Budhy Munawar-Rachman (Ed.)

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA

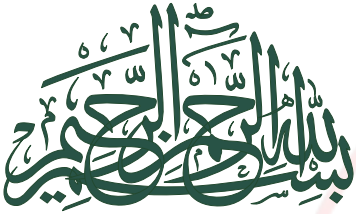
Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(BUKU 3)

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Trisno S. Sutanto



DEMOCRACY PROJECT



Democracy
www.abad-de
Perpusta

Membela Kebebasan Beragama

Percakapan tentang Sekularisme, LIberalisme, dan Pluralisme

(Buku 3)

Penyunting:
Budhy Munawar-Rachman

Penyunting Pelaksana:
Tantowi Anwari

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Trisno S. Sutanto

Edisi Digital

DEMOCRACY PROJECT
Yayasan Abad Demokrasi

Jakarta 2011

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA
Percakapan tentang Sekularisme, LIberalisme, dan Pluralisme

Penyunting:
Budhy Munawar-Rachman

Penyunting Pelaksana:
Tantowi Anwari

Pewawancara:
Muhammad Akib, Didi Ahmadi, Saidiman, Moh. Syifa Amin Widigdo, Iqbal Hasanuddin, Rifah Zainani, Moh. Hanifudin Mahfuds, Ahmad Mustopa, Moh. Shofan

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi, Samsu Rizal Panggabean, dan Trisno S, Sutanto

Pewajah Sampul: mps creativa
Foto Isi: Khoemini

Edisi Digital

Diterbitkan oleh:
Democracy Project
Yayasan Abad Demokrasi
www.abad-demokrasi.com

Layout dan Redesain cover: Ida Ningsih
Redaksi: Anick HT

Daftar Isi

Komaruddin Hidayat 1146
Lies Macoes-Natsir 1196
Lily Zakiyah Munir 1230
Lutfhi Assyaukanie 1282
M. Amien Rais 1311
M. Amin Abdullah 1327
M. Quraish Shihab 1359
M. Syafi'i Anwar 1382
Maman Imanul Haq Faqieh 1420
Maria Ulfah Anshor 1459
Martin Lukito Sinaga 1491

Masdar Farid Mas'udi 1526
Melani Budianta 1541
Meuthia Ganie-Rochman 1565
Moch. Qasim Mathar 1586
Mohammad Imam Aziz 1626
Muhammad Tholhah Hasan 1650
Nasaruddin Umar 1685
Neng Dara Affiah 1708

Democracy
www.abad-de
Perpusta

Membela Kebebasan Beragama

Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(Buku 3)

Percakapan dengan

Komaruddin Hidayat



Komaruddin Hidayat, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN), Jakarta. Ia mantan Direktur Yayasan Wakaf Paramadina dan memperoleh gelar master dan doktor dalam bidang filsafat Barat dari Middle East Technical University, Ankara, Turki.

Instrumen yang paling efektif dalam menciptakan kemakmuran masyarakat adalah negara, bukan agama. Namun begitu, sekularisme hendaknya tidak dipahami dari konteks teologis, tetapi sosiologis – gagasan yang mendorong bahwa kehidupan bernegara (ranah politik) dapat didekati secara rasional dengan teori-teori politik modern, sementara agama ditempatkan pada tataran moral. Sedangkan perguruan tinggi, sebagai tempat produsen ilmu pengetahuan baru, sepatutnya lebih menonjolkan riset dalam ilmu-ilmu sosial dan alam. Tuntutan dalam dunia science: menghargai perbedaan argumentasi. Maka persoalan utama pada ilmu-ilmu agama Islam adalah bagaimana nilai-nilai yang abadi dalam Islam dapat mendorong munculnya ilmu-ilmu baru dalam bidang sosial dan alam.

Acap kali banyak kalangan, terutama umat Islam, terlanjur menaruh curiga terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme tanpa memahami lebih dahulu persoalan sebenarnya. Mungkin ini pula yang membuat MUI pada Juli 2005 lalu mengharamkan ketiga paham tersebut. Sekularisme, misalnya, hanya karena datang dari Barat, lantas disalahpahami oleh umat Islam sebagai paham yang menjadikan agama terkikis perannya dalam kehidupan masyarakat, bahkan dianggap sebagai paham yang bertanggung jawab atas gaya hidup masyarakat Eropa yang anti-agama. Bagaimana pandangan Anda terhadap perdebatan semacam itu?

Ketiga kata di atas memang bersifat sangat konseptual, sehingga perlu pemahaman bersama sebelum terlibat dalam sebuah perdebatan. Jadi lebih baik apabila dalam perbincangan tentang ketiga paham itu dieksplorasi terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan ketiga kata tersebut. Istilah dan konsep sekularisme, liberalisme dan pluralisme semuanya datang dari bahasa dan masyarakat Barat. Ketiganya tumbuh dari lingkungan sosial, politik dan teologis masyarakat Barat yang Krsitiani dan sekularistik. Sehingga, ketika ketiga kata itu masuk ke dunia Islam, sangat wajar kalau kemudian menimbulkan pro-kontra, karena dunia Islam berpikir dengan logika, bahasa dan tradisi keilmuan yang berbeda dari Barat. Pada tataran simbolik, yaitu makna dan konsep, cara berpikir kita sangat diwarnai oleh bahasa Indonesia dan tradisi Islam, sedangkan bahasa, makna dan nilai yang dikandungnya senantiasa berkaitan.

Hal ini sesungguhnya juga berlaku pada kata dan konsep demokrasi. Dari segi bahasa, demokrasi – *demos* dan *kritos* – mempunyai arti bahwa kekuasaan atau kedaulatan di tangan rakyat. Apabi-

la ditarik pada tataran teologis, bisa saja konsep ini berseberangan dengan Islam mengingat dalam Islam kebenaran bukan datang dari rakyat, tetapi datang dari Tuhan, yang dibawa oleh Nabi. Adalah Nabi yang memiliki otoritas untuk menafsirkan kehendak Tuhan, bukannya rakyat. Jadi, dari segi teologis dan ontologis Islam tidak bisa tidak berseberangan dengan prinsip demokrasi.

Namun demokrasi sebagai sebuah nilai luhur dan cita-cita sosial yang menekankan keadilan, musyawarah, keterbukaan terhadap kritik serta kesamaan hak di depan hukum, jelas Islam sangat sejalan bahkan mendukung. Jika nilai-nilai dan mekanisme demokrasi berjalan semestinya, maka akan muncul seleksi pemimpin yang terbaik, mengikis kultus individu, serta penguatan supremasi hukum serta etika sosial.

> Apabila sekularisme dipahami dalam konteks sosiologis – suatu paham yang mendorong bahwa kehidupan bernegara dan ranah politik hendaknya didekati secara rasional dengan teori-teori politik modern, di mana agama berada pada tataran moral; dalam proses teknis politis sudah melewati mekanisme demokrasi; kedaulatan di tangan rakyat; lantas masalah-masalah dunia didekati dengan ilmu dan teknologi – maka sesungguhnya sekularisme bisa diterima.

Jadi, demokrasi harus dilihat dari spirit dan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan; sementara Islam sendiri sangat menghargai hak asasi manusia (HAM), musyawarah dan menghargai kritik. Sehingga tidak relevan memperhadapkan Islam dengan demokrasi. Dari sini kita bisa memahami apa alasan orang yang menerima dan apa alasan yang menolak demokrasi.

Hal serupa mestinya juga diperlakukan dengan *fair* manakala kita menempatkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Bagi

orang yang memang berangkat dari pandangan teologis dan metafisis, tentu saja, mereka ada benarnya kalau berkesimpulan bahwa sekularisme merupakan sebuah paham yang hanya menekankan keduniaan dan tidak memberi ruang terhadap pertimbangan atau doktrin agama. Karena itu, Islam ber-seberangan dengan sekularisme. Kalau perdebatannya semata ditarik pada pengertian teologis dan metafisis, maka pemahaman umat Islam terhadap paham itu betul juga. Tetapi, apabila sekularisme dipahami dalam konteks sosiologis – suatu paham yang mendorong bahwa kehidupan bernegara dan ranah politik hendaknya didekati secara rasional dengan teori-teori politik modern, di mana agama berada pada tataran moral; dalam proses teknis politis sudah melewati mekanisme demokrasi; kedaulatan di tangan rakyat; lantas masalah-masalah dunia didekati dengan ilmu dan teknolo-gi – maka sesungguhnya sekularisme bisa diterima. Tetapi kata sekularisme itu sendiri, karena dinilai menimbulkan kontroversi, hemat saya tidak produktif mendiskusikan perihal sekularisme. Untuk itu, betapa akan jauh lebih santun apabila dicarikan saja istilah-istilah lain yang sepadan tanpa harus menghilangkan substansinya.

Namun demikian, akan relevan jika istilah sekularisme dinisbatkan terhadap masyarakat Barat yang dalam sejarahnya antara gereja dan negara sejak awal terjadi pemisahan, kendatipun secara historis ternyata juga tidak konsisten, misalnya banyak perguruan Tinggi di Barat muncul sebagai perpanjangan tangan dari gereja, bahkan negara pun punya nilai dan semangat Kristiani. Amerika Serikat merupakan negara yang mempunyai semangat Kristiani dalam pengertian etika. Tetapi dalam pengertian sistem politiknya dipisahkan antara kekuasaan gereja dan negara. Lagi-lagi, pemisahan itu sesungguhnya hanya retorika saja. Jadi, pelbagai aspek yang

melingkupi diskursus tentang sekularisme perlu dipahami bagi orang-orang yang pro dan kontra.

Tetapi, bagi umat Islam, termasuk di negeri ini, justru Nabi Muhammad sekaligus mewariskan agama dan kekuasaan secara integral, yang beberapa kalangan menyebutnya dengan "masyarakat Madinah". Hal tersebut kemudian diteruskan oleh para penerusnya, sultan-sultan. Jadi, Islam dan negara menyatu. Inilah sebenarnya *collective memory* yang menyebabkan antara masyarakat Barat dan Islam berbeda dalam menyikapi sekularisme. Pasalnya, ketika istilah tersebut digunakan memang mempunyai referensi yang berbeda. Jadi, kita harus *fair* memperlakukan sebuah kata.

Jika merujuk kepada kata liberal, sulit untuk menemukan padanannya dalam rumusan ilmu pengetahuan Islam. Oleh karena itu, istilah liberal hendaknya jangan dipaksakan untuk disamakan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam Islam. Jadi, bagi para kalangan intelektual yang menganggap berbagai istilah yang datang dari Barat dapat bermanfaat untuk kemajuan pemikiran Islam, sepatutnya dijelaskan terlebih dahulu. Begitu pula kalangan yang mengkritiknya harus menjelaskan secara argumentatif mengapa menolaknya.

Menurut Anda hubungan antara agama dan negara yang ideal seperti apa, apakah yang integrated *tadi? Sebelumnya Anda memaparkan juga bahwa di dalamnya terdapat sisi atau aspek lain yang tercakup dalam Islam: antara Islam yang meyakini bahwa kedaulatan di tangan Tuhan dan kesesuaian Islam dengan demokrasi yang menjunjung HAM, yang pada prinsipnya memandang kedaulatan berada di tangan rakyat, bagaimana mengharmonikan keduanya?*

Pada tataran yang ideal, secara konseptual Islam mempunyai tujuan yang umum dan melewati batas-batas wilayah nasionalisme, menjunjung tinggi keadilan, kemakmuran, ketakwaan, peradaban dan sejenisnya. Tetapi pada tataran yang empiris dan praktis, hemat saya, Islam harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Pada hari ini, misalnya, Islam di Inggris, Amerika, Timur Tengah, Turki, atau bahkan Indonesia tentunya berbeda-beda. Sebab, ketika Islam masuk ke dalam wilayah kekuasaan politik maka agama akan terikat dengan banyak variabel. Namun demikian, apabila berbicara dalam tataran ideal tujuan umum dari agama yang paling ideal dan mulia, tentu saja hal itu hampir menjadi watak bagi setiap agama. Tetapi jika masuk ke dalam wilayah empiris-praktis, niscaya kita tidak bisa membuat keseragaman atas dunia dan kehidupan ini dengan wajah tunggal. Memimpikan boleh saja, tetapi realitas yang ada, pada hemat saya, adalah plural. Sehingga, terjadi keragaman artikulasi. Idenya sama-sama untuk memajukan rakyat, tetapi artikulasinya berbeda-beda, karena kemajuan bidang ekonomi, pendidikan dan teknologinya juga berbeda-beda. Sehingga, untuk dapat memakmurkan dan menciptakan keadilan, setiap negara dan agama mempunyai artikulasi yang berbeda-beda.

Jikalau artikulasi setiap negara dalam menerjemahkan nilai-nilai yang ideal mengandaikan suatu perbedaan yang tidak bisa diseragamkan, lantas dalam konteks keindonesiaan, model seperti apakah yang cocok buat membangun negeri ini?

Pada dasarnya Islam selalu bereksperimentasi dalam sejarah. Oleh karenanya, Islam juga teraktualisasikan dalam sejarah. Agama Islam senantiasa tumbuh. Maka, sudah sepatutnya apa yang lama

dan bagus mari dipelihara; apa yang salah juga jangan takut untuk dikoreksi. Sementara yang belum ada mari diciptakan yang baru. Demikianlah semestinya kehidupan berperadaban berjalan. Maka, apabila sekarang ini kita kaji apa yang lama dan bagus, yang patut lestari: komitmen Islam untuk menegakkan nilai-nilai keadilan, kedamaian, kemajuan, kemakmuran dan ketakwaan. Menurut saya semua itu abadi. Tetapi ketika nilai-nilai tersebut hendak dilaksanakan dalam konteks bernegara, maka hemat saya kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang melingkupi bangsa ini.

Dulu, sebelum kemerdekan, yang menonjol adalah semangat perjuangan melawan penindasan. Oleh sebab itu ketika sudah bernegara, maka yang harus didesak adalah bagaimana kita umat Islam membuat aturan-aturan hukum yang dapat menegakkan keadilan sesuai dengan konteks keindonesiaan. Begitu pula ihwal mendorong kemakmuran bagi segenap warga negara, maka umat Islam harus memilih alat yang paling mungkin. Untuk konteks sekarang tentu saja instrumen yang paling efektif guna membela dan menciptakan kemakmuran masyarakat adalah negara. Negara hakikatnya anak kandung masyarakat. Sehingga,

> Apabila liberalisme diartikan sebagai pemujaan kepada nalar semata, sehingga manusia sebagai ukuran kebenaran, pemikiran sebagai referensi akhir, tentu saja itu ditentang oleh Islam dan agama manapun. Kalau akal sebagai ukuran kebenaran, agama lainnya, termasuk agama Kristen yang berkembang di Eropa dan Amerika, *pun* menentang, bukan hanya Islam. Semua agama menentang. Sebab ketika menelaah wilayah agama, secara otomatis berarti di dalamnya terdapat sumber yang absolut, yang kebenarannya melampaui pemikiran manusia.

karena tujuan Islam di antaranya adalah menyejahterakan masyarakat, maka kalau negara dianggap sebagai instrumen yang paling bagus, tentunya umat Islam Indonesia medorong untuk memperkuat negara. Apabila dalam proses pemerintahan terjadi penyelewengan dan hal-hal yang jauh dari ideal, maka cara yang paling mungkin adalah mengoreksinya. Kalau memang ada instrumen lain yang bagus, bisa saja membuat negara baru. Tetapi pertanyaannya adalah: kalau ingin membuat negara baru apakah realistis? Tanahnya di mana dan mekanisme pemerintahannya seperti apa? Ya, mungkin-mungkin saja membuat negara baru. Karena instrumen apapun pasti ada cacatnya. Negara manapun pasti ada kekurangannya. Problem utamanya apakah mau kita koreksi dan benahi atau kita *counter* dengan membuat negara baru.

Katakanlah umat Islam mempunyai referensi yang sama tentang konsep pemerintahan: Madinah. Yang kemudian menjadi problem, manakala dalam konteks kontemporer tafsir terhadapnya bermacam-macam, meskipun referensi idealnya tetap Madinah. Sehingga ada yang wujudnya seperti Arab Saudi, Iran, Afghanistan, Pakistan, Mesir, Malaysia dan sebagainya – yang bermacam-macam dalam upayanya menginterpretasikan hubungan antara agama dan negara. Dalam pandangan Anda, sebenarnya di tengah pluralitas hubungan negara dan agama dalam konteks Muslim kontemporer, terjemahan yang paling relevan terhadap konsep Madinah seperti apa?

Bagi saya konsep mana yang paling *commited* dengan nilai-nilai keislaman yang universal; mana yang lebih *commited* pada nilai-nilai kemajuan, kesejahteraan, keadilan dan perdamaian, maka itu yang harus dipertahankan. Ibarat kendaraan, boleh saja berbeda,

apa itu bus, sedan, ataupun sepeda, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tetapi sepanjang sarana itu bisa mengantarkan ke arah tujuan utamanya, maka silahkan saja berbeda-beda, dengan catatan tetap memegang dan menjalankan komitmennya. Sekolah boleh saja berbeda-beda, tetapi tujuannya adalah mendidik anak agar berkarakter. Tidaklah bermasalah dengan perbedaan sekolahnya: sekolah anak berbakat, sekolah anak autis, ada perguruan tinggi agama dan yang bukan, dan seterusnya. Namun, pada prinsipnya ada satu nilai yang harus dipegang. Di situlah ruh dalam menerjemahkan konsep Madinah.

Saya meyakini Islam yang saya anut paling benar. Tetapi saya tidak berani untuk menutup kasih Allah yang maha absolut, siapa tahu orang lain akan menerima aliran kasih dan ampunan Tuhan karena Tuhan bagaikan Maha Mata Air kasih yang tak terbatas. Karena Allah serba maha segalanya, sebaliknya pikiran, pengetahuan dan pengalaman saya sangat terbatas, maka jalan terbaik adalah "berislam" atau berserah diri secara total (*kâffah*) pada Allah. Sebagai manusia yang nisbi, relatif, terbatas, maka yang paling menenangkan diri saya adalah berislam secara total pada Allah, tidak berpretensi mengajari dan menyaingi Allah yang absolut.

Dalam dunia keilmuan, sekularisme masuk untuk melepaskan ilmu pengetahuan dari pelbagai nilai tradisional dan semangat agama yang dapat mencemarkan objektivitas dan keilmiahannya. Untuk itu, kalangan intelektual Muslim bereaksi menampiknya dengan kian gencar mendemonstrasikan islamisasi ilmu guna menyodorkan alternatif terhadap maraknya ilmu pengetahuan yang terlampau sekular. Apa pandangan Anda ihwal perdebatan semacam ini?

Saya tidak tertarik dengan diskusi seperti itu, sebab saya kurang tertarik pada topik islamisasi atau sekularisasi ilmu pengetahuan. Bagi saya, *pertama* perguruan tinggi merupakan suatu tempat untuk mentransfer ilmu. Jadi kalau orang ke kampus layaknya orang mau menimba dengan datang ke sumur. Datang ke kiai atau dosen adalah transfer ilmu. Makanya seorang dosen harus berilmu. Kalau seorang dosen berhenti belajar maka dia harus berhenti mengajar. Karena ilmu berkembang terus. *Kedua*, perguruan tinggi tidak lain tempat produsen ilmu-ilmu baru. Maka, di perguruan tinggi riset harus berkembang.

Dahulu Islam menonjol sekali, terutama, bagaimana marak terjadi transfer ilmu pengetahuan. Model *sanad* merupakan salah satu contoh. Pada masa kejayaannya, agama ini ditandai, terutama, di mana ada Islam maka ada madrasah dan perguruan tinggi. Islam sangat mendorong penghargaan terhadap ilmu. Karena itu, terkait dengan fungsi perguruan tinggi sebagai produsen ilmu, maka riset yang sepatutnya ditonjolkan, yaitu dalam ilmu-ilmu sosial dan alam. Sedangkan ilmu-ilmu agama Islam, pada tataran normatifnya, sudah selesai. Apa yang mesti diper-soalkan lagi? Yang menjadi persoalan utama sekarang ini adalah bagaimana nilai-nilai abadi yang terdapat dalam Islam dapat mendorong munculnya ilmu-ilmu baru terutama ilmu-ilmu dalam bidang sosial dan ilmu alam. Misalnya al-Quran menyuruh riset lautan. Al-Quran juga membincang ihwal bintang atau astronomi; menuntut pembebasan orang miskin, yang artinya mendorong ilmu ekonomi. Jadi, bagi saya al-Quran mendorong agar umat Islam menjadi produsen ilmu pengetahuan.

Ketiga, perguruan tinggi berfungsi sebagai *character building*, yakni bagaimana berperan dalam menciptakan kultur yang berkarakter, dengan alumni-alumninya yang berkarakter dan ber-*akhlâq*

karîmah. *Keempat*, yang namanya ilmu dengan masyarakat keilmuannya (*scientific community*), di samping mengedepankan riset, tempat transfer ilmu, *character building*, mereka juga harus mempunyai *social responsibility*. Seorang ilmuawan harus mengemban tanggung jawab sosial, *amar ma'rûf nahy munkar*.

Kelima, to preserve, memelihara, mengawetkan dan mengeksplorasi seni dan budaya. Orang Islam apresiasinya pada seni dan budaya relatif rendah. Oleh karena itu bagi saya istilah sekularisasi dan islamisasi ilmu kurang menarik untuk diperbincangkan. Akan lebih produktif apabila bersama-sama kita membicarakan apa sejatinya nilai Islam, bagaimana mengimplementasikannya, bagaimana pula mendorong riset yang serius dan berkualitas, bagaimana mencerdaskan masyarakat yang bodoh, membentuk karakter umat dan bagaimana pula lembaga Islam memberikan kontribusi sosial dan ekonomi dalam kerangka *state building*.

> Negara-negara yang selama ini dikenal liberal kadang-kadang mereka lebih sosialis. Negara-negara tersebut lebih tanggap dalam menyantuni orang-orang yang menjadi korban. Sehingga, kendati berangkat dari individualisme yang lebih mementingkan konteks individu, tetapi dalam konteks sosial mereka lebih sosialis.

Jika menimbang konversi UIN yang sudah beberapa tahun berjalan, apakah perkembangannya sudah seperti yang diidealkan, yakni sesuai dengan komitmen perguruan tinggi yang mencakup lima aspek sebagaimana dijelaskan Anda? Bagaimana juga Anda melihat aktivitas proses pendidikan di UIN yang beberapa kurikulum dan peng-

ajarannya masih kental dengan studi-studi yang normatif dan jauh dari akademis?

Seyogianya dibedakan antara Islam sebagai objek studi dan Islam sebagai *values*. *Pertama*, Islam sebagai objek studi pada dasarnya semakin berkembang. Di Barat pun perguruan tinggi yang prestisius sekarang banyak yang membuka program *Islamic Studies*, yang meletakkan Islam sebagai kajian ilmiah, sebut saja Harvard University, Chicago University, dan perguruan-perguruan tinggi besar lainnya di Barat. Dan tidak diragukan lagi, hal itu mempunyai akar sejarah yang kuat. Bagaimanapun juga, salah satu ciri peradaban Islam adalah melahirkan warisan ilmiah. Buku fikih itu kitabnya banyak sekali. Begitu pula dengan cabang keilmuan lainnya seperti teologi, filsafat dan sebagainya.

Karena itu orang-orang Barat yang non-Muslim tertarik untuk mempelajarinya, sehingga banyak di antara mereka yang ahli tentang Islam. Bahkan mereka berkontribusi besar dalam melestarikan warisan Islam. Mereka juga dengan gigihnya ikut membela, manakala Islam disalahpahami secara ilmiah. Jadi, sebetulnya jasa orang Barat terhadap Islam tidak dapat diremehkan begitu saja. Kalau ada problem, biasanya yang muncul lebih sebagai sikap politik dan ideologis, yang memanfaatkan informasi keislaman untuk tujuan yang lain. Namun kalau untuk tujuan keilmuan semata, mereka mempunyai etika keilmuan.

Kedua, Islam sebagai *values* atau karakter. Perguruan tinggi apapun baik Islam atau umum mestinya menjadi suatu *values* yang dapat diserap baik oleh mahasiswa ataupun dosennya. Lantaran Indonesia mayoritas penduduknya Muslim, jadi tidak usah harus di UIN, akan tetapi di perguruan tinggi umum pun mestinya Islam sebagai karakter harus berkembang. Terlebih lagi, Islam juga

sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan sesuai dengan budi pekerti yang mengakar di nusantara.

UIN menampilkan keislamannya dengan dua macam sekaligus: Islam sebagai karakter dan Islam sebagai objek studi. Sebagai *values* atau karakter Islam harus dijiwai oleh mahasiswa dan dosen jurusan apapun. Islam sebagai objek studi memang masih terus dikembangkan dan diupayakan secara maksimal. Namun demikian, yang jadi ulama tidak banyak. Jadi kalau IAIN menjadi UIN, bukan berarti Islam semakin terpinggirkan. Sebab, Islam dalam pengertian objek studi masih ada. Begitupun di tempat lainnya, Islam menjadi objek studi masih banyak. Tetapi kalau kita ingin mencetak alumni-alumni yang memiliki spirit keislaman, dibutuhkan suatu perluasan dan kemajuan.

> Kalau pluralisme artinya mengidentikkan semua agama, maka pengharaman tersebut dapat saya memaklumi. Tetapi kalau terdapat definisi yang lain atas pandangan pluralisme, seperti alasan sosiologis bahwa realitas keberagamaan itu beragam, dan perlunya sikap saling menghargai, sampai di situ saya jelas setuju dengan pluralisme. Oleh karena itu masing-masing benar dengan posisi dan argumen yang berbeda-beda. Kebenaran tidak selalu tunggal.

Lantas, bagaimana upaya mengintegrasikan spirit keislaman, keilmuan dan keindonesiaan yang sudah semestinya mendapat perhatian serius dari pelbagai kalangan? Upaya semacam itu hendaknya didemonstrasikan lagi oleh perguruan-perguruan tinggi seperti UIN, dalam arti lebih menggali cita-citanya. Namun demikian, karena upaya tersebut masih dalam proses, maka hasilnya pun harus terus mengalami koreksi atau pembenahan. Artinya, belum bisa kita menghakiminya, sebaliknya

justru yang diperlukan di sini adalah keterlibatan semua pihak untuk bersama-sama mendorong proses integrasi tersebut. Orang tua pun mengirimkan anaknya ke UIN karena dua alasan. Ada yang ingin anaknya menjadi ahli agama; yang lainnya juga memimpikan anaknya agar menjadi ilmuwan handal, namun dia tetap agamis dan yang penting lagi mempunyai karakter. Jadi pendidikan di Indonesia memerlukan dua-duanya.

Memang, kecenderungan belakangan ini, menurut hemat saya, yang dituju dan diharapkan dalam dunia pendidikan adalah kesanggupan perguruan tinggi dalam mencetak para ahli ekonomi, teknologi, hukum dan seterusnya, yang memiliki komitmen keagamaan, dengan tidak harus menjadi ahli agama semuanya. Kendatipun mayoritas orang tua mengirimkan anaknya ke UIN, misalnya, dengan harapan besar kelak anaknya menjadi ahli agama. Namun, tak dapat dipungkiri apabila belakangan ini mereka mulai ada yang ingin mendorong anaknya masuk ke UIN agar menjadi ahli dalam bidang tertentu tetapi mempunyai etika agama. Maka, lagi-lagi dikembalikan pada kecenderungan masing-masing orang tua dan bakat dari mahasiswanya sendiri.

Apakah dengan demikian Anda sepakat dengan kalangan yang mengatakan bahwa ilmu itu tidak bebas nilai, karena di situ terdapat islamic values *yang* embedded *di dalamnya?*

Bagaimanapun ilmu tidak ada yang bebas nilai. Baik di dunia Islam maupun non-Isam tidak ada yang bebas nilai. Paling tidak, orang menawarkan atau menjual ilmu dengan tujuan dan kepentingan tertentu. Minimal orang menjajakan ilmunya supaya mendapat imbalan atau gaji. Begitupun menciptakan teknologi, misalnya,

untuk mempertahankan negara; membuat senjata untuk menaklukkan, dan seterunya. Jadi, pertanyaan bebas nilai dalam ilmu pengetahuan, bagi saya, sudah tautologis: pasti tidak ada.

Apabila mencermati ekspresi-ekspresi yang muncul di kalangan umat Islam, maka penolakan terhadap gagasan liberalisme lantaran dianggap sebagai paham yang mengedepankan kebebasan tanpa batas dan mengabaikan moralitas. Bagaimana pendapat Anda tentang respon umat Islam terhadap liberalisme?

Demokrasi sebagai sebuah nilai luhur dan cita-cita sosial yang menekankan keadilan, musyawarah, keterbukaan terhadap kritik serta kesamaan hak di depan hukum, jelas Islam sangat sejalan bahkan mendukung. Jika nilai-nilai dan mekanisme demokrasi berjalan semestinya, maka akan muncul seleksi pemimpin yang terbaik, mengikis kultus individu, serta penguatan supremasi hukum serta etika sosial.

Pertama, lagi-lagi, saya ingin mengatakan bahwa istilah liberalisme datang dari kamus Barat, yang oleh para pemikir kemudian ditarik ke wilayah Islam. Pertanyaanya: apakah liberalisme yang datang dari Barat tersebut terislamkan, atau dia tetap tidak mengenal adaptasi dengan Islam, atau liberalisme itu sebenarnya tumbuh dari pemikiran Islam itu sendiri. Jika dilihat dari segi bahasa, tentu istilah itu tidak dari Islam, melainkan dari Barat. Karena itu, yang kemudian harus dikaji secara serius adalah istilah liberal dalam tataran konseptual. Apabila liberalisme diartikan sebagai pemujaan kepada nalar semata, sehingga manusia sebagai ukuran kebenaran, pemikiran sebagai referensi akhir, tentu saja itu ditentang oleh Islam dan agama

manapun. Kalau akal sebagai ukuran kebenaran, agama lainnya – termasuk agama Kristen yang berkembang di Eropa dan Amerika – pun menentang, bukan hanya Islam. Semua agama menentang. Sebab ketika menelaah wilayah agama, secara otomatis berarti di dalamnya terdapat sumber yang absolut, yang kebenarannya melampaui pemikiran manusia. Sementara liberalisme menempatkan kebenaran semata sebagai produk nalar. Sehingga, tidak hanya agama Islam yang menentang.

Memang, di Barat, terutama di Eropa, pernah muncul di suatu masa di mana agama dipinggirkan dan akal pikiran di puja-puja. Tetapi kalau ditarik pada tataran sosiologis dan psikologis, sebenarnya tujuan dari itu semua dimaksudkan guna membela hak-hak dan kebebasan individu untuk berkarya dan berprestasi, dengan dalil bahwa setiap orang memiliki bakat dan minat yang akan tumbuh potensinya ketika ada iklim yang bebas. Tanpa iklim yang bebas manusia sulit untuk mengaktualkannya. Maka, diperlukan ajang kompetisi. Dengan adanya kompetisi maka orang dipacu untuk maju. Sebagai perumpamaan, mengapa olah raga demikian berkembang, karena di dalamnya ada kompetisi. Sebaliknya, kalau tidak ada kompetisi maka bakat-bakat tidak muncul. Sementara, di abad pertengahan semua itu dikekang oleh gereja. Padahal, masyarakat Barat mempunyai kerangka pemikiran bahwa setiap individu lahir dengan hak, bakat, dan potensinya, maka mereka harus berkompetisi bebas tanpa ada institusi yang memasungnya. Kebebasan tersebut berlaku baik dalam pemikiran maupun dalam bidang ekonomi.

Namun demikian, liberalisme di Barat, yang saya pahami, sebenarnya tetap berada di bawah kendali aturan hukum negara. Oleh karena itu dalam dunia ekonomi mereka mempunyai prinsip yang

mempersilakan setiap orang berpacu mengambil untung sebesar-besarnya, tetapi kalau melakukan kecurangan, menipu, dan korup, maka hukum akan intervensi. Jadi, walaupun liberal tidak seenaknya membunuh orang. Sehingga liberalisme dalam tataran ekonomi dan politik Barat berkembang bersama dengan wibawa hukum. Sebab, kalau tidak ada hukum namanya anarki. Jika demikian, lantas negara harus berperan dalam menerapkan hak dan kewajiban.

Bagi siapa saja sebagai warga negara yang menang dalam kompetisi, maka dia harus membayar pajak. Pajak dipungut untuk menyantuni orang yang kalah dalam bersaing. Maka dalam ekonomi liberal diberlakukan pajak profesi. Semakin tinggi pendapatannya semakin tinggi pajaknya, sehingga distribusi kesejahteraaan ekonomi sampai pada pihak-pihak yang tidak beruntung dan kalah dalam persaingan. Jadi liberalisme ekonomi dan politik di Barat tumbuh bersama wibawa hukum untuk mencegah anarkisme.

> Demokrasi harus dilihat dari spirit dan nilai-nilai yang hendak diperjuangkan; sementara Islam sendiri sangat menghargai hak asasi manusia (HAM), musyawarah dan menghargai kritik. Sehingga tidak relevan memperhadapkan Islam dengan demokrasi. Dari sini kita bisa memahami apa alasan orang yang menerima dan apa alasan yang menolak demokrasi.

Tetapi ketika liberalisme ditarik ke dalam tataran teologis, dengan pengertian bahwa liberalisme meniadakan agama, di situlah kita bisa memahami keberatan orang terhadap liberalisme. Termasuk kata individualisme itu sendiri. Sebab individualisme mengandung dua makna, yang positif dan negatif. Positif yaitu menghargai dan melindungi setiap individu. Sehingga individualisme itu masih

serumpun dengan liberalisme, demokrasi, HAM, karena individu dijamin dan dilindungi. Maka, individualisme seperti ini harus dibedakan dengan egoisme. Sebab, egoisme tidak lain bentuk dari individualisme yang negatif.

Jadi, hakikat individualisme adalah untuk menghargai hak setiap individu. Oleh sebab itu hak individu untuk memenangkan kompetisi diberikan kesempatan, demikianpun individu yang tidak beruntung mempunyai hak hidup untuk disantuni negara. Itulah sebabnya negara-negara yang selama ini dikenal liberal kadang-kadang mereka lebih sosialis. Negara-negara tersebut lebih tanggap dalam menyantuni orang-orang yang menjadi korban. Sehingga, kendati berangkat dari individualisme yang lebih mementingkan konteks individu, tetapi dalam konteks sosial mereka lebih sosialis. Lihat saja, setiap ada bencana atau kelaparan di Afrika atau di negeri mana saja, negara mana yang lebih peduli? Jawabannya adalah negara dan masyarakat Barat.

Bagaimana dengan Indonesia sendiri, apakah posisi negara sudah bisa menjamin hak-hak dan kebebasan warga negara, yang artinya juga menghargai eksistensi setiap individu dan bertanggung jawab guna memenuhi hak-hak warganya?

Secara normatif Indonesia lebih menekankan pada sosialisme, gotong royong dan koperasi. Namun, jika dicermati, pada praktiknya justru egoisme yang dikedepankan, bukan individualisme. Sebab, kalau egoisme yang berlaku, maka lebih mementingkan dirinya sendiri. Sementara kalau individualisme justru menghargai hak-hak individu. Lagi-lagi, harus digarisbawahi perbedaan antara individualisme dan egoisme. Kadang-kadang saya heran, kita yang

katanya antiliberalisme, ternyata tidak juga berhasil mewujudkan sosialisme. Lihat saja pembangunan bangsa selama ini. Negara ini begitu kaya alam dan budayanya, namun sekaligus juga menumpuk hutangnya di tengah kemiskinan rakyat. Jadi, di sini ada satu hal yang salah dalam merumuskan konsep negara dan bagaimana menuangkannya dalam tataran praksis.

Mengapa di negara ini sampai terjadi kesenjangan antara konsep (yang sosialis) dengan tataran praksisnya (egoistis), apa pemicu utamanya?

Mungkin pada dasarnya konsepnya sendiri yang tidak begitu jelas. Atau, pada tataran praksis kenegaraan, karena konsepnya tidak jelas lantas tidak didukung oleh orang-orang yang paham dan *commited* terhadap konsep tersebut. Jadi, antara aktor dan perilaku politik dengan ideologi negara ini terdapat keterputusan. Kalau komunis, terlepas dari ketidaksetujuan kita, secara konseptual mendasarkan pada gagasan Marxisme. Begitupun tahap-tahap untuk mencapainya. Demikian juga liberalisme mempunyai konsep negara yang jelas, begitupun bagaimana cara meraihnya. Maka dunia ini pernah ada dua model: kapitalisme dan sosialisme. Kedua model tersebut dapat berkembang lantaran mereka paradigmanya jelas sampai pada tataran *how to achieve?*

> apabila berbicara dalam tataran ideal tujuan umum dari agama yang paling ideal dan mulia, tentu saja hal itu hampir menjadi watak bagi setiap agama. Tetapi jika masuk ke dalam wilayah empiris praktis, niscaya kita tidak bisa membuat keseragaman atas dunia dan kehidupan ini dengan wajah tunggal.

Beberapa tahun yang telah lampau, Indonesia menyakralkan begitu rupa Pancasila. Tidak dijabarkan secara jelas dan sistematis dalam tataran filosofis atau paradigmanya. Ia sakti, dan repotnya lagi menjadi doktrin tunggal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, terlebih dikritik. Kendati pemerintahan yang berkuasa waktu itu kerap bersembunyi di belakangnya dalam mengambil suatu kebijakan yang semena-mena dan egoistis. Sehingga Pancasila dipuji dan dilindungi tapi akhirnya tidak terwujudkan secara empiris.

Tetapi jika diikuti perkembangan konseptualnya, kapitalisme dan Marxisme terbuka untuk dikritik dan dikembangkan. Sehingga, sosialisme itu mengalami pergeseran. Misalnya Cina yang belajar dari kegagalan Uni Soviet, karena itu tidak mau melakukan kesalahan yang sama. Jadi sosialisme tetap ada, begitu pula individualisme, keduanya diakomodir di Cina. Artinya, walaupun Cina merupakan negara komunis, tetapi gagasan individualisme juga ditampung. Sebaliknya juga Barat yang kapitalis, tetapi spirit sosialisme diadopsi. Jadi sesungguhnya tidak ada yang *pure* 100% sosialis atau sebaliknya kapitalis. Karena dalam diri masing-masing warga terdapat tuntutan hak-hak individu. Di Cina sekarang ini spirit setiap individu untuk kaya tinggi sekali. Itu naluri manusiawi. Begitu juga sebaliknya di Barat dorongan untuk menyantuni orang lain juga tidak kalah tinggi. Lalu, posisi Indonesia sebagai negara, konsepsi apakah yang dengan jelas dapat ditangkap. Di Indonesia, saya ingat betul ketika Pak Adam Malik masih hidup, ia mengeluarkan statemen: "awas hati-hati Indonesia ini jangan-jangan menjadi sampah kapitalis dan sampah sosialis". Yang dimaksudkan beliau: kapitalisme sampahnya berupa semangat egois untuk mengumpulkan duit; sampah sosialis berbentuk kediktatoran negara terhadap rakyat.

Sebab, ciri negara komunis dengan kediktatorannya adalah tidak adanya ruang kebebasan individu. Sedangkan dalam konteks mengumpulkan uang, kapitalisme memungkinkan juga perilaku egoisme yang tidak memperdulikan nasib orang lain yang lebih membutuhkan. Perpaduan kedua "sampah" tersebut yang menyebabkan bangkrutnya negara ini. Sehingga *warning* dari almarhum Adam Malik relevan untuk direnungkan bersama. Saya ingat betul karena selama lima tahun saya menjadi tutor studi Islam di keluarga Adam Malik. Sehingga saya terbiasa mengobrol dengan keluarga Pak Adam Malik.

> Saya sangat menyayangkan beberapa tuduhan dan beredarnya buku yang isinya mengkritik UIN namun tidak etis dan tidak ilmiah. Kasihan, mereka telah meracuni umat dan menyebar fitnah. Bahwa ada dosen ataupun mahasiswa yang pantas ditegur, saya sangat setuju. Namun jangan mudah membuat generalisasi dan mengadili iman orang lain. Jadi, setiap ada sebuah isu keagamaan sudah sepatutnya terlebih dahulu ditimbang matang.

Namun, apabila mencerna butir-butir yang terdapat dalam Pancasila, maka dasar negara ini lebih menekankan sosialisme. Hal yang sama juga berlaku dalam konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 33.

Sesungguhnya ada unsur kombinasi dalam dasar negara dan konstitusi kita. Kita tidak bisa ekslusif dalam menangkap semangatnya. Tantangannya sesungguhnya manakala konsep tentang negara ini dikaitkan dengan Islam, di mana Islam pada prinsipnya secara retorik seharusnya lebih bagus ketimbang sosialisme dan

kapitalisme. Maka, pertanyaan yang patut diajukan: apakah bisa Islam mewujudkan konsep yang lebih bagus? Di sinilah mestinya Islam bertemu dengan konsep Pancasila. Islam hendaknya dapat menunjukkan kelebihannya, kalau tidak bisa menunjukkan ke dalam dunia kenyataan, berarti kalah. Dan dalam kenyataannya yang lebih diterima justru prinsip-prinsip kapitalis. Namun begitu, saya percaya bahwa Islam merupakan wahyu yang mengandung spirit di mana kebaikan dan kebenaran bersumber dari Allah. Pada tataran normatif saya percaya bahwa Islam sanggup menginspirasikan konsep yang lebih unggul. Tetapi pada akhirnya letak persoalannya adalah bagaimana nilai-nilai Islam diwujudkan, tentunya, membutuhkan pranata hukum, ilmu atau metodologi yang memadai. Di situ, pada hematnya, umat Islam ditantang untuk menerjemahkan nilai-nilai dalam pranata-pranata.

Tetapi mungkinkah Islam ditarik ke dalam wilayah kompetisi ideologis, dengan mengandaikan Islam memiliki tatanan yang unik dan unggul, melampaui sosialisme dan kapitalisme?

Sebelum masuk pada perdebatan apakah Islam memberikan landasan yang lebih baik bagi terciptanya suatu ideologi, terlebih dahulu, *pertama*, kita rumuskan dengan jernih makna ideologi dalam konteks ini. Ideologi merupakan sebuah formula yang di dalamnya mempunyai nilai-nilai atau cita-cita yang ingin diperjuangkan untuk mengubah masyarakat. Maka, sebuah ideologi seharusnya mempunyai *blueprint* dan menjadi *imagined society*, masyarakat yang seperti apa yang hendak diidamkan. Setelah itu, baru ditarik pada pertanyaan yang paling mendasar: apakah Islam mempunyai itu semua? Adakah dalam Islam rumusan yang jelas

ihwal masyarakat yang diidamkan, dan seperti apakah itu? Sebab, kalau konsep yang kapitalis, di antaranya, masyarakat sangat menghargai individu, terdapat kebebasan kompetisi dan tegas dalam menegakkan hukum. Masyarakat komunis bekerja secara optimal tetapi mengonsumsi sesuai dengan kebutuhannnya, dan semuanya diatur oleh negara.

Yang *kedua*, ideologi akan tumbuh ketika orang mempunyai semangat dan militansi tinggi untuk memperjuangkan nilai-nilai ideologi yang diyakininya. Artinya, ada emosi untuk membela sesuatu yang diangankan. Jika demikian, lalu konsep apa yang hendak dibela oleh umat Islam. Yang *ketiga*, ideologi mempunyai musuh yang dianggap sangat mengancam dan sekaligus menyebabkan kondisi yang senantiasa diidamkan jauh dari kenyataan. Kalau tidak ada musuhnya, suatu ideologi akan "pingsan". Maka, semua ideologi mesti mempunyai musuh. Dulu Barat musuh utamanya adalah Uni Soviet, yang komunis, tetapi ternyata musuh itu telah ambruk. Begitupun, dapat dikatakan di sini bahwa musuh Barat termasuk rezim fasis seperti di Italia dan Nazi di

> Di dalam Islam perbedaan paham merupakan hal yang biasa. Inilah yang menjelaskan mengapa muncul banyak mazhab di Islam. Salah satu alasannya, karena Islam terbiasa dengan tradisi kritik. Dalam lingkup konsepsi fikih, tasawuf, filsafat dan politiknya terdapat banyak mazhab. Sebab, pangkal utama dari amunisi ilmu, di antarnya, tidak lain kritik. Tetapi etika dan standar keilmuan hendaknya tetap dijaga. Jangan sampai perbedaan dalam ilmu pengetahuan keislaman memunculkan fitnah dan didorong oleh kebencian. Saya sangat menghargai kritik, tetapi etika dan ketulusan harus dijaga.

Jerman yang sudah roboh juga. Karena itu, sekarang ini dimunculkan lagi musuhnya, yaitu Islam, teroris.

Semua gerakan mempunyai musuh. Maraknya gerakan-gerakan yang radikal di dalam Islam sudah tentu mempunyai musuh. Sebab salah satu amunisi sebuah ideologi tidak lain mengidentifikasi lawan sebagai musuhnya. Tetapi, yang perlu ditekankan lagi di sini, ideologi tersebut harus memecahkan problem yang ada di masyarakat. Kalau tidak, maka ideologi akan kehilangan basisnya. Jadi, *pertama* problemnya jelas; yang *kedua* orientasinya *problem solving*.

Di antara problem yang sedang mengemuka dan diidentifikasi sebagai musuh oleh kalangan atau gerakan-gerakan radikal dalam Islam, terutama karena dianggap oleh mereka sangat menghimpit dan menyengsarakan perekonomian masyarakat, di samping juga menyebabkan rusaknya moralitas, adalah proyek neoliberalisme dengan pasar bebasnya. Apa tantangan dan solusi yang hendak ditawarkan Islam untuk menciptakan keadilan ekonomi dan keadilan sosial terhadap desakan pasar bebas?

Saya tidak ahli di bidang itu. Namun, sebagaimana saya uraikan tadi bahwa nilai-nilai Islam dengan tegas memperjuangkan keadilan. Itu hal yang pokok untuk menyikapi persoalan yang sedang kita bahas. Keduanya, dibutuhkan peran negara. Untuk itu, apa yang baik dari negara lain bisa saja ditiru. Sementara yang tidak baiknya bisa saja dikritik, atau menciptakan sendiri yang lebih baik. Kalau memang tidak bisa menciptakan, tiru saja yang baik, karena hidup ini sejatinya proses tiru-meniru. Yang dapat ditiru misalnya hal yang bagus dari negara lain yang telah maju adalah memberikan ruang

kebebasan yang diiringi dengan ketagasan hukum; pembelaan dan pemihakan kepada kalangan warganya yang kalah. Jadi kalau hidup ini pada dasarnya adalah panggung kompetisi, maka dibutuhkan negara untuk menjadi wasit, dengan peran dan fungsinya membuat panggung yang bebas, menyediakan fasilitas keamanan, pendidikan, kesehatan dan akses-akses lainnya. Dalam panggung kompetisi itu, negara juga memberikan "hadiah". Yang menonton disediakan tenda. Yang kalah dan sakit dibawa ke rumah sakit dan diberikan tunjangan atau akses agar dapat berkompetisi lagi. Yang menang dipungut pajak. Jadi, negara bukan malah menjadi pemain. Dalam aturannya negara juga tidak diperbolehkan membunuh orang, dengan tinju boleh-boleh saja asal jangan sampai mati. Setiap panggung permainan yang baik membutuhkan biaya yang memadai. Karena itu sepak bola juga ada pajaknya. Coba lihat sepak bola di Eropa. Itu merupakan kompetisi sekaligus festival. Di situ dikenakan pungutan pajak.

> Yang namanya anti-pluralisme dan sikap eksklusivisme, merasa dirinya paling benar dan yang lain mesti salah dan sesat, mudah ditemui pada semua kelompok agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam yang kesemuanya mengaku sebagai pewaris dan penerus millah Ibrahim. Jadi jangan menganggap bahwa anti-pluralisme itu fenomena orang Islam saja. Orang Yahudi yakin mereka adalah umat terbaik pilihan Tuhan. Mungkin teologi yang inklusif adalah ajaran Hindu dan Budha, yang lebih sering disebut sebagai *way of life*, bukannya agama.

Jadi negara itu memberikan fasilitas dengan mendorong orang, melindungi yang kalah, dan menyediakan akses untuk meramaikan permainan. Jadi, hidup seperti panggung festival. Tidak disangsikan

lagi, hidup ini tak ubahnya festival. Sehingga di dalamnya berlangsung beragam kompetisi. Tetapi kompetisi yang berjalan harus di bawah rambu-rambu hukum. Dalam kompetisi tersebut niscaya ada menang dan kalah. Maka, negara harus menyelenggarakan festival yang indah untuk ditonton.

Salah satu akses atau fasilitas yang mesti disediakan negara supaya dapat menyelenggarakan kompetisi yang sehat adalah pendidikan. Problemnya, ketika sebagai sebuah institusi pendidikan milik publik, apa yang selama ini dilakukan oleh UIN sering direspon berbeda, bahkan mengundang kontroversi. Ada yang melihat UIN sebagai basis pendidikan yang memproduksi gagasan-gagasan radikalisme agama, di satu sisi. Pada sisi lainnya, beberapa kalangan Islam justru beranggapan bahwa UIN merupakan gudang yang menjadikan liberalisme pemikiran berkembang subur, sehingga nilai-nilai Islam sendiri dalam pendidikan semakin terpinggirkan?

Allah menyuruh umat manusia merenungkan ayat-ayat atau jejak-jejak-Nya. Di dalam al-Quran Allah berkali-kali menyerukan kepada manusia agar mempergunakan akal pikirannya. Sehingga, menurut ajaran Islam, orang yang akalnya tidak sehat dan tidak fungsional akan menggerogoti atau bahkan merusak imannya. Artinya, tanpa melakukan perenungan, kontemplasi dan refleksi kritis, sulit bagi seorang mukmin untuk mengagumi kebesaran Tuhan dan ciptaaanNya. Namun kita mesti hati-hati, bisa-bisa disebut sombong mengatakan telah mengenal dan mengetahui hakikat Allah, karena Allah pada dasarnya Maha Gaib, Maha Tersembunyi. Yang tampak adalah jejak-jejak-Nya semata. Jadi, seharusnya antara *believe*, iman, dan nalar terjadi hubungan yang dinamis, senantiasa

menelisik dan merenungkan ayat-ayat-Nya. Kalau orang mengingkari Allah dengan demikian ia buta dan tuli, sebab begitu nyata ayat-Nya. Tetapi, lagi-lagi, adalah congkak sekali apabila ia menganggap mengetahui tentang Tuhan. Sebab nalar manusia terbatas hanya mengetahui obyek-obyek yang empiris. Sedangkan ayat-ayat atau jejak-jejak Tuhan terlalu akbar untuk dijangkau oleh nalar manusia. Artinya, Islam menyuruh agar umatnya memacu dan berpikir keras untuk membaca ayat-ayat-Nya, yang apabila diandaikan untuk ditulis seluruhnya kalaupun lautan jadi tinta dan segenap dedaunan menjadi kertas, ayat-ayat Tuhan tidak akan pernah habis ditulis.

> Secara pribadi saya tidak setuju pada nihilisme. Tetapi untuk mengatakan pada satu kebenaran absolut terhadap apa yang saya pahami dan yakini, dengan menafikan kebenaran yang terkandung di luar, juga tidak berani. Sebab, saya adalah manusia yamng sangat lemah dan bodoh, namun ingin berjalan menuju kebenaran yang absolut, tapi bukan absolutisme pemikiran dan pemahaman. Meminjam istilah Sayyed Hossein Nasr, konstruksi pemahaman agama itu *relatively absolute* dan *absolutely relative*. Saya selalu berusaha memperoleh kebenaran sejati milik Allah, sekalipun saya mesti selalu waspada, siapa tahu pemahaman saya tentang kebenaran yang terkandung dalam al-Qur'an ternyata salah, tidak lurus.

Namun begitu, jika kembali merujuk kepada kata liberal, sulit untuk menemukan padanannya dalam rumusan ilmu pengetahuan Islam. Oleh karena itu, istilah liberal hendaknya jangan dipaksakan untuk disamakan dengan konsep-konsep yang sudah ada dalam Islam. Jadi, bagi para kalangan intelektual yang menganggap berbagai istilah yang datang

dari Barat dapat bermanfaat untuk kemajuan pemikiran Islam, sepatutnya dijelaskan terlebih dahulu. Begitu pula kalangan yang mengkritiknya harus menjelaskan secara argumentatif mengapa menolaknya.

Maka, siapapun orangnya yang telah menyatakan menerima rukun iman dan rukun Islam, lalu berpikir secara radikal atau liberal perihal Islam bukan berarti dia telah menjadi kafir. Kecuali kalau mereka sudah tidak percaya lagi pada kebenaran al-Quran. Namun, apabila terdapat penafsiran yang berbeda terhadap ketentuan-ketentuan tersebut adalah hal yang wajar dan sudah sejak awal Islam kerap berkembang perbedaan-perbedaan di antara para Sahabat dan para ulama. Pertanyaannya, apakah pemikir-pemikir yang dianggap liberal tersebut masih menghargai dan meyakini al-Quran atau tidak; masih teguh memegang rukun Islam dan rukun iman atau sudah meninggalkannya? Selama mereka masih berpegang pada al-Quran, rukun iman, rukun Islam, bagi saya tidak ada yang perlu dituduhkan. Sebab kalau dianggap telah keluar dari Islam, maka mereka yang menuduhnya harus dapat membuktikan sudah sejauh mana para pemikir liberal telah menyimpang dari yang telah digariskan dalam al-Quran. Sepatutnya tuduhan tersebut dijelaskan oleh mereka kenapa para pemikir itu bahkan dianggap kafir atau murtad. Hendaknya terlebih dahulu wawancarai sumbernya langsung. Maka teman-teman yang menuduh bahwa orang UIN itu liberal, menyimpang dan sebagainya, jika meminjam istilah dalam ilmu Hadits, *sanad*-nya *shaḥîḥ* atau tidak? Pernahkah mereka wawancara, membaca bukunya secara utuh dan mengutipnya secara benar? Karena itu apabila "Haditsnya tidak sahih" maka itu semua adalah fitnah. "Haditsnya palsu".

Komaruddin Hidayat

Bagaimana kalau mereka berkaca pada pihak-pihak tertentu di dalam UIN yang dianggap liberal, lantaran alasan – salah satu (dosen) di antaranya – mengawinkan pasangan yang berbeda agama dan menafsirkan al-Quran secara bebas, karena sangat menjunjung tinggi rasionalitas, dan alasan lainnya?

Berbagai isu yang diperdebatkan umat dan adakalanya telah menimbulkan perselisihan, sesungguhnya bukan topik baru kalau saja mereka sempat membaca kitab-kitab klasik. Maksud saya, kita tidak harus setuju dengan pendapat orang, namun jangan pula mudah kaget lalu kecam sana kecam sini. Terlebih mereka yang dianggap tokoh masyarakat, sebaiknya memberi contoh yang bijak bagaimana melemparkan gagasan dan bagaimana merespon gagasan yang kita tidak setuju. Problem utama dari tuduhan yang terlanjur berkembang selama ini terhadap UIN dan beberapa person di dalamnya adalah karena tidak dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Mari belajar dari ulama Hadits. Mereka sangat kritis dan teliti ketika mendengar sebuah berita tentang agama, tidak mudah menerima sebelum melakukan klarifikasi dan investigasi.

> Dalam dunia ilmu pengetahuan, konflik dan kritik diperlukan kalau ingin maju. Ilmu pengetahuan maju karena adanya kritik dan perdebatan teoritis terus-menerus.

Saya sangat menyayangkan beberapa tuduhan dan beredarnya buku yang isinya mengkritik UIN namun tidak etis dan tidak ilmiah. Kasihan, mereka telah meracuni umat dan menyebar fitnah. Bahwa ada dosen ataupun mahasiswa yang pantas ditegur, saya sangat setuju. Namun jangan mudah membuat generalisasi dan mengadili iman orang lain. Jadi, setiap ada sebuah isu keaga-

maan sudah sepatutnya terlebih dahulu ditimbang matang. Jika, memang tuduhan tersebut benar adanya, dikarenakan pihak tersebut menyimpang dari ketentuan yang digariskan dalam rukun iman dan Islam – setelah diselidiki dan ditimbang dengan sungguh-sungguh sampai pada sumber bersangkutan – kita wajib memberi *tawshiyah*. Tetapi harus dicermati juga apakah persoalannya hanyalah sebatas perbedaan pemahaman dan apakah benar-benar dalam prinsip yang lain juga menyimpang semuanya? Di sinilah, bagi saya, merupakan bagian dari dinamika tafsir agama. Karena itu, pro-kontra sejatinya bagian dari kekayaan Islam, dan mestinya dipersilakan saja, sebagaimana sudah sejak awal mengiringi perjalanan agama ini. Namun dalam konteks tersebut, yang harus tetap dikedepankan adalah etika dan standar keilmuan.

Di dalam Islam perbedaan paham merupakan hal yang biasa. Inilah yang menjelaskan mengapa muncul banyak mazhab di Islam. Salah satu alasannya, karena Islam terbiasa dengan tradisi kritik. Dalam lingkup konsepsi fikih, tasawuf, filsafat dan politiknya terdapat banyak mazhab. Sebab, pangkal utama dari amunisi ilmu, di antarnya, tidak lain kritik. Tetapi etika dan standar keilmuan hendaknya tetap dijaga. Jangan sampai perbedaan dalam ilmu pengetahuan keislaman memunculkan fitnah dan didorong oleh kebencian. Saya sangat menghargai kritik, tetapi etika dan ketulusan harus dijaga.

Apabila dirumuskan dalam paham liberalisme, apakah menurut Anda kebebasan berpikir juga mesti berkorelasi terhadap cakupan lainnya, artinya kebebasan berpikir kemudian mengandaikan juga kebebasan berkompetisi dalam ekonomi dan kebebasan politik?

Pasangan yang tepat dalam meletakkan prinsip kebebasan berpikir sudah tentu harus dengan etika dan hukum. Sebab, kalau sudah tidak ada hukum dan etika, menurut hemat saya, sudah tidak sehat. Sebab nantinya akan menimbulkan fitnah yang tidak dikehendaki, caci-maki, dan laku tidak beradab. Negara dan kampus ini didirikan dengan tujuan mulia membangun peradaban, masyarakat madani, masyarakat yang beradab dengan ikatan-ikatan hukum dan bimbingan ilahi. Di Madinah sebenarnya berpegang pada spirit tauhid dan konsensus hukum disepakati. Jika etika dan hukum menjadi landasannya maka tercipta perkembangan ilmu pengetahuan dengan kreasi-kreasi budaya di dalamnya.

Hindu dan Budha memandang beragam agama bagaikan beragam sungai yang kesemuanya tengah mengalir menuju lautan. Hanya saja ketika seseorang tengah berada di sebuah sungai, seolah-olah sungai hanyalah satu dan unik, pasti berbeda dari yang lain. Entah kedalamannya, tebingnya, ikan-ikannya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihatnya dari langit, ternyata banyak sekali sungai dan semuanya menuju ke lautan. Begitulah halnya dengan beragam agama, mereka memandangnya semua menuju pada muara yang sama.

Dalam kajian yang pernah dilakukan UIN, kalau memang ada, ataupun respon yang muncul dari komitmen UIN sebagai perguruan tinggi, terhadap desakan globalisasi yang sudah di hadapan mata, yang datangnya dari Barat, apakah bagi UIN globalisasi dianggap sebagai tantangan dan dorongan bagi kemajuan kreativitas berpikir kalangan akademisi atau justru hanya membelenggu karena terlampau kuatnya hegemoni Barat?

Semua agama sekarang dihadapkan pada pengalaman yang sangat baru, yaitu keberadaan masyarakat plural yang langsung dirasakan kehadirannya. Agama-agama yang umurnya sudah di atas 1000 tahun, dahulu mereka tumbuh dalam masyarakat yang *remote*, terpencil, saling berjauhan dan sangat komunal. Bahasanya sama, wilayahnya menyatu dan pakaiannya sama. Sehingga, otomatis yang menjadi panutan adalah sosok atau figur waktu itu. Kemudian bayangkanlah, agama yang muncul ribuan tahun yang lalu tersebut, yang hingga sekarang masih dianut oleh masyarakat, secara demografis tiba-tiba umatnya berlipat-lipat dengan milyaran penganut. Lantas, ketika di antara mereka bertemu, masing-masing mempunyai kepercayaan yang berbeda, bahasa juga berbeda. Sehingga perlu dicatat: betapa hebatnya agama sampai bisa bertahan ribuan tahun.

Jadi, jika kembali mencerna ulang kemunculan tiap-tiap agama dengan wilayah dan zamannya masing-masing, maka agama sebetulnya jumlahnya ribuan di muka bumi ini. Tetapi dalam perjalanan waktu, di antara banyaknya agama itu ada yang mati menjadi fosil, bahkan hanya berumur singkat. Beberapa di antaranya terus bertahan. Dengan pengertian lain, agama dengan bahasanya yang masih bertahan itu hebat sekali. Begitupun yang terjadi dengan ideologi. Di antara ideologi yang pernah ada, beberapa umurnya hanya sampai hitungan puluhan tahun, kemudian mati. Komunisme di negara Uni Soviet, misalnya, tak sampai seratus tahun sudah bangkrut

Adalah suatu kelebihan bagi agama Islam yang sampai sekarang dapat bertahan. Di dunia ini agama-agama primitif banyak sekali yang mati. Sementara itu, Yahudi yang muncul 6000 tahun yang lalu hingga sekarang masih bertahan agamanya, bahasanya, jaringan politiknya dan para penganutnya terus berkembang. Di samping

Anda benci terhadap mereka, tetapi coba pelajari bagaimana Yahudi *survive*. Karena itu, perlu juga Anda mengetahui antropologi Yahudi. Sebab bagi saya hal itu mengagumkan. Orang-orangnya mempunyai jaringan ekonomi, ilmu, lobi, dan banyak yang meraih Nobel. Kalau Anda percaya akan takdir dan pilihan Tuhan, sehingga mereka sekarang semakin kuat, maka harus konsekuen: menerima saja kehebatan mereka, jangan dimusuhi. Jadi, sikap umat Islam itu paradoks. Kalau yang terjadi di dunia ini sudah menjadi kehendak dan pilihan Tuhan, maka mestinya umat Islam mengajak berSahabat mereka. Tetapi kalau mereka dibenci Tuhan kemudian umat Islam dengan serta-merta memusuhinya, mengapa mereka semakin besar dan menguasai dunia ini hampir di pelbagai bidang?

> Hemat saya tidak produktif mendiskusikan perihal sekularisme. Untuk itu, betapa akan jauh lebih santun apabila dicarikan saja istilah-istilah lain yang sepadan tanpa harus menghilangkan substansinya.

Demikianpun Nasrani, di mana Yesus Kristus dalam kritik sejarahnya banyak menuai kontroversi. Sudah sejak awal kemunculannya teologi Kristiani oleh Yahudi dimusuhi, terlebih sosok Yesus. Al-Quran juga mengkritik teologi Kristiani karena dianggap menyimpang. Tetapi, Nasrani terus bertahan. Padahal, dia dijepit oleh teologi Yahudi dan Islam. Bahkan agama Nasrani dalam perkembangannya sangat agresif, ekspansif, dan ditakuti. Barangkali penting mengkaji anatominya, karena hal tersebut menarik. Begitu juga Islam, yang dianggap agama orang Arab, dapat berkembang di Amerika, Eropa, Inggris, bahkan disegani. Dan banyak lagi agama atau kepercayaan yang bertahan lama dan mendapat tempat

sangat luas di muka bumi ini seperti Konghuchu, Hindu, Budha dan yang lainnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sekarang ini terjadi proses yang semakin mengental di antara agama-agama yang ada, *selected religion*. Dengan pengertian lain, teori Darwin tentang evolusi, *the survival of the fittest*, seleksi alam, berlaku juga pada agama. Sebagian dari agama-agama itu ditinggalkan, bangkrut dan ambruk. Sebagian di antarnya bertahan, berkembang dan menjadi kompleks.

Di sinilah letak persoalannya: dalam masyarakat perkotaan sekarang ini sulit dipertahankan homogenitas etnis dan agama, terlebih di kampus. Sebab, kampus merupakan miniatur masyarakat plural. Terlebih, eksistensi dunia kampus semakin "menginternasional", artinya dinamika di dalamnya semakin memplural. Dulu bahasa Arab pernah memegang hegemoni peradaban kelas dunia, sekarang bahasa Inggris paling banyak digunakan orang, terutama dengan adanya komputer dan internet sehingga kian memperkokoh penyebaran bahasa Inggris dalam dunia sains dan bisnis. Jadi sekarang ini masyarakat dunia tengah mengalami sebuah fenomena atau pengalaman baru berupa masyarakat global yang sangat majemuk. Dalam situasi seperti itu banyak pemeluk agama yang terkaget-kaget. Kekagetan tersebut ada yang diekspresikan dengan penuh rasa curiga terhadap kelompok yang berbeda, ada yang bersahabat, ada yang berdialog, dan ada juga yang mengambil sikap konfrontatif.

Dalam menyikapi pengalaman dunia yang serba baru itu, dalam agama Islam sendiri bermacam-macam ekspresi dan problemnya sebagaimana bisa kita lihat keragaman sistem politik dan tradisi yang tumbuh di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, seperti Iran, Maroko, Saudia Arabia, Mesir, Pakistan, Irak, Indonesia,

dan Bangladesh, yang kesemuanya terlihat gamang memasuki dunia modern yang penuh persaingan.

Sebagai realitas sosial-politik, umat Islam Indonesia sendiri masih belum selesai bagaimana memposisikan agama, negara dan masyarakat sehingga yang lebih mengemuka hanyalah hiruk-pikuk berebut massa dan kekuasaan, bukannya membangun peradaban. Semua itu bagi saya merupakan pengalaman dan pemandangan yang menarik untuk diamati dan dianalisis. Sungguh terkadang sangat mengasyikkan dan sekaligus membingungkan. Ada kalangan yang cemberut dan mudah membenci serta mencurigai yang lain. Ada yang setiap hari berpikir bagaimana membunuh orang kafir, karena beranggapan bahwa dengan membunuh pintu surga terbuka baginya. Beberapa orang terus memutar otak bagaimana mendakwahkan Islam secara tepat di tengah masyarakat yang centang-perenang ini. Beberapa kalangan lainnya sibuk merumuskan dialog antar-agama yang efektif dan mengagendakan bentuk kerjasama di antara umat beragama yang berbeda.

> Yang menjadi persoalan utama sekarang ini adalah bagaimana nilai-nilai yang abadi yang terdapat dalam Islam dapat mendorong munculnya ilmu-ilmu baru terutama ilmu-ilmu dalam bidang sosial dan ilmu alam.

Semua itu merupakan mozaik pandangan dan sikap beragama yang tak luput dari pengaruh karakter pribadi, etnis maupun variabel lain di luar ajaran agama. Selama tidak mengganggu keamanan dan tidak main paksa, silakan masing-masing mencari dan mengekspresikan keyakinan agamanya. Karena agama memang selalu tumbuh bersama perkembangan pribadi dan dinamika zaman.

Dalam situasi seperti itu, jelas peran UIN adalah sebagai lembaga keilmuan dan lembaga dakwah dalam pengertiannya yang luas, sehingga diharapkan bisa memberikan kontribusi pencerahan dan bimbingan dengan merujuk pada nilai-nilai Islam untuk kebangkitan bangsa dan kemanusiaan. Tetapi mengharapkan UIN sebagai sebuah kekuatan raksasa yang mampu menyelesaikan persoalan umat Islam Indonesia, tentu merupakan harapan yang berlebihan.

Apabila mencermati lebih dekat fenomena yang relatif baru bagi pengalaman keagamaan, di mana kemajemukan menjadi tantangan tersendiri bagi agama, begitupun tingkat fragmentasi dalam mengekspresikan pemahaman agama atau keyakinan yang begitu tinggi, apakah UIN sebagai institusi pendidikan yang berbasis agama Islam mempunyai kurikulum yang dapat merespon kondisi keagamaan tersebut sehingga dapat membekali mahasiswanya untuk bersikap lebih arif dan dewasa terhadap kemajemukan, terlebih di tengah derasnya arus globalisasi?

Jika uraian sebelumnya lebih melihat realitas dunia secara umum, maka dalam konteks keindonesiaan yang terkait dengan agama Islam, keberadaan MUI, UIN, Muhammadiyah, NU, Partai Islam, termasuk juga negara, semua menghadapi sebuah kondisi di mana masyarakat sedang berada di tengah nilai dan kepentingan yang campur aduk. UIN hanyalah salah satu *scope* kecil dalam mozaik besar dunia Islam. Sehingga perannya jangan terlampau dibesar-besarkan dan tidak mungkin dituntut untuk dapat mengatasi segenap persoalan yang ada. Namun demikian, hendaknya masing-masing institusi yang mengaku Islam, baik partai politik, ormas, pesantren, IAIN, STAIN, demikianpun UIN, merumuskan

masing-masing jati dirinya yang akomodatif atau "santun" terhadap keanekaan.

Teristimewa ihwal jati diri kampus atau universitas sebagaimana telah disinggung sebelumnya yang mencakup lima aspek (tempat transfer ilmu, lembaga produsen ilmu baru, *character building, social responsibility,* lalu pusat pengembangan kebudayaan). Namun demikian, banyak harapan yang dialamatkan pada UIN yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi umum semacam UI, ITB ataupun UGM, yaitu lembaga yang juga diharapkan menjadi produsen ahli dan pemimpin keagamaan. Jadi, sekalipun UIN sudah mengembangkan program studi umum, masyarakat tetap menitipkan harapan agar dari UIN muncul ulama dan tokoh-tokoh agama. Lebih dari itu, di kampus ini banyak mahasiswa yang datang dari desa dan keluarga miskin serta dari lingkungan pesantren. Bagi mereka satu-satunya harapan terdekat untuk mendapat jembatan mobilitas intelektual adalah lewat UIN. Dengan demikian kami berusaha melayani dan mendidik serta membekali mereka agar nanti kembali ke masyarakat menjadi orang yang mempunyai pengetahuan *(knowledge)*, saleh *(piety)*, mempunyai integritas tinggi sebagai calon *leader*.

Sebagai universitas yang menjadi kebanggaan umat Islam, UIN Jakarta mestilah membuka diri terhadap berbagai perkembangan ilmu serta menjalin kemitaraan dengan insitusi lain baik di dalam maupun luar negeri agar bisa menjadi model dan inspirasi bagi pengembangan perguruan tinggi Islam lain di tanah air khususnya. Dengan begitu sebagai lembaga pendidikan UIN mengemban amanat dan harapan umat dan bangsa. Sekian banyak profesor dan doktor yang ada harus merasa terpanggil untuk ikut memantapkan kehidupan bernegara dan menciptakan suasana yang sehat bagi hubungan antar-agama. Karena itu, meski UIN secara

kelembagaan berada di bawah Departemen Agama, namun secara sosial dan keilmuan juga merupakan aset bagi Depdiknas, Deplu, maupun pemerintah sendiri, dengan menjadikan UIN sebagai laboratoriumnya.

Dan, karena posisi UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, maka kami menjadikannya sebagai pintu gerbang dunia untuk melihat Islam Indonesia. Hal ini sudah kami lakukan dengan bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi asing. Sejauh ini begitu banyak kunjungan tamu asing, baik diplomat, wartawan maupun ilmuwan peneliti yang datang ke UIN untuk berdiskusi. Beberapa pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Islam di Indonesia kompatibel atau tidak dengan demokrasi ? Bagaimana prinsip *human rights* dalam Islam dan bagaimana implementasinya? Ada juga pertanyaan bisnisman perihal aman atau tidaknya mereka berinvestasi di Indonesia. Saya pikir-pikir, ternyata salah satu agenda penting seorang rektor adalah menerima tamu dan undangan seminar, baik di dalam maupun di luar negeri.

Jadi, UIN mesti bisa menjaga keseimbangan, mendengarkan dan mempertemukan suara umat, pemerintah dan dunia. Karena itu bagaimana kita memposisikan lembaga ini agar tidak terlalu jauh ke Barat sehingga yang di sini (kalangan umat Islam sendiri) merasa ditinggakan. Akan repot kalau kita menciptakan jarak secara ekstrem dengan berbagai *stakeholders* UIN. Di sinilah posisi UIN dalam menjaga keseimbangan sekaligus menjadi jembatan. Risiko dan komitmen ketika menjadi jembatan, tentu saja harus siap diinjak-injak oleh pihak-pihak agar tercipta silaturahmi antarmereka. Tetapi posisi ini sering disalahpahami oleh beberapa pihak dari kalangan Islam sendiri. Komitmen kami dengan membuka Fakultas Kedokteran adalah memberi kesempatan kaum santri agar bisa

menjadi dokter dan pada gilirannya nanti harus mengabdi pada masyarakat miskin di desa. Beberapa santri yang pintar-pintar kita berikan beasiswa agar nantinya kembali dan membangun pesantren sebagai pusat kesehatan desa. Kendati untuk merealisasikan ini semua sangat mahal biayanya, tetapi kita carikan agar beasiswa tetap ada. Syukur-syukur pemerintah daerah bersedia mengirimkan putranya yang terbaik dengan dukungan beasiswa dari mereka.

Sebagaimana juga sekularisme dan liberalisme yang datang dari Barat, sehingga mendapat reaksi yang keras dari umat Islam, begitu pula pluralisme. Apa tanggapan Anda perihal diharamkannya pluralisme oleh MUI karena, salah satunya, dipahami sebagai sinkretisme?

Karena kebetulan *background* saya adalah studi filsafat, saya selalu ingin klarifikasi konseptual dan argumen sebelum membuat penilaian. Kalau pluralisme artinya mengidentikkan semua agama, maka pengharaman tersebut dapat saya maklumi. Tetapi kalau terdapat definisi lain atas pandangan pluralisme, seperti alasan sosiologis bahwa realitas keberagamaan itu sangat beragam, dan perlunya sikap saling menghargai, sampai di situ saya jelas setuju dengan pluralisme. Oleh karena itu masing-masing benar dengan posisi dan argumen yang berbeda-beda. Kebenaran tidak selalu tunggal. Tetapi bagi saya, lagi-lagi, *subject matter*-nya apa? Saya bisa memaklumi alasan MUI, tapi saya juga bisa memaklumi alasan yang berseberangan. Karena mereka berbicara dengan sudut pandang yang berbeda.

Tetapi menurut Anda sendiri, apakah mengidentikkan pluralisme dengan sinkretisme – untuk mengharamkan pluralisme – yang dianggap menjadikan akidah atau iman dari umat menjadi dangkal, merupakan alasan yang proporsional dalam menempatkan makna sebenarnya dari pluralisme?

Kekhawatiran yang menyergap kalangan Islam dan MUI adalah hal yang sah-sah saja. Tetapi apakah kekhawatiran itu benar-benar terjadi atau tidak. Untuk membuktikan itu semua maka diperlukan riset dan kajian yang serius. Untuk mengecek benar tidaknya sebuah statemen, bagi saya, perlu diverifikasi. Pertanyaannya, betulkah yang menerima pluralisme berarti mengamini sinkretisme? Maka harus ada riset untuk mewawancarai setiap pihak yang menerima pluralisme. Kalau kesimpulannya adalah tidak, berarti pernyataan itu tidak benar, sebaliknya kalau ya, berarti benar.

Kalau pandangan Anda sendiri tentang pluralisme bagaimana?

Kalau pluralisme dipahami sebagai cerminan atas realitas sosial, maka itu adalah kemestian. Sebagaimana telah saya katakan sebelumnya bahwa kita hidup dalam dunia yang begitu majemuk, sehingga sulit bagi kita untuk tidak bergaul dengan kelompok yang berbeda. Pluralitas itu sesungguhnya paling mudah terjadi dalam dunia *science* dan kebudayaan. Dalam dunia *science* kita tidak bisa untuk tidak menghargai perbedaan argumentasi. Dalam wilayah budaya, contoh yang paling mudah kita dapatkan pada bangunan dan arsitektur masjid. Unsur dalam bangunan masjid mana yang murni Islam? Menara sebenarnya berasal dari tradisi Majusi, begitu pula kubah. Speaker dahulu di Arab tidak ada. Lalu apanya yang khas Islam? Yang pasti tata cara ibadahnya itu sendiri.

Pada tingkat teologis, pluralisme sampai pada pemahaman bahwa hakikatnya keselamatan bukan monopoli sebuah agama. Apakah memang demikian?

Pasti muncul perdebatan seru setiap berbicara keselamatan, apakah secara ekslusif hanya dimiliki sebuah agama atau setiap agama memungkinkan ada jalan keselamatan. Ihwal pengakuan adanya keselamatan pada agama lain, memang ada pendukungnya, dan ada pula penentangnya. Apapun alasannya, saya yakin bahwa setiap pemeluk agama sangat yakin bahwa jalan keselamatan paling dekat adalah ajaran agama yang dipeluknya. Lebih dari itu, masing-masing pemeluk agama mengklaim dirinya paling selamat.

Secara sosiologis dan psikologis, hal ini mudah diteliti. Umat Kristiani tentu berpandangan merekalah yang paling selamat, selainnya berada di atas jalan kesesatan. Begitupun dalam pandangan orang Islam, pemeluk Kristen itu celaka. Demikianlah seterusnya setiap pemeluk agama cenderung berpikir ekslusif, merasa paling benar dan paling dekat dengan Tuhan. Bahkan ekslusivisme itu berkembang lagi dalam tubuh internal satu agama, sehingga muncullah mazhab, sekte dan aliran yang cenderung mengkafirkan yang lain.

Namun begitu tak dapat dipungkiri terdapat sekelompok orang yang memiliki keyakinan berbeda, ada yang secara terbuka dan ada yang diam-diam secara pribadi, bahwa jalan kebenaran itu juga terdapat di seluruh agama. Orang Kristen bilang, bisa saja orang Islam masuk surga. Demikian juga sebagian orang Islam mengatakan mungkin saja orang Kristen masuk surga. Bahkan ada yang berpandangan, siapapun bisa saja masuk surga – terserah kehendak Tuhan yang maha Kasih dan maha Pengampun.

Jadi yang namanya anti-pluralisme dan sikap eksklusivisme, merasa dirinya paling benar dan yang lain mesti salah dan sesat, mudah ditemui pada semua kelompok agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam yang kesemuanya mengaku sebagai pewaris dan penerus *millah* Ibarhim. Jadi jangan menganggap bahwa anti-pluralisme itu fenomena orang Islam saja. Orang Yahudi yakin mereka adalah umat terbaik pilihan Tuhan. Mungkin teologi yang inklusif adalah ajaran Hindu dan Budha, yang lebih sering disebut sebagai *way of life*, bukannya agama.

Hindu dan Budha memandang beragam agama bagaikan beragam sungai yang kesemuanya tengah mengalir menuju lautan. Hanya saja ketika seseorang tengah berada di sebuah sungai, seolah-olah sungai hanyalah satu dan unik, pasti berbeda dari yang lain. Entah kedalamannya, tebingnya, ikan-ikannya, dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihatnya dari langit, ternyata banyak sekali sungai dan semuanya menuju ke lautan. Begitulah halnya dengan beragam agama, mereka memandangnya semua menuju pada muara yang sama. Ada lagi yang menggunakan ibarat cahaya di dalam rumah. Mata kita hanya melihat cahaya sebatas yang ada di dalam rumah kita. Padahal, dari matahari yang sama dan satu, sekian banyak rumah, kebun dan daerah juga memperoleh cahayanya.

Jadi, lagi-lagi menurut mereka yang berpandangan sangat ekslusif, manakala seseorang berada dalam satu keyakinan tertentu, ia cenderung menafikan: pada agama lain tidak ada cahaya kebenaran dan keselamatan. Di luar dirinya tidak ada kebenaran. Itulah kecenderungan utama dari teologi Yahudi, Kristen dan Islam. Dan sesungguhnya sikap ekslusif, merasa dirinya paling benar dan tidak rela melihat kebajikan dan keunggulan pada orang lain, itu juga terjadi dalam aspek kehidupan lainya. Dalam pertandingan sepak

bola saja sering muncul keributan dan perekelahian antar-para pendukungnya. Begitu pula yang sering terjadi dalam persaingan antar-partai yang bisa memicu konflik dan perkelahian. Maka, sikap inklusif dan ekslusif selalu berkaitan dengan faktor-faktor non-agama, di dalamnya masuk sentimen psikologis dan antropologis. Salah satu penjelasannya, manusia cenderung larut untuk berkelompok, ikatannya bisa dalam bentuk agama, olah raga, nasionalisme, partai dan apa saja.

Jika pada dasarnya kecenderungan manusia lebih suka untuk mengikatkan dirinya dalam satu kelompok tertentu ketimbang melakukan pergaulan yang terbuka dengan pihak di luar kelompoknya, apakah itu menjadi pertanda bahwa keharusan pembaharuan teologi menjadi inklusif dan pluralis dapat dikatakan useless *dan sia-sia?*

Untuk mengatakan bahwa upaya terhadap pembaharuan teologi agar lebih inklusif dan pluralis itu sia-sia dan tidak berguna sama sekali adalah hal yang keliru. Akan tetapi, dalam ranah teologi indikasi betapa kuatnya ekslusivisme itu tidak bisa diabaikan. Adalah sifat manusia yang mempunyai kecenderungan untuk ekslusif. Pasalnya, ekslusivisme merupakan watak setiap manusia karena dengan gampangnya mereka mengikatkan kuat-kuat dirinya pada jenis ikatan tertentu, tidak hanya dalam teologi. Seperti di Palestina, para pejuangnya tidak semua karena agama, tetapi juga karena alasan tanah air. Namun ekslusivisme akan menjadi semakin militan ketika memperoleh penegasan dari paham agama yang diyakininya, seperti halnya para teroris yang yakin sekali meledakkan bom itu merupakan tindakan suci. Hal itu merupakan fenomena kultural, antropologis,

psikologis yang kebetulan mendapat penguatan dari agama. Sementara, tanpa agama saja, seseorang bisa menjadi sangat radikal.

Apabila persoalan ekslusivisme teologis dapat dilacak dari aspek psikologis dan antropologis, apakah dalam wilayah yang lebih filosofis hal itu dapat ditangkap – atau barangkali lebih tepatnya membenturkannya pada level perennial, di mana semacam ada samudra kebenaran yang maha luas dan tak terbatas?

Dalam filsafat perennial memang dijelaskan perihal "samudera". Tetapi kita hidup di kolam-kolam kecil, yang masing-masing memiliki batas atau pagar dan masing-masing merasa kolam-kolam itu wilayah privasinya. Padahal, sekalipun kita di rumah punya sumur sendiri, sesungguhnya air itu bagian dari samudera luas. Saya tidak berani untuk mengatakan bahwa yang punya sumur hanya saya. Orang lain mungkin juga punya air dari sumber yang berbeda. Saya meyakini Islam yang saya anut paling benar. Tetapi saya tidak berani untuk menutup kasih Allah yang Maha Absolut. Siapa tahu orang lain akan menerima aliran kasih dan ampunan Tuhan karena Tuhan bagaikan maha mata air kasih yang tak terbatas. Karena Allah serba maha, sebaliknya pikiran, pengetahuan dan pengalaman saya sangat terbatas, maka jalan terbaik adalah "berislam" atau berserah diri secara total (*kâffah*) pada Allah. Sebagai manusia yang nisbi, relatif, terbatas, maka yang paling menenangkan diri saya adalah berislam secara total pada Allah, tidak berpretensi mengajari dan menyaingi Allah yang absolut.

Yakin bahwa Allah Maha Kasih, *al-Rahmân* dan *al-Hâdî*, maka terserah pada kehendak Allah mau diapakan akhirnya hidup sekarang, besok dan setelahnya nanti. Jadi, maaf, saya tidak dalam

posisi untuk mengadili dan menimbang iman dan amal seseorang. Saya termasuk Mu'tazilah dalam pengertian berusaha keras untuk bisa menjadi Jabariyah, yaitu menjalani hidup dengan ikhlas dan penuh kepasrahan pada Allah. Kalau Allah menghendaki dia masuk neraka, siapa yang dapat mencegah-Nya. Sebaliknya, sangat mungkin bagi Allah menghendaki pemeluk agama lain atau orang lain yang kelihatannya tidak pernah berdoa untuk memasukkan mereka ke surga.

Tetapi, tepat pada titik itulah perdebatan tentang pluralisme yang salah satunya bagaimana menghindar dari bahaya relativisme. Sebab, jika setiap orang dapat mengambil air dari sumur manapun karena tidak ada sumber air yang menjamin kebenaran absolut, karena hanya Tuhan yang absolut, maka segala sesuatunya yang berkaitan dengan kebenaran iman seseorang akan menjadi serba relatif.

Dalam perbincangan ini harus dibedakan antara absolutisme, relativisme dan nihilisme. Secara pribadi saya tidak setuju pada nihilisme. Tetapi untuk mengatakan pada satu kebenaran absolut terhadap apa yang saya pahami dan yakini, dengan menafikan kebenaran yang terkandung di luar, juga tidak berani. Sebab, saya adalah manusia yang sangat lemah dan bodoh, namun ingin berjalan menuju kebenaran yang absolut, tapi bukan absolutisme pemikiran dan pemahaman. Meminjam istilah Sayyed Hossein Nasr, konstruksi pemahaman agama itu *relatively absolute* dan *absolutely relative*. Saya selalu berusaha memperoleh kebenaran sejati milik Allah, sekalipun saya mesti selalu waspada, siapa tahu pemahaman saya tentang kebenaran yang terkandung dalam al-Quran ternyata salah, tidak lurus.

Tetapi karena relatif itulah sehingga setiap orang atau kelompok boleh mengklaim apa yang menurutnya benar. Inilah yang dengan mudah menyulut konflik, dalam hal ini, teologi?

Konflik tidak bisa dielakkan. Ambisi untuk menyelesaikan konflik merupakan hal yang tidak mungkin. Untuk itu, biarkan saja konflik terjadi, dengan catatan asal tidak keluar dari ketentuan etika sosial dan hukum yang ada. Sebab jika konflik berubah menjadi anarki, maka peradaban akan hancur. Hidup ini penuh konflik. Jangan pernah Anda membayangkan kehidupan tanpa konflik. Yang diperlukan adalah manajemen konflik (politik, pemikiran, teologi dan sebagainya).

Tidak ada kehidupan tanpa konflik. Dalam wilayah yang paling kecil, konflik bisa terjadi dengan diri sendiri yang pecah dalam batin seseorang. Misalnya aku merasa bodoh dalam memandang hal tertentu, lalu muncul tuntutan bagaimana agar aku pintar. Itu merupakan konflik dialektis. Hidup itu penuh dialektika, ada tesis dan antitesis. Kita sendiri merasakan, justru karena terjadi konflik dialektis maka hidup menjadi dinamis dan selalu ingin mengubah dan memperbaiki nasib.

Jadi, apakah mestinya tidak harus dipertentangkan antara nilai-nilai yang partikular dalam agama dengan satu atau seperangkat nilai yang universal dan absolut?

Boleh saja hal tersebut dipertentangkan, tetapi jangan sampai memaksa orang lain untuk mengikutinya. Hargailah kemerdekaan orang lain, karena kita juga ingin dihargai oleh orang lain. Jadi junjunglah etika, ketulusan, dan komitmen untuk memajukan masyarakat yang selalu berada pada ketegangan antara konflik dan

rekonsiliasi. Antara keinginan untuk damai dan kompetisi yang urutannya bisa memunculkan peperangan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, konflik dan kritik diperlukan kalau ingin maju. Ilmu pengetahuan maju karena adanya kritik dan perdebatan teoretis terus-menerus. Sekian ulama besar tampil ke panggung sejarah karena berani berbeda dengan gurunya. Tetapi, tentu saja, yang diharapkan adalah konflik yang disertai dengan kecerdasan dan etika.

Tetapi, bagaimana kalau konflik tersebut berlangsung terus tidak berujung, sebagaimana terjadi di masyarakat Arab: antar-kabilah atau antara Sunni dan Syi'ah, dan di tempat lainnya lantaran tidak adanya satu aturan nilai dan hukum yang dapat mengikat mereka, yang bersifat universal?

Jika mereka terus berkonflik tanpa etika dan aturan hukum yang ditaati bersama, maka ongkosnya dibayar sendiri. Seluruh risiko yang ditimbulkan ditanggung sendiri. Itu *sunnatullâh*. Atau ongkosnya, di antaranya, sebuah masyarakat akhirnya akan dikuasai dan diatur oleh orang asing yang lebih kuat dan pintar. Itulah hukum sejarah. Misalnya saja jika kita tidak mau bersahabat dengan alam, maka banjir bermunculan di sana-sini dan kita semua yang harus menanggung risikonya. Seekor sapi saja kalau disayangi akan memberi susu yang segar, sebaliknya kalau diabaikan dan tidak diurus dengan baik, tidak akan keluar susunya. Karena itu hendaknya manusia lebih mengedepankan kasih sayang terhadap sesama manusia, ketimbang memupuk konflik. Nabi, misalnya, memberikan tauladan dengan datang untuk membagi kasih sayang dan pencerahan. Orang kafir pun beliau sayangi dan beliau tegur, lalu diajak ke jalan yang benar untuk berbagi kasih dan ilmu. Itu

semua oleh Nabi dijalani dengan penuh etika dan kesabaran yang luar bisa.

Apakah Anda – kaitannya dengan kasih sayang yang tidak terbatas hanya pada kalangan Muslim, tetapi hendaknya juga menyayangi umat yang lain – berpandangan bahwa sudah saatnya menjadikan UIN lebih terbuka dengan siap menerima mahasiswa non-Muslim, misalnya?

Sekarang ini masih ada pihak yang keberatan bagi mahasiswa non-Muslim untuk belajar di UIN. Ini perlu kita tanyakan apa yang menjadi alasan keberatan mereka? Apakah kurang percaya diri terhadap kehadiran orang lain? Apa keberatannya orang non-Muslim mempelajari agama Islam yang kita yakini paling unggul? Kalau kita melarang, jangan-jangan akan dinilai menutup jalan kebenaran. Bukankah itu dosa? Saya sendiri secara pribadi tidak apa-apa. Sebab dahulu umat Islam ketika tengah mengalami masa kejayaannya juga menghargai dan menerima murid maupun profesor dari agama lain. Problemnya, pada waktu itu umat Islam sedang percaya diri. Sebab, sikap inklusif mudah muncul ketika orang dalam posisi kuat dan percaya diri. Sebaliknya, orang yang mudah marah dan sarat kecurigaan terhadap orang lain, pasti sedang mengalami krisis percaya diri.

Kalau benar ada yang ditakutkan dengan penerimaan mahasiswa non-Muslim, sebenarnya hal itu perlu ditinjau ulang, apa pertimbangan utamanya, mengingat UIN bukanlah lembaga konspirasi, tetapi lembaga pendidikan dan peradaban. Kalau orang lain masuk ke UIN, berarti orang tersebut tertarik pada ilmu keislaman. Karena itu saya sebagai pribadi, bukan sebagai rektor, setuju apabila UIN membuka diri dan mempersilakan umat lain menimba

ilmu di kampus ini. Tetapi pertanyaannya, apakah memang sudah siap? Apakah masyarakat, terutama umat Islam, juga sudah siap menerima? Padahal, kalau kita percaya bahwa Islam dan kampus ini merupakan sumber ilmu dan kebenaran, jangan dihalangi jika ada orang yang tertarik untuk datang belajar. Siapa tahu akan jadi amal saleh. Kalau mereka tidak diperbolehkan datang, berarti kita menutup pintu dakwah. Tetapi, lagi-lagi cara berpikir saya ini mungkin berbeda dari teman lain.

Jadi, di sini ada logika yang kurang konsisten. Di sisi lain agama menyuruh untuk berdakwah kepada orang kafir, tetapi ketika ada orang kafir datang malah ditolak. Tentu saja kalau orang kafir itu membawa api permusuhan, buat apa diterima. Tetapi kalau mereka mau belajar, tidak ada salahnya untuk diterima di UIN. Namun saya sangat menyadari bahwa institusi ini milik negara dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga mesti izin terlebih dahulu pada semua pihak.

Wawancara dilakukan di Jakarta

Percakapan dengan

Lies Macoes-Natsir



Lies Macoes-Natsir, aktivis perempuan tamatan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (sekarang UIN).

Sekularisasi dipilih para pendiri republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan tujuh kata di belakang sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya. Keindonesiaan kita sedang mendapat ancaman dari tiadanya demarkasi yang jelas antara wilayah privat (agama) dengan publik (negara). Maka, Indonesia harus mengambil langkah sekularisasi sebagai jawaban niscaya bagi penyelesaian masyarakat yang plural. Untuk itu dibutuhkan ketegasan menarik jarak dengan urusan primordial agar negara dapat bersikap adil kepada semua entitas warga yang berbeda. Kita membutuhkan suatu pandangan bersama semacam Pancasila dan aturan-aturan praktis yang mampu mewadahi keanekaragaman sekaligus melindungi keyakinan kita dari intervensi dan kepentingan politik.

Bagaimana Anda memandang sekularisme yang sering dipandang negatif oleh banyak kalangan?

Awal tahun 2006 saya diundang sekelompok perempuan yang, katakanlah, sudah selesai secara ekonomi. Mereka umumnya lahir dan besar dari keluarga Muslim atau setidaknya Abangan. Bahkan sebagian anak-anak mereka menikmati lembaga pendidikan Islam modern dan elitis. Sesuatu yang tidak mereka rasakan tempo hari karena mereka umumnya sekolah di lembaga pendidikan Katolik atau swasta lainnya. Sebagian besar mereka atau suami mereka mungkin menikmati liberalisme ekonomi pada masa Orde Baru. Pendeknya mereka adalah ibu-ibu kelas mapan Jakarta.

Undangan bersifat informal itu dimulai dengan sebuah cerita. Rupanya mereka baru kembali dari Turki. Dalam tuturannya, mereka di sana menyaksikan sesuatu yang menurut mereka sangat mengagumkan, demikian mereka bercerita. Bukan sekadar alamnya yang indah, tetapi situasinya yang mengesankan sebagai kota peradaban Islam. Mereka berkesimpulan bahwa Turki telah berhasil membangun sebuah negara modern dengan tetap mencirikan sebuah negara sekular, tetapi dengan fondasi kebudayaannya (Islam) yang kuat. Keberhasilan ini, menurut mereka, karena Turki berhasil melalui proses sekularisasi.

Ketika mereka kembali ke tanah air, demikian lanjutan ceritanya, mereka seperti merasakan kegelisahan yang tak bisa dibuang dengan pergi tidur atau berlibur. Harap dicatat, ketika itu di Jakarta sedang terjadi perdebatan yang sangat hangat soal rancangan Undang-undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi. Masyarakat nyaris terbelah antara yang pro dan kontra. Hampir setiap minggu di jalan-jalan utama di Jakarta terjadi pawai dan demonstrasi yang menunjukkan polarisasi pendapat atas RUU itu.

Secara diametral para ibu "gedongan" ini mencoba membanding-bandingkan kondisi masyarakat Islam di sini dan di Turki. Menurut mereka, Islam di sini tak lagi ramah seperti di masa lalu. Setiap perbedaan seringsekali disikapi dengan kekerasan dan tindak anarkis. Mereka, sebagaimana Buya Syafii Maarif, demikian jengkel pada perilaku kampungan para "pembela Islam" yang datang ke kafe atau ke tempat ibadah agama lain dengan cara-cara kekerasan. Secara langsung tampilan para "preman berjubah" itu tampaknya telah mengganggu ketentraman kaum ibu yang merasa memiliki Islam juga. "Biar begini, saya ini Muslim", demikian biasanya mereka mengenalkan identitas dirinya.

> Secara sederhana saya memaknai sekularisasi sebagai pemisahan ruang privat dan publik. Pemisahan sama sekali tidak berarti penghilangan apalagi pemusnahan agama. Pemisahan artinya mendudukkan ruang dan fungsi pada tempatnya. Urusan agama, dalam pemahaman saya dengan mengacu pada konsep sekularisasi, seharusnya masuk ke persoalan privat, urusan pribadi. Sebab, spiritualitas adalah pengalaman pribadi.

Dari sini, diperoleh gambaran sederhana bahwa Islam di negara Indonesia telah mengalami proses fundamentalisme. Dan ini, bagi ibu-ibu, sangat mengkhawatirkan. Kebebasan yang selama ini mereka peroleh baik sebagai warga negara atau sebagai umat Islam, merasa terusik oleh perilaku kalangan fundamentalis itu. Menurut mereka, Islam Indonesia saat ini telah menjadi suatu kekuatan dengan watak minoritas, meskipun pada kenyataannya mereka yang mayoritas bahkan dominan. Dengan watak minoritas dimaksud, kalangan tertentu merasa punya mandat untuk melakukan proteksi terhadap keyakinannya dan merasa punya wewenang

untuk melakukan apa saja termasuk represi kepada kelompok lain yang dianggapnya bertentangan. Celakanya, dalam situasi itu negara malah bungkam atau setidaknya tak kunjung tegas. Tidak salah jika negara bahkan dianggap tunduk pada perilaku sipil yang represif itu. Padahal sudah sangat jelas Islam Indonesia dewasa ini adalah kelompok mayoritas dan bahkan dominan. Di sisi lain, pluralitas Indonesia adalah sebuah keniscayaan.

Mengapakah sikap primordial Islam muncul, sementara mereka sendiri justru sang mayoritas? Mengapakah selalu muncul anggapan bahwa Islam sedang terancam sehingga harus melakukan tindakan apapun, termasuk kekerasan untuk membelanya? Bukankah untuk sebuah negara yang plural dibutuhkan sebuah ketegasan dalam menarik jarak dengan urusan primordial, sehingga negara dapat bersikap adil kepada semua entitas warga di negara ini? Menurut mereka, kita membutuhkan suatu pandangan bersama semacam Pancasila dan aturan-aturan praktis yang mampu mewadahi keanekaragaman Indonesia, sekaligus melindungi keyakinan kita dari intervensi dan kepentingan politik. Contoh perda-perda yang diberi label "syariat Islam" yang pada intinya mengatur urusan-urusan perilaku personal dan bukan publik menjadi rujukan betapa bedanya kita dengan Turki.

Kesimpulan tentang kemajuan Turki boleh jadi benar, dalam beberapa hal, namun juga terlalu naif, untuk hal lain. Mereka tentunya tahu bahwa ketika sekularisasi menjadi "panglima", represi yang dilakukan negara atas nama sekularisasi di Turki juga luar biasa. Kelompok Muslim tak memiliki kebebasan sedikitpun untuk menunjukkan kemusliman mereka di ruang publik. Perempuan Muslim mengalami kekerasan yang berlipat dibandingkan kaum lelakinya. Sebab selain ditekan negara, dalam situasi seperti ini mereka juga

ditekan para pemuka agama agar patuh pada pandangan tradisional ihwal perempuan dalam agama seperti kewajiban menggunakan jilbab di ruang publik. Akibatnya, banyak dari mereka tidak dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum atau bahkan harus berhenti bekerja.

Sebetulnya represi yang dilakukan negara pernah dialami kalangan Muslim di Indonesia pada masa awal Orde Baru. Islam politik benar-benar di tindas. Islam budaya dikerdilkan menjadi sekadar hiburan atau ritual tanpa ruh. Atas nama politik SARA, kepelbagaian haram untuk dibicarakan apalagi dipertentangkan. Konsep budaya rukun, sebuah cara pandang yang dicaplok mentah-mentah dari budaya Jawa, diterapkan dengan paksa ke seluruh penjuru negeri ini. Perbedaan direkayasa untuk dikelola menjadi harmoni yang juga diterapkan tanpa dibicarakan terlebih dahulu. Pancasila yang seharusnya dapat menjadi ideologi terbuka, ditafsirkan tunggal oleh dan untuk kepentingan Orde Baru. Jadi, terlepas betapapun naifnya mengagungkan keberhasilan Turki dalam sekularisasi,

Tentu saja tak semua produk fikih dikesampingkan dalam mengatur urusan publik. Undang-undang Perkawinan adalah satu contoh bagaimana produk pemikiran fikih diubah menjadi hukum positif. Seperti sebuah irisan diagram ven, Undang-undang perkawinan merupakan sebuah kesatuan dari berbagai pandangan fikih di mana semua lingkaran-lingkaran pandangan yang berbeda-beda itu bersinggungan membentuk sebuah lingkaran dalam yang relatif bulat. Lingkaran dalam itulah yang kita namakan *maslahah* atau kebaikan. Sejauh itu membawa kemaslahatan untuk semua, fikih atau hukum adat atau apapun bisa disodorkan sebagai sumber hukum yang kemudian diuji secara demokratis.

menurut saya kegelisahan mereka tentang represi yang dilakukan kalangan agama kepada kelompok lain adalah sah adanya.

Sebenarnya apa yang Anda maknai dengan sekularisasi itu; apa bedanya dengan sekularisme? Relevankah gagasan tersebut buat Indonesia?

Secara sederhana saya memaknai sekularisasi sebagai pemisahan ruang privat dan publik. Pemisahan sama sekali tidak berarti penghilangan apalagi pemusnahan agama. Pemisahan artinya mendudukkan ruang dan fungsi pada tempatnya. Urusan agama, dalam pemahaman saya dengan mengacu pada konsep sekularisasi, seharusnya masuk ke persoalan privat, urusan pribadi. Sebab, spiritualitas adalah pengalaman pribadi. Dari sisi historis, sekularisasi di Barat terjadi ketika gereja pada Abad Pertengahan mendominasi kehidupan warganya. Segala sesuatu ditentukan dan diputuskan oleh gereja dan didasarkan pada rujukan yang subyektif, yaitu wilayah keyakinan. Mengambil kata Yunani *saekulum*, sekular artinya dunia; serba dunia. Sekularisme adalah pemikiran atau konsep yang memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Melalui usaha sekularisasi ini institusi gereja ditolak atau setidaknya dibatasi kehadirannya agar mereka tidak ikut *cawe-cawe* mengurusi urusan publik. Wilayah gereja seharusnya terbatas hanya mengurus umat, dan karenanya bersifat domestik dan subyektif. Sementara urusan publik seharusnya diserahkan kepada negara dan karenanya mesti bersifat netral, objektif demi melindungi semua warganya terlepas dari apapun latar belakangnya baik secara sosial, etnis, gender dan keyakinannya.

Dominasi gereja memang tidak terjadi di negeri ini. Tapi kebutuhan untuk melakukan sekularisasi di Indonesia bagi saya adalah

nyata. Berbeda dengan di Barat, yang kita butuhkan adalah menarik jarak dari fikih yang diformalkan menjadi peraturan-peraturan atau hukum positif. Fikih sebagai produk pemikiran ulama kebanyakan bersifat *khilâfiyah* (di dalamnya terdapat perbedaan pendapat). Sebuah hukum yang *khilâfiyah* seharusnya tak dipaksakan menjadi hukum positif yang kemudian menjadi makna tunggal. Aturan-aturan yang berkaitan dengan peran dan kedudukan perempuan, atau mengatur bagaimana perempuan sebagai warga negara harus bertingkah laku, tidak bisa dipaksakan oleh hanya satu mazhab dalam fikih.

Tentu saja tak semua produk fikih dikesampingkan dalam mengatur urusan publik. Undang-undang Perkawinan adalah satu contoh bagaimana produk pemikiran fikih diubah menjadi hukum positif. Seperti sebuah irisan diagram ven, Undang-undang perkawinan merupakan sebuah kesatuan dari berbagai pandangan fikih di mana semua lingkaran-lingkaran pandangan yang berbeda-beda itu bersinggungan membentuk sebuah lingkaran dalam yang relatif bulat. Lingkaran dalam itulah yang kita namakan *mashlaḥah* atau kebaikan. Sejauh itu membawa kemaslahatan untuk semua, fikih atau hukum adat atau apapun bisa disodorkan sebagai sumber hukum yang kemudian diuji secara demokratis.

> Diakui atau tidak, sejarah sekularisasi di Indonesia berbanding lurus dengan berdirinya republik ini. Sekularisasi dalam pendapat saya telah dipilih oleh para pendiri Republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata di belakang sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa". Sangat jelas ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya.

Diakui atau tidak, sejarah sekularisasi di Indonesia berbanding lurus dengan berdirinya republik ini. Sekularisasi dalam pendapat saya telah dipilih oleh para pendiri Republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata di belakang sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa". Sangat jelas ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya. Sebagai mayoritas, umat Islam waktu itu justru bersikap *legowo* untuk menghormati kepelbagian di negeri ini. Mereka tidak *aji mumpung* sama sekali. Dengan menyadari bahwa agama dan adat adalah dua hal yang teramat penting dalam mengatur kebutuhan dan tata hubungan antar-umat beragama, maka sampai batas tertentu negara diberi wewenang untuk mengurusinya. Dan dengan melanjutkan tradisi birokrasi jajahan Belanda, urusan umat kemudian diserahkan kepada Departemen Agama. Sementara untuk tata hubungan internal agama diserahkan kepada umat sendiri. Di sanalah peran organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan NU menjadi sangat penting. Negara secara objektif semestinya berhubungan dengan umat melalui perwakilannya, baik di partai atau di organisasi keagamaan. Berbagai keperluan umat agar mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan keyakinannya, diurus dan dikomunikasikan melalui badan-badan tersebut. Dengan pemaknaan seperti itu setiap upaya sekularisasi bagi sebuah negara yang plural seperti Indonesia, buat saya adalah niscaya. Apalagi untuk kondisi saat ini.

Mengapa saat ini Anda merasa sekularisasi begitu penting untuk kondisi Indonesia?

Ya karena dalam perkembangannya kita melihat bahwa campur tangan agama ke dunia publik, secara perlahan tetapi pasti, mulai tak terkendali. Ini karena kita membiarkan Islam menjadi hanya pada simbol dan politik. Padahal seharusnya kita bersikukuh pada Islam yang substantif yang di dalamnya justru termuat nilai-nilai pluralisme, kesetaraan antara manusia, berlomba untuk hal yang baik bagi kemanusiaan dan seterusnya. Contoh sederhana adalah soal seragam sekolah. Seragam sekolah semula diciptakan untuk mengeliminasi perbedaan antarstatus sosial warga, suku, ras, dan agama. Tapi tiba-tiba seragam telah dititipi atribut agama atas nama pengajaran moral bagi anak didik. Saya bukan tidak setuju dengan pendidikan moral, budi pekerti, tetapi bagi saya pendidikan moral di sekolah harusnya yang memiliki nilai-nilai universal dan berlaku umum, tidak didasarkan pada salah satu pandangan mazhab dalam fikih. Mengajarkan tentang kebersihan, kejujuran, sopan-santun, berbuat baik kepada sesama teman, menghormati perempuan, hal-hal tersebut lebih substantif dan berlaku umum ketimbang mewajibkan anak perempuan memakai rok panjang atau anak laki-laki memakai baju koko di hari Jumat. Kalau menghendaki bahwa penggunaan baju itu diberi nilai-nilai agama, mengapa tidak pada yang sub-

> Diakui atau tidak, sejarah sekularisasi di Indonesia berbanding lurus dengan berdirinya republik ini. Sekularisasi dalam pendapat saya telah dipilih oleh para pendiri Republik ini ketika mereka menolak Piagam Jakarta dan menghilangkan 7 kata di belakang sila pertama "Ketuhanan yang Maha Esa". Sangat jelas ini adalah upaya untuk menjaga netralitas negara terhadap semua warganya.

stansinya. Misalnya memenuhi nilai-nilai kebersihan, kepantasan, jauh dari *riyâ'* (pamer) dan sombong.

Katakanlah sebagai mayoritas kita ingin agar cara berpakian tetap bersumber dari nilai-nilai *fiqhiyah*. Mengapa kita tidak mencari pandangan yang lebih moderat, misalnya batas-batas aurat dari mazhab Hanafi yang cukup di bawah dengkul. Jadi dengan menggunakan rok seperti itu, bagi anak-anak Muslim telah memenuhi tuntutan fikih, bagi kelompok lain tak merasa ada pemaksaan mengikuti keyakinan orang lain. Substansinya adalah mereka menggunakan seragam dengan tetap Islami, sopan, memenuhi nilai-nilai kepantasan dan bisa digunakan oleh semua siswa apapun latar belakang agamanya. Dari segi praktisnya rok di atas mata kaki justru memudahkan anak-anak perempuan untuk bergerak sesuai dengan perkembangan kejiwaannya sebagai remaja. Sekolah umum menurut pandangan saya seharusnya mengutamakan sebuah "ruang" di mana persamaan menjadi pengikat warga belajar dan seragam sekolah adalah salah satu medianya. Namun ketika seragam kemudian diintervensi oleh salah satu pandangan agama yang bersifat mengikat, yang secara nyata membeda-bedakan warga belajar berdasarkan keyakinannya, maka dalam hal ini saya merasa membutuhkan penjelasan.

Bukankah dulu Orde Baru juga melakukan hal yang sama, memaksakan siswa untuk tidak menggunakan jilbab? Bukankah ini juga pemaksaan?

Itu jelas berbeda. Orde Baru melakukan pemaksaan untuk tidak menggunakan sesuatu yang diyakini siswa. Sementara sekarang anak-anak dipaksa untuk memakai sesuatu yang belum

tentu mereka yakini. Ketika para siswa dengan sukarela memakai jilbab, siswa lainnya masih punya pilihan individu. Sebab ini adalah pilihan kesadaran. Negara jelas tidak boleh melarang seseorang menjalankan keyakinanya. Tetapi dalam hal penggunaan rok panjang atau bahkan jilbab di hari Jumat, ini adalah bentuk pemaksaan yang dilakukan sebuah peraturan untuk sesuatu yang belum tentu diyakini siswa atau orang tuanya. Ketika Jilbab dilarang, saya berteriak dan menyatakan itu melanggar HAM. Begitu juga ketika rok panjang dipaksakan, saya juga berteriak karena itu juga pelanggaran. Pada kasus pertama (penggunaan jilbab) dasarnya adalah pelanggaran atas keyakinan, sementara penggunaan rok panjang dasarnya adalah paksaan atas nama peraturan. Bagi saya keduanya sama-sama paksaan: yang pertama, paksaan untuk membuka (kasus Orde Baru); yang kedua, paksaan untuk menggunakan. Padahal, dalam ibadah harusnya tidak ada paksaan!

> Bagi saya pendidikan moral di sekolah harusnya yang memiliki nilai-nilai universal dan berlaku umum, tidak didasarkan pada salah satu pandangan mazhab dalam fikih. Mengajarkan tentang kebersihan, kejujuran, sopan-santun, berbuat baik kepada sesama teman, menghormati perempuan, hal-hal tersebut lebih substantif dan berlaku umum ketimbang mewajibkan anak perempuan memakai rok panjang atau anak laki-laki memakai baju koko di hari Jumat.

Ada hal lain yang jauh lebih bermasalah. Ketika pelarangan atas penggunana jilbab terjadi, kita bisa berteriak atas nama HAM. Tetapi ketika anak kita dipaksa untuk menggunakan rok panjang dan jilbab, kita tidak bisa berteriak lagi. Sebab, sangsinya kita dianggap melawan Tuhan atau minimal melawan aturan

agama. Ketika jilbab dilarang, kalangan aktivis HAM dan agama bahu-membahu untuk melawan peraturan negara yang represif itu. Tetapi, sekarang ketika pemaksaan penggunaan rok dilakukan, secara horisontal warga negara harus berhadap-hadapan antara yang pro dan yang kontra. Lebih dari itu, agama kemudian menjadi unsur yang memaksa, menjadi tiran. Sebagaimana diungkapkan oleh kalangan ibu-ibu "gedongan" tadi. Ketika agama melakukan intervensi terhadap kepentingan-kepentingan publik yang di dalamnya terdiri dari pelbagai agama dan kepentingan, sebenarnya pada saat itu agama telah menciderai akal sehat atau malah telah memberangus akal sehat.

Selain persoalan itu, apalagi yang mendasari mengapa sekularisasi penting bagi Indonesia?

Momentum paling baru yang memicu kegelisahan orang dan kemudian mulai memikirkan lagi perlunya sekularisasi adalah ketika terjadi kontroversi dalam Rancangan Undang-undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU-APP). Telah saya katakan, kalangan yang menolak RUU APP seperti saya, bukan datang dari kelompok yang tidak beragama, kami umumnya berasal dari keluarga Muslim yang terdidik dan tidak berkeberatan anak kami atau keluarga, bahkan diri sendiri, mengenakan jilbab sebagai pilihan keyakinan. Namun ketika aturan-aturan agama tersebut dipaksakan masuk ke dalam domain publik, kita menjadi tidak punya pilihan. Padahal agama sendiri memberikan pilihan. Pada akhirnya kami merasa bahwa akal sehat kita tidak lagi bisa digunakan. Spiritualitas kita dipasung dan dikendalikan orang lain. Bagaimana bisa menjalankan

keyakinan begitu saja disamakan dengan mengurus KTP? Inikah model bermasyarakat yang kita kehendaki?

Sementara itu di daerah-daerah muncul perda-perda yang tendensinya mengatur persoalan-persoalan privat yang dasarnya adalah penafsiran fikih yang masih mengidap *khilâfiyah*. Perda tentang kewajiban menjalankan salat secara berjamaah, atau kewajiban menggunakan jilbab atau menggunakan kemampuan baca tulis al-Quran sebagai syarat untuk masuk tingkat SD atau SMP, misalnya, pada titik ini saya melihat bahwa keindonesiaan kita memang sedang mendapat ancaman dari tiadanya demarkasi yang jelas antara wilayah privat agama dengan wilayah publik negara. Pada sisi ini, menurut saya, sekularisasi bagi Indonesia menjadi niscaya.

Bagi saya, sepanjang masih ada umat manusia, spiritualitas agama tidak akan pernah mati. Yang justru mendesak untuk dilakukan adalah sejauh mungkin agama mengambil jarak dari negara. Mengambil jarak yang jauh tak berarti agama mati, sebaliknya mendekat, bahkan menempelpun, belum tentu hidup. Sekularisasi adalah pilihan. Sekularisasi dapat dijadikan jawaban dan penyelesaian bagi sebuah masyarakat yang plural.

Dalam konteks Indonesia mengapa hal seperti ini muncul? Bukankah dari dulunya kita telah menetapkan Indonesia menjadi negara yang memang tidak berbasiskan agama?

Menurut saya, salah satu akar persoalannya adalah karena rezim Orde Baru gagal membuktikan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia berhasil dengan merata. Satu hal yang sangat penting dalam ruh Islam adalah adanya panggilan untuk mengatasi krisis, untuk berjihad melawan kezaliman. Namun, ketika Orde

Baru gagal, muncul kembali gagasan-gagasan untuk berjihad. Celakanya, jihad tersebut bukan dengan mengatasi krisis; tetapi dengan menawarkan ideologi Islam sebagai solusi.

Sangat menarik bahwa pada mulanya Soeharto sangat enggan bekerjasama dengan kalangan agama. Namun dalam dekade kedua dan ketiga dari pemerintahannya, Soeharto kemudian makin mendekat kepada kelompok Islam. Tampaknya, ini merupakan cara untuk mendapatkan dukungan dengan ongkos murah. Soeharto memilih bermain mata dengan kelompok mayoritas agama yang ada di mesin birokrasi. Golkar yang sebagian besar di-*support* oleh kalangan Islam terdidik segera menjadi *the ruling class.* Sayangnya, kesempatan ini tidak digunakan oleh mereka untuk menunjukkan penyelenggaraan negara yang bersih yang didasarkan pada nilai-nilai substantif Islam. Sebaliknya Islam hanya dihadirkan pada simbolnya, cangkangnya dan semata-mata kemudian digunakan sebagai kendaraan politik.

Kelalaian kalangan Islam birokrat yang sebagian besar berasal dari organisasi kemahasiswaan seperti HMI ini kemudian dimanfaatkan kelompok fundamentalis untuk menawarkan Islam ideologi sebagai solusi atas berbagai krisis di negeri ini. Sementara di wilayah non formal, mereka masuk ke relung-relung wilayah kerja organisasi kemasyarakatan Islam yang selama ini digarap NU dan Muhammadiyah. Terbukanya hubungan mesra antara negara (rezim Orde Baru) dengan kalangan agama, yang dalam periode berikutnya berlanjut dengan terpilihnya Gus Dur menjadi presiden, menyebabkan umat terbengkalai, sementara tokoh-tokohnya asyik dengan agendanya masing-masing. Kita mungkin masih ingat pernyataan salah satu pelaku peledakan Bom Bali II, si Ayip dari Pamarican, Banjar, Jawa Barat. Pernyataannya jelas menunjukkan

betapa dia teraniaya oleh kemiskinanya, tapi pada saat bersamaan, sekaligus mendapatkan harapan dari langit: *"Ibu, saya minta maaf, tapi seperti yang Ibu katakan, biarlah kita miskin di dunia, tapi kita akan kaya raya di akhirat"*. Buat saya itu adalah *signal* yang sangat kuat bahwa Islam gagal memberikan kesejahteraan kepada umatnya. Pimpinan agama hanya sibuk untuk meniti dan menyusun tangganya masing-masing.

Maka, tidaklah keliru jika banyak dari umat kemudian digarap kelompok lain yang menawarkan ideologi Islam dengan turunan-turunannya, seperti perda syariat Islam sebagai solusi. Dari kedekatan penguasa dengan kalangan Islam birokrat – pada rezim Soeharto, Habibie, Megawati dan sekarang SBY – inilah yang juga dimanfaatkan oleh kalangan fundamentalis Islam untuk memaksakan ideologinya agar masuk ke wilayah publik secara formal. Sebagian dilakukan dengan cara-cara represi, sebagian lain dilakukan dengan cara yang lebih santun seperti melalui partai politik atau dengan cara-cara yang bisa dikatakan sah secara demokratis.

> Pesantren memiliki sumber daya yang luar biasa berupa santri-santri dan pengasuhnya yang kemudian ketika bergaul atau masuk lembaga pendidikan di luar pesantren mereka sanggup menafsirkan pandangan-pandangan dari bawah dengan perspektif baru, yakni dengan perspektif keadilan jender. Hasilnya adalah sekumpulan produk pemikiran keagamaan yang sangat progresif jika dibandingkan dengan kelompok Islam dari dunia yang lain. Ini sebetulnya kekuatan yang luar biasa bagi gerakan perempuan Islam di Indonesia.

Dengan pendekatan represi itu di satu pihak, dan pemaksaan idelogi dilakukan atas nama Tuhan di pihak lain, kita, umat Islam

yang berada di luar itu, kemudian sama sekali tidak diberi kesempatan untuk bertanya, beradu argumen atau berdialog. Di daerah-daerah kita dikejutkan oleh terbitnya berbagai perda yang *aneh bin ajaib*. Atau muncul jargon-jargon yang menunjukkan watak primordial dan *minority complex* Islam seperti menerapkan syariat Islam secara *kâffah*. Karena itu, akal kita seperti dipasung sebab, seperti dalam sulap, kita tiba-tiba dipaksa untuk menerima logika bahwa perda-perda, seperti perda anti-maksiat, diyakini bisa menjadi solusi ampuh untuk berbagai krisis di negeri ini. Berhadapan dengan kenyataan ini akal sehat kita terbang entah ke mana. Kita tidak punya ruang untuk bertanya atau mendiskusikannya. Wilayah agama dianggap sebagai wilayah sakral, dan karenanya dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak dapat dipertanyakan, apalagi digugat. Padahal beberapa peraturan tersebut, kalaupun dikaitkan dengan aturan agama, sama sekali tak menyentuh esensi persoalan krisis yang dihadapi Indonesia dewasa ini.

Ini semua, menurut saya, membuat Indonesia, bagaimanapun juga, harus mengambil langkah-langkah sekularisasi. Artinya, kembalikanlah persoalan-persoalan agama ke dalam wilayah privat, individu. Di wilayah publik, kalaupun mau, kita hanya mengambil esensinya. Dalam bahasa metodologi pembacaan teks, kita hanya mengambil yang *qath'î*-nya, bukan yang *zhannî*. Kita mengambil yang universalnya, bukan yang partikluarnya. Atau, kita menebar garamnya, bukan memaksakan jenis dan bentuk masakannya. Itulah hakikat sekularisasi dan dasar perlunya sekularisasi di Indonesia.

Tetapi apakah nantinya sekularisasi itu akan mematikan agama?

Abdul Karim Soroush, professor tamu di lembaga internasional untuk kajian Islam di Belanda-ISIM, dulunya adalah seorang fundamentalis yang sangat percaya pada Islam ideologi. Dia adalah pendukung kuat revolusi Islam di Iran. Khomeini sendiri yang melantiknya sebagai anggota Dewan Revolusi Kultur Islam. Sekarang setelah melihat perkembangan di tanah airnya, ia berpendapat bahwa negaranya memerlukan sekularisasi demi "melindungi agama dan spiritualitas dari permainan dan kepentingan politik".

Melihat pengalaman dan sejarah di tanah air kita saat ini, tidak bisa lain saya sepenuhnya setuju dengan Soroush. Bagi saya, sepanjang masih ada umat manusia, spiritualitas agama tidak akan pernah mati. Yang justru mendesak untuk dilakukan adalah sejauh mungkin agama mengambil jarak dari negara. Mengambil jarak yang jauh tak berarti agama mati, sebaliknya mendekat, bahkan menempelpun, belum tentu hidup. Sekularisasi adalah pilihan. Sekularisasi dapat dijadikan jawaban dan penyelesaian bagi sebuah masyarakat yang plural.

> Indonesia, bagaimanapun juga, harus mengambil langkah-langkah sekularisasi. Artinya, kembalikanlah persoalan-persoalan agama ke dalam wilayah privat, individu. Di wilayah publik, jika pun mau, kita hanya mengambil esensinya. Dalam bahasa metodologi pembacaan teks, kita hanya mengambil yang *qath'î*-nya, bukan yang *zhannî*. Kita mengambil yang universalnya, bukan yang partikluarnya. Atau, kita menebar garamnya, bukan memaksakan jenis dan bentuk masakannya. Itulah hakekat sekularisasi dan dasar perlunya sekularisasi di Indonesia.

Sekularisasi memang memisahkan antara wilayah publik dan kemasyarakatan sebagai wilayah sekular. Di dalamnya tidak ada

aturan-aturan yang mengikat warga yang secara langsung berkaitan dengan keimanan seseorang. Bahwa kemudian seseorang menggunakan keyakinannya untuk menjalankan atau tidak menjalankannya, hal itu terpulang kepada yang bersangkutan. Misalnya, seseorang tidak berbuat korupsi pada dasarnya disebabkan karena dia tahu korupsi adalah melanggar hukum. Mengambil hak warga lain adalah perbuatan salah secara hukum. Tapi bahwa dia mendapatkan semangat untuk tidak korupsi dari keimananya karena takut berbuat dosa, itu sah-sah saja.

Jadi, meskipun gagasan sekularisasi untuk Indonesia dipermasalahkan atau dipertanyakan oleh kelompok lain, bagi saya ini adalah sebuah keharusan. Dengan sekularisasi bukan berarti urusan umat dan kebutuhannya lalu diabaikan. Sebaliknya, urusan umat bahkan bisa menjadi transparan, terang dan jelas. Contoh sederhana adalah dalam urusan ibadah haji. Tadi saya sudah menjelaskan Departemen Agama adalah perpanjangan negara untuk mengatur kebutuhan umat dalam kenyamanan beribadah. Di sini gagasan sekularisasi dalam mengurus manajemen haji dapat menerang-jelaskan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan umat untuk berhaji: bagaiamana angkutannya, pemondokannya, mengurus visa negara lain (Arab saudi), *catering*, dan lain-lain. Semuanya adalah urusan manajemen yang didalamnya membutuhkan pendekatan dan perangkat sekular seperti komputer, bahasa, pesawat terbang, visa, dan sebagainya. Dengan pendekatan sekular ini persoalan haji bisa dibicarakan secara rasional, mengevaluasinya secara terukur dan objektif. Ini contoh sederhana bagaimana cara-cara sekular digunakan mesikupun untuk urusan ibadah. Kalau tidak dikelola secara sekular, maka kejadiannya seperti peristiwa kelaparan di Mina, sebagaimana peristiwa haji tahun lalu, di mana umat diminta untuk

bersabar dengan mengatakan, "ini ujian dari Tuhan", padahal jelas-jelas ini adalah kebobrokan dalam pengelolaan haji. Kedunguan dalam urusan *catering* diselesaikan dengan perintah untuk bersabar dan larangan untuk bersakwasangka. Atas nama ibadah kita dilarang mempertanyakan cara kerja Departemen Agama. Ini merupakan pembodohan yang luar biasa.

Contoh lain adalah dalam kurikulum ekstra-sekolah. Saya menyekolahkan anak saya ke sekolah umum. Selain murah, saya berharap anak saya bisa bersikap toleran karena siswanya relatif beragam. Di sana ada Muslim, Kristen, Hindu, Budha, Tionghoa atau etnis lain. Namun belakangan ini anak saya wajib mengikuti pembacaan al-Quran selama 15 menit sebelum kelas dimulai. Saya sangat heran,

Ada yang menyimpulkan bahwa gerakan perempuan Islam di Indonesia jauh lebih baik daripada kelompok feminis di negara berpenduduk Muslim lainnya. Dalam beberapa hal saya setuju dengan pendapat itu. Penyebabnya barangkali karena, *pertama*, Islam Indonesia adalah Islam periferal yang jauh dari pusatnya. Oleh karena itu, kita punya kebebasan yang cukup besar untuk menginterpretasikan apa itu Islam dan bagaimana peran perempuan dalam corak Islam seperti itu. *Kedua*, secara kultural kita mempunyai kebudayaan yang sedemikian rupa sanggup menyerap ajaran-ajaran Islam tanpa bisa lagi memisahkannya. Artinya, kita tidak lagi bisa membedakan antara kultur dengan ajaran agama, karena keduanya sudah menyatu. *Ketiga*, kita memiliki tradisi pesantren yang bukan hanya memiliki bangunan fisik di mana anak lelaki dan perempuan dididik dan ditumbuhkan, tetapi juga bangunan teologi yang bersumber dari kitab-kitab klasik yang masih terbuka untuk dibaca ulang demi penegakan hak-hak perempuan."

mengapa sekolah umum mengurusi anak bisa ngaji atau tidak. Itu bukan urusan sekolah; bukan urusan publik. Itu urusan keluarga; urusan privat. Berbeda kasusnya kalau anak saya disekolahkan ke sekolah Islam (dan swasta).

Saya adalah alumni IAIN (sekarang UIN Jakarta), jadi Anda tak perlu meragukan saya. Bagi saya kalau anak saya mau belajar membaca al-Quran itu bukan menjadi kewajiban sekolah, melainkan kewajiban saya, orang tuanya. Paling jauh itu menjadi kewajiban komunitas dengan menyediakan Taman Pengajian al-Quran. Ketika saya tanyakan kepada pihak sekolah, mereka mengatakan dengan membaca al-Quran anak didik diharapkan akan menjadi anak yang saleh dan mempunyai budi pekerti. Tapi bagaimanakah anak didik akan melakukan itu, sementara yang diwajibkan membaca adalah anak-anak dengan latar belakang Muslim, anak lain bagaimana? Katakanlah jawabannya adalah agama lain pun diwajibkan membaca kitabnya. Tapi bagaimanakah dari agama yang berbeda-beda diharapkan akan keluar sebuah etika yang sama yang bisa berlaku umum tanpa melalui proses yang mengakui kesamaan di antara agama-agama itu? Bukankah kita menganggap Islam adalah agama paling benar? Demikian juga dengan agama yang lainnya. Terlebih, karena anak-anak kita yang Muslim hanya membaca tanpa memahami maknanya. Jadi, kesalehan dan budi pekerti macam apa yang diinginkan lahir dari anak yang sama sekali tidak paham dengan apa yang dibacanya? Jika anak diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak merokok atau tidak melakukan tindakan kekerasan, saya mengerti itu adalah bagian dari penerapan ajaran budi pekerti. Jika anak diminta untuk tidak berbuat aniaya kepada sesama, murid laki-laki tidak melecehkan murid perempuan, tidak bolos atau tidak berdusta, saya mengerti

bahwa itu adalah penjabaran dari konsep anak saleh. Tetapi jika anak didik diwajibkan membaca al-Quran, lalu diharapkan menjadi anak yang berdisiplin, saleh dan berbudi pekerti, saya sama sekali tidaak paham! Maaf, saya tak bisa melihat hubungannya!

Sebagai seorang aktivis perempuan, problem apa sebetulnya yang Anda anggap paling berat untuk terus diperjuangkan?

Saya melihatnya begini: dalam situasi global saat ini, sebagaimana kita semua tahu, kita berhadapan dengan sikap negara-negara adidaya yang begitu arogan dan mengabaikan realitas ketertindasan negara-negara berkembang, terutama dunia Islam. Melihat realitas yang demikian, kita seperti melihat orang adu tarik-tambang. Di satu pihak negara adidaya yang begitu arogan, mendiktekan kemauannya sendiri, memberlakukan standar ganda, mengontrol dan mencurigai negara lain sementara negara sendiri sewenang-wenang. Di sisi lain, terutama kelompok Islam pada kenyatannya begitu tidak berdaya dari sisi apapun, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, SDM dan seterusnya. Umat Islam di mana-mana mengalami kolonialisme (baru) dalam bentuknya yang lain. Bagaimana kita dapat melihat keadilan dalam struktur dunia yang timpang seperti ini? Sementara itu, dari kelompok-kelompok yang kalah ini, tampaknya hanya kegilaan kelompok fundamentalis saja

> Pluralisme, menurut saya, menjadi sangat penting ketika saat ini muncul *euforia* lokalitas. Yakni ketika Indonesia dari era reformasi ke era otonomi daerah masyarakatnya semakin menganggap bahwa genuinitas identitas dan lokalitas merupakan hal yang sangat penting.

yang dapat mengimbangi dominasi negara adidaya tersebut. Melihat arogansi negara adidaya dan lemahnya negara-negara Muslim, saya hanya bisa mencoba mengerti, meskipun dengan sangat sedih, bahwa untuk menghadapi kegilaan negara *super power* itu ternyata hanya bisa dengan sikap militan, sikap fundamentalis.

Lantas di manakah posisi kelompok perempuan? Kelompok perempuan sebetulnya berada di antara dua posisi yang tarik-menarik ini. Persis sama dengan pola di atas: di satu pihak ada masyarakat dunia yang patriarkal, yang di dalamnya bercokol ideologi liberal yang menempatkan perempuan sebagai objek. Perempuan adalah komoditas sekaligus target pasar. Kehadiran perempuan dianggap penting bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk kepentingan ekonomi global dan kapitalisme. Agar mereka bisa *survive* dan mampu bersaing di dunai publik yang patriarkal, mereka dituntut menjadi warga dunia dengan pendekatan maskulin; sanggup melakukan ekspansi, penaklukan, adu otot dan kekuatan, mengesampingkan nilai-nilai kelembutan dan seterusnya. Dengan cara berpikir seperti itu, bahkan rahim perempuan juga harus dikendalikan. Tujuannya adalah produktivitas. Beranak pinak dianggap sebagai penghambat produktivitas. Keluarga sejahtera diukur dari seberapa kecil keluarga itu. Kelompok liberal ini memosisikan perempuan sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi. Mereka sangat berkepentingan dengan rahim perempuan. Kaum perempuan dituntut untuk membatasi kelahirannya agar ongkos produksi rendah dan produktivitas tetap tinggi sebagai tenaga kerja yang murah.

Di pihak lain, kaum perempuan berhadapan dengan cara pandang dan kelompok fundamentalis yang juga menganut ideologi patriarkal. Perempuan bagi kelompok ini adalah eksistensi dan harga diri mereka. Karena yang diangap sang musuh adalah modernisasi

yang mewujud dalam hal-hal yang serba Barat, maka perempuan menjadi rentan ketika dikaitkan dengan hal- hal yang dianggap Barat. Pendidikan, misalnya, pada mulanya adalah personifikasi Barat. Pendidikan, pada masa penjajahan dianggap monster yang dapat merusak kemurnian perempuan. Rusaknya kemurnian perempuan sama dengan hancurnya Islam. Akibatnya dengan berbagai cara perempuan mengalami pemingitan dalam modus dan bentuk yang berbeda-beda. Dimulai dari pembatasan ruang geraknya, seperti pembatasan untuk bicara, sampai pembatasan untuk masuk dan bergerak di ruang publik sebagai pemimpin. Namun dalam waktu yang bersamaan, kalangan fundamentalis sangat paham bahwa keberadaan mereka tergantung benar kepada keberadaan kaum perempuan. Melalui perempuanlah anggota mereka bisa bertambah baik dengan cara banyak melahirkan atau memperbanyak istri-istri. Kelompok fundamentalis memperlakukan perempuan sebagai kelompok yang homogen, yang dalam bayangan mereka dianggap sebagai satu-satunya harapan masa depan kelompok ini.

> Negara secara objektif semestinya berhubungan dengan umat melalui perwakilannya, baik di partai atau di organisasi keagamaan. Berbagai keperluan umat agar mendapatkan kenyamanan dalam menjalankan keyakinannya, diurus dan dikomunikasikan melalui badan-badan tersebut. Dengan pemaknaan seperti itu setiap upaya sekularisasi bagi sebuah negara yang plural seperti Indonesia, buat saya adalah niscaya.

Dengan mengeskploitasi rahim serta melalui perannya sebagai seorang ibu, perempuan diterima kehadirannya. Jadi, ada dua kelompok besar yang secara bersamaan menghimpit perempuan demi

kepentingan mereka masing-masing. Ini adalah situasi global yang sedang dihadapai oleh kelompok perempuan.

Jika demikian rentannya posisi perempuan, kemudian apa tawaran Anda agar perempuan bisa keluar dari himpitan seperti ini?

Saya tidak punya resep yang yang bisa mengobati segala macam penyakit. Kita harus melihatnya dalam konteks yang berbeda-beda. Tetapi, saya kira, kita bisa belajar dari pengalaman kita sendiri. Feminisme sebagai ideologi sekaligus gerakan kesadaran tentang hak-hak perempuan barangkali bisa menjadi tawaran. Tapi sekali lagi tidak bisa digeneralisasi. Ada yang menyimpulkan bahwa gerakan perempuan Islam di Indonesia jauh lebih baik daripada kelompok feminis di negara berpenduduk Muslim lainnya. Dalam beberapa hal saya setuju dengan pendapat itu. Penyebabnya barangkali karena, *pertama*, Islam Indonesia adalah Islam periferal yang jauh dari pusatnya. Oleh karena itu, kita punya kebebasan yang cukup besar untuk menginterpretasikan apa itu Islam dan bagaimana peran perempuan dalam corak Islam seperti itu. *Kedua*, secara kultural kita mempunyai kebudayaan yang sedemikian rupa sanggup menyerap ajaran-ajaran Islam tanpa bisa lagi memisahkannya. Artinya, kita tidak lagi bisa membedakan antara kultur dengan ajaran agama, karena keduanya sudah menyatu.

Ketiga, kita memiliki tradisi pesantren yang bukan hanya memiliki bangunan fisik di mana anak lelaki dan perempuan dididik dan ditumbuhkan, tetapi juga bangunan teologi yang bersumber dari kitab-kitab klasik yang masih terbuka untuk dibaca ulang demi penegakan hak-hak perempuan. Pesantren memiliki sumber daya yang luar biasa berupa santri-santri dan pengasuhnya yang

kemudian ketika bergaul atau masuk lembaga pendidikan di luar pesantren mereka sanggup menafsirkan pandangan-pandangan dari bawah dengan perspektif baru, yakni dengan perspektif keadilan jender. Hasilnya adalah sekumpulan produk pemikiran keagamaan yang sangat progresif jika dibandingkan dengan kelompok Islam dari dunia yang lain. Ini sebetulnya kekuatan yang luar biasa bagi gerakan perempuan Islam di Indonesia.

Keuntungan lain, kita memiliki ormas keagamaan yang anggotanya ribuan perempuan dari desa sampai ke kota. Ini potensi yang luar biasa. Orde Baru pernah memanfaatkan mereka untuk menyebarkan gagasan dan program pembangunan. Jadi, betapa kekuatan mereka sangat dahsyat. Ingat kasus ditinggalkannya Aa Gym oleh jamaahnya. Gara-gara melakukan poligami, ia benar-benar mati langkah. Itu semua adalah kerjaan ibu-ibu anggota majelis taklim yang merasa Aa Gym telah menzalimi perempuan, bukan kerjaan kami yang terus berkutat dengan penafsiran ulang ayat poligami.

Yang menjadi persoalan kemudian adalah karena kita menjadi periferal maka kita sulit menjadi pusat. Kita, sejauh ini, tidak pernah memberi alternatif kepada dunia. Sejauh ini kita belum bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Islam Indonesia berbeda dan lebih baik ketimbang Islam di negara lainnya dalam menempatkan kaum perempuan, meskipun Indonesia juga sedang diserang oleh *transnational fundamentalism.* Sejauh ini kita belum bisa menjadi *role mode* dunia Islam internasional.

Mungkin kita mempunyai problem bahasa. Dari sejarahnya, kita adalah jajahan Belanda, bukan jajahan Inggris. Jadi, kita bukan bagian dari negara Persemakmuran seperti India, Pakistan, Bangladesh yang kemudian mendapatkan keuntungan secara per-

adaban karena mereka mempunyai tradisi berbahasa yang laku di dunia internasional.

Indonesia adalah negara dengan kemajemukan yang luar biasa. Untuk itu, hendaknya pluralisme menjadi keniscayaan bagi negara ini. Dalam pandangan Anda, bagaimana seharusnya pluralisme dipahami dalam konteks keindonesiaan? Apakah ia mengarah pada sinkretisme – yang cenderung menyamakan kebenaran semua agama, sebagaimana dituduhkan MUI – dan relativisme?

Pluralisme, menurut saya, menjadi sangat penting ketika saat ini muncul *euforia* lokalitas. Yakni ketika Indonesia dari era reformasi ke era otonomi daerah masyarakatnya semakin menganggap bahwa genuinitas identitas dan lokalitas merupakan hal yang sangat penting. Identitas kelokalan kemudian diukur dari darah, bahasa, agama dan suku. Semua ini dijadikan ukuran genuinitas suatu wilayah yang ditonjolkan untuk kepentingan dua hal: pertama kekuasaan; dan kedua akses pada sumber ekonomi. Dalam rangka kepentingan ini, lokalitas kemudian menjadi isu primordial. Semula isunya adalah bebas dari dominasi Jawa, karena itu otonomi daerah menjadi penting. Tetapi pada saat yang bersamaan momen ini dimanfaatkan untuk mendapatkan akses kepada kekuasaan dan ekonomi, atau sebagai alasan untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara membabi buta.

Dalam konteks inilah kemudian pluralisme – oleh mereka yang memiliki kepentingan (politik dan ekonomi) tertentu–dianggap sebagai ancaman, terutama terkait dengan otonomi daerah. Ini yang pertama. Kedua, terkait dengan munculnya kelompok *transnational Islamic fundamentalism.* Islam fundamentalis, dalam pandang-

an saya, cenderung mengabaikan keragaman. Jadi semuanya ingin dijadikan satu dan diseragamkan dalam tradisi teologi tertentu, misalnya Wahhabisme.

Politik Orde Baru pada masa lalu adalah politik yang anti-keragaman, sehingga kemudian dikenal ada politik SARA. Pada masa Orde Baru kepelbagaian menjadi persoalan karena di dalamnya mengandung kemungkinan berbeda pendapat. Dari sisi kepentingan Orde Baru, berbeda pandangan dan pendapat adalah ancaman, karenanya harus ditekan. Ketika kepelbagaian ditekan sedemikian rupa, kita lalu merasa seolah-olah tidak punya masalah dengan kepelbagaian itu. Kepelbagaian dikelola oleh rezim Orde Baru melalui kebijakan politik hubungan antar-agama atau politik kerukunan antar-umat beragama di tingkal elit. Sementara di tingkat bawah, di era Orde Baru, hal tersebut ditekan oleh kekuatan tentara dan tidak diperbolehkan untuk muncul.

Setelah Orde Baru, kemudian muncul ide otonomi daerah, di mana pada waktu yang bersamaan identitas kelompok atau daerah juga mulai dimunculkan. Kenapa identitas lantas dibicarakan? Sebagaimana saya sering katakan, ini adalah terkait dengan akses. Orang Papua kembali menonjolkan identitasnya karena dengan cara seperti itu mereka bisa menjadi gubernur, bupati, camat, dan lain sebagainya. Orang-orang dari daerah lain juga melakukan hal yang sama. Pada saat ini kepelbagaian muncul lagi, tetapi dengan semangat primordial. Kemunculannya sarat dengan muatan politik dan bukan sebagai upaya untuk memahami realitas masyarakat yang plural.

Jadi orang bersikap mendua terhadap realitas masyarakat yang majemuk ini. Di satu pihak dianggap berkah, namun di lain pihak dianggap ancaman. Ancaman bagi siapa? Kalau pada masa Orde

Baru kepelbagaian adalah ancaman bagi kesatuan politik Orde Baru; sementara saat ini kepelbagaian dianggap sebagai ancaman bagi kelompok Islam yang kita sebut sebagai kelompok fundamentalis.

Jadi, kalau Anda menanyakan bagaimana kita menghadapi ini semua, maka bagi saya, kita harus kembali pada sejarah awal kenapa kita sepakat membentuk republik ini. Sebetulnya konsep Bhinneka tunggal ika merupakan kristalisasi dari pemahaman tentang pluralitas Indonesia. Kenyataannya kita terdiri dari berbagai suku, bahasa dan budaya yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Tapi kemudian pluralisme dianggap sebagai monster. Kehadirannya mengancam kepentingan kelompok yang diuntungkan oleh gagasan otonomi daerah dan kelompok-kelompok Islam yang menganggap bahwa Indonesia adalah negara Islam; dan Islam adalah satu. Dengan begitu, keragaman adalah ancaman bagi dua kelompok ini.

Saya tidak hendak mengatakan bahwa dengan keragaman ini agama kita kemudian akan sama benarnya dengan agama Kaharingan, misalnya. Tetapi pokok yang ingin saya katakan adalah bahwa realitas negara kita sangatlah plural. Kesadaran inilah yang harus ditumbuhkan lagi di Indonesia. Ketika saya kecil, pelajaran mengenai peta bumi Indonesia dengan segala macam ragam budayanya itu harus dihafal, sehingga kita waktu itu tahu wilayah-wilayah geografi Indonesia. Tapi coba tanya anak-anak sekarang apakah mereka tahu wilayah-wilayah atau daerah-daerah di Indonesia yang beragam ini. Jadi kita harus sadar bahwa kita sebetulnya telah melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Orde Baru. Hanya saja kalau dulu pelakunya adalah rezim Orde Baru dan militer, sekarang yang melakukan adalah diri kita sendiri, umat Islam.

Menurut saya, tidak bisa lain harus ada kesadaran dari kelompok mayoritas, yakni kelompok Muslim mengenai keragaman ini. Kita tidak bisa berharap kepada kelompok minoritas untuk selalu bersuara bahwa mereka ada. Jika kelompok mayoritas menyadari adanya keragaman, maka kemudian harus ada ruang bersama, di mana semua unsur bisa masuk ke dalamnya. Untuk itu jalan yang bisa kita pakai, dan ini bagi saya merupakan jalan satu-satunya yang paling mungkin, adalah sekularisasi demi menghormati keragaman tersebut.

Terkait dengan terus bermunculnya persoalan-persoalan yang tidak kalah rumitnya seperti trafficking, *apakah tindakan yang diambil oleh negara saat ini sudah bisa dikatakan memihak pada perempuan?*

Apabila kita cermati, memang mulai ada perhatian dari pihak-pihak terkait. Setidaknya sudah ada usaha ke arah sana, walaupun itu melalui *bargaining* politik. Kita melihat sudah ada Undang-Undang Anti-kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Anti-Trafiking, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihatnya dari segitiga penerapan hukum, maka kita tidak bisa hanya melihat dari *content of law,* melainkan juga harus sekaligus melihat dari *structure of law* dan *culture of law.* Kalau budayanya masih menganggap bahwa perempuan adalah subordinat, oleh karena itu perempuan dibayar lebih murah daripada laki-laki, perempuan hanya dianggap sebagai pencari nafkah tambahan, atau perempuan dianggap sebagai objek seks belaka, maka usaha pembelaan terhadap perempuan akan tetap sulit dilakukan.

Tetapi saya ingin lebih optimis dalam melihat persoalan ini. Kita memang harus melakukan pendekatan multidimensi untuk meng-

atasi masalah ini. Oleh karena itu, kita benar-benar tidak bisa hanya berharap pada negara. Sebab dalam konteks ini, menurut saya, *civil society* berperan besar dalam upaya-upaya perlindungan terhadap perempuan atau upaya penyadaran pada perempuan. Dan yang saya suka adalah akal publik ternyata memunyai kewarasan untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk. Kembali kita mengambil kasus Aa Gym. Saya melihat itu murni akal publik perempuan yang melakukan penghakiman terhadap sebuah tindakan yang dirasa tidak adil bagi mereka, di mana agama ditafsirakan secara sepihak oleh laki-laki seperti Aa Gym. Sehingga akal publik perempuan tetap menilainya sebagai tindakan tidak adil. Ternyata kita tidak perlu melawan tindakan seperti Aa Gym itu dengan ayat lagi. Biarkanlah kewarasan manusia, dalam hal ini kewarasan perempuan, yang melawannya. Untuk itu yang diperlukan adalah terbukanya ruang bagi perempuan untuk belajar dan menyatakan pendapatnya.

Demikian juga dengan kasus RUU-APP. Menurut saya, yang menjegal isu RUU-APP yang diusung oleh anggota parlemen adalah murni akal publik. Meskipun pada saat yang sama kelompok-kelompok yang setuju dengan isu tersebut mengerahkan massa, bahkan sampai mengintimidasi. Namun akal publik tetap tidak bisa dibungkam. Saya sangat percaya pada akal publik. Dan akal publik akan tetap waras kalau kita sudah sanggup memisahkan antara domain agama yang bersifat privat dengan domain publik. Hal inilah yang seharusnya diperjuangkan terus-menerus. Sebab hal ini merupakan kebutuhan bagi Indonesia.

Bagaimana dengan tindak kekerasan terhadap perempuan seperti kerap terjadi pada wilayah domestik yang demikian sulit untuk diang-

kat pada tingkat hukum, begitu pula rumitnya isu trafficking *dan sebagainya? Advokasi seperti apa yang mesti dilakukan oleh kelompok perempuan jika kita tidak bisa mengandalkan negara secara penuh?*

Kelompok-kelompok perempuan sejauh ini tetap melakukan advokasi-advokasi untuk membela perempuan melalui Prolegnas, yakni program-program legislasi yang mendukung perempuan. Jadi, aktivis-aktivis perempuan memberikan informasi yang seimbang kepada anggota DPR. Tetapi, seperti tadi sudah saya katakan, kita tidak bisa berharap hanya pada salah satu sudut saja dari segitiga hukum untuk melakukan perubahan. Perubahan hanya mungkin kalau dari ketiga unsur itu, yakni budaya, isi, dan struktur hukumnya berjalan bersamaan.

Capaian dalam masalah *content of law* mungkin sudah lebih baik karena sudah ada beberapa undang-undang yang memihak perempuan. Tapi untuk masalah pelaksanaannya kita masih berharap adanya dukungan entah itu dari masyarakat atau pemerintah untuk melakukan penyadaran di tingkat budaya. Meskipun *content of law*-nya sudah ada tetapi jika kemiskinan dan tingkat pendidikan yang buruk masih ada dan perempuan masih menjadi tumpuan bagi keluarga miskin dengan tingkat pendidikan yang rendah maka *trafficking* masih akan terus terjadi.

Bagaimana Anda melihat masa depan Indonesia?

Mungkin sedikit pesimistik, untuk tidak mengatakan khawatir. Jika corak keislaman Indonesia semakin mengabaikan realitas keragaman, realitas kepelbagaian, dan malah menonjolkan corak Islam yang monolitik dan tidak multitafsir, maka saya sangat kha-

watir. Sebab, kita akan kehilangan keislaman sekaligus keindonesiaan kita. Jika tidak ada lagi tradisi pesantren yang memungkinkan untuk mengembangkan tradisi kulturalnya, maka itu adalah sebuah ancaman yang luar biasa terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia. Kita masih melihat bahwa dalam tradisi lokal yang berkembang di pesantren terletak kemungkinan adanya ruang untuk kepelbagaian kita. Benar bahwa tradisi lokal pun sangat bisa mengancam perkembangan pemikiran yang sehat dan terbuka, karena karakternya yang cenderung feodal dan cenderung melakukan represi terhadap orang yang lemah. Tetapi, menurut saya, kearifan-kearifan mereka yang dilahirkan melalui dialektika seharusnya tidak dilibas baik oleh ekonomi liberal maupun oleh *transnational Islamic fundamentalism* yang masuk ke Indonesia dan berusaha untuk menyeragamkan corak keagamaannya. Tetapi jika negara hanya tinggal bungkam dan tidak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi hal ini, maka, bagi saya, pendapat mas Dawam benar, hal ini akan menjadi ancaman bagi keindonesiaan.

Lantas apakah masih ada harapan akan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia yang memperlakukan seluruh warganya secara adil, setara dan memihak pada minoritas dan kalangan atau warga yang terpinggirkan?

Kalau melihat perkembangan gerakan perempuan, menurut saya, masih ada harapan dan membuat kita punya alasan untuk optimis. Satu contoh, beberapa waktu lalu kami mengundang beberapa angkatan ulama Aceh untuk mendiskusikan masalah jender. Pertama-tama mereka menganggap bahwa isu ini adalah ancaman yang dihembuskan oleh Barat untuk menaklukkan Islam. Namun,

kemudian setelah mereka dikenalkan dengan metodologi atau cara baca teks, di mana dengan cara seperti itu mereka bisa melihat aspek keadilan bagi orang lemah, bagi minoritas atau bagi perempuan, ternyata mereka bisa menerima dengan terbuka. Metode dialog seperti ini bisa memupus kecurigaan antar-agama, antar-suku, antar-ras, dan lain sebagainya. Dengan model dialog juga tercipta ruang-ruang untuk saling memahami. Memang kita berada dalam posisi yang sulit, oleh karena posisi kita sebagai kelompok moderat. Sebab kita menjadi tidak bisa "berantem" dengan kelompok fundamentalis yang bisa melakukan apa saja. Tetapi, bagi saya, ini adalah resiko memilih demokrasi dan memilih menjadi seorang yang moderat. Kita hanya bergantung pada kewarasan, akal sehat dan hukum yang adil dan sensitif pada kepelbagian anak negeri ini.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 23 Mei 2007

Percakapan dengan

Lily Zakiyah Munir



Lily Zakiyah Munir, peneliti Center for Pesantren and Democracy Studies (CePDeS), Jakarta, yang fokus pada isu-isu jender dan hak asasi manusia dalam perspektif Islam.

Konsep syariah tidak seharusnya dijadikan sebagai aturan formal negara. Upaya tersebut tidak akan berhasil karena terlalu banyak kemunafikan dan standar ganda di dalamnya – di samping hanya menjadi komoditas elit tertentu, termasuk elit agama. Padahal syariah sejatinya jalan menuju kemaslahatan. Sehingga, ketika kompleksitas persoalan bangsa ini bersumber pada bobroknya moralitas, pembangunan kembali moralitas bisa diunduh dari agama dan juga luar agama. Namun demikian, negara sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk urusan keyakinan setiap warganya. Maka, sekularisme hendaknya dipahami sebagai *political secularism* dan bukan sebagai ideologi. Ini merupakan ikhtiar untuk melindungi agar agama tidak dijadikan alat politik.

Sekularisme sering disalahpahami oleh umat Islam sebagai penyebab hilangnya agama di ruang publik. Bagaimana Anda menanggapi persoalan ini?

Kekhawatiran umat Islam tehadap sekularisme bisa dimengerti. Karena pada dasarnya sekularisme sendiri multi-makna. Heiner Bielefeldt, filosof religi dari Jerman, dalam *The Two Faces of Secularism* melihat dua wajah sekularisme. *Pertama*, sekularisme ideologis *(ideological secularism)*. Yakni Sekularisme yang mengambil bentuk sebagai ideologi: masyarakat atau negara tidak boleh beragama. Ideologi yang memandang agama sebagai urusan privat, bukan urusan publik. Tetapi, ada juga yang menampakkan wajahnya sebagai *political secularism*. Ini lebih bersifat politis. Jadi, kepentingan sekularisme adalah untuk melindungi supaya agama tidak dijadikan alat politik. Namun demikian, model yang terakhir ini tidak memojokkan agama dalam ruang privat.

Kritik dan analisis Heiner Bielefeldt ini senada dengan analisis para pemikir Muslim. Abdullahi Ahmed An-Naim, misalnya, mengkritik paham ini dengan mencoba menjabarkannya dalam karyanya *Secularism vis a vis Syarî'ah.* Demikianpun seorang wartawan Muslim kelahiran Pakistan, Ziauddin Sardar, sekarang tinggal di London, mengkritisi sekularisme juga. Dari beberapa pandangan itu, lagi-lagi, saya melihat sekularisme memang mempunyai beberapa makna.

Kalau kita cermati, sejarah sekularisme di Eropa lahir setelah agama (Katolik) dijadikan alat untuk menindas dan mengeksekusi kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, Gereja Katolik bekerja sama dengan negara untuk menindas mereka yang berbeda pendapat. Terjadilah eksodus dari Eropa ke Amerika. Trauma seperti ini yang membuat mereka yang tertindas bermigrasi dari Eropa ke

Amerika dan berusaha mempromosikan pemisahan antara gereja dan negara. Itu makna asli sekularisme.

Saya kira, sekularisme memang berusaha agar jangan sampai dua kekuatan itu, gereja dan negara, berkolaborasi. Karena risikonya akan sangat tinggi. Di satu pihak negara sudah mempunyai *power*, di pihak lain agama juga suatu *power* yang luar biasa dengan doktrin-doktrinnya. Kalau dua kekuatan ini berintegrasi, maka akan menimbulkan pengalaman traumatis seperti yang terjadi di Eropa, yaitu penindasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda.

Saya kira, sekularisme memang berusaha agar jangan sampai dua kekuatan itu, gereja dan negara, berkolaborasi. Karena risikonya akan sangat tinggi. Di satu pihak negara sudah mempunyai *power*, di pihak lain agama juga suatu *power* yang luar biasa dengan doktrin-doktrinnya. Kalau dua kekuatan ini berintegrasi, maka akan menimbulkan pengalaman traumatis seperti yang terjadi di Eropa, yaitu penindasan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda.

Dalam sejarahnya, Islam, sejatinya, tidak mengenal sekularisme. Hal tersebut kentara apabila menengok praktik Rasulullah. Selain beliau sebagai panutan atau imam dalam hal agama, tetapi juga sebagai kepala negara dalam hal pemerintahan. Jadi, Nabi mempraktikkan integrasi dalam satu tubuh antara negara dan agama. Tetapi, tentu saja Rasulullah *mumpuni* untuk melakukan itu semua. Konteksnya, waktu itu Rasulullah langsung berkonsultasi dengan Allah, sementara untuk sekarang ini kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan Rasulullah.

Demikianpun praktik pemerintahan pada masa *al-khulafâ' al-râsyidûn* sama dengan Rasulullah. Ada integrasi antara agama dan

negara. Pasca *al-khulafâ' al-râsyidûn,* kemudian dunia Islam memasuki dinasti-dinasti yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan antara agama dan negara, antara *'ulamâ'* dan *umarâ'*. Dari sinilah terjadi penyalahgunaan wewenang yang luar biasa. Sejarah membuktikan bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda ditindas atas nama agama. Pengalaman ini mirip dengan yang terjadi di Eropa. Itu konteks masa lalu Islam. Kenapa ini semua saya angkat? Karena ini teramat penting, terutama relevansinya dengan tuntutan kelompok Islamis yang akhir-akhir ini ingin mengintegrasikan kembali agama dan negara.

Dalam konteks keindonesiaan kita tentunya mengenal Bhinneka Tunggal Ika. *Founding fathers* kita sepakat untuk membentuk sebuah negara-bangsa, bukan negara agama, meskipun mayoritas warganya beragama Islam. Jangan sampai ada pemaksaan dalam beragama. Bagaimanapun bangsa ini terikat pada nilai-nilai yang tercakup dengan Deklarasi Universal HAM, yang intinya semua orang memiliki kebebasan yang sama.

Demikian pula harus digarisbawahi di sini bahwa Islam menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu tujuan pokok dari syariah. Ini diungkapkan Al-Syatibi dalam konsep *al-Kullîyât al-Khamsah,* lima hal pokok dalam syariah, yang terdiri atas: menjaga agama (*hifzh al-dîn*), menjaga nalar (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nashl*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*), dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdl*). Dalam *hifzh al-dîn*, ajaran Islam menjamin kebebasan seseorang untuk memeluk agamanya. Al-Quran juga menegaskan "*Lakum dînukum wa liya dîn*". Ditegaskan lagi dengan "*Lâ ikrâha fî al-dîn qad tabayyana al-rusydu min al-ghayy*".

Dari sini, Indonesia kemudian menganut konsep negara-bangsa, bukan negara agama. Tetapi di Indonesia negara tetap mengatur

keberagamaan warganya. Untuk itu berdiri Departemen Agama. Jadi, agama tidak diprivatkan total seperti Amerika. Tetapi kalau kita benar-benar ingin sekular seperti di Amerika, itu semua harus berkembang sendiri. Negara sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk urusan beragama. Misalnya saja sebuah gereja di Amerika tidak akan bisa menerima bantuan dari negara, kecuali gereja tersebut mempunyai program sosial yang lintas-agama, bukan sektarian.

Saya ingin bercerita sedikit tentang sekularisme di Amerika. Setelah peristiwa 11 September 2001, saya bersama dua orang rekan dari Indonesia, Mudji Sutrisno dan Komaruddin Hidayat, serta beberapa intelektual dari Asia diundang ke Amerika. Waktu itu, tepatnya tahun 2003, kami diundang dalam rangka *International Visiting Program* (IVP) yang diselenggarakan *US Government*. Temanya *freedom of religion.* Sebenarnya program ini telah dilaksanakan selama 27 tahun, tetapi baru setelah peristiwa 11 September mengangkat tema seputar agama. Sebelumnya program ini temanya bermacam-macam, seperti *Young Leaders*, *Journalism*, dan yang lainnya.

Kami berkunjung ke enam negara bagian. Di sana saya belajar bagaimana agama dipisahkan dari negara. Tetapi bukan berarti kehidupan beragamanya mati. Yang benar-benar melakukan pengembangan agama di sana adalah institusi agama sebagai inisiatornya, bukan negara. Di sana kami bertemu dengan *Captain*, imam atau penasihat agama untuk tentara. *Captain* itu ada yang Kristen, Katolik, dan Islam. Saya bertemu dengan *Captain* yang Islam. Dia tugasnya memfasilitasi, memberikan penerangan dan pendidikan keagamaan kepada tentara-tentara yang Muslim. Misalnya, mengajarkan bagaimana memandikan jenazah, mengadvokasi tentara pe-

rempuan Muslim yang memakai celana pendek agar dapat menggantinya dengan memakai celana panjang. Semua disediakan sebagai fasilitas untuk kondisi-kondisi seperti itu. Namun, misalnya, urusan KTP pasti tidak terdapat agamanya. Sebab, identitas dalam KTP tidak mencantumkan agama. Kenyataan lainnya dari bentuk negara sekular adalah bahwa gereja tidak menerima bantuan dari negara. Jadi betul-betul keduanya dipisahkan.

Meskipun agama dan negara dipisahkan, bukan berarti agama tidak berperan dalam kehidupan masyarakat Amerika. Sebaliknya, agama menjadi sumber etika dan moralitas yang mereka junjung tinggi. Agama sudah diimplementasikan dalam kehidupan, tidak sekadar dihafalkan. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau saya melihat persoalan yang dihadapi sekarang, di Indonesia, seperti korupsi, ketimpangan sosial dan lainnya, bersumber pada satu hal, yaitu moralitas yang bobrok. Moralitas pada dasarnya bisa bersumber dari agama, tetapi bisa juga dari luar agama. Bahkan, orang-orang yang mengatakan diri ateis bisa juga jauh lebih bermoral. Jadi, etika atau moral itu bisa bersumber dari agama bisa dari non-agama.

Yang perlu diperhatikan, dalam budaya Amerika sanksi sosial berjalan dengan baik lantaran nilai-nilai ajaran agama sebetulnya sudah banyak dihayati oleh masyarakat Amerika. Misalnya, betapa nilai amanah (*trust*) sudah melekat dalam keseharian mereka. Di Amerika jika Anda berjualan buah, Anda tinggal menaruhnya di pinggir jalan, kemudian dikasih tulisan harganya. Misalnya, apel sepuluh buah harganya satu dolar dan seterusnya. Setelah itu Anda tinggalkan, kemudian sore hari Anda kembali, maka jika apelnya terjual, Anda akan mendapati uangnya ada di situ.

Kalau di Indonesia hal seperti ini tidak mungkin. Paling apelnya habis dan uangnya tidak ada. Kenapa masyarakat Amerika bisa

seperti itu? Saya melihat ada suatu bentuk manifestasi dari tanggung jawab moral yang sudah terbentuk. Tanpa melihat agamanya apa. Itu yang belum kita miliki.

Kalau untuk konteks Indonesia, menurut Anda, idealnya nilai-nilai atau moralitas dalam agama mestinya didorong oleh negara atau cukup di lingkup civil society, dengan menyerahkan pada masyarakat untuk mengelolanya?

Saya melihat dua-duanya harus sinergis menegakkan nilai-nilai agama di tengah kebobrokan moral dewasa ini. Karena nilai-nilai agama adalah sumber moralitas, maka sangat tepat untuk mengobati penyakit bangsa yang menggurita. Islam, misalnya, sarat dengan nilai-nilai moral. Ada konsep *al-nazhâfatu min al-îmân,* kebersihan itu sebagian dari iman. Dalam Hadits juga dijelaskan bahwa senyummu adalah *shadaqah*-mu. Itu salah satu bukti bahwa ajaran Islam sarat dengan nilai-nilai sosial. Tetapi sayang, ada gap antara ajaran Islam dan Muslim. Muslim tidak semuanya mencerminkan spirit Islam. Coba saja Anda lihat komunitas yang kumuh-kumuh,

Islam menjamin kebebasan beragama sebagai salah satu tujuan pokok dari syariah. Ini diungkapkan al-Syatibi dalam konsep *al-Kullîyât al-Khamsah',* lima hal pokok dalam syariah, yang terdiri atas: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga nalar (*hifzh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga harta (*hifzh al-mâl*), dan menjaga kehormatan (*hifzh al-'irdl*). Dalam *hifzh al-dîn*, ajaran Islam menjamin kebebasan seseorang untuk memeluk agamanya. Al-Qur'an juga menegaskan "*Lakum dînukum wa liya dîn*". Ditegaskan lagi dengan "*Lâ ikrâha fî al-dîn qad tabayyana al-rusydu min al-ghayyi*".

mereka adalah komunitas Muslim, termasuk di pesantren sebagai institusi pendidikan Islam.

Tetapi, apakah nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam harus diurus oleh negara, mengingat ini memiliki implikasi lebih jauh dalam pelbagai dimensi kehidupan warga, misalnya ketika pemerintah berada di belakang penerapan syariat Islam di daerah-daerah?

Tidak, pendekatannya bukan seperti itu. Saya tetap percaya terhadap konsep sesungguhnya dari syariah, tanpa harus melibatkan negara untuk mengurus dan menjadikannya sebagai aturan formal. Syariah merupakan jalan menuju kemaslahatan. Namun begitu, pendekatan terhadap syariah tidak *top down* atau melalui hukum, tetapi melalui pendidikan. Saya melihat metode pengajaran moral kita selama ini salah: hanya menyentuh aspek kognitif. Mengajarkan akhlak seharusnya tidak dengan hafalan, tetapi dengan teladan dalam bentuk perilaku. Banyak Hadits akhlak yang dihafal umat Islam Indonesia, tetapi perilakunya tidak berakhlak. Padahal selain Hadits kita juga sarat dengan nilai-nilai luhur yang tercakup dalam Pancasila dan PPKN, khususnya dalam kurikulum pendidikan dasar. Itu semua merupakan ajaran moralitas bagaimana kita berbangsa, bernegara, menghargai orang lain atau toleransi. Tetapi sayangnya yang diajarkan sekadar pada tulisan dan hafalan. Pengujiannya pun ditulis, bukan bagaimana berperilaku yang baik.

Bagaimana metode pengajaran yang baik? Al-Quran menjelaskan "*Ud'û ilâ sabîli rabbika bi al-hikmah wa al-maw'izhah al-hasanah wa jâdilhum bi al-latî hiya ahsan.* Jadi, ada tiga metodologi untuk mengajak kepada kebaikan. *Pertama*, dengan hikmah (kebijaksanaan), maksudnya disesuaikan dengan kondisi atau kon-

teksnya. Kita mesti arif dan bijaksana dalam menetapkan apa sebetulnya poin syariah? Misalnya, tentang minuman keras atau judi. Mungkin seseorang berjudi karena frustasi, tidak tahu lagi apa yang tengah atau akan dilakukannya. Mungkin mereka ingin lari dari problem kehidupan yang menghimpit dengan kenikmatan sesaat. Jadi, penanganan sosialnya harus secara *hikmah*.

Kedua, bi al-maw'izhah al-hasanah, maksudnya dengan tutur kata yang baik dan teladan. Artinya, ketika hendak mengajak supaya jangan korupsi, tetapi pemimpin-pemimpin kita sendiri banyak yang korupsi. Padahal masyarakat Indonesia cara pandangnya masih sangat paternalistik, melihat ke atas, mencontoh para pemimpinnya. Itu yang saya maksud negara harus bertanggung jawab, karena telah mengakibatkan suatu kondisi yang bobrok. *Ketiga, wa jâdilhum bi al-latî hiya ahsan,* dan ajaklah memperdebatkan setiap persoalan dengan cara yang sehat dan baik.

Artinya, apakah syariat Islam seharusnya diimplementasikan umat di negeri ini tidak dengan memformalkan nilai-nilai Islam?

Benar. Formalisasi syariah tidak akan bisa berhasil, karena banyak sekali kemunafikan dan standar gandanya. Menurut saya, fokus utamanya adalah pendidikan. Tetapi, lagi-lagi, konsep pendidikan yang dijiwai dengan tiga cara itu, *bi al-hikmah wa al-maw'izhah al-hasanah wa jâdilhum bi al-latî hiya ahsan.* Misalnya, kita merujuk pada keteladanan para Walisongo ketika mereka berdakwah. Mereka tidak langsung menerapkan ajaran dan nilai normatif Islam secara tekstual dan dengan pemaksaan, tetapi dengan *hikmah*, yakni bertahap dan menciptakan prakondisi. Itulah *hikmah* (bijaksana).

Bagi mereka, hal-hal yang tidak substansial tidak menjadi masalah. Misalnya soal istilah. Di Yogyakarta ada istilah *sekaten*, yang sebenarnya berasal dari kata *syahâdatayn*. Mereka membiarkan tradisi tersebut dan tidak mempermasalahkan dengan aksentuasi atau pengucapan Jawa. Yang penting, bagi mereka, nilainya tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal. Sebab, dalam pandangan mereka Islam Mengajak kepada moralitas agama, kewajiban-kewajiban dasar agama. Jadi, *hikmah* artinya juga bisa membedakan antara yang substanstif, antara yang pokok, dengan yang formal.

Namun, kembali pada persoalan pendidikan, saya kira, negara tetap harus bertanggung jawab, tidak bisa lepas begitu saja. Kalau pendidikan dilepaskan ke *civil society,* masyarakat Islam yang di negeri ini merupakan warga negara yang kebanyakan miskin tidak akan mampu membangun pendidikannya. Karena dari umat Islam yang berjumlah 80% hanya sedikit umat yang bisa mengajar. Artinya, dalam pendidikan, berapa jumlah orang yang mampu mendidik ada syaratnya. Sedangkan di masayarakat hanya berapa% dari umat Islam yang mampu, bukan hanya mengakses, dalam pengertian memberikan fasilitas pendidikan. Dan, menurut saya, justru menjadi hak warga negara, dalam hal ini umat Islam, untuk mendapat pendidikan. Sebab itu menjadi bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya yang tidak lain menjadi kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan yang baik.

Apabila diterjermahkan dalam mekanisme yang praksis, menurut Anda bentuk sinergi yang ideal antara civil society dan negara itu seperti apa, yang mengacu pada nilai-nilai hikmah, al-maw'izhah al-hasanah dan wa jâdilhum bi al-latî hiya ahsan?

Jadi kembali saya tekankan, *pertama,* prosesnya adalah pendidikan. *Kedua*, pendekatannya harus *bottom up* dari *civil society,* kemudian negara menampung. Sebab, pada dasarnya yang mempunyai *resource*, akses sumber daya adalah negara; sementara kebutuhan di tangan rakyat. Maka dalam konteks seperti inilah sebisa mungkin kita berusaha menerjemahkan kebutuhan warga negara – yang kemudian mengaitkannya dengan *resources* – bagaimana hal tersebut dapat bersinergi supaya kebutuhan bisa dipenuhi oleh yang mempunyai *resources* (negara).

Maka dari itulah saya tidak percaya dengan formalisasi syariah karena pendekatannya *top down* dan sangat politis. Sebab, kalau sudah maemasuki ranah yang politis, kita akan berbicara penampilan para elit saja, bukan malah membangun *civil society* yang adil dan setara. Artinya, formalisasi syariah hanya menjadi komoditas elit tertentu, termasuk di sini elit agama. Jika demikian, maka apa yang dilakukan mereka sangat berbahaya, karena menggunakan agama untuk menambah kekuatannya. Sebab, kalau kita membaca buku Khaled Abou El-Fadl, *Speaking in*

> Saya juga termasuk kelompok penentang liberalisme. Karena saya melihat liberalisme sangat identik dengan liberalisme ekonomi atau pasar bebas. Dan semua itu adalah sumber dari malapetaka Dunia Ketiga, khususnya di Asia dan Afrika yang sebagian besar Muslim. Indonesia bangkrut seperti ini karena mengikuti anjuran liberalisme IMF. Sungguhpun demikian, saya sangat menjunjung dan menganjurkan *liberal thinking*.... *Liberal thinking* tidak berarti harus menghasilkan liberalisme. *Liberal thinking* bisa mendorong pluralisme dan sekularisme positif yang menghasilkan persaudaraan. *Liberal thinking* tidak jumud atau stagnan, justru lebih kontekstual.

a God's Name, yang mengelaborasi dengan baik persoalan otoritas, di mana ketika satu orang atau sekelompok orang diberikan otoritas, maka ada kecenderungan berubah menjadi otoritarian. Namun, yang paling tidak kita inginkan, dan buku ini dengan sangat tegas mewanti-wanti, adalah kalau otoritas ini diinvestasikan kepada elit agama tertentu, karena kemungkinannya sangat besar untuk berubah menjadi otoritarian. Mereka, para elit agama, akan menggunakan teks-teks suci agama untuk memberikan justifikasi dan legitimasi *power*-nya. Hal ini sangatlah berbahaya karena kemudian masyarakat umum melihat sepak-terjang atau manuver politik para elit agama sebagai representasi dari Tuhan – di samping para elit agama sendiri merasa mempunyai legitimasi atau otoritas untuk menafsirkan teks-teks Tuhan ini. Itu yang terjadi sekarang.

Padahal di dalam Islam tidak ada yang namanya mediator antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, dalam Islam pintu ijtihad dibuka. Di dalam al-Quran banyak sekali ayat mengenai penggunaan akal, misalnya *afalâ ta'qilûn, afalâ tatafakkarûn* (apakah kamu tidak berakal? apakah kamu tidak berpikir?). Jadi, pada prinsipnya, *existing* akal merupakan satu ciri dari Islam. Tidak lantas umat menyerahkan sepenuhnya kepada pemimpin agama, dalam pengertian "taklid buta", yang kemudian tanpa melihat substansi dan *values* dari ajaran Islam itu sendiri.

Masih terkait dengan pendidikan, dalam hal ini korelasinya dengan penyebaran ilmu pengetahuan. Dulu Natsir di samping menolak pemisahan antara agama dengan negara, juga menolak sekularisme yang dipahami sebagai pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral (agama dan tradisi). Tetapi yang menjadi persoal-

an adalah ketika pendidikan atau pengetahuan tentang agama yang diajarkan atau disebarkan di Indonesia terlampau normatif, hanya berkutat pada halal-haram dan benar-salah. Bagaimana Anda melihat ini semua?

Idealnya, makna dan sikap normatif bukan semata karena kesempitan cara pandang. Bagaimanapun saya juga tidak setuju dengan gagasan pemisahan antara ilmu pengetahuan dan moralitas. Moral, menurut saya, harus ada di mana-mana. Coba bayangkan sekarang apabila seorang ahli *hightech* tidak bermoral, ia dapat dengan mudah *menilep* uang orang lain, karena ia memakai mesin komputer untuk menipu dengan mengotak-atik angka. Artinya, yang menjadi keresahan kita bersama sekarang ini adalah betapa negeri ini tengah mengalami krisis moral. Banjir, misalnya, tidak lain karena moral. Kenapa saya mengaitkan antara banjir dengan moral? Bayangkanlah kalau pemimpin kita, penguasa DKI Jakarta ini, mepunyai tanggung jawab moral, di mana seharusnya dia berkewajiban memikirkan rakyat, bukan dirinya sendiri. Sebab, kalau alasannya tidak adanya uang untuk mengatasi banjir, pada sisi tertentu dana triliunan malah dia pakai untuk bikin busway, sebaliknya yang lebih penting, banjir, malah dia biarkan. Yang selalu jadi alasan adalah tidak adanya dana.

Lantas, kenapa dalam hal ini pemerintah provinsi DKI Jakarta terlihat lain *attitude*-nya terhadap busway dan banjir? Setidaknya ini dapat dimengerti karena banjir itu *cost center,* sedangkan busway *profit center*. Mereka bisa mendapatkan uang dari proyek busway. Tetapi, pertanyaan yang muncul kemudian, kenapa pihak pemerintah provinsi DKI sampai timbul paradigma yang justru mengabaikan kepentingan warga Jakarta yang lebih luas? Karena, menurut hemat saya, moralnya sudah tidak ada. Moralnya bukan

lagi untuk rakyat, tetapi untuk mereka yang mempunyai kekuasaan dan tidak ragu memanipulasinya. Hal ini kalau dibiarkan terus-menerus tanpa intervensi negara, kapan berakhirnya? Celakanya, pada level negara sendiri, patut dipertanyakan negara yang mana? Masalahnya sekarang tidak ada yang bisa dijadikan sebagai *modelling*, sebagai *al-maw'izhah al-ḥasanah.*

Tetapi ilmu pengetahuan di Barat begitu sekular, di mana dialektika perkembangannya terjadi tanpa memasukkan unsur moral agama – dalam konteks ini demikianlah di antara batasan ilmiah dan objektif dalam konsepsi mereka tentang ilmu pengetahuan – lalu kenapa lebih maju dan aplicable daripada ilmu pengetahuan yang tumbuh dalam khasanah Islam?

Benar, begitulah di antara cara ilmu pengetahuan Barat dapat berkembang dengan pesatnya. Namun demikian, kita juga jangan sampai menutup kemungkinan bahwa moralitas sumbernya bisa jadi dari agama dan non-agama. Dari awal saya katakan: yang jelas *science* itu tidak boleh dipisahkan dari moral, apakah moral itu bersumber dari agama maupun non-agama. Tetapi maksud saya kalau untuk sekularisme Amerika, sejak dulu, *background* sejarahnya mencoba untuk tidak mengaitkan otoritas agama dengan negara. Dulu oleh otoritas Gereja mereka dipersekusi, menjadi pelarian orang Eropa ke Amerika. Kendati begitu, saya masih melihat kelompok Bingham di Utah, demikian juga Gereja Luther Seven Day, yang merupakan kelompok sekte yang sampai sekarang masih dipersekusi. Mereka terus dikejar-kejar oleh Gereja di Eropa kemudian melarikan diri.

Maksud dari uraian saya begini: di Indonesia kita sudah punya modal, yaitu religiusitas. Kita tidak usah mencari kiblat ke Amerika. Karena *background* sejarah kita dan Amerika berbeda.

Tetapi, religiusitas kita jangan dipraktikkan seperti sekarang dengan sangat *superficial*, hanya permukaannya saja, kemudian dari atas *top down* dengan berselingkuh memakai kekuasaan negara. Bukan itu yang saya maksudkan. Religiusitas dalam Islam misi utamanya adalah akhlak. *Innamâ bu'itstu li-utammima makârim al-akhlâk.* Misi utama Risalah Muhammad adalah menegakkan akhlak yang agung. Anda jadi ahli teknologi setinggi apa pun, misalnya, kalau tidak berakhlak, buat apa?

Menurut saya, umat Islam takut terhadap pluralisme karena dibungkus dalam istilah Barat, *pluralism*. Coba kalau dimunculkan dari bahasa al-Qur'an sendiri, *jam'iyah* misalnya atau *ta'aduddiyah*. Dengan peminjaman istilah-istilah Arab ini, menurut hemat saya, tidak akan terjadi resisten dari mereka. Hal tersebut sama dengan rumitnya umat Islam merespon jender. Jender, sejatinya, sepenuhnya ajaran Islam, kalau lihat di al-Qur'an banyak sekali ayat yang mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tetapi karena istilah jender datang dari Barat, maka menjadi seolah-olah negatif.

Kendati, lagi-lagi, harus ditekankan bahwa moral bisa bersumber dari agama ataupun non-agama, filsafat misalnya. Untuk konteks Indonesia, kita sudah punya modal, marilah para pemimpin Islam negeri ini untuk menggunakan modal keberagamaannya dengan benar. Jangan sampai sebaliknya justru malah agama dijadikan alat untuk menindas orang lain. Jadi, untuk konteks keindonesiaan, saya tetap percaya bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan negara. Tetapi

harus digarisbawahi, agama di sini dalam pengertian yang benar, cara beragamanya tidak sekadar permukaan saja dan jangan sampai memanipulasinya untuk kepentingan-kepentingan sempit dan sesaat bagi pribadi ataupun golongan tertentu.

Gagasan liberalisme mendapat resistensi yang kuat di Indonesia karena dianggap oleh banyak orang menyebarkan paham yang bebas tanpa batas. Liberalisme juga dipahami sebagai gagasan yang melahirkan kolonialisme, imperialisme bahkan fasisme. Semua itu, bagi mereka yang menentangnya, justru menjadikan negara Dunia Ketiga sebagai negeri-negeri yang ditindas dan selalu menjadi korban, lantaran liberalisme menjadikan kapitalisme sebagai gerbong dalam upaya-upaya ekspansinya. Bagaimana Anda sendiri melihat gagasan ini?

Saya juga termasuk kelompok penentang liberalisme. Karena saya melihat liberalisme sangat identik dengan liberalisme ekonomi atau pasar bebas. Dan semua itu adalah sumber dari malapetaka Dunia Ketiga, khususnya di Asia dan Afrika yang sebagian besar Muslim. Indonesia bangkrut seperti ini karena mengikuti anjuran liberalisme IMF. Sungguhpun demikian, saya sangat menjunjung dan menganjurkan *liberal thinking*.

Saya mengkritik liberalisme ekonomi, yang salah satu langkahnya, di Indonesia, dibuktikan dengan pencabutan subsidi BBM tahun 2005. Bahkan, pencabutan itu didukung oleh para intelektual negeri ini. Mereka secara terang-terangan memasang iklan di *Kompas* satu halaman penuh, mengatasnamakan diri Freedom Institute. Di situ ada nama Romo Magnis Suseno, Ulil Abshar-Abdalla, dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah itu *by design* atau *by default*. Tetapi saya tidak setuju dengan pendapat liberal semacam itu.

Liberal thinking tidak berarti harus menghasilkan liberalisme. *Liberal thinking* bisa mendorong pluralisme dan sekularisme positif yang menghasilkan persaudaraan. *Liberal thinking* tidak jumud atau stagnan, justru lebih kontekstual. Sebaliknya liberalisme terkait erat dengan globalisasi dan segala macam kritiknya. Terhadap gagasan ini ada pihak yang pro, kontra, dan ada yang mencoba berpikir lepas dari bayang-bayang liberalisme yang berwujud neo-imperialisme.

Liberal thinking juga tidak membuat segalanya menjadi liberal. Karena liberal pun punya moralitas. Kunci moralitas dalam liberal adalah agama ataupun hati nurani, bagi yang tidak beragama.

Dapatkah bercerita tentang pengalaman Anda, dahulu, bekerja di Multinational Coorporation *yang notabene agen-agen kapitalisme?*

Benar, itu pengalaman saya sudah lama sekali, di suatu perusahaan minyak. Memang, pengalaman itu menyenangkan. Kalau kita sakit, kita berobat di rumah sakit yang VIP, gajinya besar. Tetapi saya yakin Tuhan mengatur hidup saya sesuai dengan kehendaknya. Sebab ada fase-fase di mana kehidupan saya sangat terbantu dengan pengalaman kerja di sana. Misalnya, waktu sudah nikah dan kebetulan suami saya sakit, sedangkan saya harus mengumpulkan *back up* dari segi ekonomi. Namun, harus diakuai, satu hal yang saya tidak suka adalah bagaimana *environment* kita diambil, dibawa keuntungannya ke luar negeri. Betapa keuntungan *owner*-nya sangat berlipat dan sebaliknya hanya sedikit yang tersisa untuk kesejahteraan penduduk Indonesia. Demikianlah teorinya Adam Smith, "bapak" kapitalisme yang menghendaki pasar bebas. Jadi, tidak apa-apa ada *gap* antara *owner* yang kaya-raya dan para pekerja atau warga yang sumberdaya alamnya dikeruk sehingga ke-

hidupannya tetap saja miskin. Sebab, begitulah akumulasi modal yang dikehendaki kapitalisme, yang tidak mempertimbangkan *gap* kesejahteraan.

Mereka, para pekerja, mendapatkan gaji. Begitupun saya, waktu itu mendapatkan gaji yang bagi saya sudah besar sekali dibandingkan para pekerja yang lain atau yang bekerja di tempat lain. Tetapi apabila dibandingkan dengan keuntungan yang dibawa ke negara mereka, tentunya, jauh berlipat. Data-data perputaran uang di negara maju dapat dilihat di *Economist,* sebagian saya kutip untuk keperluan diskusi atau bahan-bahan tulisan saya. Sebagai contoh, orang sekaya Bill Gates diceritakan tidak mau mengambil uangnya yang "jatuh" hanya karena memakan waktu, yang jika dibandingkan, nilainya lebih besar apabila dia tetap melakukan aktivitas bisnisnya. Tetapi yang jelas bahwa *gap* antara yang kaya dan miskin itu luar biasa menganga.

Meskipun demikian, tetap saja muncul hal-hal lain yang tidak *fair*. Saya mendapatkan pengalaman yang cukup menggelikan bagaimana masyarakat Barat, yang kaya-kaya itu, memberikan penilaian yang pejoratif terhadap umat Islam. Beberapa waktu lalu saya di University of South Carolina, Georgia mengajar *Islam and Human Rights*. Topik khusus untuk saya adalah *Womens and Human Rights under Syaria.* Itu merupakan program *Islam and Human Rights* untuk *graduate program*. Awalnya mereka mengajak berkenalan. Kemudian saya melontarkan pertanyaan: *what do you know about Indonesia? What do you know about Islam?* Peserta diam semuanya. Saya lantas bertanya lagi, sebutkan satu kata yang identik dengan Islam? Mereka masih diam semua. Kemudian, lama-lama mereka pun bilang: *terrorism*. Terus saya bilang, "Jadi pengertian Anda tentang Islam seperti itu!?".

Amartya Sen dalam bukunya Development as Freedom mencita-citakan keadilan dengan mengandaikan negara yang bebas, liberal, di mana tidak ada hal-hal yang dapat mengekang warga negaranya untuk memperoleh kesejahteraannya. Arti bebas di sini adalah terdapat distribusi kepada rakyat yang miskin agar memperoleh akses dan terbebaskan dari ketiadaan mendapat akses seperti pendidikan yang baik, kesehatan yang layak dan seterusnya yang harus diatasi oleh negara. Bagaimana Anda memandang pentingnya iklim kebebasan suatu negara?

Dalam konteks keindonesiaan kita tentunya mengenal Bhinneka Tunggal Ika. *Founding fathers* kita sepakat untuk membentuk sebuah negara-bangsa, bukan negara agama, meskipun mayoritas warganya beragama Islam. Jangan sampai ada pemaksaan dalam beragama. Bagaimanapun bangsa ini terikat pada nilai-nilai yang tercakup dengan Deklarasi Universal HAM, yang intinya semua orang memiliki kebebasan yang sama.

Saya setuju. Tetapi dalam beberapa hal kita patut memberikan catatan. Karena selama ini banyak hal yang definisinya menggunakan standar ganda. Demokrasi yang dituntut Amerika, misalnya, untuk kriteria sebuah negara, adalah demokrasi hanya sebatas prosedural, sebatas pemilu. Tetapi substansi demokrasi tidak menjadi *concern* mereka. Padahal, demokrasi yang hanya prosedural bisa berujung pada pembajakan demokrasi itu sendiri, misalnya agama dijadikan alasan untuk legitimasi penindasan rakyat, melelui partai-partai yang membawa bendera agama maupun melalui penetapan regulasi yang berbasis formalisasi agama.

Jadi, pandangan Amartya Sen benar, bahwa negara harus ikut bertanggung jawab, termasuk distribusi yang adil. Sebab, masalah

kita sekarang adalah redistribusi dan pembangunanisme, sebagaimana juga diserukan oleh almarhum Mansour Fakih. Bagaimana mungkin jika negara ini berkeinginan untuk membangun tetapi rakyat malah digusur. Lantas, di mana letak moral para penyelenggara negara? Saya suka miris melihat di televisi Satpol Pamong Praja (PP) yang mengobrak-abrik pedagang kaki lima. Katakanlah mereka sebagai warga melanggar aturan negara, tetapi pertanyaannya: aturan itu dipakai untuk apa?

Rakyat mempunyai hak dasar manusia: hidup layak dan bekerja mencari nafkah. Itu bagian *human rights.* Makanya negara bertanggung jawab memenuhi *human rights* tersebut. Tetapi sekarang, pada kasus pedagang kaki lima, rakyat sudah tidak banyak menuntut haknya. Sebaliknya mereka kreatif menciptakan lapangan kerja sendiri. Dan kreativitas itu sekarang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia setelah ditimpa krisis moneter.

Saya pernah beroleh pengalaman bagaimana suatu aturan tidak berpihak pada rakyat dan sebaliknya diperuntukkan bagi kepentingan elit politik. Waktu itu, saya mengajar training para panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Kita mengikuti standar *United Nation* (UN), membuat RANHAM *National Committe*. Ini bukanlah membuat Komnas HAM baru, tetapi lebih merupakan bagian dari berbagai lini untuk mempromosikan HAM. Peserta training terdiri dari beragam latar belakang: kalangan birokrat, LSM dan sebagainya. Saya mengajari mereka tentang persoalan jender. Ketika saya bicara pelbagai masalah pelanggaran hak perempuan yang tengah mengemuka di Aceh, semua "menunduk". Mengapa? Karena syariah sudah di-*teken* atau ditetapkan sebagai peraturan, jadi semuanya harus tunduk tanpa mampu berbuat untuk mengatasi pelanggaran atas hak perempuan

yang justru direstui oleh pemerintah melalui perda syariah. Mereka hanya menunduk, tidak ada argumen lain yang menyeruak. Ini ironis. Padahal HAM atau sebuah aturan intinya diperuntukkan demi kepentingan rakyat, bukan penguasa. Lantas di mana hati nurani dan kejernihan berpikir para penguasa kita?

Anda demikian menguasai isu womens and human rights under syaria. Komnas Perempuan pernah melakukan sebuah riset dengan temuan: perda-perda syariah yang diterapkan di beberapa wilayah Indonesia memuat 29 butir perda yang membatasi aktivitas perempuan. Bagaimana Anda melihat perda syariah dan eksistensi perempuan dari sudut pandang HAM?

Selama ini kata syariah terus menjadi ajang kontestasi. Semuanya memakai dan mengklaim syariah sebagai pembenaran atas suatu kepentingan tertentu. Mulai dari perda syariah, bank syariah, asuransi syariah, mungkin nanti bisa jadi ada film syariah. Lantas, apa yang dimaksud dengan syariah itu sendiri? Itu yang menjadi inti persoalan sekarang. Syariah didefinisikan dengan amat beragam sesuai kepentingan yang hendak dicapai masing-masing orang atau kelompok. Kalau saya menjadi penguasa dari masyarakat yang mayoritas Muslim dan ingin menunjukkan kekuasaan saya untuk menindas orang lain, akan lebih efektif kalau saya memakai istilah syariah. "Ini syariah *lho*, kalau Anda melawan syariah, berarti kafir dan masuk neraka", itu mungkin yang akan saya katakan.

Demikianlah risikonya. Karena definisi syariah direduksi oleh imajinasi kuasa. Syariah dipahami sebagai "pemaksaan": pewajiban memakai jilbab, perempuan harus tutup aurat, tidak boleh keluar rumah karena menimbulkan fitnah dan memancing perzinaan. De-

finisi ini hanya bagian kecil dari satu kesatuan sistem besar. Kalau mau mengatakan syariah secara *kâffah* (lengkap), coba Anda lihat secara keseluruhan. Semua misi Islam adalah syariah. Tetapi, apakah Islam hadir hanya untuk pewajiban memakai jilbab atau membuat perempuan dikurung di rumah? Bukankah tujuan utamanya adalah *rahmatan li al-'âlamîn*. Itu yang harus dipahami.

Apakah tujuan Islam yang rahmatan li al-'âlamîn sudah bisa menjamin dan melindungi hak dan kebebasan perempuant? Bukankah kalangan konservatif dengan pemahaman mereka sendiri menganggap Islam yang mereka dakwahkan juga dalam pengertian rahmatan li al-'âlamîn?

Kita mesti kembali ke uraian paling dasar ihwal Islam. Memang, tidak dapat dipungkiri terdapat *gap* antara tujuan Islam dengan realitas empiriknya. Kalau kita berbicara ihwal *rahmatan li al-'âlamîn*, apakah memadai apabila tujuan tersebut hanya dapat dicapai melalui jilbabisasi atau dengan cara perempuan dirumahkan. Bagaimana dengan korupsi, problem pendidikan, ekonomi, kesejahteraan. Jadi hendaknya umat Islam berupaya menangkap spirit syariah secara *kâffah*, tidak secara politis, karena nuansa politis hanya mencari popularitas. Coba kita buktikan, apakah perda syariah hanya diukur dengan berjilbab dan memakai baju koko lantas sudah bisa dikatakan berislam *kâffah*. Tentu tidak sesederhana itu.

Apakah dalam syariah, yang tidak lagi dipahami secara sempit, hak-hak dan kebebasan perempuan untuk berekspresi dijamin oleh Islam?

Ya, dijamin. Ini bisa dilihat dari perintah untuk *amar ma'rûf nahy munkar*. Dalam al-Quran, perintah *amar ma'rûf nahy munkar* bukan perintah khusus laki-laki atau khusus perempuan. Tetapi berlaku untuk semuanya. Itu menunjukkan bahwa perempuan bukan hanya boleh menegakkan *amar ma'rûf nahy munkar,* tetapi wajib. Perintah itu dimungkinkan jika perempuan tidak hanya di rumah atau wilayah domestik. Tetapi, tentu saja, perempuan juga harus terjun ke masyarakat, melihat apa yang sedang terjadi di masyarakat, apakah kondisinya baik atau buruk. Di situlah perempuan berperan sebagai da'i, mendakwahkan Islam yang *rahmatan li al-'âlamîn* untuk menegakkan *amar ma'rûf nahy munkar*.

Bagaimana dengan ayat al-rijâlu qawwâmûna 'alâ al-nisâ, bukankah ini membatasi eksistensi perempuan pada wilayah publik?

Masalahnya terletak pada perbedaan interpretasi: tekstual dan kontekstual. Sejak awal pembentukan fikih pada abad kedua sampai ketiga Hijriah, ada ahli *ra'yi* dan ahli Hadits. Hanafi yang ahli *ra'yi,* misalnya, lebih rasional. Sedangkan Hanbali yang ahli Hadits dan banyak diikuti di Saudi Arabia sangat tekstual. Jadi, sejak awal memang sudah ada kecenderungan yang berbeda dalam melihat hukum Islam. Sampai sekarang pun juga begitu, sehingga perlu adanya kontekstualisasi melalui reinterpretasi.

Karena sudah menyejarah, dua kutub pemikiran yang didasarkan pada model penafsiran yang bersebrangan ini (tekstual dan kontekstual) bila memperdebatkan satu pandangan keagamaan tidak akan ketemu. Buktinya ketika ada masalah poligami yang heboh di TV, misalnya, antara yang pro dan kontra, tidak bisa ketemu dalam satu kesimpulan bersama. Karena yang pro-poligami secara

tekstual menganggapnya perintah agama, dengan mendasarkan diri pada dalil "*fankihû mâ thâba lakum min al-nisâ'i matsnâ wa tsulâtsâ wa rubâ' fa in khiftum an lâ ta'dilû*". Mereka begitu saja memaknainya dengan sangat tekstual sebagai perintah tanpa melihat konteks *asbâb al-nuzûl*-nya secara kritis. Sedangkan yang kontra melihat *asbâb al-nuzûl*-nya secara kritis dengan ragam pendekatan: sosiologis, antropologis dan ekonomis. Akibatnya, pertentangan tersebut tidak bisa didamaikan.

Bisa Anda eksplorasi lebih jauh tentang poligami dan bagaimana sikap Anda sendiri terhadap isu ini?

Ada tulisan saya di *Kompas* tanggal 11 Desember 2006 perihal isu poligami. Judulnya *Wabah itu Bernama Poligami.* Saya tidak banyak mengeksplorasi sisi teologis dari poligami yang intinya memperdebatkan kaitannya teks dan konteks. Saya lebih mengaitkan dengan aspek psikologis, sosiologis, dan perdebatan hermeneutika. Sebagai seorang perempuan, saya melihat selama ini terbukti banyak hukum Islam kurang memiliki perspektif tentang perempuan. Dalam hal poligami, siapa yang menentukan dan mendefinisikan bahwa poligami adil? Apakah adil itu hanya menyangkut material saja, atau cinta dan giliran seks? Sebab, sejatinya, hal-hal tersebut dalam praktiknya yang mendefiniskan adalah laki-laki.

Yang menjadi problem utama, selama ini, perdebatan dalam fikih tidak ada perspektif perempuan. Demikianpun ihwal poligami. Saya istilahkan dalam *Kompas* sebagai "poligami membisukan suara hati perempuan". Dalam hal ini yang saya tekankan bukan poligaminya, tetapi lebih pada perdebatan tentang poligami itu sendiri selama ini yang justru membisukan suara hati perempuan. Saya ambil contoh

istri seorang da'i kondang yang beberapa waktu lalu melangsungkan poligami (Aa Gym), dalam artikel tersebut tidak saya tulis jelas namanya. Dalam kasus tersebut, Teh Nini, istri pertama, di depan wartawan masih mengembangkan senyumnya dengan mengatakan ikhlas suaminya kawin lagi. Tetapi siapa yang tahu perasaan sesungguhnya di dalam hatinya. Dia sendiri (Teh Nini) mengatakan cemburu, dengan alasan "namanya juga cinta". Jadi, persoalannya tidak berhenti hanya karena kecintaannya terhadap suaminya lalu dijadikan alasan untuk cemburu. Yang harus disimpulkan di sini: ada ketidakadilan dalam setiap praktik poligami.

Selama ini perempuan tidak diberi peluang untuk mengungkapkan perasaannya secara apa adanya. Atau, kalaupun di kedalaman lubuk hatinya sudah diberi kesempatan, tetapi kemudian poligami dengan rapi dibungkus dengan dogma, maka sulit bagi perempuan untuk dapat bersuara. Artinya, suara perempuan dinafikan karena selalu terbentur dengan doktrin agama. Celakanya, karena doktrin agama, seolah-olah kita harus mengikuti tanpa terlebih dahulu menakar berbagai kemungkinan yang membawa persoalan ini menjadi benar-benar adil bagi hak-hak perempuan. Agama pada dasarnya bertujuan membawa kemaslahatan. Kemaslahatan bukan hanya lahiriah tetapi juga batiniah. Pada posisi inilah yang menurut hemat saya perlu meng-*counter* pemahaman poligami yang *mainstream*. Dalam konteks ini juga perlu ditelisik lebih mendasar lagi terutama pada wilayah psikologis perempuan. Sebab, bagaimanapun juga di kedalaman hati seorang perempuan pasti ada perasaan cemburu apabila suaminya menikah lagi.

Pertanyaannya: kenapa mereka, kaum perempuan, dapat bertahan? *Pertama*, karena alasan sosial-budaya mereka lebih memilih mempertahankan keluarganya. Sebab, masyarakat kita masih men-

stigma janda apalagi janda muda. Kadang-kadang secara umum banyak ibu-ibu bilang takut suaminya direbut orang lain, terutama janda-janda muda yang lekat dengan stereotip sebagai penggoda suami orang. Jadi, takut mendapatkan stigma janda, lalu mereka tidak memilih perceraian.

Kedua, masalah ekonomi. Pada waktu dia, sebagai seorang istri, masih produktif (bekerja atau membantu suami) dan begitu besar mendedikasikan dengan penuh cinta kepada suami, maka bagi seorang suami belum dengan semena-mena berpoligami. Tetapi, begitu istrinya sudah tidak dapat bekerja lagi, terlebih dari awal memang menggantungkan urusan ekonomi pada suami, maka dengan tanpa menenggang perasaan istrinya, suami mudah sekali menikah lagi. Jadi, ada ketergantungan ekonomi. Karena dari awal dia sengaja tergantung kepada suami dan karena segenap cintanya pula dia percaya. Kemudian dengan alasan-alasan inilah, secara psikologis, dia tidak bisa lari lagi.

Demikianlah beberapa faktor yang menjelaskan sulitnya posisi perempuan di tengah masyarakat dalam menghadapi persoalan poligami. Jadi, itu semua kalau kita sudah membicarakan dalil agama sebagai doktrin poligami sebagaimana terdapat doktrinnya dalam al-Quran, maka aspek-aspek di luarnya – psikologis, sosiologis, ekonomis dan perdebatan hermeneutikanya – tidak akan muncul. Sebab, yang ada hanyalah teks yang sangat kaku.

Dengan pengertian lain, ketika berhadapan antara teks dan konteks apakah diperlukan tafsir yang liberal?

Ya, penafsiran yang liberal sangat dibutuhkan. Tetapi, itu perlu digawangi dengan moralitas. Standar moralitas tidak harus

baku. Moralitas hendaknya selalu berubah. Sungguhpun demikian, yang terpenting dari tujuan moralitas adalah semangat yang membawa keadilan dan kemaslahatan. Misalnya tentang warisan satu banding dua (1:2). Kalau konteksnya waktu dan tempat di mana Nabi hidup, dengan kondisi geografis yang gersang dan panas dan secara antropologis masyarakatnya mempunyai karakter cukup keras, perempuan tidak bekerja, maka 1:2 itu sudah adil. Sebab, kaum perempuan secara ekonomis sangat tergantung pada kaum lelakinya. Ini menjadi bukti bahwa Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Tetapi, ketika konteks masyarakatnya berbeda dan umat Islam sudah jauh berubah untuk konteks sekarang, perempuan harus diberdayakan secara maksimal. Diberi kesempatan berkreasi di ruang publik. Itulah penafsiran liberal yang penuh nilai moral: penuh dengan kemaslahatan.

> Di dalam Islam tidak ada yang namanya mediator antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, dalam Islam pintu ijtihad dibuka. Di dalam al-Qur'an banyak sekali ayat mengenai penggunaan akal, misalnya *afalâ ta'qilûn, afalâ tatafakkarûn* (apakah kamu tidak berakal? apakah kamu tidak berpikir?). Jadi, pada prinsipnya, *existing* akal merupakan satu ciri dari Islam.

Apabila membincang hak-hak politik perempuan, pada pemilu 2004 dalam UU Parpol diatur 30% kuota perempuan. Kalau menurut Anda sendiri kondisi hak-hak politik perempuan di Indonesia sudah cukup ideal atau belum, dan bagaimana Anda memandang realitas politik yang berlaku dengan diperundangkannya kuota 30%?

Kita tidak usah bicara 30%, sebab untuk 20% saja keterlibatan perempuan dalam ruang politik, DPR, pada kenyataannya belum sampai. Kebijakan ini merupakan *affirmative action*, namun demikian tampak tidak jelas dan tegas, apabila menilik bunyi redaksi yang terdapat dalam UU Partai Politik, karena di sana dikatakan bahwa setiap partai *dapat* atau *boleh* mencalonkan perempuan sampai 30%. Jadi, redaksinya bukan *harus*. Akibatnya tidak ada konsekuensi atau sanksi mengikat bagi partai-partai yang tidak mematuhi untuk mencapai kuota 30%. Inilah bukti hegemoni laki-laki masih kuat. Sehingga tidak salah kalau perempuan anggota parlemen di bawah 10%.

Jika dibandingkan, kondisi hak-hak politik perempuan negara ini jauh berbeda dengan negara Burundi, sebuah negara di benua Afrika yang baru merdeka. Kebetulan saya pernah dipanel dengan anggota parlemen Burundi. Dari situlah saya tahu bahwa anggota parlemennya sebanyak 30% lebih adalah perempuan. Dan secara kuantitatif sebanyak sepertiga dari jumlah menterinya adalah perempuan, termasuk jabatan-jabatan menteri yang penting dan strategis yang biasanya diduduki laki-laki. Berbeda dengan perempuan Indonesia yang hanya diberi jabatan menteri pada pos-pos tertentu, seperti Meneg Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan.

Ini bukti bahwa pemberdayaan perempuan di bidang politik masih sangat lemah. Laki-laki masih memegang hegemoni kuasa. Pemberdayaan perempuan masih setengah-setengah: terlalu banyak pemasungan bagi hak-hak politik perempuan.

Jika melihat dari segi kualitasnya – setelah melalui tahapan demokrasi prosedural, pemilu 2004, dengan kebijakan kuota 30% – apakah

wakil dari perempuan yang duduk di parlemen sudah bisa menyuarakan hak-hak perempuan?

Ya, saya cukup apresiatif dengan para wakil perempuan, khususnya terkait dengan agenda menggolkan UU KDRT tahun 2004. Kendati demikian, hal tersebut lebih merupakan upaya bersama, terutama peran wakil perempuan di parlemen, Komnas Perempuan, dan sejumlah LSM perempuan lainnya sangat besar. Kalau sinergi itu dapat terus dijalankan, maka sangat besar manfaatnya bagi pemberdayaan perempuan, walaupun wakilnya di parlemen tidak seberapa.

Tetapi beberapa waktu yang lalu ada informasi dari beberapa media bahwa RUU APP (Anti-Pornografi dan Pornoaksi) akan terus diupayakan agar dapat digolkan?

Saya masih tidak percaya dan sulit untuk menerima apabila RUU APP disahkan. Sebab, masih banyak standar ganda di sana. Saya khawatir, tanpa menyiapkan kondisi sosial lewat pendidikan, RUU itu nantinya malah menjadi alat untuk melegitimasi penindasan. Misalnya, ada perjudian para tukang becak yang uangnya hanya berkisar Rp. 5.000,- an. Mengapa mereka berjudi? Saya kira tidak untuk mencari kekayaan. Mereka tahu tidak akan kaya dari berjudi. Mengapa tetap dilakukan? Tentu saja karena negara tidak peduli terhadap nasib mereka. Bukankah seharusnya negara terlebih dahulu yang harus diperkarakan karena melanggar syariah: telah mengabaikan nasib warganya yang miskin?

Hal yang sama juga (kontradiksi dan ambiguitas aturan pemerintah) terjadi dalam perda syariat Islam yang diturunkan melalui qanun-qanun di Aceh. Istilahnya "qanun" biar kedengarannya se-

perti dari Arab, sumber asli Islam, padahal istilah itu serapan dari "*canon law*" istilah dari tradisi Katolik. Yang lebih memprihatinkan lagi, pada implementasinya terdapat banyak standar ganda. Misalnya, qanun tentang *khalwat*. Pernah ada kasus penangkapan anak yang di pinggir pantai berdua. Atau kasus seorang anak SMA yang rumahnya dikunjungi cowoknya pada malam minggu, ketika mereka sedang duduk-duduk di teras tiba-tiba ditangkap aparat. Tetapi, giliran seorang ketua partai yang didapati bersama perempuan bukan muhrim di hotel, malah tidak ditangkap. Jelas sekali ada standar ganda.

Kisah lainnya ketika RI-GAM damai dan tentara ditarik. Ada upacara penarikan, setelah itu ada salah satu tentara yang mencium pacarnya, gadis Aceh asli, sebagai tanda perpisahan. Adegan itu difoto dan masuk ke media massa. Tetapi anehnya tidak ada tindakan atau sanksi apapun. Saya tanyakan kepada Kepala Dinas Syariat Islam, "Kenapa tidak dihukum?". "Itu *kan* tentara. Syariat Islam tidak untuk tentara", begitu jawabnya. Demikianpun ketika diketahui ada seorang jaksa disuap, masuk koran juga, kenapa jaksanya tidak dihukum? "Jaksa itu mempunyai atasan, jadi atasannya yang menghukum, bukan syariat", begitu lagi jawabnya. Terus saya bertanya tentang ketua partai yang ketahuan ber-*khalwat* di hotel tetapi tidak diapa-apakan. Jawabnya sama: "*kan* ada atasan partainya". Ini bukti masih ada standar ganda dan masih ada tebang pilih.

Artinya, standar ganda dalam perda syariat Islam memberitahukan kita semua betapa hak-hak dan kebebasan rakyat kecil dan perempuan, juga kalangan terpinggir lainnya selalu dikorbankan.

Benar, perempuan dan orang yang lemah menjadi pihak-pihak yang akan terus tertindas dalam sistem yang menerapkan perda syariah. Sebab syariah hanya dijadikan komoditas politik bagi penguasa yang tiranik dan otoriter.

Tentang kebebasan beragama, misalnya, ada penafsiran liberal dari seorang tokoh perempuan Muslim, Prof. Dr. Amina Wadud, karena berani menjadi imam dan khatib dalam salat Jum'at dengan jamaahnya bercampur laki-laki dan perempuan di sebuah gereja di Manhattan, New York. Padahal secara normatif (doktrin agama) perempuan tidak boleh menjadi imam untuk laki-laki. Bagaimana Anda menanggapinya?

Definisi syariah direduksi oleh imajinasi kuasa. Syariah dipahami sebagai "pemaksaan": pewajiban memakai jilbab, perempuan harus tutup aurat, tidak boleh keluar rumah karena menimbulkan fitnah dan memancing perzinaan. Definisi ini hanya bagian kecil dari satu kesatuan sistem besar. Kalau mau mengatakan syariah secara *kâffah* (lengkap), coba Anda lihat secara keseluruhan. Semua misi Islam adalah syariah.

Ya, sebetulnya itu satu kasus saja. Sebenarnya banyak hal di mana dibutuhkan penafsiran liberal atas agama yang mendorong umat untuk lebih menghargai kebebasan, kesetaraan dan keadilan. Artinya masalah dasarnya adalah bagaimana kita memperlakukan fikih. Bagaimanapun juga fikih sejatinya produk-produk yang dibuat sekian abad yang lalu. Dari sana muncul mazhab-mazhab yang paling kuat, mulai dari Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi, yang dimulai sejak tahun 150 Hijriah sampai 250-an (abad kedua dan ketiga Hijriah). Jadi, sudah 13 abad yang lalu.

Celakanya, dari waktu ke waktu hampir tidak tersentuh oleh reformasi yang signifikan.

Sebenarnya ada banyak usaha mereformasi fikih, misalnya forum *bahtsul-masâ'il* di lingkungan NU. Namun, umumnya bukan pada isu yang sudah ada di fikihnya, tetapi lebih pada isu-isu yang belum ada dalam fikih, misalnya pembahasan bayi tabung dan operasi ganti kelamin. Sedangkan hal-hal yang sudah ada ketentuannya dalam fikih hampir tidak direformasi, meskipun konteksnya sudah berbeda. Padahal, hal-hal seperti ini yang menurut kita perlu dilakukan reformasi.

Masalahnya lagi, apabila syariah, dalam hal ini fikih, direformasi, ada kekhawatiran nanti orang-orang Islam akan meninggalkan agama, dalam arti menganut cara pandang sekular. Kompleksitas permasalahan ini dijelaskan dengan baik oleh Abdullahi Ahmed An-Naim, dalam bukunya *Secularism vis a vis Syaria* dan buku lainnya *Toward an Islamic Reformation*. Karena itu An-Naim menempatkan istilah *v*is *a vis* untuk menggambarkan hubungan yang terjadi antara syariah dan sekularisme. An-Naim sebaliknya berupaya meyakinkan orang dengan menunjukkan: apabila syariahnya tidak direformasi, justru muncul kekhawatiran di mana orang lari ke sekularisme dan meninggalkan agama. Hal ini tentu tidak diinginkan. Caranya adalah melakukan reformasi dan dekonstruksi terhadap syariah. Masalahnya oleh umat Islam fikih selama ini menjadi disiplin ilmu agama yang paling diutamakan, mengalahkan tauhid dan akhlak.

Hampir setiap berbicara perihal agama, maka siapapun merasa harus mengaitkannya dengan fikih. Kalau seseorang ditanya tentang Islam, tentu jawabannya seputar fikih dulu, seperti salat, zakat, puasa dan haji. Islam tidak dipandang atau diukur dari akh-

laknya, apakah dia suka menolong orang lain atau tidak. Kemudian karena keberagamaan tadi sangat diidentikkan dengan fikih, kemudian fikih menjadi, seolah-olah, sakral. Karena sakral, bagi siapa yang berani mengubah fikih lantas dianggap sama seperti mengubah Islam. Ini yang harus didekonstruksi.

Upaya untuk mendekonstruksi fikih mendesak segera dilakukan oleh umat Islam. Sebab, sebagaimana dikatakan oleh KH. Husein Muhammad, misalnya, produk fikih sangat misoginis atau patriarkis, berpusat pada laki-laki. Bagaimana pemahaman Anda sebagai aktivis perempuan perihal upaya mendekonstruksi fikih agar menumbuhkan keberagamaan yang adil dan setara?

Ini pekerjaan yang luar biasa berat. Karena, *pertama,* sudah diciptakan *image* di tengah masyarakat Muslim bahwa dekonstruksi ataupun reformasi atau – dalam bahasa yang lebih lazim bagi umat Islam – ijtihad hanya bisa dilakukan oleh ulama. Apa lacur, mayoritas ulama, dengan ijtihad-ijtihadnya, identifikasinya adalah laki-laki. Sehingga mudah dimengerti apabila kemudian pandangan mereka kebanyakan tekstual. Banyak sekali ulama laki-laki yang kurang mempunyai perspektif perempuan. Tetapi tidak semua ulama berpandangan sempit dan bias jender. Salah satunya adalah ayah saya (KH. Mahfud Anwar) yang berusaha melampaui tafsir misoginis terhadap agama. Ayah saya merupakan seorang ulama yang dapat menjadi contoh, *role model* yang sangat progresif. Terus terang saja ketika saya berbicara perihal cara pandangnya di luar masyarakat "santri", banyak yang bilang (heran): mengapa sampai bisa dari pesantren tetapi pemikirannya sangat liberal dan menghargai perempuan?

Ayah saya merupakan menantu *hadlratusysyaykh* Hasyim Asy'ari. Menikahi ibu saya yang bernama Abidah Maksum ketika masih berusia 13 tahun dan belum sempat sekolah. Ayah sayalah yang mengajari Ibu. Meski sebenarnya sejak kecil, ibu sudah sering mendengarkan pengajian Mbah Hasyim Asy'ari. Ayah seorang hakim, yang juga pendiri fakultas Ushuluddin di IAIN Surabaya. Hal yang paling dia nikmati adalah mengaji dengan orang-orang di desa. Beliau membuka pondok di dekat Tebu Ireng, namanya Pondok Seblak.

Ibu saya, dari sisi bapak, adalah keturunan dari Kiai Maksum Ali, penulis kitab *sharaf*. Sementara dari sisi ibu, beliau putri dari Mbah Khairiyah Hasyim, salah seorang putrinya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi, ibu saya adalah cucunya Hasyim Asy'ari. Kemudian bapak saya yang mengajari Ibu saya mulai dari membaca dan menulis, sampai ibu saya menjadi seorang politikus (anggota DPRD Konstituante) dan mengajar ngaji di mana-mana. Ketika saya tanya prinsip yang mendasarinya sehingga bapak saya menghormati hak-hak perempuan, beliau menjawab justru pada penafsiran surat an-Nisa ayat 34: *al-rijâlu qawwâmûna 'alâ al-nisâ'*.

Kata *qawwâmûna* kalau menurut bapak saya artinya membuat berdiri, jadi memberdayakan (*empowerment)*. Karena *tasrif*-nya adalah *qâma – yaqûmu - qawman*. *Qâma* itu berdiri, sedangkan *qawwâmûna* membuat berdiri. Laki-laki yang sudah diberi kekuatan lebih, menjadi pemimpin, kenapa masih harus menindas perempuan. Tentu saja siapapun tidak boleh semena-mena seperti itu. Prinsip ini dibuktikan bapak saya bukan hanya dalam omongan, tetapi juga dalam perilaku.

Hal ini dibuktikan, misalnya, ketika Ibu saya menjadi anggota DPRD tahun 1951 – tahun kelahiran saya. Pada waktu itu

ibu harus dinas, menjalankan tugasnya. Sedangkan perjalanan dari Seblak ke Jombang kira-kira 8 km. Pada waktu itu saya yang masih bayi dan tidak mungkin dibawa ibu sambil bertugas. Sebab, saat itu tidak ada kendaraan mobil, tetapi naik andong. Sehingga aku dititipkan ke seorang ibu yang mempunyai anak. Bagaimanapun pada tahun 1951 belum ada susu formula. Sungguhpun demikian, bapak tetap mendorong karir ibu. Kemudian ketika ibu saya harus pergi ke Bandung untuk sidang Konstituante, sebenarnya ibu saya nggak mau, karena anaknya masih kecil, tetapi bapak saya bilang: "Biarlah saya yang menangani anak-anak, saya bisa mendidik anak." Jadi teks *qawwâmûna 'alâ al-nisâ'* ini dimaknai sebagai memfasilitasi, mendukung dan memberdirikan kaum perempuan.

> Religiusitas kita jangan dipraktikkan seperti sekarang dengan sangat *superficial*, hanya permukaannya saja, kemudian dari atas *top down* dengan berselingkuh memakai kekuasaan negara. Religiusitas dalam Islam misi utamanya adalah akhlak.

Dan satu lagi, tentang nafkah. Bapak saya berkata: (memberi) nafkah tidak boleh asal saja. Misalnya, kalau seorang istri terbiasa mengonsumsi suatu makanan tertentu sebagaimana ia peroleh sebelumnya, maka sebagai suami harus siap. Begitupun kalau istrinya tidak bisa masak, suami harus membantu. Hal-hal seperti itu dibuktikan oleh bapak saya. Tentu saja, sekarang kebanyakan lelaki tidak mau membantu istrinya. Sebenarnya banyak contoh lagi yang menggambarkan betapa bapak saya seorang yang terbuka dan sangat menghargai perbedaan. Misalnya ketika menerima pendeta dan romo dari Belanda dan Amerika, satu Kristen dan dua Katolik, bapak saya membiarkan mereka menginap di pon-

dok (pesantren) kami. Bapak membiarkan mereka yang laki-laki ke masjid menunggu para santri salat. Setelah itu mereka berdiskusi dengan santri dan berdialog juga bersama bapak saya. Ini merupakan bentuk toleransi.

Mengenai pendidikan bagi anak-anaknya, bapak saya menyekolahkan anak-anaknya di sekolah umum. Untuk saat itu cukup aneh kalau anak kiai sekolah di umum, bukan di madrasah atau pesantren. Kakak saya yang perempuan dokter, ada yang insinyur, sedangkan saya sendiri sekolahnya mengambil Bahasa Inggris. Pendidikan saya dari MI NU, PGAP, PGAA kemudian melanjutkan Bahasa Inggris di IKIP Surabaya dan IKIP Jakarta. Setelah itu saya terjun ke dunia "kapitalisme", manajemen dan konsultan. Baru kemudian saya mengambil konsentrasi antropologi, itulah potret keluarga kami yang progresif.

Lembaga Anda CePDeS (Center for Pesantren and Democracy Studies) sering melakukan advokasi ke pesantren-pesantren. Pertanyaannya, bagaimana upaya untuk menafsirkan ulang fikih yang misoginis di dalam lingkungan pesantren yang kesehariannya terlampau fikih oriented?

Lembaga kami waktu pra-pemilu 2004 kemarin mengadakan program *Rising Awareness* untuk *political rights* (hak-hak politik) kaum perempuan. Jadi, kami ingin menyadarkan hak-hak politik kaum perempuan di pesantren dan masyarakat sekitarnya bahwa kita mempunyai hak untuk berbeda dalam memilih. Di antaranya: *pertama,* perempuan mempunyai hak memilih. Hal ini jelas karena hendaknya di antara semua elemen masyarakat, terutama jender, tidak ada diskriminasi. *Kedua*, mereka boleh berbeda dari

suami, dari laki-laki atau dari kiainya sekalipun. *Ketiga*, mereka juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri. Bahkan, kita mengatakan bahwa perintah *amar ma'ruf nahy munkar* merupakan *part of the obligation,* suatu keharusan bagi perempuan juga, tidak hanya laki-laki, untuk terjun di wilayah publik (politik).

Yang patut disayangkan, budaya kita masih sangat menyegregasi antara ranah domestik dan publik. Perempuan berada di wilayah domestik seperti memasak dan mencuci; sementara dunia publik (politik) milik laki-laki. Demikianlah yang selama ini kaprah mengendap di alam pikiran masyarakat. Hal ini nyata ketika salah satu peserta meyakini bahwa politik itu dunianya lelaki. Jadi, yang mau kita terobos dan bongkar adalah pandangan segregatif tersebut yang dibungkus dengan ayat-ayat sebagai bentuk justifikasi agama atas kekuasaan laki-laki. Kemudian kita juga meng-*counter* Hadits yang mengatakan bahwa akan rusaklah masyarakat kalau dipimpin oleh perempuan. Lantas kami menjelaskan konteksnya.

Dalam proses kegiatan tersebut banyak dari peserta perempuan yang mengatakan, "Kita *kan* perempuan." Artinya mereka sendiri tidak mau dan resisten dengan ide-ide yang menjadi bagian dari program *Rising Awareness* untuk *political rights*. Kemudian fasilitator kami menjelaskan bahwa dalam program ini harus dibedakan antara budaya dan agama. Memang, itu suatu hal yang tidak mudah. Sebab, dalam benak mereka sudah terbentuk suatu hegemoni pemikiran yang sangat kental bahwa perempuan tempatnya di lingkup keluarga (urusan rumah tangga). Jika perempuan keluar rumah dan kemudian keluarganya terbengkalai maka yang patut disalahkan perempuan. Paradigma seperti ini yang harus kita bongkar terlebih dahulu.

Sebenarnya perubahan budaya patriarki yang paling ideal dimulai dari keluarga. Dan itu sangat mungkin. Ayah saya membongkar budaya patriarki sampai saya merasa tidak ada pembedaan dan diskriminasi lelaki-perempuan. Justru setelah saya menikah dan terjun di masyarakat, baru saya tahu ternyata kaum perempuan selama ini diperlakukan dengan tidak adil. Keterkejutan ini saya sadari karena di ranah keluarga kami tidak pernah dibedakan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi, perbedaannya sebatas pada: Anda ingin ke mana, bakatnya apa? Tetapi bapak saya selalu menekankan bagaimana semua anaknya harus sekolah sampai perguruan tinggi, baik perempuan maupun laki-laki. Tentu saja ini bagi masyarakat luas tidak mudah. Kakak perempuan saya tahun 1960-an masuk di Kedokteran Universitas Airlangga. Kiai-kiai di Jombang pada waktu itu menggunjing dan mencibir, "Kiai Mahfud anak perempuannya disekolahkan di Kedokteran, mau jadi apa, paling nanti kembali lagi ke pesantren." Dalam konteks tahun 60-an hal-hal seperti itu dianggap tidak mungkin. Tetapi kalau sekarang sudah banyak anak kiai yang disekolahkan di luar negeri. Sementara tahun 1960-an ibu saya sudah melanglang buana ke mana-mana. Lagi-lagi, bapak saya yang mendorong.

Hal ini disebabkan oleh *frame of thinking* bapak saya yang meyakini betul bahwa *amar ma'rûf nahy munkar* menjadi kewajiban setiap orang, laki-laki dan perempuan. Jadi pertanyaannya, bagaimana pemikiran semacam ini bisa menyebar luas di tengah masyarakat sementara kenyataannya, apabila melihat psikologisnya, pada diri para lelaki masih saja tertanam: rasa takut dan terancam – karena budaya kita yang sangat patriarkis. Konsepnya adalah pokoknya laki-laki harus lebih; malu kalau kalah sama perempuan. Jadi, kenyataannya yang terjadi malah suami-suami yang menghambat

langkah perempuan. Terus terang saja saya sendiri juga berproses untuk sampai pada kondisi seperti sekarang. Puluhan tahun saya bermanuver dengan suami saya supaya dia tidak merasa terkalahkan, karena pribadi saya kritis sekali. Ini biasanya tidak semua orang bisa, dan seringnya di situ perempuan menyerah.

Terkadang ada kekhawatiran dari masyarakat kalau semuanya berperan di sektor publik kemudian yang di rumah tidak ada yang mengurus, keluarga menjadi berantakan. Bagaimana menanggapi hal itu?

Urusan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan. Lihat, di al-Quran saja nama suratnya Lukman! Jadi, sebetulnya seorang bapak yang bertanggung jawab juga mau mengurus pendidikan anak-anaknya. Bapak saya membuktikan hal ini. Bapak saya tidak pernah melemparkan tanggung jawabnya begitu saja atas pendidikan anak-anaknya ke ibu saya. Sebaliknya bapak saya mengurus pendidikan kami, anak-anaknya. Sedangakan secara umum orang laki-laki terus-menerus mensegregasi mana wilayah pekerjaan perempuan (istri) dan lelaki (bapak), misalnya seorang ayah yang melulu mengurus bisnis kantor dan mencari uang, sementara urusan anak-anak mulai dari makan, sekolah dan semuanya diserahkan pada ibu. Itu tidak benar.

Science itu tidak boleh dipisahkan dari moral, apakah moral itu bersumber dari agama maupun non-agama.

Jadi, jangan dipisah antara tanggung jawab laki-laki (wilayah publik) dan perempuan (wilayah domestik). Hendaknya menjadi tanggung jawab bersama. Buktinya saya bisa tunjukkan: anak saya ada tiga. Perempuan semua. Yang pertama lulus ITB, yang kedua

sekarang S2 Psikologi di Universitas Airlangga, yang ketiga lulusan UI Akuntansi. Mereka *al-hamdulillâh* tidak ada yang nakal dalam arti, misalnya, mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau melakukan seks bebas yang tidak bertanggung jawab. Padahal saya begitu aktif di luar (persoalan publik). Dalam pengertian lain, adalah mitos kalau keluarga rusak yang kemudian harus dijadikan kambing hitam adalah perempuan. Pandangan seperti ini sudah seharusnya disingkirkan. Sebab, semua itu menjadi tanggung jawab bersama.

Ihwal affirmative action untuk perempuan, apakah tidak malah mendiskriminasi perempuan, karena memposisikan kaum perempuan sebagai pihak yang selalu perlu diberikan perlakuan berbeda, atau justru memberdayakan perempuan lantaran kondisi masyarakat dengan kultur dan seluruh sistemnya yang memang tidak memihak?

Affirmative action bisa juga disebut *positive discrimination*. Jadi memang hal itu dapat dimengerti sebagai tindak diskriminasi, tetapi positif. Namun yang harus dipahami mengapa *affirmative action* harus diberikan pada perempuan karena terdapat dasar hukum dan dasar sosialnya. Legitimasi hukum dan sosiologisnya memang sangat diperlukan. Hal tersebut mengingat selama ini perempuan tertinggal jauh sekali oleh karena budaya patriarki sangat mendiskriminasikan perempuan. Akibat peminggiran ini, perempuan ketinggalan di hampir seluruh aspek kehidupan. Adalah tidak *fair* kalau perempuan dalam kondisi seperti itu harus bersaing secara bebas dengan laki-laki yang sudah punya *privilege* diuntungkan oleh budaya patriarki.

Jadi, kesepakaan seperti itu dari PBB, termasuk resolusi PBB di mana Indonesia jadi terikat karena ikut meratifikasi *the Con-*

vention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW). Makanya Indonesia memasukkan isu ini ke dalam UU Politik, meskipun masih setengah-setengah.

Kemestian *affirmative action* ini sama persis dengan argumentasi saya melawan liberalisme ekonomi. Jadi, saya mempunyai justifikasi hukum dan sosiologisnya untuk menentang liberalisme ekonomi. Karena bayangkan saja orang-orang yang penghasilannya Rp. 10.000 per hari harus bersaing bebas dengan mereka yang pendapatannya milyaran. Akhirnya yang miskin modal gulung tikar. Dan sudah berapa saja yang gulung tikar karena menjadi korban globalisasi pasar bebas ekonomi ini.

Teori politik liberal tidak selalu menganut paham ekonomi pasar bebas yang menyingkirkan peran negara dalan persoalan ekonomi. A Theory of Justice dan Political Liberalism-nya John Rawls menuntut negara memberikan akses kepada setiap disadvantage (kaum yang tidak beruntung, termasuk perempuan). Mestinya negara memberikan akses pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan pada kalangan dlu'afâ', termasuk terhadap perempuan. Artinya liberal dalam pengertian Rawls paralel dengan apa yang dicita-citakan Anda. Lantas, apakah Anda juga punya anggapan bahwa affirmative action mestinya diarahkan bahwa negara juga mempunyai kewajiban terhadap pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang?

Bukan hanya John Rawls yang berkeyakinan bahwa pemihakan diperlukan bagi yang lemah, itu sudah eksplisit dalam berbagai komitmen Indonesia. Mulai dari konstitusi negara ini sampai komitmen HAM, di mana *Universal Declaration of Human Rights* dari awal sudah menyatakan untuk menegakkan prinsip kesetaraan

semua orang tanpa diskriminasi, termasuk soal jender. Keyakinan seperti itu tampak juga di artikel saya di *The Jakarta Post* tentang jender, tanggal 29 Desember 2006. Di situ saya bicara perihal konferensi di Beijing, yang sudah jelas sekali sampai teknis operasionalisasinya, yakni diidentifikasi 12 *area of concern*. Jadi Beijing Conference tentang perempuan tahun 1995 yang temanya *equality development peace* telah mengidentifikasi area yang sangat penting untuk kaum perempuan. Area itu adalah pendidikan, kesehatan, dan lainnya, sampai tingkat operasionalisasinya sudah didetailkan di Konferensi Beijing.

Sungguhpun demikian, Beijing Platform, tahun 2005, tetap mengidentifikasi sekian banyak persoalan perempuan di dunia karena begitu sulitnya membongkar budaya patriarki yang sudah merambah dan menggurita ke berbagai sektor kehidupan, termasuk dampak globalisasi bagi perempuan. Coba Anda lihat sekarang, bagaimana nilai-nilai yang tengah marak dan tiada habisnya menguasai perempuan. Materialisme, konsumerisme bahkan eksploitasi seksual terhadap perempuan sudah sangat rentan. Semua bermuara pada kapitalisme yang menghendaki perempuan "dijual". Apalagi kini dimudahkan oleh transnasionalisme (lepas batas), tidak adanya batas geografis negara. Mudah sekali orang melakukan penerbangan dan pelbagai bentuk komunikasi untuk mendukung komodifikasi perempuan. Maka banyak perempuan dikirim ke Jepang, Hongkong dan sebagainya, yang dijanjikan untuk dipekerjakan di pabrik, ternyata dijadikan budak prostitusi. Itu semua akibat dari globalisasi.

Apakah itu yang dikhawatirkan banyak kalangan di mana globalisasi justru menyeragamkan budaya, lantaran segalanya sekadar mengikuti

setiap skenario para kapitalis dan mengabaikan suara-suara lain yang tersingkir dan berbeda, termasuk perempuan?

Dalam ranah budaya sekarang ini yang berlaku adalah komodifikasi. Semuanya diatur dan dianggap barang yang bisa diperjualbelikan. Misalnya budaya berpakaian yang berkiblat pada "Amerikanisasi", baik model jeans atau model-model lainnya yang baru *ngetren*. Demikianpun dengan makanan di mana banyak orang lebih memilih McDonald ketimbang makan singkong. Jadi, kalau mau bangga, maka makannya di mall, di McDonald dan minumnya Pepsi Cola.

Upaya penyeragaman budaya dan gaya hidup ini sejatinya sangat bertentangan dengan gagasan pluralisme yang mencoba menghargai dan merayakan perbedaan. Tetapi, penyeragaman dan penunggalan lebih kental lagi terjadi dalam ranah agama. Karena itu banyak kalangan agamawan yang menentang pluralisme. Pluralisme menjadi momok menakutkan bagi kaum Muslim, terutama, karena dipahami sebagai sinkretisme atau penyamaan bahwa semua agama adalah benar. Pluralisme juga dianggap dapat berujung pada relativisme?

Saya kira, seperti juga sekularisme, definisi pluralisme mesti diperjelas lagi. Bagi saya pluralisme merupakan *sunnatullâh*. Hal ini sudah jelas sekali diuraikan al-Quran, *innâ khalaqnâkum min dzakarin wa untsâ wa ja'alnâkum syu'ûban wa qabâ'ila li-ta'ârafû*. Itu sudah menjadi dasar yang sangat eksplisit bahwa Allah menciptakan semua itu dalam bingkai pluralisme. Manusia dilahirkan di tengah pluralitasnya. Oleh karena itu Tuhan menyuruh manusia untuk saling memahami dan bergandengan.

Kemudian bagaimana dengan hubungan satu sama lainnya juga sudah diatur dan ada ketentuannya: *Lakum dînukum waliya dîn.* Itu juga menunjukkan sudah ada aturan tentang ko-eksistensi yang damai (*peaceful co-existnce*) dalam Islam.

Tetapi saya melihat berbagai resistensi umat Islam terhadap pluralisme tidak bisa lepas dari dua sisi fundamentalisme: fundamentalisme agama dan fundamentalisme ekonomi. Sebab keduanya saling terkait seperti lingkaran setan. Jadi, selama fundamentalisme ekonomi (pasar bebas) menjadi dominan dan menghasilkan kemiskinan yang luar biasa di masyarakat Muslim; dan negara Muslim yang kaya juga bersikap kapitalistik; kemudian ada jarak yang begitu besar antara yang kaya dan yang miskin. Dan kedamaian ko-eksistensi yang benar-benar damai sulit diwujudkan. Maka ada dua cara mereka melakukan resistensi terhadap ketidakadilan. *Pertama*, pasrah, *nrimo* dengan alibi agama. Mereka mengalihkan orientasi pemikirannya ke akhirat. Semua itu adalah takdir. Pandangan tersebut sangatlah fatalistik. *Kedua*, mereka melawan. Secara umum mereka melihat bahwa ketidakadilan itu adalah akibat dari Amerika. Mereka tidak bisa membedakan: Amerika secara politik administratif, politik internasionalnya Bush, ataupun rakyat Amerika sendiri yang berbeda-beda pola pikirnya. Akhirnya mereka menggeneralisir saja Amerika sebagai musuh. Dari kedua sikap itulah fundamentalisme agama mewujud nyata.

Kalau menurut saya, umat Islam takut terhadap pluralisme karena dibungkus dalam istilah Barat, *pluralism*. Coba kalau dimunculkan dari bahasa al-Quran sendiri, *jam'iyah* misalnya atau *ta'addudiyah*. Dengan peminjaman istilah-istilah Arab ini, menurut hemat saya, tidak akan terjadi resisten dari mereka. Hal tersebut sama dengan rumitnya umat Islam merespon jender. Jender, se-

jatinya, sepenuhnya ajaran Islam, kalau lihat di al-Quran banyak sekali ayat yang mendorong kesetaraan laki-laki dan perempuan. Tetapi karena istilah jender datang dari Barat, maka menjadi seolah-olah negatif.

Saya pernah berdebat dengan khatib salat tarawih di mushala rumah saya. Dia mengatakan jender merupakan keberhasilan Barat melemahkan akidah umat Islam. Akhirnya saya yang kasih ceramah sesudah dia. Itu dilakukan untuk meng-*counter* pendapatnya. Saya bilang, "Bapak yang jelas saja dan *fair* dalam menimbang persoalan!". Dia bilang bukti bahwa jender itu keberhasilan Barat dalam melemahkan akidah Islam adalah sekarang banyak perempuan yang keluar rumah dan itulah penyebab pelacuran. Saya bilang: "Ya Allah, Bapak ini bagaimana: pelacuran tidak bisa terjadi oleh perempuan sendiri, pasti ada laki-laki, terus kenapa pihak perempuan saja yang disalahkan? Memangnya Bapak mau kalau istri Bapak keluar rumah terus dibilang pelacur, mau tidak?" Saya bilang begitu.

Alasan umat Islam, terutama MUI, mengharamkan pluralisme karena gagasan ini diidentikkan dengan sinkretisme yang dipahami bahwa semua agama sama benarnya. Karena tugas MUI merasa harus menjaga atau membentengi agar akidah atau iman umat Islam tidak dilemahkan oleh pluralisme, maka cara yang paling mungkin adalah mengharamkannya. Bagaimana Anda melihat semua itu?

Menurut saya umat Islam jangan terjebak sindrom inferior, yaitu merasa tidak percaya diri. Kenapa kita sebagai Muslim merasa tidak *confident*? Saya sebagai orang Islam PD (percaya diri) ke mana-mana, ke Eropa, ataupun ke Amerika. Saya berceramah

dan menegaskan bahwa saya Muslim. Saya tampilkan betapa indahnya ajaran Islam. Sewaktu saya berceramah di Rotterdam, saya tunjukkan bagaimana sebetulnya ajaran Islam tentang perempuan. Saya juga sampaikan kenyataan dalam masyarakat Muslim bagaimana perlakuannya terhadap kaum perempuan. Lantas mereka mengatakan, *you make Islam beautiful*. Saya bilang: "Ya memang Islam itu cantik. Yang tidak cantik adalah orang Islam yang selalu menafsirkan agamanya demi kepentingan politiknya, individu maupun kelompok".

Jadi, saya kira, rasa *confident* harus betul-betul ditanamkan pada diri umat Islam. Sebab dasarnya sudah menjadi ketentuan dalam al-Quran: kita hidup dengan bermacam-macam suku, agama, ras, etnis. Hal tersebut jelas dalam al-Quran. Namun demikian, kenapa sekarang kita mempersempit diri, menjadi kehilangan kepercayaan untuk mengatakan, "Ok *we co-exist*. Ok, kita hidup bersama-sama." Memang, bagaimanapun juga inferioritas umat Islam tidak lepas dari perekonomian umat yang memprihatinkan. Jadi, pada satu sisi, pemikiran para pemimpin kita sudah sangat ekonomi *oriented*, di mana rakyatnya dibawa ke cara berpikir ekonomis yang memang, pada sisi lainnya, ada ketimpangan luar biasa. Tetapi hendaknya hal ini tidak harus menjadikan kita minder sebagai Muslim.

Terjemahan yang paling praktis tentang pengakuan kebenaran agama lain adalah melalui pernikahan beda agama. Pandangan Anda terhadap konsep pernikahan beda agama bagaimana?

Itu kembali pada pola pikir umat Islam masing-masing. Bagaimanapun juga masyarakat Muslim Indonesia model beragamanya berbasis pada fikih. Sedangkan dalam fikih menegaskan bahwa laki-

laki Muslim boleh menikahi perempuan *ahl al-kitâb*, sebaliknya perempuan Muslimah tidak boleh menikahi laki-laki *ahl al-kitâb*. Jadi, itu interpretasi tekstual yang selama ini menghalangi umat Islam, terutama kaum perempuannya, untuk melakukan pernikahan beda agama. Hal ini diadopsi dari mazhab-mazhab fikih. Demikianlah yang menjadi panutan kuat umat Islam. Sehingga masih memungkinkan pernikahan beda agama, tetapi hanya berlaku bagi laki-laki yang Muslim dengan perempuan non-Muslim. Kecuali ada suatu ijtihad baru dengan pendekatan metodologi dari *ushûl al-fiqh* yang liberal, misalnya, dikeluarkan hukum bahwa perempuan Muslimah pun bisa menikah dengan laki-laki non-Muslim. Jadi, menurut saya, untuk melihat persoalan bagaimana pandangan umat Islam terhadap agama-agama lainnya menjadi lebih terbuka, teristimewa pernikahan beda agama, maka fikih yang perlu lebih dahulu kita *reform*. Saya bukan ahli fikih, tetapi kira-kira kerangka berfikirnya seperti itu.

Mengapa pembaharuan fikih dianggap perlu?

Apabila menelisik dasar teologis dari pernikahan beda agama yang dirumuskan dalam fikih perkawinan, maka ketentuan al-Quran bahwa laki-laki Muslim boleh mengawini perempuan *ahl al-kitâb* dan sebaliknya perempuan Muslimah tidak bisa menikahi laki-laki non-Muslim, saya kira, itu juga ada asumsi dasar yang mengecilkan perempuan. Karena dipikirnya laki-laki serba berkuasa, bisa menentukan bahkan sampai agama anaknya. Sedangkan perempuan mahluk yang lemah. Namun demikian, kenyataan sosiologisnya justru berbeda. Karena yang mempunyai kedekatan dan intensitas lebih dengan anak balita pada fase pembentukan adalah ibu. Arti-

nya, sebenarnya yang menjadi *determining factor* bagi perkembangan anak adalah ibunya. Saya tidak mengerti kenapa al-Qurannya memandang seolah perempuan lemah. Artinya, realitas semacam ini perlu dikaji ulang secara sungguh-sungguh. Sebab fakta dalam pendidikan anak lima tahun ke bawah adalah di bawah pengaruh ibu, baru setelah itu bapak.

Penolakan terhadap pluralisme juga lantaran ia dipahami sebagai relativisme. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, pluralisme dapat berimplikasi pada andaian subjektivisme dan partikularisme yang bermuara pada relativisme. Yang perlu diantisipasi dalam perbincangan pluralisme adalah manakala partikularisme suatu nilai pada satu komunitas justru memelihara kearifan lokal yang tidak memihak terhadap perempuan. Artinya, pada satu sisi kita harus menghargai lokalitas, tetapi bagaimana dengan subaltern yang terpinggirkan dalam komunitas lokal, seperti kaum perempuan?

Jadi, hendaknya kita melihat budaya secara dinamis. Budaya selalu bergerak dan berubah. Berubahnya ke mana dan bagaimana, hal itu sangat tergantung dari manusianya juga. Apakah di lingkungan tertentu ada yang mempunyai kesadaran bahwa selama ini budaya telah membenarkan penindasan terhadap perempuan. Kalau tidak ada kesadaran seperti itu berarti budayanya akan statis dengan kondisi relasi jender yang diskriminatif. Kecuali nanti ada orang yang mempunyai perspektif berbeda yang sudah tercerahkan, kemudian masuk melakukan pendidikan, pencerahan, advokasi, baru akan terjadi kemungkinan perubahan budaya yang memperlakukan perempuan secara adil. Sehingga upaya tersebut menghasilkan suatu realitas yang egaliter.

Lantas apakah pluralisme mengandaikan nilai-nilai yang universal dengan meringkus lokalitas atau sebaliknya kita membiarkan ekspresi-ekspresi yang partikular berserak dan tetap dihargai, kendatipun menindas subaltern, karena dianggap sebagai kearifan lokal?

Ini perdebatan yang panjang. Sebab membahas kearifan lokal dibutuhkan perangkat yang luas dan dalam. Jadi, kalau saya seorang antropolog, maka saya mesti bermain dari sisi eksplorasi dalam diri seseorang, yaitu dengan perspektif dari dalam komunitas itu sendiri. Menurut saya, untuk menyimpulkan apakah tradisi dalam suatu komunitas lokal telah memperlakukan kaum perempuan secara adil atau sebaliknya, sangat tergantung pada kesadaran setiap individu masyarakat di dalamnya. Artinya, bagi mereka yang belum tercerahkan akan menerima menerima begitu saja tradisi yang ada, meskipun menindas perempuan.

Sebab, sulit untuk terjadi perubahan kalau tidak tumbuh kesadaran dari dalam. Kerapkali apa yang dicangkokkan dari luar tidak cukup memahami lokalitas. Misalnya suatu kali UNICEF mempunyai program "jambanisasi" di salah sebuah daerah di NTB. Namun kemudian jambannya justru tidak dipakai. Sebab, orang di sana merasa *comfortable* buang air di sungai. Bagaimanapun itu sudah menjadi tradisi. Bahkan buang air di sana menjadi fenomena sosial. Mereka bisa ketemu, saling menyapa dan membicarakan banyak hal. Sementara kalau sendiri dalam jamban, bagi masyarakat di sana, menjadi sesuatu yang aneh.

Jadi, di sini apa maknanya? Apa yang mungkin dilakukan bagi semua pihak? Menurut hemat saya harus melakukan pencerahan. Yakni upaya pencerahan yang paralel dengan nilai-nilai universal harus didorong. Jamban merupakan salah satu fenomena universal:

kebersihan. Sementara buang air di sungai adalah kenyataan lokal. Tetapi tradisi tersebut sangat bermakna bagi mereka. Hal itu telah menjadi kearifan di sana: ada silaturahminya.

Kemudian, sekarang bagaimana agar kearifan lokal seperti silaturahmi tetap terpelihara, tetapi fenomena universal dari jamban – agar masyarakat tidak buang air di sungai juga – terakomodasi. *Pertama,* ini perlu pendekatan dari bawah dan dari atas agar bisa bertemu. Upaya *bottom up* dan *top down* ini nanti akan bertemu pada suatu medium tengah. Jadi, kita tidak bicara sangat universal. Karena budaya tidak mungkin diabaikan begitu saja. *Kedua,* tidak selalu *local wisdom* mengandaikan sesuatu yang bajik dan adil – menurut standar umum. Termasuk ketika digulirkan kebijakan desentralisasi tahun 2000, masyarakat di daerah-daerah kemudian beramai-ramai menghidupkan budaya lokal. Celakanya, yang terjadi justru domestifikasi peran perempuan. Itu adalah contoh konkret. Hal ini juga diuraikan secara dalam pada tulisan saya di *The Jakarta Post* 29 Desember 2006.

Ketika kita membahas desentralisasi sebetulnya kebijakan ini merupakan inti demokrasi, karena pengambilan keputusan lebih menekankan pada aspirasi rakyat. Tetapi, yang perlu digarisbawahi, harus ada pengawalan terhadap proses desentralisasi ini. Karena kita tidak ingin terjebak pada kearifan lokal yang sebetulnya mundur, tidak menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis – kalau dilihat dari standar universal. Termasuk contohnya di sini (implementasi desentralisasi) menguatnya budaya patriarki. Budaya lokal yang membatasi peran perempuan, di dapur dan di sumur. Tentu saja, dengan desentralisasi, kita semua tidak berharap untuk kembali pada tradisi yang diskriminatif dan eksploitatif. Untuk itu kita

harus mempunyai parameter ke depan, yaitu keadilan. Inilah yang harus terus didinamiskan ke depan.

Misalnya, di salah sebuah daerah Indonesia bagian timur, terdapat tradisi menyuguhkan istri buat tamu?

Itu benar, ada. Di Afrika juga ada budaya unik yang polanya hampir sama, menjadikan perempuan sebagai kaum yang tersubordinasikan, begitupun di belahan dunia lainnya. Misalnya, seorang anak yang mau *bâligh* (dewasa) harus diajari seks terlebih dahulu oleh orang yang lebih tua. Ada juga tradisi di mana orang yang menstruasi "diasingkan" di tengah kebun. Ia dijauhkan karena dianggap kotor. Dan pelbagai jenis tradisi lainnya yang menurut standar universal sudah tidak patut lagi dipertahankan apalagi dilestarikan. Maka, lagi-lagi, kalau menghadapi budaya-budaya lokal sebagaimana dicontohkan di atas, semua pihak harus berupaya mengambil jalan tengah, yakni bagaimana nilai kearifan lokal secara substansi tetap terpelihara. Apa inti di balik menyuguhkan istri, misalnya. Jika substansinya adalah penghormatan yang luar biasa terhadap tamu, maka bagaimana penghormatan tetap di jaga, tetapi tidak lagi dengan cara menyuguhkan istri.

Wawancara dilakukan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2007

Percakapan dengan

Lutfhi Assyaukanie



Lutfhi Assyaukanie, Koordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) dan Direktur Eksekutif Religious Reform Project (Repro) Jakarta. Pengajar Sejarah Pemikiran Islam di Universitas Paramadina ini menyelesaikan sarjana muda di Fakultas Syariah Jordan University, Amman, Jordan, master di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Kuala Lumpur, Malaysia, dan doktor bidang Kajian Islam di University of Melbourne, Australia.

Hanya pada negara sekular demokrasi mungkin. Sebab landasan demokrasi adalah sekularisme, di mana domain negara dan agama senantiasa dinegosiasikan. Di sini demokrasi konstitusional menjadi keniscayaan – dan oleh elemen-elemen masyarakat yang plural sebuah konstitusi dibangun. Dengan begitu, secara institusional agama tidak boleh campur tangan menentukan kebijakan-kebijakan publik. Sekali agama masuk, ketegangan antarmasyarakat tak terhindarkan. Karena itu, jika, sebagai mayoritas, umat Islam di Indonesia menolak konstitusi lantas memaksakan ketentuan atau aturan Islam yang bertentangan dengannya, maka mayoritas telah menjelma *islamo-fascism*. Pada saat itulah yang sebenarnya terjadi adalah *illiberal democracy*, karena mengabaikan substansi yang terkandung dalam konstitusi.

Perdebatan tentang sekularisme di Indonesia bukanlah hal baru. Nurcholish Madjid (Cak Nur) telah memulainya sejak tahun 1970-an, meskipun dia menggunakan istilah 'sekularisasi.' Beberapa pihak menganggap ada perbedaan mendasar antara kedua istilah itu. Bagaimana pengertian sekularisme itu sendiri menurut Anda?

Secara umum ada tiga istilah yang merujuk pada akar yang sama. Pertama, *secularity* yang lebih terkait pada kondisi akal-pikiran (*state of mind*) seseorang. Kedua, *secularism* yang terkait dengan ideologi. Dan ketiga, *secularization* yang terkait dengan proses perkembangan sekularitas. Ketiga istilah ini dipakai pada konteksnya masing-masing. Dalam sejarahnya, istilah 'sekularisasi' muncul lebih awal daripada sekularisme. Sekularisasi muncul pada tahun 1648, ketika perdamaian Westphalia di Jerman ditandatangani. Saat itu, Eropa mengalami perang saudara yang dipicu oleh pertikaian agama tak berkesudahan. Perjanjian Westphalia menengahi konflik panjang itu dengan memberikan solusi pemisahan domain agama dan domain negara. Di sanalah istilah 'sekularisasi' pertama kali diperkenalkan.

Sementara istilah sekularisme dimunculkan pertama kali oleh George Jacob Holyoake pada pertengahan abad ke-19. Holyoake adalah seorang rasionalis yang percaya pada doktrin sekularisasi. Sebagai seorang filsuf, dia memberikan landasan ideologi terhadap proses sekularisasi yang dikaguminya itu. Dia menyebutnya 'sekularisme.' Awalnya istilah 'sekularisme' lebih dimaksudakan sebagai istilah yang netral, sebagai ideologi yang memisahkan antara agama dan negara. Tapi para pengikut Holyoake kemudian memaknai sekularisme sebagai ateisme. Sekularisme tidak lagi dianggap sebagai ideologi politik, tapi telah menjadi pemahaman filsafat yang bukan saja bermaksud meminggirkan peran agama dari negara, tapi juga

ingin mengusir Tuhan dari dunia ini. Ketika gerakan positivisme semakin menguat, sekularisme dan ateisme semakin identik.

Belakangan, pada dekade 1970-an, banyak sarjana di Barat berbicara tentang sekularisasi dari perspektif sosiologis. Di antara mereka adalah seorang sarjana Amerika yang pemikiran-pemikirannya banyak mengilhami Cak Nur, yakni Robert N. Bellah. Bellah berusaha menjelaskan aspek-aspek positif dari sekularisasi. Secara soiologis, sekularisasi dipahami bukan hanya sebagai pemisahan antara agama dan negara, melainkan pemisahan nilai-nilai yang suci (*sacred*) dari nilai-nilai yang tak suci (*profan*) dalam masyarakat. Karena itu, Cak Nur membicarakan sekularisasi dalam kerangka demistifikasi. Menurutnya, mitos-mitos yang ada di tengah masyarakat tidak kondusif untuk kehidupan dunia modern. Karenanya, diperlukan adanya pemisahan antara yang rasional dan yang tak rasional. Proses pemisahan itu bisa disebut 'sekularisasi,' atau lebih tepatnya 'profanisasi.'

> Faktanya, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menerapkan sekularisasi secara murni. Karena sekularisasi sebetulnya adalah proses negosiasi, yakni negosiasi antara dua domain: agama dan negara. Hal ini sama dengan proses tawar-menawar dalam persoalan hukum, antara hukum agama dan hukum positif."

Banyak orang yang mempertanyakan apakah bentuk negara Indonesia itu sekular atau agama. Beberapa kalangan beranggapan bahwa sejak awal Indonesia merupakan negara agama, karena bagaimana pun Pancasila merupakan turunan dari konsep-konsep agama. Bagaimana pandangan Anda?

Saya kira ini bukan hanya menyangkut Indonesia. Terlalu berlebihan kalau menganggap Indonesia sebagai kasus unik. Faktanya, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menerapkan sekularisasi secara murni. Karena sekularisasi sebetulnya adalah proses negosiasi, yakni negosiasi antara dua domain: agama dan negara. Hal ini sama dengan proses tawar-menawar dalam persoalan hukum, antara hukum agama dan hukum positif. Proses penerapan syariah, misalnya, adalah proses negosiasi antara kuasa agama dan kuasa negara. Praktik sekularisme di Eropa merupakan hasil perundingan antara otoritas duniawi dengan *mindset* masyarakat yang masih dicengkeram oleh agama.

Contoh perundingan itu banyak sekali. Swiss, misalnya, adalah sebuah negara yang secara tegas mengakui prinsip sekularisasi tapi pada saat yang sama tetap mengakui Calvinisme sebagai agama resmi negara. Begitu juga, Inggris menganggap Anglikanisme sebagai gereja resmi negara. Meski kemudian ada perkembangan, hingga pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 masih terus terjadi persekusi terhadap orang Kristen yang tidak mengikuti Gereja Anglikan. Dan, meski relatif tidak sekuat dulu, sampai sekarang aturan gereja resmi Inggris tidak pernah dicabut. Ratu Inggris sampai kini masih dianggap sebagai pemimpin gereja.

Begitu juga dengan Indonesia. Kita tidak hanya mengakui satu agama saja sebagai agama resmi negara, tapi enam. Dalam hal ini kita lebih maju dari Inggris dan Swiss. Tetapi karena *mindset* masyarakat kita jauh lebih terbelakang dari negara-negara Eropa, maka dalam praktiknya Indonesia sepertinya masih lebih dekat kepada negara agama ketimbang negara sekular. Orang yang menganggap bahwa Pancasila bersumber pada nilai-nilai keagamaan sebenarnya adalah tafsir yang muncul belakangan. Menurut saya, secara

umum, negara kita sebetulnya merupakan negara sekular. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan bahwa Indonesia adalah negara agama, pemikiran seperti itu sebetulnya tak punya landasan sejarah yang nyata. Semua negara, kalau bukan negara agama adalah negara sekular. Hanya dalam perkembangan selanjutnya ada negosiasi-negosiasi antara dua domain ini.

Di Eropa ada Prancis yang dinilai sebagai negara yang secara keras menerapkan prinsip sekularisme, sementara di wilayah Islam ada Turki. Apakah dua negara ini bisa disebut sebagai negara yang telah secara komplit menerapkan sekularisme?

Dari perspektif demokrasi, menurut saya, penerapan syariah di Aceh adalah sebuah kemunduran. Begitu juga provinsi atau kabupaten lain yang mencoba menerapkan aturan-aturan yang kurang lebih sama. Mereka telah memahami demokrasi secara keliru. Yang mereka pahami hanyalah demokrasi prosedural. Bahwa kalau 80 atau 90% rakyat menginginkan syariah maka mereka berhak menerapkannya.

Turki dan Prancis menerapkan model sekularisme yang sama, yakni sekularisme yang keras. Prancis sendiri menyebut sekularisme yang diterapkannya dengan *laicití* yang lebih dekat dengan pengertian '*profan*' ketimbang 'pemisahan.' Turki, melalui Mustafa Kamal Attaturk, mengambil model Prancis, bukan Inggris atau negara Barat lainnya. Mungkin karena kedekatan hubungan Turki dengan Prancis ketika itu. Kendati demikian, kalau Anda perhatikan, pemerintah Prancis sebetulnya berkali-kali melanggar prinsip sekularisasi yang mereka junjung tinggi. Misalnya, pemerintah Prancis pernah

memberikan sumbangan kepada gereja-gereja di sebuah provinsi di negeri itu. Ini jelas melanggar prinsip sekularisasi. Alasannya sederhana, karena salah satu prinsip demokrasi adalah mematuhi suara pemenang, maka tuntutan yang juga didukung oleh parlemen itu akhirnya diberikan, meski bertentangan dengan prinsip sekularisasi yang diyakini bersama. Persoalan seperti itu terjadi di hampir semua negara, dan tidak ada yang aneh dengan hal itu. Karenanya, sekali lagi saya katakan, selalu ada proses negosiasi, tawar-menawar antara kuasa dunia dan *mindset* masyarakat yang religius.

Di Indonesia, belakangan muncul berbagai penolakan terhadap ideologi sekular. Misalnya, ada beberapa ormas Islam yang mengatakan secara tegas bahwa sekularisme adalah bentuk penjajahan baru dari Barat. Opsi yang dilontarkan adalah bahwa pemerintahan lebih baik berbentuk negara agama. Alasannya, Indonesia lebih memiliki kedekatan historis dengan Islam ketimbang Barat. Apa komentar Anda?

Membicarakan bentuk negara tidak bisa dilepaskan dari perbincangan tentang demokrasi. Landasan demokrasi sendiri adalah sekularisme, dan negara yang menerapkan demokrasi adalah negara yang sekular. Itu sebuah aksioma yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak mungkin demokrasi tumbuh dalam platform negara yang berbentuk agama atau ideologi tertentu yang anti-demokrasi. Dengan aksioma itu, saya ingin mengatakan, kalau negara-negara Muslim mengadopsi demokrasi, maka mereka juga harus mengadopsi prinsip-prinsip negara sekular. Hanya dengan prinsip sekularisme demokrasi bisa berkembang. Dengan demikian, kalau Indonesia tetap menginginkan sistem demokrasi, maka tak ada pilihan lain kecuali menjadi negara sekular.

Tapi di Indonesia ada Aceh dan beberapa daerah di mana penerapan syariat Islam dijalankan melalui mekanisme demokrasi, disahkan oleh legislatif dan eksekutif setempat.

Aceh juga bukan kasus yang unik. Ini adalah masalah otonomi daerah belaka. Sudan memiliki pengalaman yang mirip dengan kita. Di negeri itu ada bagian provinsinya yang menerapkan syariah, meski kadang terjadi negosiasi di mana negara tetap bisa melakukan intervensi. Dari perspektif demokrasi, menurut saya, penerapan syariah di Aceh adalah sebuah kemunduran. Begitu juga provinsi atau kabupaten lain yang mencoba menerapkan aturan-aturan yang kurang lebih sama. Mereka telah memahami demokrasi secara keliru. Yang mereka pahami hanyalah demokrasi prosedural. Bahwa kalau 80 atau 90% rakyat menginginkan syariah maka mereka berhak menerapkannya.

> Landasan demokrasi sendiri adalah sekularisme, dan negara yang menerapkan demokrasi adalah negara yang sekular. Itu sebuah aksioma yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak mungkin demokrasi tumbuh dalam platform negara yang berbentuk agama atau ideologi tertentu yang anti-demokrasi.

Demokrasi tentu saja tidak hanya berhenti sampai di situ. Ada yang disebut demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional menyatakan bahwa sebuah konstitusi dibangun atau dibuat oleh elemen-elemen masyarakat yang plural. Kata kuncinya adalah pluralitas. Kalau kita mengasumsikan sebuah masyarakat politik adalah masyarakat yang plural, bukan hanya plural dalam pengertian antaragama, tetapi juga komunitas, etnis, budaya dan pemikiran, maka penerapan aturan yang hanya memanjakan satu kelompok, harus ditentang. Dalam kasus Aceh, misalnya, mungkin 90% rakyat

di sana beragama Islam, tetapi di dalam komunitas Islam sendiri terdapat keragaman. Mereka ada yang tidak suka dengan penerapan Islam secara formal, bahkan ada yang mungkin sama sekali tidak percaya dengan nilai-nilai keislaman.

Saya pernah bertemu dengan orang Aceh yang sangat liberal. Dia tak setuju dengan keinginan menjadikan nilai-nilai agama sebagai hukum positif di sana. Sekali lagi, demokrasi konstitusional harus dibangun berdasar kesepakatan elemen-elemen masyarakat yang plural. Begitu ada satu kelompok yang coba mengajukan aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, yang seharusnya plural itu, maka demokrasi yang diajukan bukan lagi demokrasi yang konstitusional. Fareed Zakaria menyebutnya demokrasi tak-liberal (*illiberal democracy*), yakni demokrasi yang mengabaikan substansi yang terkandung dalam konstitusi. Itulah yang terjadi di Aceh dan di beberapa daerah lain yang menerapkan syariah.

Setelah reformasi banyak sekali bermunculan partai yang berasas Islam. Apakah dalam sebuah negara sekular hal seperti itu diperbolehkan?

Praktik demokrasi di dunia Barat sendiri sebetulnya tidak mempermasalahkan kehadiran partai-partai agama. Jerman, misalnya, mempuyai Partai Kristen Demokrat yang mempunyai pendukung cukup besar. Partai seperti itu diperbolehkan selama paltform dan visi politiknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Yang menjadi perdebatan adalah jika sebuah partai – baik partai agama, komunis, maupun partai Nazi – didirikan dengan tujuan merombak atau mengganti sistem demokrasi yang dianut oleh negara. Ada yang mengatakan boleh, selama dia hanya bermain di tingkat wacana, karena itu adalah bagian dari kebebasan bereks-

presi. Namun ada juga yang mengatakan tidak boleh, karena dia akan membahayakan konstitusi.

Saya sendiri cenderung berpendapat sejauh tujuan atau platform partai yang antidemokrasi itu sebatas wacana saja tidak apa-apa. Itulah yang terjadi di Amerika hingga sekarang. Amerika masih mempunyai Partai Komunis, meski sangat kecil. Di Eropa, Partai Komunis juga tetap ada dengan berbagai bentuknya. Mereka tahu bahwa platform partai ini pasti akan mengganti konstitusi, tapi mereka juga yakin bahwa partai ini tidak akan bisa memenangkan pemilu. Contoh di Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Menurut saya, biarkan saja kalau mereka mau menjadi partai politik. Saya senang kalau HTI mendeklarasikan diri menjadi sebuah partai politik, karena nanti akan terbukti apakah mereka punya dukungan dari masyarakat atau tidak.

Demokrasi konstitusional menyatakan bahwa sebuah konstitusi dibangun atau dibuat oleh elemen-elemen masyarakat yang plural. Kata kuncinya adalah pluralitas. Kalau kita mengasumsikan sebuah masyarakat politik adalah masyarakat yang plural, bukan hanya plural dalam pengertian antaragama, tetapi juga komunitas, etnis, budaya dan pemikiran, maka penerapan aturan yang hanya memanjakan satu kelompok, harus ditentang.

Bagaimana dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah menggolkan perda-perda yang isinya sangat dekat dengan syariat Islam. Apakah itu bukan sejenis inkonstitusionalisme?

Ya. Itu tindakan inkonstitusional. Menurut saya, pada saatnya nanti pasti akan ada proses negosiasi. Misalnya, pelarangan terhadap orang yang berjualan di siang hari pada bulan Ramadlan

adalah bertentangan dengan konstitusi, karena konstitusi kita memberikan kebebasan semua orang untuk mencari nafkah. Dalam arti itu, orang atau lembaga yang telah mengeluarkan larangan tersebut bertentangan dengan konstitusi. Sikap saya terhadap keberadaan partai-parai politik juga seperti itu. Tidak usah ada pelarangan atau pembatasan partai politik dari sekarang. Nanti tinggal lihat saja sejauh mana masyarakat bisa menerima cara-cara berpolitik yang mereka lakukan. Pada saatnya, akan terlihat apakah PKS sebuah partai yang terbuka atau sebetulnya partai yang ingin mengislamkan negara. Biarkanlah masyarakat yang akan menilai sendiri.

Namun demikian, kekhawatiran lain bisa muncul. Karena demokrasi kita masih baru dan masih sangat rentan untuk kembali pada model agama atau bahkan model totalitarian. Kalau kita mempunyai kesepakatan untuk menjaga konstitusi, apakah munculnya gerakan seperti PKS dan HTI bukan sesuatu yang harus diwaspadai?

Partai-partai politik Islam di Indonesia, selama tetap mendukung ideologisme Islam seperti Negara Islam, penerapan syariat Islam dan sebagainya, pasti akan gagal, tidak akan mendapat suara lebih banyak dari yang sekarang mereka dapatkan. Ambil contoh PKS. Ketika ia masih menjadi Partai Keadilan (PK) yang mengkampanyekan agenda-agenda Islam, perolehan suaranya jeblok, tidak sampai mendapat 3% dan karenanya tidak lolos *electoral threshold*. Tapi setelah kemudian mereka mengubah nama, meski kemudian mereka sebetulnya tak hanya sekadar mengubah nama tapi juga strategi, yakni tidak lagi membicarakan agenda syariah dalam kampanye-kampanye mereka. Bahkan pada Sidang Istimewa MPR 2002 mereka tidak mendukung faksi Piagam Jakarta (PPP,

PBB dan partai-partai gurem lain) melainkan membuat faksi sendiri bersama PAN. Dari sana, mereka sadar bahwa partai politik yang mendukung agenda ideologisme Islam pasti akan hancur. Inilah uniknya Indonesia.

Artinya, menurut Anda, sistem demokrasi yang kita miliki secara tidak langsung akan mensekularkan agenda-agenda politik yang dibawa partai-partai Islam. Apakah ada kecenderungan bahwa partai-partai Islam lambat-laun akan tersekularkan?

Ya, saya kira begitu. Seseorang bisa saja menjadi saleh secara individual, namun sekular dalam urusan negara dan pemerintahan. Thomas Jefferson dan banyak tokoh Amerika lain adalah tipe orang yang sangat saleh sekaligus sekular. Partai-partai Islam sebaiknya seperti itu. Mereka semestinya tidak hanya berkampanye soal ibadah, tetapi juga bagaimana menangani korupsi, menciptakan pemerintahan yang bersih, dan lain-lain. Sekarang PKS sudah mengkampanyekan hal-hal seperti itu. Mereka menghindari kampanye agenda Islam secara terbuka. Itu bagus dari perspektif demokrasi. Kalau mereka tetap konsisten dan terus memperbaikinya, bukan tidak mungkin mereka akan menjadi partai politik besar. Partai Kristen Demokrat

> Begitu ada satu kelompok yang coba mengajukan aturan-aturan hukum yang bertentangan dengan konstitusi, yang seharusnya plural, maka demokrasi yang diajukan bukan lagi demokrasi yang konstitusional. Fareed Zakaria menyebutnya demokrasi tak-liberal (*illiberal democracy*), yakni demokrasi yang mengabaikan substansi yang terkandung dalam konstitusi. Itulah yang terjadi di Aceh.

di Jerman, kalau Anda baca platformnya, lebih religius daripada PKS di Indonesia. Nilai-nilai biblikal jelas menjadi dasar dan sekaligus perjuangan partai. Kendati demikian, mereka meyakini dan memegang teguh prinsip-prinsip sekularisasi yang sudah disepakati bersama.

Ada kekhawatiran di kalangan umat Islam bahwa sekularisme akan menyebabkan terpinggirkannya peran agama. Sekularisasi yang meniscayakan pemisahan antara yang privat dan yang publik, menurut mereka, akan mengakibatkan ketidakmungkinan masuknya agama ke ruang publik. Lalu, bagaimana fungsi dakwah dalam Islam?

Menurut saya, pemahaman terhadap agama harus terus berkembang. Permasalahan yang tadi Anda ungkapkan hanyalah soal definisi dan soal bagaimana kita mempersepsikan praktik-praktik keberagamaan seseorang. Apakah seseorang akan disebut beragama hanya kalau memakai kopyah haji ke mana-mana, termasuk berkampanye politik? Apakah dengan semakin banyaknya orang yang memakai baju koko mengindikasikan bahwa misi Islam telah berhasil? Kalau menganggap agama hanya seperti itu, ya miskin sekali. Masih banyak persoalan yang lebih penting yang harus diatur agama. Kita tahu bahwa Departemen Agama (Depag) kerap dikatakan sebagai departemen yang paling korup. Kalau agama bisa membantu manusia membersihkan diri, memperbaiki akhlak dan kejujuran, seharusnya Depag menjadi departemen yang paling saleh dan bersih.

Bagi saya, beragama itu sebenarnya simpel saja. Beragama adalah hubungan personal seseorang dengan Tuhannya. Agama adalah institusionalisasi dari keyakinan-keyakinan manusia. Tetapi

institusionalisasi keyakinan itu sendiri sebetulnya bertentangan dengan kemanusiaan, karena setiap orang memiliki pengalaman agama yang berbed-beda. Itulah yang dalam wacana psikologi agama disebut "pengalaman personal keagamaan." Iman statusnya lebih tinggi dari agama. Beragama seharusnya tetap berada pada batas iman saja. Begitu diinstitusionalisasikan, nilai iman menjadi turun. Anda punya cara tersendiri dalam beriman kepada Tuhan. Karenanya sangat mungkin kalau institusionalisasi keimanan, sebagaimana terekam pada aturan-aturan agama, dalam beberapa hal, tidak sejalan dengan iman Anda. Misalnya, Anda meyakini bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Indah, tetapi agama memformulasikan-Nya sebagai Yang Maha Pendendam, Maha Kejam, Maha Kuat, yang sebetulnya bertentangan dengan nilai-nilai keimanan Anda sendiri.

Pada abad ke-19, istilah *nahdlah* digunakan di hampir seluruh wacana pemikiran Islam yang berkembang di dunia Arab. Para pembaharu Muslim bergetar jiwanya ketika menyebut kata '*nahdlah*.' Ini menunjukkan bahwa betapa Islam dan Barat sebenarnya memiliki pengalaman yang sama, yaitu ingin keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan.

Agama seharusnya hanya mengurusi hal-hal yang bersifat personal, seperti salat, puasa, dan sebagainya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan negara, pendidikan, dan aturan-aturan di masyarakat, sebaiknya tidak dicampuri oleh agama. Begitu agama ikut campur, di situlah konflik bermula, ketegangan di antara masyarakat muncul. Itulah yang terjadi di kabupaten-kabupaten yang menerapkan syariat Islam.

Ketakutan lain yang muncul adalah karena demokrasi lebih mungkin berkembang di negara yang sekular, sedangkan sekularisme dimaknai sebagai peminggiran agama, maka demokrasi juga tidak akan menolerir keberadaan agama. Kalau begitu, mengapa tidak buat saja, misalnya, negara yang demokratis tapi tetap mengambil dasar agama?

Itu yang disebut "demokrasi dengan kata sifat" (*democracy with adjective*). Biasanya yang menuntut demokrasi model ini adalah kaum agamawan atau para ideolog. Dari sini, kita mengenal 'demokrasi Marxis,' 'demokrasi Islam,' 'demokrasi agama,' dan lain-lain, yang sebenarnya lebih menekankan kata sifat yang menyertainya ketimbang demokrasi itu sendiri. Itulah yang diusahakan oleh kalangan Islam lewat Abul A'la al-Maududi dengan konsep teodemokrasi, demokrasi yang ilahiyah, atau lewat Muhammad Natsir melalui konsep demokrasi Islam. Natsir bahkan berkeyakinan bahwa ada hal-hal dalam ajaran Islam yang tidak bisa didiskusikan di dalam parlemen, karena demokrasi bukan sesuatu yang absolut sebagaimana agama.

Natsir memberi contoh: *khamr* atau minuman keras, misalnya, adalah haram dan perihal keharamannya tidak boleh didiskusikan di parlemen. Padahal yang didiskusikan oleh parlemen sebetulnya bukan apakah haram atau tidaknya *khamr,* melainkan bagaimana meregulasinya. Kalau Anda meyakini bahwa *khamr* haram, maka itu tidak boleh diminum. Tapi persoalannya, ada sebagian orang yang menganggapnya tidak haram, ada juga yang menganggap itu haram tapi dia tak patuh pada aturan itu. Anda harus mengakomodasi semua itu dalam konteks negara yang demokratis. Itu yang secara keliru dipahami oleh pak Natsir.

Apakah agar demokrasi bisa berjalan, agama lantas harus merampingkan diri?

Itu pasti. Agama, sekarang ini, sudah terlalu gemuk, terlalu berpretensi ingin mengatur segala hal. Perampingan agama sudah terjadi di Eropa. Eropa sudah melakukan *diet* agama sejak lama, kurang lebih sudah 300 tahun. Negara-negara Islam baru memulainya. Di Eropa, proses itu sendiri berjalan dengan berdarah-darah. Permasalahannya, apakah kita mau mengulangi kesalahan yang sama atau mau berkaca dari pengalaman pahit Eropa untuk kemudian mengambil hasil yang baiknya saja. Kalau kita mau berpikir rasional, tentu kita akan mengambil yang baiknya saja. Itu yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Jepang. Sayangnya, karena kita memiliki pengalaman kolonialisme, yang sedikit banyak kemudian memunculkan sikap anti-Barat di negara ini, proses emulasi yang dilakukan negara kita pun tidak berjalan mulus.

Indonesia telah demokratis, tapi kebebasan sipilnya masih bermasalah. Ini bisa dilihat dalam kasus Ahmadiyah, misalnya. Namun demikian, demokrasi kita sedikit banyak telah melahirkan kebebasan sipil yang lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain. Secara umum, kita patut berbangga karena kita adalah negara Muslim besar satu-satunya yang dianggap sebagai negara demokrat dan bebas.

Masyarakat kita, sejauh ini, kerap menolak liberalisme, baik dalam hal pemikiran maupun konsep bernegara, ekonomi dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan liberalisme?

Seperti sekularisme, liberalisme juga merupakan istilah kontroversial, yang mungkin lebih baik dihindari penggunannya, meski

dalam banyak hal, kita tidak bisa meghindari penggunaan istilah itu. Sebuah istilah dibuat untuk digunakan. Meski penggunaannya mungkin lebih disebabkan karena tidak adanya alternatif lain yang lebih baik. Dunia Barat sendiri memberikan reaksi sangat beragam terhadap liberalisme. Istilah 'liberal' di Inggris dan Amerika memiliki arti dan konotasi berbeda. Di Amerika, orang yang disebut liberal itu berhaluan 'kiri.' Demokrat, meski disebut liberal, konsep ekonominya justru kekiri-kirian, sosialis, anti-pasar. Sementara di Inggris, yang disebut kaum liberal itu justru konservatif, 'kanan.' Di Australia, kalangan liberalnya sangat 'kanan,' pro-pasar.

Dalam wacana Islam, istilah liberal sebetulnya merujuk pada kebebasan, khususnya kebebasan berpikir dan berekspresi. Kaum Muslim atau sarjana Islam yang coba mendekati khazanah Islam dengan semangat kebebasan, biasanya disebut sebagai 'Islam liberal.' Islam liberal adalah istilah untuk merujuk pada gerakan dalam Islam yang mendukung kebebasan berpikir, berekspresi dan jenis-jenis kebebasan lainnya.

Dalam Islam sendiri, apakah konsep kebebasan memiliki dasar yang kuat atau hanya sesuatu yang datang dari luar yang kemudian diadopsi Islam?

Khazanah intelektual Islam mengenal konsep kebebasan. Dalam tradisi filsafat Islam ada kebebasan berpikir yang berusaha memberikan alternatif bagi pemahaman ortodoks. Disiplin tasawuf juga mengenal doktrin kebebasan. Disiplin ini mengedepankan kebebasan dalam memahami teks kitab suci. Karena itu wajar kalau kemudian ada seorang sarjana yang mengatakan bahwa akar-akar liberalisme dalam Islam bisa ditelusuri pada dua disiplin, yaitu

falsafah dan tasawuf. Falsafah memberi landasan intelektual dan rasional, sementara tasawuf memberikan landasan spiritual.

Para sufi besar seperti Ibn Arabi dan Jalaluddin Rumi memahami teks-teks al-Quran secara berbeda dari pemahaman ortodoksi. Pemahaman seperti ini bisa dianggap sebagai inspirasi bagi liberalisme Islam. Misalnya, pandangan Ibn Arabi tentang rumah ibadah. Pandangan dia sangat maju. Dia menyamakan seluruh rumah ibadah agama-agama. Baginya, rumah ibadah bukan hanya masjid, tapi juga gereja dan lain-lain. Lebih dari sekadar penolakan, menurut saya, gagasan Ibn Arabi itu menjadi landasan yang bagus bagi pluralisme. Dan pluralisme merupakan salah satu isu penting dalam Islam liberal.

> Dalam bernegara yang harus dikedepankan adalah konstitusi. Mayoritas tidak cukup untuk menggagalkan konstitusi yang sudah disepakati. Bahwa ada pasal yang memberikan perlindungan terhadap kelompok agama tertentu itu harus dihormati secara konstitusional tanpa melihat apakah dia mayoritas atau minoritas.

Sumber lain liberalisme tentu saja berasal dari Barat, karena istilah liberalisme sendiri memang berasal dari sana. Akarnya bisa ditelusuri pada masa *Renaissance* dan Pencerahan. Konsep itulah yang diadopsi serta dikembangkan oleh para pembaharu Muslim seperti al-Tahtawi, Muhammad Abduh, dan Qasim Amin.

Di Indonesia sendiri bagaimana? Karena ada kalangan yang mengatakan bahwa itu baru muncul sejak Cak Nur menyuarakan ide-idenya pada tahun 1970an. Apakah benar seperti itu?

Orang yang mengatakan seperti itu pasti tidak tahu sejarah. Pasti tidak pernah belajar sejarah pembaruan pemikiran Islam yang sudah dimulai sejak abad ke-19. Tokoh pembaharu seperti Ahmad Khan, misalnya, hidup jauh lebih awal dari Cak Nur, hampir dua abad. Al-Tahtawi belajar ke Sorbonne, Prancis, jauh lebih dulu sebelum Cak Nur. Al-Tahtawi adalah lulusan al-Azhar yang lantas melanjutkan studi ke Prancis. Begitu pulang, ia menyebarkan gagasan-gagasan Jean Jacques Rousseau, Voltaire dan lain-lain yang konteksnya persis seperti Cak Nur ketika baru pulang dari Chicago pada akhir tahun 1980an. Dari perspektif itu, liberalisme yang dikembangkan Cak Nur merupakan kelanjutan dari gerakan serupa sebelumnya.

Gerakan pembaharuan Islam di mana pun memiliki semangat yang sama, yaitu memahami ulang atas ajaran-ajaran Islam klasik yang dianggap tidak lagi cocok dengan tuntutan dunia modern. Dari sisi itu, para pembaharu dan kaum muda Muslim di awal zaman pergerakan seperti Cokro Aminoto dapat dianggap sebagai tokoh-tokoh awal gerakan liberalisme Islam, meskipun beberapa pandangan mereka, jika dilihat dari perspektif sekarang, tampak sudah tidak lagi maju.

Namun, gagasan para pembaharu Muslim pada masa itu dinilai cukup maju. Di Sumatera, misalnya, kaum muda mencoba menafsirkan ulang pemahaman-pemahaman Islam yang dianggap tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka) atau Abdullah Ahmad, mencoba meyakinkan masyarakat Muslim Minangkabau, yang sangat konservatif, bahwa menggunakan sistem pendidikan modern sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Begitupun mengadopsi kurikulum Belanda tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dari sana, mereka mendirikan

sekolah Islam modern seperti Adabiyah, Jembatan Besi, Sumatera Thawalib dan lain-lain. Itulah beberapa contoh gerakan liberalisme Islam di Indonesia pada masa-masa awal.

Cak Nur tentu saja muncul dalam konteks yang berbeda, dalam suasana baru di mana sudah tidak ada lagi penjajahan dan tidak ada lagi beban Orde Lama. Cak Nur sendiri terus berkembang. Caranya mendekati persoalan, dari waktu ke waktu, berbeda, selalu ada kemajuan. Cak Nur pada era 70-an berbeda dari Cak Nur era 90-an.

> Agama seharusnya hanya mengurusi hal-hal yang bersifat personal, seperti salat, puasa, dan sebagainya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan negara, pendidikan, dan aturan-aturan di masyarakat, sebaiknya tidak dicampuri oleh agama. Begitu agama ikut campur, di situlah konflik bermula, ketegangan di antara masyarakat muncul."

Bagaimana pandangan Anda tentang ekonomi Islam?

Secara umum, ekonomi bukan bagian dari agenda Islam liberal. Baru belakangan ada gerakan yang coba masuk ke arah itu, terutama sejak munculnya agenda islamisasi ilmu pengetahuan. Dari sini, kemudian muncul ide 'bank Islam,' 'ekonomi Islam,' dan sebagainya. Menurut saya, ide-ide seperti itu malah bertentangan dengan agenda pembaharuan. Orang seperti Muhammad Abduh sejak awal telah menghalalkan bunga bank. Dengan demikian, fondasi ekonomi atau bank Islam sebenarnya sudah dipatahkan oleh Abduh sejak awal. Karena itu, gerakan-gerakan yang disebut *shaḥwah islâmiyah*, yang mengusung ekonomi Islam sebetulnya bertentangan dengan semangat pembaharuan Islam.

Sebagian kaum Muslim menuduh Islam liberal di Indonesia sebagai turunan langsung dari kolonialisme Barat karena tidak bisa melepaskan diri dari baju Barat-nya. Apa tanggapan Anda?

Bahwa gerakan liberalisme di Indonesia mengambil ide dari Barat, itu benar, tapi tentu tidak dari kolonialisme. Jangan hanya karena kebetulan yang menjajah Indonesia adalah orang Barat dan karena gagasan liberalisme datang dari Barat, maka liberalisme berarti sama dengan kolonialisme. Ini adalah cara berpikir yang kacau. Benar bahwa agenda pembaharuan Islam sejalan dengan beberapa konsep yang dijalankan di Barat. Tapi Barat sendiri terus berevolusi dari abad ke abad, dari abad kegelapan menuju *Renaissance* dan Pencerahan. Istilah '*Renaissance*' dan 'Pencerahan' diadopsi oleh para pembaharu Muslim dengan sebutan '*tanwir'* dan '*nahdlah*.'

Pada abad ke-19, istilah *nahdlah* digunakan di hampir seluruh wacana pemikiran Islam yang berkembang di dunia Arab. Para pembaharu Muslim bergetar jiwanya ketika menyebut kata '*nahdlah*.' Ini menunjukkan bahwa betapa Islam dan Barat sebenarnya memiliki pengalaman yang sama, yaitu ingin keluar dari keterbelakangan menuju kemajuan. Dari sisi itu, agenda pembaruan Islam sebetulnya sama dengan agenda pembaruan di Barat, baik dalam agama, ekonomi maupun politik. Permasalahannya, kalau kita mau belajar dari pengalaman orang lain, apakah kita akan meniru semuanya, termasuk mengikuti hal-hal yang buruknya, atau cukup melompat dan mengambil kesimpulan terbaiknya saja?

Sebagian kaum Muslim berpendapat bahwa konsep khilâfah lebih asli ketimbang demokrasi. Konstitusi yang ada di dunia Islam, menurut

mereka, tak lain dari kepanjangan tangan politik liberal Barat. Apa komentar Anda?

Konstitusi itu ciptaan Barat, kreasi orang modern. Orang zaman dulu, termasuk Islam, tidak ada yang mempunyai konstitusi. Jadi kalau mereka bilang bahwa konstitusi adalah ciptaan Barat, itu benar belaka. Persoalannya adalah kita mau memiliki konstitusi yang seperti apa? Konstitusi yang mau diterima oleh seluruh bangsa atau konstitusi yang partisan? Kalau Anda percaya dengan demokrasi dan pluralisme, maka Anda harus menerima konstitusi seperti yang dikembangkan sekarang ini. Kalau Anda mencoba menerapkan konstitusi lain, apapun nama yang dibawanya, berarti Anda telah menjadi fasis. Inilah yang oleh Francis Fukuyama disebut *islamo-fascism.*

Kalau Anda percaya dengan demokrasi dan pluralisme, maka Anda harus menerima konstitusi seperti yang dikembangkan sekarang ini. Kalau Anda mencoba menerapkan konstitusi lain, apapun nama yang dibawanya, berarti Anda telah menjadi fasis. Inilah yang oleh Francis Fukuyama disebut *islamo-fascism*.

Kelompok fundamentalis di Indonesia sudah sampai pada tindakan pemaksaan satu model pemahaman Islam. Praktiknya terlihat pada pembatasan keyakinan atau pelarangan terhadap aliran-aliran minoritas. Parahnya, negara yang seharusnya melindungi, diam saja. Bagaimana respon Anda?

Itu sebenarnya kelemahan negara saja. Kelemahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai presiden, yang tidak tegas dalam banyak hal. Karena takut *image*-nya jatuh, dia terus-menerus bersikap hati-hati dengan tidak berbuat apa-apa. Malah Yusuf Kalla, Wakil Presiden, yang lebih berani. Sekali lagi, itu hanya soal kepe-

mimpinan, tidak ada hubungannya dengan konstitusi. Konstitusi kita sudah sangat jelas menyatakan bahwa agama harus dilindungi, kebebasan beragama warga negara harus dihormati. Karena pemimpinnya tidak peduli dengan konstitusi, terjadilah hal-hal yang tak diinginkan seperti sekarang ini.

Demokrasi kita yang relatif sangat muda sebetulnya sudah melahirkan kebebasan dalam partisipasi politik, meski masih kurang dalam hal kebebasan sipil. Menurut Anda apakah ini tanda-tanda demokrasi tak liberal?

Bisa jadi, meskipun menurut laporan Freedom House, sejak 2006, Indonesia sudah masuk ke dalam katagori negara yang liberal, negara yang bebas. Menurut Freedom House, kebebasan memiliki gradasi, dalam skala 1-5, angka 1 diartikan dengan sangat liberal dan 5 tidak liberal. Demokrasi Indonesia masih berada pada kisaran angka 3 dan 2. Masih dalam batas minimal untuk bisa dikatakan liberal. Analisisnya adalah bahwa betul Indonesia telah demokratis, tapi kebebasan sipilnya masih bermasalah. Ini bisa dilihat dalam kasus Ahmadiyah, misalnya. Namun demikian, demokrasi kita sedikit banyak telah melahirkan kebebasan sipil yang lebih bagus dibandingkan dengan negara-negara Muslim lain. Secara umum, kita patut berbangga karena kita adalah negara Muslim besar satu-satunya yang dianggap sebagai negara demokrat dan bebas.

Tapi apakah absennya kebebasan sipil itu karena semata-mata pemerintahan yang tidak tegas atau ada persoalan lain?

Ada dua hal yang saling terkait untuk menjelaskan itu. *Pertama*, terkait dengan pemahaman masyarakat yang umumnya masih konservatif dengan *mindset* yang masih jauh dari nilai-nilai kebebasan sipil dan demokrasi. *Kedua*, terkait dengan ketidaktegasan pemerintah. Kalau pemerintah tegas, mestinya setiap tindakan perusakan harus ditindak secara hukum. Misalnya ketika ada pembakaran rumah Ahmadiyah, maka pelakunya harus ditangkap dan dipenjarakan karena sudah melakukan tindak kriminal. Penangkapan terhadap si pelaku, apapun agamanya, dilakukan bukan dalam rangka membela Ahmadiyah, tapi karena seseorang telah melakukan perusakan terhadap properti orang lain. Itu yang tidak dipahami. Pemerintah sendiri tidak mau berjudi mempertaruhkan citranya.

Bagaimana kalau ada kelompok Islam yang berdalih "kami ini umat mayoritas, karenanya pemerintah harus menuruti kami." Artinya, kalau ada kelompok yang menurut mereka sudah masuk dalam kriteria 'sesat,' pemerintah harus segera bertindak untuk melarangnya.

Itulah contoh perilaku yang tadi saya katakan 'inkonstitusional.' Logika semacam itu bisa dibalik: kalau orang Kristen menganggap bahwa orang Islam sebagi sesat, apakah 10 juta orang Islam di Amerika sana bisa ditumpas? Kalau mereka mau menumpas Ahmadiyah atau kelompok-kelompok agama yang dianggap sesat, logika yang mereka pakai itu juga bisa dipakai untuk negara-negara yang minoritas Muslim. Tapi dalam bernegara yang harus dikedepankan adalah konstitusi. Mayoritas tidak cukup untuk menggagalkan konstitusi yang sudah disepakati. Bahwa ada pasal yang memberikan perlindungan terhadap kelompok agama tertentu itu

harus dihormati secara konstitusional tanpa melihat apakah dia mayoritas atau minoritas.

Kritik yang kerap dilontarkan terhadap konstitusi kita adalah bahwa di sana-sini masih banyak yang paradoks. Konstitusi kita, di satu sisi mengakui bahwa setiap orang berhak menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, sementara pada sisi lain, terdapat perundang-undangan yang membatasi.

Menurut saya, konstitusi kita sudah cukup bagus. Namun banyak produk hukum di bawahnya yang bertentangan dengan konstitusi. Pembatasan jumlah agama resmi negara adalah salah satu contoh aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi negara-negara modern di dunia secara umum sudah sangat bagus. Sebelum diamandemen berkali-kali, konstitusi Malaysia juga sangat liberal. Beberapa waktu lalu saya memberi ceramah di Kuala Lumpur. Di forum itu, saya memberikan pernyataan bahwa konstitusi Malaysia cukup liberal, jauh lebih liberal ketimbang konstitusi Indonesia. Hal itu terjadi karena konstitusi Malaysia dibuat pada tahun 1957, setelah kovenan tentang HAM dikeluarkan PBB. Kovenan itu kemudian diadopsi dalam salah satu pasal konstitusi Malaysia.

Indonesia merdeka pada tahun 1945, sementara kovenan HAM baru dikeluarkan pada 1948. Maka Indonesia belum sempat mengadopsi kovenan itu, sebagaimana Malaysia. Karena itu, konstitusi kita sangat tidak liberal. Baru pada tahun 1999 hingga 2002 kita mengamandemen konstitusi dan memasukkan pasal-pasal HAM ke dalamnya. Sekarang, konstitusi kita sama dengan konstitusi-konstitusi negara modern lainnya. Jadi, dari sisi konstitusional sebetulnya

tidak ada masalah. Yang selalu jadi masalah adalah produk-produk hukum di bawah konstitusi. Di Malaysia, hal seperti itu malah lebih parah. Mereka menganggap bahwa persoalan agama, seperti yang Anda sebutkan tadi, misalnya, masuk ke dalam perdebatan yang disebut *lex specialis*, dan karenanya konstitusi tak bisa ikut campur. Bagi saya, konsitutusi harus berada di atas segalanya.

Menurut Anda, kapan demokrasi kita akan menjadi solid?

Sebagian ilmuwan politik meramalkan bahwa transisi menuju demokrasi membutuhkan waktu tak kurang dari 20 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa masa transisi akan berjalan sepanjang sejarah dan tidak pernah stabil. Filipina sudah menjalani masa transisi lebih dari 20 tahun dan sampai sekrang belum stabil. Ada juga yang demokrasinya stabil tapi masyarakatnya tidak cukup sejahtera, seperti India. India adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Pergantian kepemimpinan selalu terjadi dan tidak pernah kosong sampai sekarang. Tapi masyarakatnya tidak sejahtera. Persoalannya adalah apakah kita sedang berbicara kesejahteraan atau demokrasi? Kalau mau berbicara kesejahteraan, negara-negara teluk banyak sekali yang sejahtera. Kuwait dan Arab Saudi adalah negara-negara yang cukup sejahtera secara ekonomi, GDP-nya cukup besar, tapi tidak demokratis.

Menurut Anda, Indonesia sebaiknya mendahulukan demokrasi atau kesejahteraan?

Sebetulnya kita tidak punya pilihan. Tapi, yang sekarang kita usahakan adalah menjadikan demokrasi sebagai cara untuk menuju

kesejahteraan. Demokrasinya sendiri bukanlah merupakan tujuan, melainkan cara.

Bagaimana Anda menjelaskan pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi akan tumbuh kalau ekonomi negaranya berjalan dengan baik, masyarakatnya sejahtera?

Kalau seperti itu, bagaimana menjelaskan Singapura? Singapura adalah negara yang sangat sejahtera tapi tidak demokratis. Menjelaskan hal ini bagaikan menjelaskan ayam dan telur, manakah yang lebih dulu? Apakah menjadi demokrasi karena sejahtera atau karena demokrasi kemudian masyarakat menjadi sejahtera? Tetapi secara umum, menurut Samuel Huntington, negara-negara demokratis di Eropa memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari negara-negara yang tidak demokratis. Negara demokratis, menurut Huntington, memperlihatkan kemajuan ekonomi yang cukup signifikan. Penjelasan untuk hal ini saya kira sederhana. Dengan demokrasi akan ada investasi, ada keterbukaan ekonomi, ada pasar yang lebih besar, kemudian terjadilah pertumbuhan. Demokrasi otomatis membuka ruang ekonomi yang lebih besar.

Bagaimana dengan Singapura? Apakah karena mereka sudah sejahtera, lalu mereka tak lagi memerlukan demokrasi?

Orang Singapura sebetulnya merindukan demokrasi. Baru-baru ini, parlemen Singapura membuat satu komisi untuk memantau negara-negara kecil di Skandinavia yang bisa dijadikan model demokrasi bagi Singapura. Alasan memilih Skandinavia karena ada kemiripan dalam hal jumlah penduduk yang tidak besar. Singapura

ingin mengambil contoh demokrasi yang paling menguntungkan. Hal ini bisa dipahami karena mereka memang sudah sejahtera. Untuk itu, jangan sampai demokrasi yang ingin diterapkan malah mengganggu kesejahteraannya.

Mungkin alasan seperti itu yang membuat para filsuf besar seperti Voltaire dan Rousseau tidak terlalu berminat dengan demokrasi. Dalam mencari pemimpin, mereka lebih menjagokan *enlightened despot* (pemimpin despot yang tercerahkan) ketimbang seorang demokrat. Mahatir Muhammad adalah contoh *enlightened despot,* berpendirian keras tapi punya visi membangun bangsa. Lee Kuan Yiew di Singapura juga bisa disebut *enlightened despot*.

Pertanyaan terakhir, kita sudah banyak berbicara tentang kesejahteraan dan kapitalisme. Pertanyaannya, apakah penganut liberalisme dalam beragama harus diikuti dengan pilihan liberal secara ekonomi?

Saya bukan ahli ekonomi, tapi beberapa prinsip Islam, menurut saya, sangat mendukung kapitalisme. Pada 1960-an banyak sekali beredar buku-buku tentang Islam dan sosialisme seperti yang pernah ditulis oleh Sayyid Qutb dan Cokro Aminoto. Maxime Rodinson, sarjana Prancis pengikut Marxisme, menulis sebuah buku berjudul *Islam dan Kapitalisme*. Semula dia ingin membuktikan bahwa Islam sejalan dengan Sosialisme, tapi kemudian malah menemukan bahwa Islam sangat kapitalis. Pernyataan dia yang terkenal adalah "*Muhammad was at least not a socialist"*.

Ada seorang teman di Kuala Lumpur yang membandingkan kenapa Islam begitu keras dalam hukuman terhadap pencurian, yakni potong tangan. Teman saya itu menjelaskan bahwa hukuman keras itu adalah sebentuk tradisi kapitalisme yang sangat menghar-

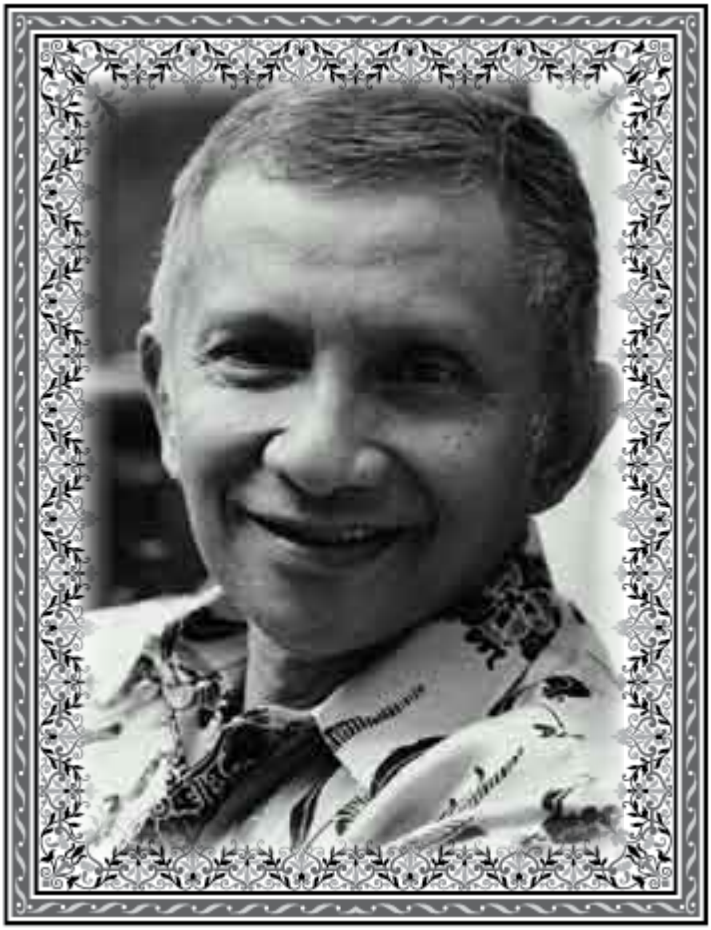
gai properti. Di Amerika, pada awal-awal abad kapitalisme, orang yang mencuri bukan hanya dipotong tangannya, tapi dibunuh. Jika ekonomi liberal dianggap identik dengan kapitalisme, Islam liberal mungkin juga identik dengan semangat kapitalisme.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Januari 2008

Democracy
www.abad-de
Perpusta

Percakapan dengan

M. Amien Rais



M. Amien Rais, Ketua Dewan Penasehat Pusat PAN (Partai Amanat Nasional). Ia meraih gelar Doktor (Political Science) pada University of Chicago. Mantan Ketua MPR ini sekarang menjadi Anggota Dewan Penasehat PP Muhammadiyah.

Sekularisme sulit diterima di dunia Islam. Di samping kemunculan paham ini mempunyai konteks yang sangat lain, al-Quran juga tidak memisahkan kehidupan menjadi dikotomis. Islam itu bukan Barat dan bukan pula Timur. Kendati demikian, kearifan, kreativitas, dan inovasi dari manapun adalah milik Islam. Kita sendiri mempunyai khasanah yang sesungguhnya sudah sangat *resourceful* yang bisa kita kembangkan secara anggun dan rasional. Berbeda dengan sekularisme, gagasan liberalisme dan pluralisme, sampai batas yang jauh sekalipun, tetap paralel dengan ajaran agama. Liberalisme menginspirasikan semangat kebebasan berpikir kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi setiap persoalan; pluralisme mempunyai tempat yang sah di dalam Islam. Terlebih, kita hidup pada zaman di mana kita harus betul-betul menjadi manusia globalis.

Kami ingin menggali komentar Anda perihal gagasan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme yang mendapat tentangan sangat kuat, terutama, di kalangan umat Islam. Di antara alasan mengapa mereka menentang sekularisme adalah kuatnya anggapan bahwa paham ini mengembuskan semangat anti-agama. Atau, muncul juga persepsi lain, kendati tidak sampai anti-agama, misalnya, bahwa sekularisme bisa melemahkan eksistensi agama. Namun begitu sekularisme lebih bisa diterima manakala ia diartikan sebagai diferensiasi atau pembeda saja, bukan pemisah, antara yang profan dan sakral, antara wilayah politik (negara) dan wilayah agama. Bagaimana Anda menduduk-kan perdebatan ini?

Saya kira sekularisme secara historis berasal dari dunia Barat. Ketika kekuasaan Paus dirasakan terlalu dominan atas para kaisar dan raja-raja di Eropa, kemudian muncul pembaharuan pemikiran politik Abad Pencerahan yang demikian lantang mewacanakan sebuah kredo, kalau tidak salah bernyi: "*Render to cesar what is cesar's and to God what is God's.*" Serahkan pada kaisar apa yang menjadi haknya dan berikan kepada Tuhan apa yang menjadi hak-Nya. Dalam arti elementer kaisar adalah penguasa dunia, yang dengan aturan-aturan yang dibuatnya mengelola masyarakat di negaranya demi mencapai berbagai macam tujuan sosial, ekonomi, filosofi dan lain-lain.

Sementara pada waktu itu tokoh-tokoh Abad Pencerahan gencar menyembulkan suatu pemikiran bahwa semakin manusia memiliki otonomi pemikiran yang tidak berkaitan dengan wahyu, maka manusia menjadi semakin dewasa dan semakin berhasil memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Sehingga, bisa kita pahami kalau pada waktu itu juga para filosof ingin mereduksi wilayah agama. Sebab, pada saat itu agama terlalu berlebihan lingkup dominasinya

dan bukannya mengajarkan rasionalitas atau solusi atas masalah-masalah kemanusiaan yang seharusnya menjadi peran yang diemban agama, sebaliknya justru membangun kepemimpinan agama di mana Paus sebagai wakil Tuhan mempunyai kata putus atas segenap urusan manusia.

Jadi, semua arah pemikiran kaum intelektual pada waktu itu, dengan gagasan-gagasan otonom, muncul dalam konteks pergulatan antara kekuasaan gereja dengan kekuasaan para raja dan kaisar yang kemudian berakhir dengan kemenangan yang terakhir (kekuasaan raja-raja). Sejak itu sekularisme menjadi ideologi yang cukup dominan, dan kemudian bersamaan dengan sekularisme dimunculkan juga pemikiran-pemikiran yang berwacana liberalisme dan pluralisme.

Buat saya dunia Islam mempunyai sejarah perkembangan politik yang berbeda. Sebab, bagaimanapun dalam prinsip keyakinan umat Islam, al-Quran tidak memisahkan kehidupan menjadi dikotomis. Tetapi kaum sekular dengan lantang melakukan kompartementalisasi kehidupan: yang duniawi dan ukhrawi; imanen dan transenden. Sementara dalam Islam kehidupan kaum Muslimin berpegang teguh bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata dipersembahkan dan dipasrahkan kepada Tuhan. Sehingga tidak ada pandangan hidup yang dikotomistik.

Akibatnya, walaupun dipaksa-paksa seperti apapun, sekularisme tidak akan cocok untuk umat Islam, karena memang ranah atau tanah perkembangannya tidak sama dengan Barat. Karena itu, saya melihat sekularisme itu sangat sulit diterima di dunia Islam. Tetapi, kalau gagasan pluralisme dan liberalisme, sampai batas yang jauh sekalipun, tetap paralel dengan ajaran agama. Jadi, agama Islam tidak ingin memaksakan suatu pendapat. Bahkan, agama

Islam sendiri sangat demokratis. Tengok saja kenyataan yang menunjukkan bahwa di samping ada kubu besar Syi'ah dan Sunni, pada masing-masing aliran tersebut muncul beragam perbedaan pandangan teologi di dalamnya, yang satu sama lain saling damai. Sunni tumbuh empat mazhab: mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i; begitupun tidak sedikit cabang-cabang pemikiran di kalangan kaum Syi'ah.

Maka, menurut saya, sampai kapanpun tidak mungkin ada "hanya satu" gagasan di kalangan dunia Islam, yang majemuk ini, akan mencapai kemenangan akhir. Sebab kodrat masyarakat Islam itu memang majemuk, beraneka ragam dan tidak tunggal. Pasalnya, pluralisme mempunyai tempat yang sah di dalam agama Islam. Sehingga ketika kalangan Ahmadiyah dizalimi masyarakat beramai-ramai, maka sejatinya tindakan seperti itu memang tidak islami. Karena semua keyakinan diberi hak hidup di dalam Islam. Sehingga, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Zoroaster atau komunisme sekalipun sejatinya diberi hak hidup dalam Islam. Tentu saja Ahmadiyah tidak berbeda dengan mereka, yakni harus diberi hak hidup pula.

Liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah-masalah yang tengah dihadapi.

Untuk itu, liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah-masalah yang tengah dihadapi. Sehingga, jika ada kompetisi gagasan atau kompetisi ide serta rivalitas antar-pemecahan intelektual bagi masalah-masalah yang konkret, justru dipuji dan dianjurkan dalam Islam. Karena itu dalam tiga

rangkaian gagasan tersebut, yakni sekularisme, pluralisme dan liberalisme, bagi saya, yang sulit diterima oleh dunia Islam adalah yang pertama karena kemunculannya mempunyai konteks yang sangat lain.

Kalau melihat di negara-negara Barat yang menganut prinsip sekularisme, tampaknya merebak kecenderungan penolakan terhadap agama, atau terjadi kemunduran agama (decline of religion) *di sana. Terlepas bahwa realitas tersebut benar atau tidak, tetapi menurut Anda apakah paham sekularisme itu berpengaruh kepada kemunduran agama?*

Sejauh yang saya baca dan saya saksikan di dunia Barat, *churchgoers* mengalami proses mengkerut. Semakin lama pengunjungnya semakin sedikit. Kekosongan gereja-gereja di Eropa dan Amerika merupakan pandangan yang umum. Bahkan beberapa gereja malah menjadi toko, koperasi, istana olahraga, dan sebagainya. Itu sesuatu yang biasa. Tetapi melihat kekosongan gereja tidak lantas kekristenan orang Barat berkurang. Mereka tetap mengagungkan peradaban Kristiani. Mereka tidak bosannya membanggakan akar sejarah mereka dan mereka tetap membanggakan prinsip Kristiani meskipun secara ritual mereka tidak pernah datang ke gereja. Saya mempunyai kesan bahwa mereka yang mendeklarasikan diri sebagai sekularis dan sebagai agnotisis, sebagai orang yang tidak peduli sama agama sekalipun, sesungguhnya tetap saja taat pada etika Kristen. Jadi kadang-kadang orang Islam bisa salah tangkap dengan ritualitas Kristen yang sudah tidak meriah itu lalu meloncat pada kesimpulan bahwa Kristen sudah binasa di Barat. Menurut saya tidak sama sekali.

Meskipun Anda mengatakan bahwa Islam sulit menerima sekularisme atau sekularisasi karena tidak ada konsep di dalamnya, tapi beberapa kalangan intelektual Islam menganggap justru Islam sangat mendukung gagasan itu. Sejak dari awal, Nabi Muhammad berperan sebagai pemimpin agama, tetapi dalam aspek lain juga sebagai pemimpin politik, di mana dalam aspek di luar persoalan agama ini beliau menyatakan, "Kalian lebih mengetahui urusan duniamu." Demikian pula setelah Umayyah, dalam sejarahnya otoritas politik berbeda dengan otoritas keagamaan. Jadi ada semacam bukti sejarah yang mengatakan itu.

Saya bisa membalik logika itu dengan logika bahwa para pemimpin Islam juga mereferensi Nabi Muhammad, sebagai rujukan moral dan etikanya. Jadi sampai sekarang pun para pemimpin di dunia Islam yang paling sekularpun berlomba-lomba untuk menciptakan citra sebagai Muslim yang baik. Mereka tidak lantas berani meninggalkan salat Idul Fitri dan Idul Adha atau menghapus perayaan *nuzûl al-Qur'ân* dan maulid Nabi. Itu tidak mungkin. Jadi, kalau mereka dianggap tokoh-tokoh Islam, dan berpolitik lantas dianggap menimbulkan sekularisme, pandangan seperti itu bisa diterima. Itu cara pandang mereka yang berbeda.

Liberalisme memberikan inspirasi bagi semangat kebebasan berpikir kepada masyarakat untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah-masalah yang tengah dihadapi. Sehingga, jika ada kompetisi gagasan atau kompetisi ide serta rivalitas antar-pemecahan intelektual bagi masalah-masalah yang konkret, justru dipuji dan dianjurkan dalam Islam.

Dalam kasus yang sama, memang moral agama tetap dipegang. Kasus yang sama di negara-negara sekular, seperti Amerika, bahkan bukan hanya moral agama yang mereka yakini dalam memerintah tetapi juga simbol-simbol agama.

Justru banyak dari kita yang mengalami kompleks rendah diri. Mereka ingin seperti Barat lantas mau meninggalkan agamanya dengan bergaya sekular, modern dan sebagainya. Seperti yang saya katakan bahwa orang Barat yang dianggap sekular itu pun tetap moral etikanya merujuk moral Kristiani. Kalau Anda ke Amerika dan Eropa di sana ada sebuah istilah yang sebenarnya mendominasi perilaku negara-negara Barat yang dinamakan *Judeo-Christian Ethic* (Etika Yahudi-Nasrani). Semua itu sumbernya agama. Jadi, saya merasa sebagai intelektual Islam, saya tidak tahu cara pembacaannya sehingga kemudian sampai pada kesimpulan bahwa Islam sejak semula selaras dengan sekularisme. Jawaban saya: *I get lost*. Jadi saya punya logika sendiri. Namun begitu, saya tetap menghormati logika mereka.

Hanya saja, menurut saya, kalau orang Islam membangun dunia, membangun kesejahteraan ekonomi, sosial, keadilan politik, hukum, pendidikan dan seterusnya, semua itu hendaknya bermotivasi atas agamanya. Jadi setiap sepak terjang kaum Muslimin di semua kehidupan, motivasinya mencari "ridlo ilahi". Jadi, perdebatan-perdebatan mengenai tema ini dapat dikatakan sudah kuno, tidak ada lagi yang baru. Justru saya hanya mengingatkan, kita tidak pernah melampaui perdebatan yang sudah terjadi di Mesir, Maroko, Iran dan Irak saja, tetapi hendaknya juga di kalangan kaum Muslimin yang hidup di dunia Barat. Tetapi bagi saya jangan sampai kita ini terjebak pada perdebatan semantik yang memang tidak akan pernah selesai. Perdebatan antar-kelompok Islam bahwa sesungguhnya

agama mengandung elemen-elemen sekularisme atau Islam sudah cukup dengan dirinya yang menjadi lumbung sumber pemikiran untuk memecahkan masalah-masalah dunia. Hal itu sejak dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun akan menjadi *intellectual exercise* yang menarik. Justru menurut saya perdebatan seperti ini jangan dihentikan. Namun demikian jangan sampai melupakan tugas pokok kaum intelektual. Buat saya perdebatan ini sedikit banyak sudah terlalu *luxerius*, terlalu mewah. Bolehlah kita semewah itu, tetapi basis dan kebutuhan pokok umat yang banyak jangan lantas kita lupakan. Umat kita menghadapi pengangguran yang semakin meluas, kemiskinan yang semakin bertambah, kerusakan ekologi yang semakin tidak ada harapan lagi, kemudian akhlak bangsa semakin karut-marut, demikianpun penegakan hukum yang demikian skematis atau tebang pilih. Kemudian dalam konteks seperti ini, nasib umat Islam menjadi kurang jelas.

> Islam sama dan sebangun dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sehingga kita mudah sekali menerima hal-hal yang memang universal tersebut.

Untuk itu, kalau para intelektualnya terlalu sibuk dan asik-masyuk dengan perdebatan pluralisme, eksistensialisme, lantas humanisme, aktivisme, sekularisme, dan segala macam, saya khawatir kita akan menjadi intelektual yang ada di menara gading, yang menikmati *intelectual debate* semata. Sementara, keadaan umat sendiri mengalami depresi. Jadi saya sebagai orang yang sudah mengembara ke Chicago, Al-Azhar, kembali ke Gajah Mada dan IAIN, saya merasa bahwa kita harus tetap konsentrasi. Energi serta kemampuan kita hendaknya difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah umat yang lebih mendesak. Jadi hal yang tengah

kita jalani ini biarlah dinikmati oleh kaum kelas menengah terdidik ke atas, tetapi jangan sampai kita kemudian asik di situ dan kita tidak pernah turun. Jangan lupa pada akhirnya prototipe intelektual Islam yang maha puncak itu namanya Nabi Muhammad saw. Jangan lupa dalam ayat kedua surat al-Jumu'ah Allah mengatakan: "Dialah yang telah membangkitkan di tengah-tengah umat yang banyak itu, seorang Rasul yang membangkitkan, yang mempurifikasi kejiwaan mereka, yang mengajarkan ilmu di tengah umat yang banyak. Kemudian sang Rasul itu mengeluarkan umat yang banyak tersebut dari kegelapan ke terang benderang". Jadi, kita jangan menjadi intelektual salon, yang asik-masyuk dikelilingi timbunan buku dan *print out* komputer, tetapi kita kemudian lupa dengan massa riil yang kita alami sekarang. Ini sekadar himbauan saja.

Artinya, daripada kita menghabiskan energi intelektual kita untuk masalah yang kita bicarakan ini, lantas mengapa kita seolah lupa bahwa Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang sangat terbelakang. Indonesia tergolong sebuah negara dengan pemerintahan kleptokrasi, di mana kaum kleptokrat atau para pencuri besar itu memegang kekuasaan, kemudian kleptokrasi Indonesia ini menghamba kepada sebuah kekuatan di bidang ekonomi dan militer yang dinamakan "korporatokrasi". Para korporatokrat mempunyai kekuatan intelektual, informasi, ekonomi, finansial, pertahanan dan militer untuk mencengkeram dunia Islam. Mengapa kita tidak membangun kekuatan perlahan-lahan untuk mendepak cengkeraman itu. Pasalnya, sumber-sumber daya alam negara Muslim seperti Indonesia sudah dikuras atau akan dikuras habis oleh kekuatan korporasi yang penuh skandal dan betul-betul eksploitatif itu. Kalau kaum intelektual Muslim di negeri ini memfokuskan perhatian dan tenaganya ke hal-hal seperti itu, mungkin akan lebih

produktif. Kita harus mulai menjelajah dan masuk pada perdebatan semacam itu. Jadi, menurut hemat saya, hal-hal yang mewah seperti itu jangan terlalu kita kembangkan karena bisa melupakan persoalan bangsa yang riil. Umat semakin parah, kian compang-camping, kehilangan daya, sementara Nabi pernah mendambakan Muslim yang kuat. Muslim yang kuat lebih dicintai Allah daripada Muslim yang lemah. Muslim yang kuat ilmu pengetahuan, ekonomi, wawasan, teknologi, diplomasi, militer, dan seterusnya. Jadi, menurut saya harus ke sanalah diskusi kita. Boleh saja perbincangan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme ini diteruskan, tetapi jangan sampai menimbulkan bentrok, sehingga saling merasa satu sama lain berbeda.

> Islam itu bukan Barat dan bukan pula Timur. Kendati demikian. kearifan, kreativitas dan inovasi dari manapun adalah milik Islam.

Sebelumnya Anda pernah mengeluarkan satu teori tentang topik sosial semacam itu. Tetapi kalau hendak mengaitkan gagasan Islam ke arah topik sosial tersebut, formulasi seperti apa yang kiranya sesuai dengan bentuk negara kita dalam menjamin dan melindungi masyarakat sipil, juga mendorong warga melakukan perlawanan, termasuk advokasi pada persoalan-persoalan riil negeri ini, seperti penguatan masyarakat yang terlemahkan?

Untuk upaya mengejewantahkan gagasan Islam ke dalam topik sosial itu perlu payung. Tanpa adanya payung itu maka nilai-nilai Islam dan kemajuan umat Islam akan tertatih-tatih. Maka Islam yang *kâffah* tidak boleh memisah-misahkan ini Islam ekonomi, Islam pendidikan, Islam politik, Islam ukhrawi, Islam pesantren,

dan sebagainya. Jadi, maksud saya, memang gagasannya hanya mengawang-awang dan tidak ada kekuatan untuk menegakkan keadilan multi-dimensional.

Namun perlu digarisbawahi di sini, Islam itu bukan Barat dan bukan pula Timur. Kendati demikian, kearifan, kreativitas dan inovasi dari manapun adalah milik Islam. Sehingga Nabi mengatakan, "*al-hikmatu dlallatu al-mu'min fa-khudzhâ min ayyi wi'â'in kharajat*". Jadi "*wisdom*" adalah mutiara yang hilang dari khasanah kaum Muslimin. Maka ambillah mutiara itu dari bejana manapun dia keluar. Jadi secara ekstrem walaupun keluarnya dari mulut anjing, "kalau berlian, ya tetap berlian". Artinya kita tidak ada *moral obstacle*, *moral handicap* untuk menerima berbagai kearifan, *wisdom*, inovasi, kreasi dari manapun juga datangnya, karena Islam sama dan sebangun dengan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sehingga kita mudah sekali menerima hal-hal yang memang universal tersebut.

Kira-kira gagasan Anda juga sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Casanova. Dia berbicara tentang public religion *sebagai bantahan terhadap usaha kaum sekular yang kukuh memprivatisasi agama. Padahal, dalam kenyataannya, dimensi agama benar-benar tidak mungkin dirumahkan atau diprivatisasi semuanya. Agama juga selalu bergairah untuk masuk ke wilayah publik. Lantas, bagaimana mendamaikan kedua kecenderungan yang berlawanan tersebut?*

Saya tidak ingin bicara yang terlalu konseptual. Akan tetapi saya ingin mengambil contoh yang konkret saja. Lihatlah misalnya Partai Islam Turki. Di bawah Erdogan Turki bisa mengempaskan keterbelakangan masa lalunya untuk kemudian menjadi negeri

Turki yang modern sejajar dengan Portugis dan Spanyol, bahkan mendekati Italia, juga, bahkan, suatu ketika nanti menyamai negara-negara Eropa yang paling maju. Tapi, lihatlah Erdogan tidak pernah meninggalkan tradisi keislamannya. Lihat juga kebijakan Mahathir Mohammad, misalnya. Mahathir Mohammad kerap dikatakan sebagai tokoh sekular. Dia pemimpin Muslim yang tahu modernitas dan mengetahui kekuatan globalisasi, sekaligus juga paham pencak silat di tengah serbuan globalisasi dan dengan sangat anggun dia membawa Malaysia ke tataran negeri Muslim yang sangat kuat.

Demikianpun Presiden Ahmadinejad. Orang muda satu ini mantan Walikota Iran yang sangat cinta dan bangga dengan Islamnya, kemudian dia menciptakan Iran yang secara militer sangat kuat sehingga tidak bisa diringkus dan didikte oleh Amerika. Bahkan, hutang luar negerinya mungkin kecil sekali dan secara ekonomi juga *survive*. Namun begitu, tidak ada yang mengatakan bahwa pemerintahan Ahmadinejad dianggap sekular, justru sangat Islam.

Contoh lain, kadang-kadang kita sudah lama sekali di-*brainwashed* oleh probencong-probencong politik di Barat. Kemudian kita terkagum-kagum pada Barat, sementara kita lupa khasanah kita sendiri. Buat saya, kalau kita sudah mengarungi dunia Barat dan sudah paham dengan khasanah Islam, maka tidak ada beban mental lagi untuk menerima demokrasi. Sebagaimana juga para pendahulu kita percaya diri untuk bicara dengan posisi yang penuh keyakinan, berbicara tentang kebagusan Islam di tengah dominasi kapitalisme – dan sosialisme, di masa lalu. Jadi, kita bisa ber-*i'tibâr* kepada intelektual Muslim seperti Muhamad Iqbal, Muhamad Abduh, bahkan dalam konteks itu ada Haji Agus Salim dan Moehammad Natsir. Tidak ada yang mengatakan bahwa Agus Salim

dan Moehammad Natsir itu orang yang lebih terbelakang dari Muhamad Abduh, dan sebagainya.

Jadi, justru kalangan intelektual muda sekarang ini saya harapkan mampu menjelajah khasanah intelektual dari khasanah Timur. Begitupun saya sangat berharap pada Islam sendiri, tentu saja, sehingga menjadi *balance*, seimbang.

Banyak orang acapkali menolak liberalisme dengan mengidentikkannya sebagai gagasan yang melatarbelakangi munculnya imperialisme dan kolonialisme. Pandangan Anda?

Di dalam diri mereka sendiri terjadi pergulatan luar biasa. Jadi misalnya ada perdebatan seputar liberalisme, libertarianisme, neoliberalisme, bahkan ada juga yang anti-neoliberalisme. Demikian pula di antara mereka ada upaya yang mendamaikan antarsemua isme-isme. Jadi, kita tidak bisa lantas terseret ke perdebatan alot mereka. Hanya saja kita harus tetap ingat bahwa liberalisme intinya memberikan kebebasan berpikir kepada masyarakat. Itu hal yang bagus. Kemudian liberalisme menimbulkan mazhab ekonomi kapitalisme, dengan asas *laissez faire* yang mendorong pasar bebas. Paham ini juga mendorong kondisi ala determinisme sosial, kemudian *the survival of the fittest* dan *struggle for life*.

Demikianlah yang dapat kita identifikasi perihal liberalisme. Kemudian semangat kebebasan berpikir inilah yang dapat dikaitkan dengan sumber-sumber dalam Islam. Karena kita sendiri mempunyai khasanah yang sesungguhnya sudah sangat *resourceful* yang bisa kita kembangkan secara anggun dan secara rasional. Saya yakin sumbersumber tersebut sudah cukup membumi. Tetapi hendaknya kita bantu dengan mengkonfron-tasikan khasanah kita tersebut ke

dunia Barat, Timur, Utara dan Selatan supaya lebih matang lagi. Karena kita hidup pada zaman di mana kita harus betul-betul menjadi manusia globalis.

Tadi Anda mengatakan bahwa Islam yang dipahami haruslah dengan pemahaman yang bersifat responsif, bisa mengangkat kaum tertindas dan sebagainya, termasuk dalam persoalan negara, yang di dalamnya juga terdapat ketegangan dengan agama. Apakah gagasan ideal yang Anda pikirkan sudah tercakup dalam Pancasila, sebagai dasar negara kita, atau belum?

Saya kira sudah tercakup di dalamnya. Jadi Pancasila hanya ekstrak dari budaya dan kesejarahan kita yang diformulasikan oleh para pemimpin kita. Jangan lupa masyarakat sebenarnya *open ended*, jadi kata-kata seperti itu manis sekali, sehingga bisa dikembangkan lagi secara fleksibel untuk kebutuhan zaman. Di dalamnya tercakup sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan sosial, perikemanusiaan, yang merupakan nilai-nilai universal yang tercakup dalam Islam juga. Sehingga saya ingat betul bagi orang Islam, meminjam ungakapan Moehammad Natsir, tidak mungkin menolak Pancasila. Karena Islam sejatinya serba sila, lebih dari lima sila itu. Untuk itulah kita terima Pancasila, kita nikmati, karena itu juga datang dari khasanah Islam.

Menurut Anda apakah paham syariat Islam yang klasik-konservatif tidak perlu dipertentangkan dengan Pancasila atau UUD '45?

Saya kira kalau syariat Islam diambil esensinya, maka ketemunya sama. Cuma kadang-kadang kita selalu terjebak dalam politik gincu,

politik bendera, sementara lupa politik garam. Kita nikmati politik gincu dan politik bendera, sehingga dari situ kita membuat dan menerapkan perda syariah, kemudian geger; kita tegakkan negara Islam, geger juga. Sebaliknya kita seolah-olah tidak usah gembar-gembor nilai-nilai Islam yang universal, yang bisa dinikmati oleh bangsa ini, baik masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Yang non-Muslim akan terproteksi, akan mendapatkan hak-hak politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan hukum yang sepenuhnya dengan nilai-nilai universal Islam yang seutuhnya.

Tetapi kalau di antara kita sudah meniupkan peluit membentuk negara Islam, maka teman-teman TNI, teman-teman nasionalis, teman-teman minoritas akan pasang kuda-kuda dan akan menimbulkan kontroversi yang sangat melelahkan. Padahal kalau kita mengambil politik garam, yakni bagaimana kita berbuat sesuai dengan nilai-nilai Islam yang universal, tentunya bangsa ini akan menerima. Saya ingat Pak Hatta pernah mengatakan janganlah kita selalu terjebak ke dalam politik gincu, tetapi gunakanlah politik garam.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006

Percakapan dengan

M. Amin Abdullah



M. Amin Abdullah, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Ia memperoleh gelar doktor dari Departemen Filsafat, Faculty of Art and Sciences, Midle East Technical University (METU), Ankara, Turki (1990) dan menempuh program Post-Doctoral McGill University, Montreal, Kanada (1997-1998).

Ketika agama dimanipulasi untuk kepentingan publik demi memperoleh atau merebut kekuasaan, muncullah dogmatisme dan menimbulkan *clash* atau *religious adherent* yang dapat berujung *violence*. Karenanya, untuk menjaga stabilitas warga, organisasi-organisasi keagamaan atau kefatwaan tetap diberi tempat, dengan disertai pembekalan bagi tokoh-tokohnya lewat agenda peningkatan kualitas pendidikan. Maka sekularisasi dalam pengertian proses yang sangat terkait dengan *the idea of progress* dan, terutama, kemajuan pendidikan harus terus diupayakan. Celakanya, selama ini pendidikan kita lebih menekankan sisi teologis, yang sebenarnya menjadi sumber tingginya *al-'aql al-lâhûtî,* nalar semi ketuhanan, ketimbang mengeksplorasi *al-'aql al-falsafî*, *al-'aql al-'ilmî* atau *al-'aql al-târîkhî*, yang merupakan dimensi antropologis dari pemikiran tentang ketuhanan.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme, apa implikasi gagasan tersebut ketika ditransfer ke Indosesia, lalu mengapa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan beberapa umat Islam menentangnya?

Pertama, kata *"secular"* akarnya dari Barat. *Kedua*, ia didahului dengan gerakan reformasi, yang sebelumnya seluruh aspek kehidupan manusia menjadi monopoli gereja, khususnya kurun waktu abad ke-12 dan 13, yang lazim disebut *"the golden age of Catholicism"*. Jadi sekular dalam ranah keagamaan yang origin berasal dari monopoli Katolik. Baru kemudian muncul gerakan yang bernama Protestan. Tetapi, itu juga masih dalam lingkup keagamaan. Belakangan, muncul Max Weber dengan *The Protestan Ethic*, yang sedikit banyak nanti akan menyentuh isu sekularisme. Yang pertama dan kedua jelas pengalaman Barat. Kemudian yang *ketiga* adalah wilayah ekspresi *behavior*: perilaku politik, sosial dan keagamaan, yang beroperasi lebih pada dataran sosiologis, bukan dataran *faith* atau keimanannya.

Sehingga, sebelum lebih jauh melihat isu tersebut dibawa ke Indonesia, hendaknya dikomparasikan dahulu bagaimana akar katanya dan sejarahnya seperti apa, juga harus dipertimbangkan pergumulan intelektual, organisasi dan seluruh aspek yang terkait dengannya. Ini tidak bisa langsung loncat. Artinya, ini agak sulit, karena berbeda konteks dan sejarahnya. Peristiwa itu sudah terjadi 500 tahun yang lalu. Rentetannya panjang. Barat harus melewati 4 – 5 abad untuk sampai ke situ. *Al-Ishlâḥ al-dînî* atau gerakan reformasi keagamaan itu pada abad ke-15. Kemudian disusul *Renaissance* abad ke-16; abad ke-17 merebak *rasionalism* (Descartes dan sebagainya) dan empirisme (Hobbes dan Locke); abad ke-18 *Enlightenment*, masa pencerahan Inggris dan Prancis atau *aufkalrung* Jerman dengan gerakan rasional Immanuel Kant dan sebagainya.

Setelah itu baru pada abad ke-19 muncul gagasan *nation-state*. Cara berpikir, bergaul dan bertindak pada era *nation-state* tentu saja sudah jauh berbeda dengan cara berpikir dan bertindak pada era *golden age of Catholicism* abad ke-12–13. Dengan menimbang betapa jauhnya rentangan yang telah dilalui, kata *"secular"* secara historis memang amat kompleks dan panjang, sehingga tidak bisa langsung dipotong.

Perihal pengharaman dan resistensi terhadap sekularisme oleh MUI, dalam arti MUI sebagai simbol hegemoni, monopoli, atau *center of power* keagamaan, hal itu mirip dengan situasi Eropa abad ke-13 dan ke-14 sebelum sampai pada era *al-ishlâḥ al-dînî*. Jika memang demikian, maka pengharaman adalah hal yang wajar dan dapat dipahami, mengingat *discours* dan wacananya masih seperti di Eropa abad ke-13-14, masih pada *the early beginning* dari sejarah pergumulan agama dan kekuasaan, *prior to idea of secularization*, sebagaimana Max Weber dengan jelas memotret itu.

Alasan umat Islam dan termasuk juga masyarakat Barat (khususnya kalangan gereja Katolik) menolak ide sekularisme, karena mereka beranggapan bahwa sekularisme memunculkan "decline of religion", *implikasi dari pemisahan antara agama dengan negara, pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan aspek moral atau teologi. Benarkah anggapan seperti itu?*

Sekularisasi, sebenarnya, tidak otomatis mengakibatkan *decline of religion*. Proses tersebut pada hematnya ada dua: *cyclic decline*, kelihatannya turun tapi kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi dan seterusnya. Sehingga agama tidak akan pernah hilang. Tetapi, kekhawatiran dari banyak kalangan terhadap sekularisme yai-

tu manakala proses tersebut berujung pada *linear decline* – yang mana agama terus-menerus mengalami *decline* dan hilang, lantaran orang sama sekali meninggalkannya. Namun, yang terjadi di Barat sekalipun, tidak seperti itu, apa lagi di Timur. Di Barat yang terjadi adalah *cyclic decline*. Oleh sebab itu, seluruh kekhawatiran tersebut harus ditinjau ulang. Banyak orang Barat tidak masuk ke gereja, namun bukan berarti tidak beragama. Barat, dalam hal ini Eropa, secara historis dulunya Katolik, yang dengan institusi gerejanya memonopoli agama hampir di seluruh wilayah Eropa, kemudian muncul Protestan, lantas terjadilah *al-ishlâḥ al-dînî*. Baru setelah itu timbul keinginan agar agama tidak lagi memonopoli ke segenap dimensi hidup manusia. Maka dipisahkanlah agama dari negara.

Sekularisasi, sebenarnya, tidak otomatis mengakibatkan *decline of religion*. Proses tersebut pada hematnya ada dua: *cyclic decline*, kelihatannya turun tapi kemudian naik lagi, turun lagi, naik lagi dan seterusnya. Sehingga agama tidak akan pernah hilang. Tetapi, kekhawatiran dari banyak kalangan terhadap sekularisme yaitu manakala proses tersebut berujung pada *linear decline* – yang mana agama terus-menerus mengalami *decline* dan hilang, lantaran orang sama sekali meninggalkannya. Namun, yang terjadi di Barat sekalipun, tidak seperti itu, apa lagi di Timur. Di Barat yang terjadi adalah *cyclic decline*. Oleh sebab itu, seluruh kekhawatiran tersebut harus ditinjau ulang.

Namun demikian, di Barat, orang yang beragama sendiri tetap mempunyai *share* yang besar sekali untuk perkembangan lebih lanjut atas peran dan fungsi agama. Misalnya, yang menggerakkan revolusi Prancis adalah orang-orang yang beragama juga, yakni para

penganut Katolik. Untuk itu, idealnya sejarah panjang Eropa dipelajari terlebih dahulu, sebelum lompat atau melangkah lebih lanjut ke persoalan MUI yang menolak isu liberalisme, pluralisme dan termasuk juga sekularisme. Sehingga patut disyukuri, setelah monopoli Katolik berlangsung begitu lama, kemudian muncul Protestan. Setelah itu jargon yang dimajukan adalah pemisahan negara dan agama. Tetapi, itu hanya pada level publik. Sementara pada level moral dan *faith*, secara prinsipil, tidak ada pengaruh. Pada kedua level ini masyarakat Barat masih tetap seperti dulu.

Sejarah sekularisme di Eropa memang berbeda dengan Amerika, Kanada atau negara-negara Islam. Karena gereja begitu dominan cengkeramannya, resistensi masyarakat Eropa terhadap agama atau gereja juga kuat. Bahkan, anti-agama justru menjadi fashion*,* life style*, bagi mayarakat Eropa sekarang. Hal ini berbeda dengan Amerika, yang sekularismenya begitu* soft*, santun. Apa pendapat Anda ihwal sekularisme Eropa?*

Against religion sebagai *life style* merupakan budaya yang baru di Eropa lantaran dahulunya hegemoni gereja mencengkeram kuat. Tetapi apa yang terjadi di Amerika memang berbeda sama sekali. Karena di sana berkumpul kaum-kaum imigran Eropa yang sudah merasa gerah dengan kungkungan gereja, lantas mereka mendirikan *culture* yang sama sekali baru. Colombus dan yang lainnya dari negeri-negeri Eropa seperti Irlandia, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman dan sebagainya, yang sudah merasa jenuh dengan *culture* di sana, lantas meninggalkannya dan membikin yang baru. Jadi kualitasnya jelas berbeda dengan induknya (Eropa).

Sekularisasi, dalam sejarahnya, memunculkan privatisasi agama. Bagaimana komentar Anda tentang privatisasi agama. Apakah hal itu merupakan suatu yang semestinya dikehendaki atau justru suatu hal yang harus diantisipasi?

Privatisasi tidak jelek. Hubungan dengan Tuhan memang sesuatu yang privat. Di dalam Islam pun ketika kelak malaikat menanyakan "mau masuk surga atau neraka" itu yang ditanya individu, bukan komunal atau organisasinya. Memang agama mulanya merupakan dimensi yang sangat privat. Sehingga Cantwell Smith membedakan antara *faith* dan *tradition. Faith* merupakan ranah yang internal, tak mungkin dapat dihindari, *transcendental,* dimensi *inwardly affairs.* Sementara *Tradition* adalah dimensi luar dari agama, eksternal, *observable*, *social and historical aspect of religiousness* untuk setiap masyarakat beragama. Karena itu agama seharusnya dilihat dari dua aspek tersebut, yaitu lahiriah dan batiniah. Kalau tidak demikian, kita akan selalu khawatir melihat peran agama dalam era modern. Dengan demikian, *personal life* justru merupakan *the essence of religion*. Ka-

> Pada dasarnya sekularisasi atau apa saja, dalam pengertian proses, sangat terkait dengan *the idea of progress* dan, terutama, kemajuan pendidikan, *the rise of education*, bukan lagi negara. Negara hanya sebagai fasilitator. Mustahil negara menjadi besar sementara rakyatnya bodoh tak berpendidikan yang baik. Yang terpenting rakyatnya harus diberi pendidikan yang memadai, terlebih lagi di era modern seperti sekarang ini. Modernisasi sangat terkait dengan pendidikan. Kalau pendidikannya tidak bergerak, maka sekularisasi juga otomatis akan sulit berkembang.

lau Anda memasuki wilayah komunal dari agama seperti syariah, yang tidak lain adalah wilayah publik, maka Anda sedang mengamalkan *tradition*. Aspek politik, sosial dan pendidikan dari agama, terlebih organisasinya, lantas hubungan ekonominya seperti apa, semuanya adalah tradisi.

Seringkali ide privatisasi agama ditolak karena mengebiri dimensi moral dan semangat sosial dari agama dalam wilayah publik. Sehingga Jose Casanova memunculkan istilah "deprivatisasi" agama. Agama harus tetap punya fungsi dan peran moral dalam wilayah publik, civil society, *bukan negara. Setujukah Anda dengan gagasan tersebut?*

Adalah tidak salah apabila Casanova menghendaki seperti itu, silakan saja. Tetapi sifat privat dari agama jangan sampai dihilangkan. Bagaimanapun deprivatisasi yang dimaksudkan Casanova tentu saja di dalamnya mengemban agenda politik, yang berarti bukan lagi aspek inner dari agama itu sendiri. Padahal hubungan seseorang dengan Tuhannya sangatlah pribadi. Sebab yang menyabut nyawa orang tersebut juga Tuhan sendiri. Semua agama juga meyakini semua itu. Jadi, deprivatisasi agama sebenarnya masuk urusan politik dan berarti juga wilayah publik. Sementara, wilayah privat harus tetap ada. Agama jangan seluruhnya dideprivatisasi. Di sini, penting membedakan antara wilayah moral sosial keagamaan dengan moral individual yang sangat terkait dengan esensi ketuhanan, *the idea of Holly*. Hal-hal yang suci, yang transenden, yang *beyond the limit of intelligent* merupakan ranah pribadi. Maka Casanova dan yang lainnya tengah menganalisis peran agama di berbagai negara, lebih-lebih di Amerika Latin, yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik dan ingin melegitimasikan agama kembali dalam

kehidupan publik. Sehingga, sejatinya hal tersebut menunjukkan adanya *cyclic decline*, bukan *linear decline*, karena sekarang mereka mulai senang kembali menggunakan agama sebagai basis politik. Politik untuk menggagas ide-ide moral lewat alat atau tangga yang bernama agama. Jika demikian, dua-duanya sulit dibedakan antara *social function of religion* dan *individual function of religion,* padahal keduanya tak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan.

Agama jangan seluruhnya dideprivatisasi. Di sini, penting membedakan antara wilayah moral sosial keagamaan dengan moral individual yang sangat terkait dengan esensi ketuhanan, *the idea of Holly*.

Menurut Anda apakah sekularisasi sebenarnya proses keniscayaan yang alamiah atau sesuatu yang harus dilalui dengan sokongan dari negara, seperti Turki dan kebanyakan negara Eropa, lantas proses ideal seperti apakah yang harus diterapkan di Indonesia?

Pada dasarnya sekularisasi atau apa saja, dalam pengertian proses, sangat terkait dengan *the idea of progress* dan, terutama, kemajuan pendidikan, *the rise of education*, bukan lagi negara. Negara hanya sebagai fasilitator. Mustahil negara menjadi besar sementara rakyatnya bodoh tak berpendidikan yang baik. Yang terpenting rakyatnya harus diberi pendidikan yang memadai, terlebih lagi di era modern seperti sekarang ini. Modernisasi sangat terkait dengan pendidikan. Kalau pendidikannya tidak bergerak, maka sekularisasi juga otomatis akan sulit berkembang. Dengan pengertian lain ide kemajuan akan benar-benar terwujud lantaran keberhasilan pendidikan. Di sisi lain, agama sebagai dimensi privat, hubungan yang

sangat intim antara pribadi manusia dengan Tuhannya, tidak akan pernah meredup dan punah. Sebab, agama, kapanpun, tidak bisa hilang. Persoalannya adalah upaya memanipulasi agama untuk kepentingan politik sangat rentan berbuah kekerasan.

Agama idealnya wilayah pribadi, hubungan saya dengan Tuhan, dan sebagai media untuk meminta petunjuk, keselamatan serta mengharap bimbingan Tuhan. Tetapi, ketika agama dimanipulasi demi kepentingan publik untuk memperoleh atau merebut *power* atau kekuasaan, muncullah dogmatisme, ketertutupan, dan menimbulkan *clash*, untuk tidak menyebut *clash of religions (religious adherent),* yang berakibat juga pada *violence*. Karena itu harus hati-hati, demarkasinya mesti dipertegas. Ketika agama dibawa ke wilayah politik, *that's mean economy and power*, maka di situlah pangkal kesulitannya, dalam arti kekerasan masuk di dalam agama. Itu sudah tidak *rahmatan li al-'âlamîn*, tidak *ahimsa* lagi. Itu perbuatan yang sepenuhnya *worldly* and *social affair*, karena terkait dengan pengelolaan sumber penghidupan, pembagian rizki, *taqsîm al-arzâq* dan perebutan pengaruh/ kewibawaan.

Kalau tidak salah baca, ide-ide Anda tentang liberalisme bercorak Kantian, dalam arti bahwa kebebasan individu untuk memeluk atau menafsirkan agama adalah sesuatu yang sifatnya otonom dalam diri individu dan tidak bisa dibatasi oleh formalitas agama. Apakah memang arah kebebasan agama yang ingin diperjuangkan Anda seperti itu?

Agama sangat terkait dengan *the idea of Holly*, adanya hal yang suci dalam hubungan pribadi seseorang yang senantiasa memohon bimbingan kepada Tuhan. Di luar itu, atau ketika agama diseret ke

ranah sosial, politik dan sebagainya, berarti, pertama, agama sudah menjadi wilayah *culture* atau *tradition*, sebagaiman sudah disinggung di atas; kedua, agama sudah terkena manipulasi ekonomi, *religionomic*, dan politik, *politiconomic*. Hal itu sah-sah saja. Tetapi hal semacam itu sifatnya *religionomic* yang mengandung hukum *supply and demand*, yang berarti mereduksi *the idea of Holly* dari agama. Agama dalam lingkup semacam itu tidak lagi *genuine*, otentik. Memang, hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan juga meliputi hubungan *supply and demand*. Karena manusia merasa serba terbatas, sehingga ia ingin sesuatu yang bisa menolong dari segala keterbatasannya. Namun, *supply and demand* dalam hal ini sifatnya *genuine*. Pribadi itu lebih *genuine*. Jadi, sekali lagi, hubungan seseorang dengan Tuhan mencakup aspek *supply and demand* karena ia perlu pengayoman dari Tuhan yang *al-Rahmân al-Rahîm*. Artinya, agama itu mempunyai dua wajah, privat dan sosial sekaligus.

> Saya termasuk penganut legal pluralism. Karena itu, usaha untuk melegal-formalkan syariat Islam merupakan hak bagi siapapun. Sebab, hal-hal yang legal itu bermacam-macam. Namun harus ditekankan di sini suatu kesadaran yang dapat mengayomi, bukan malah memonopoli, yang harus dimiliki oleh para tokoh agama.

Perbincangan ini memang sulit, kalau tidak mengenal *religious studies* yang matang, tidak sekadar *Islamic studies*. Bahkan semua itu harus terlebih dahulu melakukan komparasi antara sejarah Eropa dengan Timur Tengah, juga Indonesia. Kalau tidak begitu, akan kacau balau dalam melihat topik ini.

Apa yang dikatakan oleh Kant mengenai *ecclestical religion* dalam Katolik, merupakan monopoli kebenaran lewat institusi gere-

ja. Artinya dengan memonopoli kebenaran melalui institusi gereja (menginstitusikan agama), hal tersebut sudah melalui suatu proses yang disekularkan, *"worldly affairs"*. Sebab, "institusi" gereja adalah ranah yang sekular. Karena hal tersebut masuk wilayah sosial, *power*, ekonomi dan termasuk juga organisasi. Itu sangat nyata *religionomic* lantaran *supply and demand*-nya sangat terkait dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Umum di sini dalam arti melibatkan banyak orang, bukan individu belaka. Sementara idealnya kita meletakkan agama semata dalam level individu. Sehingga, ketika agama ditarik ke wilayah publik, maka segala akibat yang akan muncul kemudian harus segera dapat diantisipasi. Karena agama jika masuk dalam wilayah sosial-politik maka para pemimpinnya perlu memiliki *"skill"* baru seperti kemampuan, negosiasi, kompromi, *consensus,* mediasi, *social contract*, dan kecakapan mediasi sosial yang lebih dari manusia rata-rata. Pada saat itulah agama terperangkap dalam arus besar konflik, politik ataupun organisasi, yang sarat dengan gesekan, baik internal maupun eksternal-nya. Untuk itu, para agamawan sepatutnya memiliki alat-alat dan *social skill* untuk dapat mengurangi kekerasan. Itu problem tersendiri, yang sampai hari ini cukup rumit. Sementara ketika mereka menempuh pendididkan, hampir-hampir tidak pernah mengenal hal-hal seperti itu. Maka apakah para agamawan dibekali *how to solve the problem* atau tidak, lagi-lagi sangat tergantung bagaimana kualitas pendidikan mereka. Alih-alih mengayomi umatnya, salah asuh (agama) para pimpinan agama malah menumpuk berbagai persoalan menjadi beban umat, karena para pemimpinnya malah menjadikan agama *"a part of problem"* untuk tidak menyebutnya *"trouble makers"* dan jauh memiliki kemampuan *"problem solvers"*.

Hak dan kebebasan beragama sifatnya hakiki bagi setiap warga negara. Kebebasan beragama yang diekspresikan dalam wilayah individu, sebagai bentuk otonomi moral, meminjam istilah Kant, harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Apa pendapat Anda perihal kebebasan beragama?

HAM melindungi tidak hanya pribadi, tetapi juga kelompok sosial. Namun, karena ada kompleksitas ketika kebebasan individu diinstitusionalisasikan menjadi agama, ekonomi, politik dan kultur, sehingga timbul hak-hak kebebasan beragama, hak-hak ekonomi, politik, kultural dan lain sebagainya. Yang belum dilanjutkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) adalah ketika masing-masing mempunyai hak dan kemudian saling berkompetisi. Tentu saja kompetisi itu bagus. Tetapi, ketika terjadi *clash*, bagaimana menyelesaikannya, inilah yang belum masuk dalam *human rights*. Ketika terjadi *conflict of interest* yang mengarah ke tindak kekerasan, *violence*, "perangkat apa yang harus dimiliki oleh tokoh-tokoh agama?" Semua itu mendesak diperlukan sekarang. Melalui organisasi agama, apapun agamanya, termasuk organisasi-organisasi pembuat dan penyebar fatwa, dengan begitu tokoh-tokoh agama di dalamnya turut terlibat masuk ke dalam medan yang keras. Pendeknya, boleh jadi organisasinya tidak bermasalah. Tetapi, pangkal persoalan yang paling pelik manakala tokoh-tokoh yang menye-

Ketika agama dimanipulasi demi kepentingan publik untuk memperoleh atau merebut *power* atau kekuasaan, muncullah dogmatisme, ketertutupan, dan menimbulkan *clash*, untuk tidak menyebut *clash of religions (religious adherent),* yang berakibat juga pada *violence*.

tirnya tidak mempunyai bekal-bekal dasar yang memadai agar tidak terjadi konflik antar-komunal ketika masing-masing organisasi saling berkompetisi di pasar terbuka. Itu yang harus diperbaharui di era sekarang.

Adalah tidak mungkin, utopis, untuk menghilangkan organisasi atau agama. Karena itu yang terpenting adalah upaya pembekalan tokoh-tokoh agama; jangan kemudian seperti sekarang menjadi anggota DPR (sebagian anggota DPR) tanpa bekal apapun, asal jadi saja, dengan ijazah palsu, yang penting didukung oleh rakyat banyak, tanpa kriteria yang jelas. Seharusnya baik DPR maupun tokoh agama mempunyai kriteria semacam "lisensi" kecerdasan sosial-komunal. Kalau tidak, lagi-lagi, yang menjadi korban adalah rakyat atau umatnya, lantaran pemimpinnya sama sekali tidak visioner dan berpandangan sempit. Padahal pemimpin merupakan representasi dari rakyat banyak. Kalau ungkapan pemimpinnya ruwet tidak karuan, maka rakyat terbawa panas dan terbakar mendengar statemen-statemennya. Dengan demikian, untuk menjaga stabilitas segenap warga negara, maka tetap memberi tempat buat organisasi-organisasi agama atau kefatwaan, tetapi dengan disertai pembekalan bagi tokoh-tokohnya lewat agenda peningkatan kualitas pendidikan sebagaimana sudah disinggung di atas, untuk mengakses ilmu-ilmu baru, yang dapat mengatasi setiap implikasi sosial dan politik yang muncul dari kompetisi dan statemen-statemen di antara mereka. Hal ini harus *by training*, *by reading*, *by research* (penelitian) yang sungguh-sungguh dan seterusnya, sehingga tidak lagi terjadi "asal-asalan" memberi fatwa.

Terkait dengan kebebasan beragama yang kian terancam oleh gencarnya upaya dari kalangan umat Islam tertentu untuk melegal-formalkan nilai-nilai Islam, melalui perda syariah, di antaranya, bagaimana Anda melihat persoalan ini?

Saya termasuk penganut legal pluralism. Karena itu, usaha untuk melegal-formalkan syariat Islam merupakan hak bagi siapapun. Sebab, hal-hal yang legal itu bermacam-macam. Namun harus ditekankan di sini suatu kesadaran yang dapat mengayomi, bukan malah memonopoli, yang harus dimiliki oleh para tokoh agama. Lagi-lagi, lingkup persoalannya masih antara *faith and tradition*. Nilai-nilai agama ada pada *faith*, tetapi ketika diinstitusionalisasikan sudah masuk *tradition*, sesuatu yang berupa *institution*. Sedangkan setiap *institution* akan berimplikasi terhadap wilayah *religionomic*, dengan segala risikonya. Pokoknya, selama segala sesuatunya merupakan hak, kita tidak bisa melarang, justru mempersilakannya. Tetapi, semua itu harus diperhitungkan segala implikasi atau konsekuensi yang muncul kemudian.

Semua agama berbeda. Tidak ada agama yang sama. Berbeda dalam doktrinnya, dalam institusinya, kelembagaannya, pemimpinnya, jenis umatnya, hari besarnya, ruang, tempat, waktu yang dianggap suci oleh pengikutnya dan begitu seterusnya. Tetapi di dalam perbedaan itu terdapat *almaskut 'anhu*, *commonalities*, *common pattern* yang tidak terekspresikan keluar, dan yang tak terkatakan juga banyak. Artinya dalam masing-masing agama ada unsur-unsur kesamaannya, misalnya humanitasnya atau kemanusiaannya. Maka yang diperlukan sekarang adalah cara pendekatan yang baru.

Anda menegaskan bahwa ketika agama diseret ke ranah publik atau religionomic, *maka hal ini terkait dengan agamawan yang semestinya dapat melihat segala sesuatunya secara lebih baru. Persoalannya, ketika* legal pluralism *memberi ruang yang sangat lebar bagi usaha melegal-formalkan syariat Islam melalui perda, beberapa ketetapan hukum di dalam perda-perda tersebut, dalam praktiknya, justru mencabut atau merepresi hak dan kebebasan beragama warga negara lainnya. Lalu, bagaimana hal ini dapat diantisipasi?*

Begitulah kesulitannya. Karena itu, segalanya harus matang diperhitungkan oleh setiap tokoh agama.

Lantas apa peran negara dalam melindungi dan menjamin hak dan kebebasan beragama yang belakangan sering terancam?

Kita sepakat bahwa Indonesia merupakan *nation-state*. *Founding fathers* kita merumuskannya dengan matang. Jangan-jangan, munculnya kekhawatiran bahwa selama ini kebebasan beragama sedang terancam, karena negara tidak berfungsi lagi. Yang ada sekarang lebih banyak politisi, tetapi jarang sekali yang bisa naik ke jenjang "negarawan". Kalau kita sudah setuju bahwa Indonesia adalah *nation-state*, maka hukum-hukumnya harus sesuai dengan rumusan tersebut. Kalau ada hukum-hukum yang bertentangan dengannya, maka hal ini menjadi tugas negara, bukan tugas masyarakat. Masyarakat semata berharap dapat mengekspresikan keyakinan dirinya sendiri, karena inilah yang menjadi hak mereka. Maka yang harus menjadi perhatian negara: bagaimana menciptakan konsensus dalam wilayah publik yang tidak menyebabkan disintegrasi dengan wilayah yang sifatnya mempertahankan komunalitas. Di sini ne-

gara harus menghitung secermat mungkin, dengan menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara secara demokratis. Negara hendaknya melihat setiap kasus yang terkait dengan kebijakan publik, apakah nantinya berimplikasi negatif secara keseluruhan bagi segenap elemen masyarakat, atau hanya bagian-bagian tertentu saja. Apabila hanya poin tertentu dalam kebijakan tersebut, misalnya beberapa poin dari perda syariat Islam tidak terkait dengan komunitas di luar Islam, maka tidak perlu melibatkan komunitas lain. Artinya, karena Anda orang Islam, maka terikat dan dikenai seluruh poin-poin aturan yang diberlakukan, wajib memakai jilbab umpamanya. Lalu, apakah dalam pelaksanaan aturan pewajiban jilbab nantinya harus untuk umat Islam saja, sementara yang mengaku bukan Islam harus dilihat KTP-nya dahulu, itu risiko yang harus dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai terjadi salah tangkap yang dapat merugikan kelompok lainnya. Karena itu, hak dan kebebasan komunitas di luar Islam jangan sampai tercabut.

> Saya tidak setuju membiarkan entitas yang relatif terlepas atau terpisah dengan yang absolut. Begitu juga, yang "absolut" terlepas dari yang relatif. Singkatnya di dalam absoluditas ada relativitas; dan di dalam relativitas terselip absoluditas.

Untuk itulah sedari awal *founding fathers* menentukan Indonesia berdasarkan Pancasila, karena dari dahulu ihwal integritas antarumat beragama sudah dipikirkan panjang lebar. Hanya saja dalam perjalanannya, pemerintah lemah, sehingga korupsi pun tidak bisa diatasi. Polisi atau aparat hukum lainnya tidak bisa mengatasi kejahatan di daerah-daerah. Sumber utamanya adalah *the weakness of administration*, yang lantas memunculkan keinginan-keinginan

atau idealisme lama, seperti syariat Islam, *khilâfah*, dan sebagainya. Sementara pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa ketika beberapa dari keinginan atau idealisme lama tersebut terwujud justru berimplikasi buruk bagi integritas bangsa. Kalau memang penyebab utamanya *the weakness of administration* pemerintahan, kita harus bersama-sama mengoreksi ulang. Semua harus memperbaharui niat lagi.

Pemerintah ini sebenarnya arahnya ke mana, mengapa semuanya lemah, khususnya di dalam penegakkan hukum, dan apakah lantas kita perlu pindah dari hukum yang sudah ada?

Ada keprihatinan lain terkait dengan perda-perda syariat Islam. Dalam praktiknya, perda-perda ini ditegakkan dengan menunggangi mekanisme demokrasi, karena sebenarnya tidak seluruh elemen masyarakat menghendaki. Yang terjadi selama ini hanyalah kepentingan segelintir elit yang memperjuangkannya dan sebagian di antaranya sekadar memanfaatkan isu ini demi menggolkan kepentingannya, kendatipun sejatinya bertentangan dengan idealisme dirinya dan partainya. Bukankah kenyataan semacam ini justru mengebiri prinsip demokrasi?

Untuk itulah semua ini sangat tergantung *the quality of education* dari anggota masyarakat, khususnya dalam bidang *humanities* dari masyarakat. Minimnya pendidikan menyebabkan mereka begitu mudah dijaring oleh kepentingan segelintir elit. Namun demikian, tentu saja hal ini terkait juga dengan mekanisme yang berlaku. Apakah dengan bergulirnya kebijakan otonomi daerah yang melahirkan perda-perda syariah bermasalah, kemudian pemerintah pusat membiarkannya begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Atau, bisa jadi memang kasus-kasus yang bermunculan

tidak terantisipasi sebelumnya ketika hendak menerapkan kebijakan otonomi tersebut. Kalau segalanya diantisipasi dengan matang, maka perda-perda yang belakangan meresahkan hak dan kebebasan warga, tidak perlu terjadi dan niscaya akan terdeteksi. Namun kalau yang terjadi sebaliknya, sementara baru dirumuskan belakangan oleh pemerintah pusat bagaimana upaya-upaya mengantisipasi pelbagai kasus yang bermunculan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, hal ini memperlihatkan ketidakmatangan dan ketidakcakapan pemerintah.

Jadi, ketika negara hendak menetapkan kebijakan publik, segala sesuatunya harus dirumuskan dengan jeli. Dalam pengamatan saya, legal pluralism memang sejak dahulu ada dan dianut. Namun, kita mesti menggali ulang bagaimana *nation-state* Indonesia itu mendukung konsesnsus *legal pluralism* dengan ide nasionalisme. Seperti apa materi dialognya dan bagaimana *in praxis legal pluralism* dengan *the idea of nation-state* sehingga kemudian disebut dengan suatu hukum Indonesia. Lebih-lebih usia Indonesia masih muda, baru 50 tahunan, masih sangat *fragile*. Sedangkan tradisi-tradisi lain seperti Amerika atau Prancis sudah mencapai 200-300 tahun, kendatipun ketika berdatangan imigran-imigran Muslim belakangan, umpamanya, mereka masih kesulitan menghadapinya.

> Setiap agama, ajaran, sistem ritualnya atau normatifnya tetap berbeda, tetapi rasa kemanusiaan, keadilan, keprihatinan terhadap lingkungan yang buruk, menolong orang-orang yang terpinggirkan, seperti orang miskin, wanita, anak-anak dan orang tua, itu sama. Jadi itu bukan hal yang relatif, justru absolut. "Absolut" ide dasarnya, tetapi "relatif" dalam pelaksanaan dan implementasinya.

MUI dan kalangan Islam tertentu menolak liberalisme, yang salah satu alasannya karena liberalisme menghalalkan segala bentuk kebebasan tanpa batas. Dalam pandangan Anda sendiri, seperti apakah konsep liberalisme?

Yang harus digarisbawahi di sini, jika Anda perhatikan, semua buku dan tulisan saya, sebenarnya tidak pernah menyebut kata liberal, apalagi mempropagandakan atau mendirikan organisasi yang berhaluan liberal. Jadi, orang lain yang memberi saya label liberal. Patut dicatat bahwa istilah liberal bermacam-macam, di antaranya liberal progresif, moderat, radikal dan transformatif. Lalu, kategori liberal manakah yang dimaksudkan oleh MUI sehingga mendapatkan fatwa haram? Bisa jadi liberal radikal, bukan yang transformatif apalagi yang moderat. Jadi, liberal *isn't monolitic*. Meskipun saya sendiri tidak menggunakan kata itu, tetap saja kalangan muda dan banyak orang menyifati saya sebagai liberal. Padahal, saya hanya menggunakan metode dan analisis keilmuan biasa yang lebih menekankan proses bukan produk. Liberal merupakan sebuah produk. Banyak orang belum menyelami proses yang matang, belum mengetahui perbedaan *faith and tradition* antara *al-dîn* dan *al-tadayyun,* antara *al-dîn* dan *al-afkâr al-dîniyah* atau perbedaan *al-mutaghayyirât* dan *al-tsawâbit*, belum lagi wilayah *overlapping* antara keduanya, sudah berani-berani menghakimi orang sebagai liberal. Menurut saya ini tindakan yang *too early*, *irresponsible* dan tergesa-gesa. Sehingga, saya tidak tahu persis aspek liberal manakah yang dimaksud MUI sebagai haram.

Kontroversi ini mesti melibatkan diskusi akademik dan diskusi publik yang sangat mendalam. Tidak bisa diputuskan secara sepihak. Harus mengumpulkan semua definisi yang ada untuk

kemudian dirumuskan apa yang dimaksud dengan liberal. Itu sudah masuk dalam wilayah politik, sudah menjadi produk, liberal demokrat umpamanya, yang tidak ada hubungannya lagi dengan wilayah akademik. Sementara kalangan mudanya bukan tokoh politik atau tokoh liberal demokrat. Jadi, kata liberal yang dimaksud oleh anak-anak muda maupun MUI itu *confuse* sekali. Perdebatan ini, seperti halnya sekularisme di atas, karena *not based on academic research* yang mendalam. Tetapi saya tahu, sinyal-sinyalnya ke wilayah politik semua. Karena organisasi, termasuk organisasi kefatwaan, pada dasarnya adalah politik. Sehingga sekarang ini istilah liberal sudah menjadi *stereotype*. Padahal yang namanya predikat itu produk, bukan proses. *Education*, misalnya, sebagai faktor paling penting dalam membangun bangsa perlu menempuh proses yang sangat panjang sekali; sedangkan setiap produk itu instan. Jadi, terus terang memang seperti itulah keadaan anak-anak muda sekarang, yang lebih memilih produk, biasanya instan. Kendati begitu, tidak apa-apa, mereka juga punya hak untuk demikian.

Negara ini masih harus belajar banyak dan melakukan *benchmarking*, studi banding secara sungguh-sungguh dengan negara-negara lain.

Beberapa kelompok Islam seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menentang liberalisme karena dianggap memberi jalan bagi ekspansi kapitalisme yang menimbulkan imperialisme dan kolonialisme. Secara akademik, apakah konsepsi liberalisme sebenarnya menurut Anda?

Semua itu mesti dilihat lebih pada proses pendidikan yang komprehensif, tidak sepotong-sepotong. *Islamic studies* diperlukan,

tetapi tidak cukup hanya dengan itu. Dibutuhkan juga *religious studies*, *humanities*, *social sciences* dan seterusnya. Sosiolog, antropolog ataupun ekonom murni tidak cukup, dia membutuhkan atau harus mengetahui juga *Islamic studies*, untuk kalangan kita, untuk Kristen tentu lain lagi. Sebab setiap disiplin ilmu sekadar memuat pengetahuan secara sepotong-sepotong. Untuk sampai pada pandangan (liberal) yang moderat, progresif dan transformatif, mereka semua harus mendalami beberapa pendekatan lainnya.

Namun apa lacur, mendengar istilah *religionomic* saja banyak dari kita yang masih tersentak kaget karena tidak terlalu mengerti. Jadi perlu disadari, tidak hanya Habibienomik atau Yudhoyonomik, tetapi juga ada *religionomic*. Oleh karena itu, pendidikan harus dipahami sebagai *transforming individual life*. Kalau dari faktor individunya sudah berjalan, nanti pada saatnya akan merambah ke institusi. Karena apabila langsung meloncat pada institusi, tidak bisa. Jadi, seluruh disiplin keilmuan tersebut, seperti *Islamic studies*, (fikih, ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lain) sangat membutuhkan pemahaman tentang *humanities* kontemporer, karena ini merupakan ilmu-ilmu baru yang menjadi kelanjutan dari *Islamic studies*. *Humanities*, *social* dan *natural sciences*, adalah suatu keniscayaan dan merupakan *ingredient* bagi orang yang hidup di zaman sekarang. Terlebih lagi, sekarang ada Information Technology (IT).

Jadi, di situ, seyogyanya ada proses yang sangat panjang yang harus dilalui, tanpa harus menyebut liberal. Itu semua hanya proses pendidikan saja. Karena modernisasi dan kapitalisasi sebenarnya sangat terkait dengan *knowledge*. *Knowledge is power*. Kalau tidak punya pengetahuan, tidak mungkin bisa masuk ke modernisme atau kapitalisme. Kesimpulannya, *the essence* adalah *science*, ilmu pengetahuan atau pendidikan yang akhirnya masuk ke *research*.

Dari sini, kemudian menjadilah alat-alat transportasi yang canggih, sistem ekonomi yang luar biasa, sistem komunikasi inter-personal dan intra-personal yang matang. Kentucky bisa menyebar ke seluruh dunia, sementara Ayam Goreng Suharti hanya bisa tetap di jalan solo atau paling banter sampai ke Jakarta, tetapi tidak bisa mengglobal. Mengglobalnya Kentucky lantaran ilmu pengetahuan. Sehingga, ekspansi ekonomi dan pengetahuan seperti itu tetap tidak bisa disalahkan apalagi diolok-olok. Jadi, pada dasarnya kita kurang dalam banyak hal sebagaimana tercermin dari analogi Kentucky dan Ayam Goreng Suharti. Kita hanya menyalahkan dan mengeluh kapitalisasinya dan bukan akarnya, yaitu *research and development*, *science*.

Perlu digaris bawahi, kombinasi *science* ada tiga, *research*, *critical and curiosity*. Kuriositas: keinginan tahu yang besar pada wilayah alam, agama dan *social humanities*. Kritis, dalam pengertian jangan semuanya ditelan secara mentah saja, pun sampai ke wilayah agama. Kemudian baru *research*. Kombinasi ketiganyalah yang merupakan *the essence of (modern) science*. *The essence of science* bisa masuk ke dalam alamiah dasar, *humanities*, *social sciences*, *religious sciences*, bah-

Yang harus digarisbawahi di sini, jika Anda perhatikan, semua buku dan tulisan saya, sebenarnya tidak pernah menyebut kata liberal, apalagi mempropagandakan atau mendirikan organisasi yang berhaluan liberal. Jadi, orang lain yang memberi saya label liberal. Patut dicatat bahwa istilah liberal bermacam-macam, di antaranya liberal progresif, moderat, radikal dan transformatif. Lalu, kategori liberal manakah yang dimaksudkan oleh MUI sehingga mendapatkan fatwa haram? Bisa jadi liberal radikal, bukan yang transformatif apalagi yang moderat. Jadi, liberal *isn't monolitic*.

kan *Islamic studies* yang baru perlu memanfaatkan *research*. Pada hematnya, hal-hal seperti itulah yang sebetulnya harus dipupuk dan dikembangkan. Kalau langsung dihadapkan dengan produk instan, itu bukan wilayah pendidikan tetapi wilayah politik, produk. Karena itu, kalau tidak punya akar-akar atau tidak dibekali empat hal tadi (tiga kombinasi *science* dan *Islamic studies*), semua itu akan tetap berupa retorik belaka. Karena *the essence of modernism*, *the idea of progress*, kemudian kebudayaan baru, esensinya adalah pendidikan.

Karena itu, saya tidak menyalahkan HTI dan siapa saja, sebab yang menjadi tuntutan mereka tidak lain cakupan produk politik. Produk politik memang begitu, retorikanya harus keras, sebab kalau tidak, tidak akan didengar orang. Namun demikian, antara penolakan HTI terhadap liberalisme, yang merupakan wilayah politik, dan dengan wilayah pendidikan yang semestinya, sebagaimana dipaparkan tadi, adalah dua hal yang berbeda. Maka, apabila hendak berkompetisi dengan Barat secara seimbang, harus terlebih dahulu dibekali oleh yang empat tadi, sehingga bisa merancang dan mengembangkan laboratorium yang dimiliki sendiri untuk dapat melangkah lebih jauh apa yang dicita-citakan. Di sinilah kompetisi baru dimulai. Kalau tidak demikian, mustahil bisa bersaing. Kita akan tetap kalah, kendatipun dengan sekuatnya kita menolak dan menentang kapitalisme.

Terkadang tuntutan-tuntutan politik beberapa kalangan Islam, seperti penegakan syariat Islam, tidak sensitif terhadap hak dan kebebasan kaum minoritas atau disadvantage*, kalangan yang tidak beruntung atau tidak diuntungkan secara ekonomi, sosial dan politik, seperti*

kaum perempuan, rakyat miskin dan paham-paham teologi di luar mainstream *seperti Ahmadiyah dan Lia Eden, atau kaum non-Muslim. Bagaimana komentar Anda ihwal ketidaksensitifan tersebut?*

Produk-produk hukum dalam bentuk perda atau fatwa, amat tergantung pada kualitas epistemologi keilmuan. Epistemologi keilmuan "yang baru" seperti konsep atau kovenan-kovenan HAM dan CEDAW yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak, merupakan fikih-fikih baru yang tidak ada dalam fikih lama. Fikih baru membutuhkan kualitas pendidikan, training serta ilmu pengetahuan yang baru, yang lebih komprehensif. Jadi, saya melihat, karena tingkat epistemenya "lama" sementara Anda menuntut supaya mereka menghadapi persoalan secara lebih baru, maka otomatis tidak sampai. Itu semua terkait dengan kedalaman, keluasan dan pandangan ke depan epistemenya. Jadi semua produk hukum itu sangat tergantung pada jenis epistemologinya. Sehingga, keprihatinan yang Anda keluhkan tadi, terkait dengan tuntutan yang tidak sensitif, tergantung pada jenis pendidikan orang-orangnya, bukan lembaganya itu sendiri. Jadi, bagaimana bisa sensitif dengan fikih baru seperti Perlindungan Anak dan HAM, sementara untuk itu semua memerlukan penafsiran ilmu-ilmu agama (*'ulûm al-dîn*) yang *enlightened*, penafsiran teks undang-undang (hukum Islam) dengan lebih baru lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Selama undang-undang tadi tidak dianggap fikih baru oleh mereka, dengan tetap mempertahankan fikih lama (klasik), tentu saja ini teramat sulit.

Menurut Anda apakah dasar pemerintahan dan konstitusi yang ada, Pancasila dan UUD '45, sudah ideal menjiwai tatanan yang ada?

Ya betul, itu semua sangat ideal. Kebhinekatunggalikaan ada di situ secara eksplisit, pluralisme ada di situ. Hal tersebut dimungkinkan karena *founding fathers* kita datang belakangan setelah pengalaman bagaimana eksperimen Turki menjadi *nation-state*, setelah belajar mencerna dari kasus-kasus negara lain, lalu jadilah rumusan-rumusan tersebut. Maka, sebenarnya Soekarno, Hatta, Syahrir, Abdul Kahar Mudzakkir, Wahid Hashim, dan lain sebagainya merupakan representasi dari pergumulan dunia saat itu. Sehingga, relatif sudah baik. Meskipun tetap harus ada amandemen-amandemen atau perbaikan-perbaikan. Justru yang lemah dan tidak jelas adalah dalam tingkat pelaksanaannya. Seperti bagaimana mengatasi keamanan di daerah dan korupsi di berbagai elemen kemasyarakatan; sejauh mana pemerintah bisa melindungi hubungan antarkelompok dengan sebaik-baiknya, khususnya di Indonesia bagian timur dan bagian barat. Jadi, yang paling berat adalah implementasinya, kalau undang-undangnya sekali bikin sudah bagus. Semua itu membutuhkan perlengkapan yang sangat kuat, seperti polisi dan manajemen kepemerintahan yang baik (*good governance*). Itu merupakan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus.

Menyinggung kaitan kebhinekaan dengan gagasan pluralisme, yang menurut Anda sudah tercakup dalam Pancasila dan UUD'45, tentu menjadi kian rumit manakala banyak kalangan dari elemen bangsa ini justru anti-pluralisme. Masalahnya, pluralisme sering disalahpahami sebagai sinkretisme, penyamarataan atau pembenaran semua agama; kerap pula disalahartikan sebagai paham yang relativis. Itu sebabnya kenapa banyak kalangan Islam menolak pluralisme. Apa pendapat Anda tentang pluralisme?

Semua agama berbeda. Tidak ada agama yang sama. Berbeda dalam doktrinnya, dalam institusinya, kelembagaannya, pemimpinnya, jenis umatnya, hari besarnya, ruang, tempat, waktu yang dianggap suci oleh pengikutnya dan begitu seterusnya. Tetapi di dalam perbedaan itu terdapat *al-maskût 'anhu*, *commonalities*, *common pattern* yang tidak terekspresikan keluar, dan yang tak terkatakan juga banyak. Artinya dalam masing-masing agama ada unsur-unsur kesamaannya, misalnya humanitasnya atau kemanusiaannya. Maka yang diperlukan sekarang adalah cara pendekatan yang baru. Dengan menisik wilayah-wilayah agama yang memang berbeda, namun sekaligus juga wilayah-wilayah agama seperti segmen kehidupan antar-umat beragama, antar-manusia, yang sebenarnya sama. Terdapat pula kesamaan dalam *basic human need*, tentang kebutuhan spritualitas, etika atau tata aturan kehidupan umpamanya, tanpa harus melihat perbedaan (kelembagaan) agama. *Basic human need* ini adalah ide-ide mendalam tentang spiritualitas, keadilan, menolong orang yang lemah, prinsip resiproritas (prinsip timbal balik; jika dicubit sakit, maka jangan mencubit). Saya kira tidak ada agama yang mengatakan bahwa orang yang lemah harus dilempar atau dibuang.

Maka, meskipun kita berbeda di dalam kelembagaan, sebenarnya kita juga punya "rasa kemanusiaan yang sama". Namun demikian kata-kata ini yang sering disalahartikan oleh banyak orang. Bahwa ketika disebut "sama", oleh orang-orang itu yang dikira sama itu agamanya. Maka, persoalannya adalah bagaimana menjelaskan itu dengan bahasa yang lebih mudah. Setiap agama, ajaran, sistem ritualnya atau normatifnya tetap berbeda, tetapi rasa kemanusiaan, keadilan, keprihatinan terhadap lingkungan yang buruk, menolong orang-orang yang terpinggirkan, seperti orang miskin, wanita, anak-

anak dan orang tua, itu sama. Jadi itu bukan hal yang relatif, justru absolut. "Absolut" ide dasarnya, tetapi "relatif" dalam pelaksanaan dan implementasinya. Dorongan setiap agama untuk menolong orang-orang yang terpinggirkan atau ihwal pentingnya pendidikan adalah sangat penting; begitupun keadilan dan ketuhanan, semua itu absolut, tidak relatif. Tapi, lagi-lagi, dalam implementasinya sangat relatif, karena perbedaan ruang, waktu, tingkat pendidikan, perbedaan usia, tingkat ekonomi dan seterusnya.

Untuk itu, lagi-lagi, yang terutama diperhatikan di sini adalah pendidikan. Sayangnya, yang berjalan selama ini, pendidikan kita lebih menekankan sisi teologis, yang sebenarnya menjadi sumber tingginya *al-'aql al-lâhûtî*, nalar yang semi-ketuhanan; bukan lebih mengeksplorasi *al-'aql al-falsafî, al-'aql al-'ilmî* atau *al-'aql al-târîkhî* (dimensi dan sudut antropologis dari pemikiran tentang ketuhanan). Padahal ketiganyalah yang jika tidak ekstra hati-hati, dapat berubah memasuki wilayah absoluditas tadi. *Al-'Aql al-lâhûtî* sendiri, tidak bisa tidak, akan terjatuh pada partikularitas (waktu, tempat situasi budaya, sosial dan keilmuan), dan tidak sampai ke wilayah absoluditas. Padahal ketika orang mencermati, berpikir, beragama, dan berpendidikan, harus menghubungkan antara dunia universalitas yang absolut dan partikularitas yang unik-relatif.

Bagaimanapun, upaya menggabungkan antara keunikan dan keuniversalan adalah tuntutan manusia modern, manusia beragama sekarang. Kalau hanya jatuh pada partikularitas, tentu saja hasilnya relatif dan kehilangan nuansa absoluditas atau hal-hal yang fundamental tadi. Apabila orang berpikir hanya sepotong dalam arti partikularitas, pasti akan kehilangan absoluditas, kemudian akan mengatakan relatif. Tetapi, mes-kipun masing-masing (agama) kita unik, partikular dan berbeda-beda, namun tetap saja ada absolu-

ditas di tengah-tengahnya, yaitu ide-ide besar tentang ketuhanan, keadilan, menolong yang lemah, yang termarjinal-kan dan sebagainya. Dengan begitu ada wilayah yang tumpang tindih antara yang absolut-universal dan relatif-partikular, antara yang *"al-tsawâbit"* dan *al-mutaghayyirât,* antara yang *qath'î* dan *zhannî* (menggunakan istilah *ushûl al-fiqh*), bukan berarti semuanya relatif. Juga, bukan semuanya absolut. Bahaya kalau mengatakan semuanya relatif. Kita tidak akan bisa berkomunikasi antar-umat manusia, antar-agama, ras, etnis, dan jender. Hal yang demikian akan terasa sangat berat di era yang terbuka seperti ini. Maka, sekali lagi, pendekatan-pendekatan baru untuk melihat kembali realitas lama yang terkait dengan agama, hubungan sosial dan keadaan ekonomi, sangat dibutuhkan. Kalau tidak, maka akan terasa sangat berat. Saya tidak setuju membiarkan entitas yang relatif terlepas atau terpisah dengan yang absolut. Begitu juga, yang "absolut" terlepas dari yang relatif. Singkatnya di dalam absoluditas ada relativitas; dan di dalam relativitas terselip absoluditas.

Dari pemaparan panjang di atas, semua masalah yang timbul di tingkat civil society *ataupun institusi keagamaan selalu terkait dengan keterbatasan epistemologi atau rendahnya perhatian terhadap pendidikan yang lebih baru dan kontekstual. Kalau dalam wilayah negara, bagaimana kiranya negara dapat mengatur lalu-lintas ide, nilai, tujuan, paham teologi dan sebagainya dalam kerangka hubungan berbangsa dan beragama agar bisa berdampingan secara damai?*

Harus diakui, negara ini masih harus belajar banyak dan melakukan *benchmarking*, studi banding secara sungguh-sungguh dengan negara-negara lain. Pejabat negaranya juga harus mempunyai

komitmen yang kuat, tidak hanya asal menjabat. Tadi saya katakan, belum tentu para "politisi" adalah "negarawan". Kebanyakan politisi kita belum negarawan. Semua persoalan agama di setiap negara sebenarnya mempunyai masalah yang sama dalam hal relasi di antara agama-agama. Lihatlah Budha dan Islam di Thailand dan kasus-kasus hubungan antar-agama di Cina, Tibet, di Arab Saudi ada Sunni-Syi'iy (di Arab Saudi 10% warganya adalah peng-ikut syi'iy, khususnya di wilayah sebelah timur) begitupun Irak malah berdarah-darah, Israel antara Jewish dengan Zionis, belakangan di Palestina sendiri ada Al-Fattah dan Hammas, Irlandia (Protestan-Katolik) dan sebagainya. Jadi semua negara punya problem yang sama, baik di Indonesia, Amerika, Eropa atau lebih-lebih di Timur Tengah. Tidak ada negara yang paling ideal yang bisa menyelesaikan problem itu.

Bagaimana dengan Kanada yang relatif sama dengan Indonesia, multi-kultur, tetapi relatif dapat mengatasi masalah perbedaan?

Ya, Kanada relatif multikultural. Kota Vanchouver adalah kota multikultural. Asia, Afrika, Eropa, Islam, Hindu, Kristen, Budha campur baur di situ. Itulah *benchmarking*-nya. Yang dimaksudkan dengan *benchmarking* adalah usaha melihat di mana dan bagaimana kekuatan, cara atau teknik kepemimpinan (kebijakan) dan *life style* sebuah negara. Misalnya dari Kanada, kita pelajari bagaimana cara dan tekniknya. Karena itu negara kita juga harus melakukan *benchmarking*, jangan hanya bilang kita mampu menyelesaikan semua persoalan sendiri, sementara kita tidak punya kemampuan menahan diri dan mendengar. Sebab, kemampuan mendengar itu sulit. Biasanya kita hanya bilang "dengarkan saya", "ikuti saya"

bukan bagaimana mendengarkan dan menyerap aspirasi "orang lain". Orang lain di sini bisa dalam arti the *marginalized people*, kaum *dlu'afâ'*, orang-orang yang beda agama dan aliran teologi, atau yang lainnya. Di dalam intern umat Islam sendiri kita tidak punya *social skill* dan tekhnik yang canggih – yakni kecanggihan untuk bisa melerai konflik, yang kerap berujung kekerasan. Sehingga merebaklah kasus-kasus seperti yang kita lihat di Lombok, Ambon, Aceh dan sebagainya. Kalau di Kanada peran negara benar-benar netral, dalam arti negara tidak memihak satu nilai atau komunitas tertentu, terlebih yang mayoritas.

Di samping itu, netralitas juga diarahkan oleh Kanada guna mendorong semua perbedaan yang ada dalam negara tersebut, yang di antaranya negara menempuh pemihakan terhadap minoritas – bukan kelompok mayoritas, karena individu-individu di dalamnya sudah dibela oleh kalangannya sendiri. Mungkinkah Indonesia mencontoh model seperti ini?

Tak dapat dipungkiri, lagi-lagi, semua ini terkait dengan *enlightenment* dalam pendidikan. Negara ini harus segera mungkin melakukan banyak *benchmarking*, penelitian digalakan dan sebagainya. Sehingga kita kelak mungkin dapat seperti Kanada. Jadi, *many possibilities* bagi negeri ini, dengan catatan mampu menciptakan masyarakat yang berbudaya, beradab, "tidak hanya sekadar mendahulukan otot, komunalitas, dan bukan intelektual". Jika tidak sanggup menciptakan itu semua, Indonesia masih sulit melakukan kebijakan multikultural. Sebab, aspek intelektual (bukan sekadar "emosi" keagamaan yang berbau komunal) atau budaya akan menuntun masyarakat menjadi "lebih santun dan halus dalam peri-

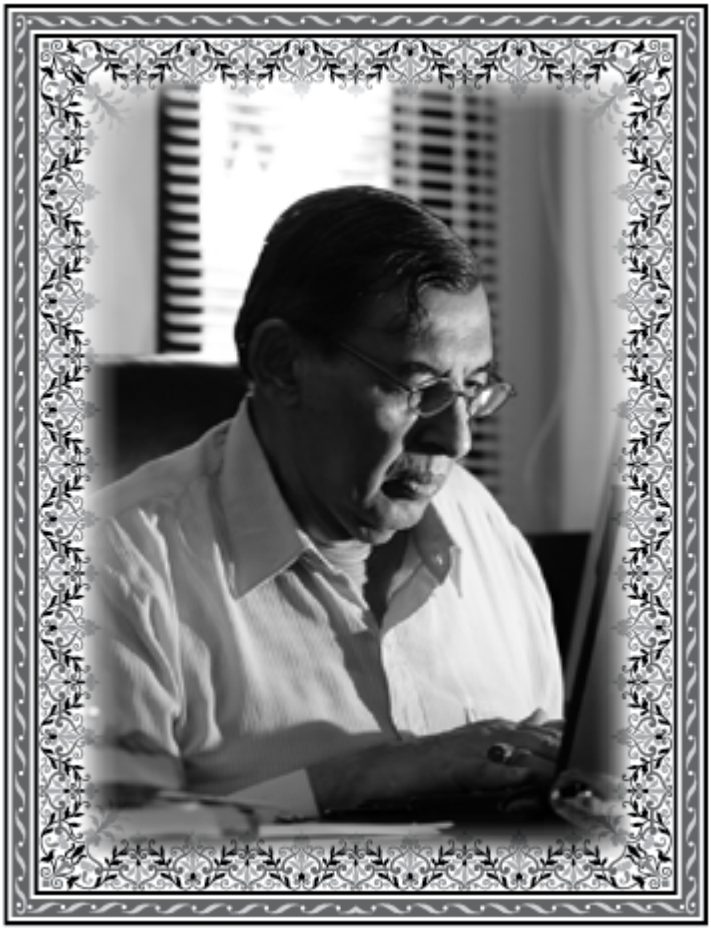
laku, bergaul dan berkomunikasi" dalam masyarakat multikultural (kebhinekatunggalikaan).

Namun, selagi pendidikan intelektual yang seperti itu tidak dikedepankan, terlebih apabila menyaksikan kejadian-kejadian di seantero negeri ini yang tidak surut menonjolkan pelanggaran-pelanggaran HAM, maka harapan seperti yang diidealkan di atas terasa jauh panggang dari api. Kendati begitu, saya tetap optimis, tetapi *takes time*, membutuhkan banyak waktu.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, Oktober 2006

Percakapan dengan

M. Quraish Shihab



M. Quraish Shihab, Direktur Pusat Studi al-Quran (PSQ). Mantan Menteri Agama Kabinet Pembangunan VII (1998) ini meraih gelar Lc, master, dan doktornya dalam bidang Tafsir dan Ulum al-Qur'an dari Universitas Al-Azhar, Mesir. Karya terkenalnya Membumikan Al Qur'an (Bandung: Mizan, 1992) dan Tafsir Al-Mishbah (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Islam tidak mengakui produk hukum yang tak mampu melindungi dan menjaga martabat manusia. Islam tidak mengenal praktik dan ketentuan hukum yang bertentangan dengan keadilan dan tidak diterima sepenuh hati oleh masyarakat luas karena, misalnya, terdapat banyak pihak yang merasa dirugikan. Bagaimanapun al-Quran sangat menghormati hak-hak dan kebebasan setiap individu. Karena itu, implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, sebagai kesepakatan bersama bangsa Indonesia, merupakan perwujudan semangat Islam. Maka, tidak dibenarkan bagi seseorang atau suatu lembaga untuk secara buru-buru menilai orang atau ajaran yang berbeda sebagai sesat. Sehingga, di tengah keberagaman bangsa, penerapan perda syariah mesti disangsikan keabsahannya; pun penegakan *khilâfah islâmiyah* sudah tentu upaya yang mustahil.

Bagaimana Anda menanggapi maraknya penolakan terhadap ide-ide yang dianggap tidak sesuai dengan nilai atau semangat Islam sebagaimana terlihat pada kasus pelarangan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme oleh MUI? Lantas, pertama-tama, bagaimana Anda mendefinisikan sekularisme itu sendiri?

Ketidaksepakatan atau perbedaan pandangan mengenai suatu istilah pasti akan menimbulkan perbedaan kesimpulan. Dalam kasus sekularisme, apakah benar sekularisme harus memisahkan agama dan negara? Menurut saya sekularisme tidak serta-merta menghilangkan peran agama dalam urusan kenegaraan atau urusan publik secara umum. Contoh paling konkret justru dapat dilihat pada beberapa negara yang menerapkan sekularisme itu sendiri, semisal Amerika atau Inggris. Di dalamnya masih terlihat cukup jelas adanya keterkaitan antara negara dengan Tuhan. Di luar kedua negara tersebut, ternyata masih banyak juga negara atau lembaga-lembaga sekular yang mau membantu lembaga-lemabaga keagamaan seperti lembaga-lembaga yang berada di Islam.

Sedangkan kalau yang dimaksud sekularisme adalah paham bahwa hanya di sini dan sekarang, tidak ada hari kemudian, itu yang akan saya tolak. Pangkal persoalan dalam kasus sekularisme menurut saya terletak di situ. Tentang perdebatan hal itu sendiri, dari dahulu, sudah ada perseteruan yang amat sengit antara Cak Nur dan HM. Rasyidi. Pada kasus itu persoalan utamanya adalah ketidaksepahaman atau perbedaan menyangkut istilah. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada persoalan pluralisme. Pluralisme yang dimaksud oleh MUI dan teman-teman lain berbeda. Kalau sebelum 'bertikai' kedua belah pihak bisa duduk bersama, menurut saya, sangat mungkin akan bisa ditemukan kesamaan pandangan.

Secara umum, saya melihat bahwa di tubuh MUI sendiri terdapat perbedaan pendapat mengenai pengharaman sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Kalau Anda bertanya apa yang saya maksud dengan sekularisme, maka bagi saya sekularisme bukanlah pemisahan antara dunia dan akhirat. Sekarang dan hari kemudian itu menyatu seperti satu mata uang dengan dua sisi. Jika Anda menghendaki hanya akhirat saja, itu bukanlah Islam, begitupun jika Anda hanya menghendaki dunia saja. Kita harus padukan keduanya, dengan masing-masing memiliki porsinya yang berbeda-beda. Oleh karena itu tidak benar adanya pembedaan antara amal dunia dan amal akhirat. Tidak benar ungkapan yang mengatakan *"kerjakan untuk amal duniamu seakan-akan engakau akan hidup selamanya, dan kerjakanlah untuk amal akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari."*

Semua kegiatan selama dilakukan untuk tujuan kemaslahatan sesuai dengan ajaran agama, menurut saya, sudah merupakan amal dunia sekaligus akhirat. Begitu dipisahkan, terjadilah pembedaan: amal dunia bertempat di pasar dan amal akhirat di masjid. Yang benar adalah tuntutlah melalui apa yang dianugerahkan Tuhan kepadamu di dunia ini untuk kebahagiaan akhirat. Semakin banyak hal yang Anda peroleh di dunia, semakin berpeluang juga Anda berbahagia di akhirat.

Jadi, sederhananya, konsep yang Anda ajukan untuk sekularisme itu bagaimana?

Sekali lagi, menurut saya sekularisme itu tidak sama dengan pemisahan. Adalah keliru orang yang mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan sebagai amal dunia itu terlepas dari akhirat. Kita ha-

rus melakukan kegiatan yang bermanfaat di dunia sekaligus akan mendapatkan hasilnya di akhirat. Untuk mencapai hal ini kita tidak bisa tidak harus mengerti hukum-hukum alam. Kita juga harus mengerti hukum sebab dan akibat. Namun demikian, saya tidak berhenti sampai pada hukum itu saja. Lebih dari itu, menurut saya, hukum sebab akibat adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan tidak menciptakan alam semesta ini kemudian lepas tangan. Tuhan bekerja dengan sistem yang tak lain adalah hukum alam.

Semuanya adalah satu kesatuan. Begitu ada pemisahan, maka tidak benar. Meski demikian, bukan berarti bahwa lembaga-lembaga sosial lantas diambil alih oleh agamawan. Bukan juga berarti bahwa pada bidang-bidang kenegaraan harus ditonjolkan simbol-simbol keagamaan. Menurut saya, ilmuwan yang percaya pada Tuhan dan nilai-nilai agama juga bisa dinamakan ulama.

Sejalan dengan gagasan sekularisme, kebanyakan orang memisahkan antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Bagaimana Anda menanggapi hal demikian?

Saya tidak sependapat dengan pembedaan seperti itu. Bagi saya prinsip dasar ajaran Islam adalah *al-tawḥîd*. Di situ beredar sekian banyak kesatuan, dari kesatuan dunia dan akhirat, sampai kesatuan ilmu. Artinya tidak ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu duniawi (sekular), semuanya bersumber dari Tuhan. Al-Quran penuh dengan uraian apa yang sekarang kita sebut dengan ilmu kedokteran, astronomi dan lain sebagainya, yang selalu dikaitkan dengan Tuhan. Semuanya menyatu. Kesatuan sumber dan asal-usul manusia, kesatuan masyarakat, dan lain sebagainya, semuanya lari dan bersumber pada tauhid.

Tauhid saya ibaratkan seperti Matahari. Di bawah daya tariknya terdapat planet-planet tata surya yang senantiasa mengelilinginya. Dari situ kita tahu bahwa segala sesuatu terikat dan bersumber dari tauhid. Begitu dipisahkan, akan hancur. Maka jangan pisahkan kemanusiaan dari ketuhanan, ilmu agama dari ilmu umum dan jangan berkata seni hanya untuk seni. Bagi saya semua bersumber dari tauhid, dari Tuhan, "*inna shalâtî wa nusukî wa mahyâya wa mamâtî lillâhi rabb al-'âlamîn*". Artinya, ketika Anda berhias berarti juga telah melakukan amal akhirat. Semuanya menyatu. Kalaupun terdapat pemisahan hanyalah pemisahan metodologis.

Ahmad Wahib pernah berkata bahwa, kini, pengertian ulama semestinya harus diubah. Ulama bukan lagi sekadar ahli fikih atau ahli agama tetapi juga ahli ekonomi, science dan teknologi. Adakah dasar teologi Islam tentang hal itu?

Uraian al-Quran tentang ulama justru banyak berkaitan dengan alam raya, gunung, bintang, dan lain-lain, baru kemudian ditegaskan bahwa yang takut dan kagum kepada Tuhan itulah yang disebut ulama. Artinya, semua yang menguasai bidang keahlian ilmu akan disebut sebagai ulama. Namun demikian, klasifikasi seperti itu tidak begitu saja diterima. Ada syarat-syarat tertentu agar seseorang dapat disebut sebagai ulama, yaitu bukan hanya mengetahui tetapi juga kagum dan patuh kepada Tuhan.

Negara yang sekular cenderung memisahkan antara persoalan agama dan persoalan negara. Karena itu partai politik seharusnya juga tidak berideologi agama tertentu.

Saya tidak melihatnya seperti itu. Semuanya adalah satu kesatuan. Begitu ada pemisahan, maka tidak benar. Meski demikian, bukan berarti bahwa lembaga-lembaga sosial lantas diambil alih oleh agamawan. Bukan juga berarti bahwa pada bidang-bidang kenegaraan harus ditonjolkan simbol-simbol keagamaan. Menurut saya, ilmuwan yang percaya pada Tuhan dan nilai-nilai agama juga bisa dinamakan ulama. Ulama bukan hanya ahli hukum agama saja.

Kalau yang dimaksud dengan liberalisme adalah kebebasan individu atau kebebasan berpikir, maka al-Quran jelas mendukung atau menyetujui. Tetapi kalau yang dimaksud dengan liberalisme adalah kebebasan tanpa memperhatikan hak-hak orang lain, al-Quran sangat tidak menyetujui. Maka jangan sampai kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain.

Kalau seperti itu maka sangat mungkin bagi para ulama masuk dalam permainan politik dan memanfaatkannya demi memperoleh kekuasaan (duniawi). Bagaimana tanggapan Anda kalau ada yang beranggapan seperti ini?

Itu bisa terjadi dalam kasus permainan politik yang kotor. Dalam pandangan agama, politik tak ubah seperti permainan catur. Setiap pemain berkeinginan untuk mengalahkan lawan mainnya. Meski begitu, tetap saja 'benteng' tidak bisa berjalan seperti jalannya 'kuda.' Artinya, politik memang bertujuan untuk mengambil atau meraih kekuasaan, tetapi tetap harus melalui ketentuan yang benar. Politik yang kotor terjadi kalau dia meninggalkan norma dan peraturan. Agama tidak merestui korupsi, pembelian suara, dan intimidasi. Maka kegiatan politik yang sudah mempraktikkan hal-hal yang tidak direstui agama berarti sudah kotor.

Tegasnya, menurut saya, agama dan politik juga tetap menyatu. Namun karena kemudian dikehendaki spesialisasi, maka yang menjadi dokter tekunlah di bidang kedokterannya; yang mempelajari ilmu hukum tekunlah pada masalah-masalah hukum; yang ahli pertanian tekun di bidang pertanian. Yang menyebabkan kekacauan adalah ketika yang tidak mengerti agama ikut membahas agama, yang tidak mengerti politik ikut juga membahas politik.

Dalam negara yang tidak berdasarkan agama, otomatis ajaran-ajaran agama tidak dibenarkan masuk secara formal menjadi hukum publik tanpa melalui proses yang demokratis. Bagaimana pandangan Anda menanggapi maraknya perda-perda yang mengklaim sebagai alat penegakan ajaran agama (syariat Islam) untuk dijadikan hukum publik?

Di negara kita, penetapan suatu undang-undang harus melalui proses tertentu, tidak bisa sembarangan. Pertanyaannya, apakah undang-undang yang ditetapkan, baik oleh eksekutif maupun legislatif itu, telah melalui proses yang benar? Kalau memang telah melalui proses yang benar, kita harus bersama-sama menerima dan menjalankannya. Prinsipnya, ketika kita menyatakan bahwa yang mencuri akan dikenai suatu hukuman, maka yang tidak mencuri tidak akan dikenai hukuman seperti itu.

Ketika konteks diturunkannya sebuah nilai atau aturan agama jauh berbeda dengan ruang dan waktu di mana aturan tersebut hendak diterapkan, maka dibutuhkan reinterpretasi terhadapnya. Karena itu ketentuan-ketentuan sosial yang terdapat dalam agama tidak bisa secara tekstual diimplementasikan.

Saya setuju. Dan memang penafsiran bisa berubah sesuai dengan zamannya. Apalagi kalau menyangkut rincian. Nabi sendiri pernah bersabda, "*akan datang suatu masa di mana perempuan berangkat dari satu kota ke kota lain, tanpa ada yang ditakuti kecuali Allah dan serigala.*" Itulah sebabnya ulama-ulama sekarang berkata bahwa yang penting adalah terjaminnya keadaan dan keselamatan sehingga tidak ada yang merasa terganggu dan tidak ada yang mengganggu. Oleh karena itu, seorang perempuan yang bepergian sendirian tanpa ditemani muhrim, tetapi berangkat dengan perempuan-perempuan lain yang terhormat, tentu saja diperbolehkan. Bagi saya, untuk melihat suatu aturan atau hukum terlebih dahulu harus memperhatikan apakah motif dan tujuan sehingga hukum tersebut ditetapkan.

Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama, tinggal bagaiman kita implementasikan sila-sila yang ada di dalamnya. Bagaimana kita implementasikan ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Yang harus diimplementasikan bukan cuma kemanusiaan, tetapi juga harus adil. Bukan cuma adil tetapi juga harus beradab. Implementasi nilai-nilai dasar demikian bukan hanya sesuai dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga sudah sesuai dengan ajaran agama.

Berarti di sinilah letak bahwa negara tidak bisa sepenuhnya dilepaskan dari agama?

Ya. Negara atau pemerintah harus mengayomi dan memelihara nilai-nilai yang terdapat di masyarakat. Kita marah ketika Malaysia mengakui lagu *rasa sayange* dan kesenian *reyog* sebagai milik asli budayanya, karena kita bangga dengan budaya kita. Bagaimana dengan agama? Sejajarkanlah! Kalau enggan menempatkan agama

di atas budaya, saya yakin akan ada perasaan yang sama bahwa agama juga perlu dipelihara.

Ketika perda syariah dimunculkan kemudian dalam realitasnya dinilai banyak orang hanya merugikan atau mendiskriminasi sebagian kelompok, misalnya perempuan dan minoritas agama, apakah perda seperti itu tetap absah sebagai bersumber dari ajaran Islam?

Tuhan tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dari segi kemanusiaan dan kewajiban melindungi dan menjaga sesama kehormatannya. Sehingga setiap produk hukum yang bertentangan dengan keadilan atau nilai-nilai dasar kemanusiaan secara tidak langsung tidak diakui oleh Islam. Persoalannya, kalau sudah menjadi produk hukum yang ditetapkan melalui proses tertentu, kita tidak bisa mencabutnya begitu saja, malainkan harus melalui proses hukum juga.

Pada masa Nabi, masa-masa awal Islam, hukum sebenarnya baru diterapkan setelah Islam benar-benar mantap sebagai suatu peradaban. Selama sekian tahun di Mekah, produk hukum yang dikeluarkan Islam hanya sedikit saja. Kita juga mestinya bisa belajar dari situ. Hukum, meski ditetapkan oleh agama, tidak bisa begitu saja ditetapkan jika masih ada kondisi masyarakat yang tidak memungkinkan untuk diterapkan. Sayyidina Umar tidak menerapkan hukum potong tangan pada masa paceklik. Seorang yang terbukti berzina, berdasarkan hukumnya harus dirajam, namun demikian tetap bisa ditangguhkan kalau ada kondisi yang menyebabkan ketidakmungkinan penerapannya.

Jadi, dengan kondisi yang seperti ini, penerapan perda syariah di Indonesia masih dalam tanda tanya besar. Saya masih sangsi bahwa

perda seperti itu akan benar-benar bisa diterapkan. Lebih dari itu, hukum hendaknya diterima dengan sepenuh hati, diterima oleh semua kalangan, tidak ada banyak pihak yang dirugikan. Dan untuk mencapai kondisi seperti ini diperlukan adanya proses yang tidak sebentar.

Perda syariah, seperti terlihat di Aceh dan Tangerang, merupakan implementasi hukum agama yang cenderung formalistik. Bagi saya, yang penting adalah substansinya. *Entoh* demikian saya tidak mau mengatakan bahwa perda itu tidak benar. Perda itu telah diputuskan melalui DPRD. Buat mereka, itu sudah benar. Pada saat yang sama, saya juga tidak mau mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku atau bersumber dari Barat itu tidak benar. Artinya, penetapan suatu hukum pasti mempunyai kondisi yang mengantarkan hukum itu bagus diterapkan pada tempat atau wilayah tertentu. Kondisi inilah yang harus kita pelajari.

Kalau mau, lebih baik kita bentengi diri agar tidak tertarik ke golongan yang menurut kita salah, atau lebih berani lagi, masuk ke dalamnya dan coba menjelaskan permasalahannya. Bagi saya kekerasan tetap tidak bisa dibenarkan. Dan yang berhak mengambil vonis salah tidaknya suatu kelompok atau tindak kekerasan tertentu adalah yang berwenang, itu pun setelah melalui proses pengadilan. Masyarakat tidak memiliki wewenang itu.

Untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, apakah Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan dasar berbangsa dan bernegara itu sudah cukup, bahkan sudah islami, atau masih diperlukan adanya nilai lain?

Saya menilainya sudah cukup. Pancasila sudah menjadi kesepakatan bersama, tinggal bagaiman kita implementasikan sila-sila yang ada di dalamnya. Bagaimana kita implementasikan ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab dan lain sebagainya. Yang harus diimplementasikan bukan cuma kemanusiaan, tetapi juga harus adil. Bukan cuma adil tetapi juga harus beradab. Implementasi nilai-nilai dasar demikian bukan hanya sesuai dengan masyarakat Indonesia, tetapi juga sudah sesuai dengan ajaran agama.

Ketika al-Quran memerintahkan untuk melaksanakan hukum Tuhan, tidak harus diartikan bahwa semua orang di suatu negara harus melaksanakan hukum Islam dengan segala rinciannya, seperti salat lima waktu dan lain sebagainya. Kalau orang Kristen bagaimana? Saya melaksanakan hukum Islam dalam arti Tuhan membolehkan mereka (non-Islam) untuk menganut ajaran agamanya. *Lakum dînukum waliya dîn*. Itu sudah hukum Islam, walaupun rinciannya tidak islami.

Pada titik itulah pluralisme diakui sekaligus diamanatkan oleh Islam. Al-Quran mengatakan *"Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal-mengenali."* Artinya, Kalau Anda menghapus lelaki atau menghapus satu suku, maka tidak akan ada satu generasi. Sehingga timbullah kekacauan.

Inilah pluralisme. Tetapi jangan samakan lelaki dan perempuan, jangan samakan satu bangsa dengan bangsa lain. Masing-masing mempunyai nilai-nilainya sendiri yang berbeda satu sama lain.

Pluralisme di Indonesia hingga sekarang masih terjaga ditopang oleh negaranya yang demokratis. Demokrasi Indonesia menganut sistem

demokrasi liberal. Artinya mengafirmasi nilai-nilai liberalisme untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia. Bagaimana pandangan al-Quran sendiri tentang nilai-nilai liberalisme itu?

Pada prinsipnya, kalau yang dimaksud dengan pluralisme adalah menghargai dan mengakui kelompok-kelompok yang berbeda, saya kira kita harus ke sana. Tetapi kalau yang dianggap sebagai pluralisme adalah mempersamakan semua kelompok, itu yang harus ditolak.

Kalau yang dimaksud dengan liberalisme adalah kebebasan individu atau kebebasan berpikir, maka al-Quran jelas mendukung atau menyetujui. Tetapi kalau yang dimaksud dengan liberalisme adalah kebebasan tanpa memperhatikan hak-hak orang lain, al-Quran sangat tidak menyetujui. Maka jangan sampai kebebasan kita mengganggu kebebasan orang lain.

Bagaimana dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan MUI terhadap kebebasan berpikir dan sebagaianya?

Bagi saya, siapapun yang membatasi kebebasan orang yang telah dianugerahkan Tuhan itu terlarang.

Kalau misalnya alasan pembatasan yang dilakukan oleh MUI itu karena pemikiran atau keyakinan seseorang telah menodai agama tertentu bagaimana?

Analoginya kalau ada suatu pabrik kecap berlabel ABC, maka saya tidak boleh membuat pabrik serupa dengan nama yang sama. Kita hanya boleh membuat pabrik yang sama-sama memproduksi

kecap namun dengan label yang berbeda. Maka untuk kasus agama juga boleh berbeda, tapi jangan memakai nama yang sama.

Seharusnya selagi suatu kepercayaan tidak mengaku Islam maka tidak bisa dikatakan menodai Islam. Namun demikian, sebagai seorang ayah, saya tentu akan melarang anak saya keluar rumah hujan-hujan, meski tetap tidak bisa melarang turunnya hujan. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti akan ada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kita. Dan yang berbeda itu tetap mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya. Maka, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara kita membentengi diri. Untuk kasus hujan tadi, kita bisa membentengi anak dengan menutup pintu, atau memberikan payung kepada si anak dan lain sebagainya. Sampai di situlah kemampuan kita untuk membentengi diri.

Pada sisi lain saya tidak setuju dengan orang atau lembaga yang buru-buru menilai orang atau ajaran lain sebagai sesat. Selama dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kenabian dan hari kemudian, kita harus berhati-hati untuk melihat dan menilai kelompok-kelompok tersebut.

Hal lain, dalam konteks ini, sebagian dari mereka yang dinilai menyimpang itu sebenar-nya tidak harus diperlakukan sama. Karena boleh jadi hanya salah paham atau misalnya berkeyakinan berbeda karena sakit jiwa. Yang sakit jiwa tidak boleh ditahan, melainkan diobati. Yang salah paham jangan dijauhi atau ditutup, melainkan didekati dan diajari. Saya tidak setuju kalau Lia Aminuddin ditahan. Harusnya dicari terlebih dahulu apa yang menyebabkan dia berkeyakinan seperti itu. Karena, dalam ilmu jiwa, bisa jadi dia itu sakit jiwa. Buktinya setelah ditahan, dia masih tetap dengan keyakinannya yang semula. Secara lebih luas lebih baik jika ulama membentengi umat dengan memberi tahu bahwa dalam ma-

syarakat kita ada yang begini dan begitu, sementara, Islam itu begini-begitu dan lain sebagainya.

Saya tidak setuju dengan orang atau lembaga yang buru-buru menilai orang atau ajaran lain sebagai sesat. Selama dia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kenabian dan hari kemudian, kita harus berhati-hati untuk melihat dan menilai kelompok-kelompok tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa justru munculnya aliran atau kelompok yang didakwa menyimpang adalah bentuk kegagalan umat Islam sendiri dalam memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang damai dan kontekstual.

Bahwa itu sebagai salah satu faktor yang menentukan, bisa dibenarkan. Hal lainnya, manusia itu memiliki kecenderungan spiritual. Dia melihat materi, ilmu dan teknologi tidak memuasakan, maka kemudian mencari sesuatu yang jauh lebih memuaskan. Pencarian yang dilakukan manusia ini bermacam-macam, ada yang lari ke musik, ada yang melepaskan diri dari segala ikatan, ada yang lari ke dukun, dan ada yang terus mencari namun tidak pernah menemukan sesuatu yang lebih memuaskan. Mereka yang masuk pada kategori pencarian yang terakhir ini terjadi lebih dikarenakan ketidakmampuan umat Islam dalam memberikan penjelasan mengenai agamanya. Dan itu bukan hanya terjadi di dalam Islam, tetapi juga di Kristen, dan agama-agama yang lainnya.

Manifestasi dari pluralisme adalah sikap toleran terhadap kelompok lain. Kita melihat bahwa selama ini hampir selalu ada upaya kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu karena menilai kelom-

pok yang lain sudah menyimpang dan harus disingkirkan. Bagaimana tanggapan Anda?

Kalau mau, lebih baik kita bentengi diri agar tidak tertarik ke golongan yang menurut kita salah, atau lebih berani lagi, masuk ke dalamnya dan coba menjelaskan permasalahannya. Bagi saya kekerasan tetap tidak bisa dibenarkan. Dan yang berhak mengambil vonis salah tidaknya suatu kelompok atau tindak kekerasan tertentu adalah yang berwenang, itu pun setelah melalui proses pengadilan. Masyarakat tidak memiliki wewenang itu.

Mereka yang anti-pluralisme juga mengklaim tindakannya bersumber dari al-Quran. Tindakan yang dia lakukan adalah jihad sebagaimana diamanatkan al-Quran. Bagaimana Anda menyikapi hal ini?

Kesalahpahaman tentang Islam seperti ini datang dari berbagai sisi. Salah satunya terjadi pada orang yang semangat keagamaannya begitu tinggi bahkan melebihi Tuhan, sampai berani memutuskan benar dan tidaknya sebuah keyakinan. Lebih elegan kalau membebaskan semua keyakinan yang ada dan siapapun berhak menjalankan apa yang diyakininya. Yang mau percaya silakan dan yang tidak pun dipersilakan. Karena boleh jadi pendapat mereka yang tidak sependapat itu juga mempunyai dasar dari al-Quran dan Hadits, atau bahkan lebih benar.

Orang seperti itu hanya memahami jihad sebagai jihad fisik. Karenanya siapapun yang menurutnya akan 'menghabisi Islam' harus dibinasakan. Lantas konsep jihad seperti apa yang semestinya dipahami?

Jihad adalah usaha sungguh-sungguh. Surat al-Furqân mengatakan, *"wajâhidhum bihî jihâdan kabîran*", berjihadlah dengan al-Quran, jihad yang besar. Jihad dengan fisik atau senjata bukan digunakan untuk penyerangan tetapi pembelaan, *defence*. Perintah untuk mempersiapkan kekuatan dalam al-Quran dimaksudkan bukan untuk menggunakannya, tetapi untuk menjadikan orang lain gentar menyerang kita.

Negara yang mempunyai bom nuklir seperti Iran, Korea, Rusia, atau Amerika, tidak bermaksud akan menggunakan bom itu, melainkan sekadar memiliki agar orang atau negara lain tidak berani memeranginya. Mengapa Amerika lebih berani menyerang Irak daripada Korea, karena Amerika tahu bahwa Korea memiliki bom nuklir. Sayangnya, belakangan, kepemilikan bom nuklir justru banyak yang disalahgunakan. Membuat bom untuk menyerang negara lain, tidak hanya untuk pertahanan.

Dalam kasus lain, mereka yang mengaku dirinya Islam tetapi mempraktikkan ajaran dengan cara lain, seperti salat dalam dua bahasanya Usman Roy, akibatnya dilarang oleh kelompok tertentu, termasuk MUI. Apa komentar Anda?

Dalam hidup ini ada hal-hal yang masuk dalam jangkauan nalar dan ada yang berada di luar jangkauan nalar. Ada hal-hal yang kita harus pertahankan sebagaimana apa adanya dan sebagaimana kita terima, sehingga kita tidak perlu menggantinya. Contoh kenapa bendera kita harus merah putih, atau kenapa orang Indonesia menjalankan mobil di sebelah kiri, sementara di Inggris di kanan? Jawabannya karena semua itu sudah menjadi kesepakatan, kalau tiba-tiba diubah akan timbul kekacauan.

Soal ibadah juga demikian. Kita tidak bisa semena-mena mengubah atau menjalankannya dengan cara yang lain. Karena setiap munculnya persoalan baru, akan diikuti oleh kemunculan persoalan-persoalan yang lain. Kenapa salat Zuhur empat rakaat? Karena begitu ada yang berpendapat tiga rakaat, akan ada juga yang berpendapat lima, enam, tujuh rakaat dan seterusnya. Sekarang, apa tujuan salat memakai bahasa Indonesia? Kita bisa carikan jalan di mana tujuan orang yang salat berbahasa Indonesia itu tercapai tanpa harus melakukan perubahan cara pembacaan. Dalam kehidupan bermasyarakat pun seperti itu. Itulah yang disebut dengan ketentuan. Coba saja Anda buat bahwa lampu merah berarti jalan dan lampu kuning berarti berhenti, pasti akan terjadi kekacauan. Kesimpulannya, di dunia ini pasti ada hal-hal yang sudah kita sepakati dan tidak usah dipersoalkan lagi.

Bukankah masih ada perdebatan soal salat dengan dua bahasa itu sendiri? Pandangan lain misalkan, kenapa salat menggunakan bahasa Indonesia adalah karena ketika ingin menambah kekhusuan, orang yang tidak bisa berbahasa Arab tentu akan lebih terbantu dengan berbahasa non-Arab.

Untuk menambah kekhusuan sebenarnya bisa dicarikan jalan lain tanpa harus mengubah bahasanya. Misalnya bayangkan saja bahwa sebentar lagi kita akan mati, pasti akan bisa khusu meskipun tidak mengerti artinya. Kekhusuan itu tidak harus selalu berkaitan dengan pemahaman makna. Kesadaran terhadap siapakah Anda tengah berhadapan, dapat melahirkan sikap kejiwaan tertentu. Sebab kalau semua orang atau golongan diperbolehkan memakai bahasa lokal masing-masing untuk melaksanakan salat, pasti akan terjadi

kekacauan. Di tempat sini mau berbahasa Jawa, yang ditempat lain berbahasa Bugis, Batak dan lain sebagainya. Kenapa kita tentukan Ka'bah sebagai tempat kita menghadap ketika salat, tak lain agar tidak terjadi kebingungan.

Bagaimana kalau alasan salat dengan menggunakan bahasa ibu yang lebih bisa dimengerti agar jelas bahwa salat mempunyai implikasi sosial, agar tahu apa yang diamanatkan dalam salat bagi kehidupan bersama?

Itu (implikasi sosial) bisa dilakukan di luar salat. Celakalah orang-orang yang salat yang melupakan substansi salatnya.

Kalau seperti itu, lantas ada orang yang beranggapan, karena yang esensial adalah implikasi sosialnya, maka tidak usah melaksanakan ritualnya. Bagaimana menanggapi pendapat seperti ini?

Saya analogikan kenapa kita tempelkan perangko untuk surat yang kita kirimkan adalah agar surat yang kita maksudkan tersebut diantar-

Saya kira cita-cita mendirikan *khilâfah islâmiyah* teramat jauh untuk bisa direalisasikan. Kecuali ada konsep baru mengenai khilâfah, misalnya khilâfah diartikan sebagai kesatuan arah (visi), bukan kesatuan pemerintah – sebagaimana dahulu, ketika masih marak penjajahan fisik, Konferensi Asia-Afrika tak lain adalah wujud dari kesatuan visi beberapa negara. Jika kesatuan seperti ini yang dimaksud, menurut saya justru bagus. Konsep seperti ini bahkan bisa dijalankan tidak hanya sesama negara Islam, melainkan juga dengan negara yang memiliki budaya yang berbeda.

kan sampai ke tempat yang dituju. Kalau kita taruh uang, maka tidak akan sampai. Dalam kehidupan beragama juga demikian, ada yang dinamakan formalitas. Ada formalitas yang terikat dan yang tidak terikat.

Berbahasa Arab adalah formalitas dalam salat. Kalaupun kita tidak mampu membacanya, maka tidak usah membaca pun tidak apa-apa, dan salatnya tetap sah. Lebih sah tidak membaca daripada membacanya dengan bahasa Indonesia. Lagi-lagi, ini adalah formalitas yang ditetapkan. Antara membaca dan membayangkan jelas berbeda. Dalam salat kita boleh membayangkan apa makna dalam bahasa Indonesia dari kalimat-lalimat yang dilafalkan, tetapi tidak boleh membacakannya. Artinya, lebih baik kekhusuan secara formal didapat meskipun tidak mengerti artinya, daripada mengucapkannya dengan bahasa selain Arab.

Akhir-akhir ini umat Islam banyak didera berbagai persoalan. Dari ikhtilâfiyah antar-kelompok, sampai munculnya keinginan untuk membuat negara Islam. Menurut Anda, apakah keinginan mendirikan khilâfah itu bagian dari Akidah Islam atau bukan?

Seseorang sah-sah saja mempunyai suatu keinginan, apalagi dalam negara yang demokratis. Dalam konteks pluralisme, kita juga tidak bisa melarang seseorang untuk memperjuangkan keyakinannya. Kalau pada akhirnya mereka berhasil mewujudkan cita-citanya, kita harus menerimanya. Pada suatu diskusi di Qatar, saya pernah mengatakan, "seandainya ada partai komunis di salah satu negara Islam mengikuti pemilu dan memenangkannya, bagaimana negara-negara Islam menanggapi atau menyikapi hal ini?" Dalam negara yang demokratis kita harus bisa menerima hal seperti itu.

Karena itu, yang harus dilakukan adalah berjuang melalui jalur hukum agar pada pemilu depan kita bisa menang. Jangan bersikap seperti demokrasinya "banci", kalau saya yang menang saya pertahankan demokrasi, tetapi kalu yang lain yang menang, saya akan menindasnya. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh Amerika di Aljazair atau di Palestina (Hammas). Kalau mau *fair*, siapa pun yang menang harus diterima.

Dalam pemikiran Islam sendiri apakah konsep khilâfah *memiliki dasar yang jelas?*

Boleh jadi hal itu mempunyai dasar pada situasi masa lampau. Untuk sekarang, jangankan *khilâfah islâmiyah* untuk seluruh dunia, negara Arab saja tidak mau menerapkan *khilâfah*, lebih memilih Liga Arab. Indonesia yang merupakan negara kesatuan, masing-masing provinsinya tetap memiliki perbedaan. Saya kira cita-cita mendirikan *khilâfah islâmiyah* teramat jauh untuk bisa direalisasikan. Kecuali ada konsep baru mengenai khilâfah, misalnya khilâfah diartikan sebagai kesatuan arah (visi), bukan kesatuan pemerintah – sebagaimana dahulu, ketika masih marak penjajahan fisik, Konferensi Asia-Afrika tak lain adalah wujud dari kesatuan visi beberapa negara. Jika kesatuan seperti ini yang dimaksud, menurut saya justru bagus. Konsep seperti ini bahkan bisa dijalankan tidak hanya sesama negara Islam, melainkan juga dengan negara yang memiliki budaya yang berbeda.

Yang jadi keberatan, mereka (yang mau mendirikan khilâfah islâmiyah*) tidak mau bermain dalam mekanisme demokrasi.*

Itu keliru, karena kita berada di Indonesia yang sudah menyepakati Pancasila dan demokrasi. Kalau tidak dalam jalur nilai-nilai falsafah bangsa, maka tidak sesuai.

Sebagian orang khawatir ketika mereka menang, dasar negara Pancasila dan UUD 1945 akan diganti.

Karena itu, masing-masing harus terus berjuang. Maka kalau memang DI/TII, misalnya, dianggap tidak bagus, tunjukkanlah di mana kekurangan dan bahayanya. Begitu juga sebaliknya, yang memandang demokrasi tidak bagus. Itulah demokrasi. Saya tidak ingin hanya mau mengamalkan demokrasi kalau itu menguntungkan kita. Demokrasi adalah pendapat mayoritas masyarakat, bukan pendapat yang dipaksakan.

Bagaimana peluang pluralisme pada masa-masa mendatang di Indonesia, apakah akan semakin terawat atau malah makin hancur?

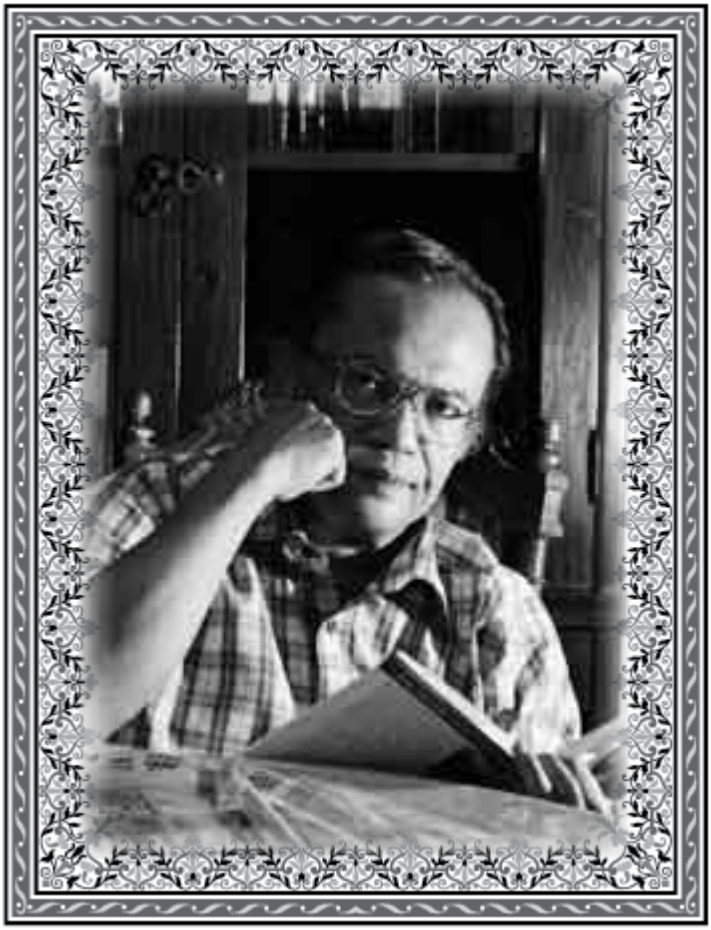
Pada prinsipnya, kalau yang dimaksud dengan pluralisme adalah menghargai dan mengakui kelompok-kelompok yang berbeda, saya kira kita harus ke sana. Tetapi kalau yang dianggap sebagai pluralisme adalah mempersamakan semua kelompok, itu yang harus ditolak. Itu juga yang dikhawatirkan oleh MUI. Mudah-mudahan, model pluralisme yang pertama itu yang akan lebih berkembang di Indonesia. Kalau yang terjadi adalah yang sebaliknya, maka jelas akan menghancurkan generasi. Saya lihat sampai sekarang belum ada kelompok yang menonjol yang sangat mengancam seperti itu, meski mungkin saja sebenarnya ada. Kalaupun ada, akal semacam ini merangkaknya pasti akan sangat lamban, sedikit demi sedikit.

Karena itu, kita harus selalu membentengi negara ini dari pandangan-pandangan yang bakal merongrong kesatuannya.

Project
emokrasi.com
kaan Digital

Percakapan dengan

M. Syafi'i Anwar



M. Syafi'i Anwar, Direktur International Center for Islam and Pluralism (ICIP), Jakarta. Ia terpilih sebagai Independent Expert pada United Nation for High Commisioner for Human Rights, mewakili Asia (2007-2009). Gelar Doktor diperolehnya dari Melbourne University, Australia.

Sekularisme adalah independensi agama dari wilayah-wilayah yang diatur negara. Definisi seperti itulah yang cenderung meletakkan sekularisme secara moderat, bahkan progresif. Agama jangan sampai campur tangan pada pengaturan kebijakan negara. Namun begitu, spirit agama tetap menuntun umat manusia untuk berlaku adil, sebagaimana telah meresap pada konsep yang sudah diuniversalisasikan (HAM). Sebenarnya kalau Indonesia konsisten mengacu pada Pancasila, maka dasar negara ini sudah cukup memuat seluruh nilai-nilai yang didamba bersama untuk menciptakan tatanan yang ideal. Karenanya, berpikir liberal, rasional, dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita dan kemajuan. Jadi, apapun konsepnya, selama sesuai dengan keadilan, harus kita terima, tetapi pada akhirnya *we have to believe in God*, percaya pada eksistensi Tuhan.

Menurut Anda apa pengertian sekularisme dan bagaimana posisi ideal agama dan negara sehingga paham ini penting untuk digulirkan di Indonesia?

Sekularisme berasal dari bahasa latin *saeculum* yang dalam pengertian umum adalah pemisahan gereja dengan negara atau agama dengan politik. Secara historis sekularisme muncul pertama kali di Barat. Kendati demikian proses sekularisme mengalami perkembangan. Karena itu tidaklah mengejutkan apabila kemudian lahir pengertian lain tentang sekularisme yang berbeda dari pengertian konvensional, yang tidak lagi dimaksudkan sebagai pemisahan antara agama dengan politik, melainkan lebih merupakan budaya yang menekankan pada aspek bagaimana sebaiknya negara tidak terlalu melakukan intervensi pada wilayah keagamaan. Jadi, sekularisme adalah independensi agama dari wilayah-wilayah yang diatur oleh negara. Definisi seperti itulah yang cenderung meletakkan sekularisme secara moderat atau bahkan progresif, yang sepatutnya ditransfer ke dalam konteks Indonesia.

Apabila dilacak rentang panjang perjalanan sekularisme di Eropa atau negara Barat secara keseluruhan, maka pemisahan antara negara dengan eksistensi agama, dalam hal ini gereja – mengingat negara-negara Barat, termasuk Amerika, lebih dekat pada tradisi-tradisi Kristiani – tampak kelihatan jelas. Namun begitu, kenyataan lainnya menunjukkan bahwa sekularisme, yang seakan-akan identik dengan keseharian masyarakat Barat sekalipun, tidak lantas meninggalkan agama sepenuhnya. Kendatipun sekular mereka secara etis tetap memberikan peran dan ruang terhadap agama. Yang juga penting untuk diperhatikan, apabila melihat Amerika – sebagai salah satu di antara negara yang kental menganut sekularisme, yang bahkan oleh para *founding fathers* negaranya, kuat sekali di-

tanamkan ke dalam paradigma berpikir setiap warganya: "Amerika Serikat adalah negara sekular" – adalah suatu kenyataan bahwa Amerika merupakan negara yang sangat religius. Pada tingkat masing-masing individu, sebagaimana sampai sekarang banyak direkam dalam berbagai survey, pada dasarnya orang Amerika lebih religius daripada orang Eropa. Kenyataan demikian sepatutnya juga dilihat bahwa sekularisme dalam konteks ini, yang didesakkan dan diatur oleh pemerintah Amerika, misalnya, menunjukkan bahwa sistem politik, pada praktiknya, tidak dapat sepenuhnya sekular. Atau dengan perkataan lain sistem politik yang sekular sama sekali tidak lantas menegasikan, mengecilkan, dan mengeliminasi agama. Maka, sejatinya dalam rumusan sekularisme besar sekali tuntutan atau harapan agar agama tidak masuk pada wilayah-wilayah politik. Artinya, agama diharapkan jangan sampai memberikan campur tangan pada pengaturan kebijakan fungsi negara. Demikianpun sebaliknya, negara jangan sampai masuk pada wilayah-wilayah yang mengatur atau yang menjadi *scope* teologi keagamaan setiap warga.

> Sekularisme adalah independensi agama dari wilayah-wilayah yang diatur oleh negara. Definisi seperti itulah yang cenderung meletakkan sekularisme secara moderat atau bahkan progresif, yang sepatutnya ditransfer ke dalam konteks Indonesia.

Konsep privatisasi agama, sebagai agenda turunan dari sekularisme, secara generik berupaya menyingkirkan agama dari ranah publik. Sebab, agama semata dipahami sebagai relasi antara individu dengan Tuhan yang bersifat pribadi, oleh karena ketika agama mendesak ke

ruang publik cenderung meringkus hak dan kebebasan setiap orang. Akibatnya, agama tidak lagi mempunyai peran sosial, sekalipun untuk pembebasan umat dari segenap ketertindasan. Bagaimana Anda memandang konsep privatisasi ini?

Privatisasi agama merupakan gagasan yang mengabaikan fungsi dan peran agama. Padahal agama tidak mungkin dilepaskan dari wilayah publik. Sebab keberadaannya yang paling utama dalam kehidupan umat yakni untuk mengemban misi suci. Sedangkan misi agama yang pokok adalah: *pertama,* sebagai edukasi (pendidikan). Agama mempunyai tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dengan memberikan tuntunan kepada umat untuk menstimulasi kepribadiannya supaya mereka berlaku baik, jujur, adil dan sebagainya, yang dalam Islam tercakup dalam konsep *amar ma'rûf nahy munkar*. Dengan demikian, mau tidak mau agama harus masuk dalam wilayah publik. *Kedua,* sebagai penerangan dan pencerahan. Yakni bahwa eksistensi agama, terlepas dari segala keterbatasan dan apapun agamanya, termasuk juga Islam, membawa misi membimbing dan memberi petunjuk kepada umat tentang suatu hal yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Karena itu, yang juga patut untuk diperhatikan terkait dengan fungsi penerangan dan pencerahan yaitu bagaimana manusia tidak hanya bisa mengandalkan semata-mata pada kekuatan-kekuatan ilmu, teknologi dan sebagainya. Sebab, jika tidak didorong dan diberikan landasan atau pijakan yang kuat oleh agama, justru ilmu dan teknologi bisa mengancam umat manusia sendiri. Teknologi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat dipergunakan dengan tidak sewajarnya atau, bahkan, disalahgunakan.

Fungsi *ketiga* yang paling penting dari agama adalah fungsi dalam mengemban misi "profetis" atau misi kenabian. Misi profe-

tis/kenabian di sini lebih melihat bahwa agama tidak semata-mata menganalisis, memberikan pencerahan atau penerangan dalam hal yang menyangkut hubungan antar-manusia (*hablun min al-nâs*) saja, tetapi juga mengandung sebuah konsekuensi berupa tanggung jawab individu kepada Tuhannya (*hablun min Allâh*). Ini menandakan bahwa sesungguhnya terdapat misi yang transenden dalam agama. Tentu saja misi transenden dalam konteks ini adalah misi kenabian itu sendiri. Misi kenabian di sini adalah misi yang suci dan mulia untuk mengangkat harkat martabat dan derajat manusia menuju jalan yang lebih baik, bukan sekadar yang berorientasi pada wilayah duniawi, tetapi juga kehidupan di balik kehidupan ini, yakni kehidupan sesudah hari akhir. Kalau manusia tidak diberikan pandangan tentang hari akhir, manusia terkadang bisa menjadi tidak terkontrol. Sebagai contoh materialisme, yang sekarang ini selalu diangung-agungkan sebagai tujuan final dari kehidupan manusia, membuat hasrat manusia tidak ada habis-habisnya, sehingga orang menjadi rakus, menzalimi yang lain dan sebagainya. Sebaliknya, jika ada kepercayaan terhadap aspek-aspek transenden seperti misteri kematian dan, terutama, kepercayaan kepada hari akhir, hidup setelah kehidupan itu sendiri, maka orang kemudian akan melakukan investasi dalam bentuk amal kebaikan yang

> Sejatinya dalam rumusan sekularisme besar sekali tuntutan atau harapan agar agama tidak masuk pada wilayah-wilayah politik. Artinya, agama diharapkan jangan sampai memberikan campur tangan pada pengaturan kebijakan fungsi negara. Demikianpun sebaliknya, negara jangan sampai masuk pada wilayah-wilayah yang mengatur atau yang menjadi *scope* teologi keagamaan setiap warga.

diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan luhur, yang merupakan tabungan di dunia. Karena bagaimanapun juga setiap orang ingin dikenang hidupnya. Sebab, ingin dikenang dan membuat sejarah merupakan hasrat terpendam yang diimpikan oleh hampir setiap orang. Sementara, agama memberikan dukungan supaya orang kelak dikenang baik. Pada prinsipnya, setiap orang bisa membuat sejarah dirinya masing-masing, apakah sejarah itu kecil atau besar. Sejatinya, sangatlah penting bagi setiap orang untuk memunculkan suatu keinginan agar bisa dikenang orang lain.

Dalam buku yang diedit oleh Herbert Feith dan Lance Castles, Indonesian Political Thinking 1945–1965*, Mohammad Natsir lewat tulisannya* The Dangers of Secularism *dengan tegas menolak sekularisme, termasuk yang didesakkan sebagai pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama dan kultural lainnya. Sekularisme menghendaki agar ilmu pengetahuan menjaga semangat ilmiah,* value free *dan objektivitasnya:* "science for the sake of science"*. Apa pendapat Anda dengan perdebatan sekularisme dalam wilyah ilmu pengetahuan?*

Saya setuju dengan pandangan Natsir tentang penolakannya terhadap sekularisme. Tetapi, lagi-lagi, saya tekankan di sini bahwa yang dikritik Natsir adalah lebih pada praktik sekularisme yang memisahkan sama sekali agama dengan negara, agama dengan politik, sebagaimana diyakini Kemal Atatturk yang diterapkannya di negara Turki. Jadi, Natsir tidak banyak mengomentari sekularisme dalam wilayah ilmu pengetahuan. Namun, kaitannya dengan sekularisme dalam ilmu pengetahuan, saya setuju dengan Natsir. Bagaimanapun juga, ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, *value free*. Maka sepa-

tutnya kita mengacu pada ucapan yang sangat terkenal dari Albert Einstein: ilmu tanpa agama itu membutakan; agama tanpa *science* itu lumpuh. Dalam konteks ini, yang harus dilihat adalah fungsi agama sebagai *education* (pendidikan dan penerangan). Agama semestinya dapat memberikan *guide lines* berupa bimbingan buat ilmu pengetahuan. Sebab, ilmu bukanlah sama sekali tidak terbatas. Ilmu pengetahuan mempunyai kemungkinan untuk berkembang ke arah, dan sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas yang lebih baik. Sebaliknya perkembangan ilmu pengetahuan dapat pula diselewengkan untuk tujuan yang tidak terpuji. Artinya, ilmu tidak bebas nilai dan juga mempunyai keterbatasan, apapun ilmunya. Sehingga, apapun bentuk dan tatar-an suatu ilmu pengetahuan, maka dia harus mempunyai pijakan moral. Dengan pengertian lain hendaknya kita percaya kepada tiga fungsi agama di atas. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa di antara fungsi agama tersebut adalah misi profetis. Fungsi itulah yang tidak ada dalam institusi atau lembaga lain selain agama. Hanya agamalah yang bisa memberikan dorongan agar ilmu mempunyai misi yang profetis. Sebagai contoh, bom atom kalau tidak dikelola oleh orang yang mendasarkan dirinya pada misi profetis dari agama, maka bisa disalahgunakan dan malah mengakibatkan bencana. Namun tidak demikian kalau suatu ilmu pengetahuan oleh ahlinya dilandasi misi profetis: pembuatan bom atom akan dimanfaatkan oleh ilmuwan untuk menjaga negaranya atau juga untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya, untuk pem-

> Berpikir liberal, rasional dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita dan kemajuan, tetapi hendaknya pada akhirnya *we have to belief in God*, kita harus percaya pada eksistensi Tuhan.

bangkit tenaga listrik dan sebagainya. Hal itu hanya bisa terjadi apabila ilmuwan tersebut mempunyai pandangan bahwa institusi keagamaan yang ia anut dan yakini menuntut untuk mengemban misi suci menjunjung tinggi harkat dan martabat umat manusia.

Dengan demikian, ilmu pengetahuan selalu dibatasi. Kalaupun dia tidak dibatasi agama, setidaknya ada *values* lainnya. Hal tersebut juga tercermin dari budaya orang Eropa, misalnya, dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan, meskipun mereka dianggap sekular tetapi di hati yang paling dalam mereka masih mempunyai etika, menjunjung moralitas – yang menurut saya, lagi-lagi, moralitas hanya bisa bersumber dari agama. Artinya, tidak ada ilmu pengetahuan yang mempunyai landasan moral yang kokoh tanpa dibarengi oleh norma agama. Dalam praktiknya, saya kira, agama bukan hanya seperangkat moral saja, tetapi juga di dalamnya dibutuhkan aturan *punishment* dan *reward* atau suatu penghargaan.

Apabila kembali pada gagasan sekularisme dalam lingkup yang lebih luas, saya mempunyai catatan tersendiri tentang sekularisme dalam konteks politis dan ide. Setidaknya wacana yang dapat dimajukan di sini, menurut hemat saya, secara lebih sederhana sekularisme mempunyai dua pengertian: *pertama*, cara pandang yang sangat ekstrem, di mana dengan tanpa kompromi memisahkan secara tegas antara agama dengan negara; *kedua* melihat sekularisme secara kontekstual. Pada pengertian yang kedua, jika dicermati dengan seksama, pengalaman sekularisme yang terjadi di kalangan Islam sendiri sangatlah beragam, sesuai dengan konteks yang melingkupinya. Begitupun dengan gagasan sekularisme yang berkembang di dalamnya. Untuk itu salah satu pemikir Muslim terkemuka dari India, Asghar Ali Enginer, mengungkapkan bahwa dia lebih suka mengartikan sekularisme yang tengah berkembang, bukan dalam

pengertian yang kerap didemonstrasikan di dunia Islam yang semata menonjolkan tarik-menarik dari sudut pandang teologis. Sebab menurut dia sekularisme merupakan produk historis.

Apa lacur, orang Islam cenderung menyeret sekularisme – yang sejatinya akan lebih produktif manakala melihatnya sebagai produk historis – untuk diideologisasikan atau "diagamakan". Sehingga yang seringkali terjadi atau beredar dalam benak umat Islam adalah cerita tentang sejarah kegelapan Eropa di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan dan juga kuatnya dominasi agama yang waktu itu memang tidak kompatibel dengan semangat kemajuan. Semua itulah yang menjadi dasar bagi munculnya sekularisme yang menyingkirkan agama. Kuatnya orang Islam dalam mengideologisasikan sekularisme sebagai paham yang tidak menerima agama menjadi alasan mereka untuk menolak paham tersebut.

Padahal, setiap negara niscaya mempunyai sejarah sekularisme sendiri, yang tidak mungkin sama dengan konteks berkembangnya sekularisme di Eropa. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus India, di mana orang India begitu mudah untuk menerima dan memilih sekularisme. Karena itulah se-

Agama semestinya dapat memberikan *guide lines* yang berupa bimbingan buat ilmu pengetahuan. Sebab, ilmu bukanlah sama sekali tidak terbatas. Ilmu pengetahuan mempunyai kemungkinan untuk berkembang ke arah, dan sekaligus juga dapat dimanfaatkan untuk aktivitas, yang lebih baik. Sebaliknya perkembangan ilmu pengetahuan dapat pula diselewengkan untuk tujuan yang tidak terpuji. Artinya, ilmu tidak bebas nilai dan juga mempunyai keterbatasan, apapun ilmunya. Sehingga, apapun bentuk dan tataran suatu ilmu pengetahuan, maka dia harus mempunyai pijakan moral.

bagian besar Muslim India menerima sekularisme. Sehingga, kendatipun India sebagian besar masyarakatnya beragama Hindu, tetapi sistem politik atau pemerintahannya tidak menganut Hinduisme. Sekularisme dalam konteks India menjadi pilihan yang ideal bagi orang Islam di India. Asghar Ali Engineer memaparkan alasan bahwa hendaknya umat Islam lebih menerima sekularisme dikarenakan paham ini memberikan peluang yang sangat lebar guna mengembangkan ruang publik (*public sphere*) yang lebih terbuka dan rasional buat agama, terutama bagi pemeluk agama untuk lebih menginterpretasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai agama secara bebas dan lebih progresif tanpa rasa takut dan khawatir akan adanya intervensi berupa regulasi ataupun tekanan dari negara.

Namun demikian, justru dengan begitulah India berkembang. Jika India menerapkan negara agama, menurut hemat saya, pasti Islam akan ditindas. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer itulah aspek positif dari sekularisme yang menyediakan ruang publik bagi agama untuk mengontekstualisasikan nilai-nilainya secara bebas dan terbuka. Jadi, sepatutnyalah pengertian sekularisme, menurut persepsi Asghar Ali Engineer, jangan sampai diteologisasikan. Sebab, pada dasarnya, ia selalu menegaskan, sekularisme tidak lain produk historis. Karena produk historis, maka sekularisme harus selalu dilihat konteks berkembangnya. Dalam konteks historis inilah, sekularisme sebagaimana terjadi dalam konteks Muslim di India, agama tetap menjadi bagian dari kehidupan setiap warga negara. Hindu tetap saja menjadi mayoritas di India, tetapi agama lainnya juga dibiarkan berkembang. Orang Islam di India mencapai sekitar 100 juta lebih.

Sebagai suatu kenyataan, mereka (masyarakat Hindu) dengan lapang menerima keberadaan umat Islam karena dalam *common*

platform-nya India memang bukan negara Hindu atau negara agama. Sama halnya dengan Indonesia yang tidak berasaskan negara agama, tetapi Pancasila. Apabila kita tilik ke belakang, konsep awal Pancasila adalah konsep negara sekular. Sebab, pada awalnya Pancasila tidak memuat kalimat "Ketuhan Yang Maha Esa", demikian Soekarno merumuskannya. Namun kemudian kalimat tersebut dicantumkan. Sehingga semacam ada upaya membawa negara ini supaya tidak terlalu sekular, namun juga tidak terlalu berdasarkan agama. Para pendiri Indonesia pada waktu itu memerlukan jalan tengah sehingga mereka sepakat menambahkan kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dari Pancasila. Dalam hal ini, sila pertama Pancasila konteksnya adalah memberikan semacam panduan moral bagi keempat sila yang lainnya. Sehingga sila pertama justru menjadi sangat penting. Namun demikian, ini jangan diartikan sebagai teologisasi dari konsep Pancasila itu sendiri, tetapi memang menjadi semacam *willingness*, kehendak dari publik, bahwa Indonesia bukan negara sekular tetapi juga bukan teokrasi, negara agama.

> Berpikir liberal tidaklah mudah bagi seorang Muslim. Sebab, seliberal-liberalnya seseorang yang beragama (Muslim), dalam mempergunakan akalnya tetap saja mempunyai batas. Karena itulah MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkan liberalisme lantaran mereka menafsirkannya sebagai paham yang terlampau menggunakan kekuatan rasio.

Pancasila dalam konteks ini, lagi-lagi, sebagai jalan tengah. Pancasila menjadi semacam dekonvensionalisasi terhadap sistem teokrasi itu sendiri. Mukadimah UUD 1945 – yang oleh beberapa kalangan Islam pada waktu itu menghendaki dicantumkannya

tujuh kata yang meliputi pengaturan agar dijalankan syariat Islam sepenuhnya – menegaskan penghilangan tujuh kata. Hal tersebut mencerminkan terwujudnya kompromi politik, yang berupa *gentlement agreement*, atau meminjam bahasa Pak Alamsyah Prawiranegara adalah sebagai pengorbanan umat Islam. Keputusan politik dari para pendiri republik yang sangat variatif, sebagai perwakilan dari berbagai macam agama, golongan dan sebagainya, menandakan kedewasaan mereka dalam melihat pluralitas. Maka, implikasi dari semua itu adalah Indonesia tidak didasarkan pada syariat Islam. Itu patut untuk disyukuri. Sebab, Indonesia adalah negara plural, meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga kalau kita lihat kembali konsep Pancasila yang pada awalnya adalah sekular tetapi kemudian, menggunakan bahasa saya, "diagamakan", diberikan muatan-muatan keagamaan. Oleh karena itulah Pancasila dalam kerangka tersebut menjadi sangat fundamental, karena bagaimanapun juga masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat religius.

Sejak awal kemerdekaan bangsa ini hingga sekarang konsep liberalisme ditentang keras oleh banyak kalangan. Salah satu alasannya adalah paham ini menyerukan kebebasan (moralitas) tanpa batas. Akibatnya, menurut mereka, di samping liberalisme berakibat pada dekadensi moral, juga, lantaran ditunggangi oleh kapitalisme, memunculkan kolonialisme dan imperialisme yang meminggirkan negara-negara atau masyarakat yang miskin. Bagaimana Anda memahami konsep ter-sebut?

Istilah liberalisme memang menjadi kontroversi yang serius, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di negara Amerika

sendiri. Terlebih lagi ketika istilah tersebut dipahami sebagai pembenaran atas kebebasan yang tanpa kontrol atau tanpa kendali dan bentuk-bentuk pejoratif lainnya. Padahal, persoalannya adalah bagaimana kita mengartikan liberalisme itu sendiri. Pasalnya, saya sendiri termasuk orang yang agak "risih" terhadap istilah liberal. Sebab, saya lebih suka menggunakan istilah progresif, walaupun terhadap ide-ide liberal saya setuju. Tetapi di dalam benak masyarakat yang terlanjur melekat adalah bahwa kata liberal mempunyai konotasi yang bukan hanya sekadar ide atau gagasan. Ia tidak bisa lepas dari sekularisme, kebebasan tanpa batas, kapitalisme dan sebagainya. Konotasi-konotasi semacam itulah yang kemudian menjadikan banyak sekali persoalan atau kompleksitas yang muncul terkait dengan liberalisme.

> Sebenarnya kalau kita mengacu pada Pancasila sebagai *common platform*, maka sebenarnya Pancasila merupakan *kalimat al-sawa*, meminjam pandangan Cak Nur ihwal lambang negara tersebut. Jadi, sebenarnya Pancasila sudah cukup memuat seluruh nilai-nilai yang kita dambakan bersama bagi tatanan yang ideal. Persoalannya adalah bahwa kasus-kasus terakhir, terutama setelah munculnya fatwa MUI, semakin menjauhkan Indonesia dari cita-cita ideal tersebut.

Sebenarnya konotasi terhadap liberalisme semacam itu tidak hanya identik dengan pandangan orang Indonesia semata, tetapi begitupun dengan sejarahnya di Barat yang tidak sedikit mendapatkan resistensi sangat kuat. Kendati demikian, berpikir liberal merupakan hal yang wajar dan sah-sah saja. Itu menjadi hak bagi setiap orang. Persoalannya, berpikir liberal tidaklah mudah bagi seorang Muslim. Sebab, seliberal-liberalnya seseorang yang beragama

(Muslim), dalam mempergunakan akalnya tetap saja mempunyai batas. Karena itulah MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkan liberalisme lantaran mereka menafsirkannya sebagai paham yang terlampau menggunakan kekuatan rasio.

Namun begitu, menurut saya, justru penggunaan rasio itu penting. Persoalannya adalah jangan sampai penggunaan akal itu sebebas-bebasnya dan tanpa batas, sehingga kemudian menjadikan kita bersikap arogan. Berpikir liberal, rasional dan kritis merupakan sesuatu yang tidak dapat dinafikan bagi cita-cita akan kemajuan, *the idea of progress*, walaupun begitu hendaknya pada akhirnya *we have to belief in God*, kita harus percaya pada eksistensi Tuhan. Dalam konteks inilah orang seperti Ulil Abshar-Abdalla dan sebagainya meskipun mempunyai pandangan yang sangat liberal, tetap saja menggunakan kerangka agama dalam pola pikirnya. Sehingga mudah dipahami, terutama dalam konteks pemikiran liberal dalam Islam, apabila penggunaan ijtihad sangat dianjurkan dan dirayakan. Dalam wacana keislaman konsep ijtihad belakangan kian berkembang. Tetapi, tentu saja, batasannya adalah bahwa dalam konteks kebebasan berpikir dan memaknai setiap persoalan secara progresif, untuk tidak memakai istilah liberal, bagaimanapun tetap saja referensi kita adalah al-Quran, Hadits dan beberapa ketentuan pendukung lainnya. Hanya saja, persoalannya terletak pada cara pandang yang berbeda: orang-orang yang menafsirkan hal-ihwal Islam secara liberal oleh banyak kalangan mendapatkan konotasi negatif atau selalu jelek lantaran mereka melihat bahwa liberalisme terlampau menggunakan rasio secara berlebihan, sebagai konsepsi yang diimpor, sehingga para pelakunya adalah antek-antek Barat.

Maka menurut hemat saya, anggapan seperti itu harus direvisi dan diperbaiki, kendatipun saya tetap setuju bahwa istilah liberal

itu sendiri memang pada dirinya mengandung persoalan, bukan hanya di Indonesia tapi juga di tempat lain. Hal ini dikarenakan, jika kita mengacu pada sejarah Eropa, berkembangnya paham liberal sebagai produk historis cenderung mempunyai semangat meninggalkan agama. Sementara, berbeda dengan pengalaman Barat (Eropa), di kalangan Islam sendiri perkembangan pemikiran liberal dalam konteks keislaman pada dasarnya sudah tumbuh dan berkembang di Mesir dan di beberapa negara Arab lainnya. Hal tersebut ditandai dengan bermunculannya model-model penafsiran dan temuan baru, di samping juga visi-visi baru tentang tafsiran keagamaan sudah sangat luas dan berkembang, sebagaimana telah diutarakan dengan amat bagus oleh Albert Hourani dalam bukunya, *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939*.

Pluralisme adalah sebuah sikap, sebuah pandangan yang berupaya menghargai pandangan "*the others*". Sebagai seorang Muslim saya tetap yakin bahwa *Inna al-dîna 'inda Allâhi al-Islâm*, agama yang paling benar adalah Islam. Saya yakin benar sebagai seorang Muslim – dengan agama yang saya anut. Akan tetapi, tentu saja, paling benar menurut saya belum tentu menurut orang lain. Sebab sebaliknya orang Kristen akan mengatakan bahwa ajarannya paling benar. Demikianpun sebaliknya, benar menurut mereka; bukan benar menurut saya. Karena itu, di sini yang harus kita kembangkan kaitannya dengan pluralisme adalah suatu sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing.

Sedangkan untuk konteks Indonesia, orang-orang seperti Nurcholish Madjid berandil besar dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran liberal. Meskipun demikian, seliberalnya pandangan Cak Nur tentang agama sama sekali tidak membuatnya

menjadi anti-Tuhan. Begitu pula seliberal-liberalnya Ulil Absshar-Abdalla, bagaimanapun dia tetap sebagai seorang Muslim. Terlebih dia punya basis yang cukup kuat dengan tradisi pesantrennya. Gus Dur dapat pula disebut pemikir liberal, yang walaupun menafsirkan agama dengan kekuatan rasionya, tetapi tetap seorang Muslim yang taat.

Semua itu patut dipahami dalam kaitannya dengan penggunaan pendekatan-pendekatan yang mereka lakukan yang lebih mengedepankan ijtihad, pendekatan yang rasional dan yang lebih inklusif. Memang, kadang-kadang, dalam beberapa hal menjadi tampak kontroversial. Namun, hal tersebut tidak bisa dikesampingkan, karena pola pikir setiap orang kerap sangat bertentangan satu sama lainnya. Tetapi bagaimanapun juga saya masih percaya bahwa seliberal-liberalnya Cak Nur, Ulil, Gus Dur, misalnya, tetap saja mereka percaya kepada Tuhan.

Sejak dibukanya pintu reformasi dengan ruang politik yang terlampau longgar, bahkan kapasitas negara juga melemah, bermunculan keinginan dari beberapa kalangan umat Islam, terlebih di beberapa daerah, untuk menerapkan nilai-nilai Islam sebagai aturan positif: syariat Islam. Namun begitu, dalam praktiknya formalisasi agama malah menimbulkan kompleksitas persoalan bangsa, di mana kontroversi implementasi perda-perda syariat Islam berakibat pada tercabutnya hak-hak dan kebebasan sipil mereka. Bagaimana respon Anda terhadap kontroversi perda syariat Islam?

Perda-perda syariat Islam yang seringkali melanggar hak-hak dan kebebasan sipil, menurut saya, bertentangan dengan konstitusi. Meskipun agama mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam,

tetapi harus diingat terdapat 17.000-an pulau dengan berbagai ragam etnis, agama dan kepercayaan yang harus dihormati hak dan kebebasannya sebagai warga negara Indonesia.

Jika mengacu pada konteks Indonesia belakangan, terlebih sejak bergulirnya reformasi, maka kita sering menyaksikan bagaimana civil rights *dan* civil liberties *demikianpun* political rights *cenderung semakin tidak mendapatkan penghargaan, jaminan perlindungan dan pemenuhan dari negara. Akibatnya, kaum minoritas seperti orang-orang non-Muslim, penganut paham atau keyakinan di luar* mainstream*, tidak mendapatkan ruang dan justru malah disingkirkan. Jika kita merujuk pada apa yang coba Anda tawarkan dengan pandangan atau konsep* "progresive Islam", *lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan istliah tersebut dan apakah mampu mendorong negara atau sistem pemerintahan agar dapat lebih adil dan setara?*

MUI tidak lain kumpulan manusia yang pendapatnya bisa diterima atau diabaikan, sebab fatwa ulama merupakan pendapat hukum yang tidak konstitusional. Sementara MUI kerap memberikan fatwa yang justru tidak mencerminkan pendapat seluruh ulama atau umat Islam di negeri ini, dan lebih merupakan keputusan politis.

Akar permasalahan yang harus diperhatikan adalah miskinnya pemahaman umat Islam di Indonesia terutama pada kesalahpahaman dan *mis-interpretasi* terhadap konsep pluralisme, sebagaimana melatari lahirnya fatwa MUI. Dalam fatwa MUI tersebut, pluralisme dengan tegas diharamkan. Sedangkan untuk kedua isu lainnya, yakni sekularisme dan liberalisme, di antara umat Islam

melihatnya secara *debatable*, masih diperdebatkan status haram atau tidaknya. Jadi, umat Islam sangat berbeda dalam memperlakukan ketiga paham yang sedang kita bahas (sekularisme, liberalisme dan pluralisme), di mana mereka, pada umumnya, teramat resisten terhadap pluralisme. Padahal, pluralisme dalam konteks masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia adalah sesuatu yang niscaya, *sunnatullâh*. Jelas sekali bahwa pluralitas dalam dunia ini adalah sebuah keniscayaan. Dalam surat al-Hujarât dikatakan bahwa oleh Tuhan kita sengaja diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kita bisa saling menenggang. Bahkan, di ayat lain, dikatakan "kalau Tuhan mau, niscaya umatnya akan dijadikan satu." Tetapi tidak, Tuhan malah menghendaki umat manusia berbeda-beda.

Letak persoalannya adalah MUI tidak bisa membedakan antara pluraslime dengan relativisme. Dalam konteks ini, pluralisme adalah sebuah sikap, sebuah pandangan yang berupaya menghargai pandangan "*the other*". Sebagai seorang Muslim saya tetap yakin bahwa *Inna 'l-dîna 'inda Allâhi al-Islâm*, agama yang paling benar adalah Islam. Saya yakin benar sebagai seorang Muslim, dengan agama yang saya anut ini. Akan tetapi, tentu saja, yang paling benar menurut saya belum tentu menurut orang lain. Sebab sebaliknya orang Kristen akan mengatakan bahwa ajarannya paling benar. Demikianpun sebaliknya, benar menurut mereka, tetapi bukan benar menurut saya. Karena itu, di sini yang harus kita kembangkan kaitannya dengan pluralisme adalah suatu sikap saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Jelas sekali dalam al-Quran dikatakan: bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dalam konteks ini, titik tekan paling utama dari pluralisme adalah bagaimana mengembangkan *tasammuh*, sikap toleran dan penghargaan atas yang lain, *the other*. Sebab, bagaimanapun

juga menghargai keyakinan orang lain sesungguhnya bagian yang asasi dalam diri kita.

Oleh sebab itu pluralisme berbeda dengan relativisme. Relativisme merupakan cara pandang yang merelatifkan semua agama. Tidak ada satu agama yang paling benar. Bahwa setiap agama mempunyai kebenarannya masing-masing. Karena itu, dalam relativisme, setiap orang mempunyai ukuran masing-masing dalam menerjemahkan kebenaran, tanpa harus merujuk pada satu atau seperangkat ketentuan yang ada dalam agama tertentu.

Pluralisme juga harus dibedakan dari sinkretisme. Dalam konteks ini, sinkretisme dalam pengertian menyamakan semua agama. Semua agama sama; semua agama baik dan benar. Justru, pandangan seperti itu bukanlah prinsip dari pluralisme, melainkan sinkretisme. Sehingga, apabila yang ditekankan dalam relasi antar-agama adalah relativisme atau sinkretisme, maka saya juga menolak. Saya menolak relativisme ataupun sinkretisme karena masing-masing agama mempunyai kelebihan yang diyakini kebenarannya. Kalau Islam tidak mempunyai kelebihan, buat apa, misalnya, saya memilih Islam? Tetapi kelebihan yang saya peroleh dari Islam tidak bisa saya paksakan kepada orang lain yang berbeda paham teologi atau agamanya. Saya yakin Islam itu *rahmatan li al-'âlamîn*. Dia mengandung ajaran-ajaran yang baik. Hal semacam itu saya

> Kesalahan fatal dari fatwa MUI adalah, salah satunya, menyamakan pluralisme dengan relativisme dan sinkretisme. Pandangan seperti itu tentu saja keliru. Persoalnnya adalah bahwa kemudian fatwa MUI itu dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok garis keras untuk kepentingan mereka sendiri atau, lebih tepatnya, demi kepentingan politik kelompok keagamaan tertentu.

terima bukan hanya karena keislaman saya kebetulan berasal dari keturunan saja, tetapi saya ingin mengatakan bahwa Islam adalah agama yang terbuka, ramah, damai dan sebagainya.

Namun saya pun menyadari betul bahwa itu semua adalah pandangan saya. Sehingga yang harus kita kembangkan secara serius bahwa semestinya pluralisme menjadi bentuk penghargaan terhadap keyakinan yang berbeda, terutama pada agama-agama *samâwî*. Sebab, terdapat rangkaian atau semacam hubungan di antara agama-agama itu. Maksudnya, rangkaian itu merupakan suatu keterikatan satu sama lainnya, khususnya agama Islam, Kristen dan Yahudi, yang dikenal sebagai *abrahamic religion*, tradisi-tradisi atau warisan-warisan Ibrahim. Ada semacam kontinuitas atau kesinambungan dari ketiga agama tersebut. Oleh karena itu, Islam sendiri tidak pernah menghilangkan, atau meminjam bahasanya Cak Nur merelatifkan atau menisbikan agama selain Islam, misalnya Yahudi atau Kristen. Karena Islam sadar betul bahwa mereka juga mempunyai sejarah dan mewarisi tradisi Ibrahim. Jadi, fungsi Islam di sini sebagai puncak agama memberikan afirmasi kepada ajaran-ajaran yang telah dikembangkan dan disebarkan sebelumnya, baik oleh Yahudi maupun Kristen. Sebab, jika kita membaca Taurat atau Injil, maka ada benang merah yang bisa kita telusuri, dalam konteks ini adalah pengakuan, penghargaan atau kasih sayang, toleransi dan sebagainya atas agama sebelumnya dan para penganutnya. Yang harus kita sadari adalah masing-masing agama mempunyai pandangan teologi atau keagamaan yang berbeda dan tidak bisa dipersatukan. Demikianlah pluralisme.

Tetapi perbedaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Adalah hal yang sangat manusiawi apabila saya suka memakai kaos, Anda lebih suka memakai baju batik, misalnya, dan

sebagainya. Namun demikian, perbedaan teologi sepatutnya tidak dijadikan sebagai alasan untuk saling mempertentangkannya, terlebih apabila didorong menjadi konflik dengan tindak kekerasan. Sebab, hanya Tuhan yang tahu kebenaran di antara teologi yang ada. Sedangkan tugas dan wilayah kita sebagai orang yang beragama seharusnya sebisa mungkin mencari titik temu dalam hal-hal yang menyangkut kemanusiaan, keadilan dan kasih sayang dalam relasinya dengan agama-agama lainnya.

Keberagamaan (Islam) yang inklusif dan pluralis akan terbuka terhadap konsep Barat apapun, sepanjang berkaitan dengan spirit agama yang menuntun umat manusia untuk berlaku adil, sebagaimana konsep hak asasi manusia (HAM) yang sudah diuniversalisasikan. Maka, pada prinsipnya, apapun konsepnya selama sesuai dengan keadilan harus kita terima.

Bagaimanapun, di antara perbedaan yang ada dalam masing-masing agama sebenarnya ada titik temu. Titik temu di sini lebih berupa permasalahan yang menyangkut nilai-nilai luhur yang bersifat universal: *welas asih*, kemanusiaan, menghargai yang lain, tolong-menolong dan sebagainya. Semua itu merupakan spirit utama dari agama yang hendaknya didakwahkan. Benang merah yang kedua adalah masalah yang menyangkut keadilan. Agama apapun di dunia ini mempunyai komitmen keadilan sebagai upaya untuk menjunjung tinggi kemanusiaan.

Dalam wacana yang terkait dengan persoalan minoritas atau the other *muncul pandangan bahwa pluralisme semata, dengan konsep toleransi (pasif)-nya, tidak lagi memadai. Hal ini berangkat dari per-*

*timbangan bahwa toleransi selama ini lebih merupakan suatu "kemewahan" yang diberikan oleh pihak mayoritas terhadap minoritas dengan sekadar membiarkan keberadaan minoritas/*the other (peaceful co-existence) *tanpa berusaha untuk saling mengenal dan turut peduli, terlebih lagi, melakukan pemihakan terhadap hak-hak dan kebebasan* the other *dalam mengekspresikan paham atau keyakinannya. Bagi beberapa pihak kemudian menawarkan konsep multikulturalisme yang mencoba memperjuangkan* affirmative action *terhadap kalangan minoritas yang terpinggirkan.*

Pandangan yang cenderung mengecilkan peran dan sumbangsih gagasan pluralisme terhadap nasib minoritas atau *the other* adalah suatu kesalahpahaman. Sebaliknya, pemahaman yang benar perihal kemajemukan dalam bingkai pluralisme, manakala kita percaya dan mengamininya, justru bisa menjadi cara pandang yang dapat mendorong orang untuk menghargai hak-hak sipil dan kebebasan sipil. Karenanya, dengan memahami pluralisme secara lebih baik, orang menjadi lebih toleran dan terbuka. Wujud konkret atas pemahaman yang benar terhadap pluralisme, misalnya dalam pengalaman pribadi saya, ketika melihat fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme, maka saya, Dawam Rahardjo, Gus Dur dan para pemikir pluralis lainnya mengkritisi dan menunjukkan ketidaksetujuannya atas fatwa tersebut, karena mengetahui betul bahwa fatwa semacam itu tidak didasarkan pada pandangan-pandangan atau riset yang sosiologis. Sehingga kritik saya terhadap fatwa MUI adalah lebih karena fatwa tersebut terlalu berpijak terhadap pandangan teologis yang sepihak. Padahal di dalam pandangan teologis itu sendiri, banyak sekali gagasan yang lebih pluralis.

Di samping itu, hendaknya juga digarisbawahi bahwa pluralisme berbeda dengan relativisme. Lagi-lagi, kesalahan fatal dari fatwa

MUI adalah, salah satunya, menyamakan pluralisme dengan relativisme dan sinkretisme. Pandangan seperti itu tentu saja keliru. Persoalnnya adalah bahwa kemudian fatwa MUI itu dikapitalisasi oleh kelompok-kelompok garis keras untuk kepentingan mereka sendiri atau, lebih tepatnya, demi kepentingan politik kelompok keagamaan tertentu. Sehingga, yang terjadi adalah kasus seperti yang menimpa kelompok Ahmadiyah yang diserbu dan diusir.

Di sini saya ingin tegaskan: saya bukan orang Ahmadiyah, bahkan saya tidak setuju dan menentang teologi Ahmadiyah. Pasalnya, dalam pandangan saya, teologi Ahmadiyah tidak cocok dan tidak dapat dibenarkan. Namun demikian, saya akan mengecam keras mereka yang melakukan tindakan brutal dan kriminal kepada jemaat Ahmadiyah. Mereka berhak di Indonesia dan tetap menjadi warga negara. Jangan kemudian karena mersa sebagai mayoritas kita dengan serta-merta mempergunakan kekerasan. Sebab, bagaimanapun juga saya tidak setuju dengan cara-cara kekerasan yang digunakan dalam setiap menangani gerakan atau paham yang berbeda dan baru yang tumbuh dalam Islam. Munculnya aliran-aliran baru dalam Islam, seperti Lia Aminuddin, Usman Roy dan sebagainya, menurut saya justru menunjukkan kegagalan dakwah Islam. Mengapa ada orang seperti Lia Aminuddin dan orang yang salat dengan menggunakan bahasa Indonesia (Usman Roy)? Kita seharusnya bertanya mengapa ada seperti itu? Menurut saya hal itu dikarenakan kegagalan dakwah Islam

> Titik tekan paling utama dari pluralisme adalah bagaimana mengembangkan *tasammuh*, sikap toleran dan penghargaan atas yang lain, *the other*. Sebab, bagaimanapun juga menghargai keyakinan orang lain sesungguhnya bagian yang asasi dalam diri kita.

yang dilakukan oleh sebagian ulama-ulama kita. Mereka tidak bisa menangkap esensi dari dakwah keagamaan yang disampaikan para ulama. Maka, yang jauh lebih penting di sini: jangan sekali-kali melakukan tindakan yang represif terhadap mereka yang berbeda, melainkan harus dengan pola edukatif, bahkan, kalau mengutip apa yang dikatakan Ahmad Syafii Maarif, orang ateis sekalipun harus kita hargai. Lantas, bagaimana nasib mereka kelak setelah mati? Itu menjadi urusan Tuhan. Tetapi, belakangan ini muncul persoalan yang acapkali menjadi kian rumit dan merepotkan, yakni manakala di tengah masyarakat para "preman berjubah" merasa dirinya yang paling benar, sedangkan setiap yang berbeda pasti dituduh keliru dan sesat.

Gagasan pluralisme di samping untuk menentang relativisme, juga tidak kalah pentingnya sebagai antisipasi terhadap universalisme yang monis, yang secara epistemologis teramat kuat menjangkiti para pemikir Pencerahan Barat yang cenderung mempunyai cara pandang linear dan mengerucut pada kebenaran tunggal dan total. Karena itu beberapa kalangan beranggapan konsep Hak Asasi Manusia/DUHAM jika dipahami dengan cara pandang monis dan diterapkan secara hitam-putih dapat terjebak pada "kolonialisme" dan "imperialisme" terhadap keunikan nilai-nilai dan budaya lokal.

Ketika pluralisme di seret ke dalam cara pandang monis, maka hal itu merupakan upaya yang salah. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pluralisme merupakan *sunnatullâh*. Karena itu, pluralisme jutru memberikan kita pandangan yang lebih terbuka dalam hidup seperti sekarang ini yang sangat kosmopolit. Artinya, tidak mungkin kita hidup dengan pandangan tunggal. Saya tidak

setuju dengan pandangan John Hick tentang pluralisme. Menurut saya dia cenderung merelatifkan agama. Padahal, justru di tengah pluralitas itulah kita bisa melihat identitas kita sebagai manusia, sebagai makhluk yang beragama dan identitas lainnya. Tentunya kita tidak bisa begitu saja menafikan konsep pluralisme sebagaimana yang ada dalam literaturnya, yang tidak mungkin dipisahkan dari sejarah panjang Eropa. Terdapat konteks yang sangat kompleks yang melatarbelakangi kemunculan gagasan pluralisme di Eropa. Dengan begitu konteks pluralisme mempunyai kenyataan tersendiri di Eropa.

Menurut hemat saya, secara lebih sederhana sekularisme mempunyai dua pengertian: *pertama*, cara pandang yang sangat ekstrem, di mana dengan tanpa kompromi memisahkan secara tegas antara agama dengan negara; *kedua* melihat sekularisme secara kontekstual.

Persoalannya adalah bagaimana membumikan suatu gagasan impor terutama dalam konteks pemahaman kita atas pluralisme itu sendiri di tengah sejarah dan kenyataan negeri ini yang berbeda dengan Eropa. Sebagaimana juga kerap terjadi pada gagasan demokrasi, yang merupakan konsep Barat, yang tidak sedikit mendapatkan batu sandungan ketika berusaha ditransfer dalam konteks keindonesiaan.

Oleh sebab itulah setiap gagasan dari luar yang hendak dicangkokkan ke dalam konteks Indonesia harus dilihat secara lebih arif. Demikianpun umat Islam harus terbuka dan tidak perlu antipati ketika memandang gagasan-gagasan tersebut. Maka, yang terpenting untuk lebih diperhatikan di sini adalah substansi dari setiap konsep: sejauh berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah*, yang mengangkat harkat luhur manusia, di mana tujuan utama dari sya-

riah adalah keadilan. Karena itu, pluralisme, demokrasi, hak asasi manusia ataupun gagasan lainnya sepatutnya disesuaikan dengan konteks Indonesia. Kendati label dan substansinya bisa bermacam-macam, baik yang datang dari dunia Barat, Timur ataupun belahan dunia lainnya, tetapi yang harus diperhatikan dan diberi penekanan dalam melihat suatu gagasan adalah bagaimana kita tetap sadar dan tahu persis bahwa hendaknya keberagamaan atau keislaman kita tengah diarahkan menjadi inklusif. Keislaman yang inklusif adalah sikap, tindakan dan pemikiran yang tidak terjebak pada absolutisme, altruisme, fundamentalisme dan pandangan sempit atau tertutup lainnya; sebaliknya, memberikan tempat dan ruang seluang-luangnya bagi *the others*.

Jadi, keberagamaan (Islam) yang inklusif dan pluralis akan terbuka terhadap konsep Barat apapun, sepanjang berkaitan dengan spirit agama yang menuntun umat manusia untuk berlaku adil, sebagaimana konsep hak asasi manusia (HAM) yang sudah diuniversalisasikan. Maka, pada prinsipnya, apapun konsepnya selama sesuai dengan keadilan harus kita terima. Sehingga tidaklah menjadi masalah menerima konsep sosialisme dan sebagainya, meskipun terkandung muatan ideologis, dengan catatan selalu berkaitan dengan Islam yang berkomitmen pada keadilan. Lantas, mengapa kita tidak membuat sosialisme Islam, misalnya? Lagi-lagi, semua itu berangkat dari bagaimana cara kita memahami dan melihat konteks. Demikianpun perihal klaim universalisme ataupun lainnya, hendaknya harus kita lihat secara inklusif.

Memang persoalannya menjadi semakin rumit bagi sebagian kalangan Muslim "garis keras" yang selalu menentang gagasan-gagasan semacam itu. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa konsepsi Barat yang mengantarkan manusia untuk menjadi

lebih adil, demokratis, inklusif dan pluralis, sebagaimana menjadi prinsip-prinsip yang kerap dirujuk dalam pandangan beberapa kalangan intelektual Muslim, mendapatkan resistensi yang sangat kuat dari gerakan-gerakan Islam "salafi" yang radikal, seperti FPI, MMI, Ikhwanul Muslimin, Hamas dan sebagainya. Harus kita akui bahwa keberadaan gerakan Islam semacam itu merupakan "penyakit" di negeri ini. Sebab, mereka mengancam integritas bangsa yang majemuk.

Salah satu ciri utama gerakan salafi radikal adalah *islamic textual civilization*, yakni mengembangkan peradaban Islam yang tekstual – *hadlarat al-nash*, istilah Arab untuk melabelkan pandangan mereka. Sehingga tafsir-tafsir mereka atas agama sangat tekstual sekali. Pasalnya, teks diperlakukan sebagai teks, *text is per se as a text*. Mereka tidak melihat *historical background* dan mengabaikan sama sekali faktor sosiologis ketika teks itu diturunkan. Pandangan mereka sangat ahistoris dan asosiologis terhadap sebuah teks. Ini pangkal dari seluruh persoalan. Ayat *wa lan tardlâ 'an-ka al-yahûd...*, misalnya, oleh mereka selalu dilihat secara hitam-putih. Dari sinilah paham salafi sangat eksklusif dalam menafsir. Padahal kita juga harus melihat konteks ketika ayat tersebut diturunkan. Ayat itu turun ketika Nabi berdakwah diganggu oleh orang-orang Kristen dan Yahudi. Dalam hal ini yang dimaksudkan dari ayat tersebut adalah "orang-orang", bukan mengacu institusi agama. Ayat itu

> Di antara perbedaan yang ada dalam masing-masing agama sebenarnya ada titik temu. Titik temu di sini lebih berupa permasalahan yang menyangkut nilai-nilai luhur yang bersifat universal: welas asih, kemanusiaan, menghargai yang lain, kasih sayang dan sebagainya.

dengan jelas menunjukkan tindakan "orang-orang". Artinya, kalau terkait dengan orang-orangnya, banyak orang Islam sendiri yang saat itu juga munafik dan sebagainya. Menurut versi saya, ayat itu tidak menunjuk secara spesifik tentang agama. Oleh karena itu, menurut saya, Cak Nur dan kalangan intelektual Islam lainnya, jelas sekali mendorong kita semua untuk menghormati orang lain yang berbeda keyakinan dan agama lain. Karena beragama adalah bagian dari keyakinan manusia yang tidak bisa diganggu sama sekali. Demikian seharusnya cara melihat ayat di atas dan ayat-ayat al-Quran lainnya.

Jika tafsir tekstual menjadi ciri utama yang menjadikan gerakan Islam salafi radikal menjadi cenderung tertutup, lalu menurut Anda apa ciri lainnya sehingga mereka bersikap intoleran?

Ciri berikutnya dari mereka adalah *strick syarî'a minded*. Ciri semacam ini membuat penafsiran mereka tentang syariah semata-mata dalam kerangka legal dan formalistik, yang menutup rapat terhadap pandangan-pandangan lainnya. Akibatnya, pandangan formalistik mereka teramat eksklusif. Padahal, arti sebenarnya syariah adalah jalan. Sehingga, ia harus diderivasikan pada konsep awalnya, yang lebih menyangkut aspek-aspek teologis. Sebab syariah yang berkembang belakangan lebih sebagai interpretasi yang lebih bersifat legal atau dalam format hukum. Hal tersebut terutama didemonstrasikan, dalam sejarahnya, pada abad kedelapan setelah ahli-ahli Islam tengah mendalami ilmu syariah. Celakanya, oleh mereka kemudian pengertian syariah dipersempit sebagai semata-mata hal yang berakitan dengan hukum, dan terutama lagi adalah hukum-hukum fikih.

Padahal, substansi dari syariah yang berarti jalan adalah petunjuk atau tuntunan yang lebih bernuansa nilai-nilai moral atau juga etis. Tujuan utama dari syariah, *maqâshid al-syarî'ah*, adalah keadilan. *Al-'Adâlah* (keadilan) menjadi kunci atau ruh dari syariat Islam. Inilah yang harus dilihat oleh siapapun manakala hendak menafsirkan syariah.

Apa lacur, oleh umat Islam kemudian syariah dipersempit semata-mata sebagai fikih yang tafsirannya teramat literal, sangat tekstual dan merupakan pandangan agama-agama lampau yang tidak dapat ditelan mentah-mentah dan harus diinterpretasikan kembali. Ciri yang ketiga dari kelompok salafi radikal yakni kecenderungannya yang anti-pluraslisme. Mereka melulu melihat pluraslime sebagai konsep Barat, yang merelatifkan agama dan kemudian menyokong Kristenisasi. Yang demikian itu adalah cara berpikir yang sangat eksklusif. Jadi, problem dari seluruh persoalan keagamaan di negara ini adalah terletak pada tabiat kelompok-kelompok salafi radikal yang melihat setiap persoalan selalu dari pengamatan tunggal dengan tafsir yang literal/tekstual dan pandangannya yang legal, eksklusif dan intoleran.

Seluruh uraian Anda sejak awal demikian mendambakan sebuah tatanan yang dapat menjunjung keadilan dan nilai-nilai demokratis lainnya. Sementara, dalam realitasnya, negara Indonesia agak jauh dari kondisi ideal semacam itu. Lantas, dalam pandangan Anda, apa yang harus diupayakan oleh negara dan seluruh masyarakat di dalamnya untuk dapat mewujudkan cita-cita bersama demi sebuah tatanan yang ideal bernama negara Indonesia sehingga minoritas dan kalangan disadvantage *(warga negara yang tidak diuntungkan seca-*

ra ekonomi, politik dan sosial) benar-benar terlindungi dan terjamin atau terpenuhi hak-haknya?

Sebenarnya kalau kita mengacu pada Pancasila, sebagai *common platform*, maka sebenarnya Pancasila merupakan *kalimah sawâ'*, meminjam pandangan Cak Nur, ihwal dasar negara. Jadi, sejatinya, Pancasila sudah cukup memuat seluruh nilai-nilai yang kita dambakan bersama bagi tatanan yang ideal. Persoalannya adalah bahwa kasus-kasus terakhir, terutama setelah munculnya fatwa MUI, semakin menjauhkan Indonesia dari cita-cita ideal yang kita dambakan bersama. Tentu saja, kita dengan sangat jelas melihat fatwa tersebut telah dikapitalisasi. Kritik saya terhadap negara ini adalah ketidakmampuan negara memberikan perlindungan kepada warganya. Misalnya, banyak perlakuan kelompok Islam tertentu, yang mengklaim sebagai representasi mayoritas umat Islam di Indonesia, yang sebenarnya merupakan tindak kriminal dan main hakim sendiri karena melakukan pengrusakan, pembakaran dan pengusiran terhadap Ahmadiyah dan paham teologi lainnya yang tidak *mainstream* dan dianggap sesat. Sementara negara, dengan aparatnya, kerap membiarkan semua itu terjadi. Kendatipun dianggap salah, jarang otoritas negara dengan tegas memproses tindakan kriminal tersebut secara hukum. Sebaliknya, karena menganggap dirinya mayoritas, dengan semena-mena, mereka, yang pola pikirnya sebangun dengan gerakan salafi radikal, mengadili sendiri setiap pihak yang dianggap berbeda.

Adalah hal yang wajar apabila kita tidak setuju dengan keyakinan orang lain yang berbeda, tetapi hendaknya jangan sampai menyegel atau merusak tempat ibadahnya sampai mengancam nyawa orang lain. Tin-dakan seperti itu sama sekali tidak benar. Itu primitif. Namun, yang menjadi pesoalan: negara sangat ra-

puh, kapasitasnya lemah. Misalnya, negara atau pemerintah takut tidak mempunyai basis dukungan dari mayoritas, khawatir akan bertentangan dengan ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan sebagainya.

Padahal, MUI tidak lain kumpulan manusia yang pendapatnya bisa diterima atau diabaikan, sebab fatwa ulama merupakan pendapat hukum yang tidak konstitusional. Tidak jarang MUI kerap memberikan fatwa yang justru tidak mencerminkan pendapat seluruh ulama atau umat Islam di negeri ini, dan lebih merupakan keputusan politis. Salah satunya, ketika MUI memfatwakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Pada kenyataannya ketika kemudian Megawati menjadi presiden, MUI mendukung di bawah pemerintahannya. Fatwa tentang larangan menjadi TKW yang bekerja ke luar negeri juga sama. Bagaimana mungkin fatwa itu sempat terlontar, sedangkan TKW merupakan pilihan pahit warga negara untuk mencari pekerjaan agar dapat menghidupi diri dan keluarganya. Serta masih banyak kasus lain yang menunjukkan bahwa fatwa MUI hendaknya tidak dijadikan pedoman hukum bagi umat Islam lantaran fatwa-fatwa yang diputuskan tidak didasarkan atas konsep dan studi yang matang sesuai dengan fakta-fakta empiris. Contohnya, jika mengacu pada fatwa pelarangan menjadi TKW bekerja di luar negeri dengan alasan jauh dari suami, keluarga dan sebagainya. Keputusan semacam itu menjadi absah kalau negara Indonesia memang menjamin dan memberikan peluang kerja. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa lapangan kerja di negeri sendiri sangat langka dan tidak memadai, sehingga mereka terpaksa menjadi TKW. Hal ini memperlihatkan bahwa fatwa-fatwa MUI tidak didasarkan atas kajian yang menyeluruh. Karena mereka hanya melihat pandangan agama secara sempit dan

tidak kontekstual atau melihat permasalahan-permasalahan riil yang dihadapi umat dan warga negara keseluruhan.

Maka, lagi-lagi, menjadi kewajiban bagi negara untuk bisa berperan secara adil dan tegas sebagai pelaksana hukum. Hukum harus ditegakkan. Tidak boleh semata mempertimbangkan akibat politis dan pragmatisnya. Kalau orang-orang Islam garis keras demonstrasi dengan merusak dan membubarkan kafe-kafe, maka negara dengan aparatnya secara tegas menegakkan hukum dengan menangkap mereka, karena mereka jelas meresahkan. Yang harus ditegakkan oleh pemerintah, tentu saja, secara etis dan legal adalah hukum nasional (positif). Kita memakai hukum yang berkaitan dengan Islam hanya pada beberapa aspek perdata saja, terutama yang berkaitan dengan perkawinan dan sejenisnya. Sedangkan masalah kriminal dan pelanggaran-pelanggaran semacamya menjadi masalah polisi dan aparat penegak hukum lainnya.

Para penganut Islam garis keras sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan-tindakan yang brutal dan tindak kekerasan lainnya atas apa yang mereka anggap sesat dan haram. Hukum nasional, misalnya, mengharuskan setiap pengendara mobil dan motor mempunyai SIM. Kalau melanggar jelas akan dikenai hukuman. Tidak bisa hanya karena saya orang Islam, yang merupakan agama mayoritas, lantas merasa tidak memerlukan SIM dan merasa seenaknya melanggar ketentuan lalu-lintas yang sudah menjadi ketentuan hukum nasional. Jika beberapa kalangan Islam mempunyai anggapan seperti itu, sehingga mereka sesuka hatinya, tanpa mengindahkan aturan negara yang berlaku, memutuskan sendiri hukum atas sesuatu yang menurutnya haram dan sesat, maka itu jelas merupakan kesalahan yang fatal.

Apabila merujuk pada praktik dan konsep di beberapa negara yang menerapkan sistem pemerintahan liberal, maka negara harus berlaku "netral" atas hak dan kebebasan individu dengan dipandu rule of law *yang tegas. Pemihakan negara hanya berlaku bagi kalangan minoritas atau* disadvantage*, bukan terhadap mayoritas – dengan mekanisme "redistribusi" yang* fair *atau* affirmative action. *Jika melihat kenyataan Indonesia selama ini, di mana mayoritas berlaku sekehendak mereka, apakah ini memperlihatkan bahwa negara tidak menjunjung asas netralitas?*

Sebenarnya pangkal dari persoalan bangsa ini bukanlah karena negara tidak netral. Jika dikaji secara menyeluruh, hal itu lebih dikarenakan lemahnya pemahaman pemerintah sendiri tentang persoalan bangsa yang sangat kompleks. Tampaknya, pemerintah ingin menjaga perasaan atau bisa jadi ada semacam kekhawatiran kalau aturan pemerintah dijalankan secara tegas tanpa pandang bulu, akan ada protes dari mayoritas. Padahal kalau negara tegas, tidak akan ada protes semacam itu. Semua itu disebabkan oleh karena negara tidak tegas, dan dalam hal ini presiden sendiri juga tidak tegas. Tindakan anarkis dari sekelompok Islam garis keras merupakan tindak kriminal yang mestinya diproses secara hukum. Bagaimanapun hukum harus ditegakkan.

Kemudian, kaitannya dengan konteks perda syariah, bagi saya, itu jelas sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Implementasi perda melarang perempuan keluar malam, sebagaimana dipraktikkan di Tangerang, misalnya, hanya akan merugikan kaum perempuan yang beraktivitas pada malam hari, yang kemudian dengan sewenang-wenang ditangkap karena kesalahan aparat penegaknya, dengan alasan memberantas pelacuran di wilayah kekuasaannya.

Pemerintah justru tidak melakukan penelitian atau studi yang serius kenapa di daerahnya banyak pelacuran. Bukankah semua itu mencerminkan banyaknya warga, bukan hanya di Tangerang saja, yang tidak mempunyai pekerjaan dan kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik. Konteks semacam inilah yang menyebabkan banyak orang harus beraktivitas pada malam hari. Warga terpaksa bekerja keras tanpa mengenal waktu.

Seharusnya, yang dipikirkan pemerintah adalah mengatasi penyebab yang sebenarnya, bukan dengan membuat dan menerapkan perda syariah. Sebab itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Dalam beberapa studi yang saya lakukan, misalnya studi saya tentang syariat Islam di Aceh, kentara sekali betapa maraknya penegakan aturan tersebut lebih semacam bentuk kapitalisasi perda syariah. Kadang-kadang bupati atau gubernur sendiri sebenarnya sama sekali tidak mengerti alasan diterapkannya perda syariah. Yang terjadi lebih karena mereka mempunyai tujuan atau kepentingan politik tertentu untuk "berjualan" perda syariah. Misalnya, ada gubernur yang latar belakang pendidikannya adalah insinyur, sehingga ia sama sekali tidak mengerti, jangankan fikih, maaf saja, agama Islam pun ia tidak benar-benar mengerti. Artinya, mereka tidak memahami betul perda syariah, dan menjadikan perda-perda itu semata untuk tujuan politis. Atau istilah yang lebih tepat: politisasi syariah.

Pesan apa yang hendak Anda sampaikan untuk mengatasi segenap problem yang mengancam bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, termasuk hak-hak politiknya? Lantas bagaimana Anda melihat masa depan kemajemukan di Indonesia?

Pancasila, menurut saya, adalah jawaban final bagi negara ini. Pancasila tidak perlu diganti. Tentu saja, yang saya maksudkan bukan pada Pancasila yang diinterpretasikan oleh Orde Baru yang sangat hegemonik, dengan menjadikannya sebagai doktrin "asas tunggal". Saya justru mengacu terhadap Pancasila pada awal-awal dirumuskannya. Yakni pada pengertian yang dibuat bung Hatta. Karena Pancasila dalam rumusan bung Hatta, menurut hemat saya, tampaknya menjadi fundamen yang paling pas. Kita harus menyadari meskipun umat Islam adalah mayoritas, namun Islam di Indonesia pada sejarah awalnya juga minoritas. Islam datang ke tanah air pada abad ke-13 ketika Nusantara didominasi oleh agama Hindu dan Budha. Meskipun pada masa itu kedua agama tersebut dominan, tetapi kedatangan Islam tidak disikapi secara agresif, tidak seperti yang dilakukan umat Islam Indonesia belakangan ini terhadap umat yang beragama dan berkeyakinan berbeda. Lalu, kenapa kemudian Islam bisa sukses? Jawabnya, karena dakwah yang dikembangkan oleh para wali atau para penyebar agama Islam saat itu adalah dakwah Islam yang bersifat kultural, bukan Islam yang politik. Ini yang menjelaskan mengapa Sunan Kalijaga mengkombinasikan dakwah Islam dengan tradisi-tradisi lokal. Hal-hal seperti ini masih lestari hingga sekarang, sebagaimana tradisi Sekatenan di Yogyakarta yang berasal dari istilah *syahâdatayn*.

Artinya, penyebaran agama Islam tidak dengan cara dan tujuan politis, tetapi lebih menekankan proses dakwah yang berbentuk "indigenisasi", atau dalam bahasa Gus Dur "pribumisasi". Islam yang datang ke Indonesia ini tidak langsung datang dari Saudi Arabia, tetapi datang dari Gujarat. Sehingga sudah dengan sendirinya mengalami proses indigenisasi. Dengan pengertian lain, menyebar dan berkembangnya Islam secara lebih luas karena Is-

lam mampu berinteraksi dengan kebudayaan lokal. Untuk itulah, seharusnya Islam didorong untuk berinteraksi dengan kebajikan lokal (*local wisdom*), agama lokal, kepercayaan lokal dan sebagainya. Itulah proses islamisasi di bumi Nusantara yang tidak seperti dibayangkan oleh kelompok Islam radikal yang dengan pongahnya memaksakan proses islamisasi secara "murni", tidak melalui sentuhan-sentuhan kultural.

Misalnya yang terjadi di Kudus, lebih tepatnya dalam arsitektur menara Masjid Kudus, jelas terlihat adanya pengaruh Hindu. Contoh lainnya adalah ketika Sunan Kudus menyebarkan Islam pertama kali di wilayah Kudus. Ketika Hindu masih mendominasi masyarakat Kudus, Sunan Kudus mengeluarkan fatwa agar jangan menyembelih sapi, karena sapi merupakan binatang yang dianggap suci oleh orang Hindu. Sehingga sampai sekarang di Kudus tidak ada sate Sapi, yang ada sate kambing dan kerbau. Padahal dalam agama Islam sendiri tidak ada larangan untuk memakan atau menyembelih sapi, tetapi dibuatnya ketetapan itu lebih sebagai rasa empati dan strategi dakwah yang dikembangkan oleh para wali.

Mereka menyebarkan agama dengan cara, *pertama*, *bi al-hikmah*, dakwah yang bijaksana. Mereka memperkenalkan Islam dengan mengembangkan sikap yang bajik dan bijak dalam menarik simpati masyarakat setempat, tidak dengan gaya-gaya radikal seperti sekarang ini yang inginnya menang sendiri dan merasa paling benar. Strategi dakwah pada awal penyebaran Islam Nusantara secara santun dan beradaptasi dengan budaya-budaya lokal, sehingga Islam dipandang sebagai agama yang ramah. Bukan seperti sekarang di mana Islam dikenal sebagai agama yang garang dan penuh kemarahan.

Kedua, dalam Islam terdapat konsep *maw'izhah hasanah*. Yakni, penyebaran Islam dengan memberikan contoh dan keteladanan yang baik. Para wali memberikan contoh dan teladan yang baik dan lemah lembut. Cara ini sangatlah sukses sehingga penganut Islam di Nusantara terus mengalami perkembangan yang pesat. Islamisasi di Jawa yang menggunakan contoh ketauladanan dan tidak menggunakan cara-cara yang konfrontatif dan radikal, tercermin dari cara Sunan Kalijaga yang menggunakan media wayang dalam menyampaikan dan mendiseminasikan ajaran-ajaran Islam.

Ketiga, konsep Islam yang disebut *bi al-latî hiya ahsan*, yaitu dialog yang baik dan santun, sebagaimana yang dilakukan Sunan Gunung Jati yang berdialog dan berkomunikasi dengan para petani; Sunan Kudus berdialog dengan nelayan, dan sebagainya. Mereka betul-betul berdialog dengan baik dalam mendakwahkan Islam, tidak memaksakan kehendak. Pendekatan mereka tidaklah *syarî'a minded*. Cara-cara seperti itu adalah kunci sukses berdakwah.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Januari 2007

Percakapan dengan

Maman Imanul Haq Faqieh



Maman Imanul Haq Faqieh, Pengasuh Pondok Pesantren al-Mizan, Majalengka, Jawa Barat dan Anggota Dewan Syura DPP Partai Kebangkitan Bangsa.

Dengan mengedepankan nurani dan semangat demokrasi, kebebasan menafsir al-Quran bagi setiap orang diharapkan mampu menghadirkan agama tidak sebagai alat kepentingan kekuasaan (politik), tapi kekuatan moral untuk perubahan, transformasi sosial. Bagaimanapun moral agama membela setiap pihak yang terzalimi, meskipun mereka berbeda agama dan keyakinan. Karena itu dalam membebaskan masyarakatnya, Rasulullah terlebih dahulu memahami hak-hak individu mereka. Sehingga penting melalui gagasan *mushafaḥah* masyarakat bersama-sama mencari jalan keluar atas berbagai konflik dan persoalan kemanusiaan sebagai proses rekonsiliasi, dengan berlapang dada menerima setiap orang dengan keunikannya masing-masing. Bagaimanapun pluralisme, sebagai kesadaran bernegara di negeri ini, merupakan hal yang wajib.

Bagaimana Anda memandang sekularisme yang sering disalahpahami masyarakat Indonesia? Bagaimana pula seharusnya memposisikan relasi agama dan negara?

Menurut saya, sekularisme adalah upaya menempatkan agama pada proporsinya, yaitu sebagai kekuatan nilai dan moral. Pada konteks itu, agama memiliki keunikan sendiri. Ketika agama ditempatkan pada tatanan nilai publik, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau dalam sebuah negara terdapat banyak agama? Maka, mau tidak mau, harus ada pemisahan antara agama dan negara. Dan itu dapat dibingkai dalam bentuk nasionalisme. Dulu Nahdlatul Ulama (NU) merumuskannya sebagai *kalimah sawâ'* atau titik temu antara agama-agama. Nilai-nilai tersebut dapat diambil dari nilai-nilai agama yang ada di Indonesia. Lalu negara menjadi sebuah wadah untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa membeda-bedakan agamanya. Saya kira, pada konteks itu, sekularisme menjadi sebuah nilai yang harus diperjuangkan. Bagi saya, sekularisme memperjelas kembali posisi agama dan negara.

Banyak orang memahami sekularisme dari definisi klasiknya, yakni privatisasi agama, sebuah upaya melenyapkan peran dan fungsi agama di ranah publik. Dalam konteks Indonesia kini menurut Anda bagaiamana seharusnya memaknai privatisasi dalam sekularisme?

Menurut saya, pemahaman bahwa sekularisme sama dengan peminggiran agama merupakan pemahaman yang salah. Sebab, sekularisme justru muncul ketika agama terlalu mendominasi negara dan menghegemoni pikiran-pikiran yang berbeda. Sekularisme berusaha menempatkan negara dan agama pada proporsi yang sebenarnya. Jadi, jangan dibalikkan. Untuk konteks Indonesia sekularisme

menjadi sangat penting, karena meskipun kita tetap menggunakan agama sebagai sebuah nilai dan pijakan, kita juga harus menghindari pelembagaan agama. Agama jangan sampai menjadi alat kepentingan kekuasaan. Kita harus menempatkan agama lebih luhur, yakni sebagai kekuatan moral untuk mencapai perubahan.

Kalau ada orang yang menganggap sekularisme meminggirkan agama, menurut saya itu pandangan *ahistoris*. Dia tidak mengerti sejarah dan bagaimana seharusnya menempatkan agama. Pada konteks tertentu, saya melihat orang-orang yang kini menjadi "pemilik-pemilik agama" dan pemangku (wakil) Tuhan sungguh tidak cerdas. Celakanya, sikap atau perilaku semacam itu lebih dikarenkan tidak mendapatkan "lahan" dalam negara atau pemerintah yang tengah berkuasa, sehingga seringkali menjual Tuhan dan agama. Padahal, kita meyakini agama sebagai sistem yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, dengan cara mengikuti Nabi dan mengelola keyakinan-keyakinan tersebut untuk kemaslahatan umum. Karena itu, jangan melihat agamanya, tapi lihatlah apa yang dilakukannya untuk kemanusiaan. Itu yang lebih penting.

Untuk konteks Indonesia sekularisme menjadi sangat penting, karena meskipun kita tetap menggunakan agama sebagai sebuah nilai dan pijakan, kita juga harus menghindari pelembagaan agama. Agama jangan sampai menjadi alat kepentingan kekuasaan. Kita harus menempatkan agama lebih luhur, yakni sebagai kekuatan moral untuk mencapai perubahan.

Pada titik itu, bagaimana menempatkan gagasan Islam yang memihak pada semangat kemanusiaan dan keadilan (emansipatoris)?

Saya ingin menegaskan bahwa *pertama,* kita tidak mungkin melepaskan agama. Agama tetap akan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan kita, selama kita bisa mengeksplorasi nilai-nilai luhur dan universal dari agama untuk kepentingan umum (*al-mashlaḥah al-'âmmah*). *Kedua,* setelah meyakini agama sebagai nilai-nilai luhur, kita akan memperjuangkan *maqâshid al-syarî'ah*-nya: untuk apa tujuan dari keberagamaan kita. Kalau mengacu kepada al-Syathibi, maka tujuan keberagamaan adalah bagaimana menjamin kebebasan berekspresi, kebebasan berkeyakinan, kebebasan ekonomi (hak milik), dan kebebasan untuk menjaga kelestarian keturunan yang baik (reproduksi). Dengan begitu, sampai hari ini saya tetap yakin bahwa agama akan tetap menarik dan penting untuk menjadi sebuah kekuatan perubahan. Tetapi, jangan sampai ia dijadikan alat kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kalau agama digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu maka agama akan menjadi candu. Ia menjadi belenggu bagi berkembangnya suatu masyarakat yang toleran.

Saya tidak setuju jika kita harus kembali ke zaman Nabi. Bagi saya, zaman Nabi merupakan zaman di mana masyarakat masih terbelakang. Dan Nabi melakukan reformasi menyeluruh untuk mengubah keadaan tersebut: *li-yukhrij al-nâsa min al-zhulumât ilâ al-nûr*, mengeluarkan manusia dari kegelapan (keterbelakangan) menuju kemajuan.

Setelah Nabi meninggal, sebenarnya jejak-jejak keterbelakangan itu masih tampak. Terbukti dengan munculnya beberapa fraksi politik yang melahirkan konflik dan kekerasan. Terbununya Umar, Usman, Ali dan Sahabat-sahabat lain menjadi bukti akan kebenaran hal tersebut. Yang lebih penting dari zaman Nabi, bagi saya, adalah spiritnya, yaitu strategi perubahan masyarakat, bukan kondisi

masyarakatnya. Kita juga bisa mempertanyakan, sejauh mana kualitas para Sahabat? Nabi menjelaskan, Sahabat itu seperti bintang. Karena itu, tak heran jika terkadang ada yang redup dan ada yang bersinar. Kita boleh memilih Sahabat mana yang menurut kita baik. Saya sendiri lebih kagum kepada Ali bin Abi Thalib. Mungkin ada orang yang lebih kagum pada Umar, Usman dan lainnya. Dan itu adalah hak dan pilihan masing-masing.

Dari sebuah Hadits Nabi tadi, (*ashẖâbî ka al-nujûm*, Sahabatku seperti bintang), kita dapat belajar bagaimana keberagaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita menjadi tahu bahwa karakter Sahabat berbeda-beda. Terserah kita mau mengikuti yang mana. Ironisnya, ada juga orang mengikuti keteladanan para nabi, kemudian yang dipilih Nabi Musa tetapi tanpa Nabi Harun. Padahal, sudah jelas Musa harus dibantu Harun dari segi diplomasi. Sekarang banyak pengikut-pengikut Musa berjuang "demi agama" dengan jalan yang kelewat "keras" (bukan tegas) tetapi tanpa strategi, tanpa diplomasi. Pada konteks tertentu, ada orang yang ingin mengikuti Umar tapi tanpa ijtihad. Sehingga yang tampak hanya kerasnya saja. Padahal Umar adalah Sahabat Nabi yang terkenal dengan ijtihadnya. Bahkan, dalam berijtihad, pada batas tertentu, Umar sampai bisa "berbeda" dengan Nabi dan ketentuan Tuhan. Sayang, yang kini diikuti dari Umar kebanyakan hanyalah sisi kekerasannya. Di atas semua itu, kita sebenarnya telah lupa dan tidak pernah mau belajar dari kondisi yang dihadapi Nabi Musa dan Umar.

> Saya tidak setuju dengan istilah kafir untuk menyebut mereka yang non-Muslim. Sebab, kafir bagi saya bukan orang yang beda agama dengan Islam, tapi orang yang zalim dan korup, walaupun dia Muslim.

Beberapa kalangan menganggap Piagam Madinah sebagai bentuk awal dari negara Islam. Bagaimana Anda memposisikannya?

Saya setuju bahwa Piagam Madinah adalah sebuah produk maju pada zamannya. Di situ Rasulullah mengakomodir semua kelompok berbeda sebagai satu kesatuan. Ada Islam, Yahudi, Kristen dan sebagainya. Dalam konteks itu, Piagam Madinah terlihat begitu menarik. Namun, tentu belum cukup untuk menganggapnya sebagai tipe ideal masyarakat madani. Meski demikian, Piagam Madinah jelas merupakan percontohan awal atau *starting point* Nabi bagi kehidupan bermasyarakat, dan kita harus melanjutkan perjuangannya.

Piagam Madinah tampak telah memunculkan penempatan wilayah privat dan publik dengan cukup baik. Piagam Madinah sendiri lebih merupakan aturan publik yang sama sekali tidak berbasis pada landasan teologis keagamaan.

Menurut saya yang terpenting untuk kita ambil dari Piagam Madinah adalah spiritnya, bukan mencontoh bulat-bulat semua yang kita anggap ideal darinya. Idealitas Piagam Madinah justru terletak pada nilai dan semangatnya. Namun demikian, kita tidak bisa menerapkan cara Nabi membentuk negara Madinah ke dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia masa kini. Nabi selalu mengatakan *innamâ bu'istu li-utammima makârim al-akhlâq*, aku diutus bukan untuk menghancurkan, atau melenyapkan, tetapi untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan kearifan-kearifan yang telah mengakar di masyarakat. Jadi, *uswah* dan *qudwah* Nabi bisa kita terapkan di Indonesia, tanpa harus menghancurkan tradisi-tradisi lokal yang sudah berkembang.

Sayang nilai-nilai Piagam Madinah yang kerap dimunculkan di Indonesia malah bentuk simbolik dari hukum agama, seperti yang tampak pada tuntutan formalisasi syariat Islam. Lebih dari itu, praktiknya justru cenderung memaksa dan mendiskriminasi kaum minoritas. Bagaimana menurut Anda?

Saya lihat ada persoalan dengan cara beragama kita, orang Islam di Indonesia. Kita seperti orang yang merasa tertindas, rendah diri, dan tidak mempunyai kemampuan untuk berkompetisi secara sehat dengan kekuatan lain. Lalu, kita selalu menjustifikasinya dengan *the great tradition.* Tradisi Islam, pada masa Nabi, seolah menjadi sesuatu yang sempurna dan harus diimplementasikan di masa kini. Inilah yang disebut *tadayyun 'alâ al-khathr, lâ tadayyun 'alâ al-ma'nâ*. Model beragama yang kerap ditampilkan hanyalah aspek simbolik dari agama, simbol Nabi, simbol Piagam Madinah, simbol jubah, sorban, janggut dan sebagainya. Kita kerap mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling bagus, karena itu, non-Islam harus masuk Islam. Cara beragama seperti itu tak ubahnya dengan memperdagangkan agama, sementara tidak mengambil spiritnya.

Munculnya perda syariah, menurut saya, merupakan *pertama*, bentuk ketidakpercayaan kita terhadap kemampuan diri sendiri. *Kedua,* bentuk ketidakcerdasan kita untuk menggali atau melakukan diagnosa terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. *Ketiga,* kita memang selalu punya keinginan untuk mempolitisasi agama, padahal agama adalah milik Tuhan.

Munculnya formalisasi atau perda syariah di Indonesia menunjukkan ketidakmampuan kita mencari formulasi yang "cerdas" untuk menyelesaikan beragam persoalan yang ada. Memunculkan perda

syariah sama saja dengan orang yang berdoa karena stres berat. Padahal, itu merupakan kesalahan fatal. Bangsa kita memerlukan solusi lewat kejernihan pikiran atas segala penyakit yang menimpa. Sekarang begitu banyak orang hanya menawarkan obat tapi tidak pernah dengan serius menelisik jenis penyakit apa yang diderita bangsa ini. Marak munculnya perda syariah, menurut saya, merupakan *pertama*, bentuk ketidakpercayaan kita terhadap kemampuan diri sendiri. *Kedua,* bentuk ketidakcerdasan kita untuk menggali atau melakukan diagnosa terhadap persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. *Ketiga,* kita memang selalu punya keinginan untuk mempolitisasi agama, padahal agama adalah milik Tuhan.

Bagaimana dengan khilâfah islâmiyah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan teman-temannya?

Sebenarnya saya termasuk orang yang kagum dengan teman-teman Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka turut mencerdaskan masyarakat melalui berbagai seminar dan kajian. Tapi saya sangat kecewa dengan mereka, karena cara mereka mengajak masyarakat berupa indoktrinasi. Mereka ingin mendesain masyarakat agar mengikuti ide yang diusungnya dengan cara memaksakan kehendak dan indoktrinasi. Memang, masyarakat diajarkan "melek" politik. Tapi mereka mengarahkannya hanya kepada *khilâfah*. Problem apapun di negeri ini seolah akan selesai dengan mengimplementasikan *khilâfah islâmiyah*. Saya kira model dakwah mereka ini harus diperbaiki. Karena masyarakat tidak semuanya bodoh, maka biarkan masyarakat kita tetap cerdas dengan memilih sendiri apa yang mereka inginkan. Tuhan saja memberi kebebasan dalam berpikir dan menentukan pilihan-pilihan terbaik demi kehidupan yang

dikehendaki kita sebagai manusia. Lihat al-Quran, Tuhan hanya memberikan nilai-nilai universal, kemudian masyarakat sendiri hendaknya mampu berpikir dan mengolahnya untuk kepentingan kehidupan dan kemanusiaan. Tuhan sangat demokratis, mengapa kita tidak bisa?

Perkembangan wacana sekularisme belakangan tidak lagi menafikan peran agama di ranah publik. Problemnya, agama, khususnya agama semitik, cenderung bersifat eksesif dan ekspansif, sehingga yang tampak di publik adalah wajah agama yang tidak toleran. Menurut Anda bagaimana seharusnya memposisikan agama di wilayah publik?

Bagi saya, agama harus tetap menjadi sesuatu yang penting dalam sebuah perubahan. Tetapi saya tidak setuju jika agama dijadikan alat kekuatan politik dalam bentuk formalisasi syariat Islam. Saya tidak setuju karena formalisasi hanya akan menyempitkan dan merendahkan agama. Mestinya, agama menjadi sebuah nilai pendorong dari dalam, selaras dengan teori *al-'aqîdah*. Seorang Muslim harus meyakini akidah dari dalam hatinya. Misalnya seorang muslim belajar bahwa Tuhan adalah satu. Itu harus betul-betul diyakini dari dalam hati. Karena yang satu hanya *al-Khâliq* (Allah), sementara makhluk itu banyak, beragam dan karenanya harus bersatu. Bagi saya, akidah adalah akar atau fondasi bertindak dan bergerak umat beragama (Islam).

Tetapi akibat pemahaman akidah yang tidak lurus – terutama pandangan banyak kalangan konservatif yang partikular dari teks-teks keagamaan – kini dipakai untuk menyerang orang lain. Padahal, kalau akidah dimaknai sebagai akar, maka tidak mungkin akar tiba-tiba menyerang orang lain, karena akar tempatnya di bawah.

Dalam konteks itu, menurut saya, telah terdapat kesalahpahaman dalam memaknai agama. Kalau kita berakidah dengan kuat, maka keberadaan batang yang kokoh dan menjulang justru akan menjadi pelengkap sistem yang memperkuat. Lalu, muncul dahan yang rindang tempat berteduh semua makhluk. Begitu pula buahnya bisa dimakan oleh siapapun. Saya tidak setuju dengan istilah kafir untuk menyebut mereka yang non-Muslim. Sebab, kafir bagi saya bukan orang yang memiliki agama berbeda dengan Islam, tapi orang yang zalim dan korup, walaupun dia Muslim.

Pada konteks ini, kita harus meyakini agama masing-masing. Jangan sampai kehilangan identitas. Karena menurut saya pluralisme sama sekali berbeda dengan relativisme. Pluralisme adalah memahami diri sendiri sebagai orang yang beragama dan menerima orang lain (*the other*) yang berbeda untuk melakukan kerja-kerja sosial berdasar keyakinannya. Yang saya tidak suka, misalnya, ada orang yang memahami pluralisme dalam arti semua agama sama. Padahal jelas berbeda. Setiap agama unik dan berhak untuk mendakwahkan ajarannya. Tetapi dakwah dalam konteks ini hanyalah dakwah yang bersifat sosialisasi semata, layaknya kampanye. Kita boleh mengatakan, "ini *lho* Islam yang peduli lingkungan." Namun kita tidak boleh menjelek-jelekkan agama lain. Sebab, dalam hukum dagang pun kita diperbolehkan untuk mengatakan bahwa produk kita paling bagus, tapi tidak boleh mencela produk orang lain.

Maka dalam beragama kita boleh yakin bahwa Islam adalah yang paling bagus, namun demikian tidak boleh menyerang Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan komunitas lainnya. Biarkan mereka hidup dan berkembang, selama tidak mengganggu dan tidak melanggar aturan negara. Untuk mengaturnya kita perlu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Tapi persoalannya, mengapa Ahmadiyah bisa diusir dan rumah serta tempat ibadahnya dibakar oleh orang atau komunitas yang tindakannya mengatasnamakan fatwa atau keputusan MUI dan Pemerintah Daerah? Saya kira orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang tidak mengerti Indonesia. Kalau MUI sadar dengan keindonesiaanya (MUI: Majlis Ulama "Indonesia") maka ia harus menerima keragaman. Kalau dia tidak bisa menerima keragaman maka tidak usah ada di Indonesia. Apa alasannya MUI Indramayu mengatur keyakinan Komunitas Dayak Losarang? Itu pun tidak ada atau sama sekali bukan urusan MUI. Sebab, kalau peran MUI ingin lebih bermanfaat buat kehidupan umat Islam dan seluruh warga negara, mengapa MUI tidak mengurus para TKW yang dizalimi; mengecam, dengan fatwanya, para pelaku korupsi, penjahat pembalakan liar atau perusahaan-perusahaan pembuang limbah pencemar lingkungan yang sangat merugikan kehidupan bersama.

Liberalisme bukan kebebasan tanpa batas, tapi sebuah upaya menghargai hak-hak individu. Setiap individu mempunyai hak-hak dasar seperti hak hidup, hak berekspresi, hak beragama, dan sebagainya. Jika liberalisme dipahami sebagai penghargaan terhadap hak-hak dasar itu, maka seharusnya agama menjadi *elan vital* perubahan. Ini selaras dengan beberapa ayat yang menyebutkan Rasulullah diutus untuk meringankan beban-beban manusia.

Bagaimana pandangan Anda tentang liberalisme, yang sering dipahami oleh banyak orang sebagai pandangan kebebasan tanpa batas dan karenanya harus ditolak?

Liberalisme bukan kebebasan tanpa batas, tapi sebuah upaya menghargai hak-hak individu. Setiap individu mempunyai hak-hak dasar seperti hak hidup, hak berekspresi, hak beragama, dan sebagainya. Jika liberalisme dipahami sebagai penghargaan terhadap hak-hak dasar itu, maka seharusnya agama menjadi *elan vital* perubahan. Ini selaras dengan beberapa ayat yang menyebutkan Rasulullah diutus untuk meringankan beban-beban manusia. Ketika Nabi Muhammad ber-*khalwat* di Gua Hira yang terletak di Jabal Nur, beliau bisa ber-*takhannuts* dengan khusyu', tetapi matanya bisa terus menatap Mekah sambil berpikir untuk melakukan perubahan. Dia berpikir bagaimana cara menghadapi kelompok pembesar yang memegang kendali ekonomi, adat, suku dan sebagainya. Dia terus bekonsultasi dengan Allah.

Artinya, sebenarnya semangat dasar liberalisme sudah terdapat pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, sebagai orang yang beragama, bisa membebaskan masyarakatnya, dimulai dari upayanya untuk memahami orang lain. Beliau memahami hak-hak individu mereka. Karena itu, ketika Muhammad diutus menjadi Nabi, dia tidak langsung menghancurkan umat yang ada di sekitarnya. Dia membicarakan terlebih dahulu dengan baik-baik. Dia mengetuk pintu Umar saja sampai 100 kali. Semua yang dialami dan dibawakan oleh Nabi bukan sesuatu yang tiba-tiba dan sekali jadi. Wahyu sendiri melakukan dialektika dengan masyarakat yang ada.

Pada konteks itu, liberalisme justru sangat relevan dengan tujuan keberagamaan kita. Bagaimana ia memberi ruang kepada semua orang untuk dapat mengekspresikan dirinya sendiri. Nabi menyebut *nafsah*, karena itu individu-individu harus memahami dirinya. Sebab, bagi manusia, mempunyai kesadaran diri itu penting. Setelah mengenal diri sendiri, baru dia mengenal Tuhan. Sayangnya,

yang terjadi sekarang tidak begitu. Sebaliknya, kebanyakan orang mencoba terlebih dahulu mengenal Tuhan, baru kemudian diri. Padahal Hadits Nabi justru mengatakan *man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu*. Itu perkataan Nabi Muhammad yang diambil dari Hermes, gurunya Plato. Konon Hermes adalah Nabi Idris. Hermes mengatakan, "jika kamu mengenali dirimu, kamu sadari dulu, bahwa kamu mempunyai hak-hak dasar, kamu boleh hidup, kamu diberi hak untuk mengakses informasi, baru kemudian kamu akan mengenal Tuhanmu."

Jadi, yang terjadi sekarang, kebanyakan pendakwah pun mengajak orang untuk terlebih dahulu mengenal Tuhan, sementara pengenalan terhadap diri, belum apa-apa sudah dipasung. Maka pelarangan Islam terhadap berhala, sebenarnya bukan bermaksud untuk melarang patung atau seni rupa. Yang terlarang dari pelarangan Islam itu adalah praktik pemberhalaannya. Saya telah menulis buku tentang hal itu. Pemberhalaan itulah yang justru sekarang muncul kembali. Kalau dulu berhala diberi nama *lattâ, 'uzzâ* dan *manât,* maka sekarang berhala itu bisa bernama kekuasaan, kekayaan, jabatan, maupun pejabatnya sendiri, para ulama, kiai atau habib. Semuanya bisa menjadi berhala.

KH. Ma'ruf Amin pernah mengatakan bahwa ketika beragama maka orang menjadi tidak bebas, karena harus tunduk pada hal-hal yang sudah menjadi ketentuan Tuhan. Bagaimana pendapat Anda terhadap pandangan seperti itu, sementara Anda melihat bahwa agama justru mempunyai spirit pembebasan, keadilan, dan kesetaraan?

Sebenarnya istilah agama sendiri dalam bahasa Arab masih *debatable*. Cara beragama kita selama ini problematis, karena seo-

lah-olah kita berhutang kepada Tuhan. Kita merasa berhutang karena diciptakan oleh Tuhan. Justru kita harus belajar dari Tuhan, bagaimana Ia menghargai betul peran kemanusiaan kita dengan menjadikan kita sebagai makhluk yang berpikir, punya rasa, dan boleh berbeda pendapat dengan-Nya. Kita diperbolehkan untuk beriman ataupun tidak beriman. Semua diserahkan kepada pilihan kemanusiaan kita.

Tetapi ketika beriman, pada saat itu jugalah kita tidak bebas. Ayat Lakum dînukum waliya dîn dipahami Ma'ruf Amin sebagai ayat yang membicarakan kondisi kita sebelum beragama. Pada saat itu, kita bebas memilih. Namun setelah beragama, kita harus patuh pada aturan-aturannya. Bagaimana menurut Anda?

Benar, pasti ada nilai-nilai yang harus ditaati ketika kita beragama. Sebagai orang Muslim, saya wajib salat, haji, zakat, dan sebagainya. Karena itu merupakan konsekuensi logis setelah saya bersyahadat. Sebagaimana ketika saya masuk sekolah, maka saya harus mengikuti aturan yang ada dalam sekolah, seperti memakai seragam, datang tepat waktu, dan sebagainya. Tapi bagaiamana cara saya salat, itu tidak diatur secara detil oleh agama (Kitab Suci). Ia tidak mengatur bagaimana berpakaian ketika salat. Tuhan hanya mengatakan bahwa salat itu wajib. Demikianpun tidak ada siapa yang mengatur kapan waktu dan di mana tempatnya, apakah semua itu harus sama. Belum lagi mazhab yang berbeda dan sebagainya. Saya setuju dengan Ma'ruf Amin pada konteks itu. Karena kita telah masuk ke sebuah sistem yang bernama Islam, maka kita wajib salat dan sebagainya. Tapi, kalau soal-soal lain saya berbeda dengan Ma'ruf Amin. Bagi saya, kalau seseorang sudah salat, maka

dia termasuk *ikhwânukum fî al-dîn*, saudara seagama. Maka, tidak ada alasan bagi kita menyuruh pengikut Ahmadiyah untuk bertaubat. *Wong* dia salatnya sama dengan kita.

Bagaimana Anda menanggapi 10 (sepuluh) kriteria sesat yang dikeluarkan oleh MUI?

Menurut saya kriteria tersebut sangat tidak relevan. MUI seperti tidak ada pekerjaan saja. Kalau dia mau bekerja, lebih baik mengkritisi orang yang buang sampah sembarangan atau pejabat yang korupsi. Menurut saya MUI bisa dipertahankan bila menjadi forum silaturahmi dalam mengeksplorasi persoalan umat kemudian mencarikan solusinya yang cerdas, humanis, dan adil. MUI harus berhenti membuat fatwa-fatwa sesat. Karena sesat dalam konteks negara hanya digunakan untuk sesuatu yang jelas-jelas melanggar undang-undang. Dengan fatwa sesat tersebut, MUI sebenarnya telah merusak hubungan antar-warga negara. Sehingga yang harus dianggap sesat adalah orang yang *ngemplang* pajak, menebar kebencian, anarkisme atau yang melakukan gerakan separatisme. Ahmadiyah yang salatnya tetap menghadap kiblat, berpuasa, memperjuangkan pendidikan dan sebagainya, lantas kenapa kita bilang mereka sesat?

> Justru kita harus belajar dari Tuhan, bagaimana Ia menghargai betul peran kemanusiaan kita dengan menjadikan kita sebagai makhluk yang berpikir, punya rasa, dan boleh berbeda pendapat dengan-Nya. Kita diperbolehkan untuk beriman ataupun tidak beriman. Semua diserahkan kepada pilihan kemanusiaan kita.

Anda menyebut MUI tidak pernah mengurusi masalah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti keadilan, kebersihan, korupsi, dan sebagainya. Hal yang sama juga terjadi pada kanun-kanun syariah, yang tidak mengatur hal-hal yang sekarang menjadi masalah konkret seperti kemiskinan, korupsi dan sebagainya. Ini sungguh dilematis.

Saya ingin kembali mengajak orang untuk memahami Islam sebagai sistem yang menarik. Islam, kata Nabi, berdiri di atas tiga pilar: *Îmân*, *Islâm*, dan *Ihsân*. Iman melahirkan akidah yang merupakan persoalan individu. Kalau keyakinan atau keimanan seseorang kuat (*al-'aqîdah al-jazîmah*) maka tidak akan ada korupsi. Dan itu harus ditanamkan baik-baik oleh kita secara individu. Ini menjadi fondasi yang kuat bagi kaum beragama. Kalau imannya sudah kuat, maka keberislaman kita yang disimbolkan dengan syariah (*al-fiqh*), seperti salat yang kita lakukan, semestinya bukan diniatkan untuk mencari pujian, melainkan karena dorongan iman. Ketika kita mengimani hari akhir, maka kita meyakini bahwa yang kita lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Dengan itu, kita akan memperbaiki kinerja, penegakan hukum dan sebagainya. Keberislaman kita menjadi tidak hanya ritual tetapi sosial.

Selanjutnya dari pilar terakhir, ihsan, akan muncul satu keyakinan bahwa salat yang baik adalah salat yang melahirkan dampak sosial. *Mushallîn* adalah seseorang yang tidak menelantarkan anak yatim *(yadu'u al-yatîm).* Salatnya orang yang beriman belum memiliki efek sosial kalau masih menelantarkan anak yatim. Tapi, yatim pun memiliki beberapa definisi. Dalam salah satu *maqâlah*-nya, al-Syafii mendefinisikan yatim bukan orang yang tidak me-

miliki ayah, tapi orang yang tidak punya ilmu dan moral. Artinya, seorang yang sudah *istiqâmah* melakukan salat harus juga serius memperjuangkan pendidikan bagi semua kalangan.

Dari tiga teori *ushûluddîn* itu muncullah Islam fraksional. Misalnya, perdebatan dalam ilmu kalam atau tauhid yang begitu banyak memunculkan aliran seperti Mu'tazilah, Jabariah, Qadariyah, Sunni dan lain sebagainya. *Ihsân* melahirkan tasawuf, *akhlâq* melahirkan filsafat akhlak, fikih melahirkan banyak mazhab. Kini sebenarnya masih terjadi pertarungan dalam tubuh Sunni: antara Wahhabisme dari Hambali dengan Syafii yang moderat, dengan perdebatan yang demikian kompleks. Lantas kalau MUI membicarakan Islam, sebenarnya Islam mana yang dibicarakan. Meski demikian, Tuhan tidak pernah berubah, tetap satu.

> Paham liberalisme sudah ada pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah, sebagai orang yang beragama, bisa membebaskan masyarakatnya, dimulai dari upayanya untuk memahami orang lain. Beliau memahami hak-hak individu mereka.

Meski perdebatan dalam tradisi Islam begitu kompleks dan melahirkan banyak aliran, sebagian besar masyarakat Islam sebenarnya tidak mampu mengakses hal atau kondisi itu. Mereka hanya tahu dari aspek fikih. Sebab, buku-buku fikih cenderung murah sehingga mudah diakses. Lalu, fikih dianggap sebagai satu-satunya acuan. Maka wajar jika pandangan keagamaan mereka menjadi sempit. Mereka jarang membaca tafsir, ilmu kalam, apalagi *târîkh* (sejarah). Kalau kita membaca tafsir maka akan diketahui betapa banyak titik temu antara Islam dengan agama lain. Tafsir tentang pengorbanan, misalnya, ternyata dalam Kristen pun ada.

Di Indonesia banyak orang yang tidak suka dengan perkembangan tafsir yang menggunakan metode hermeneutika. Menurut Anda sampai batas mana kebebasan tafsir dimungkinkan?

Al-Quran adalah teks terbuka yang bisa dibaca semua kalangan. Al-Quran akan memberi pencerahan dan hidayah terhadap semua pembacanya. Maka, semua orang bisa "menafsirkan" al-Quran baik dengan menggunakan alat ataupun tidak. Alat atau metodenya bisa berbeda, termasuk menggunakan metode hermeneutika sekalipun. Semuanya tidak menjadi masalah selama penafsiran itu dilandasi semangat menggali isi al-Quran, berangkat dari nurani, serta bisa membawa perubahan, termasuk perubahan pada dirinya sendiri. Penafsiran bisa berbahaya bila dilandasi nafsu dan pikiran kotor, serta melakukan ketidakadilan dengan mencari penafsiran untuk kepentingan sendiri seraya menghakimi pendapat atau penafsiran orang lain. Sebab, pada akhirnya publiklah yang akan menilai hasil penafsirannya. Kalau tafsirnya tidak cocok dengan prinsip kemashlahatan, keadilan dan kesetaraan, apalagi mencederai kemanusian, maka sang penafsir (ulama atau siapapun) akan ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat kita akan sangat membenci tokoh agama yang tidak konsisten. Contohnya, belakangan masyarakat cenderung meninggalkan kiai yang tidak konsisten dengan penafsiran teks-teks keagamaan, yang cenderung mengeksploitasi agama hanya untuk "kepentingan sesaat". Fenomena kemenangan SBY pada Pemilu 2004 lalu menjadi cermin bahwa pertarungan politik menjadi ajang balas dendam publik, masyarakat awam, terhadap para kiai.

Dalam konteks tafsir, kita bisa membandingkan antara Cak Nur dan Gus Dur. Cak Nur adalah orang yang sangat tertib dalam mengutip surat, ayat, dan tafsir mana yang dirujuk dalam me-

nafsirkan al-Quran. Sementara Gus Dur cenderung "ngawur" dan seenaknya. Tapi, ternyata yang lebih diterima masyarakat adalah tafsir Gus Dur. Karena ada semangat perubahan yang dibawanya. Gus Dur tidak terlalu banyak mengutip ayat dan tafsir, yang terpenting adalah kontekstualitas pemikiran.

Oleh karena itu, menurut saya, biarkan orang awam menafsirkan al-Quran. Ajarkan kepada mereka cara menafsirkan al-Quran. Sehingga mereka mengetahui apa yang ingin dikatakan Tuhan dalam al-Quran. Dalam menafsirkan bisa saja, misalnya, saya tidak peduli siapakah Musa, karena saya tidak mengerti sejarah. Tetapi di mata saya, Musa itu saya sendiri. Sosok yang tidak mampu menghadapi Firaun. Kemudian saya memakai jalur diplomasinya Harun. Begitupun ketika saya membaca Abu Lahab, tidak perlu tahu Abu Lahab itu siapa. Bisa saja yang diperlukan adalah pengertian bahwa Abu Lahab adalah orang yang membiarkan istrinya ketika melakukan gosip, dan sebagainya. Model penafsiran semacam itu justru sangat menarik bagi saya. Karena itulah, tugas ulama bukan membatasi apalagi memarahi orang yang menafsirkan al-Quran secara berbeda. Dan kalau ada penafsiran yang "melenceng", ulama cukup memberikan peringatan.

> Konsep *mushâfaḥah* adalah bagaimana kita berlapang dada dan menerima orang dengan keunikannya masing-masing. Selain itu, *mushâfaḥah* juga berarti berjabat tangan, artinya, berpegang erat untuk bersama-sama memikul persoalan kemanusiaan dan merumuskan solusinya.

Teman-teman seperti Ulil Abshar Abdalla dan lain-lain, dalam banyak hal, membawa semangat yang berbeda. Mereka ingin mencari spirit yang baru, mendobrak sesuatu yang baku. Soal

apakah dia salah atau lainnya, yang lebih arif adalah bagaimana ulama membuat wacana baru untuk meng-*counter*-nya. Siapapun berhak memilih wacana mana yang terbaik dan mana yang tidak. Sebagaimana para penjual ikan bandeng yang berjajar, mereka tidak perlu bersaing dengan cara menyingkirkan, karena semuanya berhak menawarkan ikan jualannya kepada pembeli. Artinya, masyarakat akan memilih mana yang bagus dan murah dan mana yang sebaliknya.

Bisa jadi hal tersebut menimbulkan masalah baru. Sebab jika penilaian baik-buruk dan benar-salahnya tafsir diserahkan kepada publik, sementara publik memiliki aneka ragam latar belakang, lantas bagaimana jika publik ternyata telah terkontaminasi oleh pemahaman Islam yang fundamentalis yang membenarkan kekerasan terhadap mereka yang berbeda?

Betul, kekhawatiran seperti itu memang wajar muncul. Oleh karena itu, yang bisa dikedepankan untuk mengantisipasi maraknya wacana fundamentalistik di masyarakat adalah dengan selalu memunculkan *counter* wacana. Bagaimana caranya agar kelompok beragam di masyarakat itu memproduksi wacana yang juga beragam, sebanyak-banyaknya, dan dilakuakan dengan semangat saling menghargai, menghormati, tanpa pemaksaan dan kekerasan. Kalau masyarakat kita diam saja, atau lebih parah lagi menerima bulat-bulat dan mengikuti penafsiran seorang tokoh, berarti kita telah gagal mencerdaskan umat. Kita gagal membawa misi agama sebagai pencerahan. Kita masih membuat masyarakat tidak berdaya dengan agama.

Mungkin harus ada kriteria lain agar kebebasan menafsir tetap terjaga, namun tidak bebas begitu saja tanpa batasan. Artinya, tidak semua keabsahan penafsiran diserahkan kepada publik.

Ya, saya setuju bahwa masyarakat diberi keleluasaan memilih model penafsiran agama. Namun ketika menafsirkan al-Quran tetap ada kriteria yang secara tidak langsung membatasi penafsiran yang sembarangan. Yang ditawarkan ke masyarakat bukanlah item per-tafsirnya, tetapi lebih pada bagaimana mereka diberikan perangkat metodologinya. Masyarakat tahu bahwa menafsirkan al-Quran seharusnya begini dan begitu. Dan dengan itu, biarkan mereka senang berbicara dengan al-Quran dan mengetahui isinya tanpa melalui orang lain. Sehingga diharapkan mereka menjadi dewasa dengan menghargai perbedaan tafsir; tidak dengan cara-cara pemaksaan dan kekerasan dalam menyikapi perbedaan tersebut.

> Kita harus mendesak pemerintah agar menjadikan pluralisme sebagai sebuah sistem, membuat regulasi pluralisme yang jelas dan menjadikannya sebagai kesadaran bernegara. Anda boleh Muslim, boleh Katolik dan lain sebagaianya, tapi pluralisme dan bersikap pluralis adalah hal yang wajib di negeri ini.

Dalam konteks itu, bagaimana seharusnya kita tempatkan persoalan ibadah keagamaan seperti salat dan sebagainya, lantas sisi apakah yang lebih penting dari salat: implikasi sosialnya ataukah pelaksanaan ritualnya?

Dalam hal ini saya tetap setia dengan pendapat yang sedikit konservatif, yang agak mirip dengan Quraish Shihab, yaitu bahwa kita harus setuju apa yang dikatakan oleh Ma'ruf Amin bahwa ketika seseorang memilih sistem agama, maka ia harus mengikutinya. Artinya sebagai Muslim kita harus melaksanakan salat. Tapi, apakah salatnya harus sama dengan *mainstream,* ini yang menurut saya boleh beragam, namun tetap dalam satu tujuan. Bila ada yang berbeda, jangan buru-buru dituduh sesat, melainkan harus terlebih dahulu didialogkan, kenapa dia atau yang lainnya memilih cara salat yang berbeda? Kemudian, selain pelaksanaannya, dampak sosial dari salat juga kita harapkan muncul. Tapi kalau ada yang hanya mementingkan esensinya – misalnya berpandangan bahwa salat tidaklah menjadi ritual yang diwajibkan, sebaliknya yang harus dikedepankan adalah kesalehan publiknya, sebagai inti dari salat itu sendiri – itu urusan masing-masing.

Saya termasuk orang yang konservatif dalam soal-soal ritual yang diwajibkan agama. Karena dari pesantren, saya tetap berpikir bahwa melaksanakan haji, *thawâf* dan sejenisnya haruslah ke Mekah. Tetapi, kalau ada orang yang beranggapan bahwa berhaji tidak harus pergi ke Mekah, misalnya dengan memaknai *thawâf* sebagai etos kerja untuk terus mencari rizki Allah selama tujuh hari, *sa'î* adalah bentuk perjuangan seseorang terhadap kesucian dan ketinggian, bukan hanya pada simbol berlari kecil antara Shafa dan Marwah, itu pun tetap kita hargai. Saya juga membaca referensi bagaimana dalam beragama seseorang memahami esensi seperti itu. Bagi mereka, esensi jauh lebih penting, karenanya ritual dan training ibadah bisa ditinggalkan. Dalam perdebatan seperti itu, kita ambil hikmahnya saja. Berkaca dari sejarah, akibat cara berpikir demikianlah yang kemudian memunculkan Syekh

Siti Jenar. Baginya, tidak perlu salat, zakat dan sebagainya, kalau setiap detiknya senantiasa berjiwa sosial, tulus, dan hati senantiasa ingat kepada Tuhan.

Menurut Anda adakah kemungkinan praktik-praktik keberagamaan itu disesuaikan dengan konteksnya, artinya salat orang Indonesia bisa dengan bahasa Indonesia?

Bagi saya salat harus lima waktu, tidak boleh lebih dari itu, kemudian menggunakan bahasa Arab. Tapi kalau ada orang yang salat dengan bahasa Indonesia, silakan. Namun demikian, itu tidak menjadi sebuah acuan dasar. Menurut saya ada nilai universal yang harus kita sepakati dalam menjalankan ibadah, meskipun tetap ada wilayah lokal yang harus juga kita hargai. Saya setuju dengan Quraish Shihab bahwa ke-*khusyû'*-an bisa diperoleh tanpa harus mengerti terjemahan dari kalimat ritual yang diucapkan. Tapi saya sendiri membiasakan pelajaran kepada jamaah saya dengan selalau membacakan al-Quran dan terjemahannya dalam pengajian yang kita adakan. Dari situ, jamaah saya tahu apa terjemahan dari ayat al-Quran yang dibacanya. Itu saya lakukan setiap malam Rabu.

Kekhusyuan diharapkan mampu memunculkan refleksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. bagaimana mungkin itu terjadi jika bahasa yang dipakai dalam ritual tidak dimengerti oleh para pelakunya?

Bagi saya tetap ada nilai atau sistem yang harus kita ikuti. Dan menurut saya, apa yang dilakukan oleh Usman Roy di Malang itu tidak lebih dari sebuah protes terhadap cara keberagamaan kita. Protes terhadap cara ulama mendidik masyarakat. Meski

begitu, apa yang dilakukan Usman Roy tidak bisa begitu saja dilakukan oleh orang lain. Saya sendiri memiliki pemahaman yang berbeda dengan Usman Roy. Saya akan tetap mengajarkan bacaan salat dengan bahasa Arab, sembari mengajarkan artinya. Akan saya ajarkan kekhusyuan lewat pemahaman arti bacaan-bacaan salat di luar waktu salat.

Artinya, Anda setuju upaya mendorong kebebasan tafsir, selama tidak merugikan dan tidak mencabut hak-hak orang lain?

Ya, saya setuju. Tapi tetap bahwa penafsiran keagamaan harus mengikuti beberapa rambu-rambu demi menghindari penggunaan tafsir untuk kepentingan pribadi, bukan untuk memberikan kepastian *body text*-nya. Kita boleh berbeda dalam menafsirkan ayat *lâ yamassuhû illâ al-muthahharûn,* misalnya. Ayat yang berarti tidak boleh memegang al-Quran kecuali dalam keadaan suci ini memiliki penafsiran yang bermacam-macam terhadap kata suci. Ada yang menafsirkan suci dengan mempunyai wudlu, ada pula yang menafsirkannya sebagai kesucian hati. Saya sendiri lebih memilih penafsiran yang kedua.

Sekali lagi, pluralisme bukan berarti boleh menghilangkan identitas yang kita miliki. Toleransi harus kita lakukan dengan tanpa menghilangkan identitas asal kita. Sebagai Muslim yang baik, saya harus tetap salat, harus berhaji jika mampu. Tetapi sebagai Muslim yang baik, saya juga harus menghargai orang yang berbeda. Keyakinan pluralisme seperti itu bukan hanya untuk konteks Indonesia, tetapi harus disebarkan ke seluruh dunia. Saya sering berbincang dengan Gus Dur, saya kerap mengatakan bahwa ide dan gagasan Gus Dur tentang pluralisme bukan hanya menjadi ke-

butuhan Indonesia, tetapi juga harus disebarkan ke seluruh dunia. Semangat gagasannya didorong oleh keyakinan tauhid tertentu. Kesimpulannya, meski terdapat perbedaan antara konsep pluralisme Islam dan Barat, tetap ada persamaan dalam tujuan keduanya, yaitu agar kita dapat menerima orang lain yang berbeda. Lebih dari itu, pluralisme bukan berarti boleh seenaknya mengambil atau mencampuradukkan ajaran orang lain dengan ajaran yang kita miliki.

Agama harus kita berdayakan untuk membela orang yang terzalimi. Apapun agama dan warna kulitnya, kita harus membela kelompok yang dizalimi oleh kelompok lain, yang mayoritas misalnya.

Pluralisme tidak sekadar menghargai orang lain, tetapi, lebih dari itu, juga sebuah usaha untuk memihak terhadap atau mengadvokasi pihak minoritas yang tidak diuntungkan. Ketika Ahmadiyah diserang, sebagai seorang yang pluralis, kita mestinya ikut mengadvokasi, meskipun, misalnya, kita tidak setuju dengan teologi yang dipahami mereka. Dalam konteks ini, bagaiamana Anda memaknai pluralisme?

Saya setuju dengan konsep tersebut. Agama harus kita berdayakan untuk membela orang yang terzalimi. Apapun agama dan warna kulitnya, kita harus membela kelompok yang dizalimi oleh kelompok lain, yang mayoritas misalnya. Hal ini telah dicontohkan oleh Sayyidina Ali, jauh sebelum ada gagasan pluralisme. Suatu ketika, Ali bangun subuh terlambat, sehingga dia harus berlari untuk ikut salat berjamaah bersama Rasulullah. Di tengah perjalanan, Ali terpaksa harus berjalan lambat, karena di depannya ada orang Yahudi yang sudah tua sedang lewat. Ali tidak berani mendahului

si orang tua itu. Persoalannya, bukan karena Yahudi atau Nasrani, tapi dalam Islam dijelaskan bahwa orang tua harus dihormati. Maka Ali berjalan lambat di belakang orang Yahudi tersebut sampai ia lewat. Sementara di tempat salat, Nabi dan jamaah sudah *rukû'*. Ali kemudian bergegas ke masjid. Karena masih mendapati jamaah sedang *rukû',* Ali mengucapkan *al-hamdulillâh, Allâhu akbar*, maka dijawablah oleh Rasulullah s*ami'allâhu liman hamidah*. Jadi, betapapun hendak salat berjamaah, Ali lebih mendahulukan untuk menghormati orang tua yang beragama Yahudi itu. Karena itulah Ali mendapatkan penghargaan s*ami'allâhu liman hamidah.* Menurut saya, kalau kita mau terus menggali semua ajaran agama kita, maka akan ditemukan bagaimana Islam tidak pernah membedakan manusia dari asal-usul ras, agama, dan sebagainya. Nabi pun telah mencontohkan dengan membela Bilal.

Tapi faktanya Islam juga memiliki ayat-ayat yang menganjurkan kekerasan, yang biasa diterapkan oleh kalangan anti-pluralis. Ayat walan tardlâ 'anka al-yahûdu... bagi kelompok terakhir ini dimaknai sebagai ketidaksudian orang Yahudi untuk berbaikan dengan orang Islam selama ia masih memeluk Islam. Bagaimana Anda memaknai ayat-ayat sejenis ini?

Menurut saya, kita perlu berdialog. Mari kita teliti bagaimana dan dalam konteks apa ayat itu turun. Apakah kafir yang disebut pada zaman Nabi itu masih relevan dengan kata yang sama di hari ini? Lalu apakah ayat yang menyeru memerangi kaum musyrik itu diturunkan dalam konteks untuk penegakan agama atau sekadar siasat politik Nabi semata? Itu bisa terus kita dialogkan. Kita harus membaca al-Quran sebagai proses mengedepankan semangat

kemanusiaan, demokrasi dan sebagainya. Soal apakah kemudian ada orang yang tidak sepaham dan mempermasalahkannya, mari kita dialogkan.

Kemudian ayat-ayat atau Hadits yang mengandung kekerasan, rasis dan sebagainya pun harus dilihat sejauh mana kemanfaatannya untuk dibaca dan diamalkan. Atau, mungkin bisa juga, kita hanya dan harus membaca ayat-ayat yang diprioritaskan, yang tidak mengandung unsur kekerasan dan intoleransi. Makanya, bagi saya, kalau agama hanya dipakai sebagai alat provokasi, itu sangat berbahaya. Kita boleh terus memperdebatkan makna ayat al-Quran, karena al-Quran sendiri memang membolehkan kita untuk berbeda.

> Perda syariah seharusnya menjadi sesuatu yang tidak mungkin muncul kalau kita benar-benar menjadikan Pancasila dan UUD '45 sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena produk hukum di bawah Pancasila dan UUD '45 harus mengacu kepadanya, sementara perda syariah jelas-jelas telah mencederai konstitusi.

Ada anekdot lucu bagaimana al-Quran dipakai untuk menebar kebencian pada orang lain atau dipakai untuk pembenaran tingkah lakunya. Ada kiai yang menerangkan *lillâhi mâ fî al-samawâti wa mâ fî al-ardli* dengan pengertian bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah, kita di dunia tidak punya apa-apa. Usai mengaji, santri tersebut pulang dan dia menjadi pencuri. Dia menjadikan ayat itu sebagai basis argumentasinya. Kebetulan dia mencuri jambu kiainya. Ketika pak kiai mengetahuinya, santri tersebut ditegur: "mengapa kamu mencuri jambu saya?", santrinya menjawab, "pak kiai jangan bicara begitu, semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah, berarti ini bukan

jambunya pak kiai, ini jambunya Allah. Pemahaman tekstual kiai yang diajarkan kepada muridnya, akhirnya menjadi senjata makan tuan dalam kasus tersebut.

Bayangkan saja kalau kita membaca dan memaknai al-Quran hanya untuk kepentingan-kepentingan kita sendiri. Menurut saya, dalam konteks beragama dan berbangsa, kita harus tunduk kepada sistem yang kita sepakati, yaitu undang-undang. Undang-undang adalah sebuah kesepakatan bersama untuk mengatur kehidupan bersama. Ini perlu ditekankan, sementara biarkan tafsir terus berbeda dalam menemukan konteksnya masing-masing.

Permasalahannya sekarang, kalau kita pakai saja al-Quran untuk aturan hidup sehari-hari, akan menyelesaikan masalah atau tidak? Apakah meng-*counter* pemahaman ayat yang tidak pluralis dengan mengusung ayat-ayat yang mendukung pluralisme juga dapat menyelesaikan masalah? Saya sendiri berpendapat sebaiknya tidak usah ada lagi perang ayat, tapi kita duduk bersama membicarakan pokok persoalan yang ada. Maka, dalam konteks Indonesia, kita bisa memanggil dan mengumpulkan tokoh-tokoh umat Islam, FPI, MMI, HTI, Ahmadiyah, JIL dan sebagainya, hingga setiap masalah dan konflik yang ada terjelaskan dan akan lebih baik apabila perbedaan akhirnya dapat diselesaikan.

Jadi, "perang ayat" mesti segera dihindari? Terus apa solusinya?

Ya, itu harus dilanjutkan pada tahap tidak sekadar perang wacana, perang ayat, tetapi dengan membuat sebuah ruang di mana kita bisa bertemu dan mencari gagasan untuk kepentingan bersama. Masalahnya, ada kelompok yang tidak mau bertemu dan mulai merasa diri sebagai kekuatan absolut, karena menganggap

tafsirannya yang paling sahih. Di samping itu, diharapkan teman-teman yang liberal juga bisa bertemu dengan teman-teman yang dianggap radikal dan sebaginya. Makanya, saya setuju dengan gagasan salah seorang teman yang berasal dari Katolik bahwa persoalan ini menjadi berlarut karena, pada dasarnya, nurani kita yang sudah hilang.

Pada tataran perbedaan tafsir dan "perang ayat", perlukah negara turun tangan?

Saya kira perlu. Tapi hanya menjadi mediator, bukan memutuskan apalagi menghukumi keyakinan orang lain. Negara bertugas hanya sebatas memediasi, memfasilitasi, dan menjadi pengayom warga negara secara adil tanpa melihat asal-usul agama, keyakinan, ras, atau golongannya.

Sayangnya dialog antar-agama di negara kita belum begitu maksimal menelurkan perubahan. Bahkan tak jarang dialog yang muncul hanya melibatkan internal umat beragama. Mestinya, ruang dialog diperlebar dengan secara aktif melibatkan umat Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan komunitas penghayat atau komunitas adat dan lainnya.

Memang seharusnya dalam mengembangkan konsep dialog *interfaith* oleh pemerintah mereka semua dilibatkan. Tapi, lagi-lagi, jangan sekadar wacana. Saya tidak setuju dengan pembentukan forum pemuka agama (Forum Kerukunan Beragama). Itu hanya akan dijadikan alat negara untuk memuluskan kepentingan dan gagasan-gagasan dari kaum beragama. Menurut saya, biarkan saja

mereka yang berbeda keyakinan dan agama berinisiatif bertemu, tidak usah diinstitusikan. Biarkan mereka bertemu dari bawah, berdiskusi dengan masalah-masalah yang menjadi persoalan di antara mereka. Karena persoalan demikian tidak mungkin dapat digeneralisasi. Masing-masing berbeda dan memiliki keunikan tersendiri. Jadi, tugas negara, dalam hal itu, hanya mencoba memfasilitasi, tidak sampai membentuk dan menginstitusionalisasikan sebuah forum dialog antaragama. Kalau institusionalisasi yang justru terjadi, wajar kerukunan umat beragama yang menjadi program pemerintah hanya berujung pada penyeragaman. Seharusnya, biarkan saja agama dan umat beragama yang ada sebagai entitas yang beragam, karena yang tunggal hanyalah Tuhan.

Sejarah agama-agama di dunia memunculkan konsep pluralisme berbeda-beda. Melalui Konsili Vatikan II, Katolik melahirkan doktrin dan pengakuan akan adanya keselamatan di luar Gereja. Dari aspek teologis, bagaimana konsep pluralisme dalam Islam?

Menurut saya, sejak awal Islam sudah memberikan kebebasan. Ketika kita mengatakan *inna al-dîna 'inda Allâhi al-Islâm,* itu adalah pembinaan ke dalam. Tapi ketika ada ayat seperti *yâ ayyuhâ al-nâs innâ khalaqnâkum min dzakarin wa untsâ*... atau *innâ akramakum 'inda Allâhi atqâkum,* dan sejenisnya, maka ayat-ayat tersebut lebih diarahkan agar umat Islam memandang secara luas ke luar (komunitas agama Islam). Jadi jelas Islam juga memiliki ajaran pluralisme yang tinggi. Islam memperlakukan semua manusia secara sama. Kalau kita berbicara tauhid, saya sudah tidak melihat Islam (tauhid) yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad. Menurut saya, apa saja yang baik adalah "Islam". Mungkin Anda beragama

Katolik, Kristen, atau yang lainnya, tetapi kalau Anda sudah baik berarti Anda sudah "muslim". Maka menurut saya, kalau ada orang yang tidak salat, tidak puasa, tapi dia punya kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan, dia sudah muslim. Tugas saya sebagai seorang Muslim adalah menyebarkan atau mensosialisasikan gagasan Islam. Soal Anda mau ikut atau tidak, itu hal lain.

Tetapi al-Quran memperkenalkan istilah jalan dengan kata yang berbeda-beda, ada *suluk*, *tharîq*, *syarî'ah*, dan lainnya. Kalau beragama dianggap sebagai jalan, maka wajar jika kendaraan yang dipakai setiap orang berbeda-beda, seperti halnya kendaraan di jalan raya. Itu semua soal bagaimana seseorang memilih dan mampu menjalankanya. Bagi saya, apapun kendaraan seseorang tidak menjadi masalah, asalkan beraturan dan tidak menyebabkan yang lain celaka. Negara itulah yang membuat aturan. Namun demikian, negara tidak boleh mengatur seseorang untuk naik kendaraan tertentu dan melarang menaiki kendaraan yang lainnya. Yang dia lakukan hanyalah mengatur lalu-lintas dengan membuat rambu-rambu seperti lampu merah dan sebagainya.

Selanjutnya, yang dapat menjadi penghambat di jalan adalah orang yang mogok dan yang berjalan secara zigzag. Kalau ada umat beragama yang mogok di tengah jalan, kemudian hanya berteriak-teriak di atas mobil, dia akan ditinggalkan. Itu persis dengan gaya yang dipraktikkan oleh FPI dan MUI. Mereka terus berteriak di atas kendaraannya, sementara yang lain tetap cuek dengan jalan yang dipilihnya. Artinya, dengan cara seperti yang mereka perlihatkan, agama menjadi tidak disukai oleh mayoritas umat manusia.

Bagaimana mengimplementasikan gagasan fikih tasammuh?

Saya setuju dalam beberapa hal, tetapi harus ada yang perlu ditindaklanjuti. Yang dimaksud dengan *tasammuh* dalam konteks ini adalah lebih pada menunjukkan kembali bahwa agama memiliki ruang untuk orang lain. Tapi apakah setiap agama memiliki ketulusan yang sama dengan agama lain? Menurut saya, sekarang kita tidak bisa sekadar *tasammuh,* melainkan harus ditingkatkan menjadi *mushâfahah*, berasal dari kata *shahifa* yang artinya lembaran. Konsep ini mau mengatakan bahwa kalau kita pernah berbuat kesalahan atau kekerasan maka marilah kita buka lembaran baru.

Konsep *mushâfahah* adalah bagaimana kita berlapang dada dan menerima orang dengan keunikannya masing-masing. Selain itu, *mushâfahah* juga berarti berjabat tangan, artinya, berpegang erat untuk bersama-sama memikul persoalan kemanusiaan dan merumuskan solusinya. *Mushâfahah* menjadi media penyaluran energi tangan ke hati. Dengan *mushâfahah,* mestinya kita bisa beranjak dari wacana ke praksis toleransi yang lebih mengena.

Toleransi tidak bisa diserahkan begitu saja kepada elemen-elemen masyarakat, melainkan juga membutuhkan peran konkret negara. Sayang, berbagai kasus kekerasan atas nama agama di Indonesia justru kerap memperlihatkan pendiaman negara, sehingga mencabut hak-hak dan kebebasan orang atau kelompok tertentu untuk beragama dan berkeyakinan secara beda. Negara, dalam hal ini aparat, cenderung takut kepada golongan yang mengklaim diri mayoritas, padahal melakukan pengrusakan dan penganiayaan. Pertanyaannya, peran apakah yang semestinya dilakukan oleh negara?

Saya sangat kecewa dengan Pemda, aparat Kepolisian, dan MUI Majalengka dalam menangani kasus Cadasari yang demikian

menzalimi saudara kita dari Ahmadiyah. Sejak awal saya mencoba memediasi mereka, kelompok Ahmadiyah, MUI, dan FUI, namun kemudian saya dibuat kecewa justru oleh pemerintah yang telah menghambatnya. Saya kira, ke depan, kita membutuhkan perangkat negara, birokrat dan aparat, yang paham betul bahwa ruh Indonesia adalah pluralisme. Mereka harus ditatar agar benar-benar memahami pluralisme dan kebhinekaan. Dengan begitu mungkin kita akan bisa melihat Indonesia sebagai negara yang menghargai keragaman.

Saya mengusulkan agar pemerintah membuat suatu pelatihan, seperti penataran P4, namun lebih pada pengajaran tentang pentingnya pluralisme. Kita perlu menggali akar-akar tradisi bangsa ini untuk mempertemukan kembali elemen-elemen yang berbeda di dalam masyarakat kita. Saya merasakan betapa pentingnya pluralisme ketika berada di Kupang, di mana Muslim menjadi kaum minoritas, hanya sekitar 8,2% dari seluruh penduduk. Dalam kondisi demikian, kita akan mencari ayat atau dalil agar kita disayangi oleh mayoritas, dalam hal ini Katolik. Sesekali, saya kira, FPI perlu berdiam beberapa bulan di sana untuk merasakan bagaimana menjadi kaum minoritas, agar dia tidak lagi berbuat seenaknya karena menjadi mayoritas. Di sana, mereka pasti tidak akan bisa berteriak *Allâhu Akbar* seenaknya seperti di Jakarta, karena dengan itu, mereka menjadi tidak pluralis, tidak toleran, bahkan sangat mungkin akan mengakibatkan bentrok dengan kelompok mayoritas yang Katolik.

Menurut saya, tugas berat para tokoh sekarang adalah bagaimana agar mentalitas para aparat, orang yang menjadi representasi negara atau pemerintah, memahami akar sejarah, sehingga memahami gagasan pluralisme sebagai ruh bangsa untuk kemudian disebarkan

melalui sebuah kesadaran bernegara. Karena kasus seperti yang terjadi di Cadasari itu tidak akan selesai kalau aparatnya masih belum adil dan memahami pluralisme. Ketidakadilan dan ketidaktegasan aparat itulah yang membuat saya kecewa dalam penanganan kasus Cadasari. Maka, ke depan, kita meminta partai-partai politik, birokrasi dan sebagainya, agar menghasilkan orang-orang yang mempunyai pemahaman kuat tentang pluralisme. Pelatihan pluralisme mestinya tidak hanya diberikan untuk tokoh masyarakat. Lebih dari itu, kita harus mendesak pemerintah agar menjadikan pluralisme sebagai sebuah sistem, membuat regulasi pluralisme yang jelas dan menjadikannya sebagai kesadaran bernegara. Anda boleh Muslim, boleh Katolik dan lain sebagaianya, tapi pluralisme dan bersikap pluralis adalah hal yang wajib di negeri ini.

Kembali ke persoalan mushâfah. Apakah ia dapat disamakan dengan rekonsiliasi, sebuah upaya untuk memulihkan hak-hak masyarakat yang terinjak-injak, terampas, dan tercabut? Apakah mushâfah ah hanya perlu dijalankan di tingkat civil society, elemen masyarakat yang saling berkonflik, atau juga melibatkan negara?

Insya Allah, kalau saya lihat al-Quran, konsep *mushâfah* itu lebih kepada kesadaran masyarakat. Dan itu tidak perlu banyak-banyak. Tiap komunitas lokal memunculkan sendiri gagasan itu. *Mushâfah* memaknai masa lalu sebagai lembaran yang sudah lewat, namun tidak perlu menghapusnya. Kita mulai kehidupan sekarang di lembar selanjutnya. Tapi persoalan mengisi lembar putih dan kosong sekarang justru semakin berat karena, *pertama,* memang lembarannya tidak ada, *kedua,* kita tidak mempunyai alat dan sumber daya yang mau menjadikan *mushâfah* sebagai

bentuk kesadaran untuk kemudian disosialisasikan dan sebagainya. Hal ini terjadi karena media pun, misalnya, justru lebih suka mengeskpos kekerasan. Kalau saya atau para kiai di pelosok makan bareng dengan pendeta di gereja dan sebagainya, itu tidak akan masuk dan menjadi berita di koran atau televisi. Tetapi kalau ada gereja dilempari santri saya, itu pasti akan dijadikan berita. Kita memang telah dihadapkan pada kenyataan bahwa *the bad news is the good news*.

Apakah media-media di Indonesia, menururt Anda, tidak berperspektif pluralis?

Ya, ada sebagian besar media yang begitu. Makanya kita harus membedakan antara liberalisme pemikiran dengan liberalisme perdagangan. Liberalisme perdagangan artinya kapitalisme. Maka media tidak seharusnya hanya menampilkan berita-berita yang dapat menaikkan atau mendongkrak penjualannya (*rating*) di masyarakat atau menaikkan kapital usaha perusahaan. Liberalisme dalam pemaknaan seperti inilah yang tidak saya setujui.

Persolan lain, munculnya perda syariah di berbagai daerah, seringkali mencederai kebebasan seseorang, bahkan bertentangan dengan konstitusi. Bagaimana Anda melihatnya?

Menurut saya, pemerintahan SBY dan perangkat di bawahnya banyak yang sudah menyalahi undang-undang. Sebaliknya, banyak di antara mereka yang tidak memahami UUD dan tidak berjiwa Pancasila. Padahal UUD 1945 sendiri jelas-jelas mencantumkan dan menghargai pluralisme. Dan bagi masyarakat beragama, se-

benarnya banyak sekali tujuan-tujuan keberagamaan yang lebih mulia, ketimbang peribadatan simbolik, seperti tentang kecerdasan bangsa, keadilan sosial yang merata dan sebagainya, yang sayangnya malah tidak dibaca.

Perda syariah seharusnya menjadi sesuatu yang tidak mungkin muncul kalau kita benar-benar menjadikan Pancasila dan UUD '45 sebagai acuan berbangsa dan bernegara. Kenapa demikian? Karena produk hukum di bawah Pancasila dan UUD '45 harus mengacu kepadanya, sementara perda syariah jelas-jelas telah mencederai konstitusi. Itulah persoalan besar bagi bangsa kita kini. Bangsa ini, kini, sudah tidak punya harga diri, kehilangan identitas, dan tidak bermartabat. Malangnya, hal itu justru terjadi karena kita memang sudah tidak lagi mengerti bahwa diakuinya kita sebagai negara berdaulat itu adalah karena kita mempunyai UUD yang kita akui sebagai kesepakatan bersama, yang karena ketidakmengertiannya, malah kita cederai sendiri.

Konkretnya, harusnya bertindak seperti apakah negara ini? Haruskah ia menjadi negara kuat, melebihi kekuatan yang lain?

Tidak. Menurut saya, perjuangan di ranah *civil society*-lah yang justru menjadi amat penting. Dari sini, kita mengontrol orang-orang yang kini sedang memangku jabatan di negara. Kita bisa melakukan itu dengan patokan UUD '45, karena mereka tidak bisa menjadi representasi negara kalau tidak mengacu kepada UUD '45. Bagaimana mungkin seorang polisi yang digaji oleh negara malah membekingi kekerasan. Sayangnya, mereka malah kerap melakukan hal seperti itu dan sulit mengubahnya. Salah satu yang memungkinkan itu tetap terjadi adalah proses rekrutmen di

negara kita yang memang kacau. Untuk menjadi polisi atau pegawai negeri sipil (PNS) seseorang dipaksa melakukan penyuapan, wajarlah kalau kemudian melahirkan aparat dan birokrat yang juga ahli suap, korup. Korupsi memang menjadi biang keladi dari semua persoalan bangsa ini.

Kembali ke persoalan perda syariah. Adalah ironis di mana perda syariah justru kerap diusung oleh partai sekular, bukan hanya partai Islam. Mengapa itu bisa terjadi?

Karena Perda itu dibuat untuk kepentingan politik semata. Saya katakan tadi, selama agama menjadi kekuatan moral untuk sebuah perubahan dan perbaikan transformatif, itu oke, ideal. Tapi kalau agama sudah dipolitisasi sebagai alat kekuasaan, itulah yang sangat berbahaya. Lebih dari itu, ia malah mengerdilkan peran agama.

Dengan kenyataan berbangsa seperti sekarang ini, bagaimana Anda memperkirakan hubungan antar-agama dan keyakinan di Indonesia ke depan?

Saya selalu optimis bahwa, ke depan, Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang betul-betul mempunyai identitas. Identitas itu adalah dengan mempunyai dan terus merawat keragaman dan kebhinekaan. Indonesia juga akan menjadi contoh keberagamaan yang ramah dan *rahmatan li al-'âlamîn*. Kemudian, Indonesia juga mempunyai peranan penting dalam masa depan peradaban dunia. Syaratnya, kita harus mulai melakukan komitmen, di semua elemen, dalam mendorong di sebalik kata *jahada*. *Pertama,* secara individu kita harus *zuhud*. Bagaimana kita mempraktikkan keberagamaan

kita pada konteks yang riil, bukan hanya pada sisi simbol. *Kedua,* kita harus ber-*ijtihâd*. Seluruh kemampuan intelektual kita dicurahkan untuk negara ini, tidak untuk kepentingan sesaat yang sifatnya pribadi dan golongan. Setelah itu, baru kita bisa masuk ke tahap *ketiga*, *mujâhadah*. Di sini terdapat upaya rekonsiliasi bersama bahwa yang kita inginkan adalah sebuah perubahan ke depan. Terakhir, *keempat*, adalah *jihâd*. Harus ada pendorong yang memaksa kita menyelesaikan persoalan kemiskinan dan perang melawan korupsi secara bersama-sama.

Kalau semua itu kita lakukan, saya optimis bahwa ke depan hubungan antar-agama dan keyakinan menjadi semakin baik. Bangsa kita pun akan semakin bermartabat. Saya rasa kelompok-kelompok radikal hanya akan muncul pada masa transisi saja. Acara-acara di televisi pun sekarang ini sudah mulai ada perubahan. Dari hanya memunculkan tokoh-tokoh yang memiliki pemahaman Islam permukaan, acara-acara kontes dari idol sampai dangdut, kini, seiring berkembangnya seleksi masyarakat, nalar media akan didominasi keseriusan mengusung kemanusiaan, demokrasi, HAM dan sebagainya. Itu sangat mungkin, karena media merupakan representasi dari apa yang terjadi di masyarakat. Orang-orang yang mengusung pluralisme, ke depan, akan makin disukai publik dan media. Saya kira generasi seperti inilah yang akan tumbuh dan mewarnai Indonesia pada 20 tahun yang akan datang. Namun demikian, satu hal yang paling penting adalah kita tidak perlu terjebak pada kapitalisasi.

Wawancara dilakukan di Pondok Indah Jakarta, Kamis, 28 Februari 2008

Percakapan dengan

Maria Ulfah Anshor



Maria Ulfah Anshor, Ketua Umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU. Ia menyelesaikan Pascasarjana Program Kajian Wanita di Universitas Indonesia (2004) dan mengajar Tafsir Ahkam (Islamic Law) di Institut Ilmu al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Kalaupun ada hubungan antara konsep Islam dengan kenegaraan (politik), tentu tidak memadai. Namun begitu, al-Quran menyinggung hubungan antara agama dan negara –meskipun tidak dijelaskan secara utuh– ihwal dasar-dasar pemerintahan, di antaranya mengenai mandat (amanah) dan keadilan yang harus ditegakkan bagi seorang pemimpin kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan, dan ras. Untuk itu, formalisasi syariah yang hanya mementingkan simbol dan mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum justru bertentangan dengan tujuan pembentukan syariat Islam *(maqâshid al-syarî'ah)*. Pada hematnya, NKRI dengan landasan ideologi Pancasila sudah final, tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. Sebab, substansinya selaras dengan nilai-nilai Islam.

Dalam diskursus keislaman terdapat perbedaan tentang konsep negara hubungannya dengan agama. Di satu sisi Islam dinilai tidak memiliki konsep negara, namun pada sisi lainnya beberapa umat Muslim berupaya memperjuangkan berdirinya negara Islam, karena dianggap sebagai ketentuan agama. Bagaimana Anda menyikapi ketegangan ini?

Setahu saya tidak pernah ada teks yang berbicara secara khusus tentang konsep negara, baik dari sumber al-Quran maupun Hadits. Saya belum menemukan konsep mengenai bentuk negara yang ideal dan demokratis yang digambarkan dalam al-Quran maupun Hadits. Yang ada adalah Islam memberikan nilai-nilai universal sebagai panduan moral bagi kehidupan manusia. Munculnya perdebatan tentang perlu atau tidaknya Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan sangat tergantung pada cara pandang umat Islam itu sendiri dalam memahami Islam. Bagi mereka yang memahami Islam sebagai institusi, maka memerlukan simbol, membutuhkan sistem, dan kecenderungannya diwujudkan dengan cara memformalkan syariat Islam. Sementara bagi mereka yang meyakini bahwa Islam sebagai panduan hidup yang berisi nilai-nilai moral yang universal, maka tidak perlu menjabarkannya ke dalam sebuah sistem tertentu, apalagi menjadikannya sebagai konstitusi atau aturan negara. Yang terpenting adalah substansinya bahwa nilai-nilai Islam dapat dijalankan dalam seluruh kehidupan, tanpa harus dilegal-formalkan menjadi aturan publik. Dengan kata lain, meskipun konstitusi negara bukan menggunakan label Islam atau negara Islam, tetapi sejauh isi konstitusi negara tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam maka dapat dikategorikan telah sesuai dengan tujuan pembentukan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).

Kalaupun ada hubungan antara konsep Islam dengan kenegaraan atau politik, sepengetahuan saya, tidak cukup memadai. Sebab, hal tersebut sebatas contoh-contoh mengenai sifat dan karakter pemimpin. Misalnya ketauladanan yang pernah dilakukan Rasulullah ketika menjadi pemimpin Madinah yang penduduknya terdiri dari berbagai suku, yang meliputi umat Islam pendatang (*muhâjirîn*), umat Islam penduduk asli Madinah (*anshâr*), Bani Aus dan Khazraj, ada Kristen Najran, kaum musyrikin dan lain-lain. Rasulullah melakukan perjanjian bersama mereka dan menghasilkan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Madinah. Di dalam perjanjian tersebut tidak ada satu kutipan pun yang merujuk pada al-Quran kecuali nilai-nilai universal: kewajiban dan hak bersama, menegakkan keadilan, semua suku atau kelompok diberi kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, tidak ada diskriminasi, dan perlakuan yang sama dalam hukum. Di situ tercermin sifat-sifat Rasul yang arif, menghargai perbedaan, demokratis, akomodatif terhadap usulan para Sahabat dan bahkan dari lawan politiknya. Piagam tersebut kemudian dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi negara Islam untuk menghargai warga negaranya yang bukan Islam.

Rasulullah dalam sejarahnya memiliki kapasitas untuk menjalankan tiga fungsi kenegaraan (legislatif, eksekutif dan yudikatif) sekaligus, karena dibimbing langsung oleh Allah SWT melalui wahyu. Seluruh urusan kenegaraan dan pemerintahan berada di bawah komando Rasulullah sebagai khalifah yang memimpin kota Madinah ketika itu. Beliau di satu sisi memiliki kewenangan sebagai pembuat aturan dan undang-undang (legislasi), di saat yang sama beliau menjadi pelaksana dari aturan-aturan tersebut (eksekutif) dan beliau juga sekaligus menjalankan fungsi yudikatif.

Tetapi menurut saya model pemerintahan khilâfah, baik yang dilaksanakan di masa Rasul maupun pada masa para Sahabatnya, jika diterapkan pada konteks saat ini kurang tepat. Sebagai *entry point* untuk memulai kajian kenegaraan, saya setuju dilakukan kajian sejarah yang terjadi pada masa Rasulullah. Tetapi hal tersebut bukan sebagai konsep negara Islam, karena hanya berupa satu peristiwa sejarah yang sifatnya partikular. Sementara konsep negara harus berupa kerangka konstitusional yang menggambarkan rumusan berbagai dimensi kehidupan secara holistik. Bahwa kemudian sebagian kelompok menganggap khilâfah sebagai konsep pemerintahan Islam, silakan saja. Tetapi menurut saya pandangan seperti itu berbahaya, karena implikasinya akan mempersempit pemahaman Islam yang universal menjadi pengertian yang literal dan mengabaikan kondisi kontekstualnya.

Adapun hubungan antara agama dan negara, meskipun tidak dijelaskan secara utuh di dalam Islam tetapi secara khusus mengenai dasar-dasar pemerintahan disinggung dalam al-Quran, di antaranya dalam al-Quran surat 4, al-Nisâ' ayat 58-60,

> Nilai-nilai Islam yang universal, Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-'âlamîn* jika diwujudkan ke dalam sistem kenegaraan atau menjadi konstitusi negara Islam, menurut saya, implikasinya justru akan mereduksi nilai-nilai tersebut. Bahkan kecenderungannya akan mempersulit dan mempersempit nilai-nilai Islam itu sendiri karena tidak akan mampu dijabarkan secara utuh dalam sistem kenegaraan manapun. Kalau konstitusinya menggunakan syariat Islam, apakah akan menerapkan al-Quran secara literal? Sementara al-Quran, menurut saya, tidak men-jelaskan secara detil tentang persoalan kenegaraan dan problem kekinian yang dihadapi manusia.

berisi mengenai mandat (*amânah*) dan keadilan yang harus ditegakkan bagi seorang pemimpin kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan dan ras. Selain itu, berisi perintah kepada kaum mukmin untuk menaati putusan hukum dari siapapun yang berwenang dalam sebuah pemerintahan, yang tercermin dalam ayat: *athî'û Allâha wa athî'û al-rasûl wa ûlî al-amri minkum.* Kalimat tersebut menggunakan kata perintah (*amr*) yang berarti: menaati atau melaksanakan aturan atau hukum yang diputuskan oleh pemerintah adalah wajib. Itu menunjukkan bahwa taat kepada pemimpin adalah wajib, sama hukumnya dengan taat kepada Allah dan rasulnya-Nya. Tentu yang dimaksudkan pemimpin yang wajib ditaati di sini adalah pemimpin yang sesuai dengan karakter kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah yaitu pemimpin yang bisa dipercaya (*amânah*), adil, arif dan bijaksana, yang seluruh keputusannya tidak bertentangan dengan perintah atau larangan Allah dan rasul-Nya. Tapi ayat ini tidak berbicara secara tegas mengenai bentuk pemerintahan apalagi struktur negara. Di situ hanya diperintahkan taat kepada *ûlî al-amri.*

Sementara pengertian *ûlî al-amri* dalam ayat tersebut berarti orang-orang yang berwenang mengurus urusan sosial kemasyarakatan. Pertanyaannya adalah siapa mereka itu? Dalam literatur klasik, pendapat ulama berbeda-beda atau multi-tafsir mengenai makna *ûlî al-amri*. Ada yang berpendapat pemerintah, ada juga yang mengatakan ulama, ada juga yang menafsirkan mereka adalah utusan masyarakat yang mewakili berbagai komunitas. Dalam konteks pemerintahan sekarang mereka adalah warga negara yang dipilih secara demokratis dalam pemilihan umum, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Perbedaan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa pada hal-hal

yang sifatnya partikular teks-teks Islam baik yang bersumber dari al-Quran maupun Hadits memiliki watak yang interpretable atau multi-tafsir, meskipun pada hal-hal yang universal bisa sepakat dengan doktrin maupun pemahaman yang tunggal. Kenyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa di dalam Islam keragaman pemahaman merupakan sebuah keniscayaan yang wajar terjadi bahkan boleh jadi menjadi kekayaan khazanah Islam yang tidak perlu dipertentangkan sejauh menyangkut hal-hal yang bersifat dugaan (*zhannî*).

Nilai-nilai Islam yang universal, Islam sebagai agama yang *rahmatan lil ala min* jika diwujudkan ke dalam sistem kenegaraan atau menjadi konstitusi negara Islam, menurut saya, implikasinya justru akan mereduksi nilai-nilai tersebut. Bahkan kecenderungannya akan mempersulit dan mempersempit nilai-nilai Islam itu sendiri karena tidak akan mampu menjabarkan secara utuh ke dalam sebuah sistem kenegaraan manapun. Kalau konstitusinya menggunakan syariat Islam, apakah akan menerapkan al-Quran secara literal? Sementara al-Qur'an, menurut saya, tidak menjelaskan secara detail tentang persoalan kenegaraan dan problem kekinian yang dihadapi manusia.

Apakah konsep khilâfah Islâmiyah *bisa disebut sebagai konsep mengenai negara menurut Islam?*

Secara historis kepemimpinan Rasulullah dan para Sahabatnya memang berbentuk *khilâfah*, tetapi saya kira tidak dapat disebut sebagai konsep negara Islam. Kalaupun ada yang menggunakannya sebagai sebuah konsep *khilâfah Islâmiyah* maka harus mengikuti perkembangan, bukan sebagai suatu konsep yang final. Sebuah konsep kenegaraan harus dinamis, harus menyesuaikan dengan situasi

dan kondisi yang terus berkembang. Masa-masa awal kepemimpinan Islam, yakni pada masa *al-khulafâ' al-râsyidûn* masing-masing, menurut saya, dalam kepemimpinannya ada hal-hal yang positif tapi juga ada hal-hal yang kurang tepat kalau hendak diterapkan dalam konteks sekarang.

Jadi konsep awal tersebut membutuhkan modifikasi-modifikasi atau penataan ulang. Sebab, konteks kepemimpinan Nabi dan *al-khulafâ' al-râsyidûn* berbeda sekali dengan konteks zaman sekarang. Kalau dulu kepemimpinan tunggal, artinya semuanya tergantung pada khalifah, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sementara kepemimpinan saat ini adalah kepemimpinan kolektif, yaitu kepemimpinan dengan tanggung jawab bersama sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang berdasarkan pada proses musyawarah. Sebetulnya pada masa Rasul pun proses-proses musyawarah juga terjadi, tetapi bentuk dan sistem permusyawaratannya tidak melembaga sebagaimana saat sekarang.

Apakah Anda sepakat dengan pandangan yang mengatakan bahwa agama perlu dipisah dari negara: agama urusan privat; dan negara urusan publik?

Saya setuju agama sebagai institusi dipisahkan dari negara. Tetapi ketika agama sebagai keyakinan, sebagai jalan hidup (*way of life*) manusia menuju keridlaan Tuhan, secara spirit, substansi, keduanya (agama dan negara) tidak bisa dipisahkan. Artinya, kita sebagai manusia yang memiliki dimensi semangat ketuhanan dan keberagamaan tidak bisa terlepas sama sekali dari perilaku yang melatarbelakangi dimensi itu. Jadi ibarat sebuah sosok yang di dalamnya ada ruh, di mana nilai-nilai ketuhanan menjadi ruh bagi

siapapun dan diimplementasikan di manapun. Kalau kemudian dipisahkan sama sekali, menurut saya, tidak bisa, karena nilai-nilai ini menjadi perspektif dalam kehidupan kita. Bukan berarti, misalnya, dalam hal ini kita harus menggunakan landasan negara dengan agama tertentu (Islam), tapi penekanannya lebih pada pengamalan substansi nilai-nilai tersebut. Dengan begitu, walaupun Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak harus menjadikan Islam sebagai ideologi negara.

Menurut saya urusan agama dan negara memang berbeda, tidak bisa disatukan, meskipun ada perspektif dan nilai-nilai ketuhanan yang memberi petunjuk (*guide*), inspirasi dan mengendalikan dalam menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan memang tidak bisa dihindari. Tapi bukan berarti antara agama dan negara sama dan sebangun.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, sehingga wajar jika ada sebagian golongan yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara Islam. Namun, kelompok lainnya ternyata tidak menghendaki dan tetap mengusulkan untuk mempertahankan negara dalam bentuk sekarang dengan berlandaskan

Seringkali orang mengindentikkan bahwa Islam harus dengan istilah Arab. Akibatnya, yang bukan berasal dari Arab seolah dianggap bukan Islam. Begitupun dengan istilah liberalisme, kata ini memang berasal dari bahasa Inggris, sama halnya dengan sekularisme, yang bukan bahasa Arab tetapi bukan berati harus diharamkan. Bahwa Islam diturunkan di Arab saya sepakat. Tetapi, kemudian nilai-nilai Islam sudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi budaya di berbagai negara belahan dunia. Sehingga Islam pun ada di mana-mana.

Pancasila. Menurut Anda, apakah Indonesia bisa disebut sebagai negara sekular yang memisahkan persoalan agama dari negara, atau lebih mengarah sebagai negara Islam?

Indonesia dengan dasar negara Pancasila, menurut saya, sudah memiliki semangat Islam. Hal tersebut bisa kita lihat dari fakta bahwa: *pertama*, dari seluruh sila-sila yang ada dalam Pancasila tidak ada satupun yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam; *kedua,* dirumuskan dengan berbagai pertimbangan oleh para pendahulu negeri ini yang mayoritas Muslim.

Oleh karena itu, menurut saya, tidak ada yang perlu dipertentangkan, apakah Indonesia ini negara Islam atau negara Pancasila. Faktanya yang terpenting adalah tidak ada satupun dari substansi Pancasila yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Nilai-nilai Islam yang universal, Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-'âlamîn* jika diwujudkan ke dalam sistem kenegaraan atau menjadi konstitusi negara Islam, menurut saya, implikasinya justru akan mereduksi nilai-nilai tersebut. Bahkan kecenderungannya akan mempersulit dan mempersempit nilai-nilai Islam itu sendiri karena tidak akan mampu dijabarkan secara utuh dalam sistem kenegaraan manapun. Kalau konstitusinya menggunakan syariat Islam, apakah akan menerapkan al-Quran secara literal? Sementara al-Quran, menurut saya, tidak menjelaskan secara detil tentang persoalan kenegaraan dan problem kekinian yang dihadapi manusia. Al-Quran menurut saya, sebagian besar memuat nilai-nilai umum dan universal yang membutuhkan penafsiran. Meskipun beberapa persoalan teknis dibahas dalam al-Quran, tetapi tidak detil dan lebih bersifat kasuistis – sehingga tidak bisa dijadikan landasan teknis operasional sebagaimana halnya undang-undang yang bisa berlaku secara umum.

Jadi Anda tidak setuju dengan sebagian kelompok yang mengkampanyekan negara Islam di negeri ini?

Saya tidak setuju. Karena sepengetahuan saya Islam tidak memiliki konsep yang baku mengenai negara. Kalaupun ada lebih berupa konsep syariat Islam yang dipolitisasi ke dalam sistem kenegaraan. Apalagi kalau yang dimaksudkan kampanye negara Islam itu dalam konteks untuk menggantikan Pancasila sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saya sangat tidak setuju. Sebab, Pancasila sebagai ideologi negara sudah final, tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. Karena substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

> Seringkali orang mengidentikkan Islam dengan istilah Arab. Akibatnya, yang bukan berasal dari Arab seolah dianggap bukan Islam. Begitupun dengan istilah liberalisme, kata ini memang berasal dari bahasa Inggris, sama halnya dengan sekularisme, yang bukan bahasa Arab tetapi bukan berati harus diharamkan. Bahwa Islam diturunkan di Arab saya sepakat. Tetapi, kemudian nilai-nilai Islam sudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi budaya di berbagai negara belahan dunia. Sehingga Islam pun ada di mana-mana.

Kita harus belajar dari sejarah. Keinginan untuk menjadikan agama tertentu, misalnya Islam, sebagai dasar negara, untuk kasus Indonesia sudah berulang terjadi. Di masa awal sebelum Indonesia merdeka keinginan ini sudah ramai. Kita bisa ambil contoh dari perjalanan sejarah Nahdlatul Ulama (NU). Pada tahun 1935 dalam pembahasan masalah aktual (*bahtsul masâ'il*) pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) di Banjarmasin, salah satu perdebatan yang muncul di antaranya: wajibkah bagi kaum Muslimin mempertahankan kawasan kerajaan Hindia Belanda

(sebutan untuk Indonesia waktu itu) yang diperintah oleh orang-orang non-Muslim? Muktamar kemudian memutuskan: wajib hukumnya secara agama untuk mempertahankan kawasan kerajaan Hindia-Belanda karena dua alasan: *pertama*, kaum Muslimin bebas menjalankan ajaran Islam; *kedua*, dahulu di kawasan tersebut telah ada kerajaan Islam. Pada Muktamar berikutnya, persoalan serupa muncul kembali: apakah perlu menggantikan kerajaan Hindia-Belanda dengan negara Islam? Muktamar kemudian memutuskan: NU tidak setuju dengan pembentukan Negara Islam (*dâr al-Islâm*) tetapi NU memutuskan untuk membentuk negara yang damai (*dâr al-salâm*).

Perdebatan mengenai syariat Islam sebagai landasan negara kembali muncul saat persiapan kemerdekaan, di antaranya pada Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*) yang ditanda tangani di Jakarta pada 22 Juni 1945. Dalam rancangan usulan *preambule* disebutkan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Tetapi pro-kontra antara kelompok Islam yang menghendaki memasukkan kalimat "...menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya" dan kelompok nasionalis yang hanya menghendaki kata Ketuhanan belum berakhir hingga usulan tersebut dibacakan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 10 Juli 1945. Terbukti kemudian teks Pancasila dalam *preambule* tersebut berubah lagi menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa, dan seterusnya, tanpa memasukkan kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya – tetapi menggantinya dengan kata "Yang Maha Esa" yang disahkan sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesa dalam pembukaan UUD 1945 dan berlaku hingga sekarang.

Setelah Indonesia merdeka, keinginan dari kelompok yang menghendaki asas negara harus kembali ke Piagam Jakarta terus bermunculan, namun hingga kini berhasil diredam. NU pada Muktamar tahun 1984 mengeluarkan keputusan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara sudah final, karena secara substansinya tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa kemudian implementasinya banyak yang tidak sesuai, bukan soal Pancasilanya, namun lebih disebabkan faktor personnya karena memaknai pancasila secara berlebihan dan bahkan dipolitisasi untuk kepentingan penguasa ketika itu.

> Menurut saya, dalam konteks global seperti sekarang ini tidak ada orang yang bisa hidup hanya dalam komunitasnya saja. Cepat atau lambat, sering atau jarang, kita akan berinteraksi dengan kelompok lain. Belakangan ini memang saya sangat prihatin dengan situasi-situasi di mana kelompok yang mengaku paling benar melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang berbeda.

Artinya apakah Anda ingin mengatakan, negara Indonesia lebih ke arah sekular, karena secara insitusional tidak berlandaskan agama? Namun, ada kekhawatiran bahwa sekularisme pada akhirnya akan meminggirkan agama. Bagaimana tanggapan Anda?

Menurut saya mayoritas penduduk Indonesia masih membutuhkan agama. Artinya, membutuhkan dan mengapresiasikan nilai-nilai agama yang diyakininya. Oleh karena itu, saya tidak perlu merasa khawatir bahwa agama akan tersingkir, karena melihat masih banyak orang-orang yang menekuni ilmu-ilmu keagamaan. Dan saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai

orang beragama untuk berdakwah dan menyebarkan agama yang diyakininya. Sebab itu sudah menjadi tugas dan panggilan agama masing-masing. Jadi kalau kemudian ada kehawatiran bahwa akan ada kelompok-kelompok yang jauh dari agama, itu bukan kesalahan negara, tetapi menjadi tanggung jawab individu sebagai orang yang beragama. Karena semua yang kita jalani dalam kehidupan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah oleh masing-masing orang. Dalam al-Quran dijelaskan bahwa kita tidak akan menanggung dosa orang lain. Ketika kita meyakini sebuah agama, dan kita yakin bahwa nilai-nilai agama yang kita anut adalah benar dan bisa menjadi pedoman hidup kita, saya kira, sebagai individu dengan kesadarannya, niscaya akan mengamalkan nilai-nilai agama yang diajarkannya.

Di negara-negara yang berlandaskan agama, atau daerah dengan aturan Islam seperti Aceh, misalnya, seringkali meminggirkan kaum perempuan. Menurut Anda, apakah perempuan lebih diuntungkan berada di bawah rezim sekular atau di bawah negara dengan syariat Islam?

Kenyataan yang terjadi memang kerap kali perempuan menjadi obyek dari suatu aturan publik, meskipun pada kasus tertentu saya kira tergantung pada paradigma apa yang kita gunakan. Kalau kita berangkat dari kasus Aceh, dan ini saya katakan di mana-mana termasuk ketika evaluasi satu tahun tsunami, bahwa Aceh memang sudah memiliki perda syariat Islam, tetapi substansinya menurut saya belum islami. Dengan peraturan daerah (*qânûn*) yang katanya berlandaskan syariat Islam, ternyata belum menyelesaikan persoalan kemanusiaan di Aceh. Angka kematian ibu dan anak balita cukup

tinggi di Aceh, indeks pembangunan manusia (IPM) tidak lebih baik dari provinsi lain, begitu juga kemiskinan dan lain-lain. Hukuman cambuk bagi orang yang berjudi dan berzina ternyata juga tidak mengurangi tingkat korupsi bagi dana bantuan korban tsunami. Apakah syariat Islam di Aceh memiliki aturan hukum bagi dana bantuan tsunami yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada publik? Padahal jelas-jelas korupsi itu dilarang syariah. Apakah adil? Apakah islami?

Saya belum menemukan konsep mengenai bentuk negara yang ideal dan demokratis yang digambarkan dalam al-Qur'an maupun hadis. Yang ada adalah Islam memberikan nilai-nilai universal sebagai panduan moral bagi kehidupan manusia. Munculnya perdebatan tentang perlu atau tidaknya Islam masuk ke dalam sistem kenegaraan sangat tergantung pada cara pandang umat Islam itu sendiri dalam memahami Islam... Yang terpenting adalah substansinya bahwa nilai-nilai Islam dapat dijalankan dalam seluruh kehidupan, tanpa harus dilegal-formalkan menjadi aturan publik.

Islam, menurut saya, harus diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan syariat Islam, sekali lagi, tanpa harus diformalkan menjadi aturan negara. Ketika kita meyakini bahwa Allah Maha Tahu, seharusnya tidak akan terjadi korupsi. Karena meskipun tidak terlihat oleh KPK atau orang lain, Allah melihat gerak langkah apapun dari hamba-Nya. Begitu juga hati nurani kita sebagai orang yang beriman, meyakini dan bahwa perbuatannya harus dipertanggungjawabkan, semestinya siapapun yang menyalahgunakan dana publik untuk kepentingan dirinya atau keluarganya atau kelompoknya maka harus dikembalikan ke kas negara.

Jika keadaannya sudah teramat memprihatinkan, kemudian apa yang mau ditata, undang-undangnya atau orangnya? Kalau mau menata perilaku orangnya, kita sudah punya perangkat hukum yang seharusnya mampu menegakkan hukum. Hukum berlaku bagi siapapun dan harus ditegakkan di negara manapun. Komitmen ini harus dimulai dari atas dulu, pimpinan-pimpinannya dulu. Namun ketika mereka mensahkan syariat Islam sementara di sisi yang lain mereka masih menunjukkan perilaku yang tidak islami, menurut saya, tidak ada artinya. Yang ada adalah ketidakadilan dan diskriminasi, karena hanya tukang ojek atau tukang becak yang bermain judi yang ditangkap dan dicambuk di depan umum. Rakyatnya mendapat hukuman dan dipermalukan ketika melakukan kesalahan, sementara para pemimpin dibiarkan menikmati korupsi. Ini sangat tidak adil. Lalu di mana substansi Islamnya? Jadi, sepertinya hanya memformalkan simbol-simbol Islam, tanpa ruh. Menurut saya, formalisasi syariat Islam yang hanya mementingkan simbol yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum justru bertentangan dengan tujuan pembentukan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).

Belum lagi soal pasal yang menjelaskan tentang kecurigaan kepada orang yang tengah berkhalwat. Di dalam eksekusi hukum Islam, klausul hukum yang berisi dugaan, kecurigaan dan prasangka tidak bisa dijadikan sebagai bukti hukum. Dalam hal ini, Nabi bersabda: "tinggalkan hal-hal yang meragukan". Perda Tangerang dapat dijadikan contoh. Ketika itu seorang guru SD ditangkap karena dikira sebagai pelacur, lantaran sedang menunggu bis/angkot di tempat yang biasa para pekerja seks komersial (PSK) mangkal. Dalam pengadilan dia secara jelas memberikan kesaksian bahwa dirinya bukan pelacur, suaminya juga memberikan pernyataan bah-

wa ia betul-betul istrinya sedang menunggu kendaraan pulang, namun keputusan pengadilan, kalau tidak salah, tetap menghukumnya dengan meminta tebusan kepada suaminya sebesar Rp. 300 ribu. Kemudian lantaran tidak punya uang ia memilih dipenjara 3 hari. Apakah ini adil?

Islam datang awalnya sebagai liberasi atas masyarakat Arab, namun kenyataanya rezim-rezim yang mengatakan dirinya Islam, seperti Taliban, atau aturan perda syariat, ternyata tidak menampilkan liberasi sebagaimana Islam awal. Yang jadi pertanyaan kemudian, jangan-jangan syariat Islam memang bermasalah bagi zaman yang sudah berubah. Bagaimana Anda memandang persoalan ini?

Menurut saya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan dengan *syariat* Islam. Karena syariat Islam adalah hukum atau aturan yang dibuat Allah untuk mengatur kemaslahatan umat manusia. Tetapi yang bermasalah adalah manusianya, atau orang yang mempolitisasi syariat Islam untuk kepentingan politiknya. Sementara perda syariah atau qanun adalah hukum yang dibuat manusia, itu pun sejauh tidak bertentangan dengan *maqâshid al-syarî'ah*, untuk kemaslahatan umum, maka tidak ada masalah. Perda syariah bisa menjadi masalah jika tujuannya untuk

Hubungan antara agama dan negara, meskipun tidak dijelaskan secara utuh di dalam Islam tetapi secara khusus mengenai dasar-dasar pemerintahan disinggung dalam al-Qur'an, di antaranya dalam al-Qur'an surat 4, An-nisa ayat 58-60, berisi mengenai mandat (*amanah*) dan keadilan yang harus ditegakkan bagi seorang pemimpin kepada manusia secara keseluruhan tanpa membedakan agama, keturunan dan ras.

kepentingan politik, bukan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Kita harus melihat latar belakang mengapa mereka menghendaki adanya perda syariat Islam. Dan kita juga harus membedakan antara Islam sebagai ideologi politik dengan Islam sebagai sebuah keyakinan. Menurut saya keduanya berbeda. Sah-sah saja menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi politik tetapi jangan paksakan menjadi ideologi negara di Indonesia.

Mereka menghendaki pemurnian pemahaman al-Quran dan Hadits. Persoalannya adalah tidak semua teks al-Quran dan Hadits bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita. Sebab teks-teks tersebut terlebih dahulu membutuhkan penjabaran atau penjelasan yang disesuaikan dengan konteks zamannya. Pemurnian terhadap teks al-Quran dan Hadits acap kali hanya dilihat secara tekstual, belum memperhatikan pada substansi yang dikehendaki oleh teks tersebut. Kalau kita berbicara sebagaimana yang dikehendaki oleh teks, harusnya memperhatikan juga kronologi dan sebab-sebab mengapa sebuah teks diturunkan, yang kita kenal dengan *asbâb al-nuzûl* untuk al-Quran atau *asbâb al-wurûd* untuk Hadits. Lalu teks-teks ini pun bentuknya bermacam-macam, ada yang *qath'î* dan ada yang *zhannî*. Teks yang *qath'î* ini tidak bisa ditafsirkan karena dari segi ungkapannya sudah sangat jelas. Sementara itu, teks yang bersifat *zhannî* bersifat dugaan, ini yang kemudian bisa ditafsirkan. Karena dari sifat teksnya sendiri mengandung arti ganda bahkan bermacam-macam, sehingga pemahaman orang juga berbeda. Ulama membatasi hanya teks yang *zhannî* inilah yang menjadi lahan ijtihad bagi ahli fikih atau ahli tafsir untuk melakukan penfasiran maupun membuat penjelasan-penjelasan mengenai apa yang dikehendaki dari substansi teks ini.

Ketika kita berusaha menghidupkan kembali semangat liberal, ternyata pandangan sebagian orang tentang konsep liberalisme sangat negatif. Liberalisme dianggap sebagai sesuatu yang buruk karena dianggap dari Barat. Bagaimana tanggapan Anda tentang konsep liberalisme?

Kita seringkali terperangkap dengan perdebatan istilah-istilah asing. Termasuk kasus fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan liberalisme ini. Apa lacur, seringkali umat Islam pun mengidentikkan Islam dengan istilah Arab. Akibatnya, yang bukan berasal dari Arab seolah dianggap bukan Islam. Begitupun dengan istilah liberalisme. Kata ini memang berasal dari bahasa Inggris, sama halnya dengan sekularisme, yang bukan bahasa Arab tetapi bukan berati harus diharamkan. Bahwa Islam diturunkan di Arab saya sepakat. Tetapi, kemudian nilai-nilai Islam sudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi budaya di berbagai negara belahan dunia di mana Islam berkembang. Sehingga Islam pun ada di mana-mana.

> Saya setuju agama sebagai institusi dipisahkan dari negara. Tetapi ketika agama sebagai keyakinan, sebagai jalan hidup (*way of life*) manusia menuju keridlaan Tuhan, secara spirit, substansi, keduanya (agama dan negara) tidak bisa dipisahkan.

Liberalisme sama seperti istilah jender yang juga berasal dari Barat. Tetapi jangan salah, ketimpangan jender adalah bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga substansi dari gerakan feminisme yang mengusung kesetaraan jender menjadi perjuangan yang harus ditegakkan dalam Islam. Berpikir jender berarti menghendaki ditegakkannya keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi bukan istilahnya yang harus kita permasalahkan, apakah berasal dari

Barat atau Timur, melainkan substansinya bahwa jender adalah alat analisa untuk membedah berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Sehingga hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Istilah jender memang tidak ada dalam al-Quran, tetapi substansinya untuk menegakkan keadilan jender sangat dianjurkan dalam al-Quran. Bahkan berapa puluh kali kata adil dan *awsath* disebutkan dalam al-Quran.

Terkait dengan liberalisme, Anda dikenal sebagai tokoh NU yang cukup vokal menyuarakan isu jender dan gagasan feminisme. Menurut Anda, bagaimana gerakan feminis Muslim menghadapi suatu perubahan yang mendasar dari pola hubungan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik?

Mungkin ada situasi di mana secara turun-temurun masih mengidolakan bahwa laki-laki paling kuat, cerdas, dan pintar. Ini kultur yang diterima secara turun-temurun atau *taken for granted*. Tetapi faktanya banyak juga perempuan yang pintar dan cerdas yang mempunyai kemampuan yang tidak kalah dengan laki-laki. Lantas, apakah kemudian perempuan tidak boleh memahami teks-teks Islam dengan interpretasi yang baru dan memperbaharui tafsir-tafsir lama dengan tafsir yang lebih adil untuk perempuan?

Fakta menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan sudah menjadi budaya yang turun-temurun, sehingga tidak gampang untuk mengubahnya. Misalnya, ada sebuah keluarga yang mempunyai anak laki-laki dan perempuan dan secara ekonomi pas-pasan, sehingga hanya mampu membiayai satu anaknya untuk bersekolah. Kalau kita bicara soal yang ideal, maka seharusnya dua-duanya sekolah. Tapi kondisi biaya tidak memungkinkan untuk

bisa menyekolahkan keduanya. Kalau mau *fair* tentu harus dilihat siapa yang lebih pintar atau siapa yang lebih berpotensi untuk disekolahkan. Tetapi pilihan masyarakat, meskipun yang lebih berpotensi anak perempuan, seringkali lebih mengutamakan anak laki-laki. Situasi seperti ini masih banyak di masyarakat. Untuk menyekolahkan anak perempuan pun tidak gampang, butuh pemahaman dan penyadaran terhadap orang tua. Jadi kalau kita bicara soal keadilan jender lingkupnya sangat luas, tidak hanya dengan urusan di rumah tangga tetapi termasuk juga urusan di ruang publik.

> Sepengetahuan saya Islam tidak memiliki konsep yang baku mengenai negara. Kalaupun ada lebih berupa konsep syariat Islam yang dipolitisasi ke dalam sistem kenegaraan. Apalagi kalau yang dimaksudkan kampanye negara Islam itu dalam konteks untuk menggantikan Pancasila sebagai landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), saya sangat tidak setuju. Sebab, Pancasila sebagai ideologi negara sudah final, tidak perlu dipertentangkan dengan Islam. Karena substansinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Saya sendiri ketika menjelaskan atau menyadarkan tentang ketimpangan jender memilih untuk tidak menyerang tradisi (agama dan adat), sehingga responnya cukup baik. Jadi saya kira tergantung bagaimana cara kita memberikan pemahamanan, agar tidak dikesankan menyalahi adat. Meskipun tujuan kita hendak mengubah adat yang merugikan perempuan. Tetapi caranya jangan menyerang, jangan menyalahkan orang tua, atau kepala adat, tetapi ajaklah mereka berdialog, berikan argumentasinya kalau memang ada tradisi yang merugikan pihak-pihak tertentu, apakah adat ini harus tetap kita pegang atau ditinggalkan? Oleh karena itu, kita

harus melakukan sosialisasi, sehingga tumbuh kesadaran dalam masyarakat bahwa meningkatkan pendidikan bagi perempuan adalah kewajiban bagi setiap keluarga.

Bagi saya proses itu sangat penting. Apapun yang disosialisasikan, proses menjadi strategi yang harus diperhatikan. Jangan sampai masyarakat menerima informasi yang tidak utuh, karena bagi orang awam akan membingungkan, sehingga yang terjadi kemudian adalah penolakan. Oleh karena itu, memang harus ada strategi untuk upaya pembebasan dengan proses penyadaran dan dialog, bukan proses yang sebaliknya, ofensif, dengan penyerangan.

Dengan bergulirnya reformasi, secara politis perempuan lantas diberikan affirmative action *dengan jatah kuota sebanyak 30%. Menurut Anda, apakah itu satu capaian baru dan merupakan angin segar bagi peran politik perempuan?*

Berangkat dari pengalaman pemilu yang lalu, setelah UU pemilu disahkan pada tahun 2003, pemberian kuota 30% untuk perempuan itu menurut saya masih setengah hati. Karena redaksinya "dapat mengajukan". Pernyataan tersebut lemah, secara hukum tidak mengikat, karena tidak disertai sangsi. Setiap partai politik "dapat mengajukan calon perempuan sebanyak 30%". Di sini tidak ada sangsi apapun bagi partai yang tidak memenuhi kuota tersebut. Jadi, persoalannya adalah, *pertama* tidak adanya sangsi. Karena itu, menurut saya, kalimat tersebut harus direvisi dengan pernyataan yang lebih tegas bagi partai untuk memberikan kuota kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif. Misalnya, setiap partai harus memperjuangkan calon perempuan sebanyak 30% menjadi anggota legislatif, jika tidak dilakukan maka partai yang

bersangkutan akan dicabut mandatnya atau tidak boleh mengikuti pemilu. *Kedua*, dari hasil pemilu 2004, perempuan hanya, kalau tidak salah, terwakili kurang lebih 11%. Angka 11% sebenarnya tidak bergerak dari angka pada pemilu-pemilu yang lalu. Dalam sejarahnya di Indonesia paling tinggi keterwakilan perempuan hanya 12%. Oleh karena itu, menurut saya, perlu dianalisis dari sisi undang-undangnya.

Persoalan lain adalah soal budaya patriariki yang masih sangat kuat di masyarakat. Di samping persoalan kesiapan perempuan sendiri juga belum maksimal. Tapi seandainya ada upaya yang serius, misalnya, dengan merevisi undang-undang dan menyiapkan kandidat secara maksimal, mudah-mudahan kuota seperti yang diharapkan dapat dicapai pada pemilu 2009. Hal penting yang harus dilakukan dari sisi perempuan adalah penguatan atau *capacity building* bagi setiap individu perempuan yang akan masuk partai. Meskipun pada kenyataanya yang laki-laki juga tidak lebih baik ketimbang perempuan – tetapi mereka menang hanya karena lebih dahulu menduduki posisi pimpinan partai, misalnya, sehingga bisa menentukan pilihan.

> Menurut saya, formalisasi syariat Islam yang hanya mementingkan simbol yang mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum justru bertentangan dengan tujuan pembentukan syariat Islam (*maqâshid al-syarî'ah*).

Di satu sisi, ada budaya patriarki yang sangat mengakar, yang berimbas pada ketertindasan perempuan. Di sisi lain, negara telah memberikan affirmative action *untuk peran politik perempuan. Menurut*

Anda, apa peran yang harus dimainkan civil society *demi menciptakan tatanan masyarakat yang setara dan berkeadilan?*

Menurut saya, ketiga institusi, domain eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai lembaga negara, dan *civil society* harus bisa bersinergi, bersama-sama membangun budaya bangsa. Menurut saya, dalam konteks keindonesiaan ketiga institusi tersebut bisa bersinergi, bahkan harus bersinergi, kalau memang kita menghendaki sebuah tatanan bangsa yang ideal. Bagi kita yang di legislatif, misalnya, tidak bisa berpikir ideal hanya dari perspektif legislatif, tapi juga harus melibatkan perspektif eksekutif, dan juga yudikatif. Demikian juga halnya dengan masyarakat, mereka juga mempunyai perspektif yang ideal mengenai tatanan bangsa yang damai dan adil. Oleh karena itu, menurut saya, harus di-*sharing*.

Dalam teori advokasi untuk terjadinya sebuah perubahan kebijakan, antara *content* (isi kebijakan/undang-undang), struktur (para pembuat kebijakan/legislatif dan eksekutif maupun aparat penegak hukum) dengan *culture* (masyarakat/*civil society*) seperti segitiga yang saling terkait, yang ketiga sisinya menempati posisi dengan kekuatan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi. Dalam hubungan tersebut, semua sisi harus bergerak melakukan peran yang saling mendukung satu sama lain untuk terjadinya perubahan. Jadi, ketika *civil society* mempunyai kepentingan yang ingin mereka perjuangkan, misalnya, bagaimana masyarakat lebih sejahtera, bagaimana mereka yang miskin mendapatkan keadilan, dan seterusnya, maka proses ini perlu ada yang memperjuangkan aturan-aturan hukumnya, yang disebut perubahan *content*. Karena yang membuat aturan adalah fungsi legislatif, maka *civil society* berkepentingan untuk menyuarakan aspirasinya kepada legislatif. Lalu legistalif membuat aturan yang sesuai dengan prinsip umum yang tidak bertentangan

dengan Pancasila. Dan legislatif tidak hanya mendengar masukan dari masyarakat melainkan juga meminta masukan kepada pelaksana atau dalam hal ini eksekutif, untuk mengetahui bagaimana tingkat implementasinya.

Tidak hanya berhenti pada tingkat legislasi dan implementasi, tetapi juga sampai pada tingkat pengawasan. Jadi, lagi-lagi, ketiganya juga harus bersinergi. Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh legislatif terhadap eksekutif atau *civil society* terhadap kerja legislatif, tetapi masing-masing harus saling mengontrol untuk melakukan pengawasan. Masyarakat sebagai kelompok mayoritas, menurut saya, merupakan mitra bagi aparat pembuat aturan dan aparat pelaksana kebijakan. Selain itu, *civil society* juga mempunyai kemampuan mengawasi, menjadi *pressure group*. Mereka menjadi semacam kelompok yang bisa mengawasi ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan di eksekutif maupun di legislatif. Ketiga domain ini memang harus bergerak sama-sama.

Salah satu kasus yang menarik tentang perdebatan yang terjadi di parlemen adalah perdebatan tentang RUU APP. Di sana ada tarik menarik, ada kelompok Islam yang moderat-liberal melawan kelompok Islam konservatif-fundamental. Dan sayangnya, salah seorang anggota parlemen perempuan justru demikian "getol" mendukung RUU APP, padahal sudah jelas banyak ditentang aktivis atau kalangan perempuan karena merugikan kaum mereka sendiri. Bagaimana Anda memandang tarik menarik ini?

Menurut saya, redaksi hukum draft pertama RUU APP membingungkan dan banyak klausul yang multitafsir. Satu contoh kekonyolan RUU APP versi pertama adalah adanya pasal yang kurang

lebih berbunyi: "Barangsiapa melakukan tindakan atau gerak-gerik yang menyerupai masturbasi atau onani maka dikenakan hukuman minimal sekian tahun dan maksimal sekian tahun, minimal denda sekian rupiah, dan maksimal denda 200 juta." Jadi kata-kata "menyerupai" berpotensi besar menjadi redaksi yang multitafsir. Akan sangat berbahaya jika sebuah aturan hukum mengandung redaksi yang berupa dugaan dan prasangka. Selain itu, substansinya yang semula bertujuan mengatur supaya gambar-gambar porno itu tidak dengan mudah diakses oleh anak-anak, meluas menjadi tidak hanya terhadap gambar porno, VCD porno, melainkan juga soal perilaku. Sehingga tidak mengherankan apabila bermunculan resistensi yang kuat dari masyarakat terhadap RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi.

Pornoaksi dilarang agama, saya sepakat. Sehingga hal tersebut harus dilarang dan dibuatkan aturannya. Namun, sayangnya, darft RUU APP tersebut banyak yang tidak tepat, sehingga harus dirumuskan kembali substansinya. Padahal substansi yang kita inginkan adalah bahwa gambar porno tidak lagi bisa diakses oleh anak-anak sehingga produksi gambar porno itu harus bisa dikendalikan. Persoalan ini memang sangat kompleks. Dari sudut pandang agama, pornografi harus dihindari, bahkan ditolak oleh semua agama. Namun dari sudut pandang kesenian, memandang sesuatu yang dianggap sebagai pornografi bisa menjadi objek seni. Oleh karena itu, harus dirumuskan batasan-batasannya secara jelas sehingga tidak saling merugikan dari berbagai kepentingan. Saat ini saya dengar sudah ada revisi yang lebih baik dari komisi delapan di DPR RI.

Indonesia sejak awal berdirinya terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat dengan latar belakang agama dan kepercayaan yang berbeda, bahkan kita mempunyai ratusan suku dan budaya. Sehingga sebagian kalangan mengatakan bahwa pluralisme merupakan sebuah keniscayaan dan harus menjadi prinsip yang mendasari kehidupan bersama setiap masyarakat. Tapi ada juga kelompok yang menganggap bahwa pluralisme merupakan produk Barat – dengan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat. Bagaimana Anda memahami pluralisme?

Lagi-lagi, ini soal istilah. Menurut saya hal penting yang harus diperhatikan adalah hindari menulis atau mengungkapkan kata-kata asing tanpa ada penjelasan. Persoalan seperti ini akhir-akhir ini menjadi sangat sensitif dan dampaknya sangat serius. Sebab, semua yang berasal dari Barat, non-Muslim dan produknya dianggap menyesatkan. Kalau kita lihat dari karakter bangsa Indonesia, seperti yang Anda bilang tadi, bahwa bangsa Indonesia sejak didirikan sudah sangat beragam baik bahasa, pulau, budaya, suku, dan agama. Keragaman ini kemudian diikat rekat. Ibaratnya sebuah mozaik, dengan warna-warni dan bentuk yang beragam, kemudian direkatkan menjadi satu bernama Indonesia. Semua bersepakat bahwa kita menjadi bagian dari bangsa Indonesia.

Kemudian muncul persoalan karena ada kelompok yang ingin mendominasi kelompok yang lain, dengan mengklaim kelompoknyalah yang paling benar, sementara kelompok lain dianggap salah. Langkah ini, menurut saya, tidak strategis bahkan keluar dari *frame* Indonesia yang jelas-jelas sejak didirikan mengakomodir keragaman. Inilah yang kemudian memecah-belah untaian mozaik yang warna-warni dari bangsa ini. Ideologi politik boleh berbeda, apapun partainya boleh dikembangkan. Tetapi, semua itu harus

dalam kerangka dan tujuan mengukuhkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika di antara mereka atau salah satu kelompok mereka mengatakan bahwa tidak penting dengan jumlah provinsi yang dimiliki menjadi berapa, tapi yang terpenting adalah Indonesia menjadi negara Islam, maka saya mengatakan kepada mereka bahwa ideologi tersebut berbeda dengan ideologi kita sebagai bangsa Indonesia. Saya sebagai seorang Muslim yang terlahir sebagai bangsa Indonesia, memiliki keyakinan bahwa mempertahankan bangsa kita adalah wajib hukumnya. NKRI dengan landasan ideologi Pancasilanya sudah final. Dan kalau kemudian kita berpikir bahwa karena kita mayoritas Muslim maka semua orang harus diislamkan, menurut saya, justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang dicontoh Rasulullah ketika memimpin Madinah.

Sebagian kalangan mengganggap pluralisme, dengan mengacu pada fatwa MUI, identik dengan sinkretisme, karena mencampur-adukkan, bahkan menyamakan agama. Beberapa kalangan lain juga menganggap pluralisme sebagai relativisme, karena merelatifkan semua nilai kebenaran agama. Menurut Anda seperti apakah paham ini sebenarnya?

Saya melihat pluralisme sebagai upaya menghargai perbedaan. Pluralisme sebagai alat untuk melihat bahwa keyakinan orang berbeda-beda, yang tidak bisa diseragamkan. Karena itu, di sini harus dibedakan antara pluralisme dengan upaya mencampuradukkan keyakinan. Semua orang berhak memiliki keyakinannya masing-masing, bahwa apa yang diyakininya adalah berbeda dengan keyakinan orang lain, itulah kemajemukan atau pluralitas.

Yang harus disadari adalah meskipun kita memiliki keyakinan yang paling benar menurut kita, tetapi tidak boleh menyalahkan keyakinan orang lain. Bahkan kita harus menghargai terhadap pilihan keyakinan atau agama orang lain. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk masuk agama kita, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus menghargai dan menghormati keyakinan mereka. Dengan menghormati pilihannya, kita bisa membangun relasi kemanusiaan yang merupakan prinsip dasar kita semua untuk berbangsa dan bernegara. Meskipun keyakinan kita berbeda, kita bisa mengadakan kegiatan bersama. Kita tidak ada masalah dengan kelompok yang berbeda, sejauh kita saling menghormati dan menghargai terhadap keyakinan yang dianut orang lain.

Permasalahan yang sering terjadi adalah mereka (kelompok yang tidak mengakui pluralitas) pada akhirnya memberangus hak orang lain dengan berlandaskan keyakinan ajaran yang mereka yakini. Kalangan fundamentalis, misalnya, akan mengatakan bahwa Islam mempunyai kebenaran yang ultim dan pasti. Kepercayaan ini justru membuat mereka tidak toleran, jangankan terhadap agama yang berbeda, dalam kalangan internal agama mereka sendiri yang berbeda (paham) pun tidak toleran. Ahmadiyah mereka usir, ekspresi ibadah Usman Roy juga ditanggapi dengan penolakan karena dinilai sebagai penganut ajaran sesat, juga komunitas Eden yang mendapat perilaku tak simpatik. Bagaimana Anda melihat kenyataan yang seperti ini?

Saya tentu saja prihatin melihat kondisi itu. Satu contoh, kantor Ahmadiyah di Parung itu dirusak. Karena dianggap menyim-

pang dari ajaran Islam sebagaimana diyakini kelompok mereka yang mayoritas, sehingga Ahmadiyah boleh dirusak. Juga umat dari agama lain yang tidak boleh mendirikan rumah ibadah atau malah rumah ibadah mereka dirusak. Celakanya, mereka melakukan itu dengan mengatasnamakan jihad di jalan Tuhan. Apakah jihad memang harus dilakukan dengan merusak dan membakar rumah ibadah? Apakah membakar gereja dan merusak fasilitas atau mengusir jemaat Ahmadiyah itu dibenarkan dalam Islam? Saya kira, Rasulullah pun bukan hidup dalam situasi di mana masyarakatnya semua memeluk Islam, tetapi beliau hidup di tengah masyarakat yang juga beragam. Nyatanya beliau menghargai kelompok-kelompok yang berbeda tersebut.

Dan bukankah al-Quran melarang pengrusakan terhadap rumah ibadah? Artinya, kita sudah diberi peringatan bahwa meskipun agama dan keyakinan kita berbeda tapi harus ada toleransi, ada batasan-batasan di mana kita bersatu dan ada batasan di mana kita harus berbeda. Kalau kita berangkatnya dari mencari-cari dan menegaskan perbedaan maka akan susah untuk mencapai kehidupan yang damai. Tetapi kalau kita berangkat dari persamaan, tanpa bermaksud menyatukan akidah masing-masing, maka akan dengan mudah bagi kita untuk berinteraksi dan saling menghargai. Menurut saya, dalam konteks global seperti sekarang ini tidak ada orang yang bisa hidup hanya dalam komunitasnya saja. Cepat atau lambat, sering atau jarang, kita akan berinteraksi dengan kelompok lain. Belakangan ini memang saya sangat prihatin dengan situasi-situasi di mana kelompok yang mengaku paling benar melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok lain yang berbeda.

Menurut Anda, bagaimana cara menciptakan perdamaian yang paling punya risiko minimal, dan bagaimana cara memandang Islam yang esensial itu?

Menurut saya harus ada dialog. Dibutuhkan proses penyadaran bersama. Sebuah proses di mana setiap orang harus mengedepankan nilai-nilai kesamaan di antara kita maupun dengan mereka. Misalnya, saya dan Anda pasti ada perbedaannya, dalam hal apapun. Tetapi kalau kita mencoba melihat kesamaan-kesamaanya, satu sama lain tentu saja terdapat kesamaannya. Kesamaan-kesamaan tersebut harus kita kembangkan dalam pergaulan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bahwa hanya karena ia berbeda dalam satu hal dengan kelompok tertentu, kemudian tidak mau menunjukkan sikap solidaritas, meskipun kelompok tersebut sedang tertimpa musibah. Padahal, jika kita mampu melihat sisi lain dari kelompok yang berbeda, tentu kita akan bersikap empati. Coba kita mengandaikan yang jadi korban adalah kita, tentu kita mengharapkan ada bantuan. Dalam keadaan kondisi terpaksa ini, mungkin kita tidak akan memilih dari manapun bantuan itu datang. Dengan melihat kesamaan-kesamaan kita dengan yang lain itulah maka akan muncul sikap saling memahami dan akan tumbuh rasa solidaritas yang saling menyayangi.

Apa harapan dan saran untuk membangun Indonesia di masa mendatang?

Menurut saya, sebetulnya kita butuh dialog antarkelompok, antaragama, dan antarkomunitas secara intensif. Karena dialog akan sangat besar manfaatnya. Dengan dialog, orang yang tadinya curiga

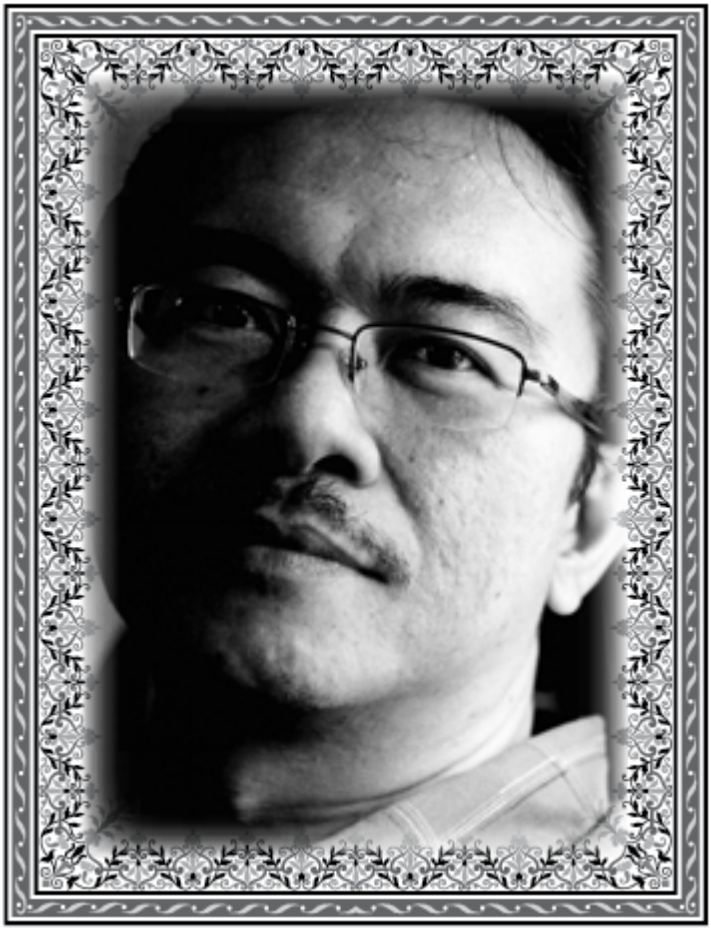
menjadi maklum. Atau, orang yang tadinya tidak mengerti satu sama lain kemudian menjadi saling memahami. Sehingga mereka yang tadinya tertutup, dengan adanya dialog menjadi lebih terbuka. Mereka yang sebelumnya pongah kemudian bisa introspeksi, dan sebaginya.

Intensitas dialog ini, menurut saya, harus ditingkatkan. Dimulai oleh pemimpin-pemimpin komunitas kemudian dilanjutkan dengan seluruh anggota komunitas masing-masing yang ada di masyarakat secara lebih luas, agar satu sama lain dapat memaknai nikmatnya perbedaan. Dengan menikmati perbedaan, maka dengan sendirinya akan tumbuh rasa saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat hidup rukun dan damai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 14 Juni 2007

Percakapan dengan

Martin Lukito Sinaga



Martin Lukito Sinaga, seorang pendeta yang aktif dalam gerakan dialog antariman. Ia pengajar di Sekolah Tinggi Teologi (STT), Jakarta, yang menempuh studi teologi di Jakarta, Hamburg (Jerman), dan Utrecht (Belanda).

Sekularisme merupakan gerakan untuk mengurangi harta gereja, yang dalam perkembangan sejarah berikutnya berarti juga berkurangnya penjelasan agama terhadap hidup. Di alam sekular, sebenarnya agama tidak kalah, cuma lebih menemukan identitasnya sebagai pemberi makna. Agama mendefinisikan dirinya sebagai *civil society*, bukan *political society*. Dalam negara sekular, liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama, tanpa harus memutlakkan pikiran-pikiran rasional kita. Komitmen moral dan sosial harus dimiliki oleh orang yang bersikap liberal dalam beragama. Dan Pancasila sebagai prinsip yang inklusif dan non-diskriminatif menjadi obsesinya. Di situlah alamat jika toleransi di Indonesia mau lebih afirmatif dan protektif terhadap minoritas.

Sekularisme sering dipahami sebagai gagasan anti-agama. Hal itu tergambar setidaknya dari gagasan privatisasi yang melekat pada sekularisme, yang menyebabkan mulai terpinggirkannya fungsi dan peran agama di wilayah publik atau dalam kehidupan bermasyarakat (the decline of religion). *Apa pandangan Anda perihal sekularisme?*

Kita harus mengurutkannya terlebih dahulu sebelum menyimpulkan bahwa memang sekularisme adalah upaya peminggiran agama. Dalam sejarah tradisi Kristen, sekularisme pada awalnya diartikan sebagai pengembalian harta gereja kepada masyarakat. Dulu, gereja mempunyai banyak sekali tanah yang diberikan oleh masyarakat, semacam tanah *wakaf* dalam tradisi Islam. Sekarang, seiring gerakan sekularime, masyarakat meminta kembali tanah yang semula diwakafkan ke gereja itu untuk menjadi hak miliknya. Tegasnya, sekularisme berarti suatu gerakan untuk mengurangi harta gereja, yang selanjutnya, dalam perkembangan sejarah, berarti juga berkurangnya penjelasan agama terhadap hidup. Inilah yang menjadi penopang negara modern. Penopang *nation-state*. Di dalam *nation-state*, sebuah sistem pemerintahan tidak lagi membutuhkan agama sebagai legitimasinya. Habermas mengatakan bahwa masyarakat dan negara, dalam sistem sekular, pada dirinya sendiri cukup legitim. Tidak perlu mendasarkan diri kepada Tuhan dan lain sebagainya.

Studi-studi belakangan, pasca runtuhnya tembok Berlin dan ketika Paus begitu aktif di Polandia, serta ketika kelompok-kelompok fundamentalisme Kristen terus-menerus memantau konstitusi Amerika, memperlihatkan perubahan yang begitu berarti. Dalam kasus aborsi, misalnya, tampak bahwa lama-kelamaan sekularisme kerap diperhadapkan dengan suara agama. Jadi, privatisasi agama

ditolak. Agama bukan hanya menjadi masalah privat atau bahkan telah tergerus, melainkan hendak menemukan tempatnya secara struktural. Agama menjadi suatu institusi yang memberi makna mengenai persoalan ultim, persoalan-persoalan yang menyangkut identitas manusia, persoalan-persoalan yang terkait dengan tujuan hidup. Maka kini tidak tepatlah teori yang mengatakan bahwa sekularisme meniscayakan privatisasi agama.

Di dalam alam sekular, sebenarnya agama tidak kalah, cuma lebih menemukan identitasnya sebagai pemberi makna. Ketika agama memikirkan hal-hal ultim, seperti identitas manusia, ternyata juga tetap mempunyai dampak ke publik. Dampak itu terlihat jelas misalnya ketika agama memberi pesan tentang martabat manusia, maka tindak aborsi jadi bermasalah, karena di dalam undang-undang (UU) aborsi juga terdapat soal martabat, soal boleh atau tidak janin dibuang. Debat terakhir Habermas dan Paus sangat jelas dalam konteks ini. Paus mengatakan bahwa kalau Anda ingin memperbaiki masyarakat maka dibutuhkan komitmen. Komitmen agama mengenai martabat manusia itu yang membuat orang berani memperjuangkan keadilan sosial. Keyakinan bahwa manusia adalah gambar Allah, sebagaimana disebutkan di dalam Kristen, yang mungkin juga sama dengan *kalîmatullâh* dalam tradisi Islam, membuat orang jadi menghargai hak asasi orang lain. Kini, agama memang tahu bahwa dia tidak bisa lagi menentukan semua hal. Tetapi karena agama mempunyai dimensi yang luas dan dalam, maka soal-soal praktis pun pada akhirnya akan tetap dicampurinya, meski dalam cara dan kadar-kadar yang lebih terbatas.

Dalam sejarahnya, banyak teolog yang menentang gagasan sekularisme disebabkan oleh pengalaman yang cukup traumatik dalam Kristen atau Katolik. Karena hal demikian inilah, mereka kemudian lebih ramah terhadap sekularisasi ketimbang sekularisme. Menurut Anda pembedaan antara sekularisme dan sekularisasi itu masih relevan atau tidak?

Untuk permasalahan ini, kita harus, pertama-tama, melihat dan membacanya sebagai gejala sosial. Penjelasan akan kedua gagasan itu dapat disederhanakan begini: sekularisasi berarti proses, sedangkan sekularisme berarti hasilnya. Para teolog, seperti Cak Nur atau Harvey Cox, mengatakan bahwa kedua hal itu memiliki persoalannya sendiri-sendiri. Para teolog, yang saya pahami, setuju dengan sekularisasi dengan menganggap bahwa sekularisasi merupakan prinsip di mana harus ada pembedaan antara *Khâliq* dan *makhlûq*, antara pencipta dan ciptaan. Sementara di lain sisi sekularisme ditolak karena mereka berpikir bahwa ada hal-ihwal duniawi yang seolah-olah otonom pada dirinya. Padahal semua ihwal selalu terkait dengan yang ilahi. Jadi, pembedaan sekularisasi dan sekularisme itu sebenarnya hanya pembagian para teolog saja. Tujuannya tak lain adalah mau mengatakan bahwa Tuhan tidak boleh dikeluarkan dari ilmu pengetahuan. Tapi kita tidak perlu ke situ. Pembagian itu hanya berguna untuk memudahkan bahwa sekularisme adalah hasilnya, sementara sekularisasi adalah proses. Namun, jika

> Sekularisme berarti suatu gerakan untuk mengurangi harta gereja, yang selanjutnya, dalam perkembangan sejarah, berarti juga berkurangnya penjelasan agama terhadap hidup. Inilah yang menjadi penopang negara modern.

kita memang mau masuk ke persoalan yang lebih teologis, maka pembagian seperti itu dapat menolong.

Sebelumnya, Anda sudah menyinggung bahwa dalam agama terdapat aspek-aspek yang ultim, yang dapat diterjemahkan di sini sebagai semangat untuk bisa mengubah masyarakat sekitarnya. Ada aspek profetis di situ. Belakangan telaah sekularisme berkembang cukup pesat. Berangkat dari asumsi bahwa karena agama tidak semata-mata baik, tetapi juga dapat menjadi pemicu perpecahan atau konflik sosial, maka harus diprivatkan. Pada sisi lainnya, Jose Casanova berusaha mendeprivatisasinya, dengan alasan nilai-nilai ultim dari agama dapat berperan dan berfungsi luhur di kancah publik. Kami meminta agar Anda menanggapi soal perdebatan privatisasi dan deprivatisasinya Casanova ini.

Casanova juga mengatakan bahwa agama itu tidak mungkin lagi hanya menjadi urusan privat. Namun begitu, kita juga jangan membiarkan agama menjadi kekuatan totaliter, sebagaimana ideologi Marxisme yang lama-kelamaan menjadi agama sebagaimana diperlakukan oleh komunisme. Artinya, agama jangan hanya dipojokkan menjadi, sebagaimana kata Khairil Anwar, manusia dengan kesepiannya, tapi juga jangan menjadi faktor mobilisasi massa. Bagaimana jalan tengahnya? Bagi Casanova, memang betul bahwa agama adalah komitmen individual. Tetapi ketika agama hendak memperjuangkan masalah publik, atau agar agama tidak menjadi totaliter tetapi tetap bisa masuk ke ruang publik, maka cara kerjanya harus diberi syarat. Syarat *pertama* – dia terpengaruh Habermas di sini – adalah harus adanya *open debate*, percakapan terbuka. *Kedua,* agama mesti memahami dirinya sebagai komunitas masya-

rakat, sebagai *civil society*, bukan *political society.* Dan *ketiga*, ketika agama hendak mengajukan prinsipnya ke masyarakat, maka tidak boleh menggerus agama lain, tidak memojokkan minoritas, dan tidak hanya memprioritaskan dirinya. Inilah tiga syarat yang menjadi jalan tengah antara ketegangan privatisasi dan politisasi agama menurut Casanova.

> Liberalisme, menurut saya, adalah suatu sikap kritis terhadap agama, yang justru diperlukan. Dengan demikian, persoalannya adalah bagaimana kita bisa kritis terhadap agama, tetapi tidak perlu memutlakkan pikiran-pikiran rasional kita ... Liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama.

Kalau dikaitkan, adakah paralelisme antara deprivatisasi dengan teologi pembebasan yang pernah terjadi di beberapa negara? Bukankah teologi pembebasan juga memiliki semangat bagaimana mempublikkan agama lewat semangat-semangat profetisnya? Di manakah letak perbedaan di antara keduanya?

Saya kira ya. Di situ memang ada upaya agama untuk keluar dari batas-batas rohani. Namun, yang menjadi persoalan dari teologi pembebasan adalah bahwa dia terlalu cepat memakai kerangka Marxis, sehingga semua masalah selalu disederhanakan menjadi masalah kelas. Padahal mungkin dalam masyarakat-masyarakat tertentu persoalan sebenarnya lebih pada status sosial atau persoalan feodalisme; sementara pada masyarakat lain, mungkin lebih pada kebutuhan mobilisasi sosial. Ada sebuah contoh yang sangat menarik untuk hal ini. Baru-baru ini, awal tahun 2007, Paus mengadakan perjalanan ke Amerika Latin. Dari perjalanan tersebut, Paus menemukan satu kecemasan yang juga dialami

masyarakat Katolik pada umumnya, yaitu persoalan kondom dan aborsi. Selain itu, Paus juga menemukan permasalahan lain yang sekarang muncul menjadi masalah baru, yaitu kenapa orang-orang Katolik banyak yang berpindah menjadi Protestan. Jutaan orang, kini, meninggalkan gereja Katolik dan masuk ke Protestan. Protestannya bukan seperti gereja saya, Gereja Batak-Simalungun, tetapi Protestan yang disebut Karismatik-Pentakosta, Protestan populer atau agama pop.

Ketika di Amerika Latin banyak orang berubah menjadi Protestan, protestantisme ini sebenarnya mengerjakan apa yang dibayangkan teologi pembebasan. Kenapa menjadi Protestan? Karena orang ingin maju. Ingin memiliki semacam disiplin pertobatan hidup baru. Komunitas-komunitas yang ingin hidup baru berarti ingin keluar dari struktur feodalisme Amerika Latin, struktur gereja dan struktur kekerasan, *violencia*. Struktur di mana minuman keras dan *drugs* menjadi tradisi masyarakat Amerika Latin. Dengan menjadi Protestan, mereka keluar dari semua itu, lalu muncullah semacam kantong-kantong komunitas sukses, kantong-kantong orang yang ingin mengalami mobilitas sosial. Hal itu hanya terjadi setelah mereka menjadi Protestan. Karena di dalam Protestan, Anda harus hidup baru –*born again Christian* – tidak merokok, minum-minum dan main perempuan, sehingga Anda bisa disiplin dan menabung, yang berakibat pada mobilitas sosial. Hal seperti ini kurang didorong dalam Katolisisme di Amerika Latin, karena agama Katolik telah menjadi agama rakyat. Jadi, menurut saya, betul bahwa deprivatisasi agama itu seperti teologi pembebasan, tentunya teologi pembebasan yang lebih kontekstual, tidak sekadar berpakem Marxis.

Ketika kita membincang bentuk-bentuk pembebasan atau kebebasan dalam kaitannya dengan martabat manusia, maka penting, di sini, untuk masuk pada persoalan liberalisme. Celakanya, di Indonesia, liberalisme banyak dipahami masyarakat sebagai paham kebebasan tanpa batas, yang akhirnya memunculkan krisis moral dan sebagainya. Inilah alasan masyarakat resisten terhadap liberalisme. Dalam hal keagamaan, liberalisme seperti apakah yang hendak diupayakan Anda?

Pertanyaan ini memang susah. Kenapa? Karena dalam kekristenan, liberalisme itu sendiri bermasalah. Mengapa bermasalah? Ada dua hal penyebabnya. *Pertama* dan yang paling menohok, yang menimbulkan penolakan terhadap liberalisme, adalah karena ternyata pemikir-pemikir Jerman yang liberal, yang telah melahirkan apa yang disebut "kultur Protestan" itu, akhirnya amat ambisius terhadap budaya Protestan Jerman, sehingga mendukung Hitler. Ada buku tentang teolog-teolog Hitler yang menceritakan tentang teolog-teolog besar di Jerman yang pro-Hitler. Buku itu menceritakan bahwa karena orang liberal yakin pada manusia, pada pikiran, dan kebebasan, jatuhlah mereka pada Hitler. Tersebutlah tokoh-tokoh seperti Gerhard Kittel, Althaus, E. Hirsch dan sebagainya. Kritik juga diutarakan oleh seorang te-

Pluralisme itu, menurut saya, adalah kosa kata sosial, walaupun dibutuhkan suatu sikap teologis untuk mengabsah-kan atau membenarkannya. Sementara jika dimasukkan ke dalam kosa kata epistemologi, kalau relatif itu dilekatkan pada pluralisme, maka di sini memang ada persoalan. Walaupun demikian, menurut saya, hal ini sebenarnya justru menjadi kesempatan bagi agama untuk berpikir ulang."

olog Jerman yang bernama Karl Barth. Barth mengatakan bahwa liberalisme itu tidak kritis terhadap kecenderungan keangkuhan manusia, karena merasa bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menggulirkan proyek kemanusiaan.

Penyebab *kedua* yang menjadikan liberalisme bermasalah dalam Kristen adalah bahwa liberalisme menjadi cikal-bakal kritik terhadap teori pewahyuan kitab suci, karena mengatakan bahwa kitab suci adalah sastra kekristenan. Di samping kedua penyebab yang ditemukan pada Protestan itu, gereja Katolik jauh lebih kritis lagi terhadap liberalisme. Padahal sebenarnya liberalisme, menurut saya, adalah suatu sikap kritis terhadap agama, yang justru diperlukan. Dengan demikian, persoalannya adalah bagaimana kita bisa kritis terhadap agama, tetapi tidak perlu memutlakkan pikiran-pikiran rasional kita.

Ringkasnya, dalam sejarahnya, liberalisme itu pernah melahirkan orang-orang yang tidak bisa lagi mengkritik dirinya, sehingga rela menjadi agen-agen agamanya Hitler. Lalu liberalisme juga dulu cenderung menyerang kitab suci dengan mengataknnya sebagai sekadar buku ciptaan manusia. Makanya kemudian, ia jadi bermasalah. Namun, di pihak lain, kita juga butuh liberalisme sebagai upaya menyehatkan agama agar tidak terjebak pada fundamentalisme dan totalitarianisme. Liberalismelah yang dapat menjaga dan mempertahankan kesehatan dan keseimbangan agama.

Bagaimana pandangan Anda terhadap anggapan masyarakat, dalam hal ini masyarakat di negeri ini, bahwa liberalisme cenderung melahirkan manusia-manusia dengan gaya hidup yang permisif — suka hura-hura, minum-minuman keras dan lain sebagainya, yang dapat

menyebabkan masyarakat tercabut keimanannya dan mengalami dekadensi moral?

Saya kira, masyarakat mau tak mau akan melihat itu, karena masyarakat hanya melihat akan yang kasat mata. Persoalan dengan liberalisme adalah sejauh mana modernitas itu boleh masuk pada agama? Liberalisme seolah-olah adalah proyek yang mau mengatakan bahwa agama kami ini adalah modern. Agama kami ini tidak *jumud*, cocok untuk orang modern. Tapi sejauh mana kita mengijinkan modernitas masuk ke dalam agama? Menurut saya, para pengikut liberal, Kristen maupun Islam, harus betul-betul jelas di sini. Jangan seolah-olah seluruh ayat kitab suci dianggap tidak benar kalau tidak cocok dengan hidup modern. Tapi jangan juga kita menghabisi dunia modern dengan doktrin-doktrin lama agama. Jalan tengahnya adalah orang liberal harus memiliki komitmen moral, dan tidak tertutup pada sikap teologis.

> Bagi saya, studi kritis itu baik, asal tahu batasnya. Sebab, jika studi kritis melahirkan klaim teologis atau klaim metafisik seperti dengan mengatakan bahwa alam semata-mata tercipta begitu saja, pernyataan itu akan sama fundamentalisnya dengan mengatakan bahwa semua yang ada dalam kitab suci harus diterapkan. Jangan sampai ahli kritis, membuat klaim yang sama mutlaknya dengan klaim kaum fundamentalis agama.

Dalam konteksnya yang sekarang, kita bisa melihat bahwa orang yang liberal, pada akhirnya juga liberal secara ekonomi. Di situ dia tidak punya komitmen etis. Seolah-olah, orang yang mengkritik agama (artinya liberal) secara sosial, juga membiarkan nilai-nilai liberal di bidang ekonomi. Kita tahu bahwa ekonomi liberal berarti yang kuat yang akan menang. Yang tidak kompeten, yang

tidak modern, yang tidak kuat bersaing, yang tidak bisa berbahasa Inggris, yang *ndeso*, akan kalah. Maka jargon kompetisi yang selalu dikumandangkan liberalisme itu pun, bagi saya, tidak akan bisa bersifat *fair*. Bagaimana kompetisi bisa berjalan dengan *fair* jika tetap membiarkan orang-orang yang memiliki kelemahan itu bermain dalam arena yang sama dengan mereka yang "sempurna". Mereka yang lemah akan tetap kalah dari segala-galanya. Bahkan sudah kalah sebelum *start*. Jadi, komitmen moral dan komitmen sosial, menurut saya, harus dimiliki oleh orang yang mau bersikap liberal dalam beragama. Karena hanya dengan itulah, dia bisa terpercaya. Kalau tidak punya komitmen sosial, orang yang liberal akan bisa serba permisif dan lain sebagainya, dan wajar kalau orang lain kemudian mengatakan, inilah dekadensi. Oleh karena itu, sekali lagi, orang yang mau liberal dalam beragama membutuhkan, katakanlah, suatu komitmen lain sebagai sikapnya.

Komitmen lain itu, dalam pengertian Anda, dapat diejawantahkan dalam bentuk keberagamaan seperti apa?

Ketaatan beragama yang diterjemahkan secara sosial. Seperti tadi saya sudah katakan, kalau Anda memang Islam atau Kristen liberal, hati-hati kalau juga mau setuju atau menerapkan pasar bebas. Anda harus kritis untuk hal itu. Kalau tidak, berarti sebenarnya Anda lebih percaya pada yang liberal itu, bukan pada Islam atau Kristennya.

Reformasi gereja oleh Luther, menurut pandangan orang awam dapat berimplikasi pada dua hal. Di satu sisi, kebebasan beragama, dalam

hal ini, kebebasan orang Kristen untuk melakukan penafsiran yang tidak lagi berpangku pada otoritas gereja, di mana setiap orang memiliki kebebasan masing-masing untuk menafsirkan Alkitab. Pada sisi lain, karena konteksnya adalah Jerman atau masyarakat Barat, dengan semangat kapitalismenya, Reformasi Lutherian juga berimplikasi jauh pada kehidupan yang cenderung anti-agama. Misalnya, di Eropa wilayah Skandinavia, anti-agama telah menjadi life style *atau f*ashion. *Apakah implikasi Reformasi Lutherian dapat ditafsirkan sampai sejauh itu?*

Seorang sosiolog dari Londom School of Economic (LSE) bernama David Martin mengatakan bahwa ada yang *korosif*, ada yang mendorong proses karatan dalam Protestantisme. Maksudnya adalah, terutama karena dia mengikuti teori sosiologi Max Weber, dia beranggapan bahwa kelompok-kelompok Protestan seringkali menghubungkan doktrin agama dengan kinerja hidup. Kalau ada doktrin A, selalu ditanyakan atau ditunggu kinerjanya bagaimana. Kebiasaan menghubungkan doktrin dengan kinerja ini akhirnya, lama-kelamaan, membuat orang Protestan hanya melihat kinerja. Apalagi kinerja itu sifatnya ekonomis. Hal ini menurut David Martin yang menyebabkan adanya *korosif* di da-

> Menurut saya, kalau Islam tidak terbiasa dengan kemajemukan, dia tidak akan bisa masuk dan diterima oleh Indonesia. Justru di situlah letak kekuatan Islam di Indonesia. Lebih daripada itu, Islam sendiri sebenarnya justru merupakan faktor pemajemuk. Ketika sentral-sentral kekuasaan di pedalaman Jawa terlalu memonopoli, Islam yang di pesisir membangun alternatif. Sehingga Islam sebenarnya adalah penanda pluralisme. Oleh karena itu tidak perlu menghadapi Islam dengan memposisikannya sebagai lawan dari pluralisme.

lam Protestan, yang membuat orang Protestan membiarkan karat mengendap di dalam proses beragamanya. Itu yang pertama, dalam penglihatan secara sosiologis. Yang kedua, menurut saya, Protestantisme Luther akhirnya meletakkan iman pada individu. Bahkan pengikutnya, seperti Schleiermacher, meletakkan agama sebagai perasaan, perasaan yang tak terbatas, Goenawan Mohamad menyebutnya sebagai perasaan akan yang tak terpermanaikan, tak terperikan, tak terhitung. Ini yang membuat tabiat individualisme.

Sekarang, "perasaanku mengenai yang tak terbatas tidak lagi menjadi urusan gereja, melainkan urusanku pribadi". Sehingga ada orang yang mengatakan bahwa sekarang orang Skandinavia itu kalau ber-Natal bukan pergi ke gereja, tetapi memancing sendirian. Itu memang gejala yang nyata. Walaupun, kata sosiolog agama yang lain, tampaknya ini hanya khusus kejadian di Eropa. Eropa yang membuat Protestan karat, individualistis. Kalau di Amerika, protestannya lain lagi. Di sana lebih semarak. Hal ini terjadi karena, katanya, orang Amerika adalah pedagang dan *marketing* yang baik, sehingga dapat memasarkan agama dengan lebih baik, yang menjadikan *supply* agama di Amerika tidak pernah membosankan. Sebaliknya, pasokan agama di Eropa terlalu rasional alias "otak sentris". Saudara lihat di Amerika, agama telah menjadi *life style*. Ada yang disebut musik rock Kristen, lalu orang kulit hitam menciptakan Gospel dan jazz, malah di Amerika ada supermarket Kristen, ada "clubbing" Kristen seperti YMCA. Di situ, ada orang tua main kartu, namanya klub Kristen, anak muda berenang juga diberi nama klub Kristen. Jadi cocok dengan hidup modern. Maka yang membedakan antara Protestan di Eropa dan di Amerika adalah kalau di Eropa, orang Protestannya murung, sedangkan di Amerika orang Protestannya kreatif, *market friendly*. Itu yang sekarang

membuat orang Katolik pindah jadi Protestan di Amerika Latin. Lebih dari itu, kejadian demikian juga akhirnya menimbulkan kegentaran pada Paus sendiri, karena, katanya, akibat dari hal itu, kolekte ke Roma berkurang.

Saya kira gejala seperti itu juga dialami oleh Islam. Namun, kembali ke konteks Kristen, konon, Protestantismelah yang menyumbang kecenderungan skripturalis dalam beragama. Mungkin hal itu bisa dielaborasi lebih lanjut oleh Anda: apakah benar demikian? Kalau memang benar, hendaknya cara pandang keberagamaan yang bagaimanakah yang harus dikedepankan untuk mengatasi cara pandang skripturalis seperti itu?

Menurut saya, skripturalisme itu adalah gejala Protestan seratus tahun lalu. Karena Luther mengatakan *sola scriptura*, hanya kitab suci, skripturalisme jadi berkembang. Dan skripturalisme ini juga terkait dengan persoalan ilmu pengetahuan yang mencemooh dokumen kitab suci, misalnya soal evolusi. Sekarang, sisa-sisa kaum skripturalis Kristen itu diwakili oleh kaum Injili, kaum *Evangelical*. Kelompok ini mempunyai lawannya, yaitu kelompok liberal. Sekarang muncul lagi kelompok yang bukan lawan, tetapi tidak perduli soal skripturalis ini, yaitu kelompok karismatik, yang luar biasa menyuplai agama dengan "event-event" raksasa yang digelar di stadion-stadion dan televisi-televisi. Bagi mereka, yang terpenting ketika kita berkumpul, kita bertaubat, hidup baru, sembuh, suka-cita, ada mobilisasi sosial,

> Di dalam alam sekular, sebenarnya agama tidak kalah, cuma lebih menemukan identitasnya sebagai pemberi makna.

makin kaya, itu saja sudah cukup. Itulah agama Kristen yang kontemporer. Makanya, memang sebenarnya persoalan skripturalisme itu menjadi masalah hanya untuk sebagian kelompok Kristen saja, tidak untuk sebagian yang lain.

Adakah rumusan agar cara beragama kita lebih aware terhadap hak-hak dan kebebasan sipil? Pertanyaan ini dilontarkan karena, misalnya, kecenderungan di Indonesia sendiri terlihat jelas bahwa dengan mengatasnamakan agama tertentu, suatu kelompok dengan seenaknya mencabut hak-hak dan kebebasan minoritas. Hal itu, di dalam Islam, tampak seperti kasus yang menimpa Ahmadiyah, Lia Eden, Usman Roy dan lain sebagainya. Eksistensi mereka telah dipinggirkan oleh kelompok tertentu di dalam bagian Islam sendiri. Belum lagi, sasaran di luar Islam dengan merusak atau membakar beberapa gereja, misalnya, karena tindakan-tindakan seperti itu dimaknai sebagai "jihad" oleh kelompok-kelompok tersebut.

Ini memang bukan hal yang mudah. Buku SamHarris, *The End of Faith*, mencoba menjelaskan masalah tersebut. Di dalam buku itu, Harris mengatakan bahwa kalau Anda bertanya kepada agama manapun, maka sesungguhnya mereka tidak toleran. Coba saja kejar terus dari doktrin, ajaran, sampai kitab sucinya, mereka sebenarnya tidak toleran. Jadi, menurut saya, agar agama hormat terhadap hak-hak sipil, setiap agama mempunyai pekerjaan rumahnya sendiri-sendiri. Pekerjaan rumahnya adalah dia harus betul-betul belajar sejarah bahwa sikap-sikap keras yang dia tanamkan selama ini lebih banyak *madlârat*-nya ketimbang *mashlahat*-nya. Dia harus berani terbuka kepada sejarah. Itu yang *pertama*.

Yang *kedua*, dia harus yakin bahwa agamanya itu relevan. Sebab, kata orang, kelompok-kelompok yang radikal dan militan itu, sebenarnya orang-orang yang terkepung. Bahkan menurut Karen Armstrong, mereka sebenarnya sedang masuk ke dalam peperangan, yaitu peperangan rohani karena ada kekuatan yang melecehkan agamanya. Di sinilah kita perlu mendidik jemaat kita bahwa pesan agama kita masih bisa bekerja, agama kita tidak sedang terkepung. Lalu, mengedepankan kekerasan justru hanya akan menuai *madlârat* yang lebih banyak lagi. Yang diperlukan adalah bagaimana memasukkan iman ke dalam masyarakat, sehingga yang menjadi semangat beragama adalah semangat *sharing hope*, semangat berbagi harapan. Bahwa harapan Islam itu ada, itu yang hendak dibagi-bagikan untuk semua. Jangan hanya berpikiran atau berprasangka bahwa orang Islam sedang dikepung, digerus. Atau sebaliknya, orang Kristen merasa bahwa gerejanya mau dihabisi. Perasaan-perasaan inilah yang melahirkan radikalisme dan sikap tidak bisa berdialog. Yang kita tanamkan seharusnya adalah bahwa sekarang orang-orang sedang menunggu harapan Islami atau harapan Kristiani untuk dibagi-bagikan ke tengah masyarakat. Dengan demikian, orang akan mencari jalan untuk menunjukkan keislamannya di tengah-tengah isu hak-hak

> Menurut saya, para pengikut liberal, Kristen maupun Islam, harus betul-betul jelas di sini. Jangan seolah-olah seluruh ayat kitab suci dianggap tidak benar kalau tidak cocok dengan hidup modern. Tapi jangan juga kita menghabisi dunia modern dengan doktrin-doktrin lama agama. Jalan tengahnya adalah orang liberal harus memiliki komitmen moral, dan tidak tertutup pada sikap teologis.

sipil atau isu membangun masyarakat yang bebas dari korupsi dan lain sebagainya.

Persoalannya adalah, bagaimanakah membangun semangat keislaman atau kekristenan di tengah persoalan akut seperti itu? menurut saya, dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi, orang beragama lebih melihat ruang-ruang bagi peran dan sumbangannya di tengah itu semua. Menurut saya, Muhammad Yunus di Bangladesh pasti bekerja dengan semangat Islam, walaupun konteksnya ekonomi, kapitalisme dan kemiskinan di sana. Tetapi mesti ada sesuatu yang islami. Dan dengan itu dia tidak menjadi radikal, karena dia tahu dan yakin bahwa ada sesuatu dari Islam yang bisa dibagi-bagikan. Seperti halnya cerita lama, misalnya Martin Luther King yang yakin bahwa prinsip Kristenlah yang membuat semua orang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi antara yang hitam dan yang putih. Jadi, untuk menciptakan suasana keberagamaan sebagaimana anda tanyakan, saya kira, kultur agamanya harus seperti itu.

Saya minta Anda mengomentari tentang kebebasan tafsir dalam beragama. Kadang seseorang, dengan peralatan hermeneutik, memiliki kecenderungan untuk menafsir kitab suci secara bebas tanpa batas. Sehingga ada kecenderungan, baik di Islam maupun di Kristen, untuk menghakimi kitab suci. Sebatas manakah kebebasan berpikir dan kebebasan menafsirkan kitab suci itu harus ditempatkan?

Saya suka mengatakan kepada teman-teman yang Islam liberal untuk jangan sampai, karena studinya yang kritis, seolah-olah mengatakan bahwa Allah tidak lagi berbicara dalam al-Quran. Untuk yang Kristen liberal saya juga mengatakan agar jangan seolah-olah

mengatakan bahwa Kebangkitan Kristus itu tidak ada, atau Kebangkitan hanyalah metafora. Yang mau saya katakan adalah bahwa studi-studi kritis itu baik, tetapi ingat bahwa hermeneutik itu harus dikembalikan ke dalam komunitas. Artinya, pesan al-Quran akan betul-betul bermakna dalam komunitas Islam. Di luar Islam, hal itu hanya akan dianggap pengetahuan agama saja, bukan keyakinan. Sehingga walupun al-Quran atau Alkitab ditafsir dalam prinsip hermeneutik, yang patut selalu diingat adalah bahwa hermeneutik itu harus mengembalikan pesannya kepada komunitas yang memelihara kitab suci itu. Di situlah terjadi ketegangan atau dialektika antara temuan-temuan kritis dengan *the living faith*, iman yang hidup dalam konteks masyarakat tertentu.

> Komitmen moral dan komitmen sosial, menurut saya, harus dimiliki oleh orang yang mau bersikap liberal dalam beragama. Karena hanya dengan itulah, dia bisa terpercaya. Kalau tidak punya komitmen sosial, orang yang liberal akan bisa serba permisif dan lain sebagainya, dan wajar kalau orang lain kemudian mengatakan, inilah dekadensi.

Boleh saja penafsir sebebas-bebasnya dan secara akademis melakukan penafsiran, apalagi jika dilakukan dalam konteks fakultas sastra. Permasalahannya, baik al-Quran maupun Bibel (Alkitab) bukan merupakan bagian dari fakultas sastra saja, dia juga bagian dari *ummah*, bagian dari gereja. Oleh karenanya juga harus dikomunikasikan ke umat. Persoalannya adalah bagaimana membuat *community of interpreter* atau komunitas penafsir itu menjadi benar? Caranya adalah dengan tidak membiarkan komunitas kita menjadi penaklid, tidak berkembang. Pada saat yang sama juga jangan membiarkan para ahli kita bereksperimen dengan segala macam

teori dan memutar-mutarnya demi kepentingan akademis semata, misalnya. Dua kutub itu harus dipertemukan. Pertemuan inilah yang memungkinkan keduanya menjadi berkembang. Mengapa saya mengatakan demikian? Sebab, orang memelihara al-Quran, tak lain karena ada umat yang memeliharanya. Alkitab tidak akan mempunyai otoritas tanpa jemaat. Tanpa jemaat, dia hanya akan menjadi tak ubahnya novel pelipur lara. Di samping itu, kita masih melihat dimensi transenden baik dari al-Quran maupun Alkitab, makanya kita tidak mau kalau kemudian hal itu hanya menjadi milik atau urusan para ahli saja. Hal itu seharusnya menjadi milik komunitas secara keseluruhan.

Tetapi, seorang ahli hermeneutika, John D. Caputo, meskipun dia sendiri seorang teolog, dengan negative theology-nya berusaha memperlakukan agama secara spiritual daripada secara institusional, tanpa harus terjatuh pada sikap atheis. Bahwa mestinya: beragama tidak sekadar pada batas-batas teologi yang formal, yang sudah digariskan, melainkan berusaha melampauinya – sebagai pengalaman keberagamaan yang tidak mungkin tercapai ketika seseorang berteologi dengan pengotakan dan pengaplingan paham tertentu.

Menurut saya, melampaui tanpa meninggalkan. Makanya, kalau ada studi yang kritis, hendaknya terlebih dahulu diperhadapkan dengan dogma ajaran. Dari sini, akan ada pencairan-pencairan. Studi kritis bukanlah segala-galanya. Ia juga merupakan konstruk modernitas. Janganlah sekali-kali kita mendewakan konstruk modernitas. Intinya, bagi saya, komunitas penafsir itu tetap harus dipertahankan. Karena di situlah kerendahan hati para pakar akan diuji dan keterbukaan pikiran umat dipertaruhkan. Sebab siapa

yang percaya sekularisme? Ternyata hanya orang-orang sekolahan, dosen-dosen di kampus, dan wartawan-wartawan yang sudah kelas menengah. Artinya, orang yang percaya sekularisme itu sebenarnya sedikit sekali. Kenapa? Karena tidak berkomunikasi. Oleh karena itu, yang terpenting bagi saya adalah bagaimana agar tercipta komunikasi antara kepakaran dan keumatan.

Deprivatisasi agama itu seperti teologi pembebasan, tentunya teologi pembebasan yang lebih kontekstual, tidak sekadar berpakem Marxis.

Berdasarkan pengalaman, beberapa umat Islam yang mencoba melakukan perbandingan wacana atau meminjam beberapa teori Barat dalam melakukan penafsiran agama, tidak lain untuk mencegah terjadinya hal-hal yang kita takutkan, sebagaimana kerap dipraktikkan oleh para ulama garis keras, di mana memakai al-Quran sebagai sebuah jawaban final terhadap segalanya tanpa menakar perubahan ruang dan zaman, dan menampik khazanah intelektual di luar Islam yang lebih kontekstual dalam merespon kehidupan. Menurut Anda, apakah usaha rasionalisasi terhadap teks kitab suci pada akhirnya dapat menggerus kesuciannya atau malah memperteguh komitmen keagamaan?

Dalam derajat tertentu, suatu proses rasional mengenai teks mungkin membantu, terutama, katakanlah dalam kasus Kristen, tentang penciptaan alam semesta selama enam hari (demikian tertulis dalam Alkitab bagian *Kejadian*), yang kalau diperiksa dokumennya ternyata ia bagian sastra para imam di Bait Allah. Makanya, dalam studi kritis Kitab Kejadian, hari pertama sampai

keenam itu diberikan inisial "P", untuk menunjuk bahwa ia itu dokumen kaum imam, yang dalam liturgi, dalam ibadah, mereka membacakannya. Kitab itu bisa dikatakan sebagai bacaan liturgi yang dijadikan kitab suci. Soal benar atau tidaknya enam hari penciptaan menjadi relatif. Yang benar adalah bahwa kelompok imam terbiasa mengurutkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam ibadahnya. Dan kitabnya, yang adalah bagian ritual itu, kemudian dijadikan kitab suci. Dalam batas itu studi kritis atas Kitab Suci mungkin membantu. Namun, jangan lantas disimpulkan bahwa Allah sebenarnya tidak menciptakan dunia ini, atau tidak ada hubungannya antara penciptaan alam semesta dengan Allah.

Saya kira, para penafsir tidak bisa atau jangan sejauh itu melakukan penafsiran. Bagi saya, studi kritis itu baik, asal tahu batasnya. Sebab, jika studi kritis melahirkan klaim teologis atau klaim metafisik seperti dengan mengatakan bahwa alam semata-mata tercipta begitu saja, pernyataan itu akan sama fundamentalisnya dengan mengatakan bahwa semua yang ada dalam kitab suci harus diterapkan. Jangan sampai ahli kritis, membuat klaim yang sama mutlaknya dengan klaim kaum fundamentalis agama. Seorang pemikir hermeneutik modern, seperti Paul Ricoeur, jauh lebih *waskito*, lebih bijak, ketika mengatakan bahwa memang ada masalah-masalah historis-rasional yang harus selalu diperhatikan dalam masalah penafsiran, tetapi ingat, katanya, bahwa kitab suci itu adalah sebuah *testimony*, sebuah kesaksian, sebuah himbauan, sebuah panggilan ke arah Allah. Kitab suci merupakan sebuah ajakan untuk menjadi Islam atau Kristen, menjadi hamba yang taat. Dimensi demikian tetap tidak boleh dihilangkan, meski kita juga harus tetap punya sikap kritis terhadap kitab suci.

Realitas majemuk yang inheren pada bangsa ini, membutuhkan sikap arif dari setiap anggota masyarakat untuk menenggang perbedaan. Di sinilah gagasan pluralisme, yang mendapat resistensi yang kuat dari umat Islam, menjadi relevan untuk diperbincangkan. Alasan kenapa pluralisme banyak ditentang oleh masyarakat adalah karena ia lebih dianggap menabur relativisme. Dan yang menyebabkan MUI menjatuhkan fatwa haram terhadap pluraslisme, karena ia tak lebih dari sekadar sinkretisme, pencampuradukan teologi dan penyamaan bahwa semua agama benar. Lantas apa yang Anda pahami tentang pluralisme?

Bagi saya, toleransi tak lain adalah kembaran dari pluralisme itu sendiri. Dalam Protestantisme, toleransi itu dihadapi tidak secara teologis, melainkan secara institusional, yaitu lewat bemunculannnya sekte-sekte. Makanya yang paling terkenal adalah sekte orang Protestan, dan itu juga yang membuat pusing orang Islam. Dengan banyaknya sekte, gereja Protestan jadi menumpuk, ada lokalisasi gereja-gereja. Itulah cara orang Protestan melakukan toleransi, yaitu dengan sikap institusional, artinya membiarkan sekte-sekte bermunculan dengan bebas.

Entah kenapa percakapan pluralisme kita terlalu tergesa-gesa menjadi percakapan teologis. Terlalu tergesa-gesa mau mencari tahu mana ayat kitab sucinya atau mana dalil-dalilnya. Mungkin kebiasaan kita juga yang terlebih dahulu harus memakai dalil untuk mengatakan sesuatu itu benar atau tidak. Padahal, menurut saya, pluralisme harus pelan-pelan dulu dilihat sebagai semangat hidup bersama yang toleran. Atau minimal yang memperhitungkan adanya kebhinekaan. Pluralisme adalah *Bhinneka tunggal ika*. Harusnya ini dulu yang menjadi

pendasaran makna pluralisme. Setelah itu, kita akan bisa melihat masyarakat kita sebagai masyarakat yang plural. Artinya, tidak hanya bhineka tetapi ada komitmen bersama. Komitmen bahwa Anda yang berbeda dari saya, saya perlukan untuk hidup bersama. Tidak ada lagi yang bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Untuk Aceh, misalnya, tidak bisa lagi diselesaikan hanya oleh orang Islam, tetapi juga membutuhkan orang-orang sekular, mungkin juga sedikit orang Kristen. Membutuhkan pedagang-pedagang Cina, orang-orang Malaysia, atau bahkan orang-orang Skandinavia yang tidak datang dengan agama tapi percaya pada perdamaian. Sehingga persoalan Aceh harus dilaporkan dan diselesaikan di Swedia, padahal akar masalahnya dekat dari sini.

Jadi, yang terpenting adalah komitmen. Komitmen bahwa kita betul-betul yakin saling membutuhkan. Baru, setelah itu, agama ditanya bisa atau tidak merestui kalau orang Islam bekerjasama dengan dokter Ateis, misalnya, untuk memperbaiki Aceh. Di situ, menurut saya, baru dalil bisa dipanggil. Sehingga dalil itu sifatnya lebih pada memberi makna yang teologis terhadap gejala hidup bersama yang majemuk. Selama ini, dalam percakapan pluralisme, agama seolah-olah dilihat sebagai pengganggu. Agama dilihat sebagai kelompok yang mencegah pluralisme. Sebagai kelompok yang agresif, yang selalu menginginkan semua orang untuk masuk Kristen, atau menginginkan negara ini untuk menjadi negara Islam.

Kesalahan kelompok-kelompok pluralis adalah mengajak berkonfrontasi dengan agama. Kenapa tidak menanya agama dengan baik-baik: hidup kita yang beragam dan kompleks ini menurut agama bagaimana? Ada atau tidak pesan agama untuk hidup yang seperti ini? Tentu agama akan mengatakan, ada. Dalam Islam, ada doktrin bahwa Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, mi-

salnya. Benar atau tidak Islam mempertaruhkan nilai yang sangat toleran seperti ini? Kristen juga bisa membangun gagasan mengenai mengapa kamu harus hidup dengan orang lain. Dalam Kristen juga jelas bahwa kalau kamu betul-betul mengerti mengasihi, kamu tidak boleh mengira bahwa mengasihi hanya berarti mengasihi dirimu, atau mengasihi satu kaummu saja, tetapi juga mengasihi orang lain, orang yang sama sekali berbeda dari kamu.

Selama ini gejala yang terlihat, tampaknya, kaum pengusung pluralisme, belum apa-apa sudah terlebih dahulu merasa terancam oleh agama. Agama seperti momok bagi pluralisme. Agama terlebih dahulu dikritik. Sikap demikian, justru pada kesempatan berikutnya memicu reaksi balik dari agama yang kadang jauh lebih keras. Apalagi di Indonesia, kalau kita betul-betul realistis, studi terakhir mengenai Islam di Jawa, sebagaimana dituliskan Andrea Beatty, *Variasi Agama di Jawa,* menyimpulkan bahwa, khususnya untuk kasus Banyuwangi, di Jawa itu orang masih "melek-melekan" di samping langgar. Dan melek-melekan ini diisi dengan pembacaan primbon. Lalu kalau ada orang yang sakit, mereka pergi ke masjid tertentu, yang *notabene*, sebelumnya merupakan tempat pendiri atau sesepuh desa itu dikubur. Sedangkan Islam sendiri, tampak menonjol di kelurahan, katanya, karena terkait dengan urusan ingin menjadi lurah. Terkait dengan ini semua, kita mengatakan bahwa masyarakat kita ini sebetulnya sangat menerima kemajemukan. Islam sendiri sudah terbiasa dengan kemajemukan. Jangan lantas malah ditantang, melainkan di-

> Cara orang Protestan melakukan toleransi, yaitu dengan sikap institusional, artinya membiarkan sekte-sekte bermunculan dengan bebas.

minta saja kebijaksanaan apa yang bisa diberikan oleh Islam untuk menghadapi kemajemukan.

Menurut saya, kalau Islam tidak terbiasa dengan kemajemukan, dia tidak akan bisa masuk dan diterima oleh Indonesia. Justru di situlah letak kekuatan Islam di Indonesia. Lebih daripada itu, Islam sendiri sebenarnya justru merupakan faktor pemajemuk. Ketika sentral-sentral kekuasaan di pedalaman Jawa terlalu memonopoli, Islam yang di pesisir membangun alternatif. Sehingga Islam sebenarnya adalah penanda pluralisme. Oleh karena itu tidak perlu menghadapi Islam dengan memposisikannya sebagai lawan dari pluralisme. Saya sendiri tidak tahu dari mana penyebab datangnya reaksi keras MUI seperti yang telah Anda katakan tadi. Apakah ini persoalan politis belaka atau memang mencerminkan *trend* keislaman baru di masyarakat, bahwa secara dogmatis Islam harus begitu. Menurut saya, MUI sebenarnya hanya mengedepankan norma, bukan praktik. Praktik kita sebenarnya adalah praktik hidup yang sangat pluralis.

MUI dan beberapa kalangan Islam tertentu melihat pluralisme itu hanya berkonotasi pada inter-faith dialogue*, sehingga berujung pada sinkretisme. Dan bahaya dari sinkretisme, bagi mereka, adalah mempercepat pendangkalan iman umat. Maka, iman umat harus segera dipagari supaya tidak terseret dan masuk ke doktrin pluralisme yang membahayakan itu.*

Berarti MUI di situ mengeluarkan fatwa dengan semacam perasaan terancam. Bahkan saya membaca juga katanya, antara lain, MUI juga menyatakan bahwa "kami tidak yakin kalau akhirnya kita akan dapat masuk surga secara bersama-sama". Artinya, dia

(MUI) seperti sedang berkhutbah Jum'at di masjid-masjid. Kelemahan MUI di sini adalah menjadikan fatwanya itu bersifat publik. Seharusnya biarkan khutbah itu cukup menjadi khutbah (seperti khutbah Jum'at) saja, karena Islam juga harus menjaga umatnya. Memang, selalu mesti ada yang mutlak dalam agama. Kalau tidak ada, maka agama tak ubahnya dengan LSM, yang bahkan, LSM sendiri pun, masih mempunyai bagian yang "mutlak", semacam prinsiplah! Jadi biarkan dia (agama) mutlak, tetapi untuk kalangan sendiri. Di Kristen juga ada doktrin bahwa Kristus adalah juru selamat, itu merupakan bagian dari kemutlakan.

Saya kira, kita memang harus lebih rileks dengan sikap MUI, jangan menyerangnya. Kita bisa dengan menunjukkan kepada kalangan yang menentang pluralisme bahwa praktik-praktik hidup kita ini sebenarnya sudah sangat pluralis, seraya mendengarkan pendapat varian-varian Islam lain yang mengatakan bahwa pluralisme itu sudah menjadi sesuatu yang *sunnatullâh*, bahkan sudah menjadi *fî sabîlillâh.* Begitulah jalan Islam, jalan Allah di negeri ini: plural. Misalnya, Islam masuk ke tanah Jawa, menjadi orang Jawa, yang pergi ke kuburan. Kadang-kadang saya suka melucu, bahwa jumlah orang Muhammadiyah itu kira-kira sama dengan jumlah orang Protestan di Indonesia. Kira-kira 15 juta-an, seperti terlihat dari perolehan suara PAN. Karena Muhammadiyah dan Protestanlah yang terlalu doktriner, puritan, mesti begini, harus begitu. Padahal, jalannya agama masuk dan diterima itu sendiri melalui proses *kulo nuwun*.

Makanya, menarik sekali studi Geertz dalam *Islam Observed* tentang Sunan Kalijaga. Menurut Geertz, Sunan Kalijaga itu sama sekali tidak tahu bahasa al-Quran, bahasa Arab, tetapi dapat menjadi Walisongo. Yang dia wartakan adalah bahwa dia mendapat ca-

haya ilahi dengan menjaga kali. Berarti dia sebenarnya mewartakan sesuatu yang sangat Jawa. Islam Indonesia berasal dari para petani yang mementingkan agar sawah tetangganya bisa diairi. Mereka tidak pernah menekankan agresivitas. Dia tahu sangatlah tidak mungkin untuk memusuhi tetangganya, karena air yang mereka pakai adalah air yang sama. Inilah cerita Sunan Kalijaga, yang, meski kemudian tumbuh menjadi pendakwah besar, tidak tahu bahasa Arab. Dia tidak tahu membaca al-Quran. Yang dia wartakan adalah bahwa dia menemukan Allah dalam kesendiriannya, dalam ketenangannya, dalam *rasa*. Berbeda dengan Islam Maroko, yang bermula dari para penunggang kuda yang kemudian menaklukkan daerah-daerah, di Indonesia (Jawa) Islam tidak seperti itu. Justru Islamnya berasal dari orang yang mengerjakan sawah. Cenderung ramah dan tanpa kekerasan.

Tadi sudah disinggung tentang doktrin keselamatan. Katolik, ketika Konsili Vatikan II, sudah mulai melihat adanya keselamatan di luar gereja. Lantas di Protestan sendiri, landasan teologis dari pluralisme itu berasal dari mana?

Ada dua cara. Cara *pertama*, mungkin belum pluralis, tetapi masih inklusif, dengan mengatakan bahwa ada pewahyuan yang khusus dalam Kristus dan ada pewahyuan yang umum (general) dalam seluruh manusia. Sehingga setiap orang sebenarnya menerima wahyu Allah. Cuma, dalam kekristenan, wahyu itu khusus dalam seorang manusia (yaitu Yesus Kristus) yang menebus manusia lain dari dosanya. Ini merupakan indikasi bahwa, minimal, orang lain juga sebenarnya tidak sesat; ada sinyal-sinyal ilahi juga untuk mereka. Namun, ini memang menjadi mutlak pada dirinya.

Dalam Kristus, sinyal itu lebih terasa dan jelas, sementara pada yang lain kecil-kecil saja sinyalnya. Alasannya adalah karena umat agama lain juga berada dalam ciptaan yang sama, diberi matahari dan dunia yang sama.

Cara yang *kedua*, yang jauh lebih radikal, namun mungkin masih disebut pluralisme yang inklusif, adalah dalam bahasa yang sedikit agak teologis, yaitu dalam hal Kristen yang melihat Allah secara trinitarian. Yang membedakannya dengan Islam adalah bahwa kalau Islam monoteismenya itu konsisten, *tawḥîd*, *lâ ilâha illâ Allâh*, sedangkan di Kristen, monoteismenya dinamis. Arti trinitarian sendiri adalah bahwa yang Satu itu punya sifat. Sifatnya ada tiga macam yang menjadi nyata: dalam Kristus, dalam Bapa dan dalam Roh Kudus. Sifat Allah Ruhul Kudus itu berhembus ke mana Dia mau. Sehingga selalu ada kemungkinan bahwa Ruhul Kudus itu juga menerangi "nur Muhammad". Karena mereka berada dalam suatu konteks rohani, maka Ruhul Kudus bisa sampai pada hati, jiwa, atau "nur" Muhammad. Dengan demikian, orang Kristen terbuka pada kemungkinan sampainya cahaya Allah di tempat-tempat lain, walaupun memang dalam kesatuan trinitarian. Tetapi Allah yang satu yang dipercayai Kristen dan bersifat roh itu juga melewati batas-batas Kristen, melewati batas Kristus sendiri. Pandangan ini sedikit lebih pluralis ketimbang yang pertama. Yang pertama lebih populer di jemaat. Kalau jemaat ditanya, maka, hanya sebagian orang saja yang mengatakan bahwa hanya Kristen yang akan selamat, sebagian besar lain mengatakan bahwa persoalan itu hanya diketahui oleh Tuhan. Karena ada keyakinan bahwa kepada Kristen, pewahyuan itu bersifat khusus, sementara kepada yang lain, pewahyuan itu bersifat umum. Ini minimal, sebenarnya sudah menolong.

Sebelumnya Anda juga sudah menyinggung tentang adanya hal yang mutlak dalam agama. Padahal, kenapa pluralisme juga ditolak, salah satunya adalah karena ada sebagian yang beranggapan bahwa pluralisme memiliki kedekatan dengan relativisme. Tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada satu nilai pun yang harus diunggulkan daripada yang lainnya. Hal itulah yang membuat pluralisme, baik dalam ranah politik, apalagi agama, kerap dipinggirkan. Komentar Anda untuk hal ini bagaimana?

Pluralisme itu, menurut saya, adalah kosa kata sosial, walaupun dibutuhkan suatu sikap teologis untuk mengabsahkan atau membenarkannya. Sementara jika dimasukkan ke dalam kosa kata epistemologi, kalau relatif itu dilekatkan pada pluralisme, maka di sini memang ada persoalan. Walaupun demikian, menurut saya, hal ini sebenarnya justru menjadi kesempatan bagi agama untuk berpikir ulang. Kalau pluralisme mengatakan bahwa kebenaran itu begitu banyak, malah dalam bahasa lain, kebenaran itu ada di mana-mana, lantas bagaimana dengan kebenaran agama sendiri, yang sekarang sedikit "nervous" dengan tekanan semacam ini. Menurut saya, kenapa oleh beberapa orang agama cenderung tidak menemukan makna kebenaran, karena sekarang seolah-olah cara orang mendefinisikan kebenaran adalah suatu definisi dengan eksklusi. Itu prinsip eksklusi Aristotelian yang mengatakan bahwa kalau ini benar, maka yang itu harus salah. Kebenaran agama harus dihayati bukan dalam kerangka eksklusi tadi. Logika kebenaran agama adalah suatu kebenaran yang akan ditampakkan lebih jelas lagi, sebagaimana pandangan Heidegger tentang kebenaran yang disebutnya sebagai *aletheia*, ketersingkapan.

Menghadapi kebenaran dalam agama seperti menghadapi proses penyingkapan Sang Ilahi. Sehingga memang benar bahwa penying-

kapannya itu, sebagaimana pluralisme mengingatkan kita, sebenarnya belum selesai. Kita tidak boleh menutup diri, karena penyingkapan akan terus terjadi sampai akhir semuanya, di mana semuanya jadi lebih jelas. Dengan demikian, kita tidak akan bertabrakan dengan para pluralis, dengan mengatakan bahwa betul kebenaran itu sifatnya tidak tertutup, tidak beku. Makanya kami menghayati kebenaran Islam, sambil kami mengerjakan syariah, jalan kecil, sambil menjadi Muslim. Dalam hal ini, menurut saya, Gus Dur adalah seorang tokoh yang sangat hebat. Dia mengatakan bahwa syariah yang *kâffah* itu berarti damai, bukan rincian-rincian hukum yang normatif. Gus Dur mengajarkan kita cara-cara menghayati kebenaran sebagai suatu perjalanan yang pelan-pelan semakin nyata. Kebenaran bukan suatu paket untuk menafikan yang lain. Bukan logika Aristotelian yang tidak memungkinkan adanya dua kebenaran secara bersamaan. Kebenaran agama adalah sesuatu yang muncul, memanggil, dan membuat kita berjalan. Pada titik inilah tantangan pluralisme seharusnya dijawab oleh agama dengan kapasitasnya untuk memperbaharui diri tanpa kehilangan diri.

Yang menjadi persoalan adalah ketika sebuah nilai agama hendak diterapkan dalam ke-putusan yang sifatnya publik, maka suatu nilai harus dihentikan atau ditetapkan dalam rentang waktu tertentu. Kebenaran tidak menying-kapkan terus-menerus tanpa henti. Dalam sebuah keputusan diskusi atau konsensus yang sifatnya publik, tidak mungkin menghindari tindak ekslusi. Pasti ada keputusan yang pada akhirnya mengeksklusi nilai-nilai atau kebenaran yang lain. Kalau dalam tataran epistemologis, mungkin kita bisa berdiskusi tentang kebenaran yang terus mengalir, menampakkan dirinya di mana-mana, embeded

dalam tradisi masing-masing. Tetapi ketika ada upaya overlapping consensus, *maka niscaya akan ada yang tereksklusi, karena* overlapping *consensus menuntut hanya ada satu kebenaran bagi keputusan atau kepentingan publik.*

Mungkin yang lebih tepat bukan satu kebenaran. Kebenaran agama, dalam konteks publik, memang membutuhkan fiksasi, membutuhkan penghentian. Tanpa harus berdebat jauh, menurut saya, kebenaran Kristiani dalam hal pengampunan membuat orang Kristen harus yakin pada rekonsiliasi. Mungkin begitulah penghentian kebenaran pengampunan dalam sebuah kepentingan publik: rekonsiliasi. Dengan demikian, dalam agama Islam, yang menurut saya merupakan agama yang benar, ketika ditanya tentang kebenaran agamanya di ranah publik, maka jawaban yang dapat ditemukan ternyata majemuk. Mengenai manusia misalnya, kebenarannya, dalam Islam, bisa berujud pada "insan kamil". Mengenai politik kebenarannya bisa lebih bermacam-macam lagi.

Kalau melalui mekanisme demokratis, misalnya, perda syariah menetapkan kebenaran bahwa yang mencuri harus dipotong tangannya, dengan mengabaikan tafsir lainnya?

Tetapi ketika mencuri sudah menjadi tema dalam Islam, menurut saya, akan muncul percakapan di internal Islam mengenai apa itu mencuri dan bagaimana di dalam publik bisa menjadi *fixed*.

Dalam praktik kehidupan bersama, kata pluralisme tidak bisa dipisahkan dari kata toleransi. Alfred Stepan mengatakan bahwa agar pluralisme tetap berjalan lestari diperlukan juga peran negara. Ada menara

kembar toleransi di situ. Ada peran agama yang tidak memaksakan pandangan-pandangannya untuk diafirmasi oleh negara dan sebaliknya juga negara. Saya minta konfirmasi Anda bagaimana peran negara dalam konteks pluralisme?

Saya hendak mencoba melihat secara *de facto* perihal toleransi dalam agama Kristen. Bagi saya, toleransi tak lain adalah kembaran dari pluralisme itu sendiri. Dalam Protestantisme, toleransi itu dihadapi tidak secara teologis, melainkan secara institusional, yaitu lewat bemunculannnya sekte-sekte. Makanya yang paling terkenal adalah sekte orang Protestan, dan itu juga yang membuat pusing orang Islam. Dengan banyaknya sekte, gereja Protestan jadi menumpuk, ada lokalisasi gereja-gereja. Itulah cara orang Protestan melakukan toleransi, yaitu dengan sikap institusional, artinya membiarkan sekte-sekte bermunculan dengan bebas.

Amerika itu dibangun oleh mental perpecahan gereja. Ini menarik. Ketika gereja A mengklaim kamilah pemilik Amerika, orang lain juga mengatakan kamilah pemilik Amerika, yang lainnya lagi juga demikian, dan seterusnya. Masing-masing membikin gerejanya sendiri, sehingga negara pun bingung. Akibatnya, tidak ada satu gereja pun yang bisa memonopoli Amerika, sehingga di setiap tengah kota di Amerika itu selalu ada *public sphere*, selalu ada ruang terbuka. Silakan agama-agama berdakwah dengan kecanggihan *marketing* masing-masing untuk menyerap umat. Di situlah toleransinya. Melakukan toleransi dengan memecah diri. Saya tidak terlalu tahu, saya bukan ahli Islam dalam hal ini, apakah dalam Islam, sekte itu mudah muncul atau malah dianggap sebagai bidah. Menurut saya terlalu sedikit sekte dalam Islam, atau banyak juga?

Sebetulnya banyak sekte dalam Islam. Berbeda dengan di Kristen, kemunculan sekte dalam tubuh Islam selalu direpresi. Dan terkait dengan toleransi, Anda telah menyinggung bahwa toleransi baru sebatas inklusif, baru sebatas peaceful co-existence*, menghargai yang lain. Permasalahannya adalah bentuk penghargaan dalam toleransi lebih sebagai kemewahan dari mayoritas buat minoritas. Bukankah toleransi yang seharusnya dirumuskan mengandaikan adanya pemihakan, tidak sekadar menghargai tetapi* pro-existence*, saling bekerja sama?*

Lagi-lagi, saya sedikit lebih berbicara secara *de facto*. Makanya, orang-orang Protestan cepat-cepat bermain di konstitusi. Artinya, karena sadar bahwa agama ini bisa *meleng* dan hanya mementingkan dirinya, maka peran konstitusi untuk melindungi setiap kelompok masyarakat itu menjadi kesibukan gereja-gereja. Misalnya, orang seperti TB Simatupang yang matian-matian memperjuangkan penegakan Pancasila di Indonesia. Eka Darmaputra juga menulis disertasi mengenai Pancasila. Pancasila sebagai prinsip yang inklusif dan non-diskriminatif itu menjadi obsesinya. Orang Protestan yakin di situlah alamat jika toleransi di Indonesia mau lebih afirmatif dan protektif terhadap minoritas. Sebab kalau tidak begitu, kenyataan agama adalah lebih mementingkan dirinya. Makanya gereja di Manokwari, karena menjadi mayoritas, mungkin bermain dalam pembuatan perda juga. Dari kasus ini, terlihatlah bahwa agama bisa melangkah jauh, dan karenanya dibutuhkan konstitusi yang lebih solid mengenainya.

Di sinilah kita bisa berharap pada agama untuk memunculkan sikap-sikap toleran. Sebab, tidak mungkin akan lahir Gus Dur di setiap tahun. Gus Dur juga bisa demikian karena dia mayoritas, dia toleran dan afirmatif. Umat yang jumlahnya hanya 19, seperti Eden, dia (Gus Dur) tolong juga. Sewaktu acara pesta ulang tahun ke 65-

nya Mas Dawam, orang yang mempunyai umat hanya beberapa gelintir diizinkan untuk mendapat giliran berpidato paling lama, malah seperti melakukan khutbah. Sementara umat yang lebih banyak agak sungkan-sungkan. Makanya, ketika mas Tom (Utomo Dananjaya), salah satu panitia acara, mengatakan kepada saya, "Maaf Pak Martin, seharusnya dari Protestan ada yang berbicara juga. Seharusnya yang berbicara adalah Anda", karena pada waktu itu tidak ada yang berbicara mewakili Protestan. Saya katakan kepadanya, "Tidak apa-apa, pak, *wong* Isa al-Masih, Yesusnya sudah berbicara kok, lewat Yesusnya Lia Eden".

Wawancara dilakukan di Jakarta, 15 Mei 2007

Percakapan dengan

Masdar Farid Mas'udi



Masdar Farid Mas'udi, ketua tanfidziyah PBNU dan Direktur P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Jakarta. Ia menamatkan S1 di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan Pascasarjana Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta.

Tiga kali al-Quran menyerukan bahwa Allah sajalah yang tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya. Sehingga, kerendahan hati menjadi kunci bagi umat Islam Indonesia dalam menyikapi setiap perbedaan dalam berkeyakinan. Demikianpun al-Quran bukan monopoli para ahli atau kelompok tertentu. Ia bebas ditafsir siapapun yang kemudian terbuka untuk diuji dan pemahamannya terseleksi berdasar kekukuhan metodologi, prinsip-prinsip universal, dan sanggup memberi manfaat bagi seluruh umat. Di sini negara harus berdiri netral dari tafsir, paham, keyakinan, dan agama tertentu, sebagaimana Piagam Madinah yang menuntut agar negara bebas dari jerat kepentingan sektarian suatu agama sehingga bisa mengayomi dan melayani segenap warga secara adil dan tidak diskriminatif.

Liberalisme, pluralisme, dan sekularisme akhir-akhir ini menjadi perdebatan panas, terutama setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) menfatwakan keharamannya. Bagaimana komentar Anda?

Setahu saya hukum halal-haram dalam fikih obyeknya adalah tindakan, bukan paham. Dalam definisi fikih dikatakan: *al-fiqh al-'ilm bi al-ahkâm al-syar'îyah al-'amalîyah al-muktasab min adillatihâ al-tafshîlîyah*. "Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' perihal tindakan praktis yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat rinci". Tapi kalau MUI mau menghukumi pemikiran atau paham, ya, *monggo* saja. Cuma catatan saya, karena yang dihukumi adalah konsep, bukan perkara riil yang obyektif, seperti judi, minuman keras, atau pembunuhan, maka perlu ekstra teliti.

Sebab, yang namanya konsep atau pemikiran selalu multitafsir, multidefinisi. Dan untuk memahaminya kita harus mengacu pada sudut pandang pihak yang melahirkan konsep itu dan kesejarahannya.

Apa implikasi menghukumi konsep atau pemikiran?

Hukum tergantung pada definisi perkara yang akan kita hukumi: *al-hukmu 'alâ al-syay' far'un 'an tashawwurih.* "Menghukumi sesuatu merupakan cabang dari pendefinisian terhadap sesuatu itu". Demikian kaidah mantiqnya. Karenanya, salah satu ciri berpikir fikih adalah rinci, *tafshîl*. Para kiai pesantren setia betul terhadap tradisi ini. Kalau tidak *tafshîl*, tapi hitam-putih, jangan-jangan yang merumuskan fatwa itu bukan ahli fikih.

Ada salah sebuah anekdot, kalau ahli fikih ditanya apa hukumnya "A", jawabannya: tergantung! Hukum "A" bisa haram,

mubah, sunah atau bahkan wajib. Tergantung definisi, *'illat,* dan konteksnya.

Lihat, misalnya, ketika fikih menghukumi tindakan aborsi. Sesuatu yang tampaknya begitu simpel, yang secara apriori orang cenderung menghukumi haram, tapi di tangan *fuqahâ'* (ahli fikih) akan keluar hukum yang beraneka: a. Aborsi haram (terlarang) jika dilakukan atas janin yang sudah *tanfîkh al-rûḥ*, bernyawa, dan tanpa alasan; b. Aborsi mubah (boleh) dilakukan untuk janin yang belum bernyawa dan untuk satu keperluan tertentu; c. Aborsi dianjurkan bahkan wajib jika dilakukan untuk janin belum bernyawa, yang apabila tidak dilakukan dipastikan dapat mengancam nyawa sang ibu.

Begitu juga ketika menghukumi liberalisme, pluralisme atau sekular-isme. Ia bisa saja kita hukumi haram atau sebaliknya. Semua itu tergantung bagaimana kita mendefinisikan konsep itu dan konteksnya. Seperti saya katakan di atas, karena sekularisme, liberalisme dan pluralisme adalah konsep yang abstrak dan lahir dalam konteks sejarah masyarakat tertentu, maka pendefinisiannya harus cermat, sekaligus mempertimbangkan sejarah dalam komunitas bersangkutan, bagaimana ketiga konsep itu muncul. Sehingga menghukuminya juga tidak bisa hitam-putih.

Karena sekularisme, liberalisme dan pluralisme adalah konsep yang abstrak dan lahir dalam konteks sejarah masya-rakat tertentu, maka pendefinisiannya harus cermat, sekaligus memper-timbangkan sejarah dalam komunitas bersangkutan, bagaimana ketiga konsep itu muncul. Sehingga menghukuminya juga tidak bisa hitam-putih.

Kita mulai dari liberalisme. Menurut Anda apa sebenarnya maksud dari istilah itu?

Saya akan mendefinisikan ketiga konsep tersebut (liberalisme, pluralisme, dan sekularisme) dalam konteks yang lebih khusus, konteks kehidupan beragama.

Seperti halnya sekularisme dan pluralisme, liberalisme adalah konsep yang muncul di Barat dari hasil pergulatan kesejarahannya yang panjang, getir, dan berdarah-darah. Liberalisme berasal dari akar kata "liberty", artinya bebas (*hurriyah*: Arab). Pada mulanya adalah gerakan yang diilhami oleh Reformasi yang membuka kebebasan (liberalisasi) pada umat Nasrani untuk membaca dan memahami langsung ayat-ayat dalam kitab suci mereka. Paham dan gerakan pembebasan (liberalisme) ini menggugat dogma lama bahwa kitab suci hanya boleh dibaca dan dipahami oleh dan lewat otoritas kalangan tertentu saja, yakni jajaran pejabat resmi gereja.

Kalau itu yang dimaksud, bukankah sejak awal Islam sudah menganutnya?

Anda benar, dalam arti bahwa sejak awal umat Islam berhak, bahkan dianjurkan membaca dan memahami ayat-ayat dalam kitab sucinya, al-Quran. Tidak pernah ada dogma bahwa al-Quran hanya boleh dibaca oleh dan lewat otoritas pejabat resmi agama. Bahkan institusi pejabat resmi agama dalam Islam pun tidak dikenal. Para imam mazhab, seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad, juga yang lain, menjadi imam mazhab bukan karena diangkat resmi oleh siapa pun. Tetapi karena keilmuan beliau-beliau yang lama-kelamaan mendapatkan pengakuan dari umat.

Bahkan nama kitab suci umat Islam sendiri disebut al-Quran, yang berarti "bacaan", dari akar kata *qara'a*, sudah menunjukkan bahwa ia terbuka untuk siapa saja yang mau membaca dan memahami pesan-pesannya. Bahkan non-Muslim pun tidak dilarang membaca dan memahami al-Quran.

Al-Quran ibarat samudera luas. Siapa pun bebas mengambil airnya. Tentu saja keberhasilan orang dalam menangkap pesan kitab suci bisa berbeda-beda, tergantung pada tingkat kecerdasan, pengalaman, pengetahuan tentang konteks historis ayat, metodologi yang dipakai, dan tidak kalah penting kejujuran nurani atau imannya. Tapi sekali lagi, pada dasarnya al-Quran bebas dibaca atau ditafsirkan oleh siapa saja, bukan monopoli kelompok tertentu atau para ahli saja.

Negara harus netral terhadap semua agama dan keyakinan yang dianut oleh warganya. Inilah yang disebut dengan sekularisme, suatu paham yang memisahkan negara dari keterikatan subyektif dengan salah satu agama atau keyakinan tertentu. Hanya dengan paham inilah maka negara bisa mengayomi dan melayani kepentingan segenap warga negaranya secara adil, tanpa pilih kasih atau diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut oleh warganya.

Apakah kebebasan membaca dan memahami al-Quran seperti itu tidak membahayakan keagungan dan kemurnian al-Quran?

Kita tidak boleh ragu terhadap janji Allah yang akan menjaga kemurnian al-Quran dan integritasnya: "Akulah yang menurunkan al-Quran, dan Aku pula yang akan melindunginya", (Q,15:9). Mekanismenya, bahwa setiap pemahaman terhadap al-Quran dari seseorang atau sekelompok orang terbuka untuk diuji oleh pemahaman orang atau

kelompok lain. Dengan demikian akan terjadi proses seleksi: mana yang secara metodologis kokoh; secara substantif sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam; dan secara historis memberikan kemanfaatan bagi umat dan kemanusiaan. Yang sanggup melalui proses seleksi itulah yang akan unggul. Oleh sebab itu, kebebasan membaca dan memahami al-Quran juga harus dibarengi dengan kebebasan untuk menguji dan mempertanggungjawabkannya. Yang gagal dalam proses pengujian dan pertanggungjawaban akan gugur dengan sendirinya. Itulah prinsip kebebasan yang dianut dan yang telah berlaku dan akan terus berlaku dalam Islam.

Bagaimana dengan konsep pluralisme?

Pluralisme berasal dari akar kata "*plural*" yang berarti jamak, bhineka. Konsep ini terkait erat dengan sejarah konsep liberalisme. Akibat dari kebebasan untuk memahami kitab suci Bibel atau Injil, maka muncullah paham dan aliran atau sekte yang berbeda-beda dalam jumlah puluhan bahkan ratusan. Sesuatu yang sama sekali baru, karena sebelumnya dalam Kristen hanya ada satu paham saja yang ada, yakni yang dirumuskan oleh pemimpin Gereja di Vatikan, Roma.

Sebagaimana paham keagamaan di lingkungan kitab suci manapun, termasuk di Islam, masing-masing pemahaman yang banyak itu mengklaim dirinya yang paling benar, atau bahkan satu-satunya yang benar, sedang yang lain sesat. Yang berhak masuk surga hanya pihaknya, sedang pihak lain harus masuk neraka. Inilah salah satu kesombongan universal khas umat beragama. Kebenaran dan surga yang adalah milik Allah tiba-tiba diklaim seakan miliknya sendiri. Akibatnya, selama abad ke-17 dan ke-18, di Eropa terjadi

perang antaraliran, mazhab atau sekte yang begitu berdarah-darah. Tercatat sepertiga umat Kristen di sana terbunuh dalam perang antarmazhab atau sekte tersebut. Inilah yang digambarkan oleh Hobbes sebagai fenomena "semua hendak memerangi semua" (*homo homini lupus* atau *bellum omni contra omnes*).

Bagaimana mereka bisa keluar dari sejarah kelam itu? Apakah mereka surut kembali ke belakang?

Masing-masing pihak boleh menganggap paham dan keyakinannya benar, tapi pada saat yang sama sepakat untuk menghormati keyakinan dan hak hidup penganut paham atau keyakinan lain. Maka berlakulah norma umum yang dalam Islam termaktub pada surat *al-Kâfirûn*: "Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami" (*Lakum dînukum wa liya dîn*). Sebuah kaidah untuk penganut agama yang berbeda. Atau, "Bagi kami keyakinan dan amaliah kami, bagi kalian keyakinan dan amaliah kalian" (*Lanâ a`mâlunâ wa lakum a`mâlukum*). Inilah kaidah untuk penganut keyakinan yang berbeda dalam lingkup agama yang sama.

Tidak. Mereka tetap maju dan kebebasan membaca kitab suci tetap dipertahankan. Tetapi bersama dengan itu, muncul kesadaran dari akal sehat mereka sendiri: Kalau nafsu saling bunuh terus berlangsung, umat manusia bisa habis, sampai akhirnya tinggal satu orang yang mengaku paling benar. Tapi ia pun akan menghabisi dirinya sendiri karena stres berat dan tidak mungkin 1bisa hidup sendirian.

Menyadari hal ini, semua pihak sepakat pada satu "kearifan" yang tetap mempertahankan keanekaragaman penafsiran dan keyakinan, disertai dengan keharusan saling menghargai perbedaan yang

ada. Singkatnya masing-masing pihak boleh menganggap paham dan keyakinannya benar, tapi pada saat yang sama sepakat untuk menghormati keyakinan dan hak hidup penganut paham atau keyakinan lain. Maka berlakulah norma umum yang dalam Islam termaktub dalam surat al-Kâfirûn: "Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami" (*Lakum dînukum wa liya dîn*). Sebuah kaidah untuk penganut agama yang berbeda. Atau, "Bagi kami keyakinan dan amaliah kami, bagi kalian keyakinan dan amaliah kalian" (*Lanâ a'mâlunâ wa lakum a'mâlukum*). Inilah kaidah untuk penganut keyakinan yang berbeda dalam lingkup agama yang sama.

Paham dan sikap seperti inilah yang disebut pluralisme, suatu paham bahwa agama dan keyakinan manusia memang tidak satu dan tidak bisa dipaksa satu. Dan karena itu, masing-masing penganut harus saling menghormati agama dan keyakinan pihak lain. Soal mana yang mutlak benar semata Allah yang maha mengetahui. Begitupun siapa yang berhak masuk surga atau sebaliknya, yang bakal dibakar di neraka, biar Allah sajalah yang menentukannya.

Jadi menurut Anda harus ada kerendahan hati dalam beriman?

Betul sekali. Dan saya pikir memang harus begitu. Kita umat Islam diajarkan oleh agama kita untuk selalu memohon petunjuk (hidayah) kepada Allah 17 kali setiap hari: *Ihdinâ al-shirâth al-mustaqîm*. Tidak lain maknanya bahwa dalam keadaan apa pun kita tidak boleh sombong, takabur seolah kita pasti benar, apalagi disertai tudingan kepada orang lain sebagai sesat, hanya karena mereka tidak sepaham dengan kita. Ingat, dalam al-Quran tiga kali kita diberi tahu bahwa "Allah sajalah yang tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya"

(Q.16:125). Selain itu, petunjuk yang sama juga terdapat dalam Q.53:30 dan Q.68:7. Maka, kerendahan hati itulah landasan pluralisme.

> Setiap pemahaman terhadap al-Quran dari seseorang atau sekelompok orang terbuka untuk diuji oleh pemahaman orang atau kelompok lain. Dengan demikian akan terjadi proses seleksi: mana yang secara metodologis kokoh; secara substantif sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam; dan secara historis memberikan kemanfaatan bagi umat dan kemanusiaan. Yang sanggup melalui proses seleksi itulah yang akan unggul. Oleh sebab itu, kebebasan membaca dan memahami al-Quran juga harus dibarengi dengan kebebasan untuk menguji dan mempertanggungjawabkannya.

Bagaimana dengan sekularisme?

Nah, setelah berbagai aliran atau sekte dalam suatu lingkungan masyarakat sepakat untuk saling menghormati, minimal saling membiarkan pihak lain eksis, maka ada kebutuhan baru lagi menyusul, yakni membebaskan negara dari keterikatan dengan salah satu agama atau aliran keyakinan yang di-anut oleh warganya. Sebab kalau negara sebagai lembaga kekuasaan publik menjadi milik orang atau kelompok tertentu, atau dibiarkan memihak pada salah satu agama atau keyakinan tertentu, maka dipastikan negara akan menganakemaskan salah satu agama dengan keyakinan tertentu. Dan, pada saat yang sama, menistakan agama atau keyakinan lain.

Oleh karena itu, perlu disepakati bahwa negara harus netral terhadap semua agama dan keyakinan yang dianut oleh warganya. Inilah yang disebut dengan sekularisme, suatu paham yang memisahkan negara dari keterikatan subyektif dengan salah satu agama

atau keyakinan tertentu. Hanya dengan paham inilah maka negara bisa mengayomi dan melayani kepentingan segenap warga negaranya secara adil, tanpa pilih kasih atau diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut oleh warganya.

Dengan kata lain, negara sebagai otoritas publik dan duniawi, harus mengacu kepada sifat Allah *"al-Raḥmân"*, mengasihi segenap warganya tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama atau keyakinan mereka. Seperti halnya dengan sifat kasih-Nya, Allah mengasihi segenap manusia di dunia ini tanpa membedakan apakah mereka beriman atau kafir: semua orang boleh menghirup udara-Nya, meneguk air-Nya, menginjak bumi-Nya, dan menyerap sinar matahari-Nya. Bahwa akan ada perbedaan perlakuan atas dasar keimanan di akhirat kelak, itu lebih mengacu pada sifat-Nya sebagai *"al-Raḥîm"*.

Apakah sejarah ketegangan antara wilayah pemerintah, agama, dan warganya juga pernah terjadi di Islam?

Sejarah Islam pun mencatat hal yang tidak berbeda, terutama pada Abad Pertengahan kekuasaan Islam, ketika kekhalifahan tertentu memihak pada salah satu mazhab. Lihat ketika Abbasiyah di bawah al-Makmun yang pro-Mu'tazilah, semua tokoh Sunni dan Syi'ah disingkirkan. Imam Syafi'i dicambuk dengan tuduhan simpati ke Syi'ah; Imam Ahmad ibn Hanbal dipenjarakan sampai menemui ajalnya.

Demikian pula sebaliknya, ketika yang berkuasa adalah penganut Sunni atau Syi'ah, maka ulama dan pejabat yang menganut paham berbeda juga mengalami diskriminasi. Maka ketika khalifah al-Mansur hendak menjadikan kitab *al-Muwaththa'* sebagai sema-

cam kitab perundang-undangan untuk seluruh wilayah, Imam Malik menolaknya. Beliau tidak bersedia karena hal itu akan menyudutkan dan memberangus pemikiran dari imam-imam lain yang, bagi beliau, juga berhak hidup dan berkembang.

Sebenarnya dalam dokumen Piagam Madinah, Rasulullah pun mendesain negara Madinah sebagai negara yang netral terhadap jeratan kepentingan sektarian agama dan keyakinan tertentu. Negara Madinah dalam konsep Nabi harus dapat melindungi kepentingan semua warga negaranya, meskipun dengan agama, keyakinan, atau tradisi yang berbeda-beda.

Jadi, lembaga negaranya yang dinetralkan, disekularkan, bukan (pola pikir) manusianya?

Betul. Dalam arti negara dibebaskan dari keterikatan subyektif dengan kepentingan agama atau keyakinan tertentu. Sementara manusia tetap terikat dengan keyakinan atau agamanya. Karena agama (dengan inti keimanan dan amal) memang untuk manusia, bukan untuk negara. Tidak ada negara yang disebut mukmin atau kafir. Maka yang bakal diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak adalah manusianya, bukan lembaga kekuasaan yang bernama negara. Demikian pula yang dijanjikan masuk surga atau diancam neraka adalah manusia. Tidak ada negara yang bakal disiksa di neraka atau diganjar di surga.

Apakah Anda hendak mengatakan bahwa hukum haram atau fatwa haram terhadap liberalisme, pluralisme, dan sekularisme itu salah alamat?

Seperti saya katakan di awal, hukum itu tergantung bagaimana konsep kita terhadap yang hendak dihukumi (*mahkûm fih*). Kalau liberalisme diartikan hidup secara suka-suka, liar, dan semau nafsu kita, saya pun harus mengharamkannya dan mengutuknya. Juga jika pluralisme diartikan semua agama sama bobot kebenarannya, ya, saya pun menolaknya dan mengharamkannya. Karena jika semua agama sama benarnya atau sama bobot kebenarannya maka tidak akan ada orang yang benar-benar memilih dan meyakini agamanya. Saya menganut Islam karena saya meyakini keunggulannya meski, pada saat yang sama, saya juga harus menghormati agama-agama lain. Untuk apa saya memilih agama A kalau agama B, C atau D sama isinya dan nilainya?

Demikian pula kalau sekularisme diartikan negara harus membenci agama, melarang umatnya beragama. Dengan tandas saya pun akan melawannya, mengutuknya. Sekularisme yang seperti itu jelas haram! Tapi, siapa yang mendefinisikan liberalisme, pluralisme, dan sekularisme seperti itu?

Sebagai tokoh NU, apakah pemahaman Anda tentang ketiga isu tadi juga dipahami oleh kalangan kiai-kiai NU?

Sejauh yang dimaksud ketiga konsep tadi seperti yang dipaparkan di atas, tidak terdistorsi, saya yakin beliau-beliau juga punya pendapat yang sama. Lihat dalam konsep *Khittah* NU sendiri tercantum prinsip *al-Tasammuh*, prinsip menghormati perbedaan, tidak menistakan orang lain hanya karena berbeda agama, paham atau mazhab. Ketika dalam Anggaran Dasar NU menyebut bahwa "NU menganut salah satu Mazhab Empat", tidak lain karena NU menghormati perbedaan. Itu Pluralisme!

Prinsip *al-Tasammuh* dalam NU terlahir, di samping sebagai ajaran agama, juga berdasar pada pengalaman pahit yang dialami warga NU sendiri. Anda tahu bahwa umat Islam pertama yang dituduh sesat (dianggap akan dilempar ke neraka oleh sesama umat Islam) adalah NU.

Ceritanya, teman-teman penganut mazhab literalis melihat NU memelihara banyak bidah seperti tahlilan, *mauludan, rajaban, salawatan*, ziarah kubur, dan sebagainya. Bagi yang menuduh, semua bidah adalah sesat (*dlalâlah*), dan semua yang sesat masuk neraka. Kebetulan saja NU banyak umatnya. Saya pikir 70% umat Islam Indonesia mengenal *tahlilan*, *mauludan*, dan sebagainya. Bahkan yang sering disebut Islam *Abangan,* yang jarang salat pun kalau meninggal ingin ditahlilkan juga. Jadi orang seperti mereka pun sebetulnya *Nahdlîyîn*. Karena pengikutnya banyak, kaum literalis tadi tidak berani merusak masjid-masjid dan pesantren-pesantren NU. Coba kalau NU kecil, sudah sejak dulu NU dihabisi!

Mengingat masyarakat kita yang plural, majemuk, dengan agama, keyakinan, dan tradisi yang berbeda-beda dan sangat beragam, bagaimana seharusnya kita bersikap?

Menurut saya, semua umat beragama, umat Islam khususnya sebagai mayoritas, harus berani dan pandai bersikap rendah hati (*tawadldlu'*), tidak menyombongkan diri (*takabbur*). Sombong itulah yang membuat orang syirik, kufur, menganggap dirinya yang paling benar, bahkan tanpa disadari telah menempatkan diri seolah-olah Tuhan itu sendiri.

Kalau ada orang yang berbeda keyakinan, tidak usahlah kita tuding-tuding mereka sesat! Tudingan itu melampaui wewenang

kita. Sebab, sama saja Anda melempar yang bersangkutan ke neraka. Sebut saja mereka "berbeda" atau "menyimpang" dari garis keyakinan kita. Tentang cap "sesat" biar Allah yang menghakiminya. Lagi pula yang bakal dilihat dari kita adalah hati, akhlak serta amal perbuatan kita. Rasulullah bersabda: *Lâ yu'minu ahadukum hattâ yuhibba li-akhîhi mâ yuhibbu li-nafsih* (Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri); *Akmal al-nâs îmânan ahsanuhum khuluqan* (Yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya); *Al-dîn husnu al-khuluq* (Beragama adalah berakhlak mulia); *Al-muslim man salima al-muslimûn min lisânihi wa yadayh* (Orang Islam adalah orang yang bisa memberikan rasa aman dan kedamaian kepada orang lain, baik dengan lisan maupun tangannya).

Percakapan dengan

Melani Budianta



Melani Budianta, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI). Ia mengajar Multikulturalisme dan Kajian Budaya pada Departemen Susastra.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita berhadapan dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, etnik, bahasa, maupun budaya. Jika tatanan publik dikelola tanpa adanya pemisahan, kemungkinan konflik yang muncul menjadi lebih tinggi. Karenanya dengan sekularisasi kita perjuangkan terwujudnya agama sipil yang bisa menyatukan perbedaan dengan mengambil etos dan moralitas terbaik dari semua agama untuk dikelola di wilayah publik. Saat ini sangat diperlukan agar satu kelompok dapat memahami kelompok lainnya dan terjadi pertukaran pemahaman. Sehingga, tumbuh afeksi budaya satu sama lain. Tidak terlalu penting apakah kita menyebut cara seperti itu dengan pluralisme atau multikulturalisme, yang penting adalah konsep dasarnya. Agar pluralitas dapat terjamin, maka kesantunan publik dan jaminan hukum harus dijalankan.

Sekularisme atau sekularisasi sering dipahami sebagai desakralisasi agama (profanisasi atas yang sakral). Dapatkah Anda mengeksplorasi hal ini lebih jauh, terutama dari perspektif kebudayaan?

Pernah ada suatu diskusi tentang sekularisme di sini, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, dengan pembicara Frans Dahler dan Komaruddin Hidayat. Pada kesempatan itu Dahler membedakan antara sekularisme dan sekularisasi. Sekularisme berarti sebuah ideologi. Sedangkan sekularisasi diartikan sebagai penataan antara yang sakral dan yang profan dalam tata kehidupan publik, kehidupan bernegara dan berbangsa. Ada pembedaan yang jelas di situ. Persoalan yang muncul, sampai terjadi penentangan dan sebagainya, lebih berada dalam wilayah sekularisme. Hal tersebut dapat dimengerti, karena orang telah cenderung mengartikan sekularisme dengan jelek dan hanya menganggapnya sebagai orientasi ke arah yang sekular. Sementara sekularisasi sedikit lebih mendapatkan penailaian baik karena mempunyai arti sebagai pengaturan tata hidup.

Mengapa harus terjadi sekularisasi? Karena di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita berhadapan dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, bahasa, maupun budaya. Tatanan publik sendiri kalau dikelola dengan tanpa adanya pemisahan (agama dan negara/politik), kemungkinan konflik yang akan muncul menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, saya kira sekularisasi itu penting.

Namun pada titik inilah kiranya mendesak untuk dilakukan pembedaan antara sekularisme dan sekularisasi. Kalau mendiskusikan sekularisme (ideologi) kita akan cenderung masuk ke dalam konteks budaya masing-masing, perihal apa yang sudah kita inter-

nalisasi sejak lama. Sementara dengan sekulariasi, kita bisa lebih dingin memper-bincangkannya. Yang akan kita bicarakan adalah apa yang bisa diatur bersama. Pada wilayah inilah suatu kesepakatan bersama bahwa kita tidak memakai salah satu agama sebagai *default*-nya akan terwujud. Dalam konteks orientasi budaya, ideologi begitu melekat dan kadangkala tidak bisa ditawar lagi. Maka perdebatan sekularisme pun pada akhirnya hanya akan menjadi perdebatan terus-menerus tanpa hasil yang berarti.

Gagasan sekularisasi terkait erat dengan modernisasi yang lebih percaya pada otonomi manusia dan ilmu pengetahuan ketimbang hal-hal yang sakral atau supranatural. Dalam aspek kebudayaan, di Eropa belakangan kita bisa melihat antiagama menjadi life style. *Fenomena itu terlihat seperti pada penggambaran Yesus oleh para seniman secara vulgar dan dalam beberapa hal kurang etis, bahkan cenderung* ofensif *terhadap gereja. Beberapa kalangan menganggap serangan terhadap agama di wilayah Skandinavia tengah menjadi fashion.*

Fenomena semacam itu terjadi, menurut saya, masih dalam konteks sekularisme. Sementara dalam sekularisasi yang dipermasalahkan adalah penataannya. Bagaimana kita harus menatanya sehingga tidak terjadi pencampuradukan yang membingungkan. Gaya hidup adalah hak setiap orang. Namun aturan main dalam ruang publiknya seperti apa, ini yang perlu diluruskan. Kita berhak untuk tidak sepakat dengan yang ada, kalau memang tidak sesuai dengan cita rasa kita. Maka, dalam contoh penggambaran Yesus itu, kita tidak bisa serta-merta mengartikannya sebagai desakralisasi agama. Agama tetap menjadi wilayah yang sakral dan memang harus tetap dipertahankan oleh para penganutnya. Kendati, lagi-

lagi, bagaimana cara untuk tetap mempertahankannya yang harus dibicarakan agar tidak mengganggu hak orang lain.

Sekularisme, sudah terlalu banyak memperoleh pandangan yang sangat negatif. Barangkali kita memang harus menggunakan istilah yang lain lagi. Kita bisa menggunakan istilah *civic religion* untuk memperjuangkan hal yang secara esensial sebenarnya sama. Kita perjuangkan terwujudnya agama sipil yang bisa menyatukan perbedaan dengan mengambil etos dan moralitas terbaik dari semua agama untuk dikelola di wilayah publik.

Amerika, Prancis, dan termasuk juga Kanada, yang tetap memakai istilah sekularisme dapat memberikan ruang bagi berbagai agama untuk tetap hidup dan berkembang. Namun, pada sisi lain, tugas agama di negara-negara tersebut adalah bagaimana mengemas nilai-nilainya dalam bahasa publik yang reasonable *dan lebih mudah diterima kalangan yang berbeda sekalipun. Pada kasus ini, sekularisme tidak serta-merta membunuh agama. Lantas apakah ketakutan bahwa sekularisme akan melenyapkan agama merupakan sesuatu yang cukup beralasan?*

Bagi saya, di situlah letak pentingnya pemisahan antara sekularisme dan sekularisasi. Karena, terutama sekularisme, sudah terlalu banyak memperoleh pandangan yang sangat negatif. Barangkali kita memang harus menggunakan istilah yang lain lagi. Kita bisa menggunakan istilah *civic religion* untuk memperjuangkan hal yang secara esensial sebenarnya sama. Kita perjuangkan terwujudnya agama sipil yang bisa menyatukan perbedaan dengan mengambil etos dan moralitas terbaik dari semua agama untuk dikelola di wilayah publik. Sebetulnya, untuk konteks Indonesia,

Pancasila juga mempunyai peluang ke arah itu. Namun, karena terlanjur sudah mendapat konotasi yang begitu buruk selama 32 tahun, orang sudah terlebih dahulu mual dan alergi dengannya. Padahal melalui Pancasila kesantunan publik dari kebajikan agama-agama bisa diolah.

Problemnya, di Indonesia, tiadanya upaya pemerintah untuk bersikap tegas dalam menetapkan demarkasi antara agama dan negara, sehingga dalam praktiknya kerap terjadi pencampuradukan di antaranya. Agama pada gilirannya hanya akan dijadikan alat oleh negara atau, sebaliknya, oleh kalangan umat tertentu yang merasa dominan dan mayoritas lantas mengatasnamakan agama untuk menggolkan kepentingan-kepentingan politiknya. Bagaimanakah solusi terbaik untuk segera menyelesaikan hal seperti ini?

Memang harus ada ketegasan bahwa, misalnya, otonomi daerah dengan perda-perdanya jangan sampai bertentangan dengan kesepakatan dasar bernegara kita. Kalau sampai ada yang menyimpang dari itu, harus ada ketegasan tindakan dari pembuat keputusan. Akan sangat susah menyelesaikannya jika tetap menggunakan bahasa yang diwarnai oleh agama. Maka koridornya adalah kesepakatan bersama. Kita bisa mengambil contoh-contoh soal yang positif, sebagai *best practices*, pada suatu aturan dengan tetap mempertahankan nuansa Muslim di dalamnya. Karena di negara ini yang kebetulan mayoritas – dan oleh sebab itu bisa menjadi warna budaya di negara kita – adalah Muslim, maka sebagai warna budaya, kita harus menggali kekayaan budaya Muslim yang inklusif, plural, bisa merangkul yang lain, yang justru produktif. Dengan mengelola ini secara baik, negara kita akan bisa menjadi contoh sebagai negara

dengan budaya Muslim terkemuka. Media massa dan organ-organ swadaya masyarakatnya pun bisa menunjukkan hal yang serupa. Tentunya dengan tetap memposisikan budaya seperti itu sebagai bukan bagian tunggal yang menyatu dengan negara, tetapi terpisah. Maka adanya warna dominan agama tertentu dalam suatu negara pun menjadi tidak bermasalah, justru semakin memperkaya. Pertarungan yang ada sekarang sebetulnya adalah pertarungan budaya, yaitu bagaimana mensosialisasikan budaya yang bisa menerima dan menghargai yang lain, yang berbeda.

Sekularisasi kita jalankan bukan dengan melarang yang berbau agama di ruang publik, tetapi dengan membiarkan itu tetap ada, seraya menghormati agama yang lain di tempat yang sama. Pada prinsipnya, jangan sampai mewarnai suatu acara bersama dengan memonopoli satu agama tertentu.

Namun begitu, agama sendiri memiliki dua wajah (positif dan negatif). Memang yang dikehendaki oleh kita semua tentu adalah wajahnya yang positif. Sementara kalangan Islam tertentu yang mengklaim diri mayoritas terus berusaha dan memaksa mendesakkan ajarannya secara tekstual, harfiyah, yang diimplementasikan melalui perda-perda atau aturan perundang-undangan lainnya sehingga malah memberangus hak dan kebebasan individu untuk beragama dan berkeyakinan. Menurut Anda bagaimanakah merumuskan tatanan ideal yang tetap memberi ruang bagi agama tetapi pada sisi lainnya bisa menjamin civil rights *dan* civil liberties*, termasuk untuk perempuan?*

Memang kita tidak akan bisa sama persis dengan apa yang terdapat di Eropa. Karena kita menganggap agama sebagai sesuatu

yang sangat serius. Agama mewarnai seluruh kehidupan manusia. Demikianlah di Indonesia. Yang perlu ditegaskan, sekali lagi, adalah aturan mainnya, agar jangan sampai salah satu agama mendominasi yang lainnya. Tetapi bahwa agama mewarnai hampir seluruh kehidupan masyarakat Indonesia adalah sudah menjadi ciri kita. *Paling banter*, karena tidak bisa menghilangkan sama sekali ketentuan-ketentuan yang terdapat pada agama, di dalam kehidupan kita, maka jalan yang paling mungkin dan menjadi kemestian bagi kehidupan bersama yaitu bagaimana kita mencoba menerapkan model kebersamaan yang lebih plural. Contohnya, kalaupun setiap akhir dari suatu acara harus ditutup dengan doa, maka doanya bisa dilakukan dari berbagai macam agama yang ada. Sekularisasi kita jalankan bukan dengan melarang yang berbau agama di ruang publik, tetapi dengan membiarkan itu tetap ada, seraya menghormati agama yang lain di tempat yang sama. Pada prinsipnya, jangan sampai mewarnai suatu acara bersama dengan memonopoli satu agama tertentu.

Tentang *civil rights* dan *civil liberties*, kita harus mempunyai aturan yang jelas untuk hal ini: bagaimana kita memperjuangkan hak setiap warga, termasuk kaum perempuan, kalangan yang tertindas, dan sebagainya untuk diatur secara jelas. Lagi-lagi, aturan tersebut jangan memakai aturan agama. Itulah sekularisasi kita. Permasalahan mutakhir yang terjadi di negeri ini adalah perda-perda itu memakai perspektif suatu agama tertentu, namun, sejatinya, bertentangan dengan konstitusi dasar negara. Perda yang berbau agama itu diperbolehkan sejauh tidak bertentangan dengan dasar konstitusi kita dan tidak merugikan yang lain. Problem ini memang lumayan berat, apalagi dengan masyarakat yang umumnya tidak terlalu banyak memiliki sudut pandang pemikiran dan pemahaman. Wila-

yah untuk hal ini sebenarnya menjadi wilayah pendidikan, yang sayangnya pendidikan kita hanya "UAN sentris". Harusnya pendidikan kita menjadikan *civic education* tidak sekadar sebagai hafalan, tetapi menjadi kesadaran bersama semua warga. Inilah garapan wilayah sipil melalui pendidikan masyarakat yang tidak melulu didominasi oleh agama. Contohnya, bisa dengan membuat pendidikan lintas agama.

Kenapa Jepang, Cina dan Korea Selatan bisa menjadi negara-negara yang sangat diperhitungkan? Sebab, lewat kejepangan-nya mereka dapat memanfaatkan globalisasi. Jika demikian persoalannya, kiranya kita juga bisa memanfaatkan hal yang sama. Kita bisa memakai elektronik, sastra populer, dan sebagainya sambil memasukkan ke dalamnya nilai-nilai budaya kita, tanpa keharusan untuk memperhatikan yang asli atau murni, sebagaimana sebelumnya menjadi hal yang dianggap penting. Kalau hanya mencari yang asli, kita tidak akan pernah bisa menguasai globalisasi. Maka sekarang sudah saatnya budaya dan kesenian kita harus mulai sedikit demi sedikit diubah untuk dapat masuk dan diterima di pasar global.

Sekarang kita berada di iklim global di mana, di antaranya, agama menjadi begitu penting. Maka dalam rangka membuat formula yang dapat menjamin *civil rights* dan *civil liberties* kita bisa dengan menggarap berbagai jalan yang ada dan menjadi pegangan setiap warga. Ada yang memang sama sekali tidak melibatkan agama, dan ada yang masih memasukkan nilai-nilai atau ajaran agama. Jadi, menuju sekularisasi bukan berarti harus menghilangkan dan tidak bekerjasama dengan ajaran dan instansi agama. Kita tetap bisa masuk ke gereja atau bisa juga masuk ke pesantren untuk mendiskusikan soal pijakan mana yang harus kita pilih guna menata ruang publik, sehingga

kita bisa merasa berumah di ranah publik kita sendiri, meski dengan adanya warna budaya tertentu yang dominan.

Sebab, budaya adalah rumah. Karena itu, harus menyediakan segala keperluan dan keinginan dari yang ada di dalamnya agar tetap merasa betah. Makanya, sekulariasi yang akan diterapkan tidak serta-merta mengubah perempuan Indonesia menjadi seperti Madonna. Itu tentu akan ditolak dan membuat penghuni di dalam rumah tidak lagi merasa betah karena sudah merasa bukan rumahnya lagi. Biarkan rumahnya apa adanya, tetapi tidak mengganggu kehidupan bersama.

Kalau dengan model aturan yang sudah ada, lepas dari bahwa Pancasila pernah dijadikan asas tunggal pada masa Orde Baru, bagaimana pandangan Anda agar masyarakat bisa merasa betah bahwa negeri ini merupakan rumah kita sendiri? Lalu apakah Pancasila dan UUD '45 cukup bisa mengantarkan negeri ini sebagi rumah yang memadai dan ideal bagi seluruh warganya yang plural, atau masih harus direvisi?

Kesepakatan dasarnya, secara teknis, masih ada yang harus diperbaiki, karena Undang-Undang Dasar kita masih menyimpan benih-benih diskriminasi, seperti pembedaan pribumi dan non-pribumi serta ketentuan hukum lainnya. Di situ harus ada mekanisme untuk menerjemahkannya dalam konteks sekarang, bahwa yang asli "seasli-aslinya" itu sudah tidak ada. Yang lebih penting adalah komitmen kita sebagai warga negara, bukan lagi mempermasalahkan keaslian warganya. Dengan demikian dibutuhkan proses untuk memperbaiki konstitusi tanpa merusak tatanan inti atau prinsip dasarnya. Amerika dan negara lain selalu melakukan amandemen

terhadap konstitusinya. Masyarakat Indonesia sendiri sudah dari sejarahnya menerima keragaman, kebhinekaan. Maka Pancasila tetap bisa dipakai karena memang sangat menghargai kemajemukan. Masalahnya, sekarang ini, adalah bagaimana menghidupkan semangat yang terkandung dalam Pancasila agar tidak hanya menjadi slogan. Kita berikan contoh-contoh yang mendukung itu kepada masyarakat. Media juga harus berperan besar dalam upaya mensosialisasikannya.

> Yang saat ini diperlukan adalah agar satu kelompok dapat memahami yang lainnya dan terjadi pertukaran pemahaman. Sehingga tumbuh afeksi budaya satu sama lain. Oleh karena itu, tidak terlalu penting apakah kita mau menyebut cara seperti itu dengan pluralisme atau multikulturalisme, yang penting adalah konsep dasarnya. Menurut saya, yang cocok bagi kita dalam menyikapi kemajemukan bukan dengan cara yang segregatif.

Di samping itu, upaya media yang demikian tadi sebenarnya lebih merupakan kerja budaya. Kerja budaya akan lebih baik dan efektif kalau kelompok fundamentalis yang kurang menghargai perberbedaan, yang ingin mewarnai negara hanya dengan satu agama, hendaknya diberikan pemahaman melalui media yang bahasanya baik dan akrab bagi mereka. Jangan konfrontatif, sehingga mereka tidak terlalu resisten. Strateginya tidak bisa hanya dengan satu cara. Harus dengan banyak cara, ada yang bicara melalui kehidupan sehari-hari di kalangan bawah, ada yang menggarap kalangan menengah dan kalangan elit, atau mungkin bisa lebih banyak lagi. Kita harus belajar pada pengalaman orang yang bisa secara efektif menjalankan strategi itu.

Di atas semuanya, pekerjaan seperti itu adalah pekerjaan yang memang sangat berat dan membutuhkan energi tidak sedikit. Belum lagi fakta bahwa militansi mereka yang fundamentalis sangat tinggi, sedangkan yang menganut sekularisasi cenderung lebih individual. Sehingga wajar kalau dilihat secara budaya, sekularisasi pada dasarnya terlihat tidak terlalu cocok dengan kondisi Indonesia. Dari sini, terlihat bahwa kerja kaum sekular sudah harus turun sampai ke wilayah-wilayah terbawah dari masyarakat. Kita juga harus menggarap yang komunal. Karena ada beberapa hal yang dapat dijadikan contoh dari yang komunal, di mana di sana terdapat pola hubungan yang tetap menguntungkan yang mayoritas, dan budaya yang dimilikinya tetap dipakai sebagai warna utama, dengan tidak menggerogoti prinsip dasar negara kita yang plural itu. Dalam konteks kerja budaya ini, kita harus berterima kasih kepada beberapa kalangan, seperti seniman, cerpenis, novelis dan sebagainya, yang dengan caranya masing-masing telah melakukan terobosan, yang meski terlihat kecil dan "ngepop", ternyata memiliki gaung yang besar.

Modernisasi selain membuat agama terpinggir, juga dengan peran media yang diciptakannya telah membawa keragaman budaya menuju pada penyeragaman, yang pada akhirnya dapat menggerus tradisi-tradisi lokal yang ada dengan identitasnya masing-masing. Bagaimana Anda melihat hal ini?

Permasalahan yang kini dihadapi yaitu mengapa mereka, kaum fundamentalis agama, menjadi lebih militan? Karena dalam konteks globalnya bermunculan wacana yang disebarkan melalui media yang memposisikan agama tidak seperti yang mereka idealkan.

Kita harus dapat memahami hal ini secara jernih dan justru mencoba untuk menetralisirnya, atau bahkan menangkalnya, dengan menguatkan daya tawar budaya kita.

Kenapa menaikkan daya tawar budaya menjadi pilihan yang signifikan? Karena ada yang mengatakan bahwa Indonesia, di pentas dunia, sebenarnya tidak ada. Secara ekonomi, ia bahkan tidak lebih dari sekadar pasar tempat semua barang dapat diperjualbelikan. Maka, dalam konteks globalisasi, kalau kita coba menangkal atau melawan arusnya secara ekonomi, sangat berat. Satu-satunya daya tawar kita adalah budaya: bagaimana mengemas budaya kita agar dapat diterima di pasar, sehingga kita bisa dilihat sebagai suatu alternatif. Kapitalisme memang sangat bertumpu pada kekuatan pasar dan tidak memperdulikan lagi agama. Oleh karena itu, kalangan agama menjadi sangat militan menentangnya.

Mengapa harus terjadi sekularisasi? Karena di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa kita berhadapan dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda-beda, baik agama, bahasa, maupun budaya. Tatanan publik sendiri kalau dikelola dengan tanpa adanya pemisahan, kemungkinan konflik yang akan muncul menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini, saya kira sekularisasi itu penting.

Cara yang lebih elegan, memang, seharusnya bukan dengan menghindari globalisasi. Justru kita bisa memanfaatkan dan melihatnya sebagai peluang untuk memasukkan modal budaya kita. Kenapa Jepang, Cina dan Korea Selatan bisa menjadi negara-negara yang sangat diperhitungkan? Sebab, lewat kejepangan-nya mereka dapat memanfaatkan globalisasi. Jika demikian persoalannya, kiranya kita juga bisa memanfaatkan hal yang sama. Kita bisa memakai elektronik, sastra populer, dan sebagainya sambil memasukkan ke

dalamnya nilai-nilai budaya kita, tanpa keharusan untuk memperhatikan yang asli atau murni, sebagaimana sebelumnya menjadi hal yang dianggap penting. Kalau hanya mencari yang asli, kita tidak akan pernah bisa menguasai globalisasi. Maka sekarang sudah saatnya budaya dan kesenian kita harus mulai sedikit demi sedikit diubah untuk dapat masuk dan diterima di pasar global.

Terkait tarik-menarik antara yang global dan yang lokal, maka yang menjadi masalah sebenarnya adalah bagaimana menciptakan tatanan yang setara dan adil. Lantas, dalam konteks negara, agama, civil society *dan pasar global, menurut Anda, hubungan seperti apakah yang semestinya dibangun?*

Saya setuju bahwa masih diperlukan peran negara, minimal sebagai *broker*, yang mempunyai keberpihakan untuk memperkuat daya saing atau daya jual negara. Dalam perdagangan, misalnya, negara harus berperan dalam mengambil kebijakan baik untuk barang-barang yang masuk ke dalam negeri (impor), maupun yang keluar (ekspor). Sayangnya, negara kita sendiri sekarang sedang kehilangan moralitas, telah terjadi degradasi moral negara pascakeruntuhan Orde Baru. Tidak ada lagi semangat kenegaraan seperti dulu ketika kita masih berjuang untuk merebut kemerdekaan. Kita tidak lagi memiliki negarawan yang tidak sekadar pemimpin politik. Harapan ini hanya ditaruh pada anak-anak muda, yang mempunyai prestasi besar. Kita bisa mencari anak muda yang mempunyai kemampuan budaya mengglobal, tanpa kehilangan identitasnya, bahkan bisa membawa keindonesiannya ke luar negeri. Dari sinilah, setidaknya muncul di antara mereka sekarang ini peneliti-peneliti muda, seniman, dan lain-lain yang dapat berbicara dalam ranah

internasional. Pada titik ini, bagi saya, sangatlah penting untuk melakukan legalisasi hak paten bagi kita sendiri. Sebab, paten-paten yang seharusnya menjadi milik kita, kini makin habis dikuasai negara lain yang lebih serius mengurusinya. Seharusnya negara menjadi sponsor utama, sehingga kita mempunyai banyak hak paten, baik dari segi intelektualitas, kesenian, sampai produk makanan. Sayangnya negara kita sudah terlalu merosot karena korupsi mental yang ada. Kenegaraan kita menjadi hilang. Namun kita tetap yakin bahwa itu belum sepenuhnya hilang. Kita masih mempunyai harapan pada generasi muda.

> Agar pluralitas dapat terjamin, maka keduanya, kesantunan publik dan jaminan hukum, harus dijalankan. Menjalankan salah satunya saja tanpa dibarengi dengan yang lain tidaklah mungkin.

Di tengah derasnya serbuan globalisasi dalam pelbagai ranah kehidupan, menurut Anda apakah gagasan nasionalisme masih relevan?

Betul, nasionalisme tetap diperlukan. Namun, nasionalisme yang tidak semata jargon, tetapi menjadi praktik dan yang memiliki wawasan global. Intinya, bagaimana kita harus meletakkan nasionalisme kita dalam konteks global, bukan malah melawannya. Kita tidak mencabut diri dari globalisasi, sebaliknya masuk dan ikut memberikan nuansa yang berbeda. Dan untuk hal ini, kita tidak bisa berharap terlalu banyak kepada pemerintah, tetapi lebih kepada sastra populer, kesenian, dan lain sebagainya, yang memungkinkan untuk terciptanya kosa-kata baru bagi upaya membangun kembali kepercayaan diri yang di mata dunia internasional sudah terinjak dengan cap teroris dan lain-lain. Dari situlah

kita seharusnya dapat membuktikan bahwa kita sebenarnya tidak seperti yang mereka tuduhkan itu.

Perihal pluralisme, dalam konteks Indonesia yang teramat plural, seharusnya telaah ini sangat relevan untuk membentengi kemajemukan dari monisme dalam berpikir, yang dalam agama mewujud pada pandangan monoreligius; di samping juga untuk membentengi kemajemukan dari relativisme yang kerap dituding menjadi akibat buruk dari pluralisme yang menisbikan segala sesuatu. Bagaimana Anda menjelaskan konsep ini dalam tantangan mutakhir keindonesiaan?

Ada bermacam-macam konsep tentang pluralisme yang isinya bisa berbeda-beda. Namun di atas segala perbedaannya, yang terpenting dalam kemajemukan, kita harus menyikapinya dengan toleransi. Memang harus diakui, selama ini kita seringkali menyikapi kemajemukan dengan perspektif yang sangat mono. Cara pandang semacam ini yang hendaknya segera dibongkar supaya bisa menata yang majemuk agar masing-masing merasa memiliki dan dapat hidup dengan damai. Pertanyannya, perspektif kemajemukan seperti apakah yang bisa melakukan itu? Apakah dengan membiarkan kemajemukan tumbuh dengan sendirinya tanpa penataan, yang penting saling menghargai – seperti membiarkan Badui tetap dengan Baduinya, meskipun dengan konsekuensi munculnya sikap eksklusif yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pluralisme sendiri? Sepertinya merespon pluralisme dengan cara seperti ini tidak mungkin dan sangat tidak memadai. Terlebih kini telah terjadi persilangan budaya yang sangat kuat di masyarakat, sehingga sebenarnya realitas masyarakat banyak secara otomatis akan menolak sikap yang eksklusif sebagaimana telah diungkapkan di atas. Justru yang saat

ini diperlukan adalah agar satu kelompok dapat memahami yang lainnya dan terjadi pertukaran pemahaman. Sehingga tumbuh afeksi budaya satu sama lain.

Oleh karena itu, tidak terlalu penting apakah kita mau menyebut cara seperti itu dengan pluralisme atau multikulturalisme, yang penting adalah konsep dasarnya. Menurut saya, yang cocok bagi kita dalam menyikapi kemajemukan bukan dengan cara yang segregatif. Sebab, model seperti ini tidak lain hanyalah kelanjutan dari apa yang pernah dipraktikkan oleh kolonial Belanda. Yang sekarang harus dimajukan sebagai *best practices* dalam melihat kemajemukan adalah kemampuan kita untuk memahami secara silang. Sayangnya suara seperti itu kalah dengan yang monolitik, yang sebenarnya menyebabkan konflik. Jika kita perhatikan, sebenarnya sudah banyak kalangan muda yang melakukan praktik-praktik dengan menekankan pemahaman silang tersebut, hanya saja mereka kalah suara dan gaungnya. Demikian juga, lagi-lagi, dalam menyikapi pluralisme, yang kita inginkan bukan

---

Dalam rangka membuat formula yang dapat menjamin *civil rights* dan *civil liberties* kita bisa dengan menggarap berbagai jalan yang ada dan menjadi pegangan setiap warga. Ada yang memang sama sekali tidak melibatkan agama, dan ada yang masih memasukkan nilai-nilai atau ajaran agama. Jadi, menuju sekularisasi bukan berarti harus menghilangkan dan tidak bekerjasama dengan ajaran dan instansi agama. Kita tetap bisa masuk ke gereja atau bisa juga masuk ke pesantren untuk mendiskusikan soal pijakan mana yang harus kita pilih guna menata ruang publik, sehingga kita bisa merasa berumah di ranah publik kita sendiri, meski dengan adanya warna budaya tertentu yang dominan.

---

yang relativis, apalagi dari perspektif agama yang serba relatif. Tidak mungkin kita katakan bahwa semua agama sama benarnya, tetapi kita katakan bahwa semuanya sama memiliki hak untuk hidup dalam tatanan bersama.

Model segregatif dari pemerintah dalam merespon keberbagaian, seperti konsep kerukunannya Orde Baru yang dulu akrab disebut SARA, sudah tidak memadai lagi. Lantas bagaimanakah konsep toleransi yang ideal bagi pemerintah untuk masyarakat majemuk seperti indonesia ini?

Saya setuju bahwa sekarang konsep SARA sudah tidak mungkin lagi. Itu hanya mekanisme untuk menekan konflik. Yakni, merepresi konflik tanpa melakukan tindakan apa-apa terhadapnya. Padahal dalam konflik terdapat luka, dendam dan sebaginya, yang oleh pemerintahan Orde Baru tidak boleh dibicarakan, tetapi dialihkan. Menurut hemat saya mekanisme seperti itu tidak mungkin lagi diterapkan oleh pemerintah sekarang ini, apalagi setelah era reformasi, di mana orang berhak untuk menyuarakan apa yang menjadi kepentingan dan keluhannya. Jelas di sini kita membutuhkan kesantunan publik dan hukum yang jelas. Meski kita dalam kondisi yang disakiti atau dizalimi, kita tetap tidak berhak untuk membakar, menjarah atau merusak milik orang lain. Kalupun seseorang atau kelompok, secara agama (teologis), betul-betul dianggap sesat dan harus diluruskan, tetap saja dari segi hukum mereka tidak boleh diberantas dengan kekerasan.

Problemnya, sekarang pemerintah tidak tegas, malah terkesan takut untuk menuntaskan kasus seperti ini. Pemerintah terlalu takut kalau sampai dianggap melawan agama. Kita lihat di Ma-

laysia, yang melanggar tetap diproses secara hukum – atas nama apapun tindakan melawan hukum itu dilakukan. Kalau pemerintahnya ragu, maka masyarakat sipilnya harus lantang untuk mengatakan bahwa meski saya telah dizalimi oleh kelompok B, saya tidak mau kalau kelompok B itu diperlakukan dengan cara yang malah melanggar hukum.

Dalam hal lain, kita juga perlu mempertimbangkan kesantunan dalam menyikapi suatu konflik. Kita hanya bisa mensosialisasikan cara yang lebih santun, seperti dengan mengatakan bahwa memaki dengan kata-kata yang rasis atau melecehkan agama itu tidak santun, tidak menghormati yang lain. Justru saya, misalnya, merasa nyaman dan bangga kalau agama saya bisa berbesar hati dan tetap santun dengan yang lain.

Agar pluralitas dapat terjamin, maka keduanya, kesantunan publik dan jaminan hukum, harus dijalankan. Menjalankan salah satunya saja tanpa dibarengi dengan yang lain tidaklah mungkin. Dan untuk kepentingan ini saya juga ingin mengatakan bahwa kita harus memperkuat aparat. Namun, dalam konteks ini aparat yang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan olehnya. Di atas segalanya, yang lebih diperlukan adalah kesadaran massa, termasuk dalam kesadaran memperlakukan aparat.

Kalau memang letaknya pada massa, civil society, *kesantunan publik seperti apa yang dibutuhkan dalam mengatasi konflik, dan sampai sejauh mana batas menenggang perbedaan?*

Ada yang mengatakan kita hendaknya tetap bertoleransi, bersikap santun meski kepada orang yang hendak membunuh kita. Ini pandangan ekstrem. Namun, yang seharusnya kita kembang-

kan adalah kesantunan dan toleransi sampai membela kepentingan dan hak yang lain untuk hidup, meski mereka berbeda. Bagaimana praktiknya? Kita tetap harus bisa berdialog bahkan dengan yang jelas-jelas berseberangan. Dalam konteks ini, meski mungkin kita bisa saja menang atau sebaliknya kalah, tetapi, minimal dengan dialog, kita sudah menunjukkan cara bahwa perbedaan bisa diselesaikan tidak hanya dengan berkelahi. Selain dialog, mekanisme apa yang bisa dilakukan untuk hal ini? Saya juga tidak terlalu bisa menemukan formula yang paling tepatnya.

Tetapi, intinya adalah bagaimana terjadi proses sehingga mekanisme yang dijalankan tidak harus dengan pengrusakan atau tindak anarkis lainnya. Mungkin juga dalam masyarakat kita masih diperlukan figur-figur kharismatik untuk memfasilitasi kebersamaan di tengah perbedaan sampai ke kalangan bawah. Permasalahannya, nanti mereka akan berhadapan dengan *local leader* yang mungkin memiliki *style* sangat berbeda dan berlawanan. Makanya yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam kelompok tertentu dengan memberikan keyakinan bahwa yang kita lakukan adalah memang untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk kepentingan yang lain, yang kebetulan kita bela haknya. Karena bisa jadi meski kelompok itu benar, namun karena caranya yang kurang elegan atau bahkan salah, malah bisa dituduh salah oleh masyarakat luas dan dianggap sebagai tindak kriminal. Artinya, kita harus memberi panggung untuk mereka.

Dalam menyikapi konflik yang ada di tengah masyarakat, yang harus dijunjung tinggi dan mendapat jaminan apakah hak kelompok atau hak dan kebebasan individu?

Permasalahannya tidak bisa langsung kita tarik ke situ. Tetapi, keduanya harus diberi porsi yang seimbang. Memang yang terutama harus kita lindungi adalah individu, karena itu basis. Kemudian hak kelompok juga harus kita hargai, karena kalau sampai hak kelompok menegasi hak dan kebebasan individu, juga sama sekali tidak benar. Makanya kedua pihak harus juga dibatasi hak dan kebebasannya masing-masing. Keduanya bukan sesuatu yang harus dioposisikan, melainkan satu sama lain saling menjadi penyeimbang. Hak kelompok jangan sampai membunuh hak dasar individu untuk berbeda, demikian juga sebaliknya.

Kalau dialog masih menyimpan kemungkinan yang menguntungkan bagi kelompok yang tidak sepakat dengan pluralisme, lantaran mereka terus memaksa dan mendesakkan pandangannya, bahkan lewat mekanisme demokrasi sekalipun, lantas langkah seperti apa yang lebih memungkinkan untuk dijadikan alternatif?

Kalau dialog tidak menguntungkan, maka tidak usah melalui dialog. Dialog hanya diperlukan untuk memfasilitasi mereka yang berseberangan bisa berdamai. Sebenarnya masalah yang kita hadapai adalah masalah strategi untuk pendidikan masyarakat. Maka, mungkin yang lebih cocok sebenarnya bukan dialog, tetapi pendidikan masyarakat agar tercipta budaya saling menghargai, bukan suasana konfrontatif. Sehingga, harus diciptakan pemahaman dalam masyarakat untuk tidak terlalu mengungkit apa yang disebut musuh. Bahwa yang baik bukanlah degan terus mengungkit keburukan yang lain, yang padahal masih mungkin dianggap baik oleh kalangan lain. Lebih bagus kalau selalu mencari dan melakukan

hal-hal yang jelas berimplikasi baik bagi diri dan kelompok atau masyarakat yang lebih luas lagi.

Sedikit kembali tentang dialog yang masih menyimpan berbagai kemungkinan, dan karenanya membutuhkan pengaturan agar praktiknya betul-betul berimbang. Kalau memang seperti itu yang kita kehendaki, lantas siapakah yang lebih berwenang untuk dapat mengatur dan memberi panggung bagi terciptanya keseimbangan di masyarakat? Sementara berharap kepada individu rasanya tidak mungkin; kepada kelompok, justru masing-masing hanya mengurusi urusan dan kepentingannya sendiri-sendiri; kepada negara atau aparat pemerintahan, faktanya negara kita sendiri tidak bisa diharapkan terlalu banyak untuk berperan sedemikian rupa sehingga bisa menjamin netralitasnya.

Untuk itulah, *affirmative action*, memang harus ada di masing-masing kepala kita. Sebagaimana mestinya tindakan ini didorong ke dalam konteks kesetaraan jender, di mana kita tahu bahwa keterwakilan dalam politik sama sekali belum berimbang, karena memang budaya kita yang masih patriarkhi. Selain masalah jender tadi, secara umum, kini, kita harus sadar bahwa di tengah kemajemukan kita tidak hanya berhimpun dengan kelompok yang dekat dengan kita saja, tetapi juga yang lain. Maka, jika dalam satu situasi, misalnya ketika kita dipilih menjadi dewan juri, lantas diketahui bahwa semua juri memiliki latar belakang yang sama, harus ada kesadaran bahwa sebaiknya salah satu dari juri itu mengundurkan diri untuk memberi tempat bagi yang berlatar belakang lain. Di sinilah kesadaran untuk memberi posisi kepada yang lain (minoritas) sangat diperlukan.

Kemajemukan memang sudah harus menjadi nurani, bahkan dalam konteks yang lebih global. Dalam tatanan global, kemajemukan harus menjadi kriteria yang sangat penting. Maka dari itu, seleksi untuk beasiswa dan sebagainya, kini tidak bisa lagi hanya memperhatikan kelompok yang mayoritas. Itu suatu langkah kolektif dan sarana kritis untuk koreksi diri. Sebab, terutama sekali kita harus kritis terhadap diri sendiri. Apakah kita sudah cukup toleran dan plural untuk orang lain? Kesadaran seperti ini harus selalu direfleksikan. Karena meskipun secara teori demikian, pada praktiknya, kadang kita tetap merasa lebih enak dengan teman sendiri dan sukar memberi tempat terhadap pihak lain yang berbeda. Kini kita harus membiasakannya untuk berbagi dengan yang lain. Makanya jangkauan gerakan dan diseminasi wacana yang teman-teman agendakan ini sudah harus mulai untuk tidak hanya berkonsentrasi sebatas Sumatera-Jawa, melainkan juga Ambon, Papua, dan lain sebagainya.

Kalau dalam konteks budaya, masih perlukah affirmative action *itu diberikan oleh pemerintah terhadap budaya tertentu yang dianggap tidak* mainstream *dan justru dipinggirkan oleh kalangan mayoritas?*

Tindakan seperti itu tetap diperlukan. Pemerintah harus melakukan itu sebagai bagian dari kepentingannya menjalankan pemerintahan. Demikian juga masyarakat sipilnya harus mempunyai kesadaran akan *affirmative action* terhadap setiap pihak yang paling dirugikan. Kita tetap harus mencari kelompok ketiga, atau kelompok tengah, misalnya untuk menjembatani pihak yang bertikai. Dan ketika tidak terselesaikan dengan cara itu, kita cari ja-

lan lain, misalnya melalui agama, melalui dunia sosial dan budaya, dan lain sebagainya.

Wawancara dilakukan di Depok, 31 Mei 2007

Democracy
www.abad-de
Perpusta

Percakapan dengan

Meuthia Ganie-Rochman



Meuthia Ganie-Rochman, pengajar di Departemen Sosiologi FISIP UI dan Magister Manajemen FE UI. Ia mendapat gelar PhD dari Radboud University of Nijmegen, Belanda. Bidang keahliannya Sosiologi Politik dan Sosiologi Organisasi dan berpengalaman sebagai peneliti dan konsultan bidang organisasi pembangunan dan Corporate Social Responsibility (CSR).

Agama tidak pernah benar-benar bisa dikeluarkan dari aturan publik. Banyak nilai-nilai keagamaan yang menyumbang dimensi dan prinsip-prinsip dalam tata kelola negara modern seperti demokrasi, dengan HAM, hak-hak sipil dan politiknya. Namun mengambil begitu saja sebuah aturan dari suatu agama tentu tidak sesuai dengan kondisi tata kelola negara kita sejak setengah abad silam: netral dari agama-agama. Maka dari segi kenegaraan, pluralisme adalah kebijakan publik yang memungkinkan setiap individu atau kelompok dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya untuk berkembang, seraya tidak menyingkirkan namun seakomodatif dan sesensitif mungkin terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil, lemah, dan terpinggirkan. Sehingga untuk mengelola keragaman negeri ini jawabannya: *establishing the institution*. Institusi yang jelas dan bersih.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme dan apa urgensinya paham ini bagi keberlangsungan kehidupan publik?

Sekularisme menolak semua paham agama untuk masuk menjadi aturan publik. Sebab, aturan publik akan sangat berpengaruh pada proses yang terjadi di dalam masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataan, aturan agama tidak pernah benar-benar bisa dikeluarkan dari aturan publik. Banyak nilai-nilai keagamaan yang menyumbangkan dimensi dan prinsip-prinsip dalam tata kelola negara modern seperti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hak sipil dan hak politik, yang tampak berlatar belakang negara-kemasyarakatan. Akan tetapi, karena kebutuhan untuk *nation building* dan kekhawatiran dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu, aturan agama kemudian tidak diperkenankan menjadi aturan main bersama, bahkan untuk kelompoknya sendiri, sejauh masuk sebagai aturan negara. Akibatnya kemudian muncul kesan bahwa aturan agama tidak boleh menjadi aturan main di wilayah publik.

Saya ambil contoh di Jerman pada 1990-an. Ada satu sekolah yang memasang tanda salib di salah satu ruangannya. Awalnya memang tidak ada reaksi apa-apa. Namun kemudian ada seorang anak yang merasa takut lantas mengadukan persoalan ini. Akhirnya, setelah melalui sebuah proses hukum, diputuskan bahwa simbol salib itu harus dikeluarkan dari sekolah karena dianggap seperti memaksakan suatu gagasan keagamaan tertentu. Salib atau simbol agama apapun tidak boleh berada di ruang publik. Meski tetap ada beberapa masyarakat yang masih bisa menerima hal seperti itu. Hal itu tergantung pada kematangan dan kondisi masyarakatnya. Oleh karenanya, yang perlu diperhatikan di dalam masyarakat juga adalah sejarah konflik dan ketidaknyamanan (trauma) di masa lalu. Namun yang terpenting untuk kondisi sekarang ini adalah adanya

ketegasan aturan. Semua hal yang tampak bermasalah, sebagaimana disebutkan di atas, akan berjalan dengan baik-baik saja jika sebuah negara telah memiliki perangkat hukum yang tegas dan perekonomian yang stabil.

Dalam praktik sosial-politik di Indonesia, kita menyaksikan ada kelompok Islam tertentu yang menginginkan agar syariah menjadi aturan publik. Mengapa keinginan seperti itu bisa muncul bahkan tampak makin marak? Apakah karena peran negara yang lemah?

Benar, semua alasan yang Anda ungkapkan bisa dipakai. Kasus yang Anda ceritakan sendiri menurut saya kebanyakan terjadi di daerah. Sementara di tingkat nasional wacana kebangsaan lebih matang. Bahkan sangat sering kita lihat berbagai kelompok telah terserap ke dalam institusi yang sama, tidak ada lagi sekat kelompok atau agama. Namun demikian, beberapa daerah menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar bahwa yang terpenting adalah memilih pemimpin atau organisasi yang bisa bekerja menghasilkan kesejahteraan daripada memilih berdasarkan alasan primordial. Artinya kesempatan menjadi lebih demokratis di daerah-daerah juga sekarang ini menjadi lebih mungkin dan terbuka.

Tentang tuntutan syariat Islam, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu adalah keinginan negatif suatu kelompok untuk menjadi dominan. Mereka yang mengusung itu bisa saja yakin benar bahwa apa yang mereka perjuangkan adalah cara untuk purifikasi masyarakat, karena negara atau prinsip-prinsip pendidikan nasional dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka betul-betul percaya bahwa telah terjadi *moral decadence* di dalam masyarakat. Oleh karena itu, bagi saya, kita harus menilai sekaligus menguji

apakah argumen dan tuntutan mereka itu memang murni merupakan kepentingan umum atau hanya untuk meraih kepentingan sempit tertentu. Kita tetap harus mencari jalan tengah untuk bisa menyelesaikannya.

Misalnya, kita ajukan argumen sekaligus pertanyaan, apakah tuntutan syariat Islam tidak akan menimbulkan dampak lanjutan bagi kelompok minoritas tertentu? Karena sekali tuntutan itu direalisasikan di suatu daerah, maka akan menjadi pendorong munculnya hal yang sama pada daerah-daerah lain. Padahal daerah yang mencoba meniru ini mungkin tidak memiliki kondisi sebaik daerah yang ditirunya. Bisa jadi memang penerapan syariat Islam di suatu daerah tertentu tidak menimbulkan dampak negatif apa-apa, bahkan mungkin malah menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sementara ketika diterapkan di daerah lain malah menyebabkan instabilitas, semakin menebarkan rasa takut bagi kelompok minoritas, dan lain sebagainya. Kemungkinan kedua inilah yang perlu dikhawatirkan karena negara kita tidak mempunyai kredibilitas maupun kapasitas institusional untuk menjadi penengah sekaligus pengarah, *guidance*. Masyarakat seperti kita hanya bisa membantu menunjukkan bukti dengan beberapa argumen yang

> Sekularisme menolak semua paham agama untuk masuk menjadi aturan publik. Sebab, aturan publik akan sangat berpengaruh pada proses yang terjadi di dalam masyarakat. Namun demikian, dalam kenyataan, aturan agama tidak pernah benar-benar bisa dikeluarkan dari aturan publik. Banyak nilai-nilai keagamaan yang menyumbangkan dimensi dan prinsip-prinsip dalam tata kelola negara modern seperti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hak sipil dan hak politik, yang tampak berlatar belakang negara-kemasyarakatan.

logis dan mumpuni. Kita tidak bisa langsung tegas untuk mereka yang memperjuangkan tuntutan itu. Kalau mereka sudah main paksa, barulah kita bisa memakai argumen hukum. Jadi, bagi saya, banyak hal yang bisa diatasi dengan argumen.

Anda pernah memberikan definisi sekularisme sebagai bentuk ketidak-ikutcampuran negara terhadap urusan-urusan agama. Lantas bagaimana seharusnya negara berperan?

Mengambil sebuah pikiran atau aturan dari suatu agama tentu tidak sesuai dengan kondisi tata kelola negara kita sejak setengah abad silam. Negara kita adalah negara yang netral dari agama-agama. Oleh karenanya, yang terbaik adalah mulai dan kembangkanlah apa yang sudah ada. Yang menjadi problem utama negara kita sekarang adalah *human resource*, pemahaman hak dan kewajiban negara, kapasitas bekerja sama dan kemampuan teknokratik yang masih sangat rendah. Bagi saya itu yang harus terlebih dahulu diselesaikan. Tidak usah menambah persoalan baru seperti memasukkan aturan agama ke dalam aturan publik dan sebagainya. Sekarang ini negara kita belum stabil. Kapasitas negara juga belum bisa mencegah kalau persoalan tuntutan pemasukan aturan agama tertentu ke dalam aturan publik itu malah menjadi sesuatu yang bergulir ke arah yang negatif. Untuk menjawab persoalan seperti ini, saya akan selalu melihat konteks persoalannya dahulu. Mungkin dalam konteks negara yang lebih stabil, tuntutan seperti itu bisa saja diwacanakan atau bahkan direalisasikan, tapi untuk Indonesia, itu sama sekali belum bisa. Yang lebih butuh segera diselesaikan adalah bangunan bersama bangsa tentang keadilan, kedisiplinan, dan lain-lain.

Adakah kemungkinan bagi nilai-nilai agama atau kearifan etnis bisa menjadi aturan bersama? Kalau benar seperti itu, sejauh mana nilai-nilai tertentu bisa atau sebaliknya tidak bisa menjadi aturan publik?

Sebagaimana kasus penerapan perda syariah, yang mencoba menjadikan aturan agama tertentu untuk dipakai sebagai aturan publik, bagi saya, bisa dan tidaknya suatu nilai menjadi aturan publik tergantung pada situasi negara atau daerahnya. Suatu aturan yang berbasis pada nilai-nilai tertentu, ketika diterapkan, mungkin tidak menjadi masalah untuk suatu daerah, sementara untuk daerah lain bisa jadi malah akan merugikan. Suatu aturan bisa menjadi pengerasan dalam masyarakat sendiri. Dalam kehidupan bernegara dan berbangsa selalu ada interaksi antara masyarakat dan negara, antara individu dan kelompok yang ada di dalamnya, dan masing-masing bisa saling menambah atau mengurangi. Kalau terjadi pengerasan seperti itu, bisakah kita menunjuk metode dan institusi yang bisa mengontrol agar tidak terjadi *spill over impact*, supaya tidak menimbulkan efek negatif yang lebih parah?

> Mengambil sebuah pikiran atau aturan dari suatu agama tentu tidak sesuai dengan kondisi tata kelola negara kita sejak setengah abad silam. Negara kita adalah negara yang netral dari agama-agama. Oleh karenanya, yang terbaik adalah mulai dan kembangkanlah apa yang sudah ada.

Bangunan institusional apa yang digunakan untuk mengontrol dan menjamin agar kelompok minoritas tidak mengalami efek negatif dan, lebih jauh lagi, dapat menjadi semacam promosi tandingan bahwa memang syariat Islam bisa diterima. Namun meski demikian, apakah kelompok minoritas juga bisa menerimanya de-

ngan bangunan institusional yang ada? Karena selain perda syariah juga ada perda lain yang melindungi mereka, sehingga memungkinkan adanya negosiasi. Jangan hanya membiarkan orang lain untuk mencari tahu sendiri semua hal, tapi harus ada alat promosi. Oleh karena itu, kalau mau mengajukan sesuatu, dalam konteks Indonesia seperti sekarang ini, tanggung jawab yang harus kita pikul sangat berat. Sebab semua hal bisa menjadi promosi negatif jika tidak dimengerti konteksnya. Jadi, kalau yakin bahwa Islam dapat memberikan kebaikan untuk daerahnya, bisa saja diterima. Meski saya tetap cenderung menyangsikannya. Dari pengamatan dan pembacaan saya, kondisi daerah-daerah kebanyakan masih lemah dalam berorganisasi dan longgar dalam banyak hal.

Liberalisme, dengan wajahnya yang terus menunjukkan pembenahan dan pelbagai adaptasi, kini menjadi nilai dasar di hampir seluruh negara-bangsa modern. Bagaimana pendapat Anda mengenai liberalisme dan bagaimana dalam konteks keindonesiaan?

Liberalisme percaya bahwa individu memiliki kemampuan yang dapat menghasilkan *common virtue*. Individu bisa memilih dan melakukan sesuatu yang baik. Peran negara di situ memang minimal. Namun demikian, bentuk atau praktik liberalisme murni seperti itu mungkin sudah tidak ada lagi. Yang sekarang muncul adalah gabungan antara liberalisme dengan republikanisme atau dengan republikanisme radikal. Sebagian hak individu diakui, seperti individu dapat membuat keputusan, dan harus difasilitasi supaya dia bisa membuat keputusan. Kalau kita memberi ruang terhadap individu untuk mampu mengeluarkan potensinya secara positif, itu saja sudah menggabungkan pandangan liberal dan *radical re-*

publican. Kalau individu ternyata tetap tidak mampu, maka harus dibantu oleh negara atau oleh masyarakat, sebagaimana yang kita lihat di beberapa negara Eropa Barat dan Skandinavia.

Di negara-negara Eropa tersebut, pada 1990-an kembali diangkat masalah eksklusi dan inklusi sehingga kembali butuh penajaman konteks tiap individu atau kelompok untuk dapat membuat *individual* atau *public virtue*. Pertanyaannya, seberapa jauh negara bisa membantu? Kalau kita berpikir menurut ideologi tertentu yang kadang juga mengukur peran negara, tanpa melakukan pembahasan bersama-sama secara mendalam, hasilnya bisa jelek dan merugikan. Karena ideologi tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ideologi-ideologi tersebut belum apa-apa sudah mengatakan bahwa negara harus memiliki peran minimal atau sebaliknya maksimal, bahkan sampai otoriter. Yang benar, menurut saya, katakan saja bahwa negara tidak bisa dan hanya bisa sampai pada taraf tertentu. Sementara membuat masyarakat yang partisipatif, negara juga harus memberikan fasilitas.

> Liberalisme percaya bahwa individu memiliki kemampuan yang dapat menghasilkan *common virtue*. Individu bisa memilih dan melakukan sesuatu yang baik.

Liberalisme dalam arti paradigma berpikir semestinya dipahami seperti apa dalam konteks masyarakat yang masih kuat akar tradisi dan agamanya?

Individu bisa membuat *individual virtue* tanpa kontrol, tanpa aturan komunitas dan latar belakang agama, karena hal-hal itulah yang bisa mengekang individu. Sekarang tidak ada lagi yang seta-

jam itu. Sekarang, kita semua telah hidup di zaman modern, di mana tidak ada lagi pandangan komunitarianisme yang ekstrem sehingga menghalangi praktik liberalisme. Kini, hampir setiap negara yang mengaku sebagai penganut liberal, memfasilitasi individu atau kelompok untuk menghasilkan *individual* atau *public virtue*. Indonesia mungkin belum sampai ke situ, karena fasilitas negaranya belum mencukupi. Di Indonesia, individu sudah lebih bebas tapi tetap harus difasilitasi, apalagi untuk kelompok-kelompok tertentu yang tidak mempunyai kapasitas yang sama dengan kelompok lain yang lebih besar. Untuk mereka, ketiadaan fasilitas malah bisa menyebabkan terjadinya eksklusi secara perlahan.

Salah satu nilai utama dalam prinsip liberalisme adalah terjaminnya civil rights dan civil liberties. Sejauh ini di Indonesia apakah civil rights, political rights dan hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya sudah terjamin?

Belakangan ini beberapa hal justru malah makin memburuk. Beberapa waktu lalu, kita terpukul dalam suatu rezim otoriter dengan tangan-tangan birokratnya yang berjalan sampai ke tingkat kecamatan bahkan lebih rendah, dengan bahasa yang seolah-olah selalu pro-pembangunan dan persatuan, meski sebenarnya untuk beberapa hal semu. Sekarang ketakutan yang menghinggapi kita adalah ketidakpastian di antara kita sendiri. Memang ada beberapa masyarakat, yang lantaran beberapa kejadian yang menimpanya, jadi lebih berhati-hati, takut terjadi perpecahan. Sementara faktor keamanan minimum tidak banyak mengalami perubahan.

Contohnya, di sektor informal, dari tukang ojek dan sejenisnya, persaingan yang ada sangatlah ketat, bahkan tak jarang sam-

pai menggunakan kekerasan. Wilayah mereka sudah dibagi-bagi, kalau ada tukang ojek yang beroperasi di daerah yang bukan bagiannya, tak jarang diselesaikan dengan kekerasan. Di masa reformasi ini, penyelesaian untuk berbagai kasus memang tampak lebih hati-hati, meski tetap meminta korban yang tak sedikit. Dari seluruh kondisi tersebut, kebanyakan korbannya adalah kelompok Tionghoa. Ketakutan dan rasa tak aman yang selalu menghinggapi para keturunan Tionghoa muncul di samping karena negara yang tidak kuat, kadang juga datang dari etnis lain yang secara kuantitas memiliki jumlah lebih, bahkan mayoritas.

> Pluralisme, dari segi negara, adalah kebijakan publik yang memungkinkan seorang individu atau kelompok dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya untuk berkembang. Pluralisme hendaknya didukung dan dilengkapi dengan adanya perangkatperangkat sosial yang tidak menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu, justru, sebaliknya, berusaha seakomokdatif dan sesensitif mungkin terhadap kelompok-kelompok yang lebih kecil, *marginalized*, dan lebih lemah.

Jargon-jargon keislaman yang dibawa oleh aliran fundamentalis pun tak kalah memberi sumbangan yang menakutkan. Akhirnya, meski di tingkat nasional keturunan Tionghoa sudah mendapat keamanan dan pengakuan, namun di tingkat masyarakat mereka harus berbaik-baik dan mengambil hati masyarakat pribumi di sekitarnya. Apakah mereka tidak merasa tertekan dengan situasi itu? Tampaknya ya. Mereka harus terus memasang kuping untuk menjaga keseimbangan posisinya. Kalau berbicara harus berputar-putar terlebih dahulu agar tidak menyinggung perasaan yang lain dan akhirnya malah kehilangan inti pembicaraannya. Dari sini kita

bisa mengatakan bahwa masyarakat sedang berjuang mencari keseimbangannya sendiri tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan bersama. Sayangnya, kemampuan untuk hal itu sendiri agak terganggu karena kapasitas negara yang masih lemah, ekonomi yang terus terpuruk, dan kekacauan institusional seperti persoalan hukum dan sebagainya yang sama sekali belum kondusif.

Di tengah kondisi aparat dan institusi-institusi yang seharusnya menjamin dan melindungi civil rights dan civil liberties negeri ini belum maksimal, bagaimana Anda mengidentifikasi persoalan ini?

Institusi negara tidak bisa memberikan perlindungan disebabkan oleh banyak faktor. Sekarang ini, institusi-institusi pemerintah berada dalam situasi tanpa kepemimpinan. Kedisiplinan untuk melakakukan sesuatu, seperti menjalankan sebuah program kerja sampai tuntas dengan berbagai aspeknya jarang terlaksana, kalau bukan malah tak ada. Betapa rendah pengelolaan komitmen yang mereka miliki. Di negara kita, pembagian dana bantuan kepada orang miskin ada, tetapi sesuatu yang lebih bersifat penyelesaian institusional, yang sejatinya lebih esensial, tidak berhasil. Tangan pemerintah atau birokrasi jumlahnya sangat banyak dan idealnya antara satu dan yang lainnya memiliki hubungan. Tidak bisa semuanya hanya membuat persetujuan di tingkat atas, melainkan harus mampu mengelola ke tingkat bawah. Sampai setelah reformasi ini, seolah tidak kita temukan pemimpin yang mau dan serius bergerak ke bawah. Program nasional biasanya berjalan, tetapi tidak ada yang sampai menggerakkan ke bawah.

Oleh karena itu tidak mengherankan kalau, misalnya, tujuan untuk melindungi hak-hak sipil, seperti bebas dari rasa takut,

memberi jaminan hukum, dan lain sebagainya tidak tertangani dengan baik. Aparat hukum reformis yang mau membicarakan masalah penegakan hukum secara lebih ideal harus bertempur dalam lautan kepentingan yang berbeda. Bukan hanya karena para lawan yang anti-reformis itu lebih kuat, tetapi juga karena institusinya telah terkotak-kotak menurut kepentingan-kepentingan yang banyak. Itu pasti lebih susah daripada bertempur melawan satu, dua atau tiga orang. Ada beberapa contoh dari para presiden kita yang telah mengambil beberapa menteri yang cukup idealis, tapi kemudian tersia-siakan begitu saja karena ternyata bukan hanya itu yang dibutuhkan. Yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana mengubah kultur institusi. Menteri yang bisa berbuat seperti itu sampai sekarang, menurut saya, belum ada. Kalaupun ada baru sebatas kejujuran yang dimilikinya, tapi tak berhasil melakukan perubahan. Anda lihat sekarang, pembaharuan kepolisian dan perlindungan terhadap rakyat kecil sangat lambat terselesaikan.

Multikulturalisme adalah induk berbagai kultur dalam suatu masyarakat yang satu sama lain bisa hidup dengan damai dan tenang. Dalam kenyataan hidup bersama harus selalu ada apa yang dinamakan aspek bersama.

Menurut Anda jalan keluar seperti apakah yang dapat mencairkan hubungan negara dan civil society serta harmonisnya relasi antaranggota masyarakat agar liberalisme yang berprinsip pada penghargaan terhadap civil rights dan civil liberties dapat terwujud?

Kelompok masyarakat seperti organisasi keagamaan, LSM, atau organisasi mahasiswa, harusnya sudah mulai berpikir untuk mem-

perbanyak dan mendiseminasikan pandangan tentang hak dan kewajiban, bukan hanya menjalankan program kerja yang telah ada. Memperbaiki masyarakat, baik tentang penanaman nilai-nilai pluralisme maupun penjaminan hak-hak sipil, selalu membutuhkan kedisiplinan sosial yang tinggi. Masalah sekarang sebenarnya terutama tidak terkait dengan adanya kelompok yang tujuan pokoknya mencederai pluralitas, tetapi lebih karena mereka "sembarangan" dan tidak peduli satu sama lain. Belum ada kesadaran yang memadai untuk dapat hidup bersama dengan baik dan tenteram; belum muncul teladan dari para penegaknya; tidak terumuskannya cara-cara ideal untuk penyebaran dan pengembangan kegiatan sehari-hari, dari RT, desa/kelurahan dan seterusnya. Kegiatan yang dapat membangun kondisi seperti itu bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan informal seperti obrolan tentang kepentingan untuk jaminan kehidupan bersama dalam sebuah acara kemasyarakatan, keagamaan, seni, bahkan olahraga. Dari situlah pembentukan peraturan bersama akan lebih mudah dihasilkan dan mungkin akan lebih ringan untuk dipraktikkan.

Sayangnya, dalam konteks masyarakat kita, belum ada institusi yang bisa membahas atau menerjemahkan model pembentukan aturan sebagaimana disebutkan di atas dalam kehidupan sehari-hari, seperti sekolah atau bahkan pengajian. Kita ambil satu contoh: adanya kelompok masyarakat tertentu di daerah urban pinggiran yang memberi pinjaman uang secara informal atau lebih dikenal sebagai "rentenir", sehingga seringkali memberatkan masyarakat. Institusi peminjaman uang yang demikian itu terlahir karena masyarakat tidak mempunyai jalan lain. Negara sampai saat ini belum berhasil menciptakan kesejahteraan. Kalaupun negara mencoba memberikan fasilitas kredit, prosesnya tidak mudah. Sedang ren-

tenir menjawab kebutuhan mendesak orang miskin meski dengan bunga yang sangat tinggi. Jadi, persoalan kita lebih pada ketiadaan institusi publik yang baik. Persoalan lain, kita tidak punya kapasitas pengetahuan kehidupan sehari-hari tentang bagaimana satu sama lain bisa membantu untuk semakin produktif dan bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih baik.

Wajah publik agama selalu paradoks. Di satu sisi agama menjadi semangat bagi umat untuk berbuat kebajikan dan menciptakan perdamaian, tetapi pada sisi lainnya ia tidak jarang menjadi pemicu konflik. Bagaimana Anda melihat peran dan fungsi agama dalam kehidupan publik, terutama untuk konteks keindonesiaan?

> Menurut saya, multikulturalisme adalah hasil lebih jauh dari pluralisme. Dia sudah mempraktikkan hidup dalam kultur yang beragam, saling berinteraksi, satu sama lain seraya tetap diimbangi dengan sesuatu yang bersifat kolektif.

Sebenarnya di masyarakat kita masih sangat terbatas organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang bisa menghasilkan metode pengorganisasian atau kerja yang diakui dan bisa dicontoh oleh masyarakat lain. Organisasi keagamaan seharusnya bisa menjadi cermin kultural. Kalau Anda hendak mengelola sekolah dengan baik, maka kita bisa sekaligus belajar dari sana tentang pengorganisasian atau pengelolaan *resource*-nya. Namun demikian ada saja organisasi yang memang tidak cukup meyakinkan bahwa dia akan bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Kalau pengelolaan *resource* dijalankan dengan baik maka tidak menutup kemungkinan di kemudian hari akan bisa terwujud sesuatu yang lebih baik. Misalnya, isi pendidikan yang lebih baik,

mutu guru yang juga lebih baik, belajar bahasa asing yang lebih bagus, dan lain sebagainya.

Kalau ada suatu kelompok yang telah menghasilkan sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat, kenapa kelompk lain tidak kemudian mencoba mengadopsinya? Hal lain, di luar pendidikan, yang bisa dikembangkan adalah teknologi sederhana pertanian, teknologi pedesaan, seperti listrik desa, yang sangat vital dalam upaya pembangunan ekonomi secara lebih besar. Sebetulnya dengan bisa memasukkan dan menghasilkan substansi di dalam masyarakat maka dengan sendirinya akan terjadi kestabilan dan berbagai sinyal-sinyal positif lain antara satu sama lain. Kelompok-kelompok agama sebenarnya punya basis untuk itu. Kelompok ini mempunyai keterikatan kultural, hubungan, hirarki, yang bisa menghasilkan sesuatu yang tidak sekadar kata-kata, melainkan bisa berupa metode atau bahkan teknologi, meski berasal dari hal yang sangat sederhana.

Berangkat dari problem kemajemukan bangsa ini, adalah relevan untuk mendesakkan pluralisme demi terciptanya kebersamaan dalam keberbagaian. Dalam pandangan Anda, apa yang dimaksud dengan pluralisme?

Pluralisme, dari segi negara, adalah kebijakan publik yang memungkinkan seorang individu atau kelompok dapat mengekspresikan kepentingan dan kebutuhannya untuk berkembang. Pluralisme hendaknya didukung dan dilengkapi dengan adanya perangkat-perangkat sosial yang tidak menyingkirkan kelompok-kelompok tertentu, justru, sebaliknya, berusaha seakomokdatif dan sesensitif mungkin terhadap kelompok-kelompok yang lebih

kecil, *marginalized*, dan lebih lemah. Memang definisi seperti ini akan bisa terus berubah, tetapi pluralisme akan selalu berusaha menjadi akomodatif untuk berbagai kepentingan. Minimal, setiap argumen yang diajukan masing-masing kelompok didengar dan diterima. Bahwa nantinya apa yang diinginkan oleh kelompok itu tidak bisa direalisasikan, itu tidak masalah. Yang terpenting hak mereka untuk berargumen sudah diterima tanpa dibedakan dengan argumen-argumen lainnya. Untuk mewujudkan kondisi seperti itu dibutuhkan suatu negara yang rasional dan *capable* dan masyarakat politik yang juga *capable*. Negara tidak hanya membicarakan sambil lalu dalam melontarkan prinsip kebersamaan, tetapi juga mengetahui proses eksklusi atau marginalisasi yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga tercipta rumusan yang lebih tepat dan dapat diterima bersama.

Banyak orang cenderung mengartikan pluralisme dalam kaitannya dengan agama, meski sebenarnya ia mencakup hal yang lebih luas, termasuk etnisitas. Dalam hal ini, apakah menurut Anda ada perbedaan antara pluralisme dan multikulturalisme itu?

Multikulturalisme adalah induk berbagai kultur dalam suatu masyarakat yang satu sama lain bisa hidup dengan damai dan tenang. Dalam kenyataan hidup bersama harus selalu ada apa yang dinamakan aspek bersama. Ilmuwan atau para perancang sosial selalu menghadapi dilema: sejauh mana multikulturalisme bisa menghasilkan suatu kerekatan? Dan dengan institusi macam apa kerekatan bisa tetap terjaga dan menghasilkan *trust*, *collective action*, *collective aspiration* di tengah kelompok masyarakat yang hidup dengan simbol-simbol kulturalnya masing-masing?

Menurut saya, multikulturalisme adalah hasil lebih jauh dari pluralisme. Dia sudah mempraktikkan hidup dalam kultur yang beragam, saling berinteraksi satu sama lain seraya tetap diimbangi dengan sesuatu yang bersifat kolektif. Masing-masing kelompok akan berusaha mencari jalan untuk bisa berkomunikasi dengan kelompok lain dalam upaya memperluas kepentingannya sendiri. Secara natural, yang menang akan berusaha membuat jembatan penghubung untuk berbagai hal. Inilah proses masyarakat yang matang. Akan keluar orang-orang terbaik dari suatu kelompok yang harus bisa membuat jembatan dan bernegosiasi dengan kelompok lain. Kalau hal seperti ini sudah secara sehat dijalankan maka kelompok yang maju akan jadi lebih banyak.

Etnisitas kerap menjadi biang konflik. Pada masa Orde Baru (Orba), konsep SARA yang diajukan ternyata bukannya menyatukan malah mencerai-beraikan – karena menciptakan segregasi. Lantas konsep seperti apa yang bisa diajukan untuk mengelola keragaman etnis negeri ini?

Jawabannya: *establishing the institution*. Institusi yang jelas dan bersih. Sayangnya sekarang kita belum bisa mencari yang ideal. Kita masih harus menentukan institusi dan birokrasi seperti apa yang hendak dibuat untuk megelolanya. Birokrasi yang menangani kebutuhan publik, seperti sekolah, kini harus terbuka. Kita bisa menerangkan secara publik bahwa kenapa kita bikin A bukan B, dan seterusnya. Pada proses semacam inilah akan terjadi rasionalisasi sosial. Pemerintah harusnya memiliki keterbukaan dan akuntabilitas. Semua bentuk pelayanan harus benar-benar jelas. Segalanya sejak awal diterangkan dan benar-benar dilaksanakan bahwa, misalnya,

kalau mau membuat KTP akan membutuhkan waktu sekian lama dengan pembayaran sekian rupiah, dan lain-lainnya. Di Jerman, yang saya ketahui, setiap institusi menjalankan prinsip demokrasi. Kita mau membuat apa, caranya bagaimana, dan tujuannya apa sudah jelas. Tidak ada dominasi minimum. Setelah makin kuat dan matang, dengan *resource* yang lebih banyak, maka akan bisa mengakomodasi ruang yang lebih luas. Sistem semakin diperbaiki dan kematangan institusional lainnya akan tercipta. Setelah institusi *established*, barulah kita bicara mengenai kepentingan kelompok, etnisitas dan sebagainya.

Menurut Anda, yang paling mungkin untuk lebih diharapkan guna mewujudkan semua itu apakah negara atau civil society?

Dalam kondisi Indonesia, negara harus memimpin prosesnya karena suka atau tidak, dia lebih mampu. Mengapa demikian? Karena birokrasi pelayanan publik seperti pelayanan KTP, kalau tidak ditangani dengan baik, bisa menciptakan masyarakat yang acuh tak acuh. Kita bisa kesal dengan praktik yang bertele-tele. Kalau sistemnya jelas, setiap orang akan dengan enak dan senang mengurus dan berpartisipasi. Jadi yang harus dipenuhi oleh institusi-institusi yang berhubungan dengan hajat publik itu adalah kejelasan hak dan definisi tanggung jawab. Jika demikian maka tidak akan ada orang yang mempermasalahkan kalau harus ada uang, karena *resource* yang pantas untuk mengurusi dan melakukan sesuatu.

Sedangkan untuk masyarakatnya, perbaikilah kapasitas organisasi masing-masing. Satu hal yang saya lihat dari sekolah-sekolah Kristen di Indonesia Timur adalah ajaran tentang cinta dan penghargaan terhadap apapun pekerjaan kita. Pengelola perpustakaan, guru dan sebagainya begitu berdedikasi dengan pekerjaannya masing-masing.

Apakah kemunculan partai-partai agama di negeri kita akan menjadi berkah demi perayaan dan jaminan pluralitas, atau malah sebaliknya, hanya membuat sekat-sekat baru?

Menurut saya, mula-mula memang akan tercipta sekat. Tapi di beberapa daerah, calon yang membawa jargon agama ternyata malah kalah, karena banyak orang yang mulai kritis akan kebenaran dan kesungguhan perjuangannya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, hal bagus dari mereka adalah kemampuannya untuk membangun organisasi masyarakat, seperti ekonomi dan sebagainya. Sedangkan citra bersih yang coba dibangunnya, meski dalam beberapa hal justru banyak yang mulai sangsi dan menyatakan bahwa PKS tidak berbeda dengan partai-partai lain, sama-sama *melempem*. Belum lagi masalah dukungan dan afirmasi mereka terhadap soal poligami. Persoalan-persoalan seperti itu tidak bisa disalahkan pada Islamnya. Fakta bahwa banyak partai yang berlatar Islam bertindak seperti itu, pada hemat saya, bukan karena Islamnya. Tetapi lebih dikarenakan institusi, pelaku, dan cara kerja yang dijalankannya.

Dalam pandangan Anda, akan seperti apakah wajah pluralisme Indonesia ke depan?

Menurut saya, kondisi kita yang sekarang, malah belum memberikan kejelasan tanda akan menuju ke arah mana dan akan membuat masyarakat kita seperti apa nantinya, termasuk juga institusi negara. Kita sangat ketinggalan dibanding dengan negara-negara lain, mulai dari pendidikan sampai birokrasinya. Pembahasan tentang pendidikan macam apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk Indonesia saja belum pernah dirumuskan dengan sistematis. Jauh

lebih rumit lagi apabila mewujudkan sebuah institusi dengan birokrasi yang *capable*.

Saya melihat pluralisme adalah persoalan nomor dua yang akan menjadi sampingan dari masalah masyarakat kita yang sama sekali tidak produktif dan tidak tahu untuk melakukan sesuatu. Masyarakat tidak cukup hanya asal bertahan hidup dan mencari jalan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Di samping itu, di antara mereka juga akan menghasilkan cara yang bermacam-macam, dengan, tentu saja, kemungkinan kesalahan yang juga tidak sedikit. Namun, yang dikhawatirkan dari kondisi masyarakat yang berat itu adalah malah semakin menciptakan situasi yang sama sekali tidak kondusif, keadaan ekonomi makin buruk, konflik akan mudah pecah, dan lain-lain. Itu sangat mungkin terjadi. Selama ini masyarakat masih bertahan berdasarkan kemampuannya untuk saling menjaga keberlangsungan kehidupan bersamanya, sehingga tidak pernah terjadi konflik, tetapi tetap belum bisa menjadi masyarakat produktif, yang bisa mengelola sesuatu menjadi lebih baik.

Wawancara dilakukan di Depok, 02 Agustus 2007

Percakapan dengan

Moch. Qasim Mathar



Moch. Qasim Mathar, Guru Besar Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Ia memperoleh gelar master dan doktornya dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Adalah salah menganggap kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai bentuk teokrasi. Pada dasarnya Nabi membuat tatanan masyarakat yang sekular. Jadi tidak ada di dunia ini tipe ideal pemerintahan teokratis yang dapat dijadikan acuan umat Islam untuk mendirikan khilâfah. Karena itu liberalisme bukan satu hal yang perlu ditakuti. Justru semakin seseorang liberal dan pluralis, maka semakin luas perspektif hidupnya, tidak sempit cara pandangnya. Padahal, model keberagamaaan yang diyakini oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, yang gemar menyakralkan banyak hal, sulit untuk mendorong lingkungannya menjadi dewasa dan maju. Kalau seseorang mempunyai pemahaman sampai pada tingkat tauhid yang sejati, maka terhadap selain Tuhan hendaknya ia menyekularkan semuanya dan menyikapinya sebagai sesuatu yang murni duniawi.

Sekularisme merupakan salah satu gagasan yang diharamkan MUI (Majelis Ulama Indonesia), di samping juga pluralisme dan liberalisme. Bagaimana pandangan Anda perihal gagasan sekularisme?

Saya tidak hendak menjelaskan apa yang sudah banyak dijelaskan oleh banyak ahli ihwal sekularisme dari segi kata. Saya akan langsung memaparkan persoalan sekularisme yang bagi umat Islam sendiri semestinya dipahami sebagai upaya memisahkan secara tegas aspek-aspek agama dari soal-soal keduniaan. Agama sudah tidak lagi berusaha mengurusi dunia, sebaliknya dunia dibiarkan berjalan sendiri. Sebab, menurut saya, sekularisme merupakan semangat yang tidak lagi mengintegrasikan apa yang semestinya menjadi wilayah yang duniawi dengan yang ukhrawi.

Sehingga, tiba pada kesimpulan di mana seharusnya, sekarang ini, semangat dan praktik yang termanifestasi dalam orientasi perguruan tinggi seperti perubahan dari IAIN menjadi UIN (Universitas Islam Negeri), mestinya dijadikan sebagai titik tolak untuk mengubah institusi pendidikan yang benar-benar sekular. Karena, upaya pengintegrasian dalam bidang ilmu pengetahuan sudah dicoba sejak dahulu, dengan masa yang teramat panjang. Yakni, ketika umat Islam menghadapi dualisme yang sangat dikotomis antara ilmu agama dan ilmu umum. Dari situlah lantas timbul pemikir-pemikir pendidikan dan cendekiawan di perguruan tinggi yang berikhtiar bagaimana mengintegrasikan keduanya. Maka, di Indonesia lahirlah Unisba (Universitas Islam Bandung), UII (Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), Unisma (Universitas Islam Malang), UMI (Universitas Muslim Indonesia, Makassar) atau kemudian juga muncul berbagai universitas Muhammadiyah termasuk juga Nahdlatul Ulama dan seterusnya.

Menurut saya apa yang mereka lakukan hanyalah usaha menyatuatapkan fakultas agama dengan fakultas umum menjadi satu kampus. Tetapi, dengan cara seperti itu, substansi yang mereka inginkan tidak tercapai. Hal ini masih terlihat hingga hari ini di mana UIN Alauddin Makassar, misalnya, terdiri dari 5 fakultas agama yang masing-masing fokus pada ilmu-ilmu agama. Namun menurut pengamatan saya kelima fakultas tersebut pada praktiknya sekular. Sebab kelima fakultas yang sejak awal mempelajari masing-masing bidang agama sampai sekarang tidak bisa mencantolkan atau mengintegrasikan dirinya dengan aspek-aspek keilmuan umum. Meskipun kita bisa saja melahirkan sarjana-sarjana agama sampai dokter dari fakultas atau perguruan tinggi di bidang agama – atau sekarang juga kita (UIN Makassar) membikin Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan seterusnya, yang sebenarnya semua itu sama saja dengan yang ada di universitas umum – namun demikian tujuan dari ide pengintegrasian tidak akan pernah tercapai. Terlebih jika kita mengacu pada usaha yang pernah dilakukan, di mana ilmu-ilmu keislaman di masa klasik yang sebenarnya dapat integral, di antara kedua bidang itu (agama dan umum), namun sebaliknya apa yang telah kita lakukan di sini sama sekali belum kelihatan. Jadi, sebenarnya UIN Ciputat, Yogyakarta, Makasar dan lainnya, pada hemat saya, masih terus bergumul dan belum menemukan tanda-tanda ke arah integrasi yang diidealkan. Sehingga kita masih bisa memberi kesimpulan baik fakultas aga-

> Menurut saya, sekularisme merupakan semangat yang tidak lagi mengintegrasikan apa yang semestinya menjadi wilayah duniawi dengan yang ukhrawi.

ma atau fakultas umum yang ada atau yang tengah dicoba untuk dipadukan, pada praktiknya, masing-masing sekular.

Apa pandangan Anda perihal sekularisme dalam konteks hubungan negara dengan agama?

Saya pernah jalan-jalan ke Turki. Dan seperti pada umumnya orang Islam Indonesia, saya menganggap Islam di Turki itu sekular. Setelah dari sana, tumbuh kecenderungan hati saya agar Indonesia seperti itu. Karena, ternyata, di Turki agama lebih terurus daripada di Indonesia. Meskipun secara politik negara (Turki) menegaskan tidak mengurus agama (sekular), tetapi dalam implementasinya sangat religius. Ketika kami beraudiensi dengan sebuah majelis, seperti majelis ulamanya, meskipun saya memandang majelis tersebut tidak bisa dibandingkan dengan Majelis Ulama Indonesia, baik tata cara berpikir para pengurusnya demikian juga tata cara mereka menerima tamu. Penjelasan mereka tentang posisi agama itulah yang mendorong saya kemudian ingin mengatakan: mungkin lebih bagus posisi agama seperti itu, di mana negara tidak berusaha mencampuri agama, tetapi, praktik sebenarnya, di antaranya seperti ada tali yang terhubung dari negara kepada agama. Karena memang tersedia dana dari negara yang diperuntukkan bagi lembaga-lembaga keagamaan.

Praktik semacam itu mirip dengan apa yang terjadi di Kuala Lumpur (Malaysia). Meskipun, memang, Malaysia menempatkan Islam sebagai agama resmi negara, sehingga ada jalur di mana negara misalnya memberi gaji kepada imam besar di Kuala Lumpur.

Namun demikian, semua hal yang sudah saya uraikan itu tidak akan kita temukan di negara Indonesia yang dianggap sangat reli-

gius, sangat islami. Apabila mencoba untuk membandingkan Malaysia dan Turki dengan negara kita, maka saya lebih suka kepada dua negara tersebut dalam hal pengurusan Islam yang proporsional. Karena itu, dalam kenyataannya negara kita justru tidak pernah kelihatan benar-benar sekular. Karena dalam praktiknya pemerintahan kita tidak sekular. Misalnya, di Turki juga ada fakultas teologi yang ditangani oleh umat Islam (swasta) – dan di sana universitas negeri juga mempunyai fakultas yang sama – yang lantas fakultas teologi tersebut mengambil bentuk-bentuk kompromi dengan politik kebijakan negara menyangkut persoalan agama. Bagimanapun, kita ketahui juga, fakultas-fakultas seperti itu kemudian menjadi tempat lahirnya pemikir-pemikir Muslim Turki yang tidak kurang baik dari intelektual Muslim Indonesia.

> Saya lebih suka hal-hal di luar Tuhan disekularkan, tanpa terkecuali.

Setujukah Anda dengan penolakan banyak orang terhadap sekularisme yang, salah satunya, dianggap berbahaya bagi agama lantaran menyebabkan peran dan fungsi agama menjadi semakin tersisih dalam kehidupan sehari-hari?

Ketika Nurcholish Madjid, waktu itu masih ketua HMI, mencoba mewacanakan sekularisasi, sebenarnya makna dari gagasan ini adalah bagaimana kita menduniakan hal-hal yang duniawi dan menyikapinya apa adanya. Yakni bagaimana ketika kita menyikapi benda-benda tidak lantas berpikir dan menganggap bahwa di dalamnya terdapat aspek-aspek yang sakral dari benda-benda tersebut. Kalau seseorang mempunyai pemahaman sampai pada tingkat tauhid (perihal keyakinan akan keesaan kekuasaan Tuhan)

yang benar-benar sejati, maka berpandangan bahwa yang sakral hanya Tuhan. Atau, dengan pengertian selain Tuhan tidak ada yang sakral. Sehingga, apabila kita berkeyakinan seperti itu, maka akan mensekularkan segala sesuatu yang selain Tuhan dan menyikapinya sebagai sesuatu yang murni duniawi. Menurut saya keyakinan itu harus ditanamkan secara konsisten.

Misalnya, tidak ada bedanya antara toilet di masjid dengan *mih̲râb*, tempat orang beribadah dan para elit masjid berkumpul. Sebab, keduanya adalah hal yang material, duniawi. Tidak boleh dalam benak kita muncul perasaan bahwa *mih̲râb*, lantaran berada di dalam masjid, lantas dianggap sakral. Sebab, bisa jadi, *mih̲râb* juga digunakan sebagai tempat berbohongnya para elit masjid. Di *mih̲râb* itu, misalnya, orang bisa menghitung uang celengan/sumbangan masjid, tetapi sekaligus di situ jugalah dia memanipulasi uang celengan atau kotak amal masjid – justru bukan di toilet. Maka, baik terhadap toilet yang memang tempat orang membuang kotoran ataupun *mih̲râb*, hendaknya kita menganggap keduanya sebagai hal-hal yang duniawi. Demikian itulah sikap sekular.

Celakanya, karena kita terlampau terpengaruh pada hal-hal yang semakin banyak dianggap sakral, sehingga kita tidak dapat mengkritisi hal-hal yang seharusnya memang demikian adanya, profan semata. Di antara kita banyak yang terlanjur menganggap bahwa di lingkungan masjid tidak akan terjadi hal-hal yang manusiawi atau duniawi, dan selamanya sakral. Padahal, hal-hal yang manusiawi seperti memanipulasi sumbangan dari kotak amal masjid dan sebagainya adalah sesuatu yang tidak mustahil terjadi di dalam masjid. Kita harus melihat hal-hal seperti itu secara sekular, sebagaimana kamar di rumah saya, mungkin fungsinya sebagai tempat tidur dan sekali-kali untuk bersembahyang. Mungkin kamar saya

lebih "bersih" dari *mihrâb* masjid, karena bisa saja di *mihrâb* setiap jumat uang celengan di manipulasi orang, karena uang kotak amal itu kebetulan dihitung di *mihrâb* oleh pengurus masjid. Walaupun ada pengumuman transparan, tetapi dari rechan-rechan yang ada kita tidak pernah tahu apakah terhitung setiap hari Jumat atau setiap harinya. Untuk itulah, saya lebih suka hal-hal di luar Tuhan disekularkan, tanpa terkecuali.

> Kalau kita memahami betul semangatnya, maka liberalisme bukan satu hal yang perlu ditakuti. Karena liberalisme merupakan satu pandangan yang ingin memperlihatkan posisi manusia yang sesungguhnya, dengan hak dan kebebasannya, dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali manusia harus mempunyai posisi yang merdeka untuk menghindari kehidupan yang sulit dan tertindas.

Kalau untuk konteks Indonesia mutakhir, apakah dalam praktiknya negara kita – kendatipun konstitusinya tidak mendasarkan pada agama sekaligus juga tidak sekular – sudah berada pada jalur sekular atau belum?

Negara kita tidak sekular dalam arti sesungguhnya, dalam arti yang akademik. Sebab, dalam kehidupan sehari-hari, setiap sesuatu yang hendak kita sekularkan justru dilingkupi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak sekular. Ada kehidupan hantu di TV, ada cerita-cerita yang dianggap mewakili sebuah siaran yang bernuansa islami, dengan menonjolkan simbol-simbol Islam – meskipun, menurut saya, sebenarnya tidak (islami), lantaran sama sekali tidak ada legitimasinya dalam ayat al-Quran. Kehidupan beragama orang-orang

Indonesia jauh lebih parah dan memprihatinkannya daripada negara-negara lainnya seperti Malaysia atau, yang kita anggap sekular, seperti Turki. Orang Indonesia sering mengkritik bagaimana orang Melayu, dalam hal ini Malaysia, memberikan restu atas berdirinya *highland*, "Cameron Highland Resort", sebuah tempat di Pahang, bagi orang-orang untuk bermain kasino (judi), dan fasilitas lainnya yang oleh agama Islam dianggap maksiat, dengan kompleks yang sangat luas. Namun, jika dicermati lebih jauh, yakni manakala para pemuka Islam di Kuala Lumpur kita tanya, misalnya: "Anda merupakan orang melayu yang identik dengan Islam dan negara Anda adalah negara Islam. Lantas, kenapa Anda sebagai ulama bisa menerima berdirinya kompleks seperti itu?" Mereka tidak berpikir panjang, bahkan segera menjawab bahwa, "Dahulu kami sangat kesulitan dan tidak bisa mengontrol kejahatan atau tindak maksiat yang dapat menyebar di segala tempat, tetapi dengan adanya tempat seperti itu kami justru bisa lebih mudah mengontrol dan melokalisirnya, sehingga kemungkaran seperti itu bisa dikalkulasi karena ada tempatnya tersendiri." Dengan pengertian lain dalam mengatasi kemungkaran seperti itu dibutuhkan manajemen tersendiri. Sementara, di negara kita tidak ada *treatment* khusus yang lebih menata kegiatan maksiat dengan baik, sehingga negara dapat memanajemen kemungkaran dan kebaikan dengan teratur. Pasalnya, semuanya, di negara ini, tidak jelas.

Penolakan terhadap sekularisme muncul bukan semata karena paham ini bisa melemahkan agama, tetapi juga, yang lebih mendasar lagi (menurut para penentangnya), bertentangan dengan agama. Menurut

Anda, adakah landasan teologis bagi sekularisme sehingga paham ini mendesak untuk diterapkan di negara ini?

Secara teologis, sekularisme merupakan suatu keharusan. Ketika kita berikrar dan memberikan kesaksian: *Lâ ilâha illâ Allâh*, maka, sebagaimana yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, selain Tuhan tidak lain *saeculum*, kekinian – dan ke-di sini-an, imanen. Di luar Zat Tuhan adalah segala hal yang duniawi, profan. Yakni, selain Tuhan, yang transenden, itu alam semesta, yang imanen. Demikianlah yang di antaranya dapat dijadikan landasan teologis bagi sekularisme. Sementara itu, kehidupan bernegara di negeri ini masih sangat jauh dari pandangan yang dapat memisahkan secara tegas antara eksisitensi Tuhan yang sakral dengan eksistensi di luarnya yang semata duniawi dan profan. Sehingga, lantaran praktik sekularisme tidak berjalan, dapat kita lihat kehidupan kaum Muslimin di Indonesia sama sekali di luar dari standar tauhid yang benar. Akibatnya, banyak terjadi hal-hal yang kita keluhkan bersama, seperti korupsi dan

> Kalau kita kembali ke fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan pluralisme, sebenarnya MUI keliru memahami pluralisme. Karena MUI terlalu cepat memberikan kesimpulan bahwa orang yang pluralis akan berpandangan semua agama sama. Jadi, menurut saya pemahaman MUI seperti itu salah. Sebab pluralisme tidak begitu. Justru orang Pluralis menganggap semua agama berbeda. Penjelasan yang dilakukan MUI terhadap pluralisme tidak berdasarkan ensiklopedi. Orang yang pluralis akan membiarkan dan mentoleransi atau merasa tidak terganggu terhadap setiap hal yang berbeda dan bermacam-macam – apakah itu agama, cara pandang, keyakinan dan sebagainya.

tindakan melawan hukum lainnya. Celakanya, mereka seolah berpandangan bahwa tindakan-tindakan semacam itu sebagai sesuatu yang tidak berkaitan dengan keyakinan agama dan merupakan suatu perbuatan yang tidak harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, tidak saja kepada masyarakat. Di sinilah tindakan melanggar hukum oleh mereka kemudian menjadi hal yang sekular dan tidak ada hubungannya dengan ajaran agama. Artinya, tidak ada korelasi antara sembahyang mereka dengan perilaku di kantor yang melanggar aturan hukum positif (sekular). Mereka mensekularkan semua itu; sekular dalam arti yang negatif.

Padahal kalau berangkat dari pandangan teologis dan ketauhidan yang benar, tindakan melawan hukum seperti itu sama sekali tidak dibenarkan. Di sinilah pemahaman sekularisme yang semestinya harus terus didesakkan. Sungguhpun demikian, ulama-ulama kita, terutama ulama fikih, belum sampai berani untuk mengatakan: bila Anda melakukan korupsi berarti sembahyang Anda tidak sah. Di sinilah kita dapat memahami, kenapa lantas para koruptor tidak pernah menghubungkan tindakan melawan hukum mereka dengan ibadah sembahyangnya. Sebab, sejak dulu, waktu mengaji agama dan sekolah, kita diajarkan bahwa sembahyang akan sah kalau Anda memenuhi syarat dan rukunnya. Saya ingat pelajaran yang saya dapatkan dulu, misalnya, wudlu Anda sah kalau memenuhi syarat dan rukunnya. Demikian juga ibadah lainnya, seperti salat, puasa dan lainnya. Akibatnya, ibadah salat, puasa, haji dan sebagainya menjadi sesuatu yang terpisah dari perbuatan kita yang berhubungan dengan kehidupan sosial kita. Pemahaman agama kita, terutama juga para ulama kita, belum sampai membuat fikih yang dengan tegas menyatakan bahwa ibadah-ibadah kita itu tidaklah sah kalau apa yang menjadi ketentuan dalam al-Quran

tentang keharusan berbuat baik dan tidak berlaku zalim terhadap sesama, seperti korupsi yang merugikan negara atau masyarakat banyak, kita langgar.

Idealnya para ulama fikih kita menekankan dan mendasarkan diri pada al-Quran yang dengan tegas mengaitakan antara sembahyang dengan sikap sosial, kemudian mereka menyatakan bahwa sah tidaknya ibadah seseorang juga tergantung dengan prilaku sosialnya. Persoalannya, tidak ada dalam hukum fikih yang berani dan tegas menyatakan kalau Anda tidak bersikap sosial, maka sahnya sembahyang Anda dipertanyakan dan menjadi persoalan. Mestinya pemahaman keberagamaan kita sudah sampai seperti itu.

Menurut hemat saya, semakin seseorang pluralis dan berpandangan liberal, maka hidup ini semakin luas perspektifnya. Tetapi kalau tidak liberal dan pluralis, maka jadi sempit cara pandang seseorang. Dia semakin sulit untuk memilih. Dan, secara teologis, hal itu didukung oleh al-Quran.

Menurut Anda mengapa keberagamaan kita sampai pada pemahaman yang cenderung memisahkan perilaku sosial, demikianpun ulama-ulama fikih cenderung ritualistik dan siar keberagamaannya tidak berorientasi transformasi sosial? Padahal bagi Anda model keberagamaan seperti ini menjadi persoalan yang akut dalam kehidupan bersama.

Menurut pandangan saya, pemahaman agama yang kita terima bukanlah Islam yang langsung dari masa "klasik". Celakanya, Islam masa klasik yang kita ketahui justru menjadi bahan kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah tinggi S2 dan S3. Sementara Islam yang diajarkan sekarang ini – dan karena itu sekaligus juga

diimplementasikan – adalah Islam "Abad Pertengahan". Sedangkan dalam sejarahnya, Islam Abad Pertengahan merupakan pandangan Islam yang mundur, yang terbelakang, karena lebih didominasi oleh paham-paham fikih. Sebaliknya, kita juga menyadari betul, bahwa semangat dan praktik Islam di masa klasik belum menjadi bagian kehidupan umat Islam di Indonesia. Sebab, selama ini, semua itu hanya bisa dipelajari dalam program pasca-sarjana. Sehingga hanya sedikit orang yang dapat memahaminya dengan baik. Namun begitu, sepertinya sekarang ini sedikit mulai ada pemetaan terhadap Islam masa klasik untuk bisa diakses oleh kalangan yang agak luas.

Bagaimana Anda menjelaskan bahwa, sebagaimana Anda kerap mengungkapkannya, yang bikin mundur dunia Islam dan keberagamaan umatnya adalah Islam model fikih dan tasawuf yang anti-filsafat? Aspek manakah dalam fikih dan tasawuf anti-filsafat yang bertanggung jawab atas terbelakangnya peradaban Islam?

Di dalam sejarahnya, umat Islam, terutama periode setelah al-Ghazali, begitu rupa menyerang filsafat. Hal ini bermula dari serangan Imam Ghazali terhadap filsafat yang lantas diamini begitu saja oleh generasi kedua setelah Imam al-Ghazali. Akibatnya, lantas mereka dan generasi setelahnya menjadi alergi dengan filsafat, termasuk ilmu (alat) filsafat yang paling penting, yaitu logika atau *manthiq*. Mereka lupa kalau al-Ghazali dan cendekiawan sezamannya merupakan pelajar-pelajar yang tekun mempelajari dan mendalami filsafat sehingga menjadi orang besar. Mereka, generasi umat Islam setelah al-Ghazali, begitu saja mengabaikan kebesaran dan keluasan berpikir sarjana-sarjana Islam sebelumnya.

Meskipun kemudian di antara mereka, pemikir-pemikir Islam itu, seperti al-Ghazali sendiri, mengkritik filsafat?

Janganlah Anda lupa bahwa al-Ghazali bisa mengkritik filsafat karena dia sendiri menguasai filsafat. Demikian juga lawan-lawannya, mereka dapat melakukan pembelaan karena mereka ahli filsafat. Setelah periode tersebut, umat Islam lupa betapa pentingnya filsafat untuk membangun pemikiran agama yang luas dan membangun pengetahuan Islam yang lebih mumpuni dan disegani. Sehingga, generasi selanjutnya membuang filsafat dari kurikulum pendidikan Islam. *Manthiq* atau logika tidak dipelajari lagi. Padahal, *manthiq* merupakan perangkat filsafat yang mengajarkan bagaimana cara berpikir yang lurus, sistematis, tidak menyimpang dan logis. Lantas dalam sejarahnya kemudian ulama-ulama begitu rupa mencabut semua ilmu-ilmu umum yang kita kenal sekarang sebagai aljabar, astronomi dan ilmu-ilmu umum lainnya. Sehingga pada waktu itu yang tertinggal hanya ilmu agama.

> Sepatutnyalah apabila sekarang ini kita mempersoalkan kejanggalan-kejanggalan yang melingkupi sejarah al-Qur'an. Melacak dan mempertanyakan al-Qur'an yang kita terima sekarang ini tidak apa-apa. Bahkan saya tidak pernah takut dengan redupnya peran al-Qur'an bagi kehidupan kita. Sebab, kecanggihan teknologi tidak berjalan ke belakang, melainkan berjalan ke depan.

Babak sejarah berikutnya ulama-ulama memproklamirkan agar semua masalah yang sudah ada rujukannya dalam buku-buku – dari empat mazhab fikih yang ada – untuk diyakini keabsahannya dan tidak usah diwacanakan atau didiskusikan, terlebih dikritisi lagi. Umat Islam tinggal mengambil rujukan itu dan tidak usah

dipikirkan lagi. Sejak itu, pintu ijtihad ditutup. Umat Islam harus *taqlîd*, menerima begitu saja apa yang sudah menjadi ketentuan ulama fikih. Sehingga yang subur pada waktu itu cara berpikir *fiqhiyah* dan hitam-putih saja. Berbeda dengan pada masa klasik yang kuat pemahaman tasawufnya. Demikianpun Islam Abad Pertengahan yang, justru, bertolak belakang. Karena tasawuf yang berkembang bercorak tarekat-tarekat. Sementara pada masa klasik tasawufnya lebih banyak pengalaman individual yang bercorak falsafi, karena tasawuf di era tersebut selevel dengan bidang yang lain seperti filsafat dan teologi. Sebaliknya, pada Abad Pertengahan tasawuf atau mistisisme Islam berkembang menjadi tarekat-tarekat, di mana salah satu syaratnya harus ada guru atau *mursyid*. Sehingga, ditumbuhkanlah kefanatikan terhadap guru. Implikasi lebih jauh dari itu semua adalah bagi umat Islam yang mempelajari atau mempraktikkan dan ikut tarekat, niscaya daya kritis mereka sudah dilumpuhkan pada waktu itu juga. Daya kritis seseorang menjadi mandul manakala ia didesak fanatik terhadap satu idola.

Jika demikian, apakah dapat disimpulkan bahwa seseorang menjadi sekular berarti juga sekaligus menjadi rasionalis dan kritis?

Benar. Sebab, menjadi orang yang sekular berarti dia berani melihat realitas apa adanya yang tengah berlaku di sekitarnya. Artinya, seorang yang sekular tidak merasa tergganggu sama sekali, secara teologis, kalau dia harus mengkritisi hal-hal yang menurutnya bertentangan dan dapat merugikan orang banyak. Sebaliknya, kalau kehidupan seseorang terlalu banyak dipenuhi hal-hal yang sakral, daya kritisnya hilang dan, secara teologis, dia segan untuk mengkritisi realitas. Karena jika dia hendak mencoba untuk me-

lompat dari ketentuan-ketentuan yang sudah ada – dalam hukum fikih, misalnya – tentu saja terlibat dengan istilah-istilah sakral yang kemungkinan terakhirnya adalah akan merasa berdosa.

Tidakkah pemahaman tauhid yang ekstrem, dengan menganggap Tuhan sebagai yang satu-satunya absolut dan selain tuhan adalah duniawi dan nisbi, dapat berakibat jauh dan memunculkan pemahaman yang cenderung agnostis dan ateistis? Sebab, manakala yang dikedepankan semata sikap rasional dan kritis, tentunya akan membawa pada suatu pemahaman di mana segala sesuatunya tidak ada yang sakral kecuali Tuhan itu sendiri, sehingga salat akan dianggap tidak sakral, demikianpun nabi dan malaikat tidak sakral.

Secara teologis, sekularisme merupakan suatu keharusan. Ketika kita berikrar dan memberikan kesaksian: *Lâ ilâha illâ Allâh*, maka, sebagaimana yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, selain Tuhan tidak lain *saeculum*, kekinian – dan ke-di-sini-an, imanen. Di luar Zat Tuhan adalah segala hal yang duniawi, profan. Yakni, selain Tuhan, yang transenden, itu alam semesta, yang imanen.

Menurut hemat saya, tidak apa-apa kalau semuanya berlangsung secara logis. Seorang ateis yang di tengah masyarakat berpikir sangat logis dan rasional, pada hemat saya, lebih baik daripada orang beragama yang hidupnya terus menerus menambah daftar sakral. Yang pertama bisa mendorong orang menciptakan kemajuan peradaban. Sebab, kendatipun tidak percaya Tuhan tetapi dengan rasio dan daya kritisnya dia bisa membangun tatanan sosial seperti yang akal sehatnya inginkan dan yang dia cita-citakan de-

ngan baik. Sebaliknya yang kedua tadi hanya menambah hal-hal yang tidak sakral menjadi sakral, sehingga dia dapat menghambat pembangunan peradaban. Meskipun dia mempunyai cita-cita hidup dalam tatanan sosial yang baik, tetapi dia terhambat karena dia tidak bisa mengkritisi lingkungannya dan sekaligus membenahinya. Memang hal ini tidak enak didengar oleh kalangan yang tradisionalis dan konservatif. Tapi ini akan lebih bagus. Sebab, di dunia yang kian modern, sudah teramat sering kita melihat di banyak masyarakat, misalnya, sikap agnostis, yang tidak terlampau peduli dengan eksistensi Tuhan; paling tidak, mereka memang tidak menyebut adanya Tuhan tetapi mereka merasa di luar dirinya terdapat suatu kekuatan, hanya saja tidak menyebutnya Tuhan; atau yang paling ekstrem tidak percaya sama sekali, tetapi mereka bisa membenahi, membangun dan mengkritisi lingkungannya, karena mereka mempunyai kemampuan itu. Sementara model keberagamaan yang diyakini oleh kebanyakan masayarakat Indonesia, yang gemar menyakralkan banyak hal, sulit untuk mendorong lingkungannya menjadi dewasa dan maju.

Kita semua tentunya menganggap apa yang telah dipaparkan Anda sebagai suatu cita-cita ideal, dengan masyarakat yang dapat bersikap kritis, logis atau rasional dan dewasa, yang dalam banyak hal, ini disebut juga sebagai sikap seorang sekular. Namun demikian, kenyataan yang melingkupi umat Islam tidak seideal itu. Artinya, dunia Islam mengidap suatu problem. Menurut Anda apa yang terjadi dengan sejarah masa lalu umat Islam sehingga idealisme sebagaimana dibayangkan kita semua tidak muncul, dan justru berkembang di masyarakat Barat. Misalnya dengan indikator penolakan umat Islam

terhadap filsafat dan gagasan rasional lainnya seperti liberalisme, sekularisme dan pluralisme?

Kita dapat melacak perilaku umat sejak zaman jahiliyah yang mengalami dekadensi dalam seluruh aspek kehidupannya. Kemudian oleh Tuhan diutuslah seorang nabi untuk mengubah masyarakatnya. Pada waktu itulah Nabi Muhammad kemudian membangun kota Madinah. Artinya, sekarang ini untuk membangun suatu masyarakat dibutuhkan seorang nabi, tetapi, sesuai dengan keyakinan bahwa Muhammad merupakan Nabi terakhir, kita tidak memiliki nabi berikutnya. Maka, kita harus menghidupi zaman kita dengan meneladani apa yang pernah Muhammad lakukan di Madinah dulu. Saya kira kita semua seharusnya yang berjuang untuk membangun masyarakat menjadi lebih maju; tidak terus-menerus mewarisi pola pikir jahiliyah yang serba menyakralkan banyak hal. Yakni, dengan terlebih dahulu kita semua membetulkan cara berpikir umat. Dulu, Nabi Muhammad tugasnya hanya satu: menyampaikan wahyu. Tetapi kenapa di zaman kita malah berubah: menyampaikan dua hal, "wahyu dan Hadits". Menurut hemat saya, di sinilah letak kemunduran umat Islam.

> Saya berkesimpulan bahwa tidak ada di dunia ini tipe ideal pemerintahan teokratis yang dapat dijadikan acuan umat Islam untuk mendirikan *khilâfah*.

Sejak Nabi Muhammad meninggal, telah banyak kesalahan yang teramat panjang dan terus menerus diwariskan. Sebab, kalau kita konsisten hendak mencontoh Nabi Muhammad, karena kita semua *warasat al-anbiyâ*', maka kita harus meneruskan satu-satunya yang menjadi tugas Muhammad dan semua nabi yang sebelumnya: hanya menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan.

Harus begitu dan hanya seperti itulah yang sebenarnya kita lakukan. Tetapi sejarah kemudian mengubah para umat nabi-nabi untuk tidak saja menyampaikan apa yang disampaikan wahyu, tetapi juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ahli Hadits. Sehingga, lagi-lagi, menurut hemat saya harus dibetulkan terlebih dahulu kekeliruan ini. Al-Quran dan Hadits tolong jangan disebar bersamaan! Bahkan, janganlah Hadits itu diturunkan sedikit, sebaliknya Hadits diturunkan jauh dan sejajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana juga ilmu Hadits harus sejajar dengan semua pengetahuan yang dikenal oleh manusia. Tidak boleh Hadits diangkat ke dekat al-Quran apalagi disejajarkan. Jadi pernyataan Muhamadiyah agar umat Islam kembali kepada al-Quran dan al-Sunnah menurut saya harus segera kita tinggalkan. Jargon seperti itu tidak benar dan menyesatkan.

Bukankah pernyataan Anda dapat memancing kontroversi bagi umat Islam yang terlanjur meyakini kekuatan Hadits atau Sunnah Nabi? Apakah hal itu menjadi tawaran final Anda agar umat Islam bangun dari ketertinggalannya?

Ya. Umat Islam cukup kembali kepada al-Quran saja. Hadits itu harus sama dengan ilmu pengetahuan yang lain, karena para nabi hanya ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Di masyarakat Indonesia, dalam membangun sikap dan perilaku umat, lebih banyak dibangun oleh Hadits-hadits yang kita tidak ketahui kebenarannya, apakah Nabi pernah bicara sebagaimana yang terlanjur diyakini dan terus-menerus diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah diskusi dalam rangka ulang tahun UIN Makassar. Di situ saya bilang

bahwa semua ilmu-ilmu yang kita pelajari sekarang di UIN Makassar termasuk Hadits hendaknya dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan semua ayat al-Quran. Tidak boleh kebenaran Hadits disakralkan dan diletakkan di samping al-Quran. Sebab, hal itu, menurut saya, merupakan paradigma yang keliru. Kita semakin jauh dari cita-cita wahyu.

Seorang ateis yang di tengah masyarakat berpikir sangat logis dan rasional, pada hemat saya, lebih baik daripada orang beragama yang hidupnya terus menerus menambah daftar sakral. Yang pertama bisa mendorong orang menciptakan kemajuan peradaban. Sebab, kendatipun tidak percaya Tuhan tetapi dengan rasio dan daya kritisnya dia bisa membangun tatanan sosial seperti yang akal sehatnya inginkan dan yang dia cita-citakan dengan baik.

Sebagai salah satu contoh, soal anjing di dalam al-Quran, kalau tidak salah, hanya satu ayat. Yakni ayat ketika menyampaikan perihal anjing dengan tuannya, pemuda al-kahfi (*ashḥâb al-kahf*). Anjing dalam versi al-Quran dengan pemuda alkahfi itu dicitrakan positif. Tetapi, anjing-anjing di banyak Hadits sebaliknya digambarkan secara negatif. Saya tidak percaya kalau Nabi Muhammad membuat pertentangan dengan apa yang ditugas-kan kepadanya dalam menyampaikan kebe-naran wahyu. Menurut saya anjing bukan persoalan penting dalam Islam atau al-Quran. Kalau memang penting mestinya ihwal anjing banyak dimuat oleh al-Quran. Karena itulah Hadits-hadits yang terlampau banyak menjelaskan anjing secara negatif merupakan Hadits yang tidak benar dan bertentangan dengan citra anjing dalam al-Quran. Yang betul adalah cerita anjing dalam al-Quran. Persoalannya, mencontoh banyak Hadits yang kualitasnya tidak jelas, sebagaimana gambaran negatif perihal anjing, telah menjadi

paradigma umum umat Islam. Padahal dalam Islam sendiri tidak ada di al-Quran penjelasan yang menganggap penting tentang Hadits maupun tentang anjing.

Bagaimana dengan pernyataan Arqoun yang sampai menganggap bahwa al-Quran sebagai produk budaya, sama sebagaimana teks-teks lainnya (sastra) yang dapat dianalisis dan dikritisi?

Mungkin saja benar dengan meletakkan al-Quran seperti itu. Karena Arqoun memang bicara soal itu. Tetapi pandangan semacam itu bisa bikin "semaput" orang Islam Indonesia. Sementara kalangan Muhammadiyah selalu menggembor-gemborkan bagaimana umat Islam Indonesia agar *al-rujû' ilâ al-Qur'ân wa al-Sunnah*. Padahal ini salah. Karena itu kita harus pelan-pelan memberikan pengertian kepada umat Islam. Nabi hanya disuruh membawa al-Quran. Lantas, kenapa kita begitu rupa menyiarkan Hadits-hadits? Sebenarnya tidak bermasalah menyiarkan Hadits, tetapi kita harus menempatkan Hadits sama dengan ilmu pengetahuan sosial dan eksakta lainnya, sebagai instrumen untuk memahami ayat-ayat al-Quran.

Apa respon Anda perihal pandangan para pembaharu Islam bahwa sebenarnya al-Quran tidak perlu ditafsir?

Sebenarnya sejak di S1 kita belajar pengantar tentang ilmu tafsir dan ilmu al-Quran. Sebenarnya sejak itulah semestinya sudah muncul gugatan ketika kita menerima pelajaran dari dosen tafsir bahwa yang kita terima ini adalah mushaf atau *rasm* Utsmani. Jika kita mau kritis, mestinya pada saat itulah kita sudah menggugat

lalu mempertanyakan bagaimana keberadaan dan posisi ayat-ayat al-Quran versi yang bukan mushaf atau *rasm* Utsmani, yang pernah ada dan diketahui dalam sejarah sudah dipakai sebelumnya? Mestinya di situ kita sudah harus mulai mengkritisinya dengan melacaknya secara historis. Tetapi, lagi-lagi, karena sejak awal kita menganggap al-Quran yang di hadapan kita sekarang ini sudah final dan sakral, sehingga kita pun menerimanya begitu saja. Sebab, ini kesepakatan sejak zaman yang panjang.

Idealnya para ulama fikih kita menekankan dan mendasarkan diri pada al-Quran yang dengan tegas mengaitakan antara sembahyang dengan sikap sosial, kemudian mereka menyatakan bahwa sah tidaknya ibadah seseorang juga tergantung dengan prilaku sosialnya. Persoalannya, tidak ada dalam hukum fikih yang berani dan tegas menyatakan kalau Anda tidak bersikap sosial, maka sahnya sembahyang Anda dipertanyakan dan menjadi persoalan. Mestinya pemahaman keberagamaan kita sudah sampai seperti itu.

Padahal, sudah sepatutnyalah apabila sekarang ini kita mempersoalkan kejanggalan-kejanggalan yang melingkupi sejarah al-Quran. Melacak dan mempertanyakan al-Quran yang kita terima sekarang ini tidak apa-apa. Bahkan saya tidak pernah takut dengan redupnya peran al-Quran bagi kehidupan kita. Sebab, kecanggihan teknologi tidak berjalan ke belakang, melainkan berjalan ke depan. Jadi, menurut saya kita tidak perlu takut kehilangan wahyu. Sebab, teknologi ke depan semakin maju, canggih dan selalu akan membantu dan menghadirkan apa yang kita anggap hilang. Bagaimanapun, teknologi tidak pernah berjalan ke belakang, dia selalu lebih maju,

sehingga ada kemungkinan suatu saat teknologi bisa mengetahui bentuk-bentuk tulisan al-Quran di masa lalu.

Kalau selama ini al-Quran dan Hadits dianggap sebagai rujukan utama bagi umat Islam, dan kemudian kedua sumber tersebut didesentralisasi, lantas pada apa dan ke mana lagi umat Islam mencari pijakan etis untuk dijadikan pegangan alternatifnya guna merumuskan nilai-nilai baru untuk menata kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan maju?

Kenapa Anda merasa sulit ketika Hadits dan al-Quran perannya tidak sentral lagi bagi kehidupan kita. Di zaman sekarang betapa banyak masyarakat di pelbagai bangsa dapat menata kehidupan sosialnya jauh lebih baik dari kita (umat Islam), meskipun mereka tidak pernah menerapkan syariat Islam, mengatur orang berpuasa dan sebagainya. Banyak jalan dan terdapat berbagai bukti konkret di mana orang bisa hidup dengan tatanan sosial yang sekular, yang mereka impikan sebagai satu bangsa.

Acap kali dalam membincang perihal negara, sekularisme, yang mengidealkan bentuk nation-state *(demokrasi), biasanya dilawankan dengan teokrasi. Apa yang dapat Anda paparkan perihal bentuk pemerintahan Islam teokratis yang lazim disebut khilâfah dan selalu dijadikan tujuan perjuangan oleh beberapa kalangan Islam sebagai proyeksi sistem pemerintahan Islam yang ideal?*

Konsep teokrasi yang digambarkan dalam teori tidak pernah muncul dan terbukti, kecuali praktik di luar Islam, yaitu Vatikan, di agama Katolik. Namun begitu, memang Maududi pernah mencoba

membangun gambaran pemerintahan Islam yang teokratis; begitupun Natsir pernah tergiring membayangkan konsep tersebut.

Saya sendiri pernah mengajukan pertanyaan dan sekaligus mengklarifikasi kepada salah seorang teman tentang dari mana cikal-bakal model pemerintahan khilâfah yang diidealkan oleh banyak kalangan Islam. Ketika saya mulai dengan model Arab Saudi, dia mengkritik banyak hal tentang keluarga (dinasti) Saud yang dianggapnya jauh dari mengindahkan moral islami. Bahkan, olehnya Libanon dikritik juga. Semua negara Islam di kawasan Arab dia kritik. Lantas saya berpikir lagi, mudah-mudahan Iran bisa memancing keterangan dari dia untuk mengaitkan sistem teokrasi Islam yang diimpikan banyak umat Islam. Namun, lagi-lagi, tidak sedikit dia mengkritik sistem pemerintahan Iran yang tidak demokratis. Akhirnya, saya berkesimpulan bahwa tidak ada di dunia ini tipe ideal pemerintahan teokratis yang dapat dijadikan acuan umat Islam untuk mendirikan khilâfah. Sebab, tidak mungkin juga jika cikal-bakal *khilâfah* terbangun di Indonesia, meskipun penduduk Islamnya sangat besar.

> Terhadap selain Tuhan kita hendaknya menyekularkan semuanya dan menyikapinya sebagai sesuatu yang murni duniawi.

Jika dalam praktik dan konsepsinya tidak dapat diacu dari mana gambaran ideal sistem khilâfah dapat dikembangkan, maka menurut hemat saya mereka yang memperjuangkan bentuk pemerintahan seperti itu terlalu utopis. Sebab, negara-negara Muslim yang ada sekarang juga tidak ada satu pun yang menjadi cikal-bakal bagi berdirinya khilâfah Islam.

Jadi, teokrasi dipertentangkan dengan model *nation-state* yang demokratis. Artinya, akan jauh lebih baik bagi orang yang bersikap

sekular, realistis dan berpikir lurus ketimbang orang yang dipenuhi pikiran-pikiran teokrasi tetapi mereka sendiri tidak tahu harus berangkat dari mana. Sebab, bagi kalangan yang masih muda dan energik, atau kelak setelah berganti generasi sekalipun, saya kira, semakin sulit bagi orang untuk menerima pikiran-pikiran utopis tentang *khilâfah*.

Problemnya, belakangan semakin keras impian tersebut dimunculkan dan kelompok-kelompok Islam politik semakin gemar memainkannya. Saya sendiri beranggapan bahwa sebenarnya banyak sekali politisi kita yang tidak yakin kalau sistem *khilâfah* bisa mereka wujudkan melalui partainya. Tetapi lantaran mereka terbiasa bermain politik dan bagi mereka *khilâfah* merupakan komoditas politik yang menarik, sehingga mereka tetap mengampanyekannya untuk meraup dukungan buat diri dan partainya. Politisasi ini lebih mengeras lagi dalam problem penegakan syariat Islam. Padahal, kalau kita mau jujur, para politisi tersebut tidaklah menguasai dan mengerti betul apa yang mereka perjuangkan (syariat Islam). Begitupun partai-partai yang berasaskan Islam. Sebab, apabila diperhatikan lebih seksama, banyak hal dan istilah yang diperjuangkan mereka, termasuk di dalamnya *khilâfah*, syariat Islam dan segala macamnya, di mana sebenarnya betapa kita tidak yakin bahwa orang-orang seperti mereka dapat menguasai rumusan-rumusan tersebut dengan baik.

Artinya, apakah ketika agama dikaitkan dengan politik atau sebaliknya (politisasi agama), yang terjadi adalah pembajakan agama untuk kepentingan politik?

Betul. Politisasi agama, sebagaimana sudah disinggung, menjadi persoalan yang rumit dan berbahaya bagi hak dan kebebasan sipil. Agama, oleh para politisi, hendak dimasukkan dalam berbagai kebijakan publik. Padahal jika mereka – yang mempolitisir agama – mau dengan rendah hati membandingkan bagaimana iklim pemerintahan di negara-negara yang sekular yang justru lebih baik dan masyarakatnya jauh lebih maju ketimbang negara kita ataupun negara-negara Islam lainnya, maka tidaklah perlu bagi mereka mempolitisir agama. Harus diakui, dalam kehidupan kesehariannya, sikap masyarakat yang sekular relatif lebih baik daripada orang Muslim. Karena itu, bila kita mau jujur, berelasi dengan mereka yang tidak pernah memperjuangkan khilâfah ataupun berusaha menerapkan syariat Islam, atau yang kita anggap sebagai sekular, malah jauh lebih menyenangkan. Bahkan, akan lebih bagus jika kita berhubungan dengan orang ateis sekalipun, karena tidak merasa terancam – hak dan kebebasan kita.

> Menurut saya kita tidak perlu takut kehilangan wahyu. Sebab, teknologi ke depan semakin maju, canggih dan selalu akan membantu dan menghadirkan apa yang kita anggap hilang. Bagaimanapun, teknologi tidak pernah berjalan ke belakang, dia selalu lebih maju, sehingga ada kemungkinan suatu saat teknologi bisa mengetahui bentuk-bentuk tulisan al-Quran di masa lalu.

Apabila mengacu kepada sejarah, apakah klaim kalangan Islam politik dengan upaya menghidupkan kembali khilâfah, yang menurut mereka sebagai bentuk dari teokrasi Islam, merupakan keinginan yang

cukup berdasar? Apakah pernah terjadi sistem teokrasi di zaman para Sahabat, dinasti Abbasiyah, Umayyah maupun Turki Utsmaniyah?

Menurut saya tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia Islam bentuk pemerintahan yang teokratis. Sebab, mereka itu monarkhi yang sejatinya sekular. Demikianpun Nabi sendiri, di Madinah, pada dasarnya membuat tatanan masyarakat yang sekular, yang dibangun atas dasar musyawarah (kesepakatan bersama di antara kelompok yang ada). Adalah salah menganggap kepemimpinan Nabi sebagai bentuk teokrasi. Pasalnya, dalam sejarahnya, satu-satunya bangunan umum yang ada pada masa Nabi adalah masjid. Bahkan rumah Nabi juga di situ, di samping masjid. Sehingga semua fungsi-fungsi dan pelayanan publik yang kita kenal sekarang sudah ada pada waktu itu, dengan memakai masjid sebagai pusat segala kegiatan. Termasuk juga masjid berfungsi sebagai penjara. Begitupun, tamu Nabi, yang beragama Nasrani, ketika melakukan kebaktian dipersilakan dilakukan di masjid Nabi. Kenyataan seperti itu tidak mungkin terjadi di zaman sekarang. Hal seperti itu pasti akan memicu keributan. Lalu, kaitannya perihal relasi umat Islam dengan umat lainnya, pada hemat saya, yang benar yaitu mengembangkan sikap inklusif atau toleran sebagaimana dipraktikkan di zaman Nabi, sebagaimana telah diceritakan tadi.

Dengan begitu, apakah Anda hendak mengatakan bahwa sekulerisme justru merupakan solusi untuk mengatasi problem-problem yang ada dalam tubuh umat Islam dan mengantarkan negeri ini menjadi bangsa yang dewasa dalam menegakkan kemerdekaan hak-hak warganya?

Kalau Anda mengatakan sekularisme, maka akan memunculkan kembali polemik yang menimbulkan kesalahpahaman, sebagaimana

pernah terjadi di negeri ini sebelumnya, dalam perdebatan panjang. Karena itu, Nurcholish Madjid tidak menggunakan istilah tersebut, tetapi lebih memilih sekularisasi.

Kalau kita berbicara soal kedekaan suatu bangsa, dalam pelajaran sekolah juga dinyatakan bahwa kemerdekaan merupakan suatu hak. Kemudian, prinsip tersebut oleh umat Islam didukung dengan ayat-ayat al-Quran, Hadits-hadits Nabi, dan segala argumen keagamaan yang menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak milik pertama yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap manusia mempunyai hak untuk bebas dan merdeka.

Sungguhpun demikian, kita kerap dibuat bingung kenapa sampai muncul fatwa (pengharaman MUI atas sekularisme, liberalisme dan pluralisme) yang melarang hak-hak seperti itu. Menurut saya fatwa itu lahir karena kecemasan yang tidak perlu dari kelompok orang-orang yang merasa keyakinan agamanya terancam oleh berbagai paham dan keyakinan lain, juga oleh kuatnya pengaruh pengetahuan dan revolusi teknologi. Dia cemas karena warga masyarakat semakin liberal, semakin bebas, semakin merdeka. Tetapi, ini suatu kecemasan yang berlebihan.

Bagi bangsa Indonesia, hal yang paling menggembi-

Hadis hendaknya dijadikan sebagai bahan untuk menjelaskan semua ayat al-Qur'an. Tidak boleh kebenaran hadis disakralkan dan diletakkan di samping al-Qur'an. Sebab, hal itu, menurut saya, merupakan paradigma yang keliru. Kita semakin jauh dari cita-cita wahyu. Sebagai salah satu contoh, soal anjing di dalam al-Qur'an, kalau tidak salah, hanya satu ayat. Yakni ayat ketika menyampaikan perihal anjing dengan tuannya, pemuda alkahfi (*ashḥâb al-kahf*). Anjing dalam versi al-Qur'an dengan pemuda alkahfi itu dicitrakan positif.

rakan adalah bahwa kita semua telah keluar dari rezim Soeharto. Sebab, reformasi telah memberi ruang bagi kita bebas dan merdeka sebagai umat yang beragama. Itu modal utama bagi kehidupan beragama setiap orang. Sekali lagi saya tekankan: beragama secara merdeka jauh lebih baik ketimbang beragama dengan cara yang dipaksakan. Asumsi tersebut sudah menjadi pandangan yang prinsipil. Sebab, dalam kenyataannya, orang yang memilih kepercayaan dan keyakinan beragamanya secara liberal, bebas dan merdeka, maka dia memiliki kepercayaan itu dengan baik dan dipegang teguh, ketimbang yang dipaksakan. Sebagaimana liberalisme yang muncul di Eropa, yang merupakan respon masyarakat Barat ketika menyadari betapa dominan dan berkuasanya raja-raja dan gereja atas rakyat; begirupun tuan-tuan tanah, majikan-majikan atau pengusaha pemilik modal yang menindas para buruh. Masyarakat menyaksikan ketidakadilan sampai pada batas kemanusiaan yang tidak dapat ditanggungkan lagi. Sampai akhirnya terjadi revolusi Prancis dan revolusi industri di Inggris. Berangkat dari kedua Revolusi inilah kemudian bermunculan aliran filsafat yang disebut paham liberalisme.

Jadi, liberalisme tidak lain antitesa dari tesa-tesa yang mengekang kebebasan masyarakat, suatu keadaan yang tidak baik, di mana manusia tertindas dan dikungkung keliberalannya. Kalau kita memahami betul semangatnya, maka liberalisme bukan satu hal yang perlu ditakuti. Karena liberalisme merupakan satu pandangan yang ingin memperlihatkan posisi manusia yang sesungguhnya, dengan hak dan kebebasannya, dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali manusia harus mempunyai posisi yang merdeka untuk menghindari kehidupan yang sulit dan tertindas. Ba-

gaimanapun juga, apabila seseorang merdeka niscaya bisa melihat banyak pilihan untuk menempuh kehidupannya.

Beberapa kalangan menyebutkan bahwa liberalisme yang sekarang merasuk ke dalam kalangan Islam, seperti gagasan Islam liberal dan demokrasi, dianggap sebagai sesuatu yang sengaja disusupkan, karena terlalu berbau Barat. Menurut Anda apakah anggapan seperti itu cukup beralasan?

Tidak mesti seperti itu. Memang harus diakui bahwa ada pengaruh Barat dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang diselundupkan dari Barat. Sebab, ilmu pengetahuan itu sendiri mempunyai karakter untuk terus berkembang melalui transfer yang tiada henti. Orang-orang mencari ilmu pengetahuan dengan berkunjung ke berbagai tempat, hingga ke negeri-negeri yang jauh sekalipun. Oleh karena itu, orang-orang Islam yang pergi sekolah ke Barat, mereka lantas menerima pengetahuan di sana. Hal tersebut tidak boleh serta-merta mengatakan orang Barat sengaja menyusupkan pengetahuan kepada masyarakat luar Barat. Karena tidak ada ilmuwan yang menyelundupkan, dalam pengertian sebagaimana yang dituduhkan beberapa kalangan konservatif Islam yang tidak suka dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam belakangan. Sebab pada dasarnya semua ilmuwan berniat mentransfer semua yang dia ketahui kepada orang yang belajar dengan dirinya. Tetapi dengan tujuan bahwa apa yang dia ketahui itu, dan lantas mentransferkannya kepada orang lain, adalah sesuatu yang baik dan benar. Dan dia ingin kebenaran dan kebaikan itu dimiliki juga oleh orang yang belajar dengan dirinya. Begitulah kita melihat perkembangan pe-

mikiran Islam kontemporer – dengan menepis kecurigaan yang berlebih terhadap Barat.

Kalau kemudian akibatnya sampai melahirkan gagasan Islam liberal, menurut saya, tidak apa-apa. Karena tanpa orang belajar ke Barat sulit terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di sana, misalnya, orang secara sungguh-sungguh hanya mempelajari al-Quran dengan bahasanya yang rumit. Sedangkan, sejatinya, al-Quran meliputi ayat-ayat yang terdiri dari simbol-simbol dan tanda-tanda. Dengan pengertian lain, tanda-tanda tersebut bukanlah suatu yang final. Oleh karena al-Quran adalah tanda-tanda, maka diperlukan penafsiran yang sungguh-sungguh, dan hanya orang yang mempunyai pengetahuan saja yang bisa menjelaskan tanda-tanda atau ayat-ayat tersebut. Namun demikian penjelasan terhadap al-Quran sebagai ayat, lagi-lagi, bukanlah suatu kesimpulan yang final. Sekalipun orang tidak belajar ke Barat, tetapi dia bersungguh-sungguh dan memiliki banyak pengetahuan yang bukan dari Barat, kemudian dia mengkaji al-Quran, tetap saja ayat-ayat tersebut bisa ditafsirkan. Di sini, studi terhadap ayat-ayat al-Quran sangat memungkinkan terjadinya multitafsir. Satu orang yang ahli bahasa Arab dengan beberapa ahli bahasa Arab lainnya bisa berbeda dalam menerjemahkan atau menafsirakan satu ayat yang sama. Sebab, baik materi yang mereka pakai ataupun bahasa Arab yang mereka miliki mungkin juga berbeda. Selama penafsiran terhadap ayat yang sama itu didasarkan pada pengetahuan bahasa Arab yang ilmiah, maka kita tidak boleh mengatakan di antara salah satunya sebagai keliru, karena dia berdasarkan ilmu pengetahuan. Mungkin saja bahwa di antara mereka ada yang lebih baik atau lebih kuat ketimbang yang satu. Tetapi, bagaimanapun juga, kita bisa mengetahui mana yang lebih kuat dan lebih baik dengan melihat

seberapa serius dan komprehensifnya masing-masing dasar pijakan pengetahuan di antara mereka. Misalnya, yang satu lebih lengkap pengetahuannya sehingga penjelasannya lebih bagus; sementara yang lainnya kurang lengkap pengetahuannya. Akan tetapi dalam menyikapi setiap tafsir terhadap al-Quran kita harus tetap mengacu pada ilmu pengetahuan dengan tidak begitu saja menyalahkan kesimpulan yang telah dibuatnya.

Jika demikian, sebenarnya untuk menjadi liberal adalah potensi yang dimiliki semua orang, tanpa harus pergi belajar ke Barat sekalipun.

Sebenarnya, ayat-ayat al-Quran itu sendiri mempunyai potensi multitafsir. Karena itulah, sejak orang Islam di masa "klasik" belum belajar ke Barat dan menyerap pengetahuan dari sana, mereka sudah berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Itulah yang menjelaskan mengapa kemudian muncul mazhab-mazhab yang berbeda. Imam-imam mazhab tidak belajar ke Barat, di samping pada masa itu tidak ada "Barat" yang kita istilahkan sekarang. Perbedaan di antara mereka, meskipun sama-sama menjelaskan ayat-ayat yang sama pula tetapi mempunyai kesimpulan tafsir yang berbeda, dianggap sebagai hal yang biasa, tanpa menyalahkan dan merendahkan satu sama lainnya.

Jadi, pada dasarnya al-Quran itu sendiri sejak awal potensial untuk dijelaskan secara berbeda. Kesadaran terhadap perbedaan dalam menerjemahkan agama inilah yang justru relevan untuk pemikiran liberal.

Bagaimana Anda menyikapi kemajemukan beragama, terlebih, misalnya sekarang orang bebas menafsirkan dan mempunyai pemahaman terhadap al-Quran secara berbeda, oleh karena latar belakang setiap orang tidak sama? Dalam lingkup yang lebih luas lagi, belakangan, sejak era reformasi, kemerdekaan warga negara Indonesia untuk berpendapat juga berimplikasi pada munculnya beragam aspirasi yang berbeda bahkan kerap bertentangan satu sama lain. Bagaimanapun, Indonesia merupakan negeri yang plural, yang terdiri atas agama, budaya, etnis, suku yang berbeda-beda. Lantas, bagaimana Anda melihat gagasan pluralisme yang diharamkan oleh MUI?

Sudah seharusnya kita mentoleransi keberbagaian realitas, kemajemukan di negeri ini. Kalau kita kembali ke fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan pluralisme, sebenarnya MUI keliru memahami pluralisme. Karena MUI terlalu cepat memberikan kesimpulan bahwa orang yang pluralis akan berpandangan semua agama sama. Jadi, menurut saya, pemahaman MUI seperti itu salah. Sebab pluralisme tidak begitu. Justru orang Pluralis menganggap semua agama berbeda. Penjelasan yang dilakukan MUI terhadap pluralisme tidak berdasarkan ensiklopedi. Orang yang pluralis akan membiarkan dan mentoleransi atau merasa tidak terganggu terhadap setiap hal yang berbeda dan bermacam-macam – apakah itu agama, cara pandang, keyakinan dan sebagainya. Sebab begitulah hendaknya pluralisme dipahami. Meskipun dapat kita jelaskan lebih jauh, terutama di dalam agama-agama, kita bisa menemukan, di dalam perbedaannya, sejatinya terdapat juga suatu persamaan. Misalnya tentang Tuhan, keyakinan kepada kehidupan sesudah mati, anjuran berbuat baik, dan seterusnya, merupakan hal-hal yang esensinya sama di hampir setiap agama, kendati memang banyak

hal-hal lain di antara agama-agama tersebut yang berbeda. Karena itulah agama menjadi plural.

Jadi, pluralisme adalah konsekuensi dari kebebasan beragama atau cara berpikir bebas. Pluralisme atau wujud dari kebebasan untuk berbeda itu sendiri sampai kepada bentuk yang diistilahkan dalam al-Quran, "Jika kamu mau, silakan beriman; dan jika kamu juga mau, silakan kamu kafir". Setidaknya, dari ayat itu, sudah terdapat dua pilihan: ada yang beriman atau ada yang kufur. Keduanya ditawarkan secara bebas oleh al-Quran. Kendatipun pada ayat selanjutnya al-Quran juga menyebutkan risiko dari masing-masing pilihan tersebut. Namun pada prinsipnya, jikalau al-Quran menyebut risiko masing-masingnya, itu berarti al-Quran hendak mengajak kita berpikir lurus. Al-Quran hanya mengenalkan kalau beriman akan demikian; dan kalau kufur akan begini konsekuensinya. Artinya, al-Quran tidak memaksa. Demikianlah, saya kira, apa yang dikatakan al-Quran agar kita berpikir dan menenggang perbedaan.

Banyak sekali ayat-ayat yang meminta kita untuk menggunakan pikiran, meminta kita menggunakan hati nurani dan yang serupa dengan itu semua. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidaklah otomatis kalau menggunakan semua perangkat keilmuan yang baik lantas akan sama kesimpulannya. Misalnya jika kita dengan serius mau memikirkan pernyataan-pernyataan al-Quran seperti: "*afalâ ya'qilûn*; *afalâ ya'lamûn*; *afalâ tatadzakkarûn*; *afalâ tatafakarûn* dan seterusnya, semua itu berarti al-Quran sudah memberikan isyarat bahwa hasil *tafakkur*, akan mengandaikan kesimpulan ketakwaan dan segala macamnya tidak otomastis sama. Terlebih lagi kalau banyak hal yang sedang kita pikirkan, atau lebih jauh lagi kalau kita bisa benar-benar menyadari bahwa dalam menafsirkan: sema-

kin seseorang menggunakan semua perangkat berpikirnya, maka dia akan semakin bebas dan banyak alternatif dalam membaca ayat-ayat Tuhan. Jadi, al-Quran seperti hendak memberi petunjuk bahwa kita akan melihat banyak sekali alternatif atau pilihan dalam kehidupan ini.

Maka jelas kiranya bahwa al-Quran menyuruh kita menggunakan dengan baik dan maksimal akal pikiran kita. Artinya, kita tahu akan ada banyak alternatif kalau pikiran digunakan. Saya sendiri, misalnya, kalau sedang fokus untuk memikirkan satu hal, pasti kemudian banyak hal yang bisa saya lihat dalam pikiran; daripada kalau saya tidak berpikir, sebab pasti tidak ada jalan. Apalagi kalau beberapa orang berpikir dalam tema yang sama, maka sangatlah mungkin akan memiliki berbagai corak pemikiran dan kesimpulan yang berbeda dari satu hal yang sama. Pada tema yang sama mungkin kemudian Anda, misalnya, memiliki empat alternatif, kawan lainnya tiga dan saya lima, sehingga jumlahnya ada dua belas alternatif. Lantas kita diskusikan. Maka kita akan memperoleh perspektif yang sangat kaya.

Sebenarnya telaah ihwal pluralisme harus kita tarik sampai ke situ. Sehingga, menurut hemat saya, semakin seseorang pluralis dan berpandangan liberal, maka hidup ini semakin luas perspektifnya. Tetapi kalau tidak liberal dan pluralis, maka jadi sempit cara pandang seseorang. Dia semakin sulit untuk memilih. Dan, secara teologis, hal itu didukung oleh al-Quran.

Artinya, apakah sebenarnya gagasan sekularisme, liberalisme dan pluralisme sudah terdapat pijakan teologisnya dari al-Quran, sehingga semestinya tidak harus ditentang umat Islam?

Benar, dalam Islam gagasan-gagasan tersebut ada pijakan teologisnya sendiri. Bahkan kita kerap mendengar orang mengatakan bahwa pluralisme diistilahkan sebagai *sunnatullâh*. Tentu saja, jelas bahwa pluralisme sudah merupakan *sunnatullâh*. Yang dimaksud dengan *sunnatullâh* di sini adalah "hukum kehidupan", rumusan alam. Memang sudah demikianlah kehidupan ini dengan ragam perbedaannya. Kalau Anda menghindar dari rumusan alam atau hukum kehidupan yang menghendaki pluralitas, maka Anda akan sulit bisa mencapai hidup yang baik. Karena itu, kita harus mengetahui hukum-hukum kehidupan, sebab itu merupakan hukum sosial. Di masyarakat pasti terdapat orang yang bermacam-macam, tidak sama dengan kita. Kita harus menyadari itu. Kalau kita berpindah, misalnya, di suatu tempat kerja, kita harus memiliki kesadaran yang terbuka di manapun kita ditempatkan nanti. Misalnya dalam satu kompleks, maka harus kita sadari bahwa di situ pasti tidak semua orang sama. Pasti di situ ada orang yang sering tidak setuju dan berseberangan dengan pikiran kita atau ada juga yang mungkin suka dan setuju dengan pikiran kita.

Artinya, hidup ini penuh corak dan warna yang berbeda. Sehingga kalau kita memiliki kesadaran pluralis, maka kita tidak perlu takut untuk menghadapi hidup yang demikian kaya dengan perbedaan. Tidak perlu perbedaan itu selalu diperhadap-hadapkan. Sebab, cara pandang pluralis merupakan hidup yang sesungguhnya, bukan yang bermimpi menyeragamkan cara pemahaman setiap orang. Upaya penyeragaman itu tidak benar. Itu mimpi. Jika cara hidup seseorang seperti itu, maka dia terus bermimpi. Lebih-lebih, lantas dia menghendaki supaya orang lain memahami Islam sebagaimana dengan Islam yang dia pahami. Padahal, di sekitar kita juga banyak orang yang tidak beragama Islam. Kemudian, dia

menganggap mereka yang berbeda dengan dirinya sebagai suatu duri, gangguan yang harus dienyahkan. Menurut saya, itu hidup yang tidak realistis. Bagaimanapun kesempatan untuk mengenyahkan sesuatu tentunya tidak cukup untuk umur dia sendiri. Akibatnya, sepanjang umurnya selalu terganggu dengan apa yang dia anggap sebagai duri. Bukankah akan lebih baik dan realistis jika kita bekerjasama?

Tak dapat dipungkiri, di antara penyebab kalangan fundamentalis sangat eksklusif pandangannya perihal Islam lantaran mereka mendasarkan diri pada ayat-ayat seperti "Inna al-dîna 'inda Allâhi al-islâm" *dan sejenisnya. Bagaimana Anda melihat klaim-klaim seperti ini – kendatipun banyak pemikir moderat yang sebenarnya sangat berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat yang terkait dengan kata "Islam"? Masalahnya, klaim ini sering menjadi alasan para aktivis Islam radikal untuk bertindak bahkan kerap dengan kekerasan – atas nama agama Islam – terhadap agama atau paham yang berbeda.*

Ayat-ayat ini sering menjadi perdebatan yang panjang. Tetapi setidaknya perdebatan perihal makna Islam – dan saya kira juga banyak orang yang telah membacanya – sudah sejak lama keterangan-keterangan semacam itu dijelaskan oleh banyak intelektual Muslim Indonesia. Setidaknya, di antara mereka adalah Cak Nur, Gus Dur, Alwy Shihab, Quraish Shihab, Hasyim Muzadi dan banyak lagi yang tidak mungkin bisa disebut di sini. Apa arti Islam dalam ayat "*Inna al-dîna 'inda Allâhi al-islâm*"? Apabila mengikuti penjelasan orang-orang tersebut, sebagaimana saya pernah ikut membacanya, ayat-ayat itu justru oleh tafsiran mereka menjadi pendasaran sikap inklusif bagi umat Islam, tidak malah menjadi ekslusif. Sebab, Is-

lam yang dimaksud oleh mereka, dalam ayat-ayat tersebut, adalah Islam yang universal. Sebagaimana saya pernah mencari dalam al-Quran, setidaknya terdapat 20 ayat al-Quran yang menyampaikan redaksi tersebut dari akar kata yang sama, meskipun dalam bentuk yang berbeda: *aslama*, *islâm*, *musliman*, *muslimîn*, dan seterusnya. Setidaknya ada 20 ayat yang memberikan pesan kepada kita bahwa ternyata "islam" itu bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi agama yang dibawa oleh semua nabi. Bahkan ada di antaranya, misalnya, ayat yang mengatakan bahwa kaum Hawariun, Sahabat Nabi Isa, meminta disaksikan sebagai Muslimin. Nabi Ibrahim disebut *hanîfan musliman*. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa kata-kata Muslim sudah dilekatkan oleh Tuhan sebelum "engkau" Muhammad. Yakni ketika Tuhan memberikan label kepada orang-orang yang *aslama*, memasrahkan dirinya, sepasrah-pasrahnya kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu namanya "islam", "muslim".

Karena itu, apabila kita berangkat dari penjelasan-penjelesan tersebut, maka ayat-ayat yang disebutkan dalam al-Quran, perihal redaksi "islam", menjadi inklusif. Seorang Kristen yang *aslama* bisa kita katakan sebagai "muslim", demikianpun seorang Hindu, Budha dan seterusnya. Sehingga kita juga bisa mengatakan sebaliknya, di mana seorang yang KTP-nya Muslim, dapat disebut non-Muslim, karena dari sikap dan cara hidupnya yang tidak pasrah kepada Tuhan. Saya kira hal seperti ini perlu dijelaskan lebih jauh sehingga orang benar-benar mengerti. Itu yang kerap saya katakan lebih baik kita fokus menjelaskan al-Quran ketimbang megikuti apa yang dilakukan oleh para *muballigh* (*da'i*) kita yang banyak menyampaikan Hadits-hadits yang belum kita tahu apa benar

Nabi Muhammad memang bertindak demikian dan mengatakan hal-ihwal tersebut.

Karena itu, untuk lebih valid dan bertanggung jawab dalam meletakkan sebuah Hadits, maka setiap saya hendak mengutip Hadits biasanya saya menelpon terlebih dahulu kepada kawan saya, dosen UIN Makassar untuk mengetahui setidaknya bagaimana kualitas Hadits tersebut menurut dia. Biasanya, karena berhati-hatinya, "Tunggulah!", katanya untuk terlebih dahulu mengecek isi dan kualitas Haditsnya. Sebagaimana kita ketahui, Hadits itu begitu banyak, sehingga kita khawatir kalau kita tergesa-gesa menyampaikan dan mengutip suatu Hadits. Memang, Quraish Shihab pernah mengatakan: "Ketimbang orang menggunakan kata-kata hikmah, lebih baik menggunakan Hadits". Tetapi saya kurang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Quraish. Karena saya ingin ketika menyampaikan suatu Hadits, kita benar-benar mendapatkan keyakinan bahwa yang dikatakan oleh Hadits itu memang patut dinisbahkan (dikaitkan dan disandarkan) kepada Rasul. Sebab, banyak sekali kata-kata yang terdapat dalam suatu Hadits dan bisa jadi itu sama sekali bukan penuturan Nabi Muhammad; atau kata-kata tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang Nabi. Maka saya harus bertanya dan meneliti secara lebih selektif pada setiap Hadits. Oleh sebab itulah, menurut saya, lebih baik memakai kata-kata filosofi yang sudah jelas siapa filosof yang hendak kita kutip ketimbang mencomot sana-sini Hadits yang kita tidak mengetahui kualitasnya.

Banyak yang menilai pandangan keagamaan Anda, yang terlampau rasional dan kritis, sebagai pandangan seorang Mu'tazilah.

Seseorang disebut Mu'tazilah kalau orang tersebut meyakini lima prinsip Mu'tazilah secara utuh. Akan tetapi, apakah kalau lima prinsip itu tidak seluruhnya dipegang teguh dan mungkin orang melihatnya hanya mirip-mirip semata, apakah yang seperti itu lantas dapat juga disebut sebagai penganut Mu'tazilah? Sungguhpun demikian, bagi saya, kesalahpahaman banyak orang terhadap saya, tidaklah terlalu mengganggu. Seperti halnya oleh beberapa orang saya sampai dianggap kafir, namun, lagi-lagi, hal tersebut tidaklah mengganggu, karena perasaan dan iman saya tetap sama sebagaimana yang saya yakini. Kendatipun banyak orang mengatakan saya Mu'tazilah atau mengatakan bahwa saya anti-ini, anti-itu dan seterusnya, namun demikian saya netral saja. Dalam hal ini saya juga melihat bahwa tipe dan pemahaman setiap orang berbeda-beda. Karena itu, ketika saya dihubungi seseorang lewat sms, misalnya, dengan tuduhan bermacam-macam terhadap pemikiran Islam saya yang mereka anggap sudah melenceng, saya balas dengan sms juga. Hal ini saya lakukan karena saya hendak mencoba berdialog dengan mereka, walaupun hanya melalui sms.

Wawancara dilakukan di Makassar, 10 Desember 2006

Percakapan dengan

Mohammad Imam Aziz



Mohammad Imam Aziz, Dewan Pendiri Syarikat Islam. Ia juga ikut mendirikan Forum Persaudaraan Umat Beriman (FPUB Yogyakarta), tahun 1998, dan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS Yogyakarta) di mana ia pernah menjadi direkturnya (1996-1998).

Para perumus teologi pembebasan dalam Islam meyakini bahwa realitas harus menjadi sesuatu yang direfleksikan sebagaimana yang diperlihatkan agama pada masa-masa awal kemunculannya. Dalam konsep negara Madinah, Nabi tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk menjadi *platform* bersama. *Platform* yang diambil justru sama sekali sekular. Nabi mencontohkan model masyarakat yang ditata oleh aturan-aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah, tidak oleh doktrin atau hukum agama. Gambaran yang sangat demokratis. Problemnya, praktik demokrasi kita sekarang sama sekali belum memenuhi prasayarat paling utamanya, yaitu semua orang boleh berpendapat, dengan melalui mekanisme prosedural dan substansial sekaligus, juga mencapai rekonsiliasi atas trauma-trauma masa lalu segenap anak bangsa yang belum didamaikan.

Dalam sejarahnya, sekularisme lebih dikenal sebagai pemisahan antara agama dan negara. Akibatnya, peran dan fungsi agama di tengah kehidupan masyarakat kian memudar. Dari sini kemudian muncul berbagai gerakan di mana agama berusaha ditampilkan kembali ke wilayah publik guna merespon persoalan kemanusiaan. Di Amerika Latin bermunculan teologi pembebasan. Di Islam juga sempat muncul gagasan serupa model Ali Syariati, Hasan Hanafi dan Farid Essack. Bagaimana pandangan Anda perihal pasang-surut peran agama dalam kehidupan masyarakat?

Perkembangan teologi pembebasan di dalam Islam tak ubahnya seperti teologi kontemporer yang merumuskan konsep-konsep untuk menanggapi isu-isu riil. Konteks munculnya teologi pembebasan di Amerika Latin sendiri juga dalam rangka menanggapi isu riil: otoritarianisme dan kemiskinan. Permasalahannya, di Indonesia, hampir semua konsep mengenai apapun menjadi lemah. Katakanlah, sebagai contoh, konsep tentang buruh. Konsep buruh di Indonesia tidak seperti buruh di Eropa. Konsep buruh di Eropa tidak terjadi di sini. Demikian juga, konsep "revolusi buruh" tidak pernah terjadi di sini. Teologi pembebasan, di sini, juga menjadi lunak. Orang mengharapkan teologi pembebasan di Indonesia muncul dari Islam, karena kalau dilihat dari praksis, apa yang dialami oleh rakyat Indonesia, tak lain direfleksikan oleh pandangan teologinya. Di Amerika Latin, romo-romo Katolik bisa melakukan radikalisasi rakyat, bahkan mengesahkan penggunaan senjata. Di sini hal seperti itu tidak mungkin terjadi.

Apakah menurut Anda agama pada dasarnya memiliki peran dan fungsi publik untuk selalu mencermati dan merespon isu-isu sosial

seperti problem kemiskinan dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya? Pasalnya, pada sisi lain, ada semacam kekhawatiran bahwa ketika agama dijadikan legitimasi untuk persoalan publik, agama dapat menampilkan wajahnya yang tidak santun, seperti pencabutan hak-hak sipil, pemicu konflik dan sebagainya. Apakah fungsi dan peran agama memang harus dipublikkan?

Itu dua hal yang mungkin bisa dipilah-pilah. Di satu sisi agama mempunyai dimensi privat. Yakni penghayatan orang terhadap agamanya bersifat privat. Dalam diri kita yang sama-sama Islam saja, bisa berbeda-beda dalam penghayatannya. Namun, agama juga mempunyai dimensi publik. Sebab, agama mempunyai perangkat analisis yang multi-interpretasi. Ini juga uniknya kitab suci. Para perumus teologi pembebasan sendiri meyakini bahwa realitas harus menjadi sesuatu yang direfleksikan sebagaimana yang diperlihatkan agama pada masa-masa awal kemunculannya. Islam sendiri dimulai dengan pembebasan orang-orang kelas rendahan yang tertindas, membangkitkan jati diri mereka sehingga memiliki harga diri yang sama dengan orang-orang lain. Agama tidak sekadar dipahami se-

Dalam negara Madinah, Nabi tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk menjadi *platform* bersama. *Platform* yang diambil justru sama sekali sekular. Nabi telah mencontohkan bagaimana satu masyarakat yang ditata oleh aturan-aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah, tidak oleh doktrin atau hukum agama tertentu. Sayangnya kemudian model negara Madinah Nabi itu ditafsirkan oleh umat Islam sekarang sebagai model negara Islam.

bagai sesuatu yang mati. Selain tercakup pada teks, agama juga memiliki sisi historis yang selalu dinamis.

Salah satu kecaman terhadap agama adalah bahwa dia kerap menyebabkan terjadinya konflik. Dalam pandangan Anda sendiri bagaimana menanggapi wajah ganda agama yang di satu sisi bisa diinterpretasikan sebagai ramah sosial, memihak yang lemah dan menghargai yang lain; tetapi pada sisi lain ditafsirkan secara eksklusif – gagasan tentang jihad, memerangi yang dianggap sesat dan kafir, dan seterusnya? Lantas bagaimana Anda menanggapi fenomena munculnya fundamentalisme agama?

Saya melihat bahwa sebetulnya agama, pada awalnya, adalah satu cara berpikir. Yang menjadi problem apakah cara berpikir itu persis seperti yang teks katakan, tanpa interpretasi, atau kita mempunyai pilihan-pilihan atas teks sehingga bisa memilih cara berpikir yang memang sesuai bagi masing-masing konteks penafsir. Sebagaimana dideskripsikan dalam sosiologi pengetahuan, kalau latar belakang saya petani, cara berpikir saya akan secara otomatis juga seperti petani. Maka saya akan melihat al-Quran dengan *desentring*-nya lebih ke petani. Di situlah letak benturan-benturan penafsiran agama terjadi.

Saya tidak percaya bahwa al-Quran, dengan sendirinya, akan dapat membentuk orang. Bagi saya itu lebih sebagai perpaduan antara teks dengan pengalaman seseorang. Kitab suci memang bisa membentuk orang, tetapi pada diri setiap orang tetap mempunyai pilihan. Pemikiran seperti ini, kalau mau dikatakan subyektif, memanglah subyektif – tentunya bukan dalam hal yang bersifat ritual. Melihat begitu banyaknya tafsir al-Quran mengenai fikih dan seba-

gainya, di situ terlihat bahwa orang dibentuk pada situasi di mana dia hidup dan menjadikan teks sebagai pilihan untuk menjalani kehidupannya. Karena itu, fundamentalisme juga berkait erat dengan pilihan orang: apakah dia mau bersikap fundamentalis atau tidak, sebenarnya tergantung pada perkembangan orang tersebut.

Menurut saya, negara Madinah sama sekali bukan model negara Islam, melainkan negara sekular. Negara yang memisahkan antara agama, urusan agama yang dianut oleh masyarakatnya, dengan aturan bersama. Di situ terlihat bahwa yang paling dasar adalah kesepakatan bersama. Begitu kesepakatan dilanggar, terjadilah masalah.

Selama ini banyak pihak memandang Anda sebagai orang yang konsisten mentransformasikan agama secara profetis. Ada sisi emansipatif dari agama yang harus diperjuangkan. Bagaimana cara Anda menerapkan agama pada model penafsiran sosial seperti itu?

Pilihan-pilihan atas sikap beragama itu harus dilihat dari konteksnya. Saya sendiri harus dilihat latar belakangnya kenapa melakukan penafsiran demikian. Rumusan-rumusan sebagaimana yang terdapat dalam penafsiran saya tentang agama yang dikaitkan dengan problem sosial yang ada, sebenarnya semua sudah tersedia di kitab suci sendiri. Yang paling sulit bagi kita adalah bagaimana agar dapat memilih jalannya secara konsisten. Al-Quran sendiri menyebut pilihan jalan itu sebagai *subul,* (*Wa al-ladzîna jâhadû fînâ lanahdiyannahum subulanâ)*. Di situ dikatakan *subul* (bentuk jamak) bukan *sabîl* (tunggal). Artinya agama menyediakan banyak jalan dan pilihan. Bagi orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan menunjukkan banyak jalan. Hal seperti ini, menurut saya,

menarik. Bahwa pilihan sifatnya eksperimental, itu pasti. Karena dalam Islam, kalau orang berijtihad, salah pun tetap berpahala. Tuhan sangat adil. Itu sangat mendewasakan umat. Dalam konteks itulah saya bersikap terhadap fundamentalisme.

Jika agama dalam konteks sosial merupakan interpretasi atau pilihan masing-masing orang, di sinilah negara, dalam hal ini negara modern, harus masuk untuk menjamin bahwa semua pilihan setiap orang akan aman dan dijamin hak-haknya, sehingga mereka dengan leluasa melakukan pilihan-pilihan atas apa yang diyakininya. Menurut Anda hubungan seperti apakah yang harus dibangun antara negara dan agama?

Kalau dasarnya adalah pilihan-pilihan pribadi maka memang harus ada aturan dasar yang disepakati. Dulu, ketika Nabi mempunyai eksperimen negara Madinah, juga terlebih dahulu dilakukan kesepakatan-kesepakatan. Perintah membuat negara Madinah sendiri tidak terdapat dalam al-Quran. Tetapi karena tuntutan sosial politik, Nabi kemudian mempunyai inisiatif untuk membuat model seperti itu, meski mungkin juga tidak membuatnya secara sengaja. Namun prinsip dari negara Madinah model Nabi itu adalah bahwa pluralitas harus dijaga dan harus ada dasar yang disepakati bersama. Dasar-dasar itulah yang harus diambil dan ditaati oleh masyarakat. Salah satu dasarnya adalah apakah agama tertentu dijadikan landasan bersama oleh semua orang atau tafsir atas agama tertentu akan dijadikan pedoman bagi semua orang. Melihat eksperimen Nabi di Madinah, ternyata pilihan itu tidak dilakukan. Memang semua orang memiliki agama sendiri-sendiri, tapi *platform*

bersama yang disepakati adalah bahwa keamanan dan kesejahteraan harus dijaga dan diwujudkan secara bersama-sama.

Dalam negara Madinah, Nabi tidak memaksakan suatu agama tertentu untuk menjadi *platform* bersama. *Platform* yang diambil justru sama sekali sekular. Nabi telah mencontohkan bagaimana satu masyarakat yang ditata oleh aturan-aturan yang disepakati bersama melalui musyawarah, tidak oleh doktrin atau hukum agama tertentu. Sayangnya kemudian model negara Madinah Nabi itu ditafsirkan oleh umat Islam sekarang sebagai model negara Islam.

> Kalau kita menginginkan kebebasan yang sebenarnya, maka cara satu-satunya adalah dengan membiarkan orang lain untuk memiliki kebebasan yang sama.

Menurut saya, negara Madinah sama sekali bukan model negara Islam, melainkan negara sekular. Negara yang memisahkan antara agama, urusan agama yang dianut oleh masyarakatnya, dengan aturan bersama. Di situ terlihat bahwa yang paling dasar adalah kesepakatan bersama. Begitu kesepakatan dilanggar, terjadilah masalah.

Jadi, mari kita kembali kepada dasar agama yang bersifat privat. Bagi saya setiap orang bisa menafsirkan agamanya dengan bermacam-macam. Setiap orang boleh hidup dengan penafsiran sendiri-sendiri. Sungguhpun demikian, pada taraf tertentu masing-masing individu harus taat pada kesepakatan bersama. Kalau sekarang agama-agama memiliki caranya sendiri dalam menerjemahkan bagaimana kesejahteraan ekonomi diperoleh, silakan masing-masing dikedepankan. Akan tetapi tetap harus ada kesepakatan tertentu agar sisi ekonomi itu bisa berjalan untuk semua orang.

Untuk konteks Indonesia, di mana masyarakatnya sangat plural, bagaimana Anda menerjemahkan prinsip-prinsip agama sehingga menjadi konsensus yang adil untuk bersama, tidak terjadi kesepakatan yang sepihak dan terlampau mementingkan yang mayoritas ketimbang mengakomodir minoritas?

Prinsip dasar kesepakatan yang adil untuk semua harus selalu diperjuangkan karena kita berkembang dalam situasi yang mungkin masing-masing kelompok mempunyai posisi yang kuat. Tentu saja, masyarakat Islam, kelompok agama lain, dan kelompok adat pun sama-sama kuat. Mempertemukan kelompok-kelompok itu secara bersamaan memang sangat susah. Di sisi lain, semua orang berhak memperjuangkan pilihannya.

Dalam konteks itu sebetulnya saya menganggap bahwa negara kita belum final. Prinsip-prinsip dasar yang semestinya disepakati masih sangat lemah. Implementasi suatu rumusan bersama dari soal ekonomi, ketahanan-keamanan, pengelolaan kesejahteraan, sampai persoalan politik, memang tidak akan pernah final. Namun yang paling penting semua itu dijamin. Makanya, sekali lagi, bagi saya yang terpenting adalah semua aspirasi harus dijamin sampai yang fundamentalis sekalipun. Oleh karena itu, harus disepakati sejak awal bahwa tidak boleh memperjuangkan semua hal dengan kekerasan. Hal inilah yang selama ini terlewatkan. Bagaimana caranya supaya kita sepakat bahwa siapapun, kalau mau memperjuangkan sesuatu, tidak boleh memakai kekerasan, baik kelompok masyarakat atau negara sekalipun.

Bagaimana jika lewat jalur yang demokratis, seperti membuat partai, mengikuti pemilu, menetapkan perda syariah atau perda Anti-Maksiat,

yang sama sekali tidak dengan kekerasan, namun dalam praktiknya, ketika mereka berkuasa secara politis, kemudian hanya menjadikan nilai-nilainya sendiri sebagai nilai utama dan paling luhur, sehingga nilai-nilai lain, yang berbeda, tidak bisa muncul dan terpinggirkan; lantas bagaimana Anda melihat kecenderungan seperti itu yang tengah menggejala di berbagai daerah?

Persoalannya, kenapa hal tersebut sampai bisa terjadi? Karena kondisi seluruh warga yang ada belum imbang. Demokrasi yang dipakai oleh kita sekarang ini, pada hemat saya, sama sekali belum memenuhi prasayarat paling utamanya, yaitu semua orang boleh berbicara dan berpendapat. Kalau ada seseorang atau kelompok yang mau berjuang lewat partai politik, maka yang lain pun harus diperbolehkan. Sekarang masih sangat banyak elemen atau orang-orang yang tidak boleh berpolitik. Orang-orang yang disebut sosialis, komunis, kalangan masyarakat adat, masih belum mendapatkan tempat dalam partisipasi demokratis. Artinya berjuang lewat demokrasi seperti sekarang ini belum sah sebelum semua orang, pendapat atau aspirasi dalam bentuk apapun diperbolehkan tampil secara adil.

> Menurut saya, orang Islam belum punya hak untuk mengatakan pluralisme sebelum mengakui secara teologis bahwa ada keselamatan di luar masjid.

Bagi saya, kalau sekarang ada yang berjuang lewat perda dan sebagainya, kemenangannya itu sama sekali belum sah. Saya tidak melihat dari sisi hukumnya, tapi dari hak asasi manusianya, di mana pada kenyataannya masih banyak pihak yang direpresi. Pihak yang satu merepresi pihak yang lain, misalnya, lantas yang kuat dan dominan berjuang, sehingga wajar kalau bisa menang.

Seolah-olah sudah melalui mekanisme yang demokratis, padahal sama sekali belum.

Kalau kita melihat beberapa kasus di Eropa, seperti Jerman yang secara kuantitatif telah memiliki nilai demokrasi yang tinggi, tetap melarang munculnya Nazi. Kasusnya agak mirip dengan di Indonesia. Karena trauma akan masa lalu, orang-orang yang disebut sosialis, eks-komunis, dirampas hak politiknya.

Bagi saya, negeri manapun atau pada siapapun kita merujuk untuk mencapai cita-cita demokrasi, bukan menjadi problem utama kita. Sebab, bagaimanapun, berangkat dari konteks yang tengah dihadapi, kita harus tetap berjuang untuk demokrasi yang adil. Demokrasi sekarang ini sama sekali belum adil. Seolah-olah *start*-nya sudah sama, padahal sebelumnya, orang lain disuruh "minggir" terlebih dahulu. Maka sudah dapat dipastikan siapa yang akhirnya akan bisa memenangkan perlombaan itu. Bagi saya itu perbuatan yang sangat licik.

Problem ketidakadilan di Indonesia yang menimpa kalangan minoritas, hampir sudah menjadi sesuatu fenomena yang membudaya dan mengakar lama. Misalnya, karena yang mayoritas di Indonesia adalah Islam, dengan masyarakat yang cukup religius, maka apa yang selama ini diperjuangkan oleh Anda agar masyarakat eks-tapol (tahanan politik) komunis dan keluarganya juga memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya, bagi kebanyakan masyarakat adalah suatu usaha yang sama sekali tidak bisa diterima.

Itu problem akut bangsa ini. Makanya kita juga seharusnya tidak usah mengeluh kalau kemudian muncul fundamentalisme. Karena dalam sejarahnya kita telah melakukan represi yang luar biasa terhadap satu golongan tertentu. Masalah ini, menurut saya, tak ubahnya seperti daur hidup. Kalau salah satunya saja dipotong, maka akan terjadi ketidakseimbangan. Iklim sekarang berubah-ubah secara ekstrem, karena beberapa daur hidupnya telah terpotong. Kita selalu mengeluh kenapa fundamentalisme muncul di Indonesia, sementara tidak pernah mengeluh kenapa yang bersikap kritis tidak boleh muncul juga di Indonesia. Seharusnya semua itu dilihat secara seimbang. Kalau sudah imbang, tinggal bagaimana bersama-sama berjuang dengan cara damai, tidak ada kekerasan.

Sekarang secara umum kita hampir saja menyimpulkan dan menganggap bahwa orang-orang kiri selalu memakai kekerasan dalam perjuangannya. Padahal, sekarang lihat siapakah yang sekarang ini menggunakan kekerasan? Di satu sisi ada kelompok yang menuduh bahwa kelompok "X" telah memakai kekerasan, sementara pada sisi lain kelompok yang menu-

Perintah membuat negara Madinah sendiri tidak terdapat dalam al-Qur'an. Tetapi karena tuntutan sosial politik, Nabi kemudian mempunyai inisiatif untuk membuat model seperti itu, meski mungkin juga tidak membuatnya secara sengaja. Namun prinsip dari negara Madinah model Nabi itu adalah bahwa pluralitas harus dijaga dan harus ada dasar yang disepakati bersama. Dasar-dasar itulah yang harus diambil dan ditaati oleh masyarakat. Salah satu dasarnya adalah apakah agama tertentu dijadikan landasan bersama oleh semua orang atau tafsir atas agama tertentu akan dijadikan pedoman bagi semua orang.

duh tersebut juga melakukan kekerasan dalam menjalankan tujuannya.

Terkait peran dan fungsi negara, dengan segala ketidakoptimalan penegakan hukum, sebagaimana telah Anda utarakan, lantas bagaimana dan dari mana kita memulai agar negara bisa menjamin, melindungi dan memenuhi semua pilihan yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik serta ekonomi, sosial dan budaya agar tumbuh bersama secara adil dan fair?

Apabila kita bertanya negara itu siapa? Maka jawabnya: tentunya "kita semua" juga. Negara itu sistem di mana kita juga termasuk di dalamnya. Rakyat adalah bagian dari negara. Kalau berbicara aparatur negara, baru bisa bermacam-macam. Sungguhpun demikian, sebetulnya bagaimananya corak lembaga-lembaga negara, sangat tergantung pada kita semua. Makanya negara tidak akan pernah final. Kalau menganggap negara sekarang sudah final, itu berbahaya. Karena masih banyak kelompok yang masih belum bisa berbicara.

Seharusnya seluruh elemen masyarakat, baik kelompok adat dan kelompok seperti Kejawen dan sejenisnya di negeri ini, juga mesti ditanya bagaimana menurut pandangan mereka cara mengelola negara, sistem sosial, ekonomi dan sebagainya. Banyak hal yang ternyata baru kita ketahui sekarang, karena memang sejak dulu kita semua tidak pernah ditanya dan diajak untuk berpendapat. Yang dianggap mewakili pendapat paling bagus selama ini hanya orang-orang pintar. Padahal itu saja tidak cukup. Kelompok-kelompok orang yang dianggap "bodoh", orang-orang yang bertapa di gunung-gunung, dukun-dukun, kiai-kiai, orang-orang yang sela-

ma ini tidak pernah diajak berbicara pun seharusnya juga ditanya, dimintai pendapat.

Jika demikian idealnya, apakah bagi Anda sendiri mekanisme pemilu sebagai prasyarat demokrasi prosedural belum mencukupi?

Tentu saja pemilu belum cukup. Karena pemilu hanya memakai partai politik yang sifatnya masih ada pembedaan mayoritas-minoritas. Di situ masih ada ketentuan-ketentuan yang sama sekali belum memenuhi syarat. Apalagi ada larangan-larangan yang kadangkala sudah dianggap sebagai kesepakatan yang pasti dan mengikat. Seharusnya, karena negara belum final, kesepakatan pun harus selalu diperbaharui, jangan mandek di satu titik. Karena ternyata sikap seperti itu bisa menimbulkan efek psikologis seperti munculnya fundamentalisme, pemaksaan sebagian ajaran agama menjadi perda, dan lain-lain. Misalnya dalam kasus tertentu, mengapa yang itu boleh jalan, sementara yang lain tidak? Itu terjadi karena para pemegang otoritas yang bersikap tidak adil.

> Satu hal yang paling penting adalah "rekonsiliasi" nasional. Kita sebagai suatu bangsa sudah tercabik-cabik betul. Sekarang ini kita seolah-olah jalan bersama meski dengan situasi yang saling bermusuhan. Bagi saya, kalau demokrasi masih diartikan seperti itu, sebatas pada proses pemilu, maka hanya akan tercapai pada prosedurnya saja. Padahal demokrasi tidak hanya prosedur, tetapi juga susbtansi.

Masalahnya prosedur yang bisa mempersilakan semua elemen untuk bisa tampil mengeluarkan pendapat dan didengar oleh semua, termasuk institusi negara, hanyalah demokrasi. Sedangkan mekanisme

demokrasi yang dipraktikkan adalah sistem perwakilan. Makanya sangat wajar kalau pada akhirnya tidak semuanya bisa tampil. Kalau kita menghendaki bahwa yang ideal adalah dengan juga menanyakan orang-orang yang di pinggiran, kalangan miskin, tidak terpelajar, yang dirugikan secara materil dan spiritual, tanpa mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin, maka pasti model seperti itu sangat susah. Lantas mekanisme apa yang bisa merangkul semuanya?

Satu hal yang paling penting adalah "rekonsiliasi" nasional. Kita sebagai suatu bangsa sudah tercabik-cabik betul. Sekarang ini kita seolah-olah jalan bersama meski dengan situasi yang saling bermusuhan. Bagi saya, kalau demokrasi masih diartikan seperti itu, sebatas pada proses pemilu, maka hanya akan tercapai pada prosedurnya saja. Padahal demokrasi tidak hanya prosedur, tetapi juga susbtansi. Dulu, kita sudah berbicara banyak bahwa demokrasi prosedural itu tidak cukup. Lantas untuk mencapai demokrasi yang lebih substansial itu dengan cara apa? Untuk hal ini, kita juga sudah pernah mewacanakan konsensus nasional. Konsensus nasional itu sendiri syaratnya adalah terlebih dahulu tercipta rekonsiliasi bersama yang melibatkan semua pihak. Tidak mungkin tercapai konsensus yang ideal kalau dalam tubuh bangsa ini masih penuh dengan permusuhan.

Dalam konteks tersebut, rekonsiliasi artinya semua elemen yang ada saling mengakui bahwa saya telah bersalah, yang lain juga demikian. Kita semua pernah bersalah, tidak selalu benar, dan itu tidak usah dipermasalahkan lagi. Namun yang terpenting, satu hal yang harus dilakukan sekarang, adalah jangan mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lalu itu.

Dulu, di satu pihak, negara tidak adil terhadap wilayah-wilayah tertentu, seperti kasus Aceh, Papua, dan sebagainya. Karena itu harus dibuat catatan bersama yang tegas: negara tidak boleh menganaktirikan daerah lagi. Semua kesalahan, dalam proses rekonsiliasi itu, akan diberi catatan. Semua kesalahan dicatat dan tidak boleh diulangi lagi, termasuk trauma-trauma, pemberontakan-pemberontakan yang pernah dilakukan oleh kelompok-kelompok agama, politik, daerah, dan sebagainya juga diberikan catatan. Kalau sudah begitu maka kesimpulannya, tentu saja, semuanya pernah melakukan kesalahan. Sehingga yang terpenting, sekarang, sekali lagi, tidak boleh mengulangi kembali kesalahan itu. Setelah itu, mari kita merumuskan kesepakatan-kesepakatan baru, tidak sekadar cuap-cuap soal Pancasila dan UUD '45, tetapi juga diisi dengan semangat-semangat baru yang rekonsiliatif. Konsensus haruslah seperti itu. Kita harus memulai lembaran dari awal, karena banyak hal yang belum terselesaikan. Papua dan Aceh sampai sekarang belum sepenuhnya rela menjadi Indonesia, dan kita tidak bisa menutup-nutupinya.

> Agama menyediakan banyak jalan dan pilihan. Bagi orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan menunjukkan banyak jalan. Hal seperti ini, menurut saya, menarik. Bahwa pilihan sifatnya eksperimental, itu pasti. Karena dalam Islam, kalau orang berijtihad, salah pun tetap berpahala. Tuhan sangat adil. Itu sangat mendewasakan umat. Dalam konteks itulah saya bersikap terhadap fundamentalisme.

Apakah rekonsiliasi sebagai alternatif yang Anda dorong untuk negeri ini agar tercipta tatanan yang ideal dapat begitu saja tercapai, sementara di tengah masyarakat masih terekam nyata trauma

mendalam bagi beberapa kelompok yang pernah mengalami konflik? Lantas bagaimana cara yang paling mungkin untuk mengeliminir dan merehabilitasi stigma terhadap kelompok tertentu karena dianggap sebagai sumber trauma bagi sebagian kelompok yang lain?

Jika persoalannya seolah begitu rumit untuk menciptakan rekonsiliasi nasional, maka kita kalkulasikan saja: siapa yang merasa paling bersih di Indonesia ini. Siapa yang merasa tidak pernah melukai yang lain dan tidak pernah membuat trauma di negeri ini? Ada atau tidak, siapa atau kelompok yang mana, partai politik mana (misalnya, partai politik yang baru mungkin belum melakukan kesalahan, meski juga masih bisa ditanya, karena beberapa orang di dalamnya, barangkali, adalah muka-muka lama yang pernah duduk pada partai politik yang lama)?

Jadi, kita harus sama-sama terbuka untuk mengetahui dan memulai semua itu. Yang harus ditekankan di sini, kalkulasi ini sendiri pun tidak bisa hanya berdasar pada klaim. Orang-orang di Aceh, misalnya, dulu trauma kepada TNI dan Brimob, sekarang orang Pasuruan trauma pada Angkatan Laut, dan banyak trauma-trauma lain yang dulu terlihat tidak menjadi trauma. Menata kembali hal-hal seperti itu penting dilakukan sebagai upaya untuk dapat duduk bersama dan memulai kembali konsensus nasional yang sesungguh-sungguhnya. Barulah kita bisa memulai demokrasi lagi.

Demokrasi harus memiliki latar historis. Tidak ada demokrasi yang tidak mempunyai akar. Amerika mempunyai demokrasi, karena dia juga mempunyai latar belakang konflik yang luar biasa besar, perang sipil dan rasisme misalnya, untuk kemudian mewujudkan sistem demokrasi. Eropa juga sebelum demokratis, diwarnai dengan konflik berkepanjangan. Dalam urusan mengatasi panjang

dan beratnya trauma sebagaimana yang menimpa masyarakat Eropa, negara kita masih kalah jauh.

Satu hal yang perlu dicatat dari sejarah mereka adalah sikap mau mengakui. Meski kenyataannya sekarang juga terlihat mulai muncul lagi sikap-sikap pemicu konflik seperti gerakan dari kelompok kanan yang anti-Yahudi atau Kristen Ortodoks. Tetapi hal seperti itu tidak apa-apa, sebab dari situ mereka akan belajar kembali untuk berdemokrasi, demikian seterusnya. Bagi Indonesia, menurut saya, sudah selayaknya kita harus kembali memperbaharui komitmen berbangsa. Oleh karenanya, semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin harus cepat pula penyelesaiannya, jangan ditunda-tunda, apalagi diwariskan ke generasi selanjutnya.

Apakah salah satu upaya untuk mewujudkan demokrasi yang ideal kita mesti melakukan perubahan pada konstitusi dan dasar negara kita?

Bisa saja hal tersebut dilakukan. Tetapi persyaratannya semua kelompok harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berbicara. Tidak seperti sekarang ini, tiba-tiba DPR membuat Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi, seolah-olah yang dilakukan sudah demokratis, ternyata di sebelah sana masih banyak yang bilang tidak sepakat. Artinya, demokrasi sebenarnya belum seutuhnya dijalankan. Perda syariah, misalnya, meski telah melalui demokrasi prosedural dengan digodok terlebih dahulu pada tingkat legislatif sebelum menjadi keputusan eksekutif, tidak menjamin hidup kita sebagai bangsa menjadi lebih baik.

Kita harus bertanya secara kritis mengenai hal itu secara terus-menerus. Lebih baik sedikit undang-undang tapi bisa memberi

semua orang kebebasan dan rasa aman, daripada banyak undang-undang namun membuat bangsa menjadi terpecah-belah.

Kita semua menyadari bahwa Indonesia sangat majemuk, ada beragam bahasa, agama, suku, dan lain-lain. Kalau kita tengok sedikit ke belakang, ketika MUI mengharamkan pluralisme dengan alasan bahwa pluralisme cenderung mengarah kepada sinkretisme, penyamaan semua kebenaran agama – di samping oleh beberapa kalangan pluralisme juga dipandang merelatifkan semua kebenaran agama, lantas bagaimana Anda memahami pluralisme?

Bagaimanapun, sudut pandang yang dipakai oleh MUI dengan kita memang berbeda. MUI masih melihat bahwa Islam itu seperti entitas tunggal yang melingkupi semuanya. Cara pandang ini sendiri, bagi saya, merupakan bakat-bakat totalitarianisme Islam. *Husnuzhzhann*-nya bahwa yang dikritik oleh MUI adalah soal "isme"-nya. Kendati keyakinan terhadap pluralisme, seperti dalam definisi mereka, tetap tidak boleh ditolerir. Sebab, fatwa tersebut berusaha untuk menciptakan tidak adanya perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan.

Dalam tingkat tertentu, pemahaman kita tentang konsep Indonesia juga sebenarnya masih demikian. Kita bilang bahwa Indonesia itu plural, padahal sebenarnya yang dipikirkan cuma satu.

Semangat totaliatarianisme sebenarnya masih tetap ada pada diri bangsa Indonesia. Bagi saya, menganggap realitas sebagai satu, itu tidak bisa. Masalahnya, terkadang kita sendiri tidak konsekuen dengan jargon pluralitas yang kita ketahui. Semangat kita plural, namun pada praktiknya tetap mengakui ketunggalan. Meski semboyannya *Bhinneka tunggal ika*, tetap saja hanya mengakui ketung-

galan. MUI menganggap pluralitas itu tidak ada, sementara, di sisi lain, kita mengakui pluralitas namun, dalam praktiknya, sekaligus juga kerap tidak mengakuinya.

Benar, pandangan monis dalam berbagai aspek kehidupan kerap tidak sadar kita amalkan. Inilah sebab utama yang mudah menyeret masyarakat ke dalam paham-paham dan tindakan yang totaliter, mereduksikan yang majemuk menjadi tunggal. Dalam agama dikenal monoreligius. Sebagai contoh, setiap agama memiliki konsep salvation, keselamatan. Artinya setiap agama memiliki klaim keselamatan dan kebenarannya masing-masing dengan – jika diekstremkan – menganggap yang lain sebagai salah dan sesat. Pendeknya, sulit menghargai keragaman kebenaran dalam beragama. Dalam Islam misalnya, pluralisme diharamkan karena keselamatan hanya ada pada Islam. Pluralisme yang beranggapan bahwa semua agama memiliki kebenarannya masing-masing, menurut kalangan yang menentangnya, hanya akan mengakibatkan lemah atau bahkan tercabutnya iman umat. Bagaimana Anda memahami konsep keselamatan dan apa implikasinya terhadap pluralisme?

MUI sudah secara jujur berbicara seperti itu. Mungkin, sebenarnya, dalam hati kita juga ingin mengatakan bahwa keselamatan hanya ada pada Islam. Sementara, bedanya dengan Katolik, agama tersebut mengakui bahwa keselamatan terdapat di luar gereja. Menurut saya, orang Islam belum punya hak untuk mengatakan pluralisme sebelum mengakui secara teologis bahwa ada keselamatan di luar masjid. Saya melihat, dalam hal itu MUI benar, karena memang tuntutan teologisnya masih seperti itu. Sekarang siapa

yang berani mengatakan bahwa keselamatan itu ada di luar Islam juga, dengan jaminan teologis yang ada dalam al-Quran?

Kalau terjemahan MUI sudah secara tegas seperti itu, bagaimana tafsir Anda terhadap pluralisme dalam Islam?

Sepanjang pengetahuan saya terhadap al-Quran, landasan teologis pluralisme memang tidak ada.

Doktrin al-Quran yang menegaskan bahwa orang yang di luar Islam jika berbuat baik dan beramal saleh maka kebaikannya juga akan dicatat, diberi pahala, dan akan dibalas dengan rahmat yang sama, bagi beberapa orang ayat itu menjadi legitimasi teologis dari pluralisme dalam Islam. Bagaimana menurut Anda sendiri?

Tetapi, bagaimanapun juga, versi terakhir dari tafsiran ayat itu juga tidak diakui. Artinya MUI telah jujur mengatakan bahwa dalam arti itulah kebenaran yang diyakini Islam, dan sampai sekarang belum ada pihak yang mendeklarasikan bahwa ada keselamatan di luar Islam.

Padahal kalau kita kembali ke ayat-ayat yang lebih awal, sebetulnya Islam itu longgar saja. Sayang di bagian akhir, dengan turunnya ayat seperti "*inna al-dîna 'inda Allâhi al-islâm*", keyakinan awal itu dianggap selesai semua. Itulah yang dipegang MUI. Saya yakin bahwa banyak pendapat yang berhenti dan diam di situ. Ayat itu sendiri sebenarnya masih banyak diperdebatakan. Perdebatan yang muncul seperti tentang kata islam dalam ayat itu. Apakah islam di situ dalam arti agama dengan huruf "I" besar, atau islam dalam arti bukan lembaga, melainkan perilaku amal saleh sebagai

bentuk kepasrahan atau ketundukan terhadap Tuhan, *mashlaḥah*? Bagaimana meletakkan Islam dalam arti luas dan *dîen* dalam arti luas juga?

Jadi harus bagaimana agar orang Islam dapat menghargai dan mengakui pluralitas?

Saya kira problemnya lebih kepada kebenaran teologis. Dalam Islam dikenal ada yang *jumhûr* (pendapat mayoritas) dan yang *syadzdz* (pendapat minoritas). Kalau Anda mempunyai pendapat bahwa ada kebenaran dan keselamatan di luar Islam, itu bukan pendapat *jumhûr*.

Apakah gagasan seperti live-in (duduk bersama-sama dengan orang dari agama, kepercayaan, dan adat yang berbeda sehingga bisa saling menyelami kebenaran di luar yang dimiliki agama masing-masing) sebagaimana pernah dipraktikkan sejak Mukti Ali menjabat Menteri Agama (dengan Djohan Effendi sebagai pelaksananya), masih diperlukan untuk saat-saat ini?

Saya tidak tahu juga urgensi program itu untuk masa sekarang. Soal itu, MUI mempunyai aturan-aturan tertentu. Hal-hal yang bersifat *mu'âmalah* silakan saja untuk bertemu, namun masalah *'ubûdiyah* dan teologis tidak bisa dikompromikan. Yang belum ditegaskan di dalam pemahaman Islam versi MUI adalah kebebasan manusia untuk beragama dan berkeyakinan. Meskipun Islam beranggapan mempunyai keselamatan sendiri, seharusnya Islam membiarkan orang lain menjalankan agama dan keyakinannya mereka masing-masing, seperti halnya kebebasan tersebut kita,

umat Islam, miliki. Tidak perlu mendeklarasikan dulu bahwa di luar Islam juga terdapat keselamatan, nanti malah akan runyam, karena ketidaksiapan kita sendiri.

Tetapi, misalnya, karena dalam Islam ada konsep islamisasi dan di Kristen juga ada kristenisasi, kalau tidak pernah duduk bareng, yang akan muncul antara keduanya selalu rasa saling curiga.

Problem ini sangat terkait dengan banyak hal. Namun tetap paradoks yang ada di dalamnya sangat banyak. Saya sendiri merasa malu untuk mengatakan bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Kita bilang bahwa kita plural, tetapi pada saat yang sama kita juga membiarkan orang Islam melakukan sesuatu yang memalukan. Ternyata yang mendapat dana korupsi itu (dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan, DKP), misalnya, orang-orang Islam juga. Artinya kita tidak bisa konsekuen. Sayangnya ada saja kelompok kita (Islam) yang menggunakan model ini tidak untuk refleksi, melainkan politisasi dan pemaksaan kehendak. Inilah yang masih perlu membutuhkan banyak perjuangan.

Sebagaimana kita mafhum dengan apa yang selama ini Anda tempuh, di luar strategi teologis yang memang sangat susah dicarikan pendasarannya dalam Islam: bagaimanakah strategi menyebarkan nilai-nilai profetis dan emansipatoris agama dalam konteks sosial, di wilayah publik? Langkah apa yang harus dilakukan agar umat beragama dapat saling memahami satu sama lain sehingga bisa saling menerima, duduk bersama dan dapat hidup secara damai?

Yang paling penting, menurut saya, adalah menjaga kebebasan. Setiap orang mempunyai hak yang sama. Kalau ada seseorang atau kelompok yang mengganggu orang atau kelompok lain, maka kita harus ikut membela pihak yang diganggu itu. Kita harus mencegah munculnya tekanan atau tindak represi satu kelompok terhadap kelompok lainnya, agar tidak terjadi desktruksi. Itu syarat minimalnya.

Tetapi, kalau kita menginginkan kebebasan yang sebenarnya, maka cara satu-satunya adalah dengan membiarkan orang lain untuk memiliki kebebasan yang sama. Menjaga hal seperti itulah yang masih susah bagi masyarakat kita.

Wawancara dilakukan di Yogyakata, 07 Juni 2007

Percakapan dengan

Muhammad Tholhah Hasan



Muhammad Tholhah Hasan, mantan Menteri Agama Republik Indonesia Kabinet Persatuan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid dan pernah dua periode menjadi Rektor Universitas Malang (Unisma). Kini ia menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia.

Jangan biarkan "fikihisme" dan politik ideologi keislaman berkolaborasi. Bagaimanapun, kemestian bagi kalangan *mainstream* (umat Islam) hidup di tengah bangsa yang plural adalah mengedepankan dialog persuasif. Lantaran nilai-nilai substansial Islam telah mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dibutuhkan kerendahan hati untuk tidak memaksakan nilai-nilai partikular agama masuk dalam legislasi; pun tidak berpikir skripturalis, melainkan substansialis. Karena itu kemaslahatan umum menjadi dasar pertimbangan untuk menetapkan setiap aturan publik: memberdayakan agama; memompa semangat menyejahterakan masyarakat. Sementara, pemerintah berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan.

Sekularisme di Indonesia seringkali dipersepsi negatif, ia dicurigai meminggirkan peran agama di ruang publik. Bahkan pendapat yang lebih ekstrem mengatakan bahwa sekularisme anti-agama. Anda sendiri bagaimana memaknai sekularisme?

Menurut saya bangsa kita cenderung mengambil term dari Barat secara tekstual dan memaksakannya diterapkan di tengah masyarakat. Padahal, bisa jadi, itu belum tentu tepat. Contohnya term sekularisme. Sebagai sebuah gagasan, sekularisme sejatinya fenomena sosial yang dinamis dan tidak pernah berhenti di satu titik. Sekularisme yang kini berkembang di berbagai negara, berbeda dengan gagasannya yang pertama kali muncul di Inggris. Sama halnya dengan term demokrasi yang lahir di Prancis. Bagaimanapun demokrasi yang kini berkembang di dunia pun berbeda dengan yang pertama kali muncul di Prancis. Dulu tak terbayangkan akan muncul demokrasi terpimpin, demokrasi kerakyatan, demokrasi Pancasila dan sebagainya. Ini terjadi karena fenomena sosial selalu mengalami dinamika. Celakanya, kita kerapkali memahami fenomena tersebut sama seperti awal munculnya.

Sekularisme merupakan gerakan yang berusaha menghilangkan dominasi gereja terhadap negara. Sebagai istilah, sekularisme pertama kali dimunculkan oleh penulis Inggris George Holoyake pada tahun 1846. Tetapi praktik sekularisme sendiri sudah berlangsung lama ketika masyarakat Eropa gerah dengan kekuasaan gereja yang sangat absolut. Sementara negara (pemerintah) sangat lemah. Kondisi inilah yang kemudia melahirkan gagasan filosofis sekularisme, yaitu agar gereja dipisahkan dari urusan duniawi yang profan – termasuk urusan-urusan politik. Revolusi filsafat tersebut ternyata berhasil. Akhirnya, gereja dipisahkan dari masalah-masalah

politik. Gereja hanya diberi wewenang mengurusi masalah agama yang menyangkut urusan privat. Sedangkan masalah yang terkait dengan urusan publik, seperti negara, tidak menjadi kewenangan gereja. Negara harus dipisahkan dari gereja. Dalam literatur bahasa Arab, hal itu disebut pemisahan *(al-tafrîq)* antara agama *(al-dîn)* dan negara *(al-dawlah)*. Masalah sekularisme, lalu menjadi isu menarik selama berabad-abad.

Namun, berbeda dengan gagasan awal di atas, kini negara-negara yang berpaham sekular seperti Amerika Serikat pun ternyata masih mengurusi masalah agama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meski masyarakat Amerika sekular, nilai-nilai dasarnya tidak dapat dilepaskan dari protestantisme. Sistem pemerintahan sekular ternyata tidak dapat menggusur agama (Protestan) dari masyarakat. Bahkan, tak hanya Protestan, agama-agama lain pun, termasuk Islam, bisa tumbuh di sana. Tak dapat dipungkiri, kekuatan agama sangat mempengaruhi politik Amerika Serikat. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sekularisme tidak dapat memisahkan secara tegas antara agama dan negara. Pada akhirnya, gagasan pemisahan agama dan negara hanyalah wacana.

Sekularisme yang kini diterapkan di Indonesia adalah sekularisme kontekstual. Yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia. Sekularisme Indonesia dan Malaysia bahkan dipuji oleh sejumlah ahli sebagai *prototype* sebuah bangsa berpenduduk Muslim yang menerapkan sistem kenegaraan sekular.

Lantas bagaimanakah perkembangan sekularisme di dunia Islam sendiri?

Kalau kita memperhatikan perdebatan yang terjadi di dunia Islam, kini banyak sekali

kajian tentang sekularisme. Sejauh ini, perdebatan tersebut terbelah ke dalam tiga kelompok. *Pertama,* kelompok *al-tawḥîd bayn al-dîn wa al-dawlah*. Bagi kelompok ini, agama dan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Gagasan ini banyak dikemukakan oleh tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin seperti Sayyid Quthb. Di Pakistan, gagasan ini disampaikan oleh Abul A'la al-Maududi. Sementara di Indonesia, disuarakan oleh banyak kelompok, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kedua, kelompok *al-tafrîq bayn al-dîn wa al-dawlah.* Kelompok ini menganggap agama *(al-dîn)* sebagai entitas yang harus dipisahkan *(tafrîq)* dari negara *(al-dawlah)*. Keislaman sama sekali tidak menyangkut masalah negara atau politik. Islam hanyalah agama. Tokoh yang menyampaikan gagasan tersebut diantaranya Ali Abdul Raziq dan Thaha Husain.

Ketiga, kelompok *al-tamyîz bayn al-dîn wa al-dawlah.* Kelompok ini mengatakan bahwa urusan agama harus dibedakan *(tamyîz)* dari urusan negara. Meski ada hubungan antara agama dan negara, tapi ada urusan-urusan yang bukan bagian dari agama dan juga bukan bagian dari negara. Gagasan ini baru belakangan muncul. Para pemikir yang mengemukakannya yaitu Abdul Hamid Mutawalli dan Muhammad Imarah. Kini, tiga kelompok pemikiran tersebut saling berpacu merebut pengaruh. Dalam praktiknya, gagasan kelompok yang terakhir *(al-tamyîz bayn al-dîn wa al-dawlah)* merupakan yang paling banyak dianut di berbagai negara. Contohnya di Indonesia. Indonesia, dari segi sistem kenegaraannya adalah negara sekular, tapi masyarakatnya Muslim. Negara Indonesia sekular tetapi memiliki Departemen Agama. Fenomena semacam ini dulu tidak pernah terbayangkan. Jika konsisten menerapkan sekularisme, mestinya negara tidak lagi mengurusi agama.

Sejak awal, Indonesia dengan jelas mengatakan dirinya bukan negara agama, meski ia juga tak dapat dianggap sebagai negara sekular. Lantas, kesadaran seperti apakah yang melatarbelakangi dibentuknya Departemen Agama? Untuk kepentingan apa lembaga itu dibentuk?

Kita harus memahami, tujuan awal didirikannya negara ini tidak terlepas dari kewajiban melayani kepentingan rakyat. Salah satu kepentingan rakyat adalah masalah yang terkait dengan kehidupan beragama. Kalau negara tidak bisa melayani kehidupan beragama rakyatnya, berarti negara tidak bisa melayani bagian-bagian yang dianggap sangat sensitif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

> Saya temasuk orang yang tidak mau memaksakan semua ajaran Islam dimasukkan ke dalam legislasi negara. Bagi saya, hukum Islam yang perlu masuk ke dalam legislasi negara yaitu hukum-hukum yang menyangkut tata kehidupan masyarakat yang dianggap pokok seperti hukum perkawinan, haji, dan sebagainya. Tidak semua hukum Islam harus dilegislasikan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam secara substansial mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karena itu, mayoritas pendiri bangsa ini menyatakan, meskipun Indonesia tidak berdasarkan agama, tapi negara harus memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan beragama. Atas dasar itu, disepakatilah Departemen Agama yang secara khusus mengurusi masalah-masalah agama.

Apakah tidak ada kekhawatiran bahwa hal itu justru akan mengubah Indonesia menjadi negara agama? Sebab, ketika pernah terlon-

tar isu pembubaran Departemen Agama dari Presiden Abdurrahman Wahid, pada waktu itu, justru muncul reaksi balik yang menuntut pemerintah untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Bagaimana menurut Anda?

Saya kira itu wacana politik yang tidak mengakar kuat di masyarakat. Memang, sejak awal hingga saat ini, ada beberapa kelompok terpelajar yang tidak tertarik dengan Departemen Agama. Bahkan, sejak perumusan Undang-Undang Dasar 1945, kelompok itu sudah muncul. Mereka tidak menyetujui campur tangan negara dalam urusan agama. Yang mereka inginkan adalah agar Indonesia menerapkan sekularisme secara murni, agama dan negara harus dipisahkan secara tegas. Tapi, kenyataannya, sekularisme yang kini diterapkan di Indonesia adalah sekularisme kontekstual. Sekularisme yang telah disesuaikan dengan kondisi lokal masyarakat Indonesia. Sama halnya dengan Malaysia (meskipun di Malaysia Islam diakui sebagai agama resmi pemerintah). Sekularisme Indonesia dan Malaysia bahkan dipuji oleh sejumlah ahli seperti Manning Nash dalam *Islamic Resurgence in Malaysia and Indonesia* (1991) sebagai *prototype* sebuah bangsa berpenduduk Muslim yang menerapkan sistem kenegaraan sekular.

Menurut Anda, mengapa hingga kini masih ada kelompok yang menginginkan agar Indonesia menjadi negara Islam? Apakah Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi negara ini belum cukup mengakomodir kalangan Islam?

Saya kira itu terjadi karena mereka menginginkan adanya penyatuan antara agama dan negara. Mereka tidak akan puas kalau

negara ini tidak menerapkan legislasi keislaman. Kelompok ini mengartikan Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara skriptural. Padahal, mestinya Islam tidak ditafsirkan seperti itu saja. Karena nyatanya, nilai-nilai Islam telah terserap dan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mestinya kita tidak berpikir skriptualis. Berpikirlah secara substansialis. Saya kira para *founding fathers* negara ini yang Muslim telah memberikan contoh begitu baik. Sebagaimana dikatakan Andre Feilard, pemimpin-pemimpin Islam pada awal kemerdekaan lebih memilih memasukkan nilai-nilai Islam dari pada simbol-simbol formalnya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa mereka sangatlah substansialis.

Ketika kita hidup di tengah bangsa yang plural, mestinya kita lebih banyak menggunakan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Sementara nilai-nilai yang patrikular sebaiknya digunakan untuk kepentingan internal umat Islam. Persoalannya, terkadang sebagian dari kita memaksakan nilai-nilai partikular ke ranah publik yang mestinya diatur menggunakan nilai-nilai universal. Inilah yang akhirnya menyebabkan konflik antarumat beragama.

Jose Casanova juga menawarkan agar agama, melalui spiritnya, tampil di ruang publik. Persoalannya, di Indonesia, ketika agama tampil di ruang publik, seringkali yang muncul hanyalah aspek formalnya, contohnya perda syariah. Meski diinginkan sebagian masyarakat, perda syariah merugikan banyak pihak dan bertentangan dengan konstitusi. Apakah Perda yang merugikan tersebut dapat dibatalkan demi konstitusi?

Menurut saya setiap tindakan umumnya merupakan reaksi dari tindakan sebelumnya. Tindakan yang ekstrem biasanya akan memicu reaksi yang ekstrem pula. Sekularisme merupakan reaksi dari realitas kehidupan politik sebelumnya. Tapi, seiring berjalannya waktu, hal-hal yang ekstrem juga akan mengalami *cooling down.* Sehingga kehidupan bangsa akan menemukan kejernihan-kejernihan baru. Dalam konteks sekularisme, ternyata keberadaan agama di tengah masyarakat tidak mencederai proses konsolidasi menuju negara demokratis. Proses ini berjalan dinamis. Kita akan mencari bentuk-bentuk baru yang lebih ideal. Suatu saat nanti, mungkin masih ada cara-cara baru untuk melakukan pendekatan yang lebih ideal.

Saya termasuk orang yang tidak mau memaksakan semua ajaran Islam dimasukkan ke dalam legislasi negara. Bagi saya, hukum Islam yang perlu masuk ke dalam legislasi negara yaitu hukum-hukum yang menyangkut tata kehidupan masyarakat yang dianggap pokok, seperti hukum perkawinan, haji dan sebagainya. Tidak semua hukum Islam harus dilegislasikan. Yang lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai Islam secara substansial mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita harus menyadari, tidak semua nilai agama bersifat universal. Sebaliknya, tidak semua nilai-nilai agama bersifat partikular. Setiap agama memiliki nilai-nilai universal dan partikular. Ketika kita hidup di tengah bangsa yang plural, mestinya kita lebih banyak menggunakan nilai-nilai agama yang bersifat universal. Sementara nilai-nilai yang patrikular sebaiknya digunakan untuk kepentingan internal umat Islam. Persoalannya, terkadang sebagian dari kita memaksakan nilai-nilai partikular ke ranah publik yang mestinya diatur menggunakan nilai-nilai universal. Inilah yang

akhirnya menyebabkan konflik antarumat beragama. Sebaliknya, kita juga tidak bisa memaksakan agar nilai-nilai universal semata yang dipakai, sebab setiap agama memiliki nilai-nilai partikular. Kita tidak mungkin memaksa semua orang untuk *zuhud*, karena konsep zuhud berbeda-beda di setiap agama. Tapi, kalau kita mengajak masyarakat bergotong-royong memberantas kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), saya kira semua bisa menerimanya.

Reaksinya akan berbeda jika yang dikedepankan adalah nilai-nilai partikular. Contohnya, di bulan Ramadhan ketika umat Islam berpuasa, kita melarang semua orang makan siang. Orang non-Muslim tidak akan sepakat. Karena mereka tidak berpuasa. Kita tidak bisa memaksakan begitu saja. Sebaliknya, agama lain pun tidak bisa memaksakan nilai partikularnya kepada kita. Misalnya, pada waktu Nyepi, umat Hindu memaksa semua orang harus mematikan lampunya. Itu tidak mungkin. Karena ada umat lain. Hal-hal seperti itu, jika tidak ditoleransi akan menyebabkan konflik.

> Kita kehilangan pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama.

Menurut Anda bagaimana seharusnya negara menyikapi munculnya berbagai tuntutan dari masyarakat, termasuk tuntutan formalisasi syariat Islam?

Saya kira setiap negara memiliki pertimbangan berbeda dalam menyikapi berbagai tuntutan yang mengemuka di tengah masyarakat. Biasanya, negara cenderung memberikan pelayanan yang lebih banyak kepada pemeluk agama mayoritas. Demikian juga Indonesa. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim, sudah selayaknya pemerintah memberikan pelayanan lebih banyak kepada umat Islam dibanding non-Muslim (asas proporsional). Di samping itu, dalam memenuhi tuntutan dari masyarakat, pemerintah juga akan menimbang risikonya. Pemerintah akan mempertimbangkan, apakah ketika mengakomodir tuntutan tertentu akan menjamin stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat. Saya kira pemerintah tidak akan mengakomodir tuntutan formalisasi syariat Islam jika itu justru akan merugikan non-Muslim. Tapi, pemerintah pun tidak akan mengabulkan tuntutan pembubaran Departemen Agama, yang justru akan mengancam stabilitas negara.

Di atas itu semua, yang sesungguhnya lebih penting adalah bagaimana negara dapat bersikap adil kepada semua warga negara yang wajib dilayaninya. Ini yang justru kerap kali dilupakan. Karena dorongan untuk memenuhi rasa keadilan itulah, di daerah berpenduduk mayoritas Muslim, pemerintah akan memberikan pelayanan lebih banyak kepada mereka. Tapi, karena kita tinggal di daerah mayoritas Muslim, kita melihat seolah-olah Islam terlalu dominan dan menekan kelompok lain. Padahal, hal sebaliknya akan kita rasakan kalau kita berada di daerah minoritas Muslim. Kalau kita ke Bali, kita akan merasakan betapa sulitnya mengubur anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Contoh ini menunjukkan bahwa setiap mayoritas selalu menghendaki agar mendapat jatah pelayanan yang lebih besar dibandingkan minoritas.

Liberalisme juga memiliki citra sangat buruk di Indonesia. Bahkan MUI secara paket mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, karena dikhawatirkan membuat keimanan umat Islam luntur. Bagaimana Anda menilai fatwa MUI tersebut?

Menurut saya, itu terjadi karena MUI hanya menggunakan pendekatan fikih yang cenderung formalistik dan hitam-putih. Dengan pendekatan tersebut, saya tidak heran jika hasilnya liberalisme, pluralisme dan sekularisme diharamkan. Kita harus menyadari bahwa mengeluarkan fatwa merupakan bagian dari tugas MUI. Fenomena liberalisme dan sikap tradisionalisme MUI sebenarnya merupakan refleksi dari kondisi pemikiran Islam masa kini. Paling tidak, kini terdapat empat kelompok Islam yang masih eksis di berbagai negara berpenduduk Muslim. *Pertama,* kelompok tradisionalis. Mereka merupakan kelompok yang terbesar di semua negara Muslim. Meskipun pengertian tradisionalis tidak selalu sama di setiap negara, tapi secara umum mereka masih terikat atau dipengaruhi budaya lokal.

Pemerintah seharusnya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan. Kelompok *mainstream* mestinya dapat berdialog secara persuasif dan tidak mengandalkan kekerasan.

Kedua, kelompok revivalis. Kelompok ini terdiri dari mereka yang tidak puas dengan model kehidupan Muslim tradisionalis. Mereka menganggap ajaran Islam yang dipraktikkan kelompok tradisionalis sudah tidak suci. Mereka ingin membangkitkan kembali Islam seperti pada zaman Rasulullah dengan cara pemurnian.

Tapi, praktik pemurnian ini sendiri, alih-alih berujung pada islamisasi malah menjadi arabisasi. Sehingga, terkadang kita sulit memisahkan antara masalah agama dan budaya. Keduanya menjadi tidak jelas. Semuanya harus mengikuti Arab. Hingga pakaian pun harus seperti Arab. Lucunya, anak-anak kecil yang masih sekolah di Taman Kanak-kanak (TK) pun diharuskan mengenakan jilbab. Padahal, di Arab Saudi sendiri tidak ada anak TK yang memakai jilbab. Gerakan revivalisme juga muncul di berbagai negara Islam dalam bentuk aliran-aliran yang disebut fundamentalisme, wahhabisme dan sebagainya.

Ketiga, kelompok modernis. Mereka berpendapat bahwa tidak semua hal harus dikembangkan berdasarkan teks-teks keagamaan. Bisa juga menggunakan budaya. Mereka menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka berkeyakinan, tidak semua persoalan kehidupan diatur dalam teks-teks keagamaan. Karena itu, kita tidak bisa bersandar hanya pada teks-teks keagamaan semata.

Seiring berjalannya waktu, muncullah kelompok yang *keempat,* yaitu kelompok liberalis. Mereka kerap menggunakan paradigma baru dalam memahami agama. Menurut mereka, beragama yang benar adalah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan perkembangan yang terkini. Lalu, mereka lebih berani menafsirkan idiom-idiom agama sesuai dengan kebutuhannya. Kelompok inilah yang dipersoalkan MUI. Terkait hal ini, saya pernah berdiskusi dengan Nasr Hamid Abu Zayd dan Hasan Hanafi.

Perkembangan pemikiran liberal di Indonesia, mendapatkan reaksi balik dari kalangan fundamentalis. Reaksi mereka bahkan berlebih-

an, sehingga memaksa Depag mencekal Nasr Hamid Abu Zayd di Indonesia beberapa waktu lalu. Apa yang menyebabkannya dan bagaimana Anda menilainya?

Saya sangat menyesalkan kejadian itu. Sebenarnya waktu itu Nasr Hamid akan berbicara di seminar bersama saya di Malang. Tapi karena dicekal, dia tidak jadi mengisi seminar itu. Saya kira ini problem umat Islam. Terkadang kita hanya bisa berkumpul dengan orang yang sama dan sejalan. Tapi, kita tidak siap berkumpul dengan orang yang ber-beda. Bukan hanya dengan yang berbeda agama, dengan sesama Muslim pun seringkali tidak bisa. Kita telah kehilangan makna pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula sangat pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama. Menurut Muhammad Imarah dalam buku *Al-Islâm wa al-Ta'addudiyah: al-Ikhtilâf wa al-Tathawwu' fî Ithâr al-Wiḥdah,* pluralisme merupakan sebuah keniscayaan. Pluralisme merupakan prasyarat untuk dapat hidup eksis berdampingan dengan orang lain pada semua zaman.

Setiap peraturan hendaknya ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan umum. Sebab, dalam Islam, kema-slahatan umum menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menetapkan sebuah hukum syariah. Kalaupun sesuatu benar, tetapi tidak membawa *mashlaḥah*, sebaiknya ditinjau kembali.

Dalam lingkup keluarga kita sudah diajarkan bahwa pluralisme adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menolak ada anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Mereka

dapat hidup berdampingan dalam satu rumah secara harmonis. Kalau masing-masing tidak dapat hidup bersama, keluarga akan hancur. Yang tua harus berani jika suatu ketika harus tidur dengan yang kecil. Dalam kehidupan lain kita juga mesti begitu. Banyak *nash* al-Quran yang menunjukkan bahwa pluralitas merupakan kehendak Tuhan. Hanya saja ada sebagian orang yang mengartikan pluralisme sebagai sinkretisme atau pencampuradukan semua agama. Itulah yang banyak ditolak. Bagi saya sendiri, pluralisme adalah kebersamaan hidup di dalam suatu negara yang berbeda-beda agama dan etnik. Kalau pengertian ini yang digunakan, saya kira MUI juga tidak akan keberatan. Yang ditakuti MUI adalah kalau pluralisme sudah menjurus pada sinkretisme.

MUI dianggap salah dalam mendefinisikan pluralisme. Selain mengartikan pluralisme dengan sinkretisme, MUI juga mengartikan pluralisme dengan relativisme. Padahal makna yang sebenarnya jelas tidak begitu. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, kita perlu belajar berhati-hati mencari luasnya pengertian term-term tersebut. Sebab, jika kita tidak mengetahui makna sebenarnya, terkadang mudah menjatuhkan vonis tanpa mengetahui persoalannya.

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara demokratis, apakah tindakan MUI dapat dikatakan melanggar batas kewenangan negara?

Selama mereka tidak memanifestasikannya dalam bentuk tindakan anarkis, saya kira masih bisa ditolerir. Tapi, kalau mereka merusak rumah atau hak milik orang lain, maka itu akan menjadi

masalah bagi kita bersama. Sebab di dalam Islam sendiri, perbedaan sangatlah dihormati. Hak milik dalam Islam merupakan salah satu yang harus dihormati. Bukan hanya hak milik umat Islam, hak milik non-Muslim pun harus dihormati. Nabi Muhammad merupakan contoh orang yang sangat menghormati hak milik orang lain. Buktinya, ketika beliau akan hijrah, barang titipan orang-orang Quraisy yang kafir tetap beliau jaga dan dikembalikan melalui Ali bin Abi Thalib.

Kini, persoalannya banyak umat Islam yang tidak menghormati hak milik orang lain. Kalau mereka tidak cocok dengan orang lain dalam suatu masalah, seolah dibolehkan melakukan apa saja. Mungkin, merampok pun akan dilakukan. Kelompok fundamentalis seperti itu sebenarnya telah ada cikal bakalnya dari orang-orang Khawarij, yang membolehkan merampas hak orang yang tidak sependapat dengan kelompoknya. Jadi fenomena kekerasan seperti itu bukanlah masalah yang baru dalam tradisi dan sejarah Islam.

> Saya kira, penerapan syariat Islam yang kini dilakukan di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, belum dapat menyelesaikan masalah umat. Di kalangan ulama fikih dunia, masalah itu juga masih menjadi agenda diskusi yang dinamik.

Tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah. Karena itu, mestinya negara menjaga hak-hak setiap warga negara. Ini menyangkut masalah hak-hak pribadi yang harus dilindungi. Saya tidak setuju dengan tindakan anarkis yang dilakukan kelompok tertentu terhadap Ahmadiyah. Kita memang boleh mengatakan Ahmadiyah sesat, tapi tidak boleh merusak rumah dan masjid mereka. Karena itu sudah berkaitan dengan hak milik yang mempunyai aturannya sendiri.

Kalau MUI mau mengeluarkan fatwa bahwa Ahmadiyah sesat juga boleh. Tetapi MUI mempunyai tugas selanjutnya, yaitu mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Yang terpenting adalah bagaimana MUI membentuk tim untuk mendekati mereka agar mau kembali pada 'jalan yang benar'.

Menurut Anda apa yang yang menyebabkan pemerintah mendiamkan kekerasan yang terjadi terhadap Ahmadiyah dan komunitas lainnya yang dianggap sesat (crime by omission)?

Menurut saya alasannya lebih bernuansa politis. Saya sendiri sangat menyayangkan sikap pemerintah. Mestinya, ia bisa menghentikan kekerasan itu. Tapi karena takut kepada *mainstream,* pemerintah pun cenderung diam. Sikap pemerintah dari tahun ke tahun memang selalu politis. Dulu, Islam Jamaah pernah dinyatakan pemerintah sebagai organisasi terlarang, tapi pada saat pemilu mereka ditampung dan diterima dengan baik. Kemudian, belakangan, mereka banyak menimbulkan konflik-konflik kecil di tengah masyarakat. Mereka diberi nama baru LDII. Pada masa pemilu dulu mereka dibina oleh Golkar, karena hak suaranya jelas diperlukan. Nah, saya kira, sikap pemerintah terhadap Ahmadiyah kini juga muncul lebih dilatari oleh pertimbangan politis.

Menurut Anda, apa yang menyebabkan MUI menjadi ekslusif? Padahal MUI merupakan representasi dari semua kelompok Islam yang ada di Indonesia?

Sebenarnya semua organisasi Islam yang ada di Indonesia masuk ke dalam MUI. Tapi, karena kelompok yang keras jumlahnya

lebih banyak, dalam Munas pun, suara mereka lebih kuat. Kondisi ini diperparah dengan perwakilan dari NU dan Muhammadiyah yang berasal dari para ulama fikih. Ini mungkin karena sebagian besar ulama di Indonesia itu berasal dari ulama fikih. Sementara, sebagaimana diketahui, pendekatan fikih cenderung bersifat formalistik. Hal ini bahkan kemudian dikuatkan dengan ulama yang kerap menggunakan agama untuk kepentingan politik. Ketika "fikihisme" dan politik ideologi keislaman sudah berkolaborasi, tidak aneh kalau kemudian menghasilkan MUI yang memiliki citra kurang baik seperti sekarang ini.

Ahli-ahli fikih siyasah, seperti Muhammad Salim al-Awwa atau Abdul Hamid Mutawalli, mengatakan bahwa mestinya memperjuangkan *khilâfah* janganlah hanya mengedepankan bentuknya, tetapi semangatnya. Yaitu semangat untuk menyejahterakan masyarakat dan memberdayakan agama.

Selain MUI dan negara yang lemah, permasalahan juga ditambah dengan perundang-undangan yang tidak melindungi kebebasan berkeyakinan. Beberapa UU yang problematis adalah UU No.1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama. Bagaimana mestinya menyikapi kondisi tersebut?

Memang kondisi ini sangat memprihatinkan. Sebab, produk-produk UU yang lahir di Indonesia kebanyakan masih merupakan kelanjutan dari masa lalu. Penyempurnaan yang telah dilakukan sifatnya sangat terbatas dan tidak bisa sekaligus. Ke depan, dibutuhkan kecerdasan-kecerdasan baru untuk menyempurnakannya. Memang, orang bisa berpikir cerdas, tapi belum tentu bisa berpi-

kir arif. Antara kearifan dan kecerdasan kerapkali tidak bisa berjalan bersama.

Saya sendiri tidak bisa menerima pemikiran-pemikiran seperti Ahmad Mushadeq. Tetapi, saya juga tidak sepakat dengan cara yang dilakukan untuk membubarkannya yang dilakukan kelompok tertentu untuk kepentingan sendiri. Yang mestinya dikedepankan adalah sikap dewasa. Sayangnya, orang-orang yang diterjunkan di lapangan bukan orang yang pintar. Mereka adalah kerumunan *(crowded),* orang yang bertindak hanya berdasar faktor-faktor sugestif dan imitatif.

Harus seperti apakah mengelola keragaman yang ada di Indonesia agar tidak selalu terjadi pertikaian?

Di Indonesia, konflik memang sulit dihindarkan. Jangankan berbeda agama, satu agama tapi berbeda mazhab saja bisa konflik. Tapi, saya kira, kalau mereka semakin terdidik akan berubah. Mereka akan bisa mendamaikan sendiri. Dulu, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah sangat tajam. Tapi, karena semakin banyak orang NU dan Muhammadiyah yang tercerahkan, akhirnya mereka bisa hidup berdampingan dengan tentram. Meski mereka berbeda, mereka mengetahui alasan keberbedaan itu. Yang problem adalah ketika orang berbeda, tapi sama-sama tidak mengerti makna perbedaannya.

Bagaimana seharusnya negara menjembatani kepentingan berbagai kelompok keagamaan, baik yang mainstream maupun yang dianggap menyimpang?

Pemerintah seharusnya berperan sebagai mediator untuk mempertemukan hal-hal yang berbeda di masyarakat, sehingga konflik antaragama dapat dihindarkan. Kelompok *mainstream* mestinya dapat berdialog secara persuasif dan tidak mengandalkan kekerasan. Kemudian, kelompok yang dianggap menyimpang seperti Ahmadiyah harus dapat mempertanggungjawabkan keyakinannya. Ia harus siap menghadapi umat Islam yang menganggap tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Sebab, yang dipersoalkan umat Islam mayoritas adalah pengakuan mereka akan adanya Nabi setelah Muhammad. Bagi kelompok Islam mayoritas ini, keyakinan Ahmadiyah sudah berbeda dengan pokok ajaran di dalam Islam sendiri, sehingga mereka tidak berhak mengatasnamakan Islam. Kalau mereka sudah tidak mengaku dirinya sebagai Muslim, maka umat Islam akan diam. Selanjutnya, tinggal urusan antara pemerintah dengan Ahmadiyah.

> Kita kehilangan pluralisme dalam memahami Islam. Padahal, sejatinya pluralisme menurut Islam merupakan fitrah yang tak bisa ditolak. Sesungguhnya Islam sendiri semula pluralis, hanya pada perkembangannya, pemaknaan pluralisme atau pluralitas satu sama lain tidak sama.

Tapi kalau mereka tetap mengaku Muslim, padahal yang dilakukan sudah bertentangan dengan Islam, tugas kita adalah meluruskannya. Kalau mereka tidak mau diluruskan, jangan mengaku sebagai Muslim. Sebab, Islam memiliki patokan-patokan yang secara universal diakui. Hal ini sendiri sebenarnya berlaku bukan hanya di dalam Islam. Seandainya saya seorang umat Kristen, kemudian tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, orang Kristen mayoritas pun tidak bisa menerima. Saya pernah punya pengalaman mendamaikan

kelompok yang dianggap sebagai sempalan dalam agama Hindu di Kalimantan Tengah. Di sana ada aliran yang mengaku sebagai Hindu Kaharingan. Tapi orang Hindu tidak bisa merima mereka. Saya kemudian mengambil inisiatif untuk mendamaikan mereka. Kedua kelompok saya kumpulkan untuk mendialogkan masalah yang dipertentangkan. Pemerintah tidak mencampuri masalah, tapi hanya memfasilitasi supaya mereka berdialog. Ternyata, dengan jalan itu, mereka kemudian bisa berdamai. Masing-masing mengakui mana yang perlu dan tidak perlu diperdebatkan. Kaharingan pun kemudian diakui sebagai salah satu sekte dalam agama Hindu. Walau belakangan konflik itu kembali terjadi, menurut saya, lebih karena adanya kepentingan dan muatan politik.

Bagaimana mestinya menempatkan fatwa MUI? Sebab, dalam beberapa kasus, melihat fatwa MUI sulit dipisahkan dengan kepentingan politik dan ekonomi. Misalnya, fatwa yang mengharamkan bunga bank. Fatwa ini kemudian malah menjadi jalan munculnya Bank Syariah. Dari sini, mereka menuai keuntungan dengan manjadi Dewan Syariah di sejumlah bank.

Menurut saya, MUI tidak menggunakan agama untuk kepentingan ekonomi. Hanya, terkadang kita melihat masalah agama, terutama yang menyangkut wilayah sosial budaya, secara tidak utuh. Di satu sisi yang kita lihat ekornya belaka, sementara di sisi lain yang terlihat perutnya. Padahal, masalah-masalah yang menyangkut muamalah sendiri berkembang sangat dinamis. Sama halnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dinamika semacam itu dalam fikih pun sangat dimungkinkan. Contohnya adalah ibadah haji. Dulu melempar *jumrah* pada saat

haji harus dilakukan sesudah Zuhur. Sebab tidak ada dalil yang membolehkan dilakukan sebelum Zuhur. Tapi, mazhab Syafii malah telah lama membolehkannya, jika ada alasan darurat. Belakangan, dunia sudah melihat persoalan ini sebagai masalah darurat karena jumlah jamaah haji semakin banyak. Kalau melempar jumrah hanya diperbolehkan setelah salat Zuhur, kepadatan tak bisa dikendalikan lagi dan akan banyak terjadi kemungkinan-kemungkinan yang membahayakan. Dalam fikih, darurat dapat mengubah sebuah hukum. Maka, diperbolehkan melempar jumrah sebelum Zuhur.

> Ketika "fikihisme" dan politik ideologi keislaman sudah berkolaborasi, tidak aneh kalau kemudian menghasilkan MUI yang memiliki citra kurang baik seperti sekarang ini.

Bank Syariah memang produk baru dari ijtihad fikih. Sebelumnya tidak ada. Bagi saya, masalah Bank Syariah harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Sebab, kini bank telah menjadi alat transaksi paling efektif bagi semua orang. Persoalan yang muncul dalam pengharaman bank adalah praktik *ribâ*-nya, yang terkait dengan masalah akad dan lainnya. Menurut saya, Bank Syariah berusaha menyesuaikan atau mendekatkan sistem bank konvensional dengan fikih. Dalam fikih, bisa saja yang sebelumnya dilarang menjadi dibolehkan. Sebab di dalam kaidah *ushûl al-fiqh*, hukum fikih bisa berkembang dan berubah sesuai dengan alasan (*'illah*)-nya. Kalau alasannya ada, boleh berubah. Tapi, kalau alasan itu sudah tidak ada, menjadi tidak boleh. Contohnya, memakan daging babi hukum sebenarnya adalah haram. Tapi, bagi orang yang kapalnya pecah di tengah lautan, tidak ada sesuatu yang bisa dimakan kecuali makanan kaleng yang berisi daging babi dan kalau

tidak memakan itu bisa menyebabkan kematian, maka dia boleh memakan daging babi itu. Dia diperbolehkan makan sebanyak yang bisa mempertahankan hidupnya. Kalau nanti dia bisa selamat, dia tidak boleh lagi memakan daging babi.

Karena hukum selalu berkembang, saya kira wajar jika sekarang muncul adanya lembaga yang mengurusi wakaf. Saya sendiri sekarang dipercaya sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia. Perkembangan hukum menghasilkan produk baru wakaf. Sekarang telah ada jenis wakaf yang berbentuk uang. Kalau masalah ini kita sandarkan pada fikih klasik, sebenarnya tidak ada satu mazhab pun yang membicarakannya. Karena sistem moneter pada zaman ketika kitab-kitab itu ditulis, belum mengenal sistem keuangan seperti sekarang. Dulu, uang hanya bisa dipakai untuk membayar barang. Tapi sekarang uang bisa digunakan untuk berbagai transaksi. Bisa menjadi saham, sehingga nilai uang bisa dipertahankan meskipun uangnya sudah tidak ada di tangan, yang ada di tangan hanyalah kertas. Inilah yang saya sebut perubahan sistem moneter. Dalam konteks itulah, wakaf uang bisa dimungkinkan dengan memberikan suatu saham, yang dapat disamakan dengan mewakafkan barang yang bisa dilihat, seperti gedung. Kenapa bisa? Karena nilai saham tersebut bisa digunakan untuk membeli gedung.

Karena alasan itulah, hampir semua ulama fikih dari berbgai mazhab pada abad ke-20 membolehkan wakaf uang. Indonesia termasuk negara yang baru belakangan memperbolehkannya. Yang paling cepat merespon ini adalah mereka yang bermazhab Hanafi. Karena Islam mayoritas bermazhab Syafii, maka mazhab Syafii dan Hambali yang paling lambat. Baru sekarang, melalui Badan Wakaf Indonesia, kami ditugaskan untuk mewujudkan wakaf produktif dan wakaf uang.

Dalam konteks kebebasan beragama, hak-hak dan kebebasan sipil (civil rights dan civil liberties) merupakan hak yang paling banyak dicederai ketika negara menerapkan aturan berbasis syariah. Bagaimana Anda menilai perda syariat Islam, apakah ia bisa sah menjadi sumber hukum di Indonesia?

Saya prihatin dengan gerakan yang berusaha menjadikan syariah sebagai hukum formal, sementara tidak mengetahui persoalan sesungguhnya. Kita tidak bisa menyamakan semua daerah karena masing-masing berbeda. Kalau di Aceh silakan saja. Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus karena baik masyarakat maupun pemerintahnya menghendaki begitu. Meski ada yang tidak menghendaki, tapi kita tidak bisa serta merta melarang mereka melakukannya. Permasalahannya, bagaimana agar penerapan kepututsan tersebut tidak merugikan banyak pihak.

> MUI sendiri sebenarnya mengakui pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, karena keputusan itu tidak dilandasi kajian yang matang, ia menjadi tidak indah dan kurang elegan.

Kasus penerapan perda syariah di Tangerang, di mana telah terjadi kasus salah tangkap terhadap seorang guru yang dicurigai sebagai PSK, menurut saya tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang diberlakukannya peraturan tersebut. Kasus tersebut terjadi lebih karena masalah teknis dari aparatnya.

Di atas itu semua, setiap peraturan hendaknya ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan umum. Sebab, dalam Islam, kemaslahatan umum menjadi salah satu dasar pertimbangan untuk menetapkan sebuah hukum syariah. Kalaupun sesuatu benar, tetapi tidak membawa *mashlaḥah*, sebaiknya ditinjau kembali.

Penerapan perda syariah diklaim sebagai manifestasi demokrasi di tingkat lokal. Tapi, dalam konteks otonomi daerah, sebenarnya urusan agama tidak diotonomikan kepada pemerintahan daerah, melainkan otoritas pusat. Bagaimana penilaian Anda?

Kalau mereka sudah melalui kesepakatan masyarakat, DPRD dan pemerintah, sebagai warga yang menghargai demokrasi, dengan sendirinya saya harus menghargai perda syariah tersebut. Kalaupun kita mengatakan bahwa urusan agama adalah urusan pemerintah pusat, mereka pun bisa berdalih bahwa perda syariah tersebut merupakan aspirasi masyarakat setempat.

Kalau syariat Islam ditegakkan, apakah hukuman-hukumannya juga harus seperti hukuman dulu ketika syariah secara simbolik diterapkan pada masa dinasti Islam, seperti potong tangan dan rajam?

Saya kira itu masih membutuhkan kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut. Tergantung pada apakah kita berpaham skripturalis ataukah substansialis. Saya kira, penerapan syariat Islam yang kini dilakukan di Indonesia, seperti yang terjadi di Aceh, belum dapat menyelesaikan masalah umat. Di kalangan ulama fikih dunia, masalah itu juga masih menjadi agenda diskusi yang dinamik.

Apa yang membuat kita harus menerima syariat Islam?

Menurut saya, prinsipnya, adalah bahwa hukuman terhadap suatu kesalahan harus ada. Tujuan hukuman adalah agar orang yang dihukum merasa jera atau, pada tingkat yang paling bagus, tidak bisa lagi melakukannya. Untuk itu, apakah ada cara lain yang bisa

dijadikan hukuman agar orang jera? Kalau ada yang lebih efektif, maka pakailah yang lebih efektif.

Kritik yang kerap muncul terhadap perda syariah adalah lingkupnya yang hanya berurusan dengan hal-hal parsial, pewajiban jilbab, perzinahan dan sebagainya. Sementara kasus yang merugikan negara, yang efeknya lebih besar, seperti korupsi tidak dapat ditangani? Apa pendapat Anda?

Itu membutuhkan pemikiran baru yang lebih arif. Bukan hanya berdasarkan kecerdasan tetapi juga kearifan. Contoh, Piagam Madinah yang dilakukan oleh Nabi. Pada saat itu, Nabi sudah memegang kekuasaan. Tapi, Nabi masih mempertimbangkan bagaimana komunitas Yahudi dan lainnya, untuk bisa hidup dalam satu peraturan yang dibuat oleh Nabi. Di situ, bukan *nash* al-Quran yang dipakai Nabi, melainkan kebijakan dan kearifan.

> Pluralisme adalah kebersamaan hidup di dalam suatu negara yang berbeda-beda agama dan etnik. Kalau pengertian ini yang digunakan saya kira MUI juga tidak akan keberatan. Yang ditakuti MUI adalah kalau pluralisme sudah menjurus pada sinkretisme.

Kembali ke konteks otonomi daerah, apakah pemerintah pusat tidak mempunyai hak, berdasarkan konstitusi, untuk membatasi atau bahkan melarang perda syariah?

Sebenarnya pemerintah pusat mempunyai hak untuk membatalkanya. Jika ada perda yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat atau menimbulkan kekacauan dan pemberon-

takan, maka pemerintah pusat mempunyai hak untuk menunda atau membatalkannya.

Demokrasi, oleh sebagian kalangan, diyakini akan muncul pada negara yang cenderung sekular. Bagaimana Anda menilai ide khilâfah yang didesakkan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia atau, dulu, Partai Keadilan (PK)?

Saya hanya melihatnya sepintas. Sekarang perubahan dari PK menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) sendiri telah terdapat perkembangan baru. Dewan Pimpinan Pusat PKS mengatakan bahwa PKS sekarang telah menerima pluralisme. Itu menujukkan bahwa semua isu yang diangkat partai politik lebih bersifat politis, termasuk isu *khilâfah*. Kenapa PKS tiba-tiba bisa menerima pluralisme secepat ini. Padahal, selama lima tahun lebih, mereka seolah terlarang membicarakan pluralisme. Itu menujukkan bahwa semuanya merupakan masalah yang dianggap sebagai isu dan kepentingan politik, bukan berdasarkan agama. Politik adalah seni untuk melakukan hal yang mungkin.

Menurut Anda apakah khilâfah kontekstual untuk menyelesaikan problem yang dihadapi sekarang?

Saya kira masalah *khilâfah* merupakan wacana politik. Sejak awal, Nabi Muhammad telah mengingatkan bahwa khilâfah tidak akan berjalan langgeng. Suatu saat pasti akan mengalami perubahan. *Khilâfah* bersifat temporal. Bukan sesuatu yang universal, yang berlaku selamanya. Lihatlah, empat khalifah dari Abu Bakar, Umar, Usman, hingga Ali, masing-masing memiliki cara yang berbeda

dalam pelaksanaannya. Pemilihannya pun berbeda-beda. Apalagi masa-masa setelah empat khalifah awal ini. Zaman Muawiyah sudah sama sekali berbeda, hampir tak terlihat lagi sisa praktik khilâfah pada masa-masa awal. Yang tersisa hanya fungsi kepala negaranya saja, yaitu untuk mengatur kehidupan rakyat dan bertanggung jawab demi keselamatan agama. Itulah arti dan praktik *khilâfah* yang masih didengungkan hingga zaman Ibn Khaldun.

Artinya, kelompok yang tetap mengusung khilâfah *sama saja kembali ke peradaban yang lebih terbelakang?*

Ya. Sebab yang mereka perjuangkan hanya bentuknya, bukan semangatnya. Saya menyayangkan para pegiat *khilâfah* di Indonesia yang tidak banyak membaca referensi buku soal khilâfah. Di Indonesia, banyak orang yang mempunyai semangat politik tinggi, tetapi malas membaca kajian-kajian politik Islam.

Ahli-ahli fikih *siyâsah*, seperti Muhammad Salim al-Awwa atau Abdul Hamid Mutawalli, mengatakan bahwa mestinya memperjuangkan khilâfah janganlah hanya mengedepankan bentuknya, tetapi semangatnya. Yaitu semangat untuk menyejahterakan masyarakat dan memberdayakan agama.

Di Indonesia, yang diusung Hizbu Tahrir (HT) justru bentuk permanen dari *khilâfah*. Karena itu, HT ini tidak diperbolehkan berkembang di negara-negara lain. Di negara kelahirannya sendiri, Yordania, HT tidak diijinkan.

Saya kira *khilâfah* itu hanya wacana semata, tidak akan terwujud. HTI hanya mengusung wacana *khilâfah* karena tidak setuju dengan konsep negara-bangsa, juga Pancasila. *Khilâfah* yang diusungnya sendiri tidak akan pernah terwujud.

Bagaimana Anda melihat gerakan Islam transnasional seperti HT dan Jamaah Islamiyah yang memperjuangkan isu khilâfah. Apakah tawarannya akan bisa jadi solusi persoalan bangsa? Kalau tidak, menurut Anda, bagaimana meluruskan pemahaman seperti itu?

Islam transnasional sebetulnya merupakan gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Islamiyah dan lain-lain. Kebetulan mereka memperoleh momentum untuk tampil di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri memang memberikan peluang bagi mereka untuk tampil. Namun, isu yang mereka angkat, seperti *khilâfah* dan pemberlakuan syariah, merupakan isu yang sudah cukup lama. Di dunia Islam, isu itu sudah usang. Mereka terbelah dalam dua kelompok. *Pertama,* kelompok yang mengkaji ulang dengan cara yang lebih rasional, seperti Yusuf Qardlawi. *Kedua,* kelompok yang tidak bisa merebut kekuasaan dan melampiaskannya dalam bentuk gerakan kekerasan.

Bagaimana pengalaman Anda ketika menjadi Menteri Agama dalam menyusun kebijakan yang mengatur umat beragama di Indonesia?

Sejak dipilih menjadi Menteri Agama, saya menyatakan Departemen Agama harus mampu mereposisi diri dari menguasai umat menjadi melayani umat.

Ada yang menilai, pluralisme beragama di Indonesia masih terus mendapat rongrongan karena Departemen Agama sebagai institusi negara yang menaungi semua umat beragama tidak tegas dan adil.

Celakanya lagi MUI malah mengeluarkan fatwa yang memancing tindak kekerasan?

Sejak awal saya sudah meminta agar MUI tidak dijadikan sebagai kepanjangan kebijakan Departemen Agama. Pada waktu itu, saya juga mengatakan agar MUI tidak menjadi *fotocopy* dari kebijakan Departemen Agama. Demikian juga Departemen Agama jangan menjadi payung dari kegiatan MUI, dalam segala sikapnya yang sering mencitrakan ekstremitas pemikiran.

Sebenarnya, MUI merupakan lembaga swasta yang tidak mempunyai kekuatan politik. MUI merupakan federasi dari berbagai macam ormas Islam yang ada di Indonesia. Tetapi, ormas Islam sendiri tidak semuanya sepaham dengan sikap MUI. Contohnya, keputusan hukum dari majelis-majelis yang ada di NU dan Muhammadiyah, yang tidak selalu identik dengan MUI.

MUI sekarang tampak begitu kuat sebenarnya karena perlakuan yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Masyarakat yang mengkonstruksi MUI sehingga seolah-olah memiliki otoritas sangat kuat dalam menentukan *bulat-lonjongnya* kehidupan beragama di Indonesia. Sebagai federasi, kini, MUI merupakan satu-satunya federasi yang mengumpulkan orang-orang dari berbagai macam ormas Islam. Yang harus dipahami adalah bahwa pengurus MUI itu jelas bukan representasi dari ormas-ormas Islam tersebut. Mereka tidak dicalonkan oleh masing-masing ormas, melainkan dipilih oleh tim formatur dalam Musyawarah Nasional (Munas).

Dari segi pendanaan, MUI sama dengan ormas-ormas lainnya. Sebagian saja dana yang diperolehnya berasal dari bantuan pemerintah. Ketika saya menjadi Menteri Agama, saya pernah memberikan

bantuan agar dapat dijadikan dana abadi bagi MUI, sehingga ia tidak lagi mengandalkan bantuan pemerintah terus-menerus.

Bagaimana Anda merespon fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme?

Ketika MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme, saya sudah menyampaikan kepada teman-teman MUI, "*mbok* diadakan kajian yang lebih mendalam, dengan referensi yang cukup memadai dulu, masalah-masalah yang diputuskan tadi ada alasannya atau tidak, pemahamannya benar atau tidak, jangan-jangan nanti akan menimbulkan masalah." Sayangnya keputusan itu *keburu* dibuat oleh MUI. Baru kemudian, sebelum penyetakan hasil keputusan, penjelasan-penjelasan lebih lanjut dari MUI diberikan – seperti penjelasan tentang pluralisme, bahwa yang tidak disetujui adalah yang mencampuradukan agama. MUI sendiri sebenarnya mengakui pluralitas dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, karena keputusan itu tidak dilandasi kajian yang matang, ia menjadi tidak indah dan kurang elegan.

Yang menurut saya fatal adalah soal sekularisme. Mengharamkan hal ini, bagi saya, tidak dapat diputuskan begitu saja. Karena, perdebatan seputar kemunculan dan perkembangan sekularisme sendiri sangatlah panjang. Di Indonesia, dulu seperti kita ketahui, pernah terjadi perdebatan antara Cak Nur dan Pak Rasyidi. Sebuah polemik yang sama sekali tidak dangkal dan berjalan tidak sebentar. Karena itu, perlu kajian lebih mendalam sebelum memutuskan haram atau tidaknya sekularisme.

Yang dikhawatirkan oleh Pak Rasyidi berbeda dengan apa yang dikhawatirkan oleh MUI dalam konteks sekularisme ini. Pak Ra-

syidi hanya melihat sekularisme dari latar belakang kemunnculannya. Sekularisme yang kemudian berkembang menjadi sikap dan doktrin beraneka ragam, dimaknai Pak Rasyidi sebagai pemisahan permasalahan umat atau negara (masalah profan) dari masalah-masalah keagamaan (masalah sakral). Saya sendiri memahami sekularisme sebagaimana yang berkembang di sebagian negara-negara Islam, seperti Maroko, Yordan dan Indonesia, bahwa ia adalah bukan pemisahan, melainkan pembedaan antara mana yang menjadi urusan agama dan mana yang menjadi urusan negara. Bagi saya, pengertian demikian telah menempatkan secara jernih permasalahan yang menjadi tugas negara dan tidak menjadi tugas agama, atau sebaliknya.

Bagaimana Anda merespon munculnya berbagai aliran keagamaan baru seperti Mushadeq dan Usman Roy?

Meski saya tidak setuju dengan mereka, saya kira itu merupakan bukti kegagalan dakwah Islam. Soal Usman Roy di Malang, saya juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan olehnya dan kelompoknya. Tetapi, saya juga tidak setuju dan prihatin bila umat Islam yang telah melakukan salat selama bertahun-tahun tidak memahami arti dari bacaan salat yang dibacanya.

Dalam kondisi keberagamaan yang jauh dari semangat toleransi seperti sekarang ini, bagaimana masa depan pluralisme di Indonesia?

Menurut saya, hal itu tergantung dari pergulatan dan pergumulan kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia. Tapi sejauh ini, me-nurut saya, masyarakat Indonesia masih mendukung plu-

ralisme. Ke depan, kalau kelompok yang antipluralisme didukung oleh pemerintah, misalnya, untuk kepentingan politik tertentu, maka kondisinya mungkin akan sangat berbeda. Tapi saya yakin, selama model pemikiran Islam seperti Muhammadiyah, NU dan Al-Washliyah masih bertahan dan didukung pemerintah, pluralisme masih bisa berkembang dengan cara yang lebih baik.

Meski demikian, di tengah era pemilihan kepala daerah secara langsung, kita harus mewaspadai usaha kelompok antipluralisme yang sangat vokal ini. Jika mereka berkolaborasi dengan kelompok kepentingan tertentu untuk memenangkan Pilkada, saya khawatir kondisi pluralisme yang telah terjaga akan berganti menjadi antipluralisme.

Bagaimana menjaga pluralisme secara praksis, apakah hanya sekadar mengakui keragaman atau juga mesti ada keterlibatan seperti advokasi terhadap kelompok minoritas?

Memang harus ada keterlibatan dari semua pihak untuk menjaga pluralisme. Saya punya pengalaman yang bisa dijadikan contoh. Sewaktu muda, saya hidup di Malang. Masyarakat Malang adalah masyarakat yang sangat pluralis. Di sana, bangunan masjid dan gereja tak sedikit berdiri berdampingan. Tapi mereka bisa hidup harmonis. Kami saling menjaga dialog sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Jika mereka mengundang dalam dialog dan seminar-seminar, kami dari kelompok Islam pun datang, demikian juga sebaliknya. Dengan cara seperti itu, kami dapat menghindarkan terjadinya benturan-benturan seperti yang terjadi di daerah lain.

Saya kira untuk menjaga pluralisme, kita juga perlu mengedepankan dialog di antara elite-elite keagamaan. Karena masyarakat

kita masih sangat paternalistik, jika elite-elitenya dapat hidup secara harmonis, masyarakat pun sangat mungkin akan harmonis. Sebaliknya, kalau elite-elitenya justru saling berkonflik, masyarakat pun akan ikut berkonflik. Karena itu, dialog antaragama masih sangat relevan digalang untuk menjaga pluralisme. Lebih dari itu, nilai-nilai pluralisme pun harus mulai ditanamkan sejak pendidikan awal.

Kalau sampai sekarang masih kerap terjadi penodaan terhadap pluralisme di Indonesia, menurut Anda, sebenarnya apa yang salah dengan pendidikan kita saat ini?

Menurut saya pendidikan kita terlalu dikotak-kotakkan. Ada pendidikan Islam, Kristen dan sebagainya. Mereka dididik hanya memahami satu agama saja, tidak dididik untuk memahami prinsip-prinsip agama lain. Tak aneh kalau kemudian tidak ada saling pemahaman di antara mereka. Akibatnya, kita sangat mudah saling tuding, bahkan saling tonjok ketika terjadi kesalahpahaman. Mestinya sejak masih usia anak-anak, masyarakat kita diajarkan untuk saling memahami dan toleran dengan umat agama lain. Pergaulan mereka jangan dibatasi hanya dengan anak yang seagama. Sebab, jika mereka ber-gaul dengan anak dari agama lain, mereka akan belajar untuk saling memahami.

Saya punya seorang cucu yang masih kecil. Dalam pergaulan sehari-hari dia kerap berteman baik dengan anak Katolik. Ketika mereka bermain di rumah saya, saya melihat dialog yang terbangun di antara mereka sangat cair dan enak. Ketika hari Minggu, cucu saya bilang sama temannya yang Katolik, "Ini hari Minggu, kamu tidak pergi ke gereja untuk kebaktian?" Sebaliknya kalau hari

Jumat, teman yang Katolik mengingatkan cucu saya untuk salat Jumat. "Ini hari Jumat, aku pulang dulu, kamu kan mau pergi ke masjid untuk salat Jumat", kata teman cucu saya itu.

Demikian harmonisnye dialog di antara mereka, meski itu dialog kecil. Tetapi poin yang ingin saya sampaikan adalah sudah terbangunnya rasa saling mengerti di antara mereka, meski memiliki perbedaan agama. Meskipun masing-masing mempunyai kegiatan keagamaan yang berbeda, mereka bisa menerima perbedaan itu. Dan mereka bisa saling menghargai. Saya kira yang membentuk situasi di antara mereka ini adalah lingkungan.

Contoh lain saya dapatkan dari anak-anak saya sendiri. Mereka dapat bergaul dengan teman-temannya yang non-Muslim, tanpa mengurangi keimanan dan ketaatan mereka terhadap agama Islam. Sikap dan keyakinan anak-anak saya itu, menurut saya, terbentuk dari perjalanan hidup saya dan keluarga sendiri. Dulu, waktu saya masih aktif berbisnis, mereka kerap melihat saya berbisnis dengan orang-orang Cina yang non-Muslim. Saya berbisnis dengan mereka tanpa menyebabkan keimanan saya luntur. Karena itu, faktor teladan juga sangat penting untuk menyemaikan pluralisme di keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, saya kira penting agar para pemimpin dapat menempatkan diri sebagai teladan masyarakat, bukan malah membuat keributan di mana-mana. Saya sangat prihatin dengan pemimpin agama yang mencontohkan tindakan yang tidak baik. Memakai sorban dan peci sambil meneriakkan *Allâhu Akbar*, tetapi yang mereka lakukan adalah penghancuran rumah dan hak milik serta tempat-tempat ibadah agama atau aliran agama lain.

Wawancara dilakukan di Kota Wisata, Rabu, 26 Maret 2008

Percakapan dengan

Nasaruddin Umar



Nasaruddin Umar, Guru Besar bidang Ilmu Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sekarang ia menjabat Direktur Jenderal Bimbingan Masyrakat Islam, Departemen Agama.

Dengan struktur bangsa yang konfiguratif, Bhinneka Tunggal Ika, dan *prototype* masyarakat Indonesia yang berbentuk *ummah*, penerapan demokrasi merupakan keniscayaan. Sebaliknya *khilâfah islâmiyah* tidak lain gagasan utopis. Karena itu, peran yang harus dimainkan agama (*al-dîn*) untuk menggerakkan negara (*al-dawlah*) atau domain publik semestinya bersifat implisit, digali dari prinsip-prinsip moral substansial, bukan formal. Untuk itu sebagai umat hendaknya kita melakukan jihad yang visinya harus paralel dengan ijtihad, yang masuk akal dan nalar. Sedangkan *al-dawlah*, yang moral politiknya diinspirasi dari agama, mengambil peran melindungi agama-agama yang ada; jangan sampai mengambil bentuk negara Machiavellian, karena indonesia tidak bisa begitu saja mengabaikan HAM internasional.

Orang sering memaknai sekularisme sebagai paham peminggiran terhadap peran agama. Bagaimana menurut Anda?

Menurut saya, pemahaman tentang sekularisme makin lama semakin kabur. Terkadang orang memahami sekularisme dengan menggunakan ayat-ayat al-Quran, Hadits, *ushûl al-fiqh*, *'ulûm al-Qur'ân*, atau mengutip pendapat para ulama salaf. Apakah ini upaya melegitimasi paham sekularisme dengan berdasarkan ayat, Hadits, *qawl* (pendapat) ulama, atau memang upaya yang sudah tidak murni lagi sebagai pemahaman sekularisme?

Bagaimanapun, sekularisme dalam konteks kekinian semakin kabur. Kita tidak menemukan "sosok" sekularisme yang orisinil. Di Barat sendiri makna sekularisme juga kabur. Negara mana yang bisa kita contoh sebagai negara sekular? Di Amerika, sekarang, kalau kita lihat pertentangan antara Partai Demokrat dan Republik, keduanya adalah partai yang memiliki dukungan kuat dari kalangan agama. Partai Republik didukung oleh kelompok fundamental Kristen. Begitupun Partai Demokrat, calon presidennya seperti Hilarry Clinton dan Barack Obama, keduanya orang yang beragama dan *statement-statement* mereka banyak merujuk pada agama.

Menurut hemat saya, dalam konteks kekinian, yang lazim dikenal dengan zaman posmodernisme, mendefinisikan sesuatu adalah upaya yang cenderung dinilai sia-sia. Boleh jadi upaya kita mendeskripsikan sesuatu terjebak pada hal-hal yang tidak perlu lagi dideskripsikan. Jangan-jangan kita melakukan klaim-klaim yang tidak perlu lagi. Maka, jangan kita memaksakan upaya tersebut, karena dikhawatirkan justru akan menjadi alat penjebak terhadap orang lain. Karena bermula dari suatu definisi dan klaim, maka setiap orang atau kelompok yang berbeda dan sekular begitu saja

dianggap sesat, dilihat dari segi praktik keagamaan, meskipun ia mampu memberikan konstribusi sosial yang cukup baik. Misalnya, tidak sedikit masjid dan fasilitas pendidikan yang dibangun oleh orang yang dituduh sebagai sekular dan sesat. Dilihat dari segi politik, dia banyak menggolkan regulasi yang lebih berpihak pada Islam. Dilihat dari segi pertahanan, mereka ini yang lebih solid untuk menjaga umat.

Sementara itu, mereka yang menganggap bahwa sekularisme sesat, ternyata secara formal tidak melakukan apa-apa, tidak membangun rumah ibadah dan kontribusi sosial lainnya. Saya teringat Pak Jusuf Kalla (JK). Orang menilai dia seperti ini dan itu. Pak JK malah balik bertanya: sudah berapa banyak masjid yang Anda bangun? Dan orang yang bertanya itu berusaha memojok-mojokkan JK. Padahal kita semua tahu sudah berapa banyak masjid dan pesantren yang dia bangun, dan dia banyak menghajikan orang.

Jangan menuduh orang dengan label sekular dan tidak sekular, sementara kita tidak berbuat apa-apa untuk umat. Boleh jadi seseorang yang kita anggap sekular dan sesat, ternyata dia lebih banyak amalnya.

Saya menanggapi wacana sekularisme dengan hati-hati. Karena kita tidak lagi hidup di abad ke-19, di mana ada perbedaan antara yang pro dan kontra terhadap agama. Di era posmodernisme saat ini, paham tersebut sudah kabur maknanya.

Kita tidak bisa menjadikan sekularisme sebagai obyek yang harus dipukul dengan aksi jihad, atau kita sebenarnya tidak bisa lagi membedakan bahwa jihad sekarang lebih dekat dengan al-Quran atau malah dekat dengan Marxisme, dan lain sebagainya.

Kita tahu teori Marxisme telah hancur seiring dengan robohnya Tembok Berlin dan hancurnya Uni Soviet. Rumah Marxisme

kini telah hancur. Sekarang ada kecenderungan membangun rumah baru. Pertanyaannya: apakah makna jihad itu lebih dekat dengan ideologi Marxis atau al-Quran?

Marxisme mempunyai tujuan untuk menghancurkan perbedaan kelas-kelas sosial, menghilangkan kesenjangan kelas proletar dan borjuis. Jihad sekarang berusaha ingin menghancurkan dominasi kapitalisme, persis dengan apa yang dilakukan oleh Marxisme. Bedanya dengan jihad, Marxisme bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Jihad tidak boleh seperti itu. Jihad visinya harus paralel dengan ijtihad, yakni masuk akal dan nalar. Dan jihad juga harus paralel dengan *mujâhadah*, perjuangan rohani. Jadi konfirmasi rohani juga ikut menentukan apakah sebuah niat dan perjuangan merupakan jihad atau bukan. Jihad bukan untuk membunuh atau mematikan orang, tapi untuk menghidupkan (melindungi) orang, untuk menyelamatkan orang. Sedangkan Marxisme berbeda, siapapun yang mati dan berapapun yang menjadi korban tidak jadi masalah, karena itu merupakan akibat dari revolusi. Dalam Marxisme dikenal revolusi. Kalau ada korban, itu merupakan konsekuensi dari revolusi.

Jihad visinya harus paralel dengan ijtihad, yakni masuk akal dan nalar. Dan jihad juga harus paralel dengan *mujâhadah*, perjuangan rohani. Jadi konfirmasi rohani juga ikut menentukan apakah sebuah niat dan perjuangan merupakan jihad atau bukan. Jihad bukan untuk membunuh atau mematikan orang, tapi untuk menghidupkan orang, untuk menyelamatkan orang.

Dalam konsep jihad Nabi ada yang dikenal dengan istilah hijrah: *wa hâjarû wa jâhadû,* sepanjang masih bisa hijrah, jangan jihad. Nabi bukan pengecut ketika harus pindah ke Madinah.

Jadi menurut saya, jangan gegabah menggunakan istilah jihad. Jangan sampai kita bermain dengan gendang yang ditabuh oleh orang lain. Sekarang jihad dipakai untuk membentur kapitalisme dan membantai sekularisme, dan melenyapkan liberalisme. Padahal, dalam Marxisme yang dibenturkan adalah kesenjangan kelas. Jangan-jangan jihad dipakai untuk melindungi ideologi dan metodologi Marxisme.

Tokoh sebelum Marx, yakni Hegel, berusaha membuat tesis dan antitesis dari sebuah masyarakat sosialis. Jadi, menciptakan antitesis itu harus ada risikonya. Konsepnya adalah tesis-antitesis-sintesis. Itu rumusan Hegelian. Dia adalah guru Marxisme. Marxisme memiliki dendam pada masyarakat kapitalis, maka dari itu dia ingin menciptakan masyarakat sosialis dan pemerataan, yang keadilannya berbeda dengan konsep keadilan yang dianut oleh kelompok kapitalis.

Karena itu, jangan sampai Marxisme kemudian dibungkus Islam. Seperti yang saya sebutkan di atas bahwa mereka menggunakan ayat al-Quran, Hadits, *qawl* ulama untuk melegitimasi pemikirannya.

Bagaimana Anda melihat hubungan agama dengan negara? Dan bagaimana seharusnya memperjuangkan agama di ruang publik?

Perdebatan hubungan agama dan negara merupakan sebuah wacana yang sudah lama muncul dalam pemikiran Islam. Sebagai seorang sarjana Muslim, saya melihat tidak bisa dirancukan antara *al-dîn wa al-dawlah*. Pemikir-pemikir kontemporer menyebutkan bahwa *al-dîn lâ dawlah*. Padahal kalau kita membuat sebuah lingkaran dari keduanya, titik temunya dapat tercapai. Memang,

terdapat wilayah masing-masing. Ada domain *al-dîn* dan ada domain *al-dawlah*. Fatwa halal-haram bukan domainnya *al-dawlah*, tetapi domain Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebaliknya, masalah pilkada dan teknik berdemokrasi adalah domain *al-dawlah.* Namun demikian, dalam pandangan Islam harus ada moral yang menggerakkan *al-dawlah*. Inilah titik temu antara *al-dîn* dan *al-dawlah.*

Jadi, inilah yang membedakan saya dengan kelompok yang dengan tegas memisahkan *al-dîn wa al-dawlah* secara ekstrem. Al-Razi menganggap bahwa antara *al-dîn* dan *al-dawlah* seperti separuh benang merah dan separuh benang putih. Bagi saya tidak seperti itu. Meski *al-dawlah* memiliki domainnya sendiri, tetapi moral politik harus diinspirasi dari nilai-nilai agama. Sebab, tanpa moral agama hanya akan melahirkan negara ala Machiavelli. Kita tidak menginginkan menampilkan moral Machiavellian. Maka dari itu, kita menampilkan moral agama, moral Islam untuk pemeluknya, begitu juga moral Kristen untuk pemeluknya. Tetapi saya hendak mengatakan bahwa saya tidak sepenuhnya sependapat dengan al-Razi, juga tidak sepenuhnya menolak, karena ada juga pendapatnya yang masuk akal.

Peran *al-dîn* dalam *al-dawlah* implisit, bukan eksplisit; lebih bersifat subtansial, bukan bersifat formal. Sebaliknya, peran *al-dawlah* terhadap *al-dîn,* dalam posisi Indonesia berbeda dengan negara lain, yaitu harus melindungi agama-agama yang ada.

Pada hemat saya, peran *al-dîn* dalam *al-dawlah* implisit, bukan eksplisit; lebih bersifat subtansial, bukan bersifat formal. Sebaliknya, peran *al-dawlah* terhadap *al-dîn,* dalam posisi Indonesia berbeda dengan negara lain, yaitu harus melindungi agama-agama yang

ada. Bagaimanapun undang-undang yang kita anut adalah negara "beragama", bukan negara agama. Jadi kalau ada orang yang tidak mau beragama, itu urusannya sendiri. Tetapi, kalau dia mengkampanyekan untuk tidak mau beragama, itu melanggar undang-undang. Jadi harus dibedakan di antara keduanya.

Apakah orang yang tidak beragama dapat hidup di Indonesia? Jawabannya, mereka berhak hidup di Indonesia. Tapi hanya diyakini sendiri. Mereka boleh hidup di Indonesia sepanjang dia meyakini sendiri ketidakberagamanya, tapi kalau dia mengekspos dan mengajak orang lain untuk tidak beragama, pada saat itu dia tidak berhak lagi hidup di Indonesia dan dia harus dikenakan undang-undang. Sebab, kita sudah meratifikasi *international human right* (undang-undang HAM internasional).

Tetapi harus juga dipahami bahwa HAM bukanlah cek kosong. Di seluruh dunia, tidak ada HAM yang dipahami sebagai cek kosong. Anda bisa lihat sendiri di Amerika. Masalah pornografi, misalnya, salah satu aturan di sana menyatakan tidak boleh kantor pos mengirimkan surat sampai ke rumah yang dituju kalau perangkonya menggunakan perangko telanjang. Atau, majalah telanjang juga tidak boleh dikirim. Tidak boleh majalah yang menampilkan gambar *buka-bukaan* dibuat tanpa sampul yang gelap. Berarti Amerika lebih kolot dibanding Indonesia. Sebab, di Indonesia majalah seronok dijual tanpa sampul. Iklan sabun ditayangkan setelah pukul 21.00 di Amerika. Di sini justru setelah Maghrib, karena pemirsa televisi banyaknya habis Maghrib, sambil mereka makan malam.

Jadi yang konservatif itu siapa dan yang modern itu siapa? Negara Amerika itu modern, tapi mereka hanya meratifikasi beberapa butir aturan HAM internasional. Undang-undang *human*

trafficking, misalnya, tidak diratifikasi oleh Amerika. Tetapi, meskipun begitu, dia merasa menjadi polisi dunia, padahal dia paling sedikit meratifikasi undang-undang HAM internasional. Jadi secara undang-undang kita lebih liberal dibanding Amerika. Karena kita banyak meratifikasi undang-undang HAM internasional, seperti undang-undang tentang kesetaraan gender, *human trafficking*, dan sebagainya.

Tetapi, yang menjadi bahan perenungan, di era reformasi ini kita banyak meratifikasi undang-undang internasional, padahal negara-negara maju selektif sekali, seperti yang dilakukan Amerika. Karena kita mau dianggap maju maka kita meratifikasi semua, dan UUD '45 pun harus diubah. Padahal, UUD '45 sebenarnya sudah memberikan kebebasan beragama, meskipun ada juga yang membatasi HAM. Jadi HAM di Indonesia bukanlah cek kosong.

Kita bandingkan dengan Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Islam, hingga saat ini masih berbentuk kerajaan. Jangan mimpi menjadi presiden kalau bukan keturunan darah biru. Kuwait adalah negara yang kaya, tapi sistemnya kerajaan. Sistem kerajaan sebetulnya kembali ke sistem kepemimpinan *qabîlah*, bukan *ummah*. Indonesia adalah *prototype ummah*.

Formalisasi dalam bentuk perda syariah yang banyak berkembang saat ini dinilai banyak kalangan mengancam kebebasan beragama, merampas hak-hak perempuan, dan HAM. Tanggapan Anda?

Saya tidak sependapat bahwa formalisasi itu akan mengancam orang non-syariah. Saya kemarin konsultasi ke komisi XI di DPR untuk memperjuangkan undang-undang perbankan syariah. Lantas

muncul pertanyaan: Kenapa mereknya harus syariah? Sungguhpun demikian, Anda atau siapapun jangan alergi dengan kata-kata syariah. Ini bukan era Piagam Jakarta dengan munculnya tujuh kata yang banyak diperdebatkan. Istilah yang muncul belakangan, adanya kata syariah, itu minus ideologi. Jadi jangan didramatisir. Memang, kawan-kawan kita di DPR menolak mentah-mentah. Walaupun sebetulnya negara yang pertama kali memformalkan syariah itu adalah negara Barat, Eropa. Di sana, di mana-mana terdapat perbankan syariah, dan itu memang sangat kontributif. Karena itu, kami sampaikan di DPR, pada waktu itu, bahwa bila teman-teman juga punya konsep hukum dan perbankan Kristen, misalnya, *monggo* kita undang-undangkan. Tetapi, kalau itu kontributif pada kesejahteraan masyarakat.

Ternyata investasi asing, terutama petrodolar tidak bisa masuk ke Indonesia karena tidak ada undang-undangnya. Ketika kita berhubungan bisnis dengan Timur Tengah maka masuknya melalui Malaysia, karena mereka sudah memiliki undang-undang perbankan syariah.

Jadi saya tidak setuju dengan mereka yang ikut-ikut alergi dengan kata syariah. Mereka, menurut saya, hanya melihat kulit permukaan. Di Bulukumba, misalnya, tidak disebutkan sebagai perda syariah. Ketika saya ke daerah tersebut, saya bertanya kepada seorang Kristen, "Bu, setuju tidak dengan perda syariah?" Jawabannya: "Setuju sekali. Dulu kami tidak bisa *saving* karena pendapatan suami kami dipakai judi, sekarang karena tidak boleh berjudi, ada saldo yang bisa di-*saving*." "Saya setuju juga dengan perda tersebut, karena bila suami sedang mabuk dia suka menempeleng, sekarang tidak ada lagi miras di jual bebas, sehingga tidak

ada tamparan lagi yang mendarat ke wajah saya." Ini yang mengatakan adalah non-Muslim.

Bagaimana dengan pewajiban memakai jilbab di beberapa daerah?

Di Bulukumba, anjuran memakai jilbab berlaku hanya di hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari berkeringat, habis olahraga kemudian mandi, langsung kita salat Jumat. Jadi apa yang salah kalau dianjurkan untuk lelaki memakai baju *koko*. Sebab, kurang etis kalau salat Jumat memakai kaos dan training. Itu menyangkut masalah etika. Sementara himbauan bagi Muslimah untuk memakai jilbab sifatnya lebih berupa kesadaran, dan tidak akan dipaksa untuk memakai jilbab.

Bagaimana dengan yang terjadi di Aceh?

Konteks Aceh lain. Karena dia dirancang menjadi sebuah negara tersendiri, namun sekarang tidak jadi karena tuntutan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) diapresiasi. Sikap saya jelas, terhadap hukum cambuk yang diberlakukan di sana, misalnya, kenapa harus takut? Kenapa hanya karena alasan tuntutan negara Islam kita lantas menjadi takut? Kalau Anda membuang sampah di Singapura, yang merupakan negara kafir, Anda akan dicambuk. Kenapa hal itu tidak ditakuti dan tidak diributkan. Ada bedanya memang, kalau di sini hukum cambuknya ada ideologi Islam sementara di sana tidak. Padahal sama-sama dicambuk.

Jadi teman-teman jangan bersikap seperti orang yang tidak punya harga diri. Misalnya, kita menganggap semuanya benar, atau sebaliknya menganggap semuanya salah. Kenapa harus takut kalau

itu nilainya universal? Sedangkan soal rajam, tidak ada di sini yang menerapkan perda tentang rajam. Dan persoalan ini pun masih menjadi *ikhtilâf* di kalangan ulama.

Jadi jangan takut terhadap isu penerapan syariah. Saya ingat Romo Mangun saat bicara di PBNU. Dia mengatakan tidak alergi dengan perda syariah, karena jangan-jangan perda itu yang akan menjerakan koruptor. Jangan-jangan itu yang lebih memanusiakan manusia.

Uskup Agung Inggris yang mendapat protes beberapa waktu lalu, pernah mengatakan: apa yang salah bila diterapkan hukum Islam di Inggris untuk orang Islam? Lantas, kenapa malah kita sendiri yang merasa keberatan dengan menerapkan hukum Islam? *Toh* Uskup di Inggris pun mau menerapkan, dan Romo Mangun juga tidak merasa keberatan. Ini satu bukti bahwa kita kurang memiliki keberanian. Seolah-olah kita tidak berani karena menggunakan istilah formalisasi syariat Islam.

Ketakutan terhadap syariat Islam, salah satunya, karena adanya ideologi Islam transnasional yang mengidolakan berdirinya kekuasaan Islam (khilâfah) yang tidak dibatasi dengan wilayah teritorial. Tanggapan Anda?

Khilâfah islâmiyah tidak mungkin terwujud. Karena gagasan tersebut hanyalah sebuah mimpi, utopis. Apa betul konsep khilâfah bisa lahir di siang bolong? Itu trauma kepada sesuatu yang tidak nyata. Kenapa harus takut kepada sesuatu yang mustahil? Sebetulnya kekhawatiran seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak punya rasa percaya diri. Sebagai seorang Muslim, menurut saya, kenapa harus ikut-ikutan takut bahwa Indonesia akan menjadi

bagian dari *Khilâfah* Turki atau Saudi? Lagipula negara macam apakah Arab Saudi itu?

Dalam hal ini (ketakutan) mereka jungkir balik untuk memikirkan apa yang juga dipikirkan Barat, sementara Barat sendiri sudah meninggalkan apa yang dipikirkan tersebut (*khilâfah islâmiyah*).

Dari poin ini, saya tidak setuju dengan Jaringan Islam Liberal (JIL) yang seolah-olah bersikap "*yes man!*" terhadap Barat. Tetapi saya juga lebih tidak setuju lagi dengan orang yang keras, dengan mereka yang seolah-olah menganggap dirinya paling benar dan menganggap yang lain masuk neraka. Pertanyaan yang sebetulnya adalah: sudah berapa banyak dia membangun masjid, sudah berapa orang yang dia islamkan, dan berapa orang yang sudah dihajikan?

> Bagaimanapun Indonesia merupakan kombinasi yang cukup baik antara Barat dan Timur. Saya ingin mengutip kaidah fikih klasik yang sampai sekarang masih relevan bagi kita: *al-muhâfazhatu 'alâ al-qadîm al-shâlih, wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlah*. Demokrasi bagus, maka kita terapkan.

Indonesia menganut model nation state yang berkewajiban melindungi hak-hak dan kebebasan warganya. Kalau lihat konteks sekarang, dengan berbagai benang kusut persoalan yang kita hadapi, bagaimana Anda melihat Indonesia sekarang ini?

Saya melihat bahwa Indonesia merupakan *nation state* dengan penduduk mayoritasnya Muslim. Indonesia merupakan yang terbaik di antara negara-negara lain yang mayoritas penduduknya Muslim. Saya sudah keliling ke seluruh negara Islam dan saya membukti-

kan bahwa kita yang terbaik. Bagaimanapun Indonesia merupakan kombinasi yang cukup baik antara Barat dan Timur. Saya ingin mengutip kaidah fikih klasik yang sampai sekarang masih relevan bagi kita: *al-muḥâfazhatu 'alâ al-qadîm al-shâliḥ, wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlaḥ.* Demokrasi bagus, maka kita terapkan.

Kita bandingkan dengan Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Islam, hingga saat ini masih berbentuk kerajaan. Jangan mimpi menjadi presiden kalau bukan keturunan darah biru. Kuwait adalah negara yang kaya, tapi sistemnya kerajaan. Sistem kerajaan sebetulnya kembali ke sistem kepemimpinan *qabîlah*, bukan *ummah*. Indonesia adalah *prototype ummah*.

Ummah berasal dari kata *ummun*, seakar kata dengan cinta kasih; seakar kata dengan *amâma*, terdepan, yang berperspektif; seakar kata dengan *imâm*, harus ada pemimpin yang berwibawa; seakar kata dengan *ma'mûm*, harus ada rakyat yang tunduk; seakar kata dengan *imâmah,* harus ada konsep kepemimpinan yang mengatur pemimpin dan rakyat. Dan, bingkai dari semuanya adalah *ummah*. Jadi tidak bisa disebut sebagai *ummah* kalau tidak ada lagi cinta kasih sesama, tidak ada pemimpin yang berwibawa di tempat itu, tidak ada rakyat yang santun, atau tidak ada sistem yang mengatur. Oleh karena itu, kalau hal-hal ini tidak ada, maka lebih dekat pada *qabîlah*, bukan *ummah*.

Di dalam al-Quran tidak semuanya disebut *ummah*. Komunitas yang *perfect* disebut *ummah*, dan yang tidak *perfect* itulah yang disebut *qabîlah, ḥizb, qawm.* Dan al-Quran sudah menerangkan ini.

Artinya, Nabi Muhammad lahir untuk mentransformasikan masyarakat dari sistem *qabîlah* menjadi *ummah*. Apakah Indonesia ini merupakan *ummah* atau *ḥizb* atau *qawm*? Ini tergantung kriterianya. Kalau menurut saya, secara teori, bangsa Indonesia paling

bagus. Kalau di sini Anda sebagai warga biasa bisa menjadi presiden. Tapi kalau Anda warga Arab Saudi, Anda tidak akan bisa menjadi pemimpin, karena Anda bukan keturunan Bani Saud. Sehingga, bagi saya, Indonesia justru lebih sesuai dengan ayat: *innâ akramakum 'indallâhi atqâkum*.

Selain itu, Indonesia telah memiliki sistem yang sangat konfiguratif, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebetulnya impelementasi dari surat al-Ahzâb ayat 13.

Jadi, dua-duanya saya kritik. Orang liberal, menurut saya, seringkali tampak sebagai *underbow* Barat. Mereka selaku konsumen pemikiran Barat, bukan produsen. Kita menginginkan bahwa kita menerima pemikiran yang baik dari Barat, tapi jangan ditelan mentah-mentah.

> *Khilâfah islâmiyah* tidak mungkin terwujud. Karena gagasan tersebut hanyalah sebuah mimpi, utopis.

Sekarang, dengan adanya kebangkitan kelompok fundamentalis Kristen, maka Republik ini juga terancam dirugikan. Mereka yang di luar Islam berusaha mengangkat isu agama. Sebaliknya, kita sendiri keberatan untuk menjadikan nilai-nilai Islam menjadi nafas Indonesia.

Bagaimana soal pluralisme yang juga oleh beberapa kalangan ditanggapi miring, bahkan diharamkan oleh MUI?

Menurut saya, pluralisme adalah hukum alam. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa: *wa law syâ'a rabbuka la ja'alnâkum ummatan wâhidah*. Di ayat itu Allah menggunakan kata *law*, tidak menggunakan *in* atau *idzâ*, kenapa? Karena kalau menggunakan *in* atau

idzâ yang berarti bisa, maka ada dua kemungkinan: bisa ya atau tidak. Tapi Allah menggunakan *law*, yang berarti tidak mungkin manusia seragam. Demikianlah ketentuan dari Allah.

Jadi, hukum alam menyatakan bahwa manusia plural, berbeda-beda. Yang terlarang dalam Islam adalah *wiḥdat al-adyân,* penyatuan agama. *Nah* itulah yang dimaksud oleh MUI dengan pluralisme. Jadi jangan salah paham dengan MUI yang melarang pluralisme. Sekali lagi yang dilarang MUI adalah pluralisme agama. Tapi pluralisme budaya atau sosial tidak bisa diterapkan padanya aturan fikih.

Persoalannya: MUI tidak memberikan definisi operasional yang cukup atas apa yang dimaksud dengan pluralisme dalam panduannya.

Kendati demikian, saya tidak sependapat dengan tuntutan untuk membubarkan MUI. Menurut saya, posisi MUI sangat penting dalam konteks Indonesia. Hanya saja orang-orangnya harus sesuai dengan visi-misinya. Jadi, jangan membakar lumbung untuk membunuh tikus. Boleh bunuh tikusnya, tapi jangan bakar lumbungnya.

Sekali lagi saya katakan bahwa saya sangat tidak setuju dengan *statement* bubarkan MUI. Itu pemikiran buruk dan tanpa pertimbangan pemikiran. Yang harus dibersihkan adalah orangnya, bukan lembaganya. Ada NU, Muhammadiyah, dan ormas lainnya yang merupakan bagian MUI. Soal kemudian di situ ada mister X, Y, atau siapapun, yang perlu dilacak adalah siapa yang suruh memilih dia? Jadi prosesnya seperti itu.

Sama juga dengan adanya pemikiran bubarkan Departemen Agama. Menurut saya, itu pernyataan ahistoris.

Bagaimana dengan nasib minoritas di Indonesia? Apakah negara ini sudah cukup menjamin hak-hak mereka?

Mungkin kita tidak akan bisa mengagumi Indonesia kalau kita tidak pernah ke luar negeri. Coba Anda ke Mesir, apakah Anda menemukan kemerdekaan bagi non-Muslim. Atau Anda ke Saudi, misalnya, di sana perempuan tidak bisa mendapat SIM, tapi di Indonesia bisa.

Dari 33 provinsi, 10 di antaranya dipimpin oleh non-Muslim, padahal umat Islam 90%. Jadi teman-teman jangan hipokrit terhadap Islam. Indonesia ini adalah surga bagi non-Muslim. Saya pernah lama di Amerika dan saya menjadi imam di sejumlah tempat di sana, seperti Washington DC, Virginia, dan Marryland. Bahkan kita melakukan *fund raising*, sehingga dapatlah dua rumah. Namun, setelah bertahun-tahun kita mengajukan izin pembangunan masjid ke pemerintahan Amerika, tidak pernah ada jawaban. Karena memang kita tidak boleh membangun masjid. Di Indonesia, agama mana pun dari enam agama yang ada di sini yang mengajukan rumah ibadah, asal memenuhi persyaratan, tidak ada alasan bagi pemerintah menolaknya. Coba Anda bayangkan, lebih demokratis mana?

Teman-teman di Prancis untuk masuk ke sekolah tidak boleh memakai jilbab. Di sini mayoritas Muslim,

Pluralisme adalah hukum alam. Dalam al-Quran ditegaskan bahwa: *wa law syâ'a rabbuka la ja'alnâkum ummatan wâḥidah*. Di ayat itu Allah menggunakan kata *law*, tidak menggunakan *in* atau *idzâ*, kenapa? Karena kalau menggunakan *in* atau *idzâ* yang berarti bisa, maka ada dua kemungkinan: bisa ya atau tidak. Tapi Allah menggunakan *law*, yang berarti tidak mungkin manusia seragam.

tetapi Anda ke sekolah memakai salib sebesar apapun dibolehkan. Anda ingin memakai simbol-simbol agama apapun diperbolehkan. Bukan hanya di Prancis, sekolah-sekolah di Rusia juga tidak boleh. Di Austria terdengar azan di Masjid tidak boleh, tetapi kalau lonceng di mana-mana terdengar. Di Indonesia tidak ada larangan membunyikan lonceng. Sekeras apapun. *Monggo!*

Untuk di internal umat Islam sendiri muncul larangan dan penyesatan terhadap al-Qiyadah al-Islamiyah dan Ahmadiyah. Bahkan belakangan ini nasib mereka semakin terancam?

Siapa yang melarang? *Al-Qiyâdah al-Islâmiyah* yang dilarang adalah penyebaran ajarannya. Kalau Mushadeq mau melantik dirinya sendiri menjadi nabi dan tidak mengajak orang lain, tidak ada masalah. Pelanggarannya adalah karena dia mengajak orang lain. Buktinya umatnya banyak. Begitu juga Ahmadiyah. Dari 500 orang kemudian menjadi 50 ribu. Itu artinya ada kampanye. Mengkampanyekan sesuatu yang sesat adalah pelanggaran hukum di Indonesia.

Kriteria sesat itu seperti apa?

Ada undang-undang yang dibuat oleh rakyat melalui DPR, bukan pemerintah.

Sekarang muncul tuduhan sesat atas kelompok minoritas yang membuat mereka menjadi korban tindak kekerasan. Hal ini merupakan

dampak dari kurang responsifnya negara terhadap berbagai persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggapan Anda?

Hal itu pun menurut saya sangat relatif. Di negara kita ada aturan yang mengatur soal pendirian rumah ibadah, sementara di Amerika tidak ada, sehingga kita tidak diizinkan mendirikan rumah ibadah. Apakah pemerintah Amerika memberikan syarat untuk membangun rumah ibadah? Tidak ada! Menurut saya, itu lebih aneh. Meski begitu, soal tindak anarkis, menurut saya, tidak ada tempatnya di muka bumi ini.

Yang bisa melakukan tindakan anarkis hanyalah negara yang diberikan oleh hukum, seperti melaksanakan hukuman mati. Hukuman mati adalah tindak anarki, tetapi anarki yang dibenarkan oleh hukum. Dan Amerika melakukan hal yang sama. Bahkan mereka melakukan penangkapan dan penjeblosan ke tahanan tanpa proses hukum di Guantanamo. Sebetulnya yang terjadi di negeri ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Amerika.

Di Indonesia ada UU No. 1/PNPS/1965 yang mengatur pokok-pokok ajaran agama. Banyak kalangan melihat bahwa UU ini tidak sesuai dengan konstitusi, yakni pasal 28 E ayat 1 dan 2, dan pasal 29 ayat 2 tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tanggapan Anda?

Coba lihat pasal berikutnya, coba lihat kembali UUD-nya. Saya tahu persis karena saya terlibat di dalamnya waktu itu. Pak Adnan Buyung Nasution hanya mengutip dua pasal itu, tapi dia tidak baca, atau pura-pura tidak tahu dengan pasal yang mengkooptasi kedua pasal itu, yaitu pasal C-nya, bahwa tidak semua

HAM harus seenaknya diterapkan dengan mengatasnamakan HAM tetapi melanggar HAM yang lain. Apakah adil atas nama HAM tapi menggusur HAM umat Islam yang mayoritas, sehingga mayoritas terzalimi oleh minoritas? Jadi, Anda juga jangan bias memahaminya.

Kita salut dengan Cak Nur. Dia berani mengkritik Barat kalau memang mereka salah. Namun kita selama ini selalu menganggap yang dari Barat pasti bagus. Dalam hal ini saya salut dengan Cak Nur, begitu juga dengan Gus Dur, pikirannya liberal tetapi juga berani menabrak Barat.

Kita sekarang ini tidak punya jati diri, karena semua yang datang dari luar masuk ke dalam diri kita tanpa kita seleksi. Misalnya, ketika membicarakan tentang gender, saya tidak mengatakan bahwa semua perspektif gender dalam Islam salah dan perspektif gender orang lain semuanya benar, tapi saya harus tegas bahwa pemahaman kita selama ini terhadap ayat itu bias budaya, bias patriarki. Tapi saya juga tidak ingin ajaran di dalam al-Quran digusur. Contoh, soal poligami, saya yang berdiri paling depan untuk membatasi poligami, dari sini kemudian saya disebut liberal, tapi saya tidak pernah membuat *statement* bahwa poligami haram atau bahwa poligami itu tidak boleh. Melarang poligami sama jahatnya secara kemanusiaan.

Jadi poligami jangan dikatakan haram. Tetapi juga jangan dilonggarkan. Mengharamkan dan melonggarkan sama-sama berakibat buruk pada kemanusiaan. Tuhan telah meletakkan ayat-ayat dengan cantik: *wa in khiftum an lâ ta'dilû, fawâḥidah,* di dalam kalimat itu digunakan *in*, artinya boleh ya atau boleh tidak. Jadi sangat proporsional. Kepercayadirian kita sebagai Muslim harus ada dalam diri kita.

Saya salut dengan M. Dawam Rahardjo, meski dia banyak ditentang. Tapi saya tahu bahwa dia sangat menentang kapitalisme dan bagi saya dia mempunyai kepribadian yang kuat. Bahkan dalam hal tertentu, dia *pasang badan* untuk menentang mayoritas, seperti kasus yang terjadi dalam waktu belakangan ini (kebebasan beragama dan berkeyakinan). Orang yang seperti itu harus dihargai. Yang saya takutkan adalah orang yang tidak punya warna sendiri. Apa yang ada di dalam dirinya hanya duplikasi dari Barat, tidak ada tulisannya yang mencela Barat. Semua tulisannya mencela Timur. Bagi saya, orang seperti itu adalah kaki-tangan Barat. Dalam hal tertentu, saya mengajak untuk tidak seperti itu, dan ikuti hati nurani.

Bagaimana pendapat Anda dengan Bakorpakem yang terdiri dari polisi, jaksa, dan Depag, yang merupakan institusi negara yang justru dinilai banyak kalangan membatasi hak dan kebebasan beragama?

Pertama, saya bukan anggota Bakorpakem, dan saya belum pernah diundang dalam rapat mereka. Dari Depag yang mewakili adalah Pak Atho' Mudhar, jadi saya tidak banyak tahu organ dalamnya Bakorpakem seperti apa. Tapi sepanjang yang saya ketahui, Bakorpakem bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi kalau kita tidak setuju, bukan dengan membubarkan lembaganya tapi mengamandemen undang-undangnya. Sebab, yang mereka lakukan berdasarkan undang-undang dan yang membuat undang-undang adalah rakyat yang diwakili DPR. Jadi bukan *an sich* negara, tapi rakyat. Eksekutornya memang pemerintah, tetapi legislatornya adalah rakyat melalui DPR. Jadi tidak bijaksana dan terlalu picik kalau hanya menyorot Bakorpakem.

Bakorpakem itu bekerja berdasarkan pasal demi pasal. Jadi jangan salahkan mereka. Salahkan DPR yang membuat undang-undangnya. Kita selalu saja potong kompas dengan menyalahkan pemerintah, sementara yang membuat undang-undangnya adalah rakyat.

Bagaimana Anda melihat konsekuensi yang terjadi di masyarakat ketika Bakorpakem mengeluarkan aturan yang melarang kelompok tertentu? Dan sejauhmana Bakorpakem mempertimbangkan munculnya gejolak di masyarakat?

Karena saya baru sedikit terlibat di Depag untuk kasus semacam itu, saya belum tahu. Cuma saya ingin mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada pemikiran untuk membubarkan langsung Ahmadiyah. Saya waktu itu salah satu anggota rapat. Di sana hadir Mendagri dan Jaksa Agung. Saya waktu itu berpendapat, apakah bijaksana membubarkan organisasi tanpa pernah melakukan klarifikasi secara langsung terhadap organisasi itu, dan hanya berpegang pada data yang diperoleh dari lembaga yang tidak senang terhadap Ahmadiyah? Saya diprotes oleh teman-teman anggota rapat. Kalau begitu, menurut mereka, surut langkah lagi.

Sebagai orang baru di lingkungan Depag, saya memang tidak mengikuti persoalan ini dari awal. Ketika saya datang waktu itu sebenarnya tinggal menandatangani surat yang berisi pembubaran Ahmadiyah. Namun saya mengatakan bahwa kita tidak bisa begitu saja membubarkan Ahmadiyah atau memberi waktu sebulan, dua bulan, atau tiga bulan, karena Nabi berdakwah membutuhkan waktu selama 23 tahun. Argumen saya waktu itu, percuma

saja kita membubarkan organisasi formalnya, karena kita tidak bisa membubarkan keyakinannya.

Beberapa waktu kemudian saya harus menghadapi beberapa kelompok yang datang ke Depag menuntut pembubaran Ahmadiyah. Saya menemui mereka setelah selesai salat Zuhur. Satu per satu saya persilakan masuk dan bertanya. Ketika giliran saya menjawab, saya mengajak mereka untuk bersama mengingat sebuah nama dan sebuah wajah yang selalu hadir di tengah kita namun sekarang tidak lagi bisa mendampingi kita lagi, yaitu almarhum Husein Umar. Saya mengajak mereka untuk membacakan surat *al-Fâtiḥah.* Suasananya kemudian menjadi sejuk seperti disiram air. Setelah itu baru saya jawab mereka satu per satu. Inti jawaban saya, apakah kalau Ahmadiyah dibubarkan kemudian persoalannya selesai? Jawaban saya, tentu saja tidak.

Saya katakan, sebagai dirjen Bimas Islam, tugas saya tiga. Pertama, harus meminimalkan penyempalan di tubuh Islam. Karena itu, saya meminta mereka untuk mempercayakan penanganan ini kepada saya. Kedua, para penyempal itu akan saya panggil kembali ke "rumah". Tentu saja *bi al-maw'izhah al-ḥasanah,* sesuai dengan ajaran MUI, *al-rujû' ilâ al-ḥaqq*, mengembalikan mereka pada kebenaran. Konsep *al-rujû' ilâ al-ḥaqq* yang digunakan Nabi perlu memakai konsep hijrah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saya meminta jangan sampai ada tindakan anarkis terhadap kelompok sempalan. Tindakan anarkis dari umat Islam dalam menyikapi perbedaan adalah melanggar hukum dan menodai Islam sebagai agama perdamaian yang tidak menghendaki adanya tindakan anarkis pada siapapun.

Percakapan dengan

Neng Dara Affiah



Neng Dara Affiah, Komisioner dan Ketua Sub Komisi Pendidikan dan Penelitian Komnas Perempuan. Ia juga Ketua PP Fatayat NU dan Konsultan untuk program Women Empowerment Moslem Context (WEMC).

Sekularisasi mempunyai akar teologis dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan: kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya; dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok. Semangat yang harus kita ambil dari sekularisasi adalah mendobrak otoritarianisme kekuasaan atas nama Tuhan. Sementara dalam liberalisme setiap individu diberikan kebebasan berekspresi dan memilih sesuai dengan hati nurani dan nalarnya sendiri dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum dan aturan-aturan publik. Karena itu, di dalam negara yang demokratis, pluralisme adalah kemestian akan penghargaan, saling memahami, dan berdialog dengan masyarakat yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Bentuk konkretnya adalah bekerjasama memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan.

Bagaimana Anda memahami sekularisme? Apakah Anda melihat perbedaan antara sekularisasi dan sekularisme?

Saya sebetulnya tidak menyukai kata 'isme'. Kata ini mengandung paham yang memutlakkan segala bentuk ideologi, agama atau yang lainnya. Sementara dalam agama atau ideologi terdapat paradoks-paradoksnya tersendiri. Jika kita memperbincangkan sekularisasi, maka yang harus kita cermati adalah gagasan dasar atau aspek filosofisnya yang ingin mencoba memisahkan mana ranah duniawi dan mana yang wilayah agama.

Saya melihat bahwa sekularisasi sebetulnya mempunyai akar teologisnya dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan: kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya; dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok, (*I'mal li dunyâka ka'annaka ta'îsyu abadan wa i'mal li âkhiratika ka'annaka tamûtu ghadan*). Di sini ada pesan bahwa urusan duniawi sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan agama. Jika dicampuradukkan, maka besar kemungkinan akan terjadi manipulasi terhadap agama itu sendiri.

Dalam konteks bernegara, Indonesia sebetulnya negara sekular, karena ia tidak menganut negara agama. Tetapi ia tidak sekular murni, karena dasar negara kita, Pancasila, telah menempatkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pilar utama. Hemat saya, Indonesia sebetulnya ingin pada posisi *in between,* yakni posisi di tengah-tengah antara posisi bukan negara agama (sekular), tetapi sangat mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang perilakunya terinspirasi oleh nilai-nilai agama.

Di negara-negara Eropa dan Amerika pun demikian. Kendati mereka lantang memproklamirkan dirinya sebagai negara sekular, tetapi nilai-nilai religiusitas sangat mewarnai perilaku masyarakat-

nya. Negara Eropa, misalnya, secara moral dan hukum mereka terinspirasi ajaran Katolik, ilmu pengetahuan dan nalarnya terinspirasi dari kebudayaan Yunani, dan estetika dari kebudayaan Eropa itu sendiri. Amerika juga demikian. Jika kita membaca buku-buku terbitan Amerika yang sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nuansa nilai-nilai Protestan sangat kental sekali. Bahkan untuk buku-buku bisnis sekalipun. Tanda mata uang mereka pun memiliki semboyan "In God We Trust".

Semangat awal sekularisme yang terjadi di Barat adalah pemisahan antara negara dengan gereja, karena pengalaman buruk di masa lalu atas dominasi gereja. Lantas sekularisme model seperti apa yang menurut Anda harus dijalankan oleh umat Muslim?

Sekularisme Eropa memang memiliki konteks kesejarahan tersendiri. Ia berbeda dengan konteks kesejarahan di negara-negara berbasis Muslim. Oleh karena itu, yang bisa kita ambil adalah spirit atau semangatnya, sedangkan aplikasi atau implementasinya harus kita formulasikan bersama. Turki dengan kepemimpinan baru

Sekularisasi tidak berarti orang harus meninggalkan ajaran agama, melainkan ajaran agama tertentu tidak mengganggu kenyamanan penganut agama yang lain. Sekularisasi bukan berarti tidak menjunjung nilai-nilai kebaikan, mereka sangat menghargai nilai-nilai kebaikan dan memiliki nilai-nilainya tersendiri. Hal ini bisa kita saksikan di beberapa negara yang dengan bangga mengatasnamakan dirinya sekular, tingkat korupsi mereka rendah dan pemerintahannya bersih, seperti Finlandia, Swedia, New Zealand, dan sebagainya.

saat ini, misalnya, mencoba memformulasikan kembali bagaimana Islam yang moderat beradaptasi dengan sekularisasi, berdialog dengan anggota-anggota Uni Eropa serta mencoba menyingkirkan sekularisme yang selama puluhan tahun diterjemahkan kalangan militer.

Proses kesejarahan sekularisme di Barat lahir karena penguasa gereja sekaligus juga penguasa negara. Terjadi tumpang-tindih mana wilayah gereja dan mana wilayah negara. Kekuasaan pun cenderung absolut, karena penguasa gereja merepresentasikan dirinya sebagai wakil Tuhan yang tidak bisa dikritik. Dari tumpang-tindih kekuasaan tersebut, maka pelbagai gejolak pun muncul pada Abad Pertengahan ini. Tapi, dari pelbagai gejolak tersebut muncul manusia-manusia besar. Di Prancis, misalnya, ada Montesquieu, Voltaire, Leibniz, dan sebagainya di mana mereka bisa disebut sebagai pemikir pendobrak dari masa kegelapan Eropa menuju abad ilmu pengetahuan dan pencerahan. Teori-teori negara pun muncul pada masa ini, di antaranya teori Montesquieu yang mendobrak absolutisme kekuasaan dan membagi kekuasaan melalui legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam hal ini, sekularisme Eropa melahirkan anak kandungnya yang lain, yakni ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan inilah kemudian lahir apa yang disebut sebagai Abad Pencerahan (*enlightment*).

Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa memang kesejarahan sekularisme di Barat berbeda dengan kesejarahan kita. Tetapi semangat yang harus kita ambil adalah bagaimana mereka dengan tegak mendobrak otoritarianisme kekuasaan atas nama Tuhan. Otoritarianisme atas nama Tuhan ini bisa terjadi pada agama manapun, tak terkecuali Islam. Dalam perjalanan sejarahnya, Islam pun berlumur kekerasan, bertarung sesama umat Islam sendiri dalam

memperebutkan kekuasaan. Mereka mengucapkan lafaz yang sama atas nama Tuhan ketika mereka berupaya saling menaklukkan.

Anak kandung sekularisme di Barat adalah penghargaan terhadap ilmu pengetahuan dan pada gilirannya melahirkan peradaban yang besar. Dari pasca-pencerahan ini, negara-negara di mana kebijakannya berbasiskan ilmu pengetahuan menjadi maju. Banyak umat Islam dari negara-negara berbasis Muslim menjadi imigran dan menimba ilmu di negara-negara Eropa, Amerika, Australia, dan lain-lain.

Saat ini (ketika transkripsi wawancara ini tengah saya edit) saya sedang di New Zealand. Saya menyaksikan sendiri bagaimana umat Islam di negara ini memiliki kemerdekaannya untuk beribadah, mereka sangat rukun dengan agama lain tanpa intervensi dari pemerintah setempat, hak-hak dasar mereka benar-benar dilindungi. Negeri ini amat memperhatikan hal-hal dasar dari kebutuhan warga negara, seperti kebutuhan makanan, hak atas air bersih, hak orang untuk bekerja, hak warga negara

Saya sebetulnya tidak menyukai kata 'isme', karena kata ini mengandung paham yang memutlakkan segala bentuk ideologi, agama atau yang lainnya. Sementara dalam agama atau ideologi ada paradoks-paradoksnya tersendiri. Jika kita membincangkan sekularisasi, maka yang harus kita cermati adalah gagasan dasar atau aspek filosofisnya yang ingin mencoba memisahkan mana ranah duniawi dan mana yang wilayah agama. Saya melihat bahwa sekularisasi sebetulnya mempunyai akar teologisnya dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan kejarlah dunia seolah-olah kita akan hidup selamanya dan kejarlah akhirat seolah-olah kita akan meninggal besok,(*I'mal li dunyâka ka'annaka ta'îsyu abadan wa i'mal li âkhiratika ka'annaka tamûtu ghadan).*

untuk merasa aman, dan kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara lainnya. Bahkan imigran Muslim dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ini karena mereka merasa aman, yang mungkin tidak mereka peroleh di negerinya sendiri.

Seringkali umat Islam *phobi* dengan kata sekularisme atau sekularisasi. Mereka yang *phobi* ini apakah sudah mempelajari akar-akar filosofisnya dan proses kesejarahannya? Saya khawatir mereka yang bersikap miring ini mempelajarinya dari informasi yang kurang akurat atau dari buku-buku yang memang paradigmanya sinis terhadap sekularisasi. Mereka ini pada umunya kalangan apologis. Untuk memahami gagasan tersebut, sangat baik apabila kita membacanya dari literatur sejarah Eropa pada Abad Pertengahan, karya-karya filsafat yang ditulis para filosof pada abad-abad ini atau karya-karya sastranya. Ini akan memperkaya kita bagaimana pergulatan negara-negara maju membangun dirinya hingga bisa seperti sekarang ini. Sekularisasi adalah bagian dari proses tersebut.

Kembali ke pertanyaan bagaimana sebaiknya sekularisasi diterapkan di negara-negara berbasis Islam? Menurut saya, sekularisasi sebaiknya tidak menghalangi seseorang untuk komitmen atau taat menjalankan agamanya, sebagaimana yang bisa kita lihat di beberapa negara sekular yang memberikan kebebasan warga negaranya untuk patuh terhadap ajaran agamanya. Dalam hal ini, sekularisasi tidak berarti orang harus meninggalkan ajaran agama, melainkan ajaran agama tertentu tidak mengganggu kenyamanan penganut agama yang lain. Sekularisasi juga bukan berarti tidak menjunjung nilai-nilai kebaikan. Dalam masyarakat yang menerapkan sekularisasi mereka sangat menghargai nilai-nilai kebaikan dan memiliki nilai-nilainya tersendiri. Hal ini bisa kita saksikan di beberapa negara yang dengan bangga mengatasnamakan dirinya negara sekular,

tingkat korupsi mereka rendah dan pemerintahannya bersih, seperti Finlandia, Swedia, New Zealand, dan sebagainya. Hanya saja negara tidak memiliki keberpihakan terhadap agama tertentu dan ia harus dalam posisi netral, yang menjamin bahwa hak-hak agama apapun akan dilindungi, baik ia mayoritas maupun minoritas.

Salah satu tesis yang dikemukakan oleh Abdullahi Ahmed an-Na'im adalah Islam bisa dengan mudah dipisahkan dari negara, namun tidak demikian halnya dari politik. Menurut An-Na'im, Islam akan lebih sulit untuk dipisahkan dari politik. Bagaimana tanggapan Anda?

Di negara-negara yang masyarakatnya mempunyai paham liberal, tingkat kepatuhan terhadap hukum dan aturan-aturan yang melekat di dalamnya sangat tinggi. Dalam beberapa hal, liberalisme ini memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab individu terhadap Allah. Di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan sebagai individu apa-apa yang telah kita perbuat selama kita hidup.

Mungkin an-Na'im benar bahwa Islam sulit dipisahkan dari politik, karena umat Islam mempunyai keyakinan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang holistik atau *kâffah*, yang mengajarkan kepada umatnya mulai dari urusan rumah tangga hingga urusan bernegara. Tetapi saya mempertanyakan, apa yang dimaksud dengan politik Islam? Apakah politik yang berbasis umat Islam, atau berbasis ajaran Islam? Jika berbasis umat Islam, maka pertanyaannya, Islam yang mana? Partai Islam saja di Indonesia lebih dari satu dan semuanya mengatakan partai Islam. Belum lagi variannya juga banyak, ada Islam NU, Muhammadiyah, Nahdhatul

Wathan, Persis, dan lain-lain. Satu sama lain dalam memandang politik juga berbeda-beda.

Sementara jika politik berbasis ajaran Islam, maka buat saya, upaya politik yang mengedepankan pemberantasan korupsi, perlindungan dan penegakkan terhadap hak-hak dasar manusia, perempuan maupun laki-laki, seperti hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi semua warga negara, hak untuk memperoleh rasa aman di negaranya, hak semua orang untuk bekerja dan memperoleh pendapatan yang layak dan hak untuk memperoleh pendidikan, semuanya adalah politik yang berbasis ajaran Islam. Karena ajaran Islam tidak membantah kebenaran dari argumentasi ajaran dan hak-hak yang diperoleh oleh manusia sebagai-mana yang disebut di atas.

Persoalannya, kepentingan politik dengan pendekatan hak-hak dasar manusia ini sering tidak menjadi agenda dan kepentingan partai-partai yang mengatasnamakan dirinya sebagai partai Islam. Mereka seringkali sibuk dengan permainan simbol Islam yang bersifat permukaan, sementara implementasi yang mengedepankan kepentingan dasar seluruh warga negara tanpa membedakan siapapun dan apapun agama, etnis dan seterusnya seringkali terabaikan. Karena itu, bagi saya *sumir* dan tidak jelas apa yang dinamakan politik Islam.

Selama ini sebagian orang Islam masih terperangkap oleh simbol-simbol Islam ketika ia menyebut politik Islam, tetapi mereka kurang peduli ketika pemerintahnya korup dan menggunakan uang publik untuk kepentingan dirinya. Akhir-akhir ini, misalnya, semua kita tahu bahwa beberapa pemerintah daerah banyak yang menggunakan dana daerah untuk kepentingan kampanye pemenangan dirinya dalam pemilihan bupati atau gubernur dengan seolah-olah

kampanye anti-narkotika, sosialisasi program pemerintah, dan sebagainya, terutama mereka yang sebelumnya telah berkuasa (*incumbent*). Namun demikian masyarakat sangat jarang mempersoalkannya dan bahkan melakukan pembiaran terhadapnya. Ini berbeda dengan negara-negara yang tingkat korupsinya rendah, karena mereka meyakini bahwa jika pemerintah korupsi, maka ia akan berimbas pada berbagai hal di mana yang paling dikorbankan adalah hak-hak warga negara dan berimplikasi kepada kebodohan, kemelaratan, keterbelakangan dan tidak ada keamanan dalam negerinya. Celakanya, pemerintah yang korup ini sering menggunakan simbol-simbol Islam atau bahkan repesentasi penguasa dari partai Islam.

Pluralisme adalah suatu keniscayaan dalam negara demokrasi. Artinya, pluralisme adalah anak kandung dari demokrasi. Pluralisme berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang, karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban negara adalah melindunginya dan kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di negaranya.

Di Eropa, karena agama tidak boleh masuk ke ruang publik maka agama harus diprivatisasi. Dengan adanya privatisasi agama, trend *yang kemudian muncul adalah terkikisnya peran agama dalam kehidupan masyarakat, seperti yang terjadi di Denmark, Prancis, dan di negara-negara Skandinavia lainnya. Apakah tidak muncul kekhawatiran bahwa jika sekularisme dijalankan di dunia Islam juga*

akan muncul fenomena serupa, di mana peran agama Islam semakin berkurang?

Meskipun agama menjadi wilayah privat di negara-negara sekular, sepanjang pencermatan saya, ia tetap mewarnai domain publik. Warna tersebut bukan dalam bentuk simbolnya, melainkan pada orientasi nilai dan kesadaran umatnya yang terwujud dalam cara berpikir, berperilaku dan bersikap. Dengan demikian, sebetulnya agama tidak menjadi marjinal sebagai acuan nilai, melainkan terdapat pengaturan yang ketat terhadap penggunaan simbol-simbol agama tertentu di wilayah publik. Misalnya di beberapa negara sekular terdapat aturan yang ketat di mana fasilitas publik milik pemerintah seperti sekolah negeri, rumah sakit dan tempat-tempat umum harus "steril" dari simbol-simbol agama. Mengapa? Karena jika ada simbol agama tertentu sepeti salib, maka kemungkinan umat Islam tidak merasa nyaman dengan fasilitas tersebut. Demikian pula sebaliknya. Ini sangat berbeda dengan yang terjadi di kita di mana ruang-ruang publik, bahkan di jalan-jalan raya sarat dengan simbol-simbol agama mayoritas. Di Serang, Banten, misalnya, kita menyaksikan lafaz-lafaz *al-Asmâ' al-Husnâ* mewarnai kota tersebut, padahal di antara penduduknya terdapat pemeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Konghucu, Budha dan Hindu. Ini mengesankan ketidakpekaan pemerintah terhadap pemeluk agama lain. Demikian pula yang terjadi di beberapa daerah lainnya. Kasusnya akan berbeda kalau fasilitas tersebut milik swasta. Mereka tidak masalah menggunakan simbol-simbol agama seperti ada lambang salib di sekolah Katolik atau lambang Islam di sekolah-sekolah Islam.

Seberapa penting sekularisasi dalam menumbuhkan gerakan perempuan?

Pertanyaannya, sekular yang mana? Jika pemerintahannya sekular, tetapi ia bersifat militeristik, rasis, dan pemerintahannya tertutup serta otoritarian, maka sangat sulit muncul gerakan perempuan. Pada masa pemerintahan Soeharto, sistem yang dianut adalah sekular, tetapi ia bersifat militeristik, karena itu gerakan perempuan tidak tumbuh pada masa-masa ini. Jikapun muncul, ia bersifat oposan dan gagasan-gagasannya tidak diakomodasi oleh pemerintah. Bahkan ia sering memperoleh stigma perempuan Gerwani yang dipandang buruk pada saat itu. Sebaliknya yang dominan adalah organisasi-organisasi perempuan yang bisa bekerjasama dengan pemerintah, karena organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau yang menjalankan program pemerintah.

> Memang kesejarahan sekularisme di Barat berbeda dengan kesejarahan kita. Tetapi semangat yang harus kita ambil adalah bagaimana mereka dengan tegak mendobrak otoritarianisme kekuasaan atas nama Tuhan. Otoritarianisme atas nama Tuhan ini bisa terjadi pada agama manapun, tak terkecuali Islam.

Gerakan perempuan bisa tumbuh jika negara tersebut menerapkan sistem demokrasi. Sebab, dalam demokrasi terdapat ruang untuk bernegosisasi dan dialog. Saat ini, misalnya, gerakan perempuan cukup berkembang dengan baik di Indonesia, karena menerapkan sistem demokrasi. Pada masa BJ Habibie telah dibentuk suatu mekanisme nasional untuk memperkecil tindak kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan yang berkomitmen pada pe-

negakan hak-hak asasi perempuan dengan dibentuknya Komnas Perempuan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid telah ditetapkan kebijakan jender *mainstreaming*. Pada pemerintahan Megawati Soekarnoputri (2004) telah disahkan aturan normatif yang menjadi desakan gerakan perempuan, yakni Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pelbagai kemajuan yang tumbuh di Indonesia ini seringkali menjadi contoh negara lain, misalnya Malaysia.

Gerakan serupa terjadi pula di Iran. Meskipun negara ini berasaskan Islam, tetapi sistem pemerintahannya cukup membuka ruang dialog dan negosiasi bagi gerakan perempuan. Karena itu, beberapa isu dan agenda gerakan bisa didesakkan menjadi kebijakan pemerintah. Sedang hasilnya adalah Undang-Undang Perkawinan Iran atau hukum domestiknya sangat melindungi perempuan. Bersamaan dengan itu pula, segala bentuk pemikiran feminisme cukup berkembang di sana.

Sebuah upaya serupa juga coba dilakukan di Aceh dengan melakukan interpretatsi ulang yang kontekstual terhadap sumber-sumber ajaran Islam. Karena teks-teks keislaman sebenarnya tidak kaku, melainkan ia bisa berinteraksi dan berdialog dengan zaman. Dengan demikian, yang ingin saya katakan adalah gerakan perempuan bisa tumbuh jika negara tersebut bersifat terbuka (*open society*) dan membuka ruang demokrasi.

Bagaimana Anda memahami Liberalisme?

Liberalisme adalah suatu pandangan di mana manusia adalah pusat. Karena ia merupakan pusat, maka ia sangat berharga sebagai makhluk Tuhan. Pandangan ini berimplikasi kepada adanya kewajib-

an negara untuk melindungi hak-hak dasarnya, sebagai konsekuensi atas penghargaan tersebut. Selain itu, liberalisme sangat menghargai kedaulatan atau otonomi individu. Individu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihan-pilihan yang berdasarkan pada hati nurani dan nalarnya sendiri.

Liberalisme adalah suatu pandangan di mana manusia adalah pusat. Karena ia merupakan pusat, maka ia sangat berharga sebagai makhluk Tuhan. Pandangan ini berimplikasi kepada adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasarnya, sebagai konsekuensi atas penghargaan tersebut. Selain itu, liberalisme sangat menghargai kedaulatan atau otonomi individu. Individu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan pilihan-pilihan yang berdasarkan pada hati nurani dan nalarnya sendiri.

Seiring dengan penghargaan atas hak-hak manusia, maka pelbagai kewajiban dan aturanpun dibebankan kepadanya. Antara hak, kewajiban dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antarmanusia menyatu di dalamnya, maka lahirlah hukum. Penghargaan dan ketaatan terhadap hukum ini sangat tinggi, karena hanya dengan kekuatan hukum inilah dan ketaatan terhadapnya keteraturan dan hak-hak dasar manusia bisa terjamin.

Bertalian dengan hal tersebut, saya ingin mengoreksi pandangan bahwa liberalisme adalah kebebasan yang tanpa batas. Liberalisme justru sangat menjunjung tinggi aturan-aturan yang berupa produk hukum. Karena itu, di negara-negara yang masyarakatnya mempunyai paham liberal, tingkat kepatuhan terhadap hukum dan aturan-aturan yang melekat di dalamnya sangat tinggi.

Dalam beberapa hal, liberalisme ini memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan tentang tanggung jawab individu

terhadap Allah. Di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan sebagai individu apa-apa yang telah kita perbuat selama kita hidup. Seluruh anggota badan kita akan menjadi saksi, mulai dari mulut, kaki, tangan, dan sebagainya. Kita tidak mengenal konsep kerahiban dan dosa kolektif di mana perbuatan individu ditanggung orang lain, kendati itu orang tua kita. Masing-masing kita adalah bertanggung jawab atas diri kita sendiri.

Sebagai sebuah negara, Indonesia sejak awal sebenarnya memeluk sistem demokrasi liberal. Namun di sebagian kalangan umat Muslim ada pandangan bahwa demokrasi liberal adalah model baru penjajahan Barat terhadap dunia Islam dan negrara-negra Dunia Ketiga, non-Barat – karena itu pula Soekarno menentang liberalisme. Bagaimana Anda menanggapi pandangan macam ini?

Konsep kolektivitas atau komunalisme di Indonesia memang sangat dijunjung tinggi, karena itu ia kurang menghargai kedaulatan atau otonomi individu. Kepentingan bersama harus diutamakan dibanding kepentingan individu. Pandangan ini melahirkan watak "gotong royong" yang oleh Soekarno disebut sebagai watak hakiki bangsa Indonesia. Watak komunalisme atau kolektivitas ini sering dianggap sebagai ganjalan untuk penegakan hak-hak asasi manusia.

Dalam penegakan demokrasi, sebetulnya kita mempunyai modal sosial yang sangat berharga yang sudah dipraktikkan sekian lama oleh masyarakat kita, terutama di desa-desa, yakni pemilihan kepala desa secara langsung. Sekarang ini mekanisme tersebut diperluas dengan pemilihan langsung terhadap bupati, gubernur dan presiden. Jadi, pemilihan pemimpin pemerintahan secara

langsung sebagai sebuah mekanisme demokrasi sebetulnya memiliki akar kultural di tengah-tengah masyarakat. Memang kita perlu melakukan perbandingan dengan negara-negara yang tidak hanya mengutamakan individu seperti negara-negara Barat, tetapi juga ke negara-negara berbasis Islam yang sudah menerapkan sistem demokrasi.

Pluralisme sering disalahpahami oleh masyarakat sebagai sebentuk sinkretisme dan relativisme. Sebagai sinkretisme, pluralisme dianggap akan mencampuradukkan akidah, sedangkan sebagai relativisme, pluralisme dianggap akan merelatifkan kebenaran agama. Bagaimana Anda memahami pluralisme?

Pluralisme berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang, karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban negara adalah melindunginya dan kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di negaranya.

Pluralisme adalah suatu keniscayaan dalam negara demokrasi. Artinya, pluralisme adalah anak kandung dari demokrasi. Pluralisme berarti perlindungan negara terhadap hak-hak warga negaranya untuk memeluk agama sesuai dengan apa yang diyakininya. Negara tidak bisa menghakimi keyakinan seseorang, karena keyakinan seseorang atau kelompok adalah hak yang tidak bisa diganggu gugat. Kewajiban negara adalah melindunginya dan kewajiban warga negara untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berlaku di negaranya.

Bentuk lain dari pluralisme adalah penghargaan, saling memahami dan berdialog dengan masyarakat yang memiliki keyakinan atau organisasi keagamaan yang berbeda. Bentuk konkretnya adalah bekerja bersama-sama untuk memecahkan persoalan-persoalan kemanusiaan. Di beberapa daerah di Indonesia yang penduduknya majemuk secara agama, wujud konkret dari pluralisme sebenarnya sudah banyak dilakukan. Di antaranya tradisi yang tumbuh di beberapa daerah yang penduduknya majemuk secara agama, pluralitas begitu rupa dirayakan. Di Lombok, misalnya, ada tradisi gotong royong antara umat Hindu dengan umat Islam untuk membangun atau memperbaiki rumah bagi orang-orang miskin. Hal serupa di Flores yang mayoritas Katolik, tetapi mereka membantu umat Islam untuk membangun masjid. Di Manado juga demikian. Umat Islam di sana membantu pembangunan gereja yang dibutuhkan oleh orang-orang Kristen.

Kemudian apakah seorang pluralis cenderung sinkretis? Dalam hal ini saya setuju dengan pendapat Diana Eck bahwa pluralisme tidak untuk menihilkan atau merelatifkan agama, melainkan agama sebagai sumber kekayaan ajaran, kekayaan nilai dan dapat memberikan insipirasi peradaban dan kemanusiaan. Seorang pluralis tidak harus sinkretis. Dia tetap bisa berkomitmen pada agamanya, tetapi akan sangat mengapresiasi dan menghargai orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Ibarat yang sering saya sampaikan adalah baju orang lain bagus, tetapi ia belum tentu cocok buat kita; dan baju yang kita pakai yang menurut kita lebih bagus lagi, belum tentu bagus buat orang lain. Persepsinya tergantung si pemakai.

Pada satu sisi, kita berhadapan dengan realitas yang plural, sementara pada sisi lain, kita menghadapi pemerintah yang tidak netral ditambah kapasitas negara lemah, akibatnya tidak jarang terjadi berbagai kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas, seperti tindak pengusiran, pengrusakan dan pembakaran properti sebagaimana dialami Ahmadiyah, komunitas Eden, gereja, dan lain sebagainya. Maka gagasan pluralisme menjadi sangat penting dan relevan di tengah kemajemukan bangsa yang belakangan kian tampak porak-poranda. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?

Kita sebetulnya sudah meratifikasi Deklarasi Universal HAM yang di dalamnya terdapat pasal bahwa setiap negara yang telah menandatangani deklarasi tersebut akan menjamin hak-hak warga negaranya untuk memeluk keyakinan apapun. Karena itu, jika mengacu kepada apa yang telah ditandatangani oleh pemerintah Indonesia, maka kekerasan atau perlakuan buruk terhadap kelompok-kelompok seperti Ahmadiyah, komunitas Eden, perusakan gereja seharusnya tidak terjadi. Jikapun terdapat perselisihan di kalangan umat Islam mengenai apakah Ahmadiyah Islam atau bukan, maka hal tersebut adalah urusan internal umat Islam yang mungkin bisa diselesaikan di kalangan internal umat Islam sendiri. Jika hal tersebut membutuhkan bantuan pemerintah, maka pemerintah seharusnya hanya berfungsi sebagai fasilitator dan mediator untuk mendamaikan perselisihan tersebut, tetapi tidak untuk berpihak kepada salah satunya. Sebab, jika negara sudah berpihak, maka salah satu pihak akan merasa diperlakukan tidak adil.

Pelbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat terhadap kelompok-kelompok tersebut juga berkaitan dengan lemahnya hukum kita. Bagaimanapun perusakan properti

yang dimiliki oleh siapapun adalah pelanggaran hukum dan tindakan kriminal. Atas kapasitas apa kita menghakimi keyakinan orang lain sebagai salah dan kita benar? Tindakan tersebut adalah sebentuk keangkuhan dan arogansi, di mana semua ajaran agama tidak membenarkan sikap tersebut.

Dialog antaragama atau bentuk-bentuk kerjasama lain ke arah pemahaman satu sama lain atau toleransi bukanlah sesuatu hal yang baru dilakukan saat ini, melainkan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Namun, sesering dialog itu dilakukan sesering itu pula toleransi dilanggar. Pertanyaannya, apakah yang menjadi kendala adalah agama itu sendiri ataukah budaya kita yang memang tidak bisa toleran?

Salah satu prasyarat dari dialog antaragama adalah sikap yang rendah hati untuk mengakui bahwa diri kita penuh keterbatasan, termasuk keterbatasan dengan apa yang kita yakini. Apa yang menjamin bahwa keyakinan keagamaan kita benar? Maka yang selalu harus kita upayakan adalah mencari kebenaran, tetapi kebenaran yang hakiki adalah milik Allah semata. Sikap seperti ini akan berimplikasi pada keterbukaan kita untuk menerima partikel-partikel kebenaran di luar diri kita. Di situlah kemungkinan adanya titik temu antartradisi dan antaragama.

Kegagalan dialog antaragama selama ini adalah karena dialog hanya bersifat seremonial, terkadang pemerintah yang menyelenggarakan, bukan inisiatif dari masing-masing umat beragama itu sendiri. Dialog agama yang sejati adalah dialog yang harus berangkat dari ketulusan hati masing-masing pemeluk agama bahwa kita

mengakui adanya keterbatasan, tetapi sekaligus juga mempunyai pelbagai kelebihan untuk saling berbagi.

Dialog ini tidak hanya dilakukan antarpemeluk agama-agama besar saja, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, tetapi sangat perlu juga dilakukan terhadap kepercayaan-kepercayaan lokal yang sudah sekian ratus, bahkan beribu tahun hidup di beberapa daerah di Indonesia. Adalah hak mereka untuk menjaga dan memelihara kepercayaannya, sebab jika tidak mereka pelihara, komunitas mereka bisa punah. Selama ini terdapat distingsi bahwa mereka bukan agama dan tampak arogansi dari sebagian orang dengan mengatakan mereka sebagai masyarakat primitif, penyembah berhala dan lainnya. Padahal, bisa jadi mereka adalah pewaris dan penjaga tradisi dari kultur agama-agama di Indonesia yang selama ini cenderung tergerus oleh agama-agama yang oleh Huston Smith dikategorikan sebagai agama Barat (Kristen, Katolik dan Islam).

Budaya kita sebetulnya adalah budaya yang sangat terbiasa berinteraksi dengan pelbagai peradaban dan kebudayaan. Interaksi dengan India pada zaman dulu melahirkan masyarakat Hindu dan Budha yang merupakan mayoritas. Bahkan kerajaan-kerajaan Hindu pernah berjaya dan melahirkan warisan besar di negeri ini seperti Candi Borobudur dan filsafat-filsafat hidupnya. Bahkan semboyan negara kita, *Bhinneka tunggal ika*, adalah warisan dari filsafat tersebut. Demikian pula kebudayaan Islam yang dibawa oleh Gujarat dan Cina melahirkan masyarakat Islam yang saat ini mayoritas. Kebudayaan Barat yang dibawa oleh kolonial ratusan tahun lamanya juga melahirkan interaksi tersendiri yang sampai saat ini warisan tersebut masih tersisa.

Bagaimana Anda menatap Indonesia ke depan?

Pertama, Indonesia harus menyembuhkan penyakit utamanya, yakni mental korupsi, terutama pemerintahannya. Mengapa? Karena korupsi ini ibarat penyakit kanker hati yang menjalar ke seluruh bagian tubuh, dan semua tubuh kita menjadi rusak karenanya. Pemerintahan yang korup akan berakibat pada terampasnya hak-hak pelayan negara untuk memperoleh gaji yang pantas dan hak-hak utama warga negara karena ketidaktersediaan dana untuk memperoleh pendidikan yang baik, kesehatan yang memadai, makanan yang layak, yang semuanya itu berakibat pada sumber daya manusia (SDM) warga negaranya. Jika SDM masyarakat kita lemah, maka tatanan negara ini tidak akan pernah kuat, sebagus apapun aturan yang diberlakukan. Jika masyarakatnya tidak kuat, maka jangan berharap negeri ini bisa kuat dan memiliki martabat di antara pergaulan bangsa-bangsa di dunia internasional. Kita sering sedih karena banyak TKW dan TKI kita diperlakukan tidak manusiawi di negeri orang, tetapi kita sering lupa yang terpenting dari semua itu adalah kesiapan sumber dayanya untuk bersaing dalam dunia kerja di pasar internasional.

Kedua, sistem demokrasi dan pilar-pilarnya harus difungsikan sebagaimana semestinya. Misalnya, bagaimana pers tetap independen dan berfungsi benar untuk mengontrol kerja pemerintah. Partai-partai politik bisa melahirkan kader-kader negarawan yang akan melahirkan calon pemimpin negara ke depan. Kuatnya *civil society* yang memiliki kemandirian dan sekaligus bisa mengontrol kebijakan negara dan implementasinya. Saat ini memang kita masih dalam proses belajar menuju ke sana. Bahwa di dalamnya kita mengalami tantangan-tantangan, maka sebaiknya dilihat sebagai

bagian dari proses belajar yang mungkin suatu ketika akan ditemukan kematangannya.

Ketiga, kita harus mampu memilih para pemimpin pemerintahan yang benar-benar mau bekerja untuk memperbaiki bangsa dan martabat masyarakat dengan segala risiko-risikonya, dan bukan untuk berorientasi status, apalagi mencari jabatan. Karena itu, ketika kita akan melakukan penjaringan calon pemimpin, maka harus ditetapkan dulu kualifikasi apa yang dibutuhkan saat ini oleh bangsa Indonesia, atau oleh daerah tertentu jika ia pemimpin daerah. Jadi, sebaiknya pemilihan pemimpin berangkat dari kualifikasi dan bukan dari orangnya.

Jika tiga hal ini saja bisa kita laksanakan, Insya Allah, ke depan Indonesia bisa lebih baik. *Wallâhu A'lam!*

Wawancara dilakukan di Pamulang, 12 Agustus 2007

Daftar Isi Buku 1 sampai 4

Ucapan Terimakasih viii
Membela Kebebasan Beragama: Catatan Pengantar xi
Ihsan Ali-Fauzi, Samsu Rizal Panggabean, Trisno S. Sutanto

Percapakan dengan:

Budhy Munawar-Rachman xlvi
M. Dawam Rahardjo 2
Abd A'la 39
Abdul Hadi WM 68
Abdul Moqsith Ghazali 95
Abdul Munir Mulkhan 135
Abdurrahman Wahid 168
Ahmad Suaedy 184
Ahmad Syafii Maarif 222
Azyumardi Azra 246
Bahtiar Effendy 271
Badriyah Fayumi 304
Benjamin F. Intan 336
Djohan Effendi 372
Elga Sarapung 420

F. Budi Hardiman 476
Fachry Ali 520
Faqihuddin Abdul Kodir 551
Farid Wajidi 595
Franz Dahler 617
Franz Magnis-Suseno 663
Fuad Jabali 707
Gadis Arivia 736
Hamid Basyaib 771
Hamka Haq 817
Haryatmoko 848
Husein Muhammad 876
Ichlasul Amal 928
Ihsan Ali-Fauzi 951
Ioanes Rakhmat 980
Jajat Burhanudin 1022
Jalaluddin Rakhmat 1053
Jamhari Makruf 1078
Kautsar Azhari Noer 1110
Komaruddin Hidayat 1146
Lies Macoes-Natsir 1196
Lily Zakiyah Munir 1230
Lutfhi Assyaukanie 1282
M. Amien Rais 1311
M. Amin Abdullah 1327

M. Quraish Shihab 1359
M. Syafi'i Anwar 1382
Maman Imanul Haq Faqieh 1420
Maria Ulfah Anshor 1459
Martin Lukito Sinaga 1491
Masdar Farid Mas'udi 1526
Melani Budianta 1541
Meuthia Ganie-Rochman 1565
Moch. Qasim Mathar 1586
Mohammad Imam Aziz 1626
Muhammad Tholhah Hasan 1650
Nasaruddin Umar 1685
Neng Dara Affiah 1708
Nur Ahmad Fadhil Lubis 1730
Rumadi 1761
Said Aqiel Siradj 1803
Saiful Mujani 1838
Samsu Rizal Panggabean 1868
Siti Musdah Mulia 1898
Siti Ruhaini Dzuhayatin 1921
St. Sunardi 1955
Syafiq Hasyim 1982
Syamsul Arifin 2006
Taufik Adnan Amal 2030
Trisno S. Sutanto 2053

Ulil Abshar-Abdalla 2082
Yanti Muchtar.....2122
Yudi Latif.....2152
Zainun Kamal.....2187
Zuhairi Misrawi.....2234
Zuly Qodir 2267

Project
emokrasi.com
kaan Digital

Indeks

A

Aa Gym
Abad Pencerahan
Abad Pertengahan
Abbasiyah
Abdul Halim Mahmud
Abdul Kahar Mudzakkir
Abdul Karim Amrullah
Abdul Karim Soroush
Abdul Malik bin Marwan
Abdul Rauf Singkel
Abdul Shamad al-Palimbani
Abdulhamid Mutwalli
Abdulkarim Soroush
Abdullah Ahmad
Abdullah ibn Zubair
Abdullah Puteh
Abdullahi Ahmed An-Na'im
Abdurrahman ibn 'Auf
Abdurrahman ibn Muljam
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)
Abidah Maksum
Abied al-Jabiri
Aborigin
aborsi
Abou el-Fadl
ABRI
absolutely relative
absolutisme
Abu al-Wafa
Abu Bakr
Abu Hanifah
Abu Hurairah
Abu Lahab
Abu Nawas
Abu Sufyan
Abu Yusuf
Abul Kalam Azad
Aburizal Bakrie
abuse of power
accountable politics
Aceh
Adabiyah (madrasah)
Adam Malik
Adnan Buyung Nasution
adult tv
Affandi

Democracy Project
www.abad-de
Perpusta

affirmative action
Afghani, al-
Afghanistan
afinitas
Afrika
"agama sekular"
Agus Salim
Agustinus
ahimsa
ahl al-bayt
ahl al-hadîts
ahl al-hall wa al-'aqd
ahl al-kitâb
Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah
Ahmad Dahlan (Kiai)
Ahmad ibn Hanbal
Ahmad Khan
Ahmad Mushadeq
Ahmad Sahal Mahfudz
Ahmad Suaedy
Ahmad Sumargono
Ahmad Syafii Maarif
Ahmad Wahib
Ahmadinejad
Ahmadiyah
ahwâl al-syakhshîyah, al-
Aisyah
Ajinomoto
AKKBB
Akta Filipus
akuntabilitas
Al Gore
Alamsyah Prawiranegara
Ali Abd al-Raziq
Ali ibn Abi Thalib (Imam Ali)
Ali Imron
Ali Jinnah
Ali Khamenei
Ali Syariati
Aljazair
Alkitab
Allen, Judith
Alois A. Nugroho
Althaus
altruisme
Alwy Shihab
amar ma'rûf
Ambon
Amerika Latin
Amerika
Amien Rais
Amin Abdullah
Amina Wadud
Amir Ali
Amrozi
Amstrong, Karen
Ananda Marga
Andalusia
Anderson, Bennedict
Anglican Church
Anglikan
animisme
antidote
antikorupsi
antroposentris
ANTV

Anwar Sadat
apartheid
APBN
Appenzell
'aql al-'ilmî, al-
'aql al-falsafî, al-
'aql al-lâhûtî, al-
'aql al-târîkhî, al-
Arab (budaya)
Arab Saudi
Arabisasi
Arifin Ilham
Aristoteles
Aristotelian
Arkoun
Arswendo Atmowiloto
Arsyad al-Banjari (Syekh)
arus radikalisasi
As'ad Syamsul Arifin (Kiai)
asbâb al-nuzûl
asbâb al-wurûd
Asghar Ali Engineer
ashḥâb al-kahf
Asia
Asy'ari, al-
Asy'ariyah
ateisme
Atho' Mudhar
Attaturk, Kemal
aufkalrung
Australia
Austria
axiologi
Azhar, al-
Azyumardi Azra

B

Babad Diponegoro
Baghdad
Baghdadi, al-
Bahrain
Bali
Bandung
Bangladesh
Bani Aus
Bani Nadzir
Bani Qainuqa
Bani Quraizhah
Bani Umayyah
Banjarmasin
Bank Islam
Bank Muamalat
bank syariah
Banten
Bantul
Barth, Karl
Basrah
Bassam Tibi
Batak
bayi tabung
Beatty, Andrea
Beijing Platform
Belanda
Bell, Daniel
Bellah, Robert N.

bellum omni contra omnes
Benda, Harry J.
Benny Susetyo (Romo)
Berger, Peter L.
Berlin, Isaiah
Bernas (harian)
Bertrand, Jacques
Beshara School
beyond the limit of intelligent
beyond the scope of socioloy
beyond the traditional understanding
Bhagavad Gita
Bhinneka Tunggal Ika
biblical and theological foundation
Biblical argument
Bielefeldt, Heiner
biodiversitas
Black Muslim
BLBI
Bonaparte, Napoleon
borjuis
Borobudur (candi)
Bosnia
Bourdieu, Pierre
BPUPKI
Brahma Kumaris
Brigham Young University
Brunei Darussalam
budaya marginal
Budha
Budhisme
Budhy Munawar-Rachman
Bughyat al-Murtasyidîn
Bugis
Bulgaria
Bush, George W.
Bush, George

C

California
Calvin, John
Calvin, Yohanes
Calvinisme
capacity state
capital market
Caputo, John D.
Carrefour
Casanova, Jose
Castles, Lance
Catatan Pinggir
Catherine
CEDAW
celebrating the differences
CePDeS (Center for Pesantren and Democracy Studies)
Cerita 1001 Malam
Chang Hai Chi
Chicago University
Chile
Chomsky, Noam
Christlich Demokratsche Union (CDU)
Christliche Volkspartei (CVP)
Cina

citizen rights
civic education
civic liberties
civic religion
civil courage
civil liberties
civil liberty
civil rights
civil society
civil war
Cixous, Helene
clash of civilization
clash of religions
Clinton, Hilarry
co-existence
Cokro Aminoto
collective action
collective aspiration
collective identity
collective memory
common denominator
common virtue
consociational democracy
content of law
context of discovery
context of justification
contradictio in terminis
Cordoba
Cox, Harvey
creative pro-existence
crime by ommision
cross culture fertilization
Crowder, George
cultural broker
cultural capital
cultural identity
cultural mandate
cultural revivalism
culture of law
cyclic decline

D

D'Sa, Francis
Da Vinci
Dali, Salvador
Damaskus
dâr al-amn
dâr al-ḥarb
dâr al-Islâm
dâr al-Kufr
dâr al-salâm
Darwin, Charles
    teori—
Daud Beureueh
Daud Patani
Dawkins, Richard
dawlah islâmiyah
Dayak
de Tocqueville, Alexis
decline of religion
deisme
deklarasi Kairo
dekriminalisasi
deliberasi
demistifikasi

Democracy Project www.abad-de Perpusta

demitologisasi
democracy with adjective
demokrasi
    system—
demokratis
Denmark
Denneth, Daniel
Departemen Agama
Departemen Kelautan dan Perikanan
Departemen Luar Negeri
Departemen Penerangan
Depdiknas
derogable rights
Derrida
desakralisasi
Deutero-Kanonika
devide et impera
Dewan Gereja-gereja se-Dunia
Dewan Pers
Dewan Revolusi Kultur Islam
DI
diferensiasi
dimensi "surgawi"
Din Syamsuddin
direct democracy
disadvantage
disenchantment of the world
dislike relationship
Djohan Effendi
DKI Jakarta
doctrina domus
dogmatis
doktrin poligami
DPR
DUHAM
Dunia Ketiga
dzimmî

E

ecclestical religion
economical capital
Economist
Eden, komunitas
Edison, Thomas Alfa
edukasi (proses)
Einstein
Eka Darmaputera
eklektisisme
ekonomi liberal-kapitalis
ekonomi sosialis
eksklusivisme
ekstremisme
ekumenikal
electoral threshold
Elijah Muhammad
emosi traumatis
Empedokles
enlightened despot
enlightenment
epistemologi
equal citizen
equilibrium
Erdogan
Eropa

eshtablished cruch
Essack, Farid
Ethiopia
etnonationalism
euforia lokalitas
Eurocentris
Evangelical
Evangelis (gerakan)
existential security

F

fanatisme
Fariduddin al-Attar
fasisme
Fatimah Mernisi
Fatimiyah
Fattah
Fauda, Farag
Fazlur Rahman
Feilard, Andre
Feith, Herbert
feminis (gerakan)
feminisme
feodalisme
Ferry, Luc
filantropi
Filipina
Finlandia
fiqh jinâyah
fiqh oriented
FIS
Fitna
fitnah al-kubrâ, al-
FKUB
Ford Foundation
formal arrangement
formal arrangment
formalisasi syariah
Foucault, Michel
FPI
Frans Dahler
Franz Magnis Suseno (Romo)
Freedom House
Freedom Institute
freedom of belief
freedom of expression
freedom of religion
freedom to act
freedom to choice
freedom to expression
Freeport
Friedman, Milton
friendly religion secularization
Fuad Hasyim, K.H.
FUI
Fukuyama, Francis
fundamentalisme
fundamentalisme agama
fundamentalisme religius
fundamentalistik
Fushûsh al-Hikam
fusion of horizons

G

G 30 S/PKI
Gadamer
Galileo
GAM
Gamal Abdul Naser
gamelan
Gandhi
Gates, Bill
GBHN
Gedong (ibu)
Geertz, Clifford
genocide
gentlement agreement
gereja Ortodoks
Ghazali, al-
ghetto
Giddens, Anthony
Gilligan, Carol
globalisasi
Globalizing Indonesian Local Islam
Goenawan Mohamad
Gogarten, Friedrich
golden rule
Goldziher, Ignácz
Golkar
good governance
good government
Gospel's mandate
grammar of action
Granger, Gilles-Gaston
Griffin, David Ray

H

Habasyah
Habermas
Habibie
Habibie Center
ḥablun min Allâh
ḥablun min al-nâs
Hadikusumo, TB.
haji
Hajjaj ibn Yusuf al-Tsaqaf
halal *food*
Hallaj, al-
HAM
Hamas
Hamilton, Alexander
Hanafi (mazhab)
Hanafi, Imam
Hanbali
ḥanîf
Hantington
Harun (Nabi)
Harun al-Rasyid
Harun Nasution
Harvard Divinity School
Harvard University
Hasan Basri
Hasan Hanafi
Hassan al-Banna
Hasyim Asy'ari
Hasyim Muzadi
Hayek, Friedrich August von
Hayy ibn Yaqzhan

HB Jasin
Heather Sutherland
Hefner, Robert W.
Hegel
Heidegger
Henry VIII
hermeneutika (metode)
Hermes
Hick, John
Hidayah (majalah)
Hidayat Nur Wahid
hifzh al-'aql
hifzh al-bî'ah
hifzh al-dîn
hifzh al-mâl
hifzh al-nafs
hifzh al-nashl
hifzh al-nasl
Hindia-Belanda
Hindu
Hirsch, E.
Hitler
HIV-AIDS
HMI
Hobbes
Hobsbawm, Eric
Holoyake, George
homo homini lupus
Hongkong
Hourani, Albert
HT (Hizbut Tahrir)
HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)
hudûd
hukum adat
human trafficking
humanities
Huntington
Hurgronje, Snouck
Husein Muhammad
Husein Umar
Hustler (majalah)
hypothetical imperative

E

IAIN
Ian Saphiro
Ibn Arabi
Ibn Hisyam
Ibn Ishak
Ibn Jarir al-Thabari
Ibn Katsir
Ibn Khaldun
Ibn Qayyim
Ibn Taimiyyah
Ibn Thufail
Ibrahim (agama)
ICCPR
ICIP
ICMI
ICRP
identity marker
ideologi liberal
ideologi pembangkangan masyarakat
ideologisasi

Idris (Nabi)
Idul Adha
Idul Fitri
ijmâ'
ijtihad
Ikhwanul Muslimin
illiberal democracy
IMF
imperialisme
incommensurability
India
indigenous value
individual function of religion
individualisme
indoktrinasi
Indonesia
inferiority complex
Inggris
Inglehart
Injil
Injil Filipus
Injil Maria Magdalena
Injil Thomas
Injil Yudas
inklusivisme
inkuisisi
Interfidei
internal colonialism
Internal Security Act (ISA)
international human rights law
international humanitarian laws
interpersonal trust
intifâdah
Inul Daratista
IPNU
Iqbal
Irak
Iran
Iranian Corner
Irigaray
Irsyad, al-
Irwandi Yusuf
Isa al-Masih
ISEAS
Iskandar Muda
Islam:
  budaya—
  ekonomi—
  formalisasi syariat—
  —Abad Pertengahan
  —abangan
  —Jamaah
  —liberal
  —progresif
  —radikal
  kerajaan—
  negara—
  nilai-nilai—
  sejarah—
  tradisi—
islamic textual civilization
islamisasi
  proses—
Islamisme
Islamizing Capitalism
islamo-fascism

Ismail al-Faruqi
Isra Mi'raj
Israel
Italia
ITB
ITS
ittibâ' muthlâq

J

Ja'far Umar Thalib
Jainisme
Jalaluddin al-Rumi
Jalaluddin al-Suyuthi
Jalaluddin Rahmat (Kang Jalal)
Jamaah Islamiyah
Jamal (perang)
Jawa Barat
Jawa Pos
Jawa Timur
Jefferson, Thomas
Jembatan Besi
Jepang
Jerman
Jesuit (ordo)
JI
jihad
JIL
jilbab
Jilbab Award
Jombang
Judeo-Christian Ethic
Judeo-Kristiani
jumhûr
Jurgensmeyer, Mark
Just War
Justice and Development Party
Jusuf Kalla
juz'iyât

K

Kahar Muzakkar
Kaharingan
Kahin, George Mc T
kalimah sawâ'
Kamboja
Kanada
Kant, Immanuel
KAPAL Perempuan
kapitalisme
Kartini
Kasman Singodimedjo
Katolik
Kaum Muda
Kaum Tua
KB
kearifan lokal
Kebangkitan Kristus
kebenaran teologi
Kedaulatan Rakyat
keindonesiaan
Kejawen
Kennedy, John F.
Kepel, Gilles
Kerry, John

Khadijah
Khairil Anwar
Khairiyah Hasyim
khalîfah fî al-ardl
Khandaq (perang)
Khawarij
Khazraj
KHI
khilâfah (konsep)
khilâfah (system)
khilâfah fî al-ardl
khilâfah islâmiyah
Khomeini
Khulafâ' al-Râsyidûn, al-
Khwaja Jamal
killing the others
Kinabalu
kitab kuning
Kittel, Gerhard
kloning
KNIP
knowledge management
kolonialisme
Komaruddin Hidayat
Komnas Perempuan
Kompas
komprehensif-obyektif
komunikasi rasional
komunisme
Komunitas Eden
Konferensi Pekabaran Injil
Konfusianisme
Konfusius
Konghucu
konservatif
konservatisme
Konsili Nicea
Konsili Vatikan I
Konsili Vatikan II
konsumerisme
kontraproduktif
Korea Selatan
"korporatokrasi"
korupsi
kosmopolitanisme
KPI
KPK
Krisdayanti
Kristen
Kristenisasi
Kristiani
    tradisi—
Kroasia
kuantitatif-eksistensialis
Kudus
Kufah
Kuhn, Thomas
KUHP
kullîyât al-khamsah, al-
Kung, Hans
Kuntowijoyo
Kupang
Kuwait
Kuyper, Abraham

L

label syariah
Laclau, Ernesto
laicití
laissez faire
Laskar Jihad
Laurent, Sophia
law enforcement
LDII
Lee Kuan Yew
legal pluralism
Leibniz
Lembaga Survei Indonesia
Levinas
Lewis, Bernard
Lia Aminuddin (Lia Eden)
Libanon
liberal fundamentalism
liberal mind
liberal rights
liberal thinking
liberalisasi
liberalisme
—agama
—ekonomi
Liga Arab
Lijphart, Arend
Lindholm, Tore
linear decline
Little, David
Liu, Lucy
local democracy
local wisdom
Locke, John
Lombard, Denis
Lombok
London School of Economic
Long, Jeffrey D.
Lopez, Jennifer
LP3ES
LSAF
LSM plat merah
Lubarsky, Sandra B.
Luhmann, Niklas
Luther, Martin
Lutherian (reformasi)
Lybia

M

M. Chatib Basri
M. Dawam Rahardjo
M. Hatta (Bung Hatta)
M. Natsir
M. Rasyidi
M.M. Billah
Ma'ruf Amin
MADIA
Madinah
Madura
Magelang
Mahatir Muhammad
Mahfud Anwar, KH.
Mahkamah Agung
Mahkamah Tinggi Syariah

Democracy Project
www.abad-de
Perpusta

Mahmakah Konstitusi (MK)
Mahmud Ayyub
Mahmud Shalthout
Mahmud Thaha
Majalengka
Majelis Tarjih Muhammadiyah
majority rule
Majusi
Makassar
Maksum Ali (Kiai)
Malay Moslem
Malaysia
Malik ibn Anas (Imam Malik)
Maliki (mazhab)
Mangun (Romo)
Manokwari
mansûkh
Mansur, al- (khalifah)
manthiq
maqâshid al-syarî'ah
marginalisasi sosial
Mariah al-Qibthiyyah
Maroko
Martin, David
Marxis
Marxisme
Masdar F. Mas'udi
mashlahah al-'âmmah, al-
Masyumi
materialisme
Matra (majalah)
Maturidiyah
Maududi, al-
Mawardi, al-
mazhab fikih
McDonald
McDonaldization
McIntosh
McIntyre, Alasdair
MDG's (Millenium Development Goal's)
media watch
Megawati
Mekah
Meksiko
Merauke
Merkel, Angela
Mesir
Mill, John Stuart
millah Ibarhim
Miller, Robert J.
Minangkabau
minimal state
minimum state
minority complex
minority protection
minus malum
misoginis
mistisisme
MMI
mobilisasi sosial
moderat secularism
moderating effect
Moehammad Natsir
Moh. Rajab Thayyib Erdogan
money politic

monisme
Monitor (Tabloid)
monoteisme
Monroe, Marilyn
Montesquieu
moral argument
moral decadence
moral handicap
moral judgement
moral obstacle
moral pluralism
moral revivalism
Mormon
MPR
mu'âmalah
Mu'tasim Billah, al-
Mu'tazilah
Muawiyah
Mudji Sutrisno (Romo)
Muhajirin (kaum)
Muhammad Abduh
Muhammad Ali (petinju legendaris)
Muhammad Assad
Muhammad ibn Abdul Wahhab
Muhammad ibn Hasan al-Syaybani
Muhammad Imarah
Muhammad Salim al-Awwa
Muhammad Thahir bin 'Asyur
Muhammad Yunus
Muhammadiyah
MUI
fatwa—
MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura)
mujâhadah
mujtahid
Mukhairiq
Mukti Ali
multicultural act
multicultural policy
multikulturalisme
multiple affiliation
multiple identity
Munawir Syadzali
muqallid
Murray, John Courtney
Musa (Nabi)
Mushadeq
Muslim Abdurrahman
Mustafa Kemal
Mustasyfâ, al-
Musthofa Bisri (Gus Mus)
mutawâthir
Muwaththa', al-
My Forbiden Face

N

Naguib al-Attas
nahy munkar
naked public square
Nash, Manning
nâsikh
Nasr Hamid Abud Zayd

Nasr, S.H.
Nasrani
Natal
nation building
National Guard
National University of Singapore (NUS)
natural liberty
natural religion
Nawal El-Sadawi
Nawawi al-Bantani
Nazi
Nazisme
Negara Madinah
negative immunity
negative theology
Nehru
nemesisi of power
neo-konservatif
neo-liberalisme
neopositivisme
Nestorian
Neuhaus, John Richard
New Age
New York
New York Times
New Zealand
Nicholls, John
Nicholson
nihilisme
NII
nilai-nilai universal
Nizham al-Mulk
NKRI
non-derogable rights
Norris
NTT
NU
numinosum
Nurcholish Madjid (Cak Nur)
Nurcholish Madjid Memorial Lecture
Nuruddin Ar-Raniri
Nusa Tenggara Barat (NTB)
Nusantara
nuzûl al-Qur'ân
Nyepi (hari)

O

Obama, Barack
objektivikasi
official religion
Ohio University
Oman
ontologi
option for the poor
Opus Dei
Orde Baru
Orde Lama
Orde Reformasi
organized religion
ortodoksi
Osama bin Laden
otonomi daerah
otoritarianisme

otoritas keagamaan
over simplified

P

P3M
PAD
Padang
Paderi (perang)
PAKEM
Pakistan
Palestina
PAN
Pancasila
Pan-Islamisme
Papua
Parakitri
Paramadina
Paris
Parkindo
parliament watch
Parsons, Talcott
Partai Islam
Partai Katolik
Partai Kristen Demokrat
Paskah (hari)
passing over
patriarkhal
Paul II, John
Paus Benediktus XVI
Paus Johannes Paulus II
Paus Paulus II
PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa)
PDIP
peaceful co-existnce
Pelita (harian)
Pemberontakan para petani di Banten
Pemilu 2009
Pensylvania
Pentakosta
Pepsi Cola
Peradilan Agama
Perang Dingin
Perang Dunia I
Perang Dunia II
Perang Salib
Perda Antimaksiat
Perda Hindu
Perda Injil
Perda Syariah
Perjanjian Baru
Perjanjian Lama
Persatuan Ulama Seluruh Aceh
Persia
Persis
PETA
PGI
phallocentris
Philips, Anne
Phillips
Phytagoras
Piagam Jakarta
Piagam Madinah
PKB
PKI

PKNU
PKS
Plato
Playboy
Plotinus
pluralisme
—agama
—sosial
pluralist indifferent
PMII
PMKRI
PNI
PNS
Polandia
Polanyi, Michael
polisemik
politeisme
political capital
political engagement
political influence
political pluralism
political recognition
political revivalism
political rights
political society
politiconomic
politisasi syariah
Pondok Seblak
Ponte, Carlo
Popper, Karl
positive discrimination
positive immunity
positivisme
posmodernisme
Posporius
pos-sekular
Posten, Jyllan
PPIM
PPKI
PPP
Prancis
predatory capitalism
"preman berjubah"
prior to idea of secularization
privatisasi agama
pro-domo
pro-existence
proses legislasi
proses sosiologis
Protestan
Protestant family value
Protestant Reformed
Protestantisme
PSI
puasa
public deliberation
public justice
public life principles
public reason
public reasoning
public religion
puritanisme
PWI

Q

qâdlî al-qudlât
qânûn
Qasim Amin
Qatar
qath'î
qishâsh
Qiyadah, al-
qiyâs
Qomaruddin Khan
Quraish Shihab
Qurtubi, al-

R

radical mainstream
radical republican
radikalisme
rahmatan li al-'âlamîn
Rahner, Karl
Ramage, Douglas E.
RANHAM National Committe
Rasyid Ridla
Rawls, John
Razi, al-
reformasi (gerakan)
regulasi publik
regulasi restriktif
relatively absolute
relativisme
religionomic
religious adherent
religious decline
religious freedom
religious intimacy
religious pluralism
religious rights
religious sciences
religious secularism
Renaissance
Republika (harian)
revolusi filsafat
Revolusi Islam Iran
Revolusi Prancis
revolusi teknologi
ribâ
Ricouer
Ricouer, Paul
Rieke Dyah Pitaloka
Riffat Hassan
Rizieq Shihab
Rodinson, Maxime
Roma Katolik
Romawi
Roosevelt, Franklin Delano
Rousseau, Jean Jacques
rûh al-syarî'ah
Rusia
Russell, Bertrand
RUU APP
RUU Hak-hak Minoritas
RUU KUB

S

Sabah
Sabi'in
Sabili
Sachedina, Abdulaziz
Sahrastani, al-
Said Aqiel Syiradj
Saiful Mujani
Saksi Yehovah
samḥah
SamHarris
Sandel, Michael
SARA
Sartre
Sassoon, A.S.
Saudi Arabia
Sayyed Hossein Nasr
Sayyid Quthb
SBY-JK (pemerintahan)
Schacht, Joseph
Schillebeeckx
Schleiermacher
scientific community
Scopes, John T.
Scott, James
second class citizens
secular fundamentalism
secularization as differentiation
secularization as privatization
sektarianisme
sekularisasi
sekularisme
sekularisme liberal
Semit (agama)
Sennett, Richard
separation between religion and nation
separatisme
Shabi'in
shalawat badar
Shiffîn (perang)
Sikh
silent majority
Simatupang, T.B.
Singapura
sinkretisme
sintesa eklektis
Siti Jenar (Syekh)
siyâsah
Sjafruddin Prawiranegara
Skandinavia
Sloterdijk, Peter
Smith, Adam
Smith, Huston
social argument
social construction
social contract
social ethicist
social function of religion
social humanities
social responsibility
social sciences
social skill
society-state distinction
sociological pluralism

Socrates
Soeharto
Soekarno (Bung Karno)
soft state
sosialisme
—Arab
Spanyol
specific historical course
spiritual argument
spiritual enlightenment
spiritual sanctions
spiritually religious
Spivak, Gayatri Chakravorty
splitsing theory
STAIN
Star tv
state building
state of mind
state rebuilding
state responsibility
state-like institutions
state-society distinction
Steenbrink, Karl
Stephan
strick syarî'a minded
structure of law
Suara Pembaruan (harian)
substansi ideologi
Sudan
sugih macak kere
suicide
Sumarthana, Th.
Sumatera Barat
Sumatera Thawalib
Sunan Gunung Jati
Sunan Kalijaga
Sunan Kudus
Sunni
supporting ideas
supporting morality
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
Sutan Takdir Alisjahbana
swarga nunut neraka katut
Swedia
Swiss
Swiss, St.Gallen
Syafi'i (mazhab)
Syafi'i, Imam
Syafruddin Prawiranegara
Syah Waliyullah
Syahrir
Syatibi, Imam al-
syaykh al-Islâm
Sydie, RA
Syi'ah
Syria
system of rights
syûrâ, al-

T

Tahtawi, al-
tajdîd
taklid
Talal Asad
talfiq

Taliban
Tangerang
Tao Te Cing
Taoisme
taqlîd jâmid
taqlîd mahdlî
taqlîd manhajî
taqlîd qawlî
Tarbawi
tasawuf
Taurat
Taylor, Charles
Teater Utan Kayu
teisme
Tempo (majalah)
teo-demokrasi
teokrasi
teologi pembebasan
teosentris
Thaha Husain
Thailand
the art of compromise
the art of possible
The Asia Foundation
the best among the worse
The City of God
The Economist
the essence of modernism
the essence of religion
the idea of Holly
the idea of nation-state
the idea of progress
The Jakarta Post
the politics of exclusion
the politics of inclusion
the problem of good life
the problem of justice
The Protestan Ethic
the rise of education
The Roles of Religion
the survival of the fittest
The Third Wave
the ultimate truth
The Wahid Institute
Theo Syafei
theological argument
Theresa (ibu)
Timor Leste
Timor Timur
Timur Tengah
TKW
TNI
Toffler, Alvin
toleran
toleransi
totalitarianisme
trafficking
transnational fundamentalism
transnational Islamic fundamentalism
Trinitas
truth claim
Tunisia
Turki Muda
Turki

U

UAN sentris
UIN
UIN Jakarta
UIN Makassar
UIN Yogyakarta
ulama Dayah
Ulil Abshar-Abdalla
ultimate truth
Umar ibn Abdul Azis
Umar ibn Farid
Umar ibn Khattab
Umayyah
UMI
Ummu Salamah
umûru bi-maqâshidihâ, al-
Uni Soviet
UNICEF
unintended consequence
UNISBA (Universitas Islam Bandung)
UNISMA (Universitas Islam Malang)
Universitas Airlangga
Universitas Alighard
Universitas al-Nizamiyah
Universitas Gajah Mada (UGM)
Universitas Indonesia (UI)
Universitas Islam Indonesia (UII)
Universitas Osaka
Universitas Paramadina
University of Chicago
University of South Carolina
US Government
Usman Roy
Utomo Dananjaya
Utsman ibn Affan
Utsmani (dinasti)
UU Administrasi Kependudukan
UU Anti-Diskriminasi
UU Anti-Pornografi dan Pornoaksi
UU Anti-Trafiking
UU Haji
UU KDRT
UU Kewarganegaraan
UU KKR
UU LSM
UU Partai Politik
UU Peradilan Agama
UU Perbankan Syariah
UU Perbankan
UU Perkawinan
UU Pidana Islam
UU PNPS
UU PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)
UU Wakaf
UU Zakat
UUD
Uzair

V

value free
van der Kroef, J.M.
Vatikan
Vietnam
Voltaire
von Bismarck, Otto
von Hayek

W

Wahhabi
Wahhabisme
Wahid Hasyim
Walby, Sylvia
Walisongo
Walzer, Michael
Waraqah bin Naufal
Washington Consensus
Washington DC
Washliyah, al-
watak primordial
Watson, S.
Watt, James
Watt, Montgomery
Weber, Max
Weedon, Christ
Weigel, George
welfare state
wilâyat al-faqîh
wilâyat al-ḫisbah
Wilders, Geert
Wilson, AM
WTO (World Trade Organization)

Y

Yahudi
Yakobit
Yale Divinity School
Yale University
Yatsrib
Yesus
Yogyakarta
Yordan
Yudi Latif
Yunani
Yusuf al-Najjar
Yusuf Qardlawi

Z

Zaenuddin MZ
Zaid ibn Tsabit
Zainal Abidin
Zakaria, Fareed
zakat
zhannî
zhihâr
zhillullâh fî al-ardl
Ziauddin Sardar
Zionis
Zoroaster

Credit:

Edisi cetak buku ini diterbitkan pertama kali oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat bekerjasama dengan Paramadina Jakarta, Januari 2010. ISBN: 978-602-95860-0-8 (No. jil. lengkap), ISBN: 978-602-95860-1-5 (Jil. 1), dan ISBN: 978-602-95860-2-2 (jil. 2)

Halaman buku pada Edisi Digital ini tidak sama dengan halaman edisi cetak. Untuk merujuk buku edisi digital ini, Anda harus menyebutkan "Edisi Digital" atau menuliskan *link*-nya. Juga disarankan mengunduh dan menyimpan file buku ini dalam bentuk pdf.

DEMOCRACY PROJECT
Yayasan Abad Demokrasi

Yayasan Abad Demokrasi adalah lembaga nirlaba yang berkomitmen untuk pemajuan demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan tradisi keberagamaan yang menghargai nilai-nilai demokrasi, pluralisme, perdamaian, dan penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan.

Lembaga ini berupaya menyebarkan seluas-luasnya ide-ide pencerahan dan demokrasi ke khalayak publik. Juga memfasilitasi publikasi, penelitian, dan inisiatif-inisiatif lain terkait dengan isu yang sama.

Juga berupaya memfasilitasi transfer pengetahuan dan pembelajaran demokrasi dari berbagai belahan dunia. Lembaga ini juga concern terhadap upaya membangun tradisi akademik dan intelektual, sehingga proses demokratisasi Indonesia berjalan dalam fundamen yang kokoh dan visioner.

Lembaga ini juga berencana mengembangkan kader-kader pendukung proses pemajuan demokratisasi di Indonesia.

www.abad-demokrasi.com

